



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

LAPORAN EVALUASI RKPD

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

TAHUN 2025
TRIWULAN - I

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas Rahmat-Nya maka laporan Evaluasi Hasil Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 triwulan I dapat diselesaikan. Evaluasi dilakukan dengan maksud untuk memastikan bahwa target rencana program, lokasi, dan kegiatan prioritas daerah dalam RKPD provinsi dapat dicapai, untuk mewujudkan visi pembangunan jangka menengah daerah provinsi serta untuk mencapai sasaran pembangunan tahunan nasional.

Dalam pelaksanaannya, evaluasi hasil RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 pada triwulan I dilakukan dengan dasar dan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah *jo* Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD. Berdasarkan ketentuan tersebut, evaluasi hasil RKPD dilakukan melalui penilaian hasil pelaksanaan RKPD untuk mengetahui realisasi antara rencana program dan kegiatan prioritas daerah dalam RKPD provinsi, dengan capaian indikator kinerja program, lokasi, dan kegiatan yang dilaksanakan melalui APBD provinsi; dan realisasi penyerapan dana program dan kegiatan yang direncanakan dalam RKPD provinsi dengan laporan realisasi APBD provinsi.

Demikian laporan ini disusun dalam rangka mewujudkan akuntabilitas kinerja serta sebagai salah satu bahan pendukung penyusunan P-RKPD tahun 2025. Ucapan terimakasih patut disampaikan kepada semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan dan penyusunan laporan hasil evaluasi RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025. Kami menyadari bahwa masih terdapat berbagai kekurangan dalam pelaksanaan

dan penyusunan laporan hasil evaluasi RKPD, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun menjadi hal yang sangat kami butuhkan.

SAMARINDA, MEI 2025
KEPALA BAPPEDA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

YUSLIANDO

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Dasar Hukum	7
1.3 Maksud dan Tujuan.....	8
1.4 Metode Evaluasi	8
1.5 Sistematika.....	11
BAB II CAPAIAN MAKRO PEMBANGUNAN DAERAH	13
2.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	15
2.2 Angka Kemiskinan	24
2.3 Angka Pengangguran	35
2.4 Pertumbuhan Ekonomi	42
2.5 Ketimpangan Pendapatan	46
2.6 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita	51
BAB III EVALUASI KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH	57
3.1 Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Berjalan	59
3.2 Realisasi Belanja Daerah Tahun Berjalan	66
3.3 Realisasi Pembiayaan Daerah	73
BAB IV EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD	75
4.1 Capaian Indikator Kinerja Tujuan RKPD Tahun 2025	75
4.2 Capaian Indikator Kinerja Sasaran RKPD Tahun 2025	77
4.3 Capaian Program Prioritas Pembangunan Daerah	84
4.4 Capaian Indikator Kinerja dan Keuangan pada Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan RKPD Tahun 2025	103

4.5	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah..	180
BAB V	FAKTOR PENDORONG DAN PENGHAMBAT	224
5.1	Faktor Pendorong	224
5.2	Penghambat Capaian Kinerja	225
BAB VI	RUMUSAN PERMASALAHAN HASIL EVALUASI	228
6.1	Permasalahan Capaian Tujuan Pembangunan	228
6.2	Permasalahan Capaian Sasaran Pembangunan	229
BAB VII	KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	233
7.1	Kesimpulan.....	233
7.2	Rekomendasi.....	236

DAFTAR TABEL

2.1	Capaian Makro Pembangunan dalam Dokumen RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 Triwulan I	15
3.1	Konsistensi pelaksanaan target RKPD pada keuangan daerah...	57
3.2	Realisasi Pendapatan Daerah Tw-I Tahun 2025	60
3.3	Realisasi Belanja Daerah Tw-I Tahun 2025	66
3.4	Realisasi Pembiayaan Daerah Tw-I Tahun 2025	73
4.1	Capaian Indikator Kinerja Tujuan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 Triwulan I	77
4.2	Capaian Indikator Kinerja Sasaran RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 Triwulan I	83
4.3	Capaian Program Prioritas Tahun 2025 pada Sasaran 1: Meningkatnya Pemerataan Taraf Pendidikan Masyarakat	86
4.4	Capaian Program Prioritas Tahun 2025 pada Sasaran 2: Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	87
4.5	Capaian Program Prioritas Tahun 2025 pada Sasaran 3: Menurunnya Tingkat Pengangguran	88
4.6	Capaian Program Prioritas Tahun 2025 pada Sasaran 4: Meningkatnya Daya Saing Perempuan	89
4.7	Capaian Program Prioritas Tahun 2025 pada Sasaran 5: Terwujudnya Diversifikasi Ekonomi	90
4.8	Capaian Program Prioritas Tahun 2025 pada Sasaran 6: Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat Miskin	94
4.9	Capaian Program Prioritas Tahun 2025 pada Sasaran 7: Meningkatnya Kualitas dan Ketersediaan Infrastruktur untuk Mendukung Perekonomian dan Pemenuhan Infrastruktur Dasar	96
4.10	Capaian Program Prioritas Tahun 2025 pada Sasaran 8: Terjaganya Kualitas Air, Air Laut, Udara, dan Lahan	98

4.11	Capaian Program Prioritas Tahun 2025 pada Sasaran 9: Menurunnya Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Kehutanan dan Penggunaan Lahan	99
4.12	Capaian Program Prioritas Tahun 2025 pada Sasaran 10: Meningkatnya Pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan	101
4.13	Capaian Program Prioritas Tahun 2025 pada Sasaran 11: Terwujudnya Birokrasi yang Profesional, Akuntabel, serta Berorientasi Pelayanan Publik yang Didukung ASN BerAKHLAK	102
4.14	Capaian Indikator Kinerja Utama	181
4.15	Capaian IKK Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	188
4.16	Capaian IKK Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	189
4.17	Capaian IKK Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	191
4.18	Capaian IKK Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	192
4.19	Capaian IKK Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	193
4.20	Capaian IKK Urusan Pemerintahan Bidang Sosial	194
4.21	Capaian IKK Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja	195
4.22	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	197
4.23	Capaian IKK Urusan Pemerintahan Bidang Pangan	198
4.24	Capaian IKK Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	199
4.25	Capaian IKK Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	200
4.26	Capaian IKK Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	201
4.27	Capaian IKK Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	202

4.28	Capaian IKK Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan	203
4.29	Capaian IKK Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika	204
4.30	Capaian IKK Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	205
4.31	Capaian IKK Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal	206
4.32	Capaian IKK Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga	206
4.33	Capaian IKK Urusan Pemerintahan Bidang Statistik	208
4.34	Capaian IKK Urusan Pemerintahan Bidang Persandian	208
4.35	Capaian IKK Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan	209
4.36	Capaian IKK Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan	209
4.37	Capaian IKK Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan	210
4.38	Capaian IKK Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan	211
4.39	Capaian IKK Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata	212
4.40	Capaian IKK Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian	214
4.41	Capaian IKK Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan	215
4.42	Capaian IKK Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	216
4.43	Capaian IKK Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan	216
4.44	Capaian IKK Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian	218
4.45	Capaian IKK Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan dan Keuangan	219
4.46	Capaian IKK Urusan Pemerintahan Bidang Pengadaan	221
4.47	Capaian IKK Urusan Pemerintahan Bidang Kepegawaian	222
4.48	Capaian IKK Urusan Pemerintahan Bidang Transparansi Dan Partisipasi Publik	222

DAFTAR GAMBAR

2.1	Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024	17
2.2	Perkembangan Umur Harapan Hidup (UHH) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024	19
2.3	Perkembangan Harapan lama Sekolah (HLS) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024	20
2.4	Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024	21
2.5	Perkembangan Pengeluaran Per Kapita Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024	22
2.6	Indeks Pembangunan Manusia Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024	23
2.7	Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur Periode Tahun 2020-2024	24
2.8	Perkembangan Angka kemiskinan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024	27
2.9	Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin (ribu jiwa) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024	28
2.10	Perkembangan Garis Kemiskinan (GK) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024	30
2.11	Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024	31
2.12	Perkembangan Indeks Keparahan Kemiskinan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024	32
2.13	Angka kemiskinan Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024	33

2.14	Perkembangan Angka Kemiskinan Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur Periode Tahun 2020-2024	34
2.15	Perkembangan Angka Pengangguran Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2024	37
2.16	Perkembangan Pengangguran TPAK dan TKK Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024	39
2.17	Angka Pengangguran Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023	41
2.18	Perkembangan Angka Pengangguran (TPT) Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur Periode Tahun 2019-2023	42
2.19	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024	44
2.20	Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kalimantan Timur Per Kabupaten/Kota Tahun 2024	45
2.21	Indeks Gini Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024	48
2.22	Indeks Gini perkotaan dan Perdesaan di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024	49
2.23	Indeks Gini Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024	50
2.24	Perkembangan Indeks Gini Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur Periode Tahun 2020-2024	51
2.25	PDRB Per Kapita Kalimantan Timur Tahun 2020-2024	53
2.26	PDRB Per Kapita ADHB Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024	53
2.27	Perkembangan PDRB Per Kapita ADHB Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur Periode Tahun 2020-2024	54
2.28	PDRB Per Kapita ADHK Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024	55

2.29	Perkembangan PDRB Per Kapita ADHK Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur Periode Tahun 2020-2024	56
3.1	Capaian Pendapatan Daerah	65
3.2	Rekapitulasi Pengeluaran Daerah	71
3.3	Perangkat Daerah paling terdampak Efisiensi (pengurangan anggaran)	72
4.1	Kumulatif capaian Program Prioritas	84
4.2	Capaian IKU Kaltim 2025	181
4.3	Capaian IKK Tahun 2025	185

DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran Realisasi Kinerja dan Keuangan Seluruh Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan RKPD Tahun 2025 Triwulan I

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Tahun 2025 menandai dimulainya tahun kedua pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Kalimantan Timur periode 2024-2026. Untuk menjabarkan pelaksanaan tahun kedua RPD tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur kemudian menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 melalui Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 26 Tahun 2024. Sebagai dokumen perencanaan tahunan, RKPD tidak hanya merangkum arah kebijakan pembangunan tahunan, tetapi juga menyajikan potret kondisi aktual daerah, proyeksi dan kerangka ekonomi, serta alokasi keuangan guna mendukung berbagai prioritas pembangunan. Tidak hanya itu, RKPD juga turut memuat arah kebijakan pembangunan untuk dijadikan panduan bagi pemerintah kabupaten/kota, rencana kerja dan pendanaan daerah, maupun kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah pada tahun 2025.

Secara substansi, RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 mengusung tema “Peningkatan Diversifikasi Ekonomi didukung Infrastruktur Wilayah dan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing”. Tema ini mengandung makna bahwa pembangunan Kalimantan Timur di tahun 2025 hendak berfokus pada upaya mengakselerasi diversifikasi ekonomi, baik secara vertikal maupun horizontal guna mendorong pertumbuhan sektor non-pertambangan dan penggalan yang didukung dengan peningkatan kualitas infrastruktur wilayah yang andal, serta sumber daya manusia yang berdaya saing dalam rangka peningkatan inklusifitas pembangunan. Terdapat setidaknya 8 (delapan) hal yang menjadi prioritas pembangunan RKPD Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2025 guna mendukung tema tersebut, yakni:

1. Akselerasi pertumbuhan sektor ekonomi non-migas dan batubara, terutama pada hilirisasi industri.
2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja.

3. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan akses pelayanan kesehatan rumah sakit dan fasyankes lainnya.
4. Pemenuhan infrastruktur wilayah untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pemenuhan layanan dasar.
5. Pemenuhan akses kebutuhan dasar dan perluasan akses sosial ekonomi kepada masyarakat miskin.
6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan.
7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik.
8. Penguatan kapasitas wilayah yang berbatasan dengan IKN.

Kedelapan prioritas pembangunan tersebut kemudian dijabarkan ke dalam 4 (empat) tujuan dan 11 (sebelas) sasaran pembangunan daerah dengan berbagai indikator dan target yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tujuan dan Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Satuan	Target 2025
Tujuan 1: Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	78,60
Sasaran 1: Meningkatnya Pemerataan Taraf Pendidikan Masyarakat	Harapan Lama Sekolah	Tahun	14,12
	Rata-rata lama sekolah	Tahun	10,21
Sasaran 2: Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Usia Harapan Hidup	Tahun	74,89
	Prevalensi Stunting	Persen	19,80
Sasaran 3: Menurunnya Tingkat Pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	4,60 - 5,14
Sasaran 4: Meningkatnya Daya Saing Perempuan	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	67,64
Tujuan 2: Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	Persen	6,28- 6,58
	Tingkat Kemiskinan	Persen	5,05 - 5,67
	Indeks Gini	Indeks	0,310 - 0,321
Sasaran 5: Terwujudnya Diversifikasi Ekonomi	LPE Non Migas dan Batubara	Persen	6,40-7,20
Sasaran 6: Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat Miskin	Indeks Kedalaman Kemiskinan	Indeks	0,740
	Indeks Keparahan Kemiskinan	Indeks	0,120

Tujuan dan Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Satuan	Target 2025
	Tingkat inflasi	Persen	2,5 _± 1
Sasaran 7: Meningkatnya Kualitas dan Ketersediaan Infrastruktur untuk Mendukung Perekonomian dan Pemenuhan Infrastruktur Dasar	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI)	Indeks	8,39
Tujuan 3: Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	80,19
	Persentase Penurunan Emisi dari <i>Business As Usual</i> (BAU)	Persen	27,53
Sasaran 8: Terjaganya Kualitas Air, Air Laut, Udara dan Lahan	Indeks Kualitas Air	Indeks	71,41
	Indeks Kualitas Air Laut	Indeks	81,47
	Indeks Kualitas Udara	Indeks	84,32
	Indeks Kualitas Lahan	Indeks	88,43
Sasaran 9: Menurunnya Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Kehutanan dan Penggunaan Lahan	Persentase Penurunan Emisi GRK Sektor Kehutanan dan Penggunaan Lahan dari <i>Business As Usual</i> (BAU)	Persen	24,40
Sasaran 10: Meningkatnya Pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan	Bauran Energi Baru dan Terbarukan (EBT)	Persen	12,39
Tujuan 4: Mewujudkan Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	B (74,00)
Sasaran 11: Terwujudnya Birokrasi yang Profesional, Akuntabel, serta Berorientasi Pelayanan Publik yang Didukung ASN BerAKHLAK	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	86,30
	Sistem Merit	Poin	275
	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	3,40
	Nilai Akuntabilitas Kinerja	Poin	(A) 80,01
	Tingkat maturitas SPIP	Level	3 Skor 3,726

Lebih lanjut, keempat tujuan dan sebelas sasaran pembangunan daerah tersebut diterjemahkan kedalam 56 program prioritas yang diselenggarakan oleh masing-masing perangkat daerah sesuai dengan kewenangannya.

Sejak ditetapkan pada 30 Juni 2024 dan berlaku efektif pada 1 Januari 2025, RKPD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2025 telah dilaksanakan oleh masing-masing perangkat daerah hingga triwulan I. Terhadap hal tersebut, sebagai bagian dari pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah maka Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur melalui Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah (Bappeda) melaksanakan evaluasi terhadap hasil pelaksanaannya. Evaluasi terhadap hasil RKPD yang dilaksanakan oleh Bappeda merupakan pelaksanaan atas amanat Pasal 275 huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah *juntis* Pasal 180, Pasal 183 huruf c, Pasal 248 dan Pasal 257 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD.

Menurut Pasal 261 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, evaluasi terhadap hasil RKPD sebagaimana dimaksud mencakup sasaran dan prioritas pembangunan daerah serta rencana program dan kegiatan prioritas daerah. Evaluasi dilakukan melalui penilaian hasil RKPD untuk mengetahui realisasi antara rencana program dan kegiatan prioritas daerah dalam RKPD provinsi, dengan capaian indikator kinerja program, lokasi, dan kegiatan yang dilaksanakan melalui APBD provinsi; dan realisasi penyerapan dana program dan kegiatan yang direncanakan dalam RKPD provinsi dengan laporan realisasi APBD provinsi. Evaluasi sebagaimana dimaksud juga dilakukan untuk memastikan bahwa target rencana program, lokasi, dan kegiatan prioritas daerah dalam RKPD provinsi dapat dicapai, untuk mewujudkan visi pembangunan jangka menengah daerah provinsi dan mencapai sasaran pembangunan tahunan nasional. Lebih lanjut, pada level teknis evaluasi terhadap hasil RKPD dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD.

Yang menarik dari evaluasi hasil RKPD Tahun 2025 kali ini adalah hadirnya kebijakan efisiensi belanja pada pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. Kebijakan tersebut didasarkan pada Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 yang kemudian ditindaklanjuti oleh Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/833/SJ tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja dalam APBD Tahun

Anggaran 2025. Didalamnya memuat beberapa kebijakan penting, diantaranya Pemerintah Daerah diminta untuk melakukan efisiensi belanja APBD Tahun Anggaran 2025 dengan langkah berikut:

1. membatasi belanja kegiatan yang bersifat seremonial, kajian, studi banding, percetakan, publikasi, dan seminar/focus group discussion;
2. mengurangi belanja perjalanan dinas sebesar 50% (lima puluh persen) untuk seluruh perangkat daerah;
3. membatasi belanja honorarium melalui pembatasan jumlah tim dan besaran honorarium dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai standar harga satuan regional;
4. mengurangi belanja yang bersifat pendukung dan tidak memiliki output yang terukur;
5. memfokuskan alokasi anggaran belanja pada target kinerja pelayanan publik serta tidak dilakukan berdasarkan pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran pada tahun anggaran sebelumnya;
6. lebih selektif dalam memberikan hibah langsung baik dalam bentuk uang, barang, maupun jasa kepada Kementerian/Lembaga; dan
7. melakukan penyesuaian belanja APBD Tahun Anggaran 2025 yang bersumber dari Transfer ke Daerah (TKD).

Hasil efisiensi sebagaimana dimaksud dialihkan untuk digunakan pada:

1. bidang pendidikan;
2. bidang kesehatan;
3. infrastruktur dan sanitasi;
4. optimalisasi penanganan pengendalian inflasi;
5. stabilitas harga makanan dan minuman;
6. penyediaan cadangan pangan; dan
7. prioritas lainnya yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, penciptaan lapangan pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi.

Pada satu sisi, kebijakan efisiensi dalam jangka waktu panjang tentu dipercaya dapat membawa berbagai dampak positif. Diantaranya *pertama*, meningkatkan kualitas belanja publik karena penggunaan anggaran dapat

diarahkan secara lebih tepat guna dan tepat sasaran. *Kedua*, efisiensi belanja menuntut perencanaan dan pelaporan yang lebih terukur, sehingga mendorong tata kelola keuangan daerah yang lebih akuntabel dan transparan. *Ketiga*, penyesuaian belanja yang lebih selektif dapat membantu pemerintah daerah dalam menjaga keseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran sehingga mengurangi potensi defisit dan meningkatkan kemandirian fiskal. *Keempat*, dengan mengurangi belanja yang tidak produktif sebagaimana diatur dalam surat edaran *a quo*, pemerintah daerah dapat memberi ruang fiskal yang lebih besar untuk merespon kebutuhan mendesak atau program prioritas daerah maupun nasional.

Pada sisi yang lain, oleh karena kebijakan efisiensi secara efektif mulai diberlakukan pada tahun berjalan RKPD Tahun 2025, hal ini dalam jangka pendek justru membawa pengaruh yang cukup signifikan terhadap capaian kinerja program maupun capaian kinerja keuangan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 setidaknya hingga triwulan I. Beberapa hal yang terdapat diantaranya *pertama*, penyesuaian dan pembatasan belanja yang dilakukan secara tiba-tiba pada awal tahun anggaran menyebabkan keterlambatan dalam proses pengadaan, pelaksanaan kegiatan dan realisasi program prioritas yang telah direncanakan dalam RKPD. Hal ini pada akhirnya menurunkan capaian indikator program pada triwulan I. *Kedua*, efisiensi acapkali diikuti oleh pengetatan mekanisme pencairan dana atau bahkan penundaan kegiatan non-prioritas. Hal ini pada akhirnya mengganggu arus kas, memperlambat penyerapan anggaran, serta potensial menimbulkan akumulasi kegiatan pada triwulan berikutnya. *Ketiga*, meski hal ini tidak sepatutnya terjadi tetapi pembatasan terhadap belanja operasional, honorarium, dan perjalanan dinas secara potensial dapat berdampak pada motivasi kerja aparatur pemerintah daerah apabila tidak di mitigasi dan dikomunikasikan dengan baik. Hal tersebut pada akhirnya potensial mempengaruhi produktivitas dan kualitas layanan pemerintahan.

Berbagai dampak tersebut tergambar dalam evaluasi hasil pelaksanaan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 triwulan I yang lebih lanjut disajikan dalam “Laporan Evaluasi Hasil Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 Triwulan I”.

1.2. Landasan Hukum dan Kebijakan

Pelaksanaan evaluasi terhadap hasil RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 pada triwulan I didasarkan pada berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN).
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
4. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025.
5. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 12 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
6. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 16 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026.
7. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 26 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025.
8. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

9. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900/833/SJ tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah Dalam Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

1.3. Maksud dan Tujuan

Evaluasi terhadap hasil RKPD Tahun 2025 pada triwulan I dimaksudkan untuk memastikan bahwa target rencana program, lokasi, dan kegiatan prioritas daerah dalam RKPD Provinsi dapat dicapai, untuk mewujudkan visi pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Timur dan mencapai sasaran pembangunan tahunan nasional. Sedangkan tujuan dilakukannya evaluasi terhadap hasil RKPD Tahun 2025 pada triwulan I adalah untuk:

1. Mengetahui realisasi antara rencana program dan kegiatan prioritas daerah dalam RKPD Provinsi Kalimantan Timur dengan capaian indikator kinerja program, lokasi dan kegiatan yang dilaksanakan melalui APBD Provinsi Kalimantan Timur pada semester I.
2. Mengetahui realisasi penyerapan dana program dan kegiatan yang direncanakan dalam RKPD Provinsi Kalimantan Timur dengan realisasi APBD Provinsi Kalimantan Timur pada semester I.
3. Mengetahui berbagai faktor pendorong dan penghambat serta permasalahan capaian target kinerja tujuan, sasaran dan program prioritas pembangunan daerah pada dokumen RKPD pada semester I.
4. Merumuskan rekomendasi dan rencana tindak lanjut pelaksanaan RKPD semester berikutnya.

1.4. Metode Evaluasi

Evaluasi terhadap hasil pelaksanaan RKPD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2025 pada triwulan I dilakukan dengan menggunakan 2 (dua pendekatan) yakni pendekatan kuantitatif dan pendekatan kualitatif. Secara rinci, aplikasi terhadap kedua pendekatan tersebut dijabarkan sebagai berikut:

Pertama, pendekatan perhitungan kuantitatif dilakukan untuk mengetahui tingkat pertumbuhan dan capaian kinerja pelaksanaan RKPD.

Terhadap pertumbuhan/penurunan capaian pembangunan, digunakan formula sebagai berikut:

$$Pertumbuhan(\%) = \left(\frac{Capaian\ Indikator_t - Capaian\ Indikator_{t-1}}{Capaian\ Indikator_{t-1}} \right) \times 100$$

Terhadap capaian kinerja (CK) dikelompokan menjadi dua perhitungan berbasis data yang digunakan, namun dengan pengelompokan rumus yang sama. Yaitu jika angka persentase semakin tinggi menunjukkan pencapaian kinerja dan kondisi semakin baik (positif), maka digunakan formula sebagai berikut:

$$CK_{positif}(\%) = \left(\frac{Capaian - Realisasi}{Target} \right) \times 100$$

Berdasarkan formula diatas, akan diketahui bahwa semakin tinggi persentase capaian kinerja, maka menunjukkan pencapaian kinerja dan kondisi yang semakin baik (positif).

Sementara terhadap capaian kinerja (CK) dengan angka persentase semakin tinggi menunjukkan pencapaian kinerja dan kondisi yang semakin buruk (negatif), maka digunakan formula sebagai berikut:

$$CK_{negatif}(\%) = \left(\frac{Target - (Realisasi - Target)}{Target} \right) \times 100$$

Berdasarkan formula diatas, akan diketahui bahwa semakin tinggi persentase, maka menunjukkan pencapaian kinerja dan kondisi yang semakin buruk (negatif).

Hasil penilaian realisasi kinerja dan realisasi keuangan pemerintah daerah dapat diklasifikasikan dalam kriteria penilaian dengan mengadopsi skala nilai peringkat kinerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 berikut:

No	Kriteria	Deskripsi	Warna
1	Tercapai/Melampaui	<p>1. Presentase capaian kinerja RKPD triwulan I Tahun 2025 dibandingkan dengan target akhir RKPD Tahun 2025 lebih dari atau sama dengan 100%; dan</p> <p>2. Presentase capaian kinerja RKPD Tahun 2024 dibandingkan dengan target akhir RKPD Tahun 2025 lebih dari atau sama dengan 100%</p>	
2	Akan Tercapai	<p>1. Presentase capaian kinerja RKPD triwulan I Tahun 2025 dibandingkan dengan target akhir RKPD Tahun 2025 25% sampai dengan 99,99%; dan</p> <p>2. Presentase capaian kinerja RKPD Tahun 2024 dibandingkan dengan target akhir RKPD Tahun 2025 25% sampai dengan 99,99%.</p>	
3	Perlu Upaya Keras	<p>1. Presentase capaian kinerja RKPD triwulan I Tahun 2025 dibandingkan dengan target akhir RKPD Tahun 2025 kurang dari 25%; dan</p> <p>2. Presentase capaian kinerja RKPD Tahun 2024 dibandingkan dengan target akhir RKPD Tahun 2025 kurang dari 25%</p>	

Kedua, pendekatan kualitatif dilakukan untuk mengetahui berbagai faktor pendorong dan penghambat serta permasalahan pelaksanaan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 hingga triwulan I. Untuk mengetahui berbagai faktor pendorong dan penghambat serta permasalahan tersebut, dilakukan analisis melalui terhadap data-data sekunder yang relevan untuk menggambarkan capaian program dan capaian keuangan secara kuantitatif.

1.5. Sistematika Penyajian Laporan Evaluasi

Evaluasi hasil RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 semester I disajikan dalam sebuah dokumen laporan Evaluasi hasil RKPD dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Bab I laporan memuat uraian terkait dengan beberapa hal yang melatarbelakangi dilakukannya evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 pada triwulan I; landasan hukum dan kebijakan yang dijadikan acuan; maksud dan tujuan dilakukannya evaluasi; serta metodologi yang mendukung dilakukannya evaluasi.

BAB II : Capaian Makro Pembangunan Daerah

Bab II laporan memuat gambaran perkembangan realisasi kinerja indikator makro pembangunan yang terdiri atas: Laju Pertumbuhan Ekonomi; PDRB per Kapita; Indeks Pembangunan Manusia/Indeks Modal Manusia; Angka Kemiskinan; Indeks Gini; dan Tingkat Pengangguran Terbuka.

BAB III : Evaluasi Kebijakan Keuangan Daerah

Bab III laporan memuat gambaran realisasi keuangan daerah periode tahun berjalan (penjelasan target dan realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang tercantum pada RKPD dan APBD) serta analisis faktor penyebab rendah atau tingginya realisasi hingga triwulan I tahun berjalan.

BAB IV : Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD

Bab IV memuat hasil evaluasi pencapaian tujuan, sasaran, program prioritas, indikator kinerja dan keuangan seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan, serta pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

BAB V : Faktor Pendorong dan Penghambat

Bab V laporan memuat uraian terkait dengan faktor pendorong dan penghambat capaian RKPD Tahun 2025 hingga triwulan I.

BAB VI : Rumusan Permasalahan Hasil Evaluasi

Bab VI laporan memuat rumusan permasalahan berdasarkan hasil evaluasi pencapaian kinerja tujuan, sasaran pembangunan daerah.

BAB VII : Kesimpulan dan Rekomendasi

Bab VII laporan memuat uraian terkait dengan kesimpulan dari hasil evaluasi capaian RKPD Tahun 2025 pada triwulan I dan juga memuat rekomendasi yang akan ditindaklanjuti dalam pelaksanaan RKPD pada triwulan berikutnya.

BAB II

CAPAIAN MAKRO PEMBANGUNAN DAERAH

Evaluasi keberhasilan pembangunan suatu wilayah dapat dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai indikator makro yang meliputi dimensi ekonomi, sosial, dan demografis dalam rangka mendukung pencapaian pembangunan berkelanjutan. Secara normatif, penilaian capaian pembangunan makro di wilayah Provinsi Kalimantan Timur merujuk pada dua instrumen hukum, yakni Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 perihal Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Evaluasi tersebut mempertimbangkan sejumlah indikator kunci meliputi Indeks Pembangunan Manusia (IPM), angka kemiskinan, tingkat pengangguran, pertumbuhan ekonomi, dan ketimpangan pendapatan. Namun demikian, pendapatan per kapita tidak dimasukkan sebagai salah satu indikator evaluasi pembangunan di Provinsi Kalimantan Timur karena keterbatasan data. Sebagai alternatif, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita digunakan untuk memberikan gambaran mengenai tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat secara agregat serta untuk menilai kapasitas ekonomi daerah dalam mendukung pembangunan.

Dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita tidak tercantum sebagai bagian dari indikator kinerja dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan. Kendati demikian, analisis terhadap perkembangan PDRB per kapita dalam kurun waktu lima tahun terakhir tetap dilakukan untuk memberikan perspektif secara menyeluruh terkait perkembangan pembangunan Kalimantan Timur.

Kinerja makro pembangunan di Provinsi Kalimantan Timur pada Semester I Tahun 2025 menunjukkan perkembangan yang positif. Capaian tersebut tercermin dari satu indikator yang telah memenuhi target dan empat indikator lainnya yang diproyeksikan akan tercapai pada akhir periode pelaksanaan RKPD tahun 2025. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Tahun

2025 menunjukkan realisasi sebesar 78,79 dengan capaian sebesar 100,24% dari target RKPD yang ditetapkan, yaitu sebesar 78,60, sehingga indikator ini dikategorikan tercapai. Sementara itu, indikator tingkat kemiskinan juga menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. Target kemiskinan pada tahun 2025 berada pada kisaran 5,05% hingga 5,67%, dan pada Semester I telah terealisasi sebesar 5,78%, dengan capaian sebesar 85,54%, sehingga dikategorikan sebagai indikator yang diproyeksikan akan tercapai.




Tingkat pengangguran pada tahun 2025 semester 1 tercatat sebesar 5,14%, atau sebesar 88,26% dari target yang ditetapkan dalam kisaran 4,60% hingga 5,14%, yang juga masuk dalam kategori akan tercapai. Indikator pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Timur menunjukkan realisasi sebesar 6,17% pada Semester I Tahun 2025, yang mencerminkan capaian sebesar 93,77% dari target yang direncanakan, yaitu antara 6,28% hingga 6,58%, sehingga juga dikategorikan sebagai indikator yang diproyeksikan akan tercapai. Adapun ketimpangan pendapatan yang diukur melalui Indeks Gini tercatat sebesar 0,321, atau tercapai sebesar 96,45% dari target yang ditetapkan dalam kisaran 0,310 hingga 0,321. Capaian kinerja indikator ketimpangan pendapatan masuk dalam kategori akan tercapai.

Berdasarkan hasil evaluasi Semester I Tahun 2025, Provinsi Kalimantan Timur menunjukkan kecenderungan yang positif dalam upaya pencapaian target pembangunan makro. Dari lima indikator utama yang dievaluasi, satu indikator telah mencapai target yang ditetapkan, sedangkan empat indikator lainnya berada pada proyeksi pencapaian hingga akhir tahun. Kondisi ini mencerminkan bahwa kebijakan pembangunan yang diimplementasikan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah berjalan secara efektif dalam mendukung tercapainya sasaran pembangunan berkelanjutan di Kalimantan Timur.

Tabel 2.1. Capaian Makro Pembangunan dalam Dokumen RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 Triwulan I

No	Indikator Kinerja Makro	Target Indikator RKPD (2025)	Realisasi Indikator RKPD (2025)	Capaian 2025 Triwulan I (%)
1	Indeks Pembangunan Manusia (indeks)	78,60	78,79	100,24
2	Angka Kemiskinan (%)	5,05 - 5,67	5,78	85,54
3	Angka Pengangguran (%)	4,60 - 5,14	5,14	88,26
4	Pertumbuhan Ekonomi (%)	6,28- 6,58	6,17	93,77
5	Ketimpangan Pendapatan (indeks)	0,310 - 0,321	0,321	96,45

Ket:

	Tercapai
	Akan Tercapai
	Butuh Upaya Keras

2.1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

2.1.1. Perkembangan IPM Provinsi Kalimantan Timur

United Nations Development Programme (UNDP) mendefinisikan pembangunan manusia sebagai suatu pendekatan yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat untuk memperluas pilihan hidup setiap individu. Konsep ini bertumpu pada tiga pilar fundamental, yaitu: 1) jaminan terhadap kehidupan yang sehat dan berumur panjang; 2) aksesibilitas terhadap pendidikan berkualitas; dan 3) ketersediaan sumber daya yang memadai untuk menopang standar hidup yang layak. Ketiga komponen ini bersifat interdependen, di mana ketiadaan salah satu unsur dapat membatasi realisasi unsur-unsur lainnya. Paradigma pembangunan manusia menegaskan prinsip kebebasan dalam tiga ranah utama, meliputi politik, ekonomi, dan sosial. Kebebasan ini memungkinkan setiap individu untuk mengaktualisasikan potensi kreativitas dan produktivitasnya, sekaligus menjunjung tinggi martabat manusia dan hak-hak dasarnya. Konsep ini muncul sebagai kritik terhadap model pembangunan konvensional yang terlalu terfokus pada pertumbuhan pendapatan nasional, sementara mengabaikan aspek-aspek krusial seperti kesehatan dan pendidikan sebagai determinan kesejahteraan manusia.

Sebagai suatu alat ukur multidimensi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dirancang untuk mengevaluasi kemajuan pembangunan manusia

suatu wilayah berdasarkan tiga komponen yaitu: 1) derajat kesehatan; 2) tingkat pendidikan; dan 3) kapasitas ekonomi. Indikator ini tidak sekadar mencerminkan aksesibilitas masyarakat terhadap layanan kesehatan dasar, pendidikan berkualitas, dan pendapatan yang memadai, melainkan juga menjadi barometer sejauh mana hasil pembangunan berdampak langsung pada peningkatan kualitas hidup penduduk.

Perkembangan nilai IPM dapat dijadikan sebagai dasar analisis untuk mengkaji keberhasilan implementasi berbagai strategi pembangunan di berbagai tingkatan pemerintahan daerah. Secara fungsional, IPM memiliki peran strategis sebagai alat pemeringkatan kesejahteraan antar daerah, dan tolok ukur akuntabilitas kinerja pemerintah daerah. Dalam kerangka kebijakan desentralisasi fiskal, IPM menjadi salah satu basis kuantitatif dalam formulasi alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) yang dapat mencerminkan prinsip meritokrasi dalam pembagian sumber daya pembangunan nasional.

Secara keseluruhan, pembangunan manusia di Provinsi Kalimantan Timur menunjukkan perkembangan yang positif selama periode tahun 2020 hingga 2024. IPM yang sebelumnya berada pada angka 76,24 pada tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 2,55 poin atau sebesar 3,34%, dengan capaian sebesar 78,79 pada tahun 2024. Pencapaian ini menempatkan Provinsi Kalimantan Timur berada dalam kategori "tinggi". Dibandingkan dengan rata-rata nasional (75,02), nilai IPM Kalimantan Timur tercatat lebih tinggi dan menduduki peringkat keempat tertinggi secara nasional pada tahun 2024, setelah DKI Jakarta (84,15), Daerah Istimewa Yogyakarta (81,62), dan Kepulauan Riau (79,89). Pencapaian Provinsi Kalimantan Timur didorong oleh pertumbuhan di sektor kesehatan, pendidikan, dan perekonomian, yang secara fundamental ditopang oleh potensi kekayaan sumber daya alam, terutama minyak dan gas bumi serta batu bara. Selain itu, pencapaian IPM ini mencerminkan bahwa masyarakat Kalimantan Timur telah memperoleh akses yang relatif baik terhadap layanan pendidikan dan kesehatan, serta menunjukkan tingkat pengeluaran per kapita yang mencukupi sebagai indikator kesejahteraan.

Namun demikian, apabila dilihat dari laju pertumbuhan dalam lima tahun terakhir, peningkatan IPM Kalimantan Timur yang mencapai 3,34% masih berada di bawah rata-rata pertumbuhan nasional yang tercatat sebesar 4,28%. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun capaian IPM Kalimantan Timur berada pada level yang tinggi, percepatan peningkatannya belum secepat yang dialami oleh sebagian besar provinsi lain di Indonesia. Hal tersebut menggambarkan masih adanya tantangan struktural yang harus dihadapi, seperti ketimpangan pembangunan antar wilayah, adanya ketergantungan terhadap sektor ekstraktif yang kurang mendukung inklusivitas dan adanya kesehatan masyarakat, terutama prevalensi stunting yang belum sepenuhnya teratasi.

Strategi pembangunan manusia yang berorientasi pada inklusivitas dan keberlanjutan masih diperlukan, termasuk upaya pemerataan pembangunan infrastruktur di daerah tertinggal, peningkatan investasi pada sektor pendidikan dan kesehatan, serta pengembangan ekonomi yang lebih beragam melalui hilirisasi sumber daya alam dan optimalisasi peran Ibu Kota Nusantara (IKN). Strategi tersebut ditujukan untuk mengejar ketertinggalan serta mendorong Kalimantan Timur menuju status pembangunan manusia "sangat tinggi", sekaligus memastikan bahwa hasil pembangunan dapat dirasakan secara adil dan merata oleh seluruh lapisan masyarakat di wilayah Kalimantan Timur.

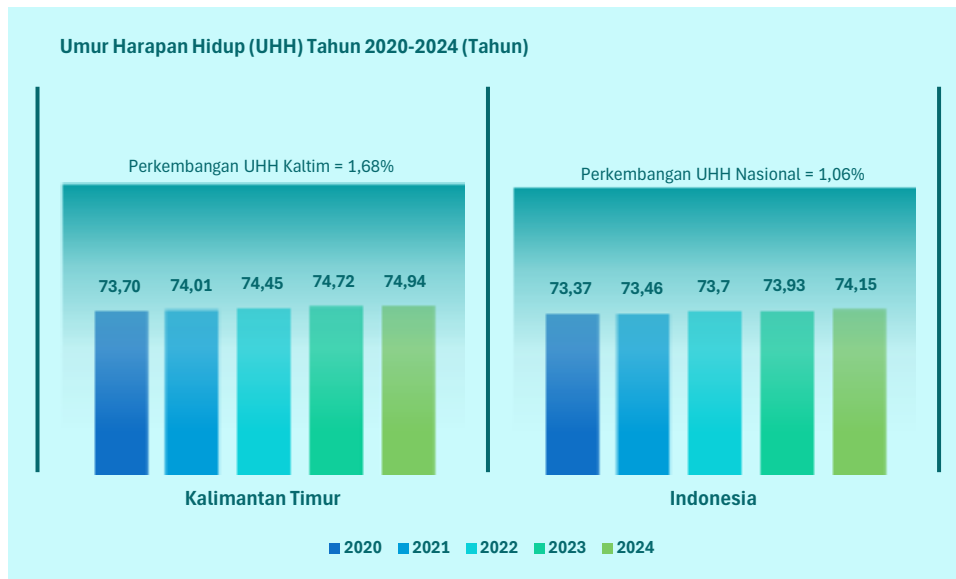


Gambar 2.1. Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024

Selama periode 2020–2024, IPM Provinsi Kalimantan Timur secara konsisten mengalami peningkatan di berbagai dimensi. Pada dimensi kesehatan, pencapaian Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH) menunjukkan adanya perbaikan kualitas layanan kesehatan dan perluasan aksesibilitas masyarakat terhadap fasilitas medis. Pada dimensi pendidikan, kemajuan tercermin dari peningkatan indikator Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) yang menggambarkan pemerataan kesempatan pendidikan dan peningkatan angka partisipasi sekolah. Sementara itu, dari dimensi ekonomi, pertumbuhan pengeluaran per kapita yang stabil merepresentasikan peningkatan kapasitas daya beli masyarakat dan perbaikan standar hidup secara signifikan.

UHH di Provinsi Kalimantan Timur menunjukkan tren peningkatan yang stabil sebesar 1,68% selama periode 2020–2024, yakni dari 73,70 tahun menjadi 74,94 tahun. Capaian ini menempatkan Kalimantan Timur berada di peringkat kedua secara nasional setelah Daerah Istimewa Yogyakarta, dan berada di atas rata-rata nasional yang tercatat sebesar 74,15 tahun. Capaian ini menggambarkan adanya perbaikan dalam kualitas layanan kesehatan, perubahan perilaku menuju gaya hidup sehat, dan keberhasilan implementasi program pemerintah baik pusat maupun daerah, termasuk adanya pengembangan infrastruktur kesehatan. Lebih lanjut, pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pendapatan masyarakat turut berkontribusi terhadap aksesibilitas yang lebih baik terhadap layanan medis.

Namun, beberapa tantangan masih perlu diatasi oleh pemerintah daerah, diantaranya masih adanya ketimpangan akses layanan kesehatan antar wilayah dan keterbatasan tenaga medis di daerah terpencil. Masih tergantungnya daerah terhadap sektor ekstraktif juga menimbulkan persoalan lingkungan yang relatif berdampak negatif terhadap kesehatan masyarakat. Strategi pembangunan yang menitikberatkan pada pemerataan layanan kesehatan, peningkatan literasi kesehatan, dan transformasi ekonomi berkelanjutan tetap menjadi kebutuhan penting untuk menjamin peningkatan UHH yang inklusif dan berkualitas di Kalimantan Timur.



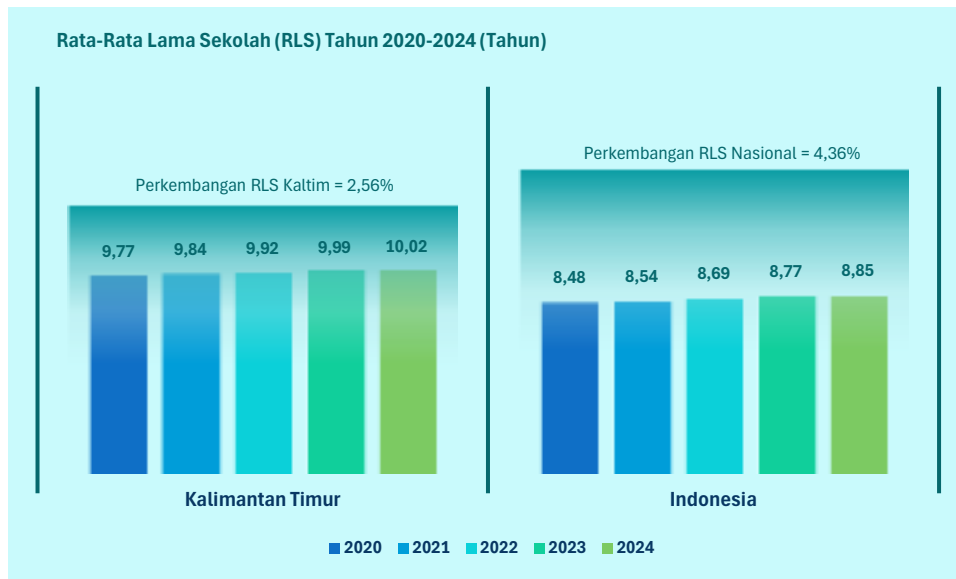
Gambar 2.2. Perkembangan Umur Harapan Hidup (UHH) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024

Pada periode 2020–2024, HLS di Kalimantan Timur mengalami peningkatan sebesar 2,26%, dari 13,72 tahun menjadi 14,03 tahun. Capaian ini melebihi rata-rata nasional (13,21 tahun) dan menempatkan Kalimantan Timur pada peringkat keempat secara nasional, setelah Daerah Istimewa Yogyakarta (15,70 tahun), Aceh (14,39 tahun), dan Sumatera Barat (14,30 tahun). Peningkatan HLS tersebut menggambarkan adanya perbaikan dalam akses pendidikan dan kualitas layanan pendidikan. Faktor pendorong utama diantaranya adanya kebijakan afirmatif daerah, peningkatan alokasi anggaran pendidikan, program beasiswa, dan perbaikan infrastruktur pendidikan. Namun, masih terdapat tantangan yang dihadapi, seperti adanya ketimpangan akses pendidikan antar wilayah, kekurangan tenaga pendidik yang berkualitas, dan rendahnya tingkat partisipasi pendidikan di daerah terpencil. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kebijakan pemerataan serta peningkatan kapasitas pendidikan secara berkelanjutan.



Gambar 2.3. Perkembangan Harapan lama Sekolah (HLS) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024

Selama periode 2020–2024, RLS di Kalimantan Timur mengalami peningkatan sebesar 2,56%, dari 9,77 tahun pada 2020 menjadi 10,02 tahun pada 2024. Pencapaian ini mencerminkan adanya kemajuan yang signifikan dalam sektor pendidikan, terutama dukungan dari kebijakan pemerintah daerah dalam memperkuat akses pendidikan dan pengembangan infrastruktur sekolah, termasuk implementasi program pendidikan inklusif di berbagai daerah. Capaian ini menempatkan nilai RLS Kalimantan Timur di posisi keempat secara nasional, setelah DKI Jakarta (11,49 tahun), Kepulauan Riau (10,50 tahun), dan Maluku (10,26 tahun). Selain itu nilai RLS Kalimantan Timur melampaui rata-rata nasional yang tercatat sebesar 8,85 tahun. Meskipun demikian, laju pertumbuhan RLS Kalimantan Timur dalam lima tahun terakhir masih lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata nasional yang mencapai 4,36%. Beberapa tantangan dalam perkembangan RLS di Kalimantan Timur, antara lain masih adanya ketimpangan akses pendidikan antar wilayah, dan masih terbatasnya jumlah dan kualitas tenaga pendidik, khususnya daerah terpencil.



Gambar 2.4. Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024

Dalam periode tahun 2020–2024, Kalimantan Timur mencatat peningkatan pengeluaran per kapita yang cukup signifikan, yakni sebesar 17,61%. Nilai tersebut meningkat dari Rp11.728.000 per orang per tahun pada tahun 2020 menjadi Rp13.793.000 pada tahun 2024. Capaian ini tidak hanya mencerminkan penguatan daya beli masyarakat, tetapi juga menempatkan Kalimantan Timur sebagai provinsi dengan pengeluaran per kapita tertinggi kelima secara nasional, setelah DKI Jakarta (Rp19.953.000), Kepulauan Riau (Rp15.573.000), DI Yogyakarta (Rp15.361.000), dan Bali (Rp14.920.000), serta melampaui rata-rata nasional yang tercatat sebesar Rp12.341.000 per orang per tahun. Selain itu, tingkat pertumbuhan pengeluaran per kapita Kalimantan Timur masih berada di atas rata-rata nasional yang hanya sebesar 12,06%. Pencapaian ini menggambarkan adanya indikator yang positif atas pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur yang relatif stabil dan berkelanjutan selama periode tersebut. Beberapa faktor utama yang berkontribusi terhadap tren ini antara lain meningkatnya pendapatan rumah tangga dan menguatnya konsumsi domestik pasca pandemi. Di samping itu, implementasi kebijakan fiskal daerah yang efisien dan percepatan pembangunan infrastruktur strategis turut memperkuat konektivitas wilayah dan mendorong peningkatan aktivitas ekonomi lokal. Lebih lanjut, capaian Kalimantan Timur yang melampaui rata-rata nasional

menunjukkan bahwa arah kebijakan pembangunan ekonomi daerah mulai menunjukkan dampak positif terhadap kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.

Namun, capaian pengeluaran per kapita Kalimantan Timur masih dihadapkan pada tantangan struktural yang dapat menghambat keberlanjutan pertumbuhan ekonomi inklusif. Ketergantungan yang tinggi terhadap sektor ekonomi berbasis ekstraksi sumber daya alam menjadikan perekonomian daerah rentan terhadap volatilitas harga komoditas global. Tantangan lainnya adalah fluktuasi inflasi regional yang berdampak pada kestabilan harga kebutuhan pokok, serta masih lemahnya jangkauan perlindungan sosial terhadap kelompok rentan.



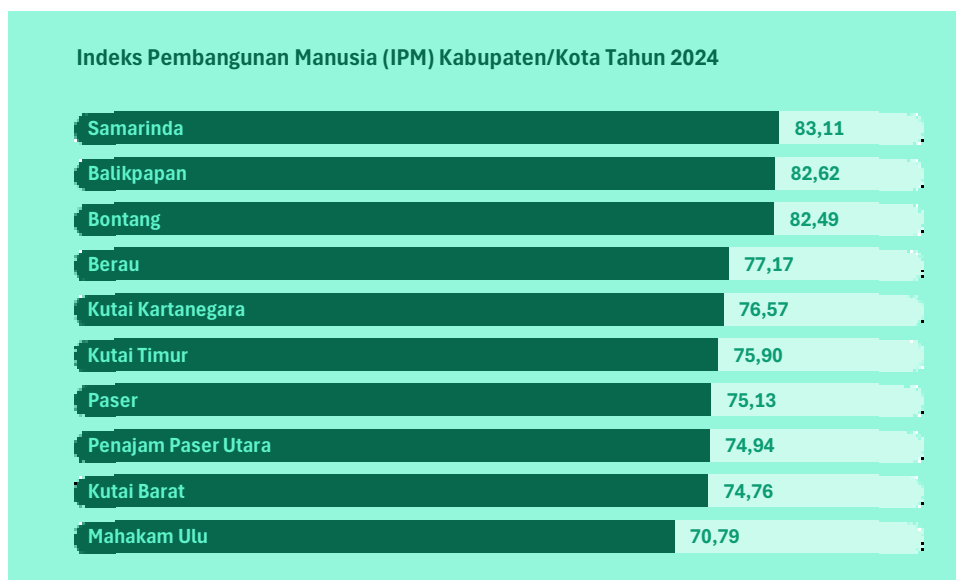
Gambar 2.5. Perkembangan Pengeluaran Per Kapita Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024

2.1.2. Perkembangan IPM di Kabupaten/Kota

Pada tahun 2024, capaian pembangunan manusia di Provinsi Kalimantan Timur memperlihatkan disparitas yang cukup nyata antar kabupaten/kota. Tiga wilayah kota, yakni Samarinda (83,11), Balikpapan (82,62), dan Bontang (82,49) tercatat dalam kategori "sangat tinggi" pada IPM. Capaian ini mencerminkan tiga daerah tersebut memiliki kualitas hidup masyarakat yang lebih baik, dan akses yang relatif lebih mudah terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur publik. Di

sisi lain, tujuh kabupaten lainnya masih berada dalam kategori "tinggi", yang menunjukkan bahwa penguatan pembangunan manusia di daerah tersebut masih diperlukan guna mencapai standar yang lebih optimal.

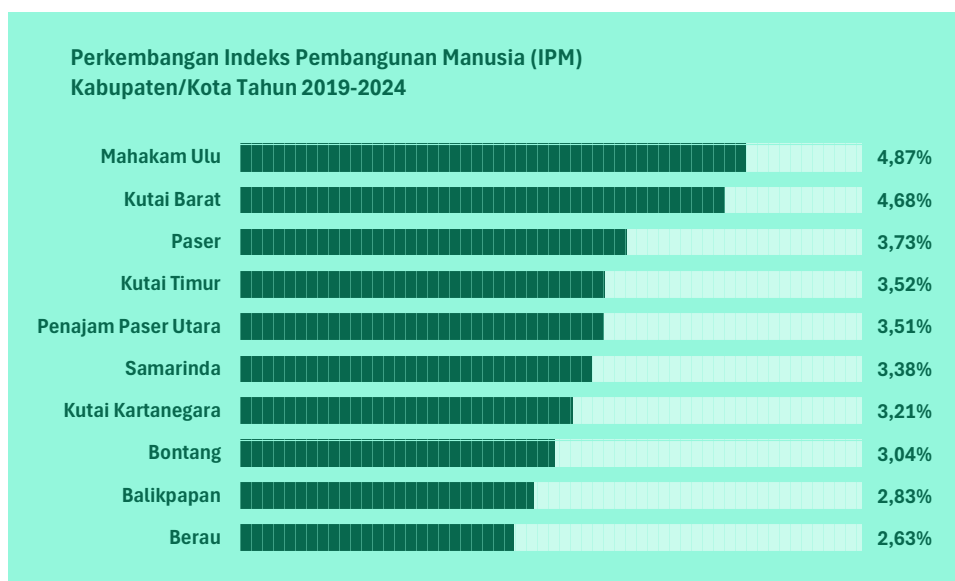
Sementara itu, tiga kabupaten di Kalimantan Timur, yaitu Penajam Paser Utara (74,94), Kutai Barat (74,76), dan Mahakam Ulu (70,79) masih mencatatkan skor IPM di bawah rata-rata nasional yang sebesar 75,02. Kondisi ini menggambarkan adanya kesenjangan di tiga daerah tersebut dalam pencapaian dimensi pembangunan manusia, terutama pada aspek pendidikan, derajat kesehatan, dan pendapatan per kapita. Intervensi kebijakan yang lebih terarah dan intensif masih diperlukan guna mendorong percepatan pembangunan manusia di daerah-daerah tersebut, agar tidak tertinggal dari daerah lain yang telah mencapai capaian yang lebih maju.



Gambar 2.6. Indeks Pembangunan Manusia Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024

Selama periode tahun 2020-2024, seluruh kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur menunjukkan tren peningkatan yang positif dalam IPM. Meskipun pada tahun 2024 Kabupaten Mahakam Ulu, Penajam Paser Utara, dan Kutai Barat masih berada di bawah rata-rata nasional dalam hal capaian IPM, ketiga daerah tersebut justru menorehkan pertumbuhan yang paling mencolok selama lima tahun terakhir. Kondisi ini menggambarkan adanya

kemajuan yang berarti dalam dimensi pendidikan, derajat kesehatan, dan kesejahteraan ekonomi penduduk di daerah tersebut. Kabupaten Mahakam Ulu tercatat sebagai daerah dengan peningkatan IPM tertinggi di Kalimantan Timur, yaitu sebesar 4,87% dalam lima tahun terakhir, diikuti oleh Kabupaten Kutai Barat dengan pertumbuhan 4,68%, dan Kabupaten Paser sebesar 3,73%. Jika dibandingkan dengan pertumbuhan IPM nasional yang mencapai 4,28% pada periode yang sama, maka Mahakam Ulu dan Kutai Barat berhasil melampaui laju pertumbuhan nasional. Hal ini mengindikasikan bahwa, meskipun secara nilai IPM mereka masih tertinggal, dinamika peningkatan yang terjadi justru lebih progresif dibandingkan banyak daerah lain di Indonesia. Kondisi ini menunjukkan adanya potensi akselerasi pembangunan manusia yang kuat di daerah-daerah tersebut apabila dukungan kebijakan dan intervensi pembangunan terus diperkuat.



Gambar 2.7. Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur Periode Tahun 2020-2024

2.2. Angka Kemiskinan

2.2.1. Perkembangan Kemiskinan Provinsi Kalimantan Timur

Kemiskinan merupakan situasi di mana individu atau kelompok tidak memiliki kemampuan yang memadai untuk memenuhi kebutuhan dasar guna mencapai taraf hidup yang layak. Kondisi ini tidak hanya berkaitan

dengan keterbatasan ekonomi, tetapi juga mencakup aspek sosial, kesehatan, pendidikan, serta keterjangkauan terhadap berbagai layanan dasar. Akar persoalan kemiskinan tidak hanya terletak pada laju pertumbuhan ekonomi yang timpang dan menghasilkan kesenjangan distribusi pendapatan, tetapi juga belum optimalnya pelaksanaan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan.

Kemiskinan dipahami melalui pendekatan kebutuhan dasar (*basic needs approach*), yaitu pendekatan yang menilai sejauh mana individu mampu mencukupi kebutuhan pokok, termasuk kebutuhan nonpangan. Berdasarkan standar yang ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), seseorang digolongkan sebagai penduduk miskin apabila pengeluaran per kapita per bulan berada di bawah garis kemiskinan. Lebih lanjut, BPS mengklasifikasikan kemiskinan ke dalam tiga bentuk utama. Pertama, kemiskinan alamiah, yang bersumber dari keterbatasan geografis dan minimnya sumber daya alam, sehingga membatasi peluang peningkatan kesejahteraan. Kedua, kemiskinan struktural, yang timbul akibat kebijakan pembangunan yang belum merata dan menimbulkan hambatan dalam akses terhadap sumber daya dan kesempatan ekonomi. Ketiga, kemiskinan kultural, yang berkaitan erat dengan cara pandang, nilai-nilai, serta kebiasaan sosial yang mendorong penerimaan terhadap kondisi miskin sebagai sesuatu yang tidak dapat diubah.

Dalam mengatasi kemiskinan diperlukan komitmen kebijakan yang kuat dan berkelanjutan karena dampak negatifnya berdampak dengan meningkatnya ketimpangan sosial, kerentanan ekonomi, serta potensi instabilitas di berbagai wilayah. Oleh karena itu, intervensi yang bersifat menyeluruh, adaptif, dan berbasis pada keadilan sosial sangat dibutuhkan untuk menekan angka kemiskinan dan mendorong pemerataan kesejahteraan secara nasional.

Dalam periode tahun 2020-2024, Provinsi Kalimantan Timur mengalami penurunan tingkat kemiskinan yang konsisten, dari 6,10% pada tahun 2020 menjadi 5,78% pada tahun 2024. Tren penurunan ini menggambarkan adanya peningkatan kondisi sosial ekonomi masyarakat serta efektivitas implementasi berbagai kebijakan intervensi pengentasan kemiskinan yang

dijalankan oleh pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah. Pencapaian angka kemiskinan di tahun 2024 menempatkan Kalimantan Timur sebagai provinsi dengan tingkat kemiskinan terendah kesembilan secara nasional, berada setelah Bali, Kalimantan Selatan, DKI Jakarta, Kepulauan Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, dan Sumatera Barat. Persentase kemiskinan di Kalimantan Timur juga tercatat lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional yang mencapai 8,57% pada tahun 2024. Hal ini mengindikasikan bahwa ketahanan ekonomi daerah yang relatif kuat dalam merespons dinamika ekonomi makro, khususnya pada periode pasca pandemi COVID-19. Faktor utama yang mendorong penurunan kemiskinan tersebut meliputi adanya peningkatan lapangan kerja di sektor konstruksi dan industri pengolahan, pertumbuhan ekonomi daerah yang relatif stabil, dan adanya penguatan program perlindungan sosial yang menjangkau kelompok masyarakat rentan. Selain itu, peningkatan sinergi antar sektor dan optimalisasi pemanfaatan dana transfer ke daerah turut berkontribusi dalam mempercepat capaian pengurangan kemiskinan.

Namun, beberapa tantangan masih perlu diatasi oleh pemerintah daerah, terutama yang berkaitan dengan kemiskinan struktural di wilayah terpencil, termasuk masih rendahnya inklusi keuangan, dan belum optimalnya pelaksanaan program pemberdayaan ekonomi berbasis masyarakat miskin. Selain itu, ketimpangan distribusi pendapatan, volatilitas harga komoditas, dan keterbatasan akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan tetap menjadi hambatan dalam mempercepat penurunan kemiskinan. Lebih lanjut, laju penurunan kemiskinan di Kalimantan Timur selama lima tahun terakhir tercatat sebesar 5,25%, masih berada di bawah rata-rata nasional sebesar 12,37%. Kondisi ini mengindikasikan bahwa pendekatan kebijakan yang lebih kontekstual, berbasis karakteristik wilayah perlu diperkuat untuk mencapai hasil yang lebih optimal, merata, dan berkelanjutan.



Gambar 2.8. Perkembangan Angka kemiskinan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024

Selama periode tahun 2020-2024, jumlah penduduk miskin di Provinsi Kalimantan Timur mengalami penurunan yang bervariasi antar wilayah. Jumlah penduduk miskin tercatat sebesar 243,99 ribu jiwa pada tahun 2020 dan menurun sebesar 13,16% dalam lima tahun terakhir, menjadi 211,88 ribu jiwa pada tahun 2024. Penurunan ini menggambarkan adanya perbaikan kondisi sosial ekonomi masyarakat secara menyeluruh, termasuk adanya dampak positif dari pelaksanaan program perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi yang dijalankan oleh berbagai pemangku kepentingan.

Penurunan kemiskinan menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan antara wilayah perdesaan dan perkotaan. Pada kawasan perdesaan, penurunan jumlah penduduk miskin lebih tinggi, yakni sebesar 19,15%, dari 115,88 ribu jiwa pada tahun 2020 menjadi 93,69 ribu jiwa pada tahun 2024. Sebaliknya, wilayah perkotaan mencatat penurunan yang relatif sedang, yaitu hanya sebesar 7,74%, dari 128,11 ribu jiwa menjadi 118,19 ribu jiwa dalam periode yang sama. Perbedaan penurunan jumlah penduduk miskin antar wilayah mengindikasikan bahwa implementasi berbagai program penanggulangan kemiskinan lebih berhasil menjangkau dan berdampak di kawasan perdesaan. Beberapa faktor utama yang pencapaian

tersebut diantaranya adanya sinergi yang efektif antara kebijakan pemerintah pusat dan daerah pada tingkat lokal.

Sementara itu, kawasan perkotaan masih menghadapi berbagai hambatan struktural yang lebih kompleks. Ketergantungan yang tinggi terhadap sektor informal, tingginya biaya hidup, keterbatasan ketersediaan lapangan pekerjaan formal, dan peningkatan arus migrasi yang tidak sebanding dengan kapasitas ekonomi daerah urban masih menjadi faktor penghambat utama dalam mempercepat penurunan kemiskinan di wilayah perkotaan. Oleh karena itu, formulasi kebijakan yang lebih kontekstual dan berbasis spasial masih diperlukan dalam mengidentifikasi disparitas antara wilayah perkotaan dan perdesaan. Selain itu, upaya pengentasan kemiskinan di kawasan perkotaan perlu difokuskan pada penciptaan lapangan kerja yang produktif dan peningkatan keterampilan angkatan kerja, termasuk penyediaan fasilitas dasar dan permukiman layak yang dapat diakses oleh kelompok masyarakat rentan secara berkelanjutan.

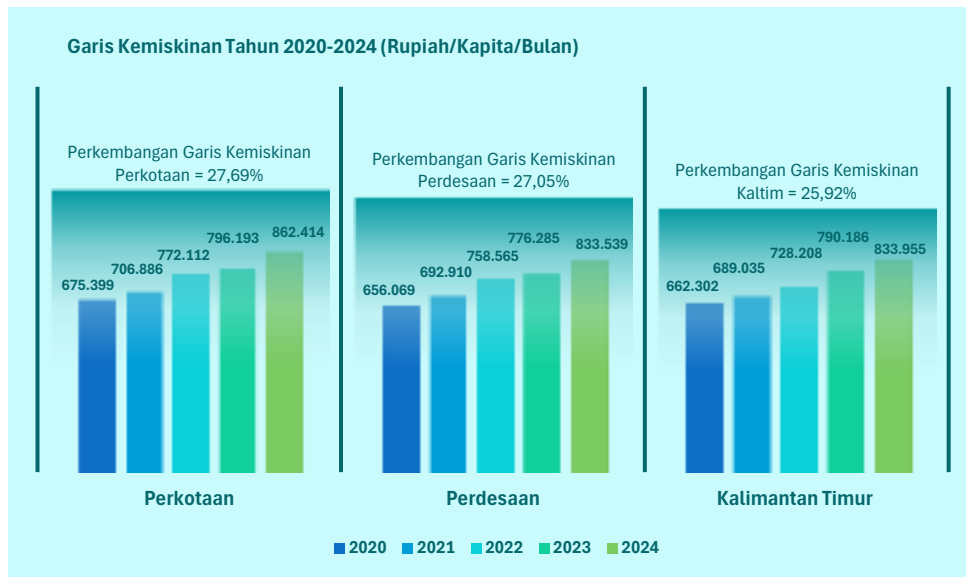


Gambar 2.9. Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin (ribu jiwa) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024

Selama periode tahun 2020-2024, nilai Garis Kemiskinan (GK) di Provinsi Kalimantan Timur mengalami peningkatan yang signifikan, dimana menggambarkan adanya dinamika perubahan kebutuhan dasar masyarakat. Secara keseluruhan, GK meningkat sebesar Rp171.653 per kapita per bulan

(25,92%), dari Rp662.302 per kapita per bulan pada tahun 2020 menjadi Rp833.955 per kapita per bulan pada tahun 2024. Kenaikan ini juga menunjukkan adanya perbedaan GK yang bervariasi secara spasial, dengan peningkatan lebih tinggi di kawasan perkotaan (Rp187.014 per kapita per bulan) dibandingkan perdesaan (Rp177.469 per kapita per bulan). Hal ini mengindikasikan adanya tekanan biaya hidup yang relatif merata, namun dengan intensitas lebih besar di wilayah perkotaan. Selain itu, kenaikan GK menggambarkan adanya respon terhadap inflasi barang dan jasa, termasuk pangan, perumahan, dan adanya pergeseran pola konsumsi yang berdampak pada peningkatan standar hidup dan daya beli masyarakat. Hal ini tidak hanya mencerminkan tekanan ekonomi, tetapi juga potensi peningkatan kapasitas ekonomi rumah tangga.

Beberapa faktor utama yang mendorong peningkatan GK di antaranya, adanya pertumbuhan ekonomi wilayah yang stabil dan peningkatan Upah Minimum Provinsi (UMP) di Kalimantan Timur. Selain itu, laju inflasi, khususnya pada sektor pangan yang diperkuat oleh peningkatan permintaan pasca pandemi dan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Namun, terdapat tantangan struktural tetap signifikan, seperti adanya ketimpangan pembangunan antar wilayah, terutama di daerah pedalaman dan pesisir. Selain itu, masih tergantungnya daerah terhadap sektor ekstraktif menyebabkan kerentanan terhadap fluktuasi harga komoditas global. Kebijakan yang mengarah pada penekanan stabilitas harga kebutuhan pokok, pertumbuhan ekonomi yang inklusif, dan pemerataan akses layanan dasar masih diperlukan dalam mengelola dampak kecenderungan kenaikan GK secara berkelanjutan.

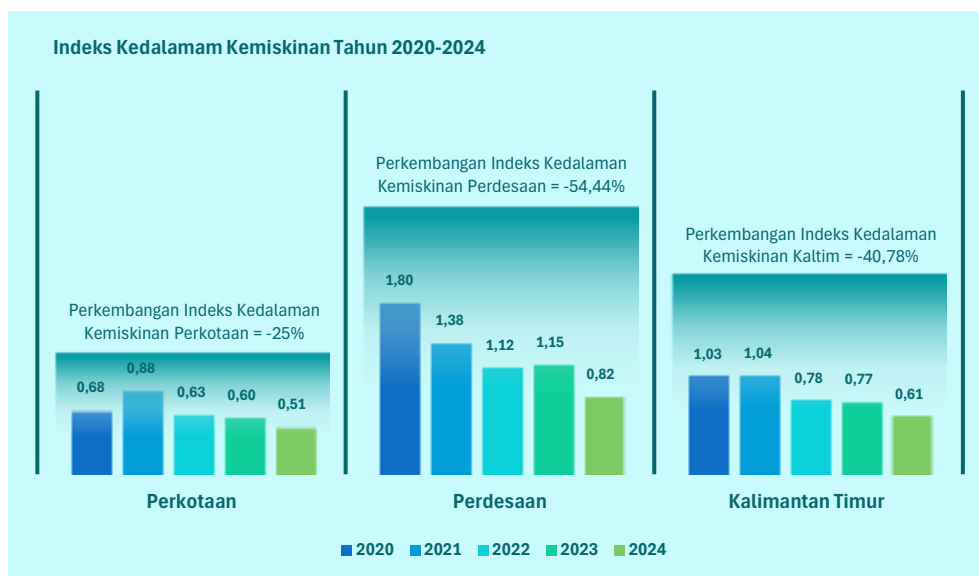


Gambar 2.10. Perkembangan Garis Kemiskinan (GK) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024

Indeks Kedalaman Kemiskinan di Provinsi Kalimantan Timur mengalami penurunan dari 1,03 pada tahun 2020 menjadi 0,61 pada tahun 2024, atau menurun sebesar 0,42 poin. Penurunan ini mengindikasikan adanya perbaikan kesejahteraan penduduk miskin, khususnya dalam memperkecil kesenjangan antara rata-rata pengeluaran mereka dengan garis kemiskinan. Di wilayah perkotaan, penurunan tersebut relatif kecil, yakni sebesar 0,17 poin, sedangkan di wilayah perdesaan lebih signifikan, yaitu sebesar 0,98 poin. Hal ini mengindikasikan bahwa kondisi sosial ekonomi masyarakat miskin di perdesaan mengalami perbaikan yang lebih cepat dibandingkan dengan masyarakat miskin di perkotaan.

Penurunan Indeks Kedalaman Kemiskinan di Provinsi Kalimantan Timur menunjukkan bahwa daya beli kelompok masyarakat miskin cenderung meningkat, meskipun ketimpangan antar wilayah masih menjadi isu utama. Beberapa faktor utama yang mendorong penurunan indeks tersebut, diantaranya adanya pertumbuhan ekonomi daerah yang relatif stabil yang ditopang oleh sektor energi serta industri pengolahan. Selain itu, peningkatan upah minimum regional dan program bantuan sosial yang memperkuat konsumsi rumah tangga turut berkontribusi, selain adanya implementasi program pengentasan kemiskinan yang lebih terarah dan berbasis data.

Namun, tantangan masih dihadapi oleh pemerintah daerah dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Ketimpangan pembangunan antar wilayah menyebabkan akses terhadap layanan dasar, terutama di sektor pendidikan dan kesehatan. Masih tingginya ketergantungan Kalimantan Timur terhadap sektor ekstraktif juga menjadikan struktur ekonomi daerah rentan terhadap fluktuasi harga komoditas global. Di samping itu, keterbatasan infrastruktur dan kualitas layanan publik di wilayah terpencil turut memperlambat proses penurunan kemiskinan secara menyeluruh. Oleh karena itu, strategi pengentasan kemiskinan yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan berorientasi pada penguatan ekonomi lokal masih diperlukan agar perbaikan kesejahteraan dapat berlangsung secara merata dan berjangka panjang.



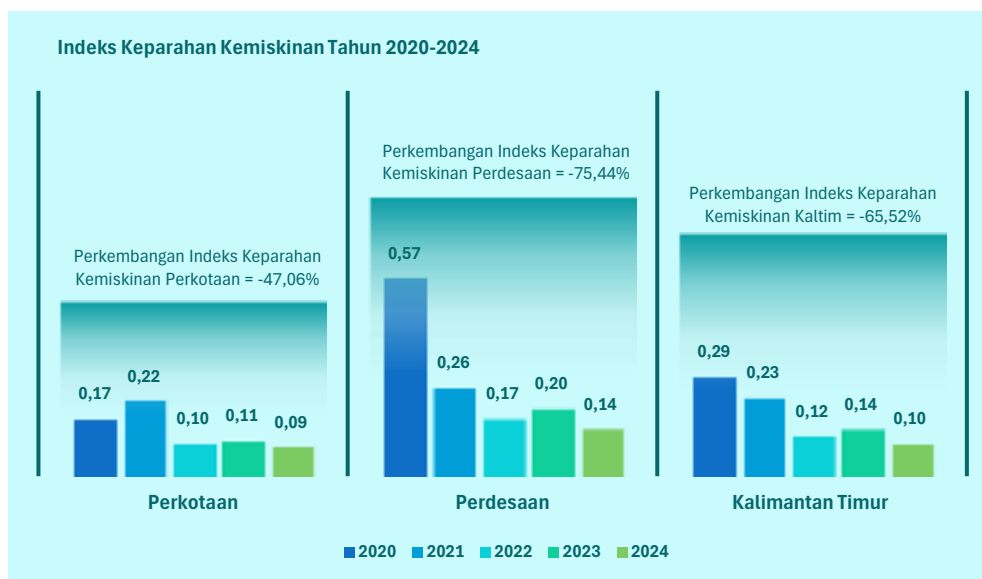
Gambar 2.11. Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024

Indeks Keparahan Kemiskinan di Provinsi Kalimantan Timur menunjukkan penurunan signifikan dari 0,29 pada tahun 2020 menjadi 0,10 pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan dalam distribusi pengeluaran di kalangan penduduk miskin. Penurunan Indeks Keparahan Kemiskinan lebih terasa di wilayah perdesaan, dimana penurunannya mencapai 75,44%, dibandingkan di wilayah perkotaan yang hanya sebesar 47,06%. Pencapaian ini mencerminkan semakin berkurangnya ketimpangan pengeluaran antar kelompok miskin, khususnya di wilayah perdesaan yang

menjadi indikasi keberhasilan program pengentasan kemiskinan dan meningkatnya akses terhadap sumber daya ekonomi.

Beberapa faktor pendorong yang mendasari capaian ini antara lain adalah adanya penerapan program bantuan sosial yang lebih tepat sasaran di wilayah perdesaan, sehingga mampu meningkatkan daya beli masyarakat miskin. Meskipun belum maksimal, pembangunan infrastruktur dasar turut mendorong keterhubungan desa dengan pusat ekonomi, membuka akses pasar dan layanan dasar. Upaya pemerintah daerah yang fokus pada isu diversifikasi ekonomi juga turut mengurangi ketergantungan pada sektor ekstraktif dan memberikan peluang pendapatan alternatif bagi rumah tangga miskin di pedesaan.

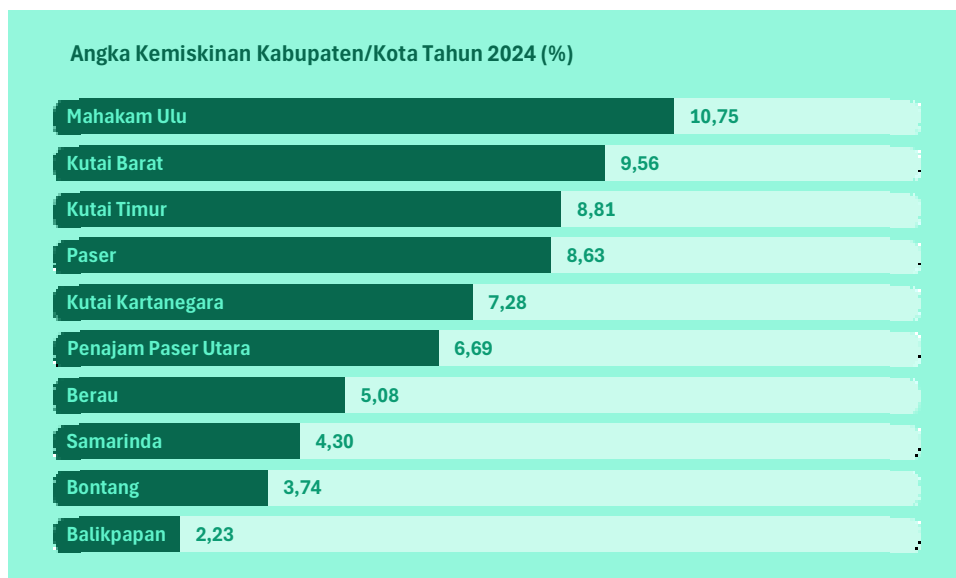
Namun, sejumlah tantangan masih menghambat pencapaian yang lebih merata. Ketimpangan antar wilayah, terutama dalam hal akses pendidikan dan kesehatan, masih menjadi hambatan utama. Ketergantungan ekonomi terhadap sektor ekstraktif juga masih berdampak pada kerentanan terhadap fluktuasi harga global, sehingga berpotensi mengganggu stabilitas pendapatan. Di sisi lain, keterbatasan akses terhadap teknologi dan informasi di wilayah perdesaan memperlambat pertumbuhan produktivitas dan inovasi ekonomi lokal, yang berperan penting dalam pengurangan kemiskinan secara berkelanjutan.



Gambar 2.12. Perkembangan Indeks Keparahan Kemiskinan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024

2.2.2. Perkembangan Kemiskinan di Kabupaten/Kota

Pada tahun 2024, terdapat empat kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur yang memiliki persentase penduduk miskin melebihi rata-rata nasional (8,57%). Kabupaten Mahakam Ulu mencatat tingkat kemiskinan tertinggi sebesar 10,75%, diikuti oleh Kabupaten Kutai Barat sebesar 9,56%, Kabupaten Kutai Timur sebesar 8,81%, dan Kabupaten Paser sebesar 8,63%. Tingginya angka kemiskinan di wilayah-wilayah tersebut mencerminkan adanya ketimpangan pembangunan antar wilayah, khususnya antara kawasan perkotaan dan perdesaan atau wilayah terpencil. Secara umum, penurunan angka kemiskinan di Kalimantan Timur dipengaruhi oleh program pemerintah. Namun, tantangan utama yang masih dihadapi antara lain adalah ketimpangan pembangunan wilayah, ketergantungan terhadap sektor ekstraktif yang rentan terhadap fluktuasi harga komoditas global, dan keterbatasan infrastruktur di wilayah terpencil. Upaya pemerataan pembangunan, peningkatan akses terhadap layanan dasar, dan diversifikasi ekonomi menjadi strategi utama dalam menurunkan angka kemiskinan secara berkelanjutan di Kalimantan Timur.

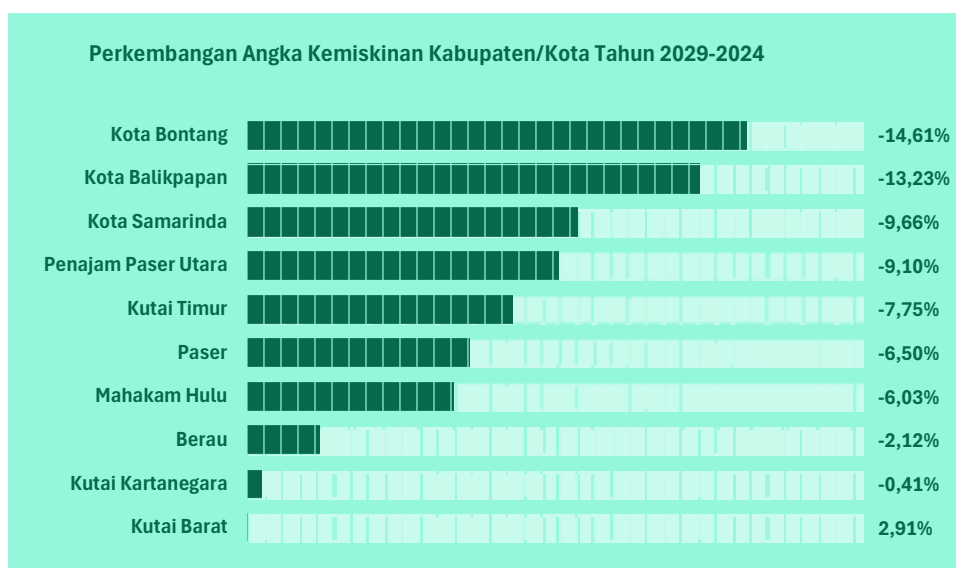


Gambar 2.13. Angka kemiskinan Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024

Selama kurun waktu tahun 2020 hingga tahun 2024, sebagian besar kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan Timur menunjukkan kecenderungan penurunan angka kemiskinan. Kota Bontang mencatat

penurunan tertinggi sebesar 14,61%, diikuti oleh Kota Balikpapan sebesar 13,23%, Kota Samarinda sebesar 9,66%, Kabupaten Penajam Paser Utara sebesar 9,10%, Kabupaten Kutai Timur sebesar 7,75%, Kabupaten Paser sebesar 6,50%, Kabupaten Mahakam Ulu sebesar 6,03%, Kabupaten Berau sebesar 2,12%, dan Kabupaten Kutai Kartanegara sebesar 0,41%. Namun, Kabupaten Kutai Barat menjadi satu-satunya wilayah yang mengalami peningkatan angka kemiskinan, yakni sebesar 2,91%. Situasi ini menggambarkan adanya perbedaan keberhasilan pelaksanaan program pengentasan kemiskinan antar daerah.

Penurunan angka kemiskinan di sebagian besar wilayah Kalimantan Timur mengindikasikan adanya efektivitas pelaksanaan program sosial yang berkontribusi signifikan dalam mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat berpendapatan rendah. Meskipun demikian, peningkatan angka kemiskinan di Kabupaten Kutai Barat menunjukkan masih adanya tantangan struktural yang belum teratasi. Ketimpangan pembangunan antar wilayah, terutama keterbatasan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan teknologi menjadi hambatan utama dalam mempercepat penurunan kemiskinan. Oleh karena itu, kebijakan yang lebih adaptif dan berbasis kebutuhan lokal dengan memperkuat kolaborasi masih diperlukan dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan di seluruh wilayah Kalimantan Timur.



Gambar 2.14. Perkembangan Angka Kemiskinan Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur Periode Tahun 2020-2024

2.3. Angka Pengangguran

2.3.1 Perkembangan Pengangguran Provinsi Kalimantan Timur

Indonesia tengah menghadapi tantangan yang signifikan dalam menanggulangi permasalahan pengangguran yang dapat memberikan dampak luas terhadap stabilitas perekonomian nasional, kesejahteraan sosial masyarakat, dan peningkatan angka kemiskinan. Pengangguran merupakan kondisi ketika individu yang tergolong dalam kelompok angkatan kerja tidak dapat memperoleh pekerjaan, baik dalam jangka waktu pendek maupun panjang. Kondisi ini disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya ketidakseimbangan antara laju pertumbuhan ekonomi dengan kemampuan sektor ekonomi dalam menyerap tenaga kerja, dan adanya ketimpangan antara jumlah pencari kerja dan ketersediaan lapangan kerja. Selain itu, adanya ketidaksesuaian kompetensi sumber daya manusia dengan kebutuhan pasar kerja turut berkontribusi, disamping meningkatnya kasus pemutusan hubungan kerja (PHK) sebagai dampak dari dinamika ekonomi.

Ditinjau dari penyebab dan karakteristiknya, pengangguran diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis. Pengangguran struktural muncul sebagai akibat adanya perubahan dalam struktur ekonomi yang menyebabkan ketidakcocokan antara keterampilan tenaga kerja dan permintaan sektor industri. Hal ini memerlukan adaptasi keterampilan agar dapat beralih ke sektor lain yang lebih relevan. Selain itu, pengangguran konjungtural yang timbul sebagai dampak dari siklus perlambatan ekonomi yang mengakibatkan penurunan kebutuhan tenaga kerja secara agregat. Sementara itu, pengangguran friksional terjadi selama proses transisi kerja, di mana individu yang telah keluar dari pekerjaannya masih memerlukan waktu untuk memperoleh pekerjaan baru yang sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya. Adapun pengangguran musiman berkaitan erat dengan fluktuasi kegiatan ekonomi yang hanya berlangsung pada periode tertentu dalam satu tahun, seperti pada sektor pertanian dan pariwisata.

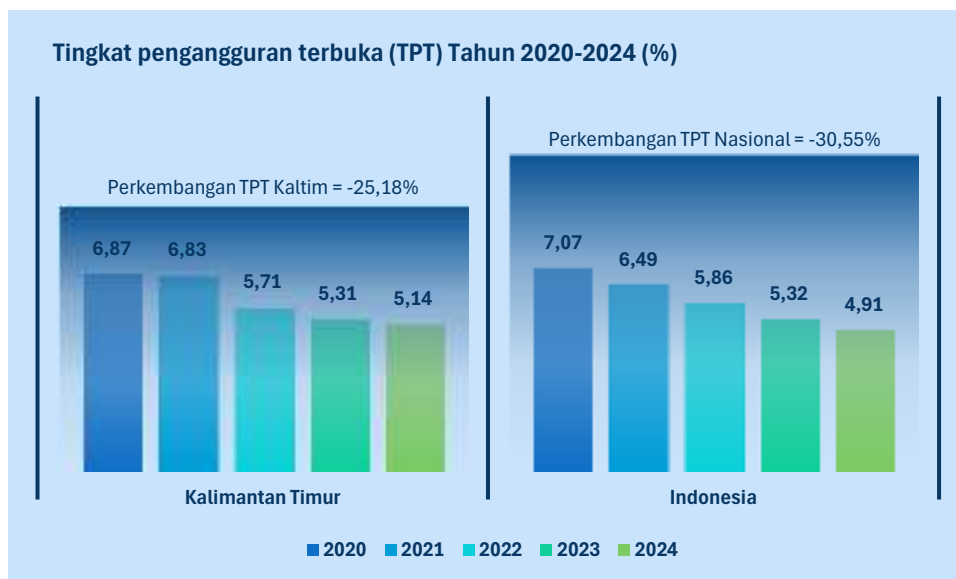
Di samping itu, terdapat beberapa kategori pengangguran lainnya. Pengangguran terbuka menggambarkan situasi di mana seseorang tidak memiliki pekerjaan dan secara aktif sedang mencari pekerjaan. Setengah menganggur mengacu pada kondisi individu yang bekerja tetapi tidak

memperoleh waktu kerja yang optimal, sehingga potensi kerjanya belum dimanfaatkan secara maksimal. Sedangkan pengangguran terselubung terjadi ketika seseorang memiliki pekerjaan, tetapi tingkat kontribusinya terhadap produktivitas ekonomi sangat rendah, misalnya akibat adanya kelebihan tenaga kerja pada suatu sektor yang tidak memerlukan tenaga sebanyak itu.

Penanganan pengangguran menjadi prioritas utama dalam agenda pembangunan nasional guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang bersifat inklusif dan berkelanjutan. Tingkat pengangguran berperan sebagai salah satu indikator makro pembangunan yang krusial dalam mengevaluasi efektivitas kebijakan pembangunan serta kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pemantauan terhadap dinamika pengangguran sangat penting bagi pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah dalam menyusun kebijakan ketenagakerjaan yang berbasis data dan responsif terhadap kondisi aktual. Beberapa indikator utama yang digunakan untuk memahami struktur ketenagakerjaan meliputi Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), Tingkat Kesempatan Kerja (TKK), dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Ketiga indikator tersebut memberikan gambaran menyeluruh mengenai situasi pasar tenaga kerja di suatu wilayah dan menjadi landasan penting dalam perumusan kebijakan ketenagakerjaan yang lebih terarah dan efektif di Kalimantan Timur.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Kalimantan Timur menunjukkan penurunan yang signifikan dalam periode tahun 2020 hingga tahun 2024. TPT pada tahun 2020 tercatat sebesar 6,87%, lalu mengalami penurunan sebesar 1,73 poin menjadi 5,14% pada tahun 2024 yang mencerminkan adanya penurunan sekitar 25,18%. Penurunan ini menunjukkan adanya kemungkinan perbaikan dalam sektor ketenagakerjaan yang dipengaruhi oleh peningkatan kesempatan kerja, pertumbuhan ekonomi daerah, dan keberhasilan program-program pemerintah dalam mengatasi pengangguran. Meskipun demikian, angka TPT Kalimantan Timur pada tahun 2024 masih lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata nasional yang tercatat hanya sebesar 4,91%. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun sektor ekonomi mengalami perkembangan,

peluang kerja yang tercipta masih belum cukup untuk menyerap jumlah angkatan kerja yang terus meningkat. Sementara itu, dalam lima tahun terakhir, meskipun terdapat penurunan TPT yang signifikan, laju penurunan TPT Kalimantan Timur sebesar 25,18% masih lebih lambat dibandingkan dengan penurunan TPT secara nasional yang mencapai 30,55%. Hal ini menunjukkan bahwa Provinsi Kalimantan Timur masih tertinggal dalam kecepatan penciptaan lapangan kerja baru dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Beberapa tantangan yang dihadapi, diantaranya ketimpangan dalam distribusi kesempatan kerja antara wilayah perkotaan dan perdesaan yang masih menjadi masalah. Selain itu, keterbatasan infrastruktur di beberapa daerah juga membatasi pertumbuhan ekonomi lokal dan peluang kerja yang tersedia. Di sisi lain, kesenjangan keterampilan antara tenaga kerja dengan kebutuhan industri juga masih menjadi tantangan yang mengakibatkan sebagian angkatan kerja belum dapat terserap secara optimal.

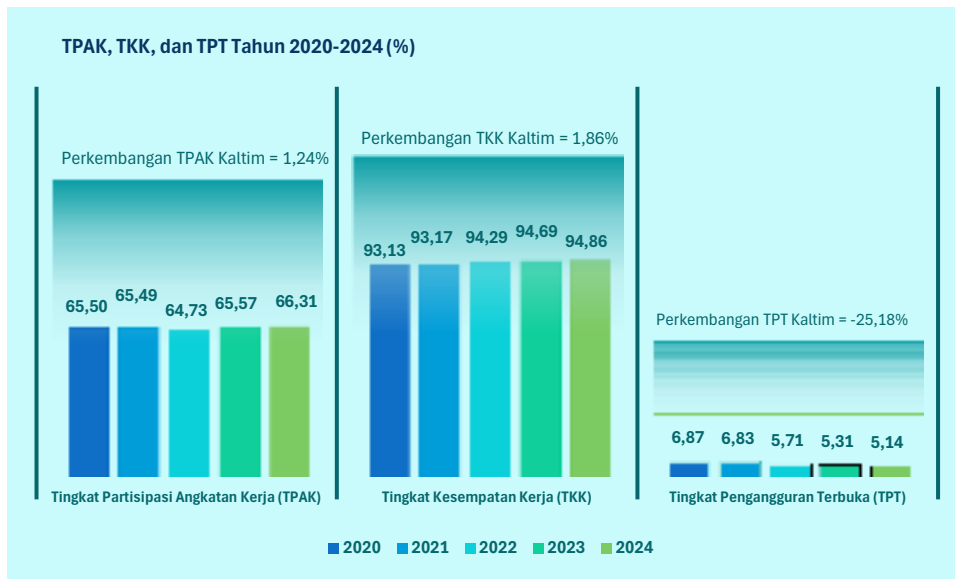


Gambar 2.15. Perkembangan Angka Pengangguran Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2024

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan indikator yang menunjukkan persentase penduduk usia kerja yang terlibat secara aktif dalam kegiatan ekonomi, baik sebagai tenaga kerja yang bekerja maupun sebagai pencari kerja. Indikator ini berperan penting dalam menganalisis dinamika ketenagakerjaan suatu wilayah serta dalam mengevaluasi

kapasitas perekonomian untuk menyerap tenaga kerja secara optimal. Di Provinsi Kalimantan Timur, perkembangan TPAK selama periode 2020–2024 menunjukkan tren yang berfluktuasi, dengan kecenderungan peningkatan sebesar 0,81 poin. Pada tahun 2020, TPAK tercatat sebesar 65,50% dan kemudian mengalami kenaikan hingga mencapai 66,31% pada tahun 2024. Peningkatan ini mencerminkan adanya dorongan dalam partisipasi tenaga kerja, dengan identifikasi adanya pengaruh berbagai faktor, seperti pertumbuhan ekonomi daerah, perubahan kebijakan ketenagakerjaan, serta kondisi pasar kerja yang lebih terbuka bagi angkatan kerja.

Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) merupakan indikator yang mencerminkan ketersediaan dan keterjangkauan lapangan kerja bagi angkatan kerja, dengan membandingkan jumlah kesempatan kerja yang tersedia dengan jumlah pencari kerja. Berbeda dengan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) yang mengukur sejauh mana penduduk usia kerja terlibat dalam aktivitas ekonomi, TKK lebih menitikberatkan pada kapasitas perekonomian dalam menyediakan pekerjaan bagi tenaga kerja yang tersedia. Selama kurun waktu tahun 2020 hingga tahun 2024, TKK di Provinsi Kalimantan Timur menunjukkan tren positif, meningkat dari 93,13% di tahun 2020 menjadi 94,86% di tahun 2024, dengan kenaikan sebesar 1,73 poin. Hal ini mencerminkan adanya perbaikan dalam penyerapan tenaga kerja dan meningkatnya akses masyarakat terhadap lapangan pekerjaan yang menandakan membaiknya kondisi pasar kerja di Kalimantan Timur. Peningkatan TKK di Kalimantan Timur didorong oleh beberapa faktor utama, diantaranya pertumbuhan ekonomi yang stabil, terutama melalui percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang mampu mendorong penciptaan lapangan kerja di sektor konstruksi dan jasa. Selain itu, implementasi pelatihan ketenagakerjaan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia oleh pemerintah daerah turut berkontribusi pada peningkatan TKK di Kalimantan Timur.



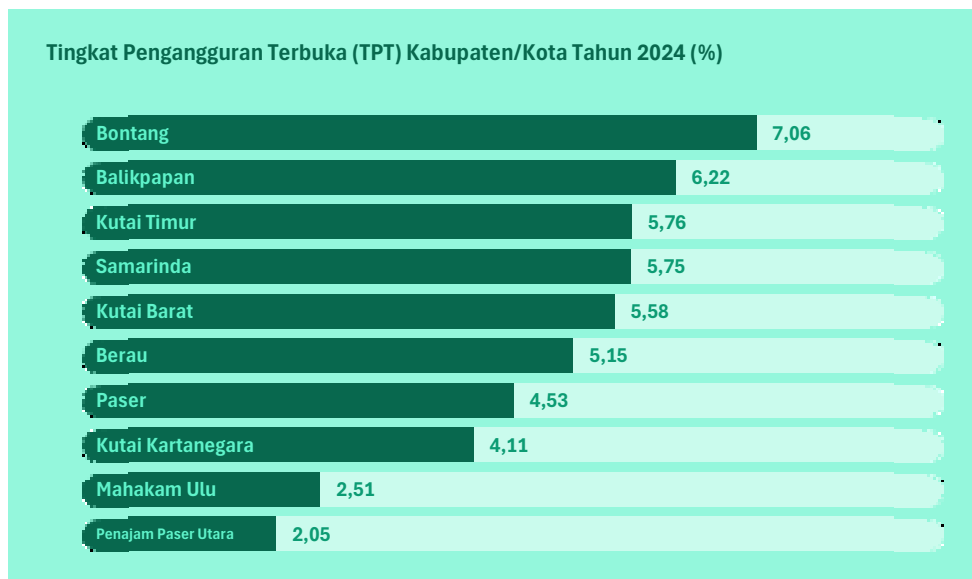
Gambar 2.16. Perkembangan Pengangguran TPAK dan TKK Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024

2.3.2 Perkembangan Angka Pengangguran di Kabupaten/Kota

Pada tahun 2024, terdapat empat kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur yang mencatatkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di bawah rata-rata nasional, yakni sebesar 4,91%. Kabupaten Penajam Paser Utara menunjukkan TPT terendah sebesar 2,05%, disusul oleh Kabupaten Mahakam Ulu (2,51%), Kabupaten Kutai Kartanegara (4,11%), dan Kabupaten Paser (4,53%). Rendahnya TPT di daerah tersebut berkaitan erat dengan dominasi sektor-sektor ekonomi yang berbasis sumber daya alam, seperti perkebunan, pertambangan, dan perikanan yang secara konsisten menjadi sumber utama penyerapan tenaga kerja lokal. Selain peran sektor primer tersebut, keberhasilan beberapa kebijakan daerah dalam mendorong iklim investasi, penguatan peran Usaha Kecil dan Menengah (UKM), dan pengembangan program padat karya juga turut menciptakan peluang kerja baru. Secara khusus, pembangunan infrastruktur secara masif di Kabupaten Penajam Paser Utara sebagai bagian dari proyek strategis Ibu Kota Nusantara (IKN), telah meningkatkan permintaan tenaga kerja, terutama di sektor konstruksi dan jasa terkait. Sementara itu, meskipun memiliki karakteristik geografis yang terpencil, Kabupaten Mahakam Ulu justru berhasil mempertahankan TPT yang rendah yang dipengaruhi oleh adanya penguatan ekonomi berbasis komunitas dan tingginya aktivitas sektor informal,

sehingga memungkinkan masyarakat tetap produktif dalam sistem ekonomi subsisten. Adapun di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Paser, sektor pertanian dan industri yang berkembang secara progresif turut memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas pasar tenaga kerja di kedua wilayah tersebut.

Sebaliknya, terdapat enam kabupaten/kota di Kalimantan Timur yang mencatatkan TPT di atas rata-rata nasional. Kota Bontang mencatatkan TPT tertinggi sebesar 7,06%, diikuti oleh Kota Balikpapan (6,22%), Kabupaten Kutai Timur (5,76%), Kota Samarinda (5,75%), Kabupaten Kutai Barat (5,58%), dan Kabupaten Berau (45,15%). Meskipun beberapa wilayah tersebut merupakan pusat industri dan energi, seperti Kota Bontang dan Kota Balikpapan, tingginya TPT di daerah tersebut disebabkan oleh adanya kesenjangan antara ketersediaan tenaga kerja dan kebutuhan industri yang terus mengalami transformasi. Ketidaksiesuaian antara keterampilan tenaga kerja dengan tuntutan pasar turut menyebabkan banyak pencari kerja tidak terserap secara optimal. Situasi yang sama juga terjadi di Kota Samarinda, yang diakibatkan adanya pertumbuhan urbanisasi yang cepat dan menjadi magnet ekonomi regional. Hal ini berdampak tingginya arus masuk pencari kerja, namun tidak diiringi oleh penciptaan lapangan kerja yang memadai. Sementara itu, di Kabupaten Kutai Barat dan Kutai Timur yang memiliki sektor pertambangan dominan, masalah ketimpangan distribusi pekerjaan serta ketidakseimbangan antara sektor formal dan informal masih menjadi tantangan utama. Lebih lanjut, Kabupaten Berau yang memiliki potensi besar pada sektor pariwisata dan sumber daya alam, namun masih dihadapkan pada keterbatasan infrastruktur dan tingginya ketergantungan terhadap sektor musiman. Hal tersebut berdampak pada fluktuasi ketersediaan lapangan kerja, sehingga menyebabkan TPT di wilayah tersebut belum dapat ditekan secara optimal.

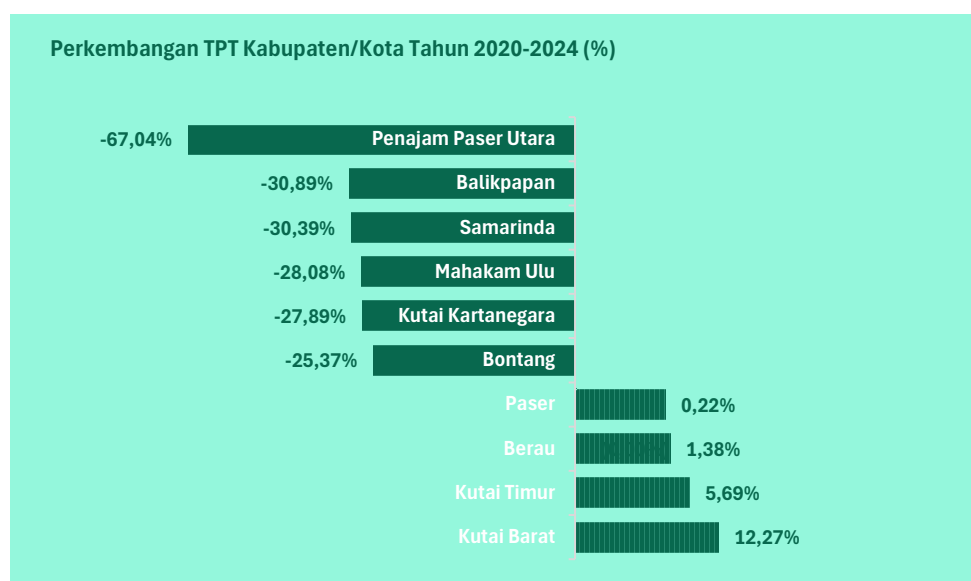


Gambar 2.17. Angka Pengangguran Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023

Selama periode tahun 2020 hingga tahun 2024, beberapa kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur menunjukkan tren penurunan TPT yang cukup signifikan. Kabupaten Penajam Paser Utara tercatat mengalami penurunan TPT paling tinggi, yakni sebesar 67,04%, disusul oleh Kota Balikpapan dengan penurunan sebesar 30,89%, Kota Samarinda sebesar 30,39%, Kabupaten Mahakam Ulu sebesar 28,08%, Kabupaten Kutai Kartanegara sebesar 27,89%, dan Kota Bontang sebesar 25,37%. Penurunan ini menggambarkan adanya dinamika ekonomi yang membaik di daerah tersebut, terutama melalui peningkatan investasi, pertumbuhan sektor industri, dan peningkatan serapan tenaga kerja pada sektor-sektor tertentu. Secara khusus, pembangunan IKN turut memberikan kontribusi besar terhadap penyerapan tenaga kerja, terutama di sektor konstruksi, infrastruktur, dan jasa penunjang lainnya. Adapun di Kabupaten Mahakam Ulu, sektor pertanian dan aktivitas ekonomi informal masih menjadi tulang punggung dalam menyerap angkatan kerja, yang berdampak pada penurunan TPT di daerah tersebut.

Namun, masih terdapat peningkatan TPT di kabupaten/kota di Kalimantan Timur. Dalam lima tahun terakhir, empat kabupaten/kota justru mencatatkan peningkatan TPT, dimana Kabupaten Kutai Barat mengalami

lonjakan tertinggi sebesar 12,27%, disusul oleh Kabupaten Kutai Timur (5,69%), Kabupaten Berau (1,38%), dan Kabupaten Paser (0,22%). Peningkatan TPT di sejumlah daerah ini umumnya disebabkan oleh berbagai kendala struktural, antara lain ketidakseimbangan antara pertumbuhan jumlah penduduk usia kerja dengan ketersediaan lapangan pekerjaan, ketergantungan terhadap sektor ekonomi yang bersifat musiman, dan belum optimalnya diversifikasi ekonomi. Faktor-faktor ini secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi kemampuan daerah dalam menciptakan kesempatan kerja yang berkelanjutan.



Gambar 2.18. Perkembangan Angka Pengangguran (TPT) Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur Periode Tahun 2019-2023

2.4. Pertumbuhan Ekonomi

2.4.1 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kalimantan Timur

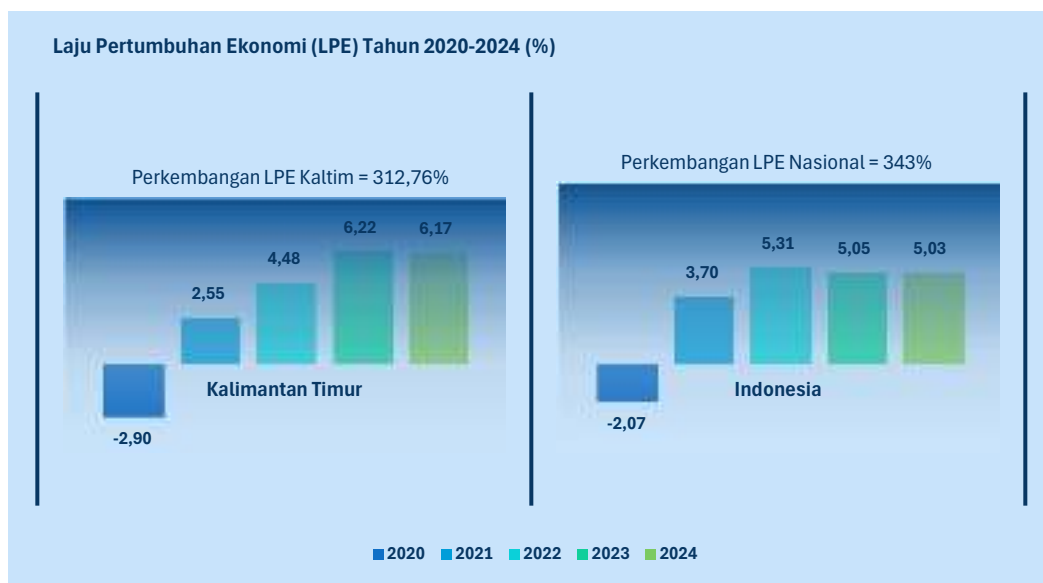
Ekonomi suatu negara atau wilayah mengalami perkembangan melalui suatu proses berkelanjutan yang mencerminkan peningkatan kondisi perekonomian dalam rentang waktu tertentu. Peningkatan ini tercermin dari meningkatnya intensitas kegiatan ekonomi masyarakat, yang pada gilirannya mendorong pertumbuhan output barang dan jasa. Dalam konteks pembangunan daerah, Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) menjadi salah satu

tolok ukur utama yang digunakan untuk menilai efektivitas pencapaian pembangunan. LPE tidak hanya merefleksikan kinerja ekonomi selama satu periode tertentu, tetapi juga menjadi landasan penting dalam merumuskan arah kebijakan ekonomi ke depan. Informasi mengenai LPE dimanfaatkan oleh pemerintah sebagai acuan dalam menyusun anggaran penerimaan, merancang strategi pembangunan, dan mengelola alokasi sumber daya secara optimal. Di sisi lain, pelaku usaha juga menjadikan LPE sebagai referensi dalam merancang strategi bisnis, termasuk dalam ekspansi pasar, pengembangan produk, dan peningkatan efisiensi operasional. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam terhadap dinamika LPE sangat diperlukan guna mendorong pembangunan yang berkelanjutan dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Dalam kurun waktu tahun 2020 hingga tahun 2024, laju pertumbuhan ekonomi (LPE) Kalimantan Timur menunjukkan peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2020, LPE tercatat mengalami kontraksi sebesar -2,9%, namun berhasil tumbuh menjadi 6,17% pada tahun 2024. Peningkatan ini mencerminkan pemulihan ekonomi yang kuat di Kalimantan Timur yang didorong oleh berbagai faktor, termasuk adanya ekspansi sektor industri, peningkatan investasi, dan pengaruh proyek strategis nasional seperti pengembangan IKN. Selain itu, sektor energi dan pertambangan yang menjadi tulang punggung perekonomian Kalimantan Timur turut berkontribusi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.

Pada tahun 2024, LPE Kalimantan Timur berhasil melampaui rata-rata nasional yang berada pada level 5,0%. Hal ini menunjukkan bahwa perekonomian daerah Kalimantan Timur tumbuh lebih cepat dibandingkan rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional di tahun yang sama. Keberhasilan ini tidak hanya mencerminkan efektivitas kebijakan pembangunan yang diterapkan, tetapi juga menunjukkan daya saing ekonomi Kalimantan Timur yang semakin meningkat di tingkat nasional. Selain itu, adanya kontribusi yang signifikan dari sektor administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib yang tumbuh sebesar 16,46% turut berkontribusi terhadap LPE Kalimantan Timur, disamping adanya peningkatan pengeluaran konsumsi pemerintah yang mencapai 11,7%.

Namun, jika dilihat perkembangan LPE pada periode tahun 2020–2024, laju perkembangan LPE Kalimantan Timur sebesar 312,76% masih di bawah perkembangan rata-rata LPE di provinsi lain yang mencapai 343%. Hal ini dapat dikaitkan dengan adanya ketergantungan yang cukup tinggi terhadap sektor berbasis sumber daya alam, yang rentan terhadap fluktuasi harga komoditas global. Selain itu, adanya tantangan dalam diversifikasi ekonomi dan pengembangan sektor-sektor non-ekstraktif, termasuk ketimpangan pembangunan antar wilayah dan keterbatasan infrastruktur di beberapa daerah terpencil juga turut menjadi faktor penghambat dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata dan berkelanjutan.



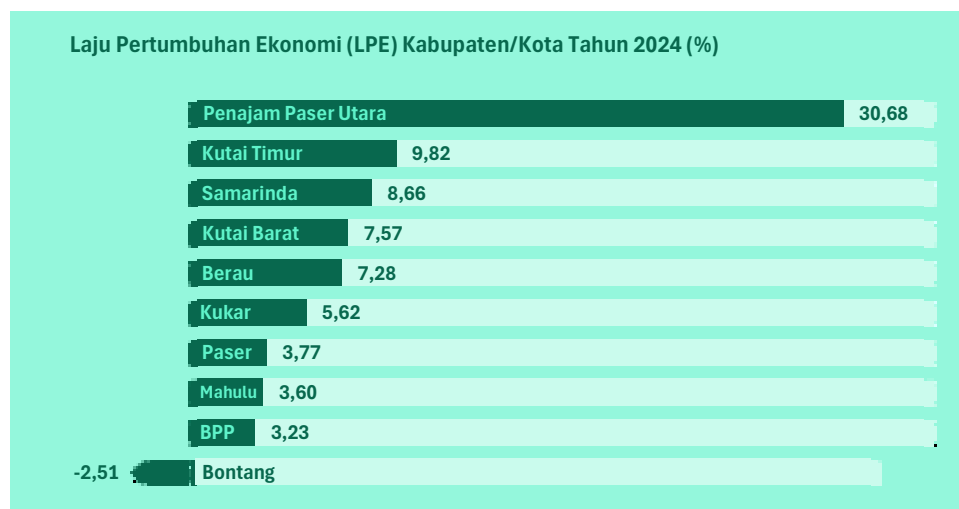
Gambar 2.19. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024

2.4.2 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota

Pada tahun 2024, pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kalimantan Timur menunjukkan variasi antar kabupaten/kota. Enam daerah mencatatkan laju pertumbuhan ekonomi (LPE) yang melampaui rata-rata nasional sebesar 5,03%. Kabupaten Penajam Paser Utara mencatatkan pertumbuhan tertinggi sebesar 36,68%, diikuti oleh Kabupaten Kutai Timur (9,82%), Kota Samarinda (8,66%), Kabupaten Kutai Barat (7,57%), Kabupaten Berau (7,28%), dan Kabupaten Kutai Kartanegara (5,62%). Pertumbuhan ini didorong oleh investasi infrastruktur dan proyek strategis nasional, seperti pembangunan IKN di Kabupaten Penajam Paser Utara, yang menarik

investasi besar dan menciptakan lapangan kerja. Selain itu, sektor pertambangan dan energi di beberapa kabupaten mengalami perkembangan pesat akibat peningkatan produksi serta harga komoditas global. Kota Samarinda juga menunjukkan pertumbuhan stabil melalui diversifikasi ekonomi di sektor perdagangan, jasa, dan industri pengolahan. Kabupaten Berau mampu mengoptimalkan potensi pariwisata dan sumber daya alam untuk menarik investasi dan wisatawan.

Sebaliknya, tiga daerah mencatatkan pertumbuhan ekonomi di bawah rata-rata nasional. Kota Balikpapan tumbuh sebesar 3,23%, Kabupaten Mahakam Ulu sebesar 3,60%, dan Kabupaten Paser sebesar 3,77%. Di sisi lain, Kota Bontang justru mengalami kontraksi ekonomi sebesar -2,51% yang disebabkan oleh adanya penurunan yang signifikan pada sektor industri pengolahan dan pertambangan. Ketergantungan yang tinggi terhadap sektor-sektor tersebut membuat Kota Bontang rentan terhadap fluktuasi harga komoditas global. Sementara itu, Kabupaten Mahakam Ulu dan Kabupaten Paser juga menghadapi tantangan infrastruktur yang terbatas dan aksesibilitas yang rendah, sehingga menghambat pengembangan sektor potensial seperti pertanian dan pariwisata di daerah tersebut. Lebih lanjut, Kota Balikpapan mengalami perlambatan akibat adanya penurunan aktivitas di sektor perdagangan dan jasa serta fluktuasi harga minyak dan gas.



Gambar 2.20. Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kalimantan Timur Per Kabupaten/Kota Tahun 2024

2.5. Ketimpangan Pendapatan

2.5.1 Perkembangan Ketimpangan Pendapatan Provinsi Kalimantan Timur

Dalam pelaksanaan pembangunan nasional, berbagai permasalahan struktural kerap menjadi hambatan utama, yang meliputi ketimpangan distribusi pendapatan, tingginya tingkat pengangguran dan kemiskinan, serta ketidakseimbangan dalam struktur perekonomian. Ketimpangan pendapatan merefleksikan perbedaan tingkat kesejahteraan, standar hidup, dan akses terhadap sumber daya ekonomi antar individu atau kelompok masyarakat, dimana umumnya disebabkan oleh ketidaksamaan dalam penguasaan faktor produksi serta distribusi sumber daya. Kondisi tersebut mengakibatkan distribusi pendapatan yang tidak merata antar wilayah maupun antar sektor, sehingga memperlebar kesenjangan antara kelompok masyarakat berpenghasilan tinggi dan rendah. Ketika model pembangunan lebih mengedepankan pertumbuhan ekonomi dibandingkan pemerataan, potensi peningkatan ketimpangan menjadi semakin besar, yang pada akhirnya dapat menghambat pencapaian pembangunan yang inklusif dan berkeadilan.

Dalam rangka mengukur derajat ketimpangan distribusi pendapatan di suatu wilayah, digunakan alat ukur yang dikenal sebagai Indeks Gini. Indeks ini berfungsi sebagai instrumen analitis untuk memantau dinamika distribusi pendapatan dalam suatu periode tertentu serta mengidentifikasi kecenderungan peningkatan atau penurunan ketimpangan. Perhitungan Indeks Gini dilakukan dengan memanfaatkan kurva Lorenz, yang menggambarkan proporsi kumulatif pendapatan terhadap proporsi kumulatif penduduk, dan membandingkannya dengan garis diagonal yang mewakili distribusi pendapatan yang sepenuhnya merata. Nilai Indeks Gini berada dalam kisaran 0 hingga 1, di mana nilai 0 menunjukkan kondisi pemerataan sempurna (setiap individu memperoleh pendapatan yang sama), sementara nilai 1 merepresentasikan ketimpangan absolut (seluruh pendapatan hanya dimiliki oleh satu individu).

Perkembangan Indeks Gini di Provinsi Kalimantan Timur dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2020–2024) menunjukkan pola penurunan

fluktuatif. Indeks Gini Kalimantan Timur tercatat sebesar 0,335 pada tahun 2020 dan menurun menjadi 0,310 pada tahun 2024, dengan penurunan sebesar 0,025 poin atau sekitar 7,46%. Penurunan ini mengindikasikan adanya perbaikan dalam hal distribusi pengeluaran penduduk yang mencerminkan adanya kecenderungan penguatan inklusivitas ekonomi di Kalimantan Timur. Bila dibandingkan dengan rata-rata nasional pada tahun 2024 yang mencapai 0,381, Kalimantan Timur menunjukkan tingkat ketimpangan yang relatif lebih rendah. Bahkan, penurunan Indeks Gini Kalimantan Timur selama lima tahun terakhir tercatat masih lebih tinggi dibandingkan penurunan rata-rata nasional yang hanya sebesar 1,04%. Hal ini menunjukkan bahwa perbaikan distribusi ekonomi di Kalimantan Timur berlangsung lebih progresif dibandingkan wilayah lain di Indonesia.

Penurunan Indeks Gini mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Timur mulai mengarah pada pola yang lebih inklusif, di mana manfaat pembangunan tidak hanya terpusat pada kelompok masyarakat tertentu, tetapi juga menjangkau kelompok berpenghasilan rendah. Salah satu contoh, pembangunan IKN di Kabupaten Penajam Paser Utara mampu menciptakan efek ganda (*multiplier effect*) terhadap penyediaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat sekitar, dan tumbuhnya sektor jasa dan konstruksi lokal. Selain itu, mulai adanya diversifikasi ekonomi meskipun belum optimal di beberapa kabupaten/kota seperti Kota Samarinda, Balikpapan, dan Kutai Kartanegara ke sektor perdagangan, jasa, dan pariwisata turut mendorong distribusi pendapatan yang lebih merata. Program perlindungan sosial juga turut memberikan kontribusi terhadap penurunan ketimpangan ekonomi, terutama bagi rumah tangga miskin dan rentan.

Namun, masih terdapat sejumlah tantangan yang harus dihadapi, diantaranya masih adanya ketimpangan pembangunan antar wilayah, terutama wilayah terpencil seperti Kabupaten Mahakam Ulu yang masih mengalami keterbatasan infrastruktur dasar dan aksesibilitas. Selain itu, ketergantungan terhadap sektor ekstraktif (pertambangan) di beberapa kabupaten juga menciptakan struktur ekonomi yang tidak inklusif. Sektor ini memiliki kontribusi besar terhadap PDRB, namun memiliki efek terbatas

terhadap penyerapan tenaga kerja lokal. Lebih lanjut, rendahnya kualitas pendidikan dan keterampilan tenaga kerja di beberapa wilayah menyebabkan kelompok masyarakat tertentu sulit bersaing dalam pasar kerja formal yang memberikan upah layak.

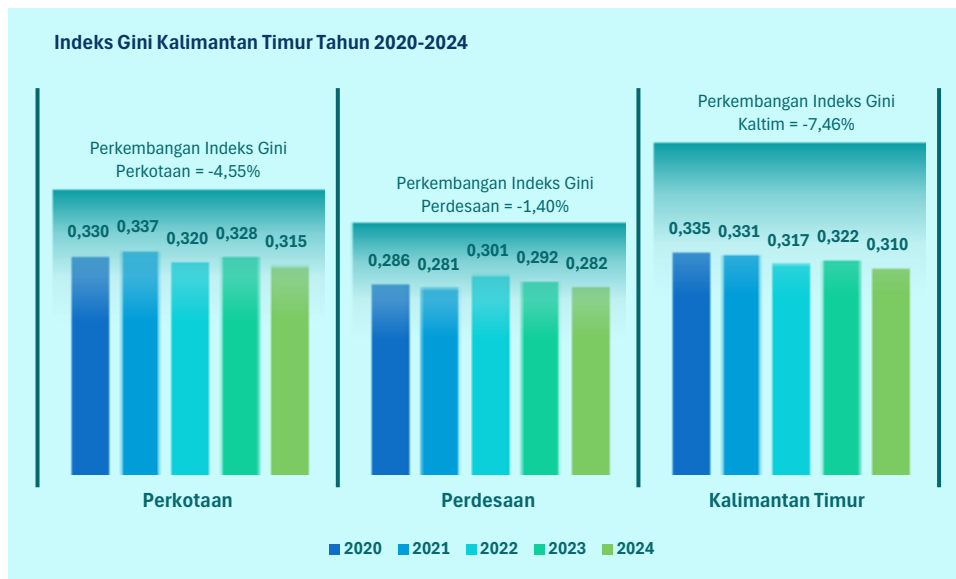


Gambar 2.21. Indeks Gini Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2020–2024), Koefisien Gini di Provinsi Kalimantan Timur menunjukkan tren penurunan, baik di wilayah perkotaan maupun perdesaan. Koefisien Gini di kawasan perkotaan menurun dari 0,333 pada tahun 2020 menjadi 0,315 pada tahun 2024, mencerminkan penurunan sebesar 0,018 poin atau sekitar 5,41%. Sementara itu, di wilayah perdesaan, Koefisien Gini turun dari 0,289 menjadi 0,282 dalam periode yang sama, menunjukkan penurunan sebesar 0,007 poin atau sekitar 2,42%. Di kawasan perkotaan, penurunan Indeks Gini dipengaruhi oleh pertumbuhan sektor ekonomi non-formal, kemudahan akses lapangan kerja, dan kebijakan sosial yang mendukung kelompok rentan. Sementara itu, di wilayah perdesaan, penurunan ketimpangan lebih dipengaruhi oleh meningkatnya intervensi program perlindungan sosial, perluasan infrastruktur dasar meskipun belum optimal, seperti jalan dan listrik, dan pengembangan pertanian terpadu yang mendukung pendapatan masyarakat desa secara lebih merata.

Beberapa faktor pendukung penurunan Indeks Gini di wilayah perkotaan dan pedesaan lebih didorong dengan adanya penguatan kebijakan

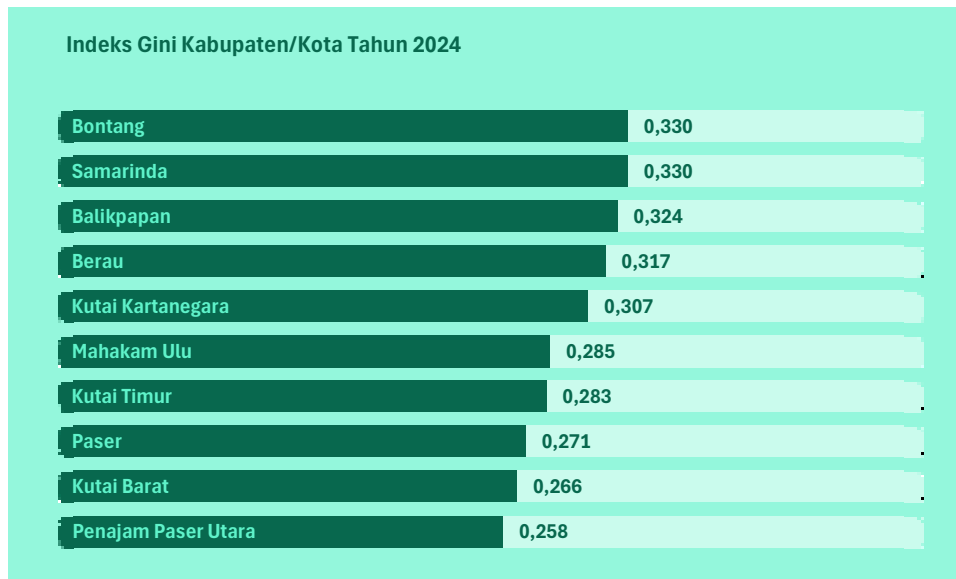
sosial ekonomi, pertumbuhan usaha mikro, dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam sektor informal dan pertanian. meskipun demikian, masih terdapat tantangan yang dihadapi, terutama masih adanya ketimpangan spasial antar wilayah, dan ketergantungan ekonomi terhadap sektor ekstraktif. Selain itu, rendahnya kualitas pendidikan dan keterampilan tenaga kerja di beberapa daerah turut memperlebar kesenjangan pembangunan.



Gambar 2.22. Indeks Gini perkotaan dan Perdesaan di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024

2.5.2 Ketimpangan Pendapatan Kabupaten/Kota

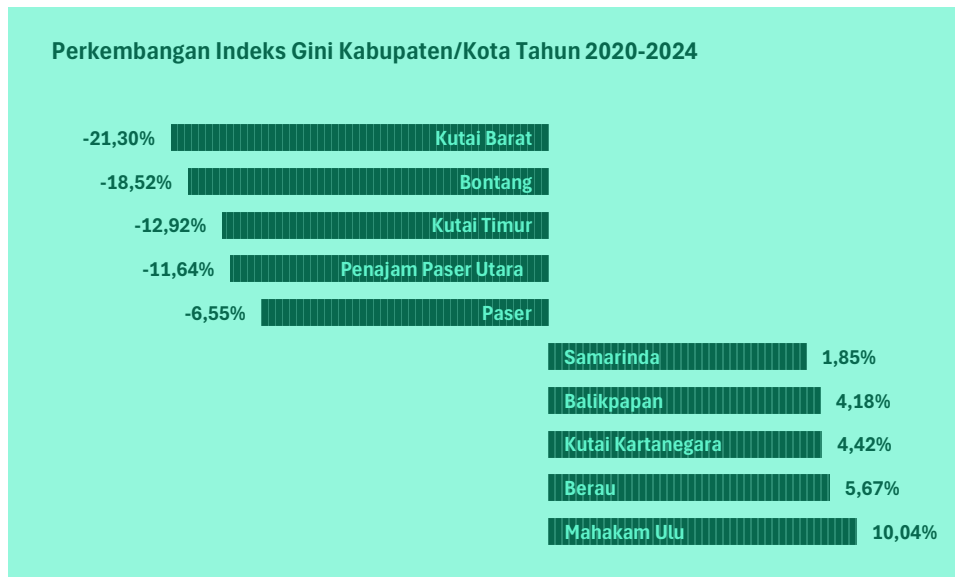
Distribusi pendapatan di kabupaten/kota Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2024 menunjukkan pola yang beragam, namun secara umum tingkat ketimpangan pendapatan di wilayah ini tetap berada di bawah rata-rata nasional sebesar 0,381. Beberapa faktor pendorong capaian Indeks Gini di kabupaten/kota, diantaranya adanya pertumbuhan sektor ekonomi non-formal, peningkatan akses terhadap lapangan kerja, dan implementasi kebijakan sosial dan ekonomi yang mendukung kelompok berpenghasilan rendah. Meskipun indikator ketimpangan di kabupaten/kota menunjukkan perbaikan, upaya peningkatan akses pendidikan, pelatihan vokasional, dan perluasan lapangan kerja di sektor non-ekstraktif masih perlu terus diperkuat agar capaian Indeks Gini dapat berlangsung secara berkelanjutan dan merata di seluruh wilayah provinsi ini.



Gambar 2.23. Indeks Gini Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024

Perkembangan Indeks Gini di kabupaten/kota Provinsi Kalimantan Timur selama periode 2020–2024 menunjukkan dinamika yang beragam. Beberapa daerah mengalami penurunan ketimpangan pendapatan, sementara lainnya mencatat peningkatan. Kabupaten Kutai Barat mencatat penurunan Indeks Gini terbesar, yaitu sebesar 21,30%, diikuti oleh Kota Bontang (18,52%), Kabupaten Kutai Timur (12,92%), Kabupaten Penajam Paser Utara (11,64%), dan Kabupaten Paser (6,55%). Penurunan ini diakibatkan dari adanya peningkatan akses terhadap lapangan kerja, pertumbuhan sektor ekonomi non-formal, dan implementasi kebijakan sosial dan ekonomi yang mendukung kelompok berpenghasilan rendah.

Sebaliknya, beberapa daerah mengalami peningkatan Indeks Gini, yang mengindikasikan meningkatnya ketimpangan pendapatan. Kabupaten Mahakam Ulu mencatat peningkatan tertinggi sebesar 10,04%, diikuti oleh Kabupaten Berau (5,67%), Kabupaten Kutai Kartanegara (4,42%), Kota Balikpapan (4,18%), dan Kota Samarinda (1,85%). Peningkatan ketimpangan ini dapat disebabkan oleh ketergantungan terhadap sektor pertambangan yang menciptakan struktur ekonomi yang tidak inklusif, ketimpangan pembangunan antar wilayah, dan rendahnya kualitas pendidikan dan keterampilan tenaga kerja di beberapa wilayah.



Gambar 2.24. Perkembangan Indeks Gini Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur Periode Tahun 2020-2024

2.6. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita

2.6.1 Perkembangan PDRB Per Kapita Provinsi Kalimantan Timur

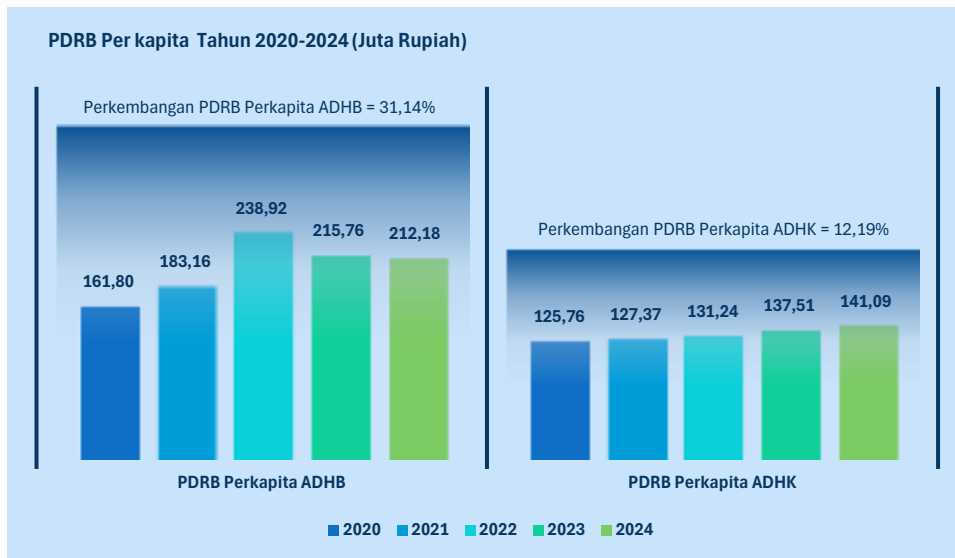
Salah satu indikator penting dalam mengukur kinerja ekonomi suatu daerah adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita, yang dihitung dengan membagi total PDRB dengan jumlah penduduk di wilayah tersebut. PDRB per kapita mempresentasikan besarnya kontribusi rata-rata setiap penduduk terhadap total output ekonomi dalam periode tertentu. Jika dihitung berdasarkan harga berlaku, PDRB per kapita menunjukkan nilai keseluruhan produksi ekonomi yang dihasilkan per individu tanpa disesuaikan dengan inflasi. Selain berperan sebagai indikator pertumbuhan ekonomi, PDRB per kapita juga dapat menjadi parameter penting dalam mengevaluasi tingkat kesejahteraan masyarakat serta seberapa besar peran ekonomi yang dimainkan oleh individu dalam suatu daerah. Oleh karena itu, setiap perubahan dalam nilai indikator PDRB per kapita dapat memberikan informasi mengenai perkembangan struktur ekonomi daerah, keberhasilan implementasi kebijakan pembangunan, dan daya saing relatif antar wilayah.

Selama periode tahun 2020 hingga tahun 2024, Provinsi Kalimantan Timur mencatat peningkatan yang signifikan dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB), yakni

sebesar Rp50,38 juta atau tumbuh 31,14%. Pada tahun 2020, nilai PDRB per kapita ADHB berada pada angka Rp161,80 juta dan meningkat menjadi Rp212,18 juta pada tahun 2024. Sementara itu, nilai PDRB per kapita Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) juga mengalami kenaikan sebesar Rp15,33 juta atau 12,19%, dari semula Rp125,76 juta pada tahun 2020 menjadi Rp141,09 juta pada tahun 2024.

Kenaikan nilai PDRB per kapita berdasarkan ADHB menggambarkan pertumbuhan ekonomi secara nominal yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk perluasan aktivitas ekonomi di Kalimantan Timur dan peningkatan harga komoditas unggulan yang menjadi tumpuan utama daerah. Sebaliknya, pertumbuhan pada PDRB per kapita berdasarkan ADHK mencerminkan peningkatan kapasitas produksi secara riil yang bebas dari pengaruh fluktuasi harga. Meskipun demikian, perbedaan tingkat pertumbuhan antara ADHB dan ADHK yang menunjukkan selisih signifikan mencerminkan adanya tekanan inflasi di Kalimantan Timur yang dapat berdampak pada daya beli masyarakat serta kestabilan ekonomi regional.

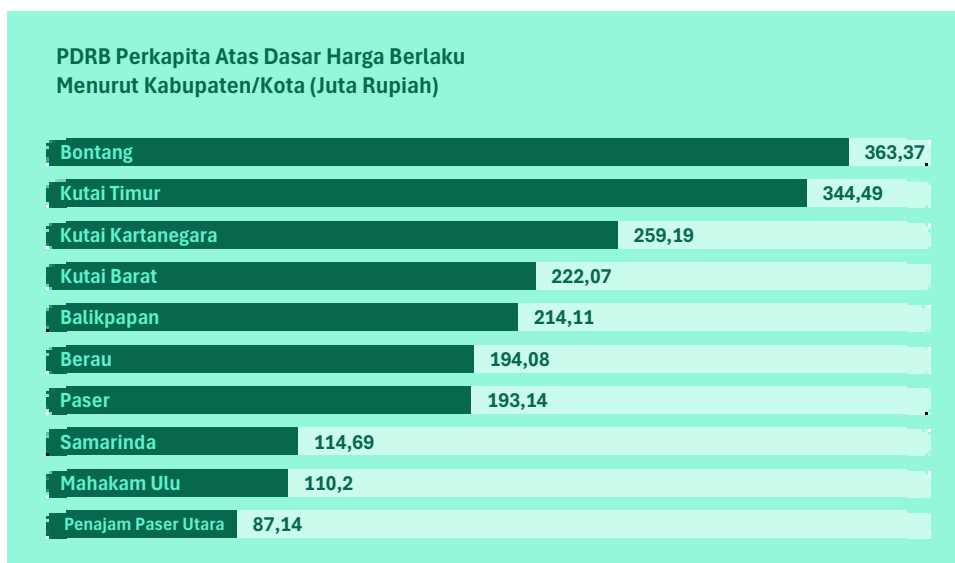
Provinsi Kalimantan Timur berhasil menempati posisi kedua secara nasional dalam hal PDRB per kapita pada tahun 2024. Jika dilihat berdasarkan Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB), nilai PDRB per kapita provinsi ini mencapai Rp212,18 juta, hanya berada di bawah DKI Jakarta yang mencatatkan angka tertinggi sebesar Rp344,35 juta. Adapun menurut perhitungan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK), Kalimantan Timur tetap berada di peringkat kedua dengan capaian sebesar Rp141,09 juta, sedangkan posisi pertama kembali ditempati oleh DKI Jakarta dengan nilai sebesar Rp201,32 juta.



Gambar 2.25. PDRB Per Kapita Kalimantan Timur Tahun 2020-2024

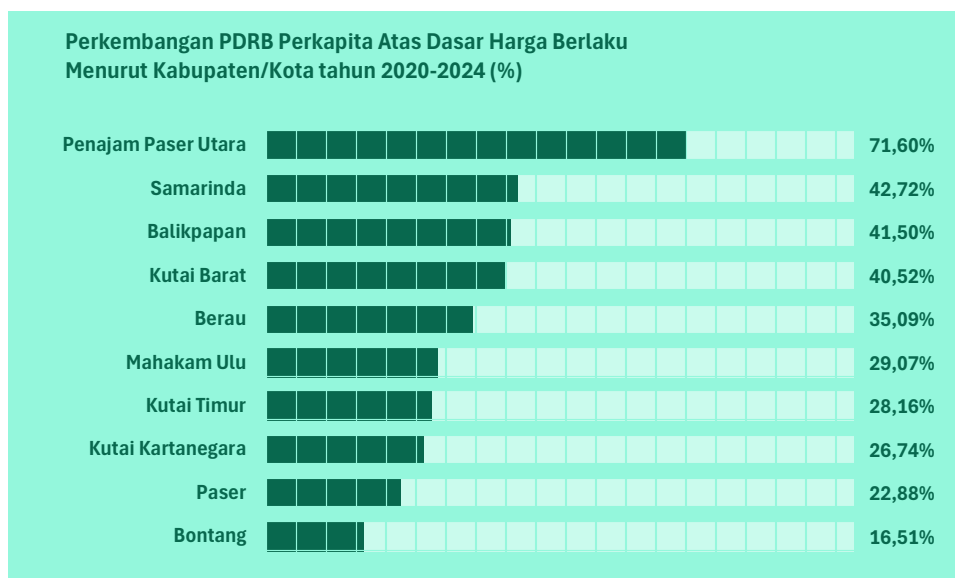
2.6.2 Perkembangan PDRB Per Kapita (ADHB) Kabupaten/Kota

Kota Bontang pada tahun 2024 tercatat sebagai daerah dengan PDRB per kapita (ADHB) tertinggi di Provinsi Kalimantan Timur, yakni sebesar Rp363,37 juta, diikuti Kabupaten Kutai Timur dengan capaian Rp344,49 juta, dan Kabupaten Kutai Kartanegara dengan nilai Rp259,19 juta. Sebaliknya, tiga daerah dengan PDRB per kapita ADHB terendah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara sebesar Rp87,14 juta, kemudian Kabupaten Mahakam Ulu sebesar Rp110,20 juta, serta Kota Samarinda sebesar Rp114,69 juta.



Gambar 2.26. PDRB Per Kapita ADHB Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024

Selama kurun waktu tahun 2020 hingga tahun 2024, Kabupaten Penajam Paser Utara menunjukkan peningkatan tertinggi dalam PDRB per kapita ADHB di antara seluruh kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur. PDRB per kapita ADHB Kabupaten Penajam Paser Utara tumbuh mencapai 71,60%. Capaian ini menempatkan kabupaten tersebut sebagai wilayah dengan laju pertumbuhan tercepat, diikuti oleh Kota Samarinda yang mencatat kenaikan sebesar 42,72%, dan Kota Balikpapan dengan peningkatan sebesar 41,50%. Di sisi lain, tiga daerah dengan pertumbuhan PDRB per kapita ADHB terendah dalam periode yang sama adalah Kota Bontang (16,51%), Kabupaten Paser (22,88%), dan Kabupaten Kutai Kartanegara (26,74%).

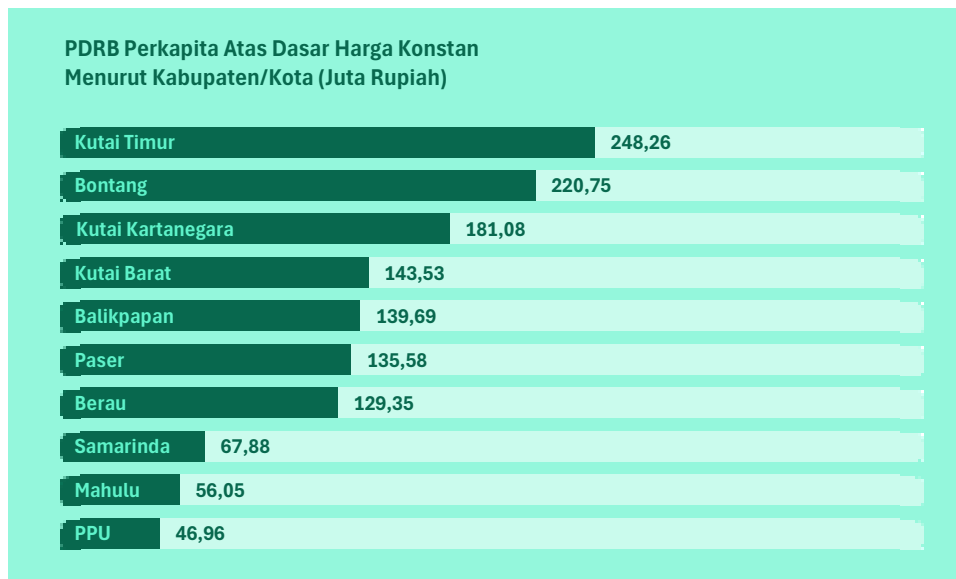


Gambar 2.27. Perkembangan PDRB Per Kapita ADHB Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur Periode Tahun 2020-2024

2.6.3 Perkembangan PDRB Per Kapita (ADHK) Kabupaten/Kota

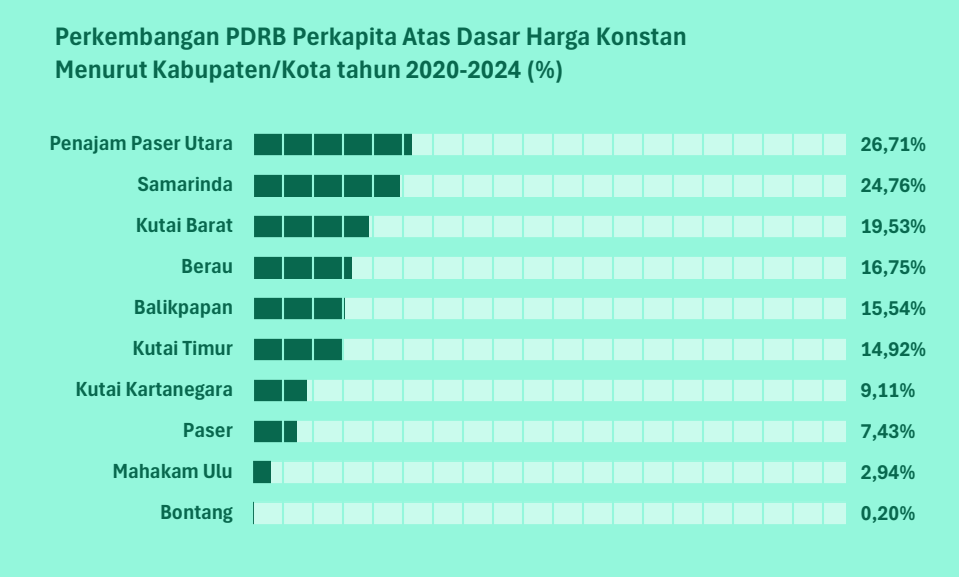
Pada tahun 2024, Kabupaten Kutai Timur menempati peringkat tertinggi dalam hal nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita atas dasar harga konstan (ADHK) di Provinsi Kalimantan Timur, yakni sebesar Rp248,26 juta. Peringkat selanjutnya diisi oleh Kota Bontang dengan nilai sebesar Rp220,75 juta, dan Kabupaten Kutai Kartanegara yang mencatatkan angka Rp181,08 juta. Di sisi lain, Kabupaten Penajam Paser

Utara menunjukkan capaian PDRB per kapita ADHK terendah sebesar Rp46,96 juta, diikuti oleh Kabupaten Mahakam Ulu sebesar Rp56,05 juta dan Kota Samarinda sebesar Rp67,88 juta.



Gambar 2.28. PDRB Per Kapita ADHK Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024

Selama periode tahun 2020 hingga tahun 2024, Kabupaten Penajam Paser Utara mencatatkan kinerja tertinggi dalam pertumbuhan PDRB per kapita atas dasar harga konstan (ADHK) di Kalimantan Timur, dengan tingkat pertumbuhan mencapai 26,71%. Pencapaian ini mencerminkan percepatan aktivitas ekonomi riil per kapita di kabupaten tersebut. Kota Samarinda menempati posisi kedua dengan pertumbuhan sebesar 24,76%, disusul oleh Kabupaten Kutai Barat dengan peningkatan sebesar 19,53%. Sebaliknya, kinerja terendah dicatat oleh Kota Bontang yang hanya tumbuh sebesar 0,20%, diikuti oleh Kabupaten Mahakam Ulu (2,94%) dan Kabupaten Paser (7,43%).



Gambar 2.29. Perkembangan PDRB Per Kapita ADHK Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur Periode Tahun 2020-2024

BAB III
EVALUASI KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Dalam penganggaran, keuangan daerah merupakan dokumen perencanaan yang merinci potensi dan mengalokasikannya pada belanja. Potensi yang dimaksud diukur dalam satuan rupiah. Keuangan Daerah tertuang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang didalamnya mencatat semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam satu tahun fiskal.

Sebagai dasar kebijakan menjalankan keuangan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah, APBD akan disetujui oleh pihak legislatif yaitu DPRD, sebelum diserahkan dan ditetapkan oleh kepala daerah sebagai pimpinan eksekutif untuk melakukan pengeluaran dalam rangka menjalankan roda pemerintahan daerah. APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah yang meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Pada tahun 2025, APBD Kaltim di tetapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Dengan struktur besar APBD sebagai berikut:

Tabel 3.1 Konsistensi pelaksanaan target RKPD pada keuangan daerah

Kode Rek	Komponen Pendapatan	Target RKPD Tahun 2025 (Rp)	Target APBD Tahun 2025 (Rp)	Keterangan
4	Pendapatan Daerah	20,100,000,000,000.00	20,080,499,012,000.00	Lebih kecil dibanding target RKPD
4.1	Pendapatan Asli Daerah	10,035,157,739,563.00	10,035,157,739,563.00	Konsisten
4.2	Pendapatan Transfer	9,862,791,865,296.00	9,843,290,877,296.00	Lebih kecil dibanding target RKPD
4.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	202,050,395,141.00	202,050,395,141.00	Konsisten

Kode Rek	Komponen Pendapatan	Target RKPD Tahun 2025 (Rp)	Target APBD Tahun 2025 (Rp)	Keterangan
5	Belanja	20,950,000,000,000.00	20,930,499,012,000.00	Lebih kecil dibanding target RKPD
5.01	Belanja Operasi	9,810,556,664,850.00	10,042,439,899,574.00	Lebih kecil dibanding target RKPD
5.02	Belanja Modal	4,584,692,185,150.00	3,996,396,021,235.00	Lebih kecil dibanding target RKPD
5.03	Belanja Tidak Terduga	100,000,000,000.00	174,965,591,911.00	Lebih besar dibanding target RKPD
5.04	Belanja Transfer	6,454,751,150,000.00	6,716,697,499,280.00	Lebih besar dibanding target RKPD
6	Pembiayaan			
6.1	Penerimaan Pembiayaan	900,000,000,000.00	900,000,000,000.00	Konsisten
6.2	Pengeluaran Pembiayaan	50,000,000,000.00	900,000,000,000.00	Penyesuaian keuangan daerah
	Pembiayaan Netto		850,000,000,000.00	
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SiLPA)	0.00	0.00	

RKPD Kaltim ditetapkan dalam Pergub Kaltim No. 26 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kaltim 2025. Terjadi perubahan pagu pendapatan pada RKPD dan APBD. Dalam RKPD ditetapkan keuangan Kaltim sebesar Rp21,000,000,000,000, sedangkan implementasi pada APBD menjadi 20,980,499,012,000. Turunnya nilai tersebut disebabkan perbuahan pagu pada pendapatan. Dimana pada RKPD ditetapkan pendapatan sebesar Rp20,100,000,000,000 berubah menjadi Rp20,080,499,012,000 atau turun sebesar 0.10% atau Rp19,500,988,000. Nilai tersebut merupakan kumulatif dari seluruh pendapatan daerah dianggarkan dalam APBD. Penyusunan pendapatan dilukan secara bruto yaitu jumlah pendapatan yang dianggarkan tidak dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan

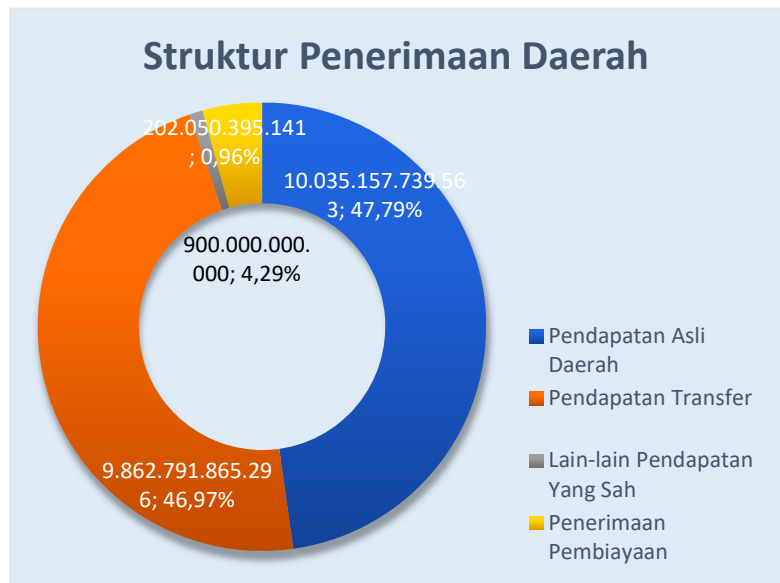
pendapatan tersebut. Perhitungan pendapatan daerah juga mempertimbangkan share/bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil; realisasi dan perkembangan pendapatan pada beberapa tahun terakhir; asumsi dasar dari capaian ekonomi makro dan kondisi ekonomi daerah (potensi daerah).

Penyesuaian pada pagu pendapatan tersebut diikuti dengan penyesuaian pada belanja. Dimana dengan prinsip anggaran berimbang, yang menetapkan belanja (total belanja + pengeluaran pembiayaan) sama besar dengan pendapatan daerah (total pendapatan + penerimaan pembiayaan). Pada RKPD 2025 ditetapkan belanja sebesar Rp20,950,000,000,000 menjadi Rp20,930,499,012,000 pada APBD (pergeseran). Secara umum, hal tersebut dipengaruhi oleh **perubahan besaran pendapatan transfer yang merupakan kewenangan pemerintah pusat**. Komponen belanja daerah yang mengalami penurunan terbesar adalah pada belanja modal, yaitu direncanakan dalam RKPD sebesar Rp4,584,692,185,150 turun sebesar 12.83% menjadi Rp3,996,396,021,235. Secara detail, komponen pada APBD akan dibahas sebagai berikut.

3.1. Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Berjalan

Secara kumulatif, capaian pendapatan daerah Kaltim triwulan I sebesar 16.78% (dihitung dari target RKPD) atau sebesar Rp3,372,711,574,151. Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2025, merupakan menjabaran dari RKPD dalam KUA PPAS yang merupakan proyeksi terukur terhadap objek pendapatan untuk dicapai dan memiliki kepastian hukum sebagai dasar penerimaannya. APBD terdiri atas Anggaran Pendapatan yaitu 1). (Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang meliputi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah, dan Penerimaan lainnya); 2). Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat, yang terdiri dari dana perimbangan (yang meliputi Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK)); Dana Insentif Daerah (DID); dan Dana Insentif Fiskal; serta 3). Pendapatan lain-lain yang sah yang meliputi Dana Hibah dan Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

PAD masih menjadi sumber pendapatan utama di Kaltim, dimana pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 47.79% penerimaan daerah bersumber dari PAD yaitu sebesar Rp 10,035,157,739,563. Hal tersebut menunjukkan **Kaltim memiliki kemandirian keuangan daerah yang bersumber dari pajak dan retribusi.** Peran transfer keuangan daerah juga mendominasi keuangan daerah di Kaltim, yaitu berkontribusi sebesar 46.97% atau Rp9,862,791,865,296. Rincian pendapatan daerah sebagai berikut.



Tabel 3.2 Realisasi Pendapatan Daerah Tw-I Tahun 2025

Kode Rek	Komponen Pendapatan	Target RKPD Tahun 2025 (Rp)	Target APBD Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Tw-I Tahun 2025 (Rp)	Capaian Tw-I 2025
4	Pendapatan Daerah	20,100,000,000,000	20,080,499,012,000	3,372,711,574,151	16.78
4.1	Pendapatan Asli Daerah	10,035,157,739,563	10,035,157,739,563	1,874,705,964,915	18.68
4.1.01	Pajak Daerah	8,400,000,000,000	8,400,000,000,000	1,629,920,688,647	19.40
4.1.02	Retribusi Daerah	1,070,333,040,395	1,070,333,040,395	154,088,102,891	14.40
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yg Dipisahkan	449,309,792,556	449,309,792,556	13,613,207,593	3.03
4.1.04	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	115,514,906,612	115,514,906,612	77,083,965,784	66.73
4.2	Pendapatan Transfer	9,862,791,865,296	9,843,290,877,296	1,493,914,384,236	15.15
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	9,862,791,865,296	9,843,290,877,296	1,493,914,384,236	15.15
4.2.01.01	Dana Perimbangan	9,862,791,865,296	9,821,876,211,296	1,493,914,384,236	

Kode Rek	Komponen Pendapatan	Target RKPD Tahun 2025 (Rp)	Target APBD Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Tw-I Tahun 2025 (Rp)	Capaian Tw-I 2025
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil (DBH)	8,322,263,421,296	8,120,244,188,296	1,250,213,223,250	15.02
4.2.01.01.02	Dana Alokasi Umum (DAU)	857,919,020,000	1,049,286,349,000	241,889,572,250	28.19
4.2.01.01.03	Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	190,152,584,000	72,197,874,000	0	0.00
4.2.01.01.04	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	492,456,838,000	580,147,800,000	1,811,588,736	0.37
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah (DID)			0	-
4.2.01.03	Dana Insentif Fiskal		21,414,666,000	0	0.00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	202,050,395,141	202,050,395,141	4,091,225,000	2.02
4.03.01	Hibah	13,864,392,517	13,864,392,517	4,091,225,000	29.51
4.03.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	188,186,002,624	188,186,002,624	0	0.00

Penerimaan daerah di Kaltim memiliki kecenderungan meningkat setiap tahunnya, baik dari sisi pertumbuhan pendapatan asli daerah, maupun dana transfer keuangan daerah. Pendapatan asli daerah (PAD) di Kaltim pada triwulan I 2025 mencapai Rp1,874,705,964,915 atau **telah tercapai 16.68% dari total target PAD**. Capaian realisasi PAD terbesar pada Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebesar 66.73%. Didalamnya meliputi sumber penerimaan yaitu Pendapatan Denda Pajak Daerah; Pendapatan Bunga; Pendapatan BLUD; Jasa Giro; dan lainnya namun dengan pagu yang relatif kecil.

Sebesar 83.71% PAD bersumber dari pajak daerah; 10.67% bersumber dari retribusi daerah; 4.48% bersumber dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yg Dipisahkan; dan 1.15% bersumber dari Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah. Dominasi pajak daerah di Kaltim bersumber dari pungutan Pajak Bahan

Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB); Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB); dan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Sedangkan nilai dari Pajak Air Permukaan; Pajak Rokok; Pajak Alat Berat; dan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MLB) masih memiliki nilai yang relatif kecil. Sedangkan untuk pungutan retribusi, sebagian besar bersumber dari Retribusi Jasa Umum yang meliputi Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah. Pada triwulan I 2025, retribusi yang dapat direalisasinya sebesar 14.40% atau Rp154,088,102,891 dari target RKPD Rp1,070,333,040,395.

Pemerintah daerah Kaltim **perlu melakukan optimalisasi pada PAD yang bersumber dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yg Dipisahkan** dimana hanya ditargetkan berkontribusi sebesar 4.48% pada PAD atau 2.24% pada pendapatan daerah. Realisasi sampai dengan triwulan I 2025 sebesar 3.03%. Pada komponen tersebut bersumber dari Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN dan BUMD. Terdapat 7 BUMD yang dimiliki Kaltim, yaitu: PT. BPD Kaltimara; PD. Melati Bhakti Satya; PD. Bara Kaltim Sejahtera; PT. Migas Mandiri Pratama Kalimantan Timur; PT. Jamkrida Kaltim; PT. Ketenagalistrikan Kalimantan Timur; dan PD. Sylva Kaltim Sejahtera.

Pada komponen selanjutnya, **Pendapatan Transfer memiliki realisasi total sebesar 15.15%** atau Rp1,493,914,384,236 pada triwulan I 2025. Dana transfer atau bersumber dari 3 komponen, yaitu dana perimbangan, Dana Insentif Daerah (DID), dan Dana Insentif Fiskal. Namun Dana Insentif Daerah (DID), dan Dana Insentif Fiskal belum memiliki realisasi sampai dengan triwulan I 2025.

Komponen Dana Perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH); Dana Alokasi Umum (DAU); Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik; dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik, hal tersebut diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; dan PP Nomor 37 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah. Dengan rincian sebagai berikut:

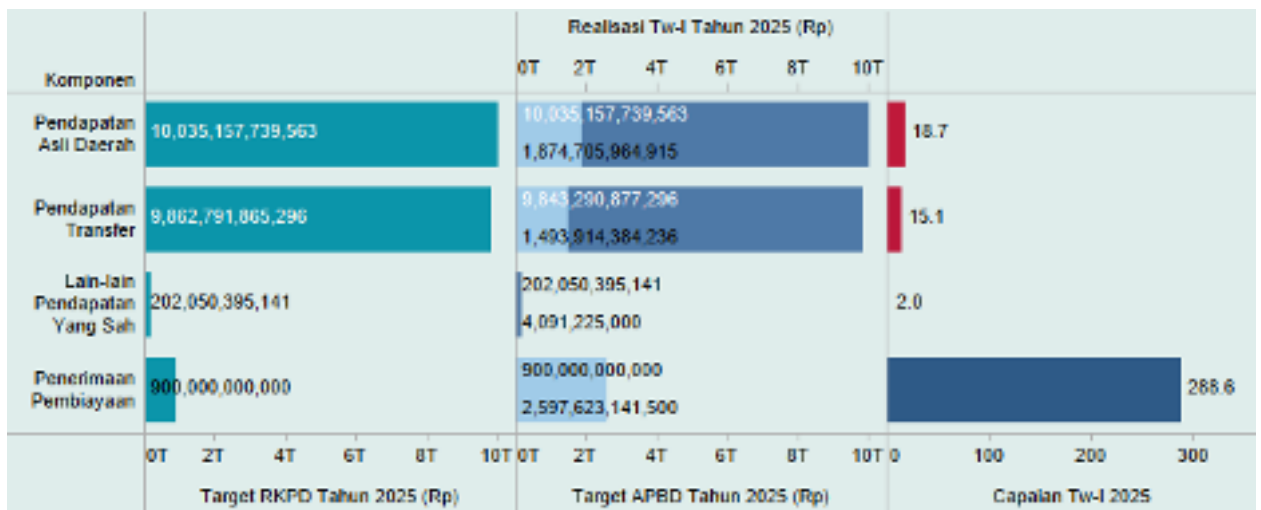
1. DBH memiliki capaian 15.02% pada triwulan I. DBH bertujuan untuk mengurangi ketimpangan flskal antara pemerintah dan Daerah, serta kepada Daerah lain nonpenghasil dalam rangka menanggulangi eksternalitas negatif dan/ atau meningkatkan pemerataan dalam suatu wilayah. DBH dialokasikan berdasarkan persentase atas pendapatan tertentu dalam APBN dan kinerja tertentu. Dari seluruh komponen TKD, **alokasi DBH Sumber Daya Alam (SDA) merupakan komponen dana terbesar di Kaltim.** Pada tahun 2024, Kaltim dianggarkan menerima Rp 7,141,354,451,763 atau 72.4% dari total TKD.
2. DAU pada triwulan I 2025 memiliki realisasi 28.19% atau Rp 241,889,572,250. DAU dialokasikan oleh pemerintah pusat dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan dan layanan publik antar daerah, dengan pertimbangan: kebutuhan pelayanan publik sebagai bagian dari pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah; pagu TKD secara keseluruhan; target pembangunan nasional; dan kemampuan Keuangan Negara. Sehingga **daerah yang cenderung memiliki kemampuan kemandirian daerah akan menerima DAU yang lebih rendah.** Dimana DAU ditujukan untuk menutupi celah fiskal (selisih antara kebutuhan fiskal daerah dengan potensi pendapatan Daerah). Namun penggunaan DAU ditentukan penggunaannya urusan layanan umum pada daerah untuk mendukung penggajian Pegawai Pemerintah dengan dan mendukung pembangunan sarana dan prasarana, pemberdayaan masyarakat di kelurahan (pada tingkat kabupaten/kota; dan DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya.
3. Dana Alokasi Khusus (DAK) yang ditujukan untuk mendanai program/kebijakan tertentu yang menjadi prioritas nasional dan membantu operasionalisasi layanan publik, yang penggunaannya telah ditentukan oleh pemerintah. DAK terdiri dari DAK Fisik dan Non Fisik. **DAK Fisik belum memiliki realisasi pada triwulan I.** Hal tersebut disebabkan pada tw. I, daerah masih menunggu petunjuk teknis penggunaan dana DAK yang diatur oleh kementerian/lembaga sesuai dengan fungsinya yang

dialokasikan berdasarkan pembangunan/pengadaan sarana dan prasarana layanan publik daerah dalam rangka mencapai prioritas nasional, mempercepat pembangunan daerah, mengurangi kesenjangan layanan publik, dan/atau mendorong pertumbuhan perekonomian daerah. Sedangkan DAK Nonfisik dialokasikan untuk memfasilitasi operasionalisasi layanan publik daerah yang penggunaannya telah ditentukan oleh pemerintah pusat. **DAK nonfisik memiliki realisasi 0.37% pada triwulan I.** Pada tahun 2025 di Kaltim, DAK Nonfisik dialokasikan untuk BOP Museum dan Taman Budaya-Museum; BOP Museum dan Taman; Bantuan Operasional Keluarga Berencana; Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak; Bantuan Operasional satuan pendidikan; dan Tunjangan Guru ASN Daerah.

Pada RKPD, tidak ditargetkan untuk penerimaan yang bersumber dari DID. DID merupakan dana yang dialokasikan dari ABPN kepada daerah tertentu berdasarkan kriteria/kategori tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan (penghargaan pembangunan daerah, inovasi daerah, pengendalian inflasi, dan lainnya) dan/atau pencapaian kinerja tertentu pada bidang tata kelola keuangan daerah (digitalisasi pelayanan dasar dan pelayanan umum pemerintahan); memenuhi opini BPK atas LKPD dengan kategori opini wajar tanpa pengecualian (WTP); dan kriteria ketepatan waktu penetapan perda ABPD (t-1). pelayanan dasar publik, dan kesejahteraan masyarakat. Namun penyaluran dana tersebut, sepenuhnya merupakan kewenangan pemerintah pusat.

Sedangkan untuk dana insentif fiskal (DIF), tidak ditargetkan pada RKPD, namun dialokasikan pada ABPD sebesar Rp 21,414,666,000 namun belum memiliki realisasi. Insentif fiskal diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Insentif Fiskal atas Pencapaian Kinerja Daerah. Sama halnya dengan DID, DIF sepenuhnya merupakan kewenangan pusat, dengan kriteria utama adalah diberikan pada pengendalian inflasi daerah.

Pada komponen Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah, terdapat Pendapatan Hibah dengan pagu Rp 13,864,392,517; dan Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dengan pagu Rp188,186,002,624 (belum terdapat realisasi). Hibah merupakan pendapatan untuk mendukung pembangunan fisik dan/atau layanan publik di Daerah tertentu yang didasarkan pada perjanjian antara Pemerintah daerah dan/atau kementerian/lembaga. Secara visual capaian pendapatan daerah Kaltim sebagai berikut:



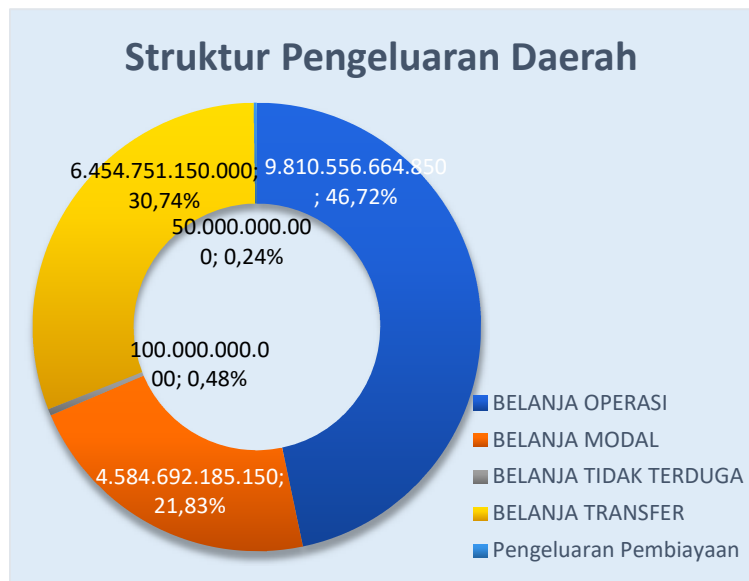
Gambar 3.1 Capaian Pendapatan Daerah

Pendapatan Asli daerah telah mncapai 18.7% lebih tinggi dibandingkan dengan TKD sebesar 15.1% pada triwulan I. Sedangkan capaian sangat rendah pada Lain-lain pendapatan yang sah, yaitu sebesar 2% dari target. Nanum, jika melihat komponen Penerimaan daerah, yaitu Penerimaan Pembiayaan, ditargetkan sebesar Rp900,000,000,000 telah direalisasikan sebesar Rp2,597,623,141,500 atau dengan capaian **288.62% yang sepenuhnya bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA). Hal tersebut menjadi salah satu dasar untuk melakukan penyesuaian pada APBD-P 2025.**

3.2. Realisasi Belanja Daerah Tahun Berjalan

Anggaran Belanja merupakan dana (dalam rupiah) yang digunakan untuk keperluan penyelenggaraan tugas pemerintahan di daerah. **Capaian belanja daerah pada triwulan I 2025 sebesar 5.48% atau Rp1,148,050,536,344. Nilai tersebut relatif sangat kecil jika dibandingkan dengan capaian penerimaan daerah.** Terdapat

4 komponen belanja, yaitu Belanja Operasi meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, dan Belanja Bantuan Sosial; Belanja Modal yaitu belanja dengan masa manfaat barang/jasa lebih dari satu periode anggaran/tahun; Belanja Tidak Terduga; Belanja Transfer; dan Pengeluaran pembiayaan.



Pada tahun 2025, direncanakan dalam RKPD untuk alokasi belanja pada belanja oprasional sebesar Rp 9,810,556,664,850 atau 46.72% dari APBD Kaltim, komponen terbesar berada pada Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa. Selanjutnya pada belanja transfer sebesar Rp 6,454,751,150,000 atau 30.74% yang meliputi Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan. Untuk komponen belanja modal, dialokasikan sebesar Rp4,584,692,185,150 atau 21.38%. Dan belanja tidak terduga dengan besaran yang relatif kecil. Rincian anggaran dan realisasi belanja sebagai berikut.

Tabel 3.3 Realisasi Belanja Daerah Tw-I Tahun 2025

Kode Rek	Komponen Pendapatan	Target RKPD Tahun 2025 (Rp)	Target APBD Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Tw-I Tahun 2025 (Rp)	Capaian Tw-I 2025
5	BELANJA	20,950,000,000,000	20,930,499,012,000	1,148,050,536,344	5.48
5.01	BELANJA OPERASI	9,810,556,664,850	10,042,439,899,574	1,123,705,827,863	11.45

Kode Rek	Komponen Pendapatan	Target RKPD Tahun 2025 (Rp)	Target APBD Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Tw-I Tahun 2025 (Rp)	Capaian Tw-I 2025
5.01.01	Belanja Pegawai	4,412,130,684,749	4,493,488,175,420	661,345,246,633	14.99
5.01.02	Belanja Barang dan Jasa	4,670,151,179,801	4,808,707,486,384	412,360,581,230	8.83
5.01.04	Belanja Subsidi		0	0	0.00
5.01.05	Belanja Hibah	700,614,300,300	715,660,737,770	50,000,000,000	7.14
5.01.06	Belanja Bantuan Sosial	27,660,500,000	24,583,500,000	0	0.00
5.02	BELANJA MODAL	4,584,692,185,150	3,996,396,021,235	24,344,708,481	0.53
5.03	BELANJA TIDAK TERDUGA	100,000,000,000	174,965,591,911	0	0.00
5.04	BELANJA TRANSFER	6,454,751,150,000	6,716,697,499,280	0	0.00
5.04.01	Belanja Bagi Hasil	4,401,500,000,000	4,663,446,349,280	0	0.00
5.04.02	Belanja Bantuan Keuangan	2,053,251,150,000	2,053,251,150,000	0	0.00

Pada belanja Operasional, terjadi penambahan pagu pada RKPD sebesar Rp 9,810,556,664,850 menjadi Rp 10,042,439,899,574 pada APBD yang disebabkan oleh penambahan belanja pegawai akibat tambahan CPNS dan P3K yang diikuti dengan penambahan belanja barang dan jasa; dan belanja lainnya yang mengikat. Secara kumulatif, pada triwulan I memiliki realisasi belanja sebesar 11.45% merupakan capaian realisasi tinggi yang disebabkan oleh sifat belanja yang bersifat rutin. Rincian belanja meliputi:

1. Belanja Pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada Gubernur, pimpinan/anggota DPRD, dan Pegawai ASN yang dianggarkan pada belanja OPD bersangkutan, memiliki besaran 21.06% dari total belanja daerah. Pagu belanja pegawai sebesar Rp 4,412,130,684,749 dengan realisasi belanja 14.99% atau Rp 661,345,246,633. Rincian belanja terdiri dari Belanja Gaji dan Tunjangan

ASN (34.30%); Belanja Tambahan Penghasilan ASN (51.88%); Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD (1.39%); Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH (0.06%); Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH (0.34%); dan Belanja Pegawai BLUD (12.01%)

2. Belanja Barang dan Jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa, memiliki besaran 22.29% dari total belanja daerah. Memiliki pagu sebesar Rp4,670,151,179,801 dengan realisasi belanja 8.83% atau Rp412,360,581,230. Rincian belanja terdiri dari Belanja Barang (28.50%); Belanja Jasa (28.51%); Belanja Pemeliharaan (7.80%); Belanja Perjalanan Dinas (13.53%); Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat (6.98%); Belanja Barang dan Jasa BOSP (3.83%); dan Belanja Barang dan Jasa BLUD (10.835). Pada belanja Belanja Perjalanan Dinas telah mengalami penurunan pagu dari Rp 665,540,164,500 menjadi Rp 387,877,436,260 mengikuti Instruksi Presiden 1/2025 Tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
3. Belanja Hibah memiliki pagu sebesar Rp 700,614,300,300 dengan realisasi belanja 7.14%. Hibah diberikan kepada Pemerintah Provinsi kepada Daerah lainnya, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran. Pada tahun 2025, APBD Kaltim memberikan belanja hibah kepada Pemerintah Pusat sebesar 8.11%; BUD sebesar 4.26%; Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebesar 75.26%; Keuangan kepada Partai Politik sebesar 1.04%; dan BOSP sebesar 11.32% dari total pagu belanja hibah. Penyaluran dana hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia ditujukan untuk mitra dalam rangka pembangunan Kaltim.

4. Belanja Bantuan Sosial memiliki pagu sebesar Rp 27,660,500,000 namun belum memiliki realisasi. Bansos digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial. Bansos diberikan kepada individu dan Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya).

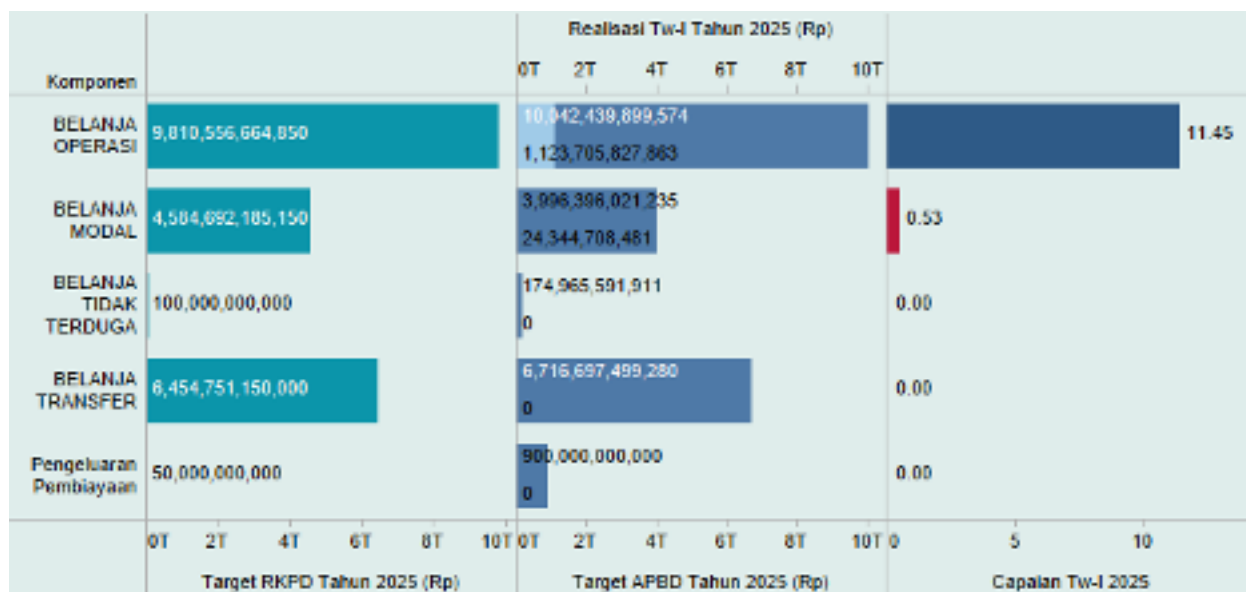
Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memiliki nilai/masa manfaat lebih dari 1 tahun, dengan realisasi sebesar Rp 24,344,708,481 atau 0.53%. Peruntukan belanja modal (Peraturan Pemerintah 12/2019), terdiri dari Belanja Modal Tanah; Belanja Modal Peralatan dan Mesin; Belanja Modal Gedung dan Bangunan; Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi; Belanja Modal Aset Tetap Lainnya; dan Belanja Modal Aset Lainnya. Namun pada triwulan I proses pekerjaan/pengadaan belum dapat direalisasikan. Alokasi belanja modal terbesar di Kaltim pada Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi; dan Belanja Modal Gedung dan Bangunan. Untuk peningkatan pemerataan infrastruktur, diperlukan peningkatan alokasi belanja modal.

Komponen belanja lainnya adalah: **Belanja Tidak Terduga (BTT)** merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya; dan **Belanja Transfer** merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya (Pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa). Kedua komponen belanja tersebut **belum memiliki realisasi per triwulan I**.

BTT wajib dianggarkan pada APBD karena bersifat untuk digunakan pada saat keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya. Dalam PP 77/2020 tentang Pedoman

Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, disebutkan BTT dapat digunakan pada belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib, contohnya belanja pegawai antara lain untuk pembayaran kekurangan gaji/tunjangan; belanja barang dan jasa antara lain untuk pembayaran telepon, air, listrik dan internet; dan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan, kesehatan, melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga, kewajiban pembayaran pokok pinjaman, bunga pinjaman yang telah jatuh tempo, dan kewajiban lainnya.

Belanja transfer dirinci atas 2 jenis, yaitu Belanja Bagi Hasil; dan Belanja Bantuan Keuangan (BBK). Dalam PP 77/2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, disebutkan Belanja bagi hasil digunakan untuk menganggarkan bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota atau pendapatan kabupaten/kota kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kaltim mengalokasikan belanja transfer bagi hasil sebesar Rp4,663,446,349,280 atau sebesar 22.26% dari total belanja daerah Kaltim. Sedangkan BKK dialokasikan mengacu kepada bantuan keuangan bersifat khusus peruntukannya ditetapkan oleh pemerintah daerah pemberi bantuan dan pengelolaannya diserahkan sepenuhnya kepada penerima bantuan. Memiliki pagu sebesar Rp 2,053,251,150,000 atau sebesar 9.80% dari total belanja daerah Kaltim. Secara visual disajikan sebagai berikut:



Gambar 3.2 Rekapitulasi Pengeluaran Daerah

Komponen belanja terbesar di Kaltim berada pada Belanja Operasi (46.72%) yang merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Hal tersebut menyebabkan capaian paling tinggi pada tw.I 2025 untuk belanja yaitu sebesar 11.45%. Sedangkan untuk belanja modal hanya tercapai 0.53% dengan rincian belanja pada tahap persiapan pengadaan barang/jasa modal. Sedangkan untuk komponen pengeluaran lainnya masih belum dapat direlasasikan. Termasuk di dalamnya **belanja transfer dengan dengan total pagu Rp 6,454,751,150,000 (30.74%) memiliki realisasi 0%**. Hal tersebut menjadi penyebab rendahnya capaian keuangan Kaltim pada Triwulan I.

Kejakan efisiensi anggaran juga menjadi penyebab rendahnya realisasi belanja pada triwulan I. Dimana sejumlah belanja perjalanan dinas belum dapat direalisasikan menyebabkan tertundanya kordinasi antar stake holder dan pemerintah daerah lainnya. Perangkat daerah yang paling tinggi mengalami penurunan pagu anggaran sebagai berikut:



Gambar. 3.3 Perangkat Daerah paling terdampak Efisiensi (pengurangan anggaran)

Sumber: Laporan ACKPD triwulan I 2025

Tindaklanjut Instruksi Presiden 1/2025 Tentang Efisiensi Beianja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, adalah penyesuaian pagu anggaran. Refocusing merupakan kebijakan yang lazimnya di lakukan pada APBD-P, namun pada kondisi tertentu (adanya inpres tersebut), sehingga mewajibkan Pemerintah Daerah melakukan pengurangan anggaran/formulasi kembali alokasi anggaran dan/atau perubahan dengan tujuan memastikan penggunaan sumber daya keuangan dapat dilakukan secara tepat sasaran. Namun **diperlukan dasar/regulasi daerah untuk mempertegas arah kebijakan keuangan daerah Kaltim**, sehingga perangkat daerah memiliki daerah dasar dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan dan layanan masyarakat. Terdapat 37 perangkat daerah mengalami penurunan pagu anggaran. Namun juga adanya kenaikan pagu pada BPKAD dari Rp 7,001,852,740,693 menjadi Rp 7,742,896,468,265; Biro Kesejahteraan Rakyat dari Rp 107,207,479,944 menjadi Rp 298,520,338,944; Dinas Kesehatan dari Rp340,349,255,130 menjadi Rp 438,605,328,362; dan DPMPD dari Rp 48,296,390,500 menjadi Rp 53,682,978,276.

3.3. Realisasi Pembiayaan Daerah

Pembiayaan terdiri dari komponen Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Penerimaan pembiayaan meliputi seluruh penerimaan dari rekening kas umum daerah yang akan dibayar kembali di masa yang akan datang, sedangkan Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah yang akan diterima kembali di masa yang akan datang, atau merupakan pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah atas penerimaan pembiayaan di masa lalu. Definisi tersebut, merujuk pada komponen pembiayaan dengan tujuan menyeimbangkan APBD dari kewajiban daerah. Dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 3.4 Realisasi Pembiayaan Daerah Tw-I Tahun 2025

Kode Rek	Komponen Pendapatan	Target RKPD Tahun 2025 (Rp)	Target APBD Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Tw-I Tahun 2025 (Rp)
6	Pembiayaan			2,597,623,141,500.20
6.1	Penerimaan Pembiayaan	900,000,000,000	900,000,000,000	2,597,623,141,500
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	900,000,000,000	900,000,000,000	2,597,623,141,500
6.2	Pengeluaran Pembiayaan	50,000,000,000	900,000,000,000	0
6.2.1	Penyertaan Modal	50,000,000,000	50,000,000,000	0
	Pembiayaan Netto		850,000,000,000	2,597,623,141,500
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)		0	4,822,284,179,307

Pada RKPD 2025, ditargetkan penerimaan pembiayaan sebesar Rp.900.000.000.000. Nilai tersebut diproyeksikan bersumber dari trend Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) pada beberapa tahun sebelumnya. SiLPA dapat bersumber dari penghematan/efisiensi belanja tahun sebelumnya; belanja yang tidak terealisasi kegiatannya, baik yang bersumber dari DBH SDA-DR; kegiatan batal dilaksanakan; dan pelampauan

PAD. Namun, apabila dalam pelaksanaan ABPD 2025 terdapat hal-hal yang mengakibatkan sumber SiLPA tersebut tidak terjadi maka penyesuaian pada Perubahan RKPD 2025.

Pada sisi pengeluaran pembiayaan daerah tahun 2025 pada RKPD ditargetkan sebesar Rp.50.000.000.000 untuk Pengeluaran Pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal ke BUMD. Hal tersebut memiliki tujuan untuk modal kerja BUMD yang pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan daerah dan meningkatkan perekonomian daerah. Namun pada ABPD di sertakan Pembiayaan Netto sebesar Rp850,000,000,000 dengan tujuan SILPA menjadi nol yang menunjukkan penerimaan pembiayaan dapat menutup defisit anggaran yang terjadi. Pembiayaan netto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam satu tahun anggaran.

Pada tahun triwulan I 2025 terdapat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya sebesar Rp 2,597,623,141,500 yang dialokasikan untuk pembiayaan netto. Terdapat SILPA sebesar Rp4,822,284,179,307 yang merupakan angka perkiraan yang bersumber dari penerimaan pembiayaan sebesar Rp3,372,711,574,150.81 dan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp1,148,050,536,343.65.

BAB IV

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD

4.1 Capaian Indikator Kinerja Tujuan RKPD Tahun 2025

Evaluasi kinerja pembangunan daerah dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 dilakukan dengan mengacu pada tujuh indikator utama yang merepresentasikan empat sasaran strategis pembangunan. Keempat tujuan tersebut meliputi: 1) Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing; 2) Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas; 3) Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup; dan 4) Mewujudkan Reformasi Birokrasi. Berdasarkan hasil evaluasi, seluruh indikator menunjukkan capaian yang sangat tinggi, dengan persentase kinerja berada dalam rentang 85,54% hingga 178,68%.

1) Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing

Tujuan ini diukur melalui indikator kinerja Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Capaian IPM Provinsi Kalimantan Timur tercatat sebesar 78,79, yang berhasil melampaui target RKPD sebesar 78,6, dengan tingkat pencapaian sebesar 100,24% (Tercapai). Capaian kinerja tersebut mengindikasikan adanya kemajuan yang signifikan dalam tiga dimensi utama pembangunan manusia, yaitu kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak. Peningkatan ini tidak terlepas dari peran investasi pemerintah dalam penguatan infrastruktur sosial serta dukungan terhadap stabilitas ekonomi daerah. Meskipun demikian, tantangan struktural seperti ketimpangan pembangunan antar wilayah, ketergantungan terhadap sektor ekonomi ekstraktif, dan potensi degradasi lingkungan masih menjadi isu strategis yang perlu mendapatkan perhatian serius.

2) Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas

Kinerja tujuan ini diukur melalui beberapa indikator kinerja, yaitu Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE), Tingkat Kemiskinan, dan Indeks Gini. Capaian kinerja tujuan 2 masuk dalam kategori Akan Tercapai, berdasarkan capaian kinerja pada tiga indikator kinerja tersebut.

Meskipun nilai LPE masih sedikit di bawah target yang telah ditetapkan, capaian pertumbuhan sebesar 6,17% mencerminkan ketahanan ekonomi daerah yang relatif kuat. Selain itu, penurunan angka kemiskinan dan perbaikan pada Indeks Gini juga turut mengindikasikan bahwa hasil pembangunan mulai dirasakan oleh kelompok masyarakat yang lebih luas. Capaian positif dari ketiga indikator tersebut antara lain didorong oleh peran aktif sektor pemerintahan dan peningkatan belanja pemerintah daerah. Namun, sejumlah tantangan strategis masih perlu diatasi, khususnya terkait dengan upaya mengurangi ketergantungan terhadap sektor pertambangan, menanggulangi ketimpangan pembangunan antar wilayah, dan memastikan kualitas belanja pemerintah semakin produktif, efisien, dan inklusif.

3) Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup

Capaian kinerja pada tujuan ini diukur melalui indikator kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup; dan Persentase Penurunan Emisi dari skenario *Business as Usual* (BAU). Capaian kinerja tujuan 3 menunjukkan kinerja yang relatif baik, meskipun masih menghadapi sejumlah tantangan. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) mencapai 95,56% dari target yang ditetapkan, yang mengindikasikan bahwa kualitas lingkungan secara umum berada pada jalur yang cukup baik (Akan Tercapai). Sebaliknya, capaian penurunan emisi dibandingkan dengan skenario *Business As Usual* (BAU) tercatat sebesar 178,68%, yang melampaui target dan menunjukkan keberhasilan luar biasa dalam upaya mitigasi perubahan iklim. Hal ini menggambarkan adanya komitmen dari Kalimantan Timur terhadap pengurangan emisi karbon dan pelestarian hutan. Namun, keberlanjutan dari capaian indikator kinerja tersebut bergantung pada penguatan kebijakan pemerintah daerah, peningkatan kapasitas pengawasan lingkungan, dan pengendalian dampak negatif yang timbul dari sektor ekstraktif, seperti pertambangan dan perkebunan (sawit) yang masih mendominasi.

4) Mewujudkan Reformasi Birokrasi.




Capaian kinerja pada tujuan ini diukur melalui indikator kinerja Indeks Reformasi Birokrasi. Capaian kinerja tujuan 4 menunjukkan kinerja yang

sangat positif. Capaian kinerja indikator Indeks Reformasi Birokrasi mencapai 115,08% (Tercapai), yang mencerminkan bahwa pelaksanaan reformasi birokrasi pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah berada pada jalur yang tepat, dan menunjukkan percepatan yang signifikan. Capaian kinerja ini ditopang adanya penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE), peningkatan kapasitas sumber daya manusia pada aparatur, dan penguatan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Namun, sejumlah tantangan masih perlu diantisipasi, terutama masih adanya resistensi terhadap perubahan budaya kerja, keterbatasan anggaran reformasi, dan perlunya penguatan sistem pengawasan internal dan eksternal.

Tabel 4.1. Capaian Indikator Kinerja Tujuan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 Triwulan I

No	Tujuan	Indikator	2025		Capaian (%)
			Target	Realisasi	
1	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	78,6	78,79	100,24
2	Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	6,28-6,58	6,17	93,77
		Tingkat Kemiskinan	5,05 - 5,67	5,78	85,54
		Indeks Gini	0,310 - 0,321	0,321	96,45
3	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	80,19	76,63	95,56
		Persentase Penurunan Emisi dari Business As Usual (BAU)	27,53	49,19	178,68
4	Mewujudkan Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi	B (74,00)	A (85,16)	115,08

Ket:

	Tercapai
	Akan Tercapai
	Butuh Upaya Keras

4.2 Capaian Indikator Kinerja Sasaran RKPD Tahun 2025

Dokumen RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 menetapkan sebelas sasaran strategis yang menjadi fokus utama dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan daerah secara berkelanjutan dan terukur. Sasaran tersebut dirancang untuk mencakup berbagai aspek pembangunan, baik dari sisi sosial, ekonomi, lingkungan, maupun tata kelola pemerintahan, guna

mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan daerah. Sasaran tersebut meliputi: 1) Meningkatnya pemerataan taraf pendidikan masyarakat; 2) Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat; 3) Menurunnya tingkat pengangguran; 4) Meningkatnya daya saing perempuan; 5) Terwujudnya diversifikasi ekonomi; 6) Meningkatnya keberdayaan masyarakat miskin; 7) Meningkatnya kualitas dan ketersediaan infrastruktur untuk mendukung perekonomian dan pemenuhan infrastruktur dasar; 8) Terjaganya kualitas air, air laut, udara dan lahan; 9) Menurunnya emisi gas rumah kaca sektor kehutanan dan penggunaan lahan; 10) Meningkatnya pemanfaatan energi baru dan terbarukan; 11) Terwujudnya birokrasi yang profesional, akuntabel, serta berorientasi pelayanan publik yang didukung ASN BerAKHLAK.

Seluruh sasaran tersebut dinilai berdasarkan 22 (dua puluh dua) indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam RKPD tahun 2025. Dari keseluruhan indikator tersebut, sebanyak 7 indikator (31,82%) menunjukkan capaian dalam kategori tercapai, sementara 15 indikator lainnya (68,18%) masuk dalam kategori akan tercapai.

Indikator kinerja yang termasuk dalam kategori tercapai meliputi: 1) Usia Harapan Hidup; 2) LPE Non Migas dan Batubara; 3) Tingkat inflasi; 4) Indeks Kualitas Air Laut; 5) Indeks Kualitas Udara; 6) Persentase Penurunan Emisi GRK Sektor Kehutanan dan Penggunaan Lahan dari Business As Usual (BAU); dan 7) Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Sementara itu, 15 indikator kinerja yang termasuk dalam kategori akan tercapai meliputi: 1) Harapan Lama Sekolah; 2) Rata-rata lama sekolah; 3) Prevalensi Stunting; 4) Tingkat Pengangguran Terbuka; 5) Indeks Pemberdayaan Gender (IDG); 6) Indeks Kedalaman Kemiskinan; 7) Indeks Keparahan Kemiskinan; 8) Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI); 9) Indeks Kualitas Air; 10) Indeks Kualitas Lahan; 11) Bauran Energi Baru dan Terbarukan (EBT); 12) Indeks Kepuasan Masyarakat; 13) Sistem Merit; 14) Nilai Akuntabilitas Kinerja; dan 15) Tingkat maturitas SPIP.

1) Sasaran 1 (Meningkatnya Pemerataan Taraf Pendidikan Masyarakat)

Capaian indikator Harapan Lama Sekolah sebesar 99,36% dan Rata-rata Lama Sekolah sebesar 98,14% menunjukkan bahwa Provinsi Kalimantan

Timur berada dalam kondisi yang mendekati target pemerataan pendidikan. Pencapaian ini menggambarkan efektivitas berbagai program peningkatan akses pendidikan yang telah dilaksanakan, termasuk pembangunan sarana pendidikan dan pemberian beasiswa bagi peserta didik. Namun, upaya pemerataan pendidikan masih menghadapi tantangan, terutama terkait disparitas kualitas pendidikan antar wilayah dan keterbatasan jumlah dan distribusi tenaga pendidik di wilayah terpencil.

2) Sasaran 2 (Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat)

Capaian Usia Harapan Hidup yang mencapai 100,07% mencerminkan adanya peningkatan dalam kualitas dan akses layanan kesehatan masyarakat. Namun, prevalensi stunting yang masih berada pada angka 87,88% dari target menunjukkan bahwa permasalahan gizi pada anak usia dini tetap menjadi isu strategis yang memerlukan perhatian khusus. Pencapaian positif dalam indikator kesehatan ini sebagian besar didorong oleh pelaksanaan program kesehatan ibu dan anak dan peningkatan layanan dasar kesehatan. Di sisi lain, tantangan yang dihadapi meliputi keterbatasan akses terhadap fasilitas kesehatan di wilayah terpencil dan rendahnya tingkat literasi gizi di kalangan masyarakat.

3) Sasaran 3 (Menurunnya Tingkat Pengangguran)

Capaian Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang mencapai 88,26% dari target yang menunjukkan adanya penurunan angka pengangguran, meskipun isu ketenagakerjaan masih menjadi tantangan struktural yang perlu mendapat perhatian Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Pembangunan IKN dan pertumbuhan sektor industri berkontribusi signifikan terhadap penciptaan lapangan kerja baru di Kalimantan Timur. Namun, kesenjangan keterampilan (*skill mismatch*) dan ketidaksesuaian antara output pendidikan dengan kebutuhan dunia kerja menjadi faktor penghambat dalam optimalisasi serapan tenaga kerja di Kalimantan Timur.

4) Sasaran 4 (Meningkatnya Daya Saing Perempuan)

Capaian Indeks Pemberdayaan Gender (IPG) sebesar 90,79% menunjukkan adanya kemajuan signifikan dalam upaya pemberdayaan

perempuan, khususnya dalam bidang ekonomi dan partisipasi sosial. Program pelatihan keterampilan dan perluasan akses terhadap permodalan usaha menjadi salah satu faktor pendorong dalam meningkatkan kapasitas dan kemandirian perempuan. Namun, tantangan struktural masih dihadapi, diantaranya masih adanya stereotip gender dalam masyarakat, dan keterbatasan akses perempuan terhadap posisi-posisi strategis dalam kepemimpinan.

5) Sasaran 5 (Terwujudnya Diversifikasi Ekonomi)

Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non-Migas dan Batubara yang mencapai 125,56% dari target mengindikasikan keberhasilan awal dalam upaya diversifikasi struktur ekonomi daerah di Kalimantan Timur. Sektor pariwisata dan pertanian turut berkontribusi sebagai pioner pertumbuhan baru di luar dominasi sektor ekstraktif. Capaian ini juga menunjukkan arah transformasi ekonomi yang positif di Kalimantan Timur dalam menuju struktur ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Namun, ketergantungan yang masih tinggi terhadap sektor pertambangan tetap menjadi tantangan strategis yang perlu segera diatasi melalui penguatan sektor-sektor produktif lainnya, termasuk pengembangan nilai tambah, dan kebijakan hilirisasi yang terintegrasi.

6) Sasaran 6 (Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat Miskin)

Capaian Indeks Kedalaman Kemiskinan sebesar 92,03% dan Indeks Keparahan Kemiskinan sebesar 71,67% menunjukkan adanya kecenderungan penurunan kemiskinan di Kalimantan Timur, meskipun permasalahan kemiskinan struktural masih menjadi isu utama dalam pembangunan daerah. Program bantuan sosial yang terarah serta inisiatif pemberdayaan ekonomi masyarakat turut berkontribusi terhadap perbaikan kesejahteraan kelompok rentan di Kalimantan Timur. Namun, tantangan mendasar seperti ketimpangan dalam distribusi pendapatan dan terbatasnya akses terhadap layanan dasar (pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur) masih memerlukan intervensi kebijakan yang lebih komprehensif dan berkelanjutan guna memastikan terwujudnya pembangunan yang inklusif dan berkeadilan di Kalimantan Timur.

- 7) Sasaran 7 (Meningkatnya Kualitas dan Ketersediaan Infrastruktur untuk Capaian Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur sebesar 94,04% mencerminkan adanya perbaikan dalam penyediaan dan kualitas infrastruktur dasar. Hal ini ditunjukkan melalui pembangunan jalan, jembatan, serta fasilitas umum lainnya. Lebih lanjut, pencapaian ini menjadi indikator yang positif terhadap peningkatan konektivitas dan aksesibilitas layanan publik di Kalimantan Timur. Namun, tantangan strategis masih dihadapi, terutama dalam aspek pemeliharaan infrastruktur secara berkelanjutan dan keterbatasan akses infrastruktur di wilayah terpencil. Tantangan tersebut memerlukan pendekatan kebijakan berbasis kewilayahan dan peningkatan kapasitas pembiayaan daerah.
- 8) Sasaran 8 (Terjaganya Kualitas Air, Air Laut, Udara dan Lahan)
Capaian Indeks Kualitas Air sebesar 73,72% mencerminkan bahwa kualitas air permukaan masih memerlukan peningkatan yang signifikan. Sebaliknya, Indeks Kualitas Udara (108,43%) dan Indeks Kualitas Air Laut (104,53%) mengindikasikan kecenderungan perbaikan yang positif dalam aspek kualitas lingkungan. Pencapaian indikator kinerja pada Sasaran 8 tidak terlepas dari implementasi program pengelolaan limbah, konservasi lingkungan, dan peningkatan kapasitas kelembagaan di bidang pengendalian pencemaran. Namun, tantangan struktural seperti pencemaran akibat aktivitas industri, deforestasi, dan lemahnya penegakan regulasi lingkungan masih menjadi hambatan yang perlu mendapat perhatian serius untuk memastikan keberlanjutan kualitas lingkungan hidup di Kalimantan Timur.
- 9) Sasaran 9 (Menurunnya Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Kehutanan dan Penggunaan Lahan)
Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sebesar 205,53% mengindikasikan keberhasilan dalam upaya pengurangan emisi, yang didorong oleh implementasi program REDD+ dan upaya konservasi hutan di Kalimantan Timur. Pencapaian ini juga menunjukkan komitmen yang kuat dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terhadap mitigasi perubahan iklim. Namun, tantangan utama yang masih dihadapi seperti

adanya indikasi pembalakan liar, dan perubahan penggunaan lahan yang masih terjadi yang perlu ditangani melalui penguatan regulasi, penegakan hukum yang lebih tegas, dan pengembangan kebijakan berbasis keberlanjutan.

10) Sasaran 10 (Meningkatnya Pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan)

Capaian Bauran Energi Baru dan Terbarukan sebesar 97,98% mengindikasikan adanya kemajuan dalam proses transisi energi menuju sumber energi yang lebih berkelanjutan di Kalimantan Timur. Pencapaian ini didorong oleh adanya investasi yang terus meningkat dalam sektor energi terbarukan dan kebijakan energi bersih yang mendukung keberlanjutan. Namun, tantangan yang masih perlu diatasi adalah masih tingginya biaya investasi awal dalam peningkatan bauran energi baru dan terbarukan, dan keterbatasan infrastruktur yang memadai,

11) Sasaran 11 (Terwujudnya Birokrasi yang Profesional, Akuntabel, serta Berorientasi Pelayanan Publik yang Didukung ASN BerAKHLAK)

Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 99,78%, Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sebesar 111,47%, Nilai Akuntabilitas Kinerja sebesar 98,41%, dan Tingkat maturitas SPIP sebesar 85,96% menggambarkan adanya peningkatan dalam kualitas pelayanan publik dan digitalisasi birokrasi di Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Pencapaian ini didorong oleh implementasi *e-government* yang efektif dan peningkatan kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui berbagai program pelatihan. Namun, tantangan yang masih perlu diatasi antara lain adalah masih adanya resistensi terhadap perubahan dalam budaya organisasi, dan kesenjangan digital yang masih terjadi yang memerlukan upaya lebih lanjut dalam meningkatkan aksesibilitas dan pemanfaatan teknologi informasi secara merata di seluruh lapisan masyarakat.

Tabel 4.2. Capaian Indikator Kinerja Sasaran RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 Triwulan I

No	Sasaran	Indikator	2025		Capaian (%)
			Target	Realisasi	
1	Meningkatnya Pemerataan Taraf Pendidikan Masyarakat	Harapan Lama Sekolah	14,12	14,03	99,36
		Rata-rata lama sekolah	10,21	10,02	98,14
2	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Usia Harapan Hidup	74,89	74,94	100,07
		Prevalensi Stunting	19,80	22,20	87,88
3	Menurunnya Tingkat Pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	4,60 - 5,14	5,14	88,26
4	Meningkatnya Daya Saing Perempuan	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	67,64	61,41	90,79
5	Terwujudnya Diversifikasi Ekonomi	LPE Non Migas dan Batubara	6,40-7,20	9,040	125,56
6	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat Miskin	Indeks Kedalaman Kemiskinan	0,740	0,799	92,03
		Indeks Keparahan Kemiskinan	0,120	0,154	71,67
		Tingkat inflasi	2,5+1	1,470	141,20
7	Meningkatnya Kualitas dan Ketersediaan Infrastruktur untuk Mendukung Perekonomian dan Pemenuhan Infrastruktur Dasar	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI)	8,390	7,890	94,04
8	Terjaganya Kualitas Air, Air Laut, Udara dan Lahan	Indeks Kualitas Air	71,41	52,64	73,72
		Indeks Kualitas Air Laut	81,47	85,16	104,53
		Indeks Kualitas Udara	84,32	91,43	108,43
		Indeks Kualitas Lahan	88,43	84,03	95,02
9	Menurunnya Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Kehutanan dan Penggunaan Lahan	Persentase Penurunan Emisi GRK Sektor Kehutanan dan Penggunaan Lahan dari Business As Usual (BAU)	24,40	50,15	205,53
10	Meningkatnya Pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan	Bauran Energi Baru dan Terbarukan (EBT)	12,39	12,14	97,98
11	Terwujudnya Birokrasi yang Profesional, Akuntabel, serta Berorientasi Pelayanan Publik yang Didukung ASN BerAKHLAK	Indeks Kepuasan Masyarakat	86,30	86,11	99,78
		Sistem Merit	275,00	271,00	98,55
		Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	3,40	3,79	111,47
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	(A) 80,01	78,74	98,41
		Tingkat maturitas SPIP	3 Skor 3,726	3 Skor 3,203	85,96

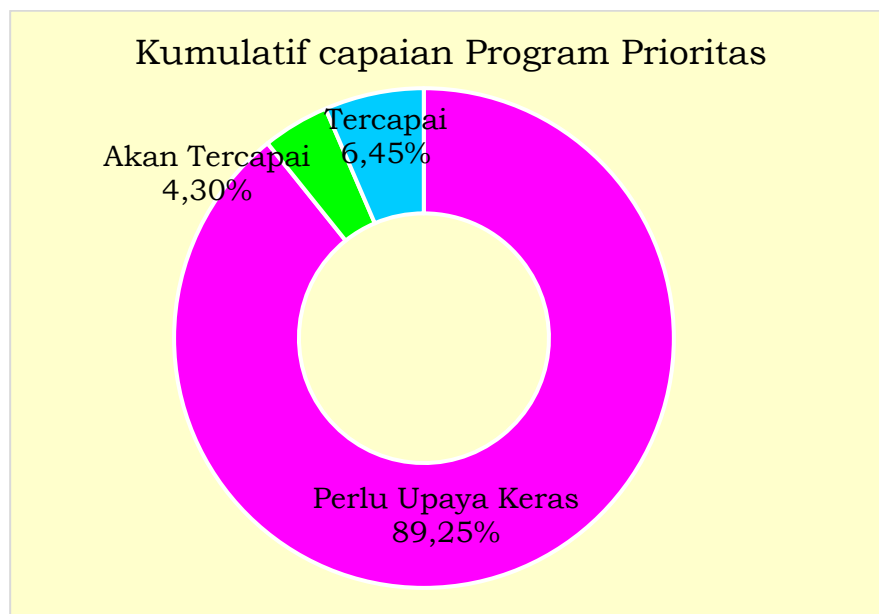
Ket:

■	Tercapai
■	Akan Tercapai
■	Butuh Upaya Keras

4.3 Capaian Program Prioritas Pembangunan Daerah

Perwujudan dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang merupakan sinkronisasi dengan Prioritas Pembangunan Nasional diimplementasikan dalam Program Prioritas. Program prioritas secara spesifik ditentukan dalam RPJMD Kaltim untuk menopang pencapaian terhadap sasaran pembangunan daerah. Dalam program prioritas juga dilaksanakan untuk menunjang target program unggulan Gubernur terpilih.

Program prioritas Kaltim, dipetakan berdasarkan relevansi atas tugas dan kewenangan perangkat daerah. Terdapat 23 perangkat daerah yang mengampuh 56 Program prioritas, yang diukur dengan 93 indikator kinerja. Secara kumulatif, hasil capaian pada triwulan I belum dapat diukur secara optimum, dimana Sebagian besar capaian pada program prioritas masih 0% . Hal ini disebabkan oleh indikator pada level program bersifat output kegiatan sehingga sebagian besar dapat dilakukan pada akhir periode RPJMD. Oleh sebab itu, diperlukan penetapan target per triwulan untuk evaluasi pengukuran kinerja. Secara kumulatif, hasil pengukuran sebagai berikut.



Gambar 4.1 Kumulatif capaian Program Prioritas

Terdapat 89.25% kinerja pada program prioritas berada pada kategori perlu upaya keras; diperkirakan 3.23% kinerja akan tercapai; dan 7.53% atau 7 indikator telah mencapai target yang ditetapkan. Namun jika secara

lebih detail melihat capaian tersebut, hasil pengukuran berada pada kategori telah tercapai disebabkan oleh indikator tersebut merupakan capaian terbalik. Dimana semakin kecil hasil/realisasi (dan bahkan jika nol) akan menyebabkan hasil pengukuran capaian semakin tinggi. Program dan indikator yang telah mencapai target adalah:

1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat pada indikator Angka Kesakitan target 10,70, realisasi 0, sehingga capaian 200%
2. Program Pengelolaan Hutan, dengan indikator Persentase Luas kerusakan kawasan hutan: target 1, realisasi 0, sehingga capaian 200%.
3. Program Penanganan Kerawanan Pangan: 1) indikator Persentase Luas kerusakan kawasan hutan Kesakitan target 1%, realisasi 0, sehingga capaian 200%; 2) indikator Persentase daerah rawan pangan target 0, realisasi 0%, sehingga capaian 100%.
4. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ): 1) indikator Jumlah Kecelakaan di Ruas Jalan Provinsi target 165 kejadian, realisasi 25 kejadian, sehingga capaian 184.85%; 2) Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Per 1000 Keberangkatan: target 0.005, realisasi 0, sehingga capaian 200%.
5. Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kesakitan, dengan indikator Indeks Pencemaran: target 5, realisasi 0, sehingga capaian 200%.

4.3.1 Program Prioritas Sasaran 1: Meningkatnya Pemerataan Taraf Pendidikan Masyarakat

Sasaran 1 “Meningkatnya Pemerataan Taraf Pendidikan Masyarakat” mencakup 2 (dua) program prioritas yang terdiri dari Program Pengelolaan Pendidikan serta Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Kedua program tersebut diampu oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Pada Program Pengelolaan Pendidikan terdapat 9 (sembilan) indikator kinerja, sementara Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan memiliki 1 (satu) indikator kinerja. Secara keseluruhan, indikator kinerja program prioritas pada Sasaran 1 berjumlah 10 (sepuluh) indikator. Secara umum, kedua

program prioritas pada Sasaran 1 belum menunjukkan realisasi dan capaian pada seluruh indikator kinerja program.

Tabel 4.3 Capaian Program Prioritas Tahun 2025 pada Sasaran 1:
Meningkatnya Pemerataan Taraf Pendidikan Masyarakat

No	Sasaran/Program Prioritas	Indikator Kinerja	2025		Perangkat Daerah
			Realisasi	Capaian	
			Kinerja (%)	Kinerja (%)	
Sasaran 1: Meningkatnya Pemerataan Taraf Pendidikan Masyarakat		Harapan Lama Sekolah	14.03	99.36	
		Rata-rata lama sekolah	10.02	98.14	
1	Program Pengelolaan Pendidikan	Persentase Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus	0	0.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Persentase Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK	0	0.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Persentase Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	0	0.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Persentase Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	0	0.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Persentase Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	0	0.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Persentase Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	0	0.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Persentase Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	0	0.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Persentase Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	0	0.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Persentase Tingkat Penyerapan Lulusan SMK	0	0.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase Tenaga Pendidik yang memiliki Ijazah diploma dan sarjana	0	0.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Angka realisasi dan capaian yang menunjukkan nilai 0 (nol) pada indikator kinerja program dapat disebabkan oleh pengukuran kinerja yang belum dapat dilakukan dan/atau hasil yang belum tersedia karena masih menunggu akhir periode pelaporan. Dengan kata lain, pelaksanaan program tetap berlangsung, namun penilaian terhadap pencapaiannya belum dapat

dilakukan pada saat data ini disusun. Namun begitu, Program Pengelolaan Pendidikan serta Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan masih memerlukan upaya keras untuk dapat mencapai target tahun 2025.

4.3.2 Program Prioritas Sasaran 2: Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat

Pada Sasaran 2 “Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat” hanya mencakup 1 (satu) program prioritas, yaitu Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat. Program tersebut dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan. Adapun indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja program hanya 1 (satu) indikator, yakni Angka Kesakitan. Capaian program prioritas pada Sasaran 2 menunjukkan bahwa target program tersebut telah tercapai.

Tabel 4.4 Capaian Program Prioritas Tahun 2025 pada Sasaran 2: Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat

No	Sasaran/Program Prioritas	Indikator Kinerja	2025		Perangkat Daerah
			Realisasi	Capaian	
			Kinerja (%)	Kinerja (%)	
Sasaran 2: Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat		Usia Harapan Hidup	74.94	100.07	
		Prevalensi Stunting	22.2	87.88	
1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Angka Kesakitan	0	200.00	Dinas Kesehatan

Meskipun secara numerik realisasi Angka Kesakitan adalah 0 (nol), namun capaian tersebut mencerminkan kinerja yang positif karena berhasil melampaui target. Hal tersebut dapat dijelaskan oleh karakteristik indikator Angka Kesakitan yang bersifat negatif, dimana semakin rendah nilai realisasinya justru mencerminkan kondisi yang lebih baik. Oleh karena itu, penetapan target perlu ditingkatkan dengan memperhatikan capaian kinerjanya yang telah mencapai target.

4.3.3 Program Prioritas Sasaran 3: Menurunnya Tingkat Pengangguran

Sasaran 3 “Menurunnya Tingkat Pengangguran” terdiri dari 2 (dua) program prioritas, yaitu Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja yang dinaungi oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta Program Pengembangan Jasa Konstruksi yang diampu oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat. Masing-masing program prioritas hanya memiliki 1 (satu) indikator kinerja. Secara keseluruhan, total indikator kinerja program prioritas pada Sasaran 3 sejumlah 2 (dua) indikator. Adapun kedua program prioritas pada Sasaran 3 belum memperlihatkan adanya target yang tercapai.

Tabel 4.5 Capaian Program Prioritas Tahun 2025 pada Sasaran 3: Menurunnya Tingkat Pengangguran

No	Sasaran/Program Prioritas	Indikator Kinerja	2025		Perangkat Daerah
			Realisasi	Capaian	
			Kinerja (%)	Kinerja (%)	
Sasaran 3: Menurunnya Tingkat Pengangguran		Tingkat Pengangguran Terbuka	5.14	88.26	
1	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Lulusan Pelatihan Kerja yang dimagangkan dan bekerja	0	0.00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Bersertifikat	0	0.00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat

Kedua program prioritas pada Sasaran 3 masih menunjukkan nilai realisasi kinerja dan capaian kinerja sebesar 0 (nol). Hal tersebut dapat disebabkan oleh belum tersedianya data kinerja secara menyeluruh hingga akhir periode pelaporan. Oleh karena itu, penting untuk terus memantau perkembangan dari kedua indikator tersebut. Selain itu, Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja serta Program Pengembangan Jasa Konstruksi masih memerlukan upaya keras untuk dapat mencapai target tahun 2025.

4.3.4 Program Prioritas Sasaran 4: Meningkatnya Daya Saing Perempuan

Sasaran 4 “Meningkatnya Daya Saing Perempuan” hanya memiliki 1 (satu) program, yaitu Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan. Program tersebut ditangani oleh Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Program tersebut juga hanya memiliki 1 (satu) indikator kinerja, yakni jumlah perempuan kepala keluarga (PEKKA) didampingi untuk peningkatan kapasitas dalam kewirausahaan. Program prioritas pada Sasaran 4 masih belum menunjukkan ketercapaian target.

Tabel 4.6 Capaian Program Prioritas Tahun 2025 pada Sasaran 4: Meningkatnya Daya Saing Perempuan

No	Sasaran/Program Prioritas	Indikator Kinerja	2025		Perangkat Daerah
			Realisasi	Capaian	
			Kinerja (%)	Kinerja (%)	
Sasaran 4: Meningkatnya Daya Saing Perempuan		Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	61.41	90.79	
1	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Jumlah perempuan kepala keluarga (PEKKA) didampingi untuk peningkatan kapasitas dalam kewirausahaan	0	0.00	Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Baik pada realisasi maupun capaian kinerja dari indikator Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan menunjukkan belum adanya perempuan kepala keluarga yang didampingi untuk peningkatan kapasitas dalam kewirausahaan sehingga capaian masih 0 persen. Hal tersebut dapat disebabkan oleh pengukuran kinerja program yang dilakukan pada akhir periode sehingga belum dapat ditentukan tingkat ketercapaiannya. Oleh karena itu, pelaksanaan program prioritas pada Sasaran 4 masih memerlukan upaya keras untuk dapat mencapai target yang telah ditetapkan.

4.3.5 Program Prioritas Sasaran 5: Terwujudnya Diversifikasi Ekonomi

Pada Sasaran 5 “Terwujudnya Diversifikasi Ekonomi” terdapat 24 program prioritas yang diampu oleh berbagai perangkat daerah, mulai dari Dinas Kehutanan, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Dinas Pariwisata, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Perkebunan, Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, dan Dinas Kelautan dan Perikanan. Adapun program-program prioritas tersebut memiliki total 34 indikator kinerja. Sebagian besar indikator kinerja program, yaitu 88,24 persen, memiliki capaian di bawah 25 persen sehingga perlunya upaya keras dalam mencapai target yang ditetapkan. Sementara itu, terdapat 2 (dua) indikator kinerja program atau sebesar 5,88 persen indikator kinerja telah melampaui target. Sedangkan indikator kinerja program yang mengindikasikan akan tercapai juga terdapat 2 (dua) indikator kinerja program atau sebesar 5,88 persen.

Tabel 4.7 Capaian Program Prioritas Tahun 2025 pada Sasaran 5:
Terwujudnya Diversifikasi Ekonomi

No	Sasaran/Program Prioritas	Indikator Kinerja	2025		Perangkat Daerah
			Realisasi	Capaian	
			Kinerja (%)	Kinerja (%)	
Sasaran 5: Terwujudnya Diversifikasi Ekonomi		LPE Non Migas dan Batubara	9.04	125.56	
1	Program Pengelolaan Hutan	Persentase Luas kerusakan kawasan hutan	0	200.00	Dinas Kehutanan
		Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi	0	0.00	Dinas Kehutanan
2	Program Pengembangan UMKM	Jumlah UKM Potensial Ekspor	0	0.00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
3	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase UKM yang Masuk Pasar Digital	1.91	19.10	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
4	Program Pengembangan Ekspor	Produk daerah yang masuk pasar ekspor dan atau negara tujuan baru	0	0.00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

No	Sasaran/Program Prioritas	Indikator Kinerja	2025		Perangkat Daerah
			Realisasi	Capaian	
			Kinerja (%)	Kinerja (%)	
5	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Pertumbuhan Industri Pengolahan Non Migas dan Non Batubara	0	0.00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
6	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase Pengembangan Daya Tarik Wisata	2.00	3.16	Dinas Pariwisata
7	Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Penyelesaian Perizinan yang Tepat Waktu	0	0.00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti	0	0.00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
8	Program Promosi Penanaman Modal	Kepeminatan Investasi Di Kalimantan Timur pada Sektor Non Migas dan Non Batubara	0	0.00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
9	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Peluang Investasi Non Migas dan Non Batubara yang Siap Ditawarkan	0	0.00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
10	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Luas Kebun yang dibangun	0	0.00	Dinas Perkebunan
11	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Tingkat Pemenuhan Sarana Perkebunan	0	0.00	Dinas Perkebunan
12	Program Penyuluhan Pertanian	Persentase Kelembagaan Petani yang Kapasitasnya Meningkat	0	0.00	Dinas Perkebunan
		Persentase Sumber Daya Manusia Pertanian yang Meningkat Kapasitasnya	0	0.00	Dinas Perkebunan
13	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	0	0.00	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
		Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	0	0.00	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
14	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Jumlah Kecamatan yang Meningkatkan Status Ketahanan Pangannya	0	0.00	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
		Persentase daerah rawan pangan	0	100.00	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura

No	Sasaran/Program Prioritas	Indikator Kinerja	2025		Perangkat Daerah
			Realisasi	Capaian	
			Kinerja (%)	Kinerja (%)	
15	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Tingkat Pemenuhan Prasarana Pertanian Hortikultura	0	0.00	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
		Tingkat Pemenuhan Prasarana Pertanian Tanaman Pangan	0	0.00	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
16	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase Pengawasan Peredaran Pestisida dan Pupuk	0	0.00	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
		Tingkat pemenuhan sarana pertanian hortikultura	0	0.00	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
17	Program Penyuluhan Pertanian	Persentase Sumber Daya Manusia Pertanian yang Meningkatkan Kapasitasnya	0	0.00	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
18	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Tingkat pemenuhan prasarana peternakan	69.49	69.69	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
19	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Tingkat Kemanfaatan Sarana terhadap capaian kinerja teknis kegiatan Agribisnis	0	0.00	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
		Tingkat Kemanfaatan Sarana terhadap capaian kinerja teknis kegiatan pakan, perbibitan dan produksi peternakan	5.07	5.76	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
20	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Tingkat Pengendalian Wilayah dari PHMSZ	0	0.00	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
		Tingkat pengendalian kesehatan masyarakat veteriner	29.40	30.69	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
		Tingkat Layanan Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat	2.58	2.60	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
21	Program Penyuluhan Pertanian	Peningkatan Kapasitas SDM dan kelembagaan peternakan	0	0.00	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
22	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	0	0.00	Dinas Kelautan dan Perikanan
23	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	0	0.00	Dinas Kelautan dan Perikanan

No	Sasaran/Program Prioritas	Indikator Kinerja	2025		Perangkat Daerah
			Realisasi	Capaian	
			Kinerja (%)	Kinerja (%)	
24	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Jumlah Produk Olahan Hasil Perikanan berkualitas (SNI) yang dipasarkan	0	0.00	Dinas Kelautan dan Perikanan

Kedua indikator kinerja program yang telah melampaui target atau telah mencapai target ialah “Persentase Luas Kerusakan Kawasan Hutan” pada Program Pengelolaan Hutan dan “Persentase Daerah Rawan Pangan” pada Program Penanganan Kerawanan Pangan. Ketercapaian kinerja pada kedua program diiringi dengan realisasi yang menunjukkan nilai 0 (nol) akibat karakteristik indikator yang bersifat negatif, dimana semakin rendah nilai realisasinya maka mencerminkan kondisi yang lebih baik. Memperhatikan telah tercapainya target, maka penetapan target kedua program perlu ditingkatkan karena cukup pesimis.

Adapun indikator kinerja program yang mengindikasikan bahwa realisasi kinerja akan mencapai target, yaitu “Tingkat Pemenuhan Prasarana Peternakan” pada Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian serta “Tingkat Pengendalian Kesehatan Masyarakat Veteriner” pada Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner. Meskipun telah menunjukkan capaian yang relatif baik, namun kedua program tetap memerlukan upaya agar dapat mewujudkan target akhir di tahun 2025.

4.3.6 Program Prioritas Sasaran 6: Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat Miskin

Terdapat 4 (empat) program prioritas yang dilakukan untuk mewujudkan Sasaran 6 “Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat Miskin”. Keempat program tersebut terdiri dari Program Perlindungan dan Jaminan Sosial yang diampu oleh Dinas Sosial, Program Administrasi Pemerintahan Desa yang diampu oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, Program Kawasan Permukiman yang diampu oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat, serta Program Stabilisasi

Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting yang diampu oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.

Pada Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting mencakup 2 (dua) indikator kinerja, sementara program lainnya terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja. Adapun total indikator kinerja program prioritas sebanyak 5 (lima) indikator kinerja. Sebanyak 4 (empat) atau 80 persen indikator kinerja masih memerlukan upaya keras dalam mencapai target. Sementara itu, 1 (satu) atau 20 persen indikator kinerja program terindikasi akan mencapai target.

Tabel 4.8 Capaian Program Prioritas Tahun 2025 pada Sasaran 6:
Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat Miskin

No	Sasaran/Program Prioritas	Indikator Kinerja	2025		Perangkat Daerah
			Realisasi	Capaian	
			Kinerja (%)	Kinerja (%)	
Sasaran 6: Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat Miskin		Indeks Kedalaman Kemiskinan	0.799	92.03	
		Indeks Keparahan Kemiskinan	0.154	71.67	
		Tingkat inflasi	1.47	141.20	
1	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Jumlah Keluarga Miskin Yang Mendapat Bantuan Sosial Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	0	0.00	Dinas Sosial
2	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang mampu menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan Desa Secara Optimal	0	0.00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
3	Program Kawasan Permukiman	Pengurangan Luas Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi	0	0.00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
4	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Disparitas Harga Barang Pokok dan Barang Penting	6.84	48.86	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
		Persentase kinerja realisasi pupuk	0	0.00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Capaian keempat indikator kinerja yang masih memerlukan upaya keras bernilai 0 persen. Hal tersebut dapat disebabkan oleh pengukuran kinerja program yang dilakukan pada akhir periode. Oleh karena itu, pemantauan

terhadap perkembangan kinerja dari indikator-indikator yang dimaksud tetap perlu dilakukan untuk memastikan ketercapaian targetnya. Sementara itu, indikator kinerja pada Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting yang terindikasi akan mencapai target. Indikator yang dimaksud adalah “Disparitas Harga Barang Pokok dan Barang Penting”, dimana capaiannya sebesar 48,86 persen. Meskipun begitu, program tersebut tetap perlu diupayakan untuk dapat mencapai target akhir yang telah ditetapkan.

4.3.7 Program Prioritas Sasaran 7: Meningkatnya Kualitas dan Ketersediaan Infrastruktur untuk Mendukung Perekonomian dan Pemenuhan Infrastruktur Dasar

Sasaran 7 “Meningkatnya Kualitas dan Ketersediaan Infrastruktur untuk Mendukung Perekonomian dan Pemenuhan Infrastruktur Dasar” memiliki 9 (sembilan) program prioritas. Program-program prioritas tersebut terdiri dari Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) yang dibawahhi Dinas Perhubungan; Program Penyelenggaraan Jalan, Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA); Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase, Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, Program Pengembangan Jasa Konstruksi, Program Penyelenggaraan Penataan Ruang, dan Program Kawasan Permukiman yang diampu oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat; serta Program Pengelolaan Ketenagalistrikan yang merupakan program dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral.

Adapun jumlah keseluruhan indikator kinerja pada 9 (sembilan) program prioritas tersebut sebanyak 18 indikator. Sebanyak 16 dari 18 indikator (88,89 persen) masih perlu upaya keras untuk mencapai target. Sedangkan 2 indikator lainnya atau 11,11 persen menunjukkan capaian yang telah melampaui target.

Tabel 4.9 Capaian Program Prioritas Tahun 2025 pada Sasaran 7:
Meningkatnya Kualitas dan Ketersediaan Infrastruktur untuk Mendukung
Perekonomian dan Pemenuhan Infrastruktur Dasar

No	Sasaran/Program Prioritas	Indikator Kinerja	2025		Perangkat Daerah
			Realisasi	Capaian	
			Kinerja (%)	Kinerja (%)	
Sasaran 7: Meningkatnya Kualitas dan Ketersediaan Infrastruktur untuk Mendukung Perekonomian dan Pemenuhan Infrastruktur Dasar		Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI)	7.89	94.04	
1	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Jumlah Kecelakaan di Ruas Jalan Provinsi	25	184.85	Dinas Perhubungan
		Persentase Layanan Lalu Lintas Jalan Provinsi dan AKDP	0	0.00	Dinas Perhubungan
		Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Per 1000 Keberangkatan	0	200.00	Dinas Perhubungan
2	Program Penyelenggaraan Jalan	Penambahan Ruas Jalan Baru	0	0.00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
		Rasio Kemantapan Jalan Provinsi	0	0.00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
3	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Luas sawah yang terlayani jaringan irigasi teknis pada daerah irigasi kewenangan provinsi (Ha)	0	0.00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
		Panjang pantai kritis yang ditangani	0	0.00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
		Penambahan kapasitas air baku untuk air bersih	0	0.00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
		Pengurangan luas genangan banjir perkotaan	0	0.00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
4	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase panjang drainase yang ditangani	0	0.00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
5	Program Pengelolaan dan Pengembangan	Persentase Kesiapan Infrastruktur Air Curah Lintas Kabupaten/Kota	0	0.00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan

No	Sasaran/Program Prioritas	Indikator Kinerja	2025		Perangkat Daerah
			Realisasi	Capaian	
			Kinerja (%)	Kinerja (%)	
	Sistem Penyediaan Air Minum				Ruang dan Perumahan Rakyat
6	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Bersertifikat	0	0.00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
7	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Skoring Penyelenggaraan Penataan Ruang	0	0.00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
8	Program Kawasan Permukiman	Pengurangan Luas Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi	0	0.00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
9	Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	Persentase Desa yang dibangun PLTS pada Desa belum berlistrik PLN	0	0.00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
		Pertambahan daya listrik yang bersumber dari EBT	0	0.00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
		Persentase Rekomendasi Teknis Izin Usaha Ketenagalistrikan yang tertangani	0	0.00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
		Persentase Kelurahan/Desa yang teraliri listrik 24 Jam	0	0.00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Terdapat 16 indikator kinerja program yang masih tingkat ketercapaian 0 (nol) persen. Hal tersebut menunjukkan bahwa masih perlunya upaya keras untuk merealisasikan ketercapaian target, meskipun nilai 0 (nol) tersebut dapat terjadi karena pengukuran kinerja program dilakukan pada akhir periode sehingga belum dapat ditentukan capaiannya saat ini. Sementara itu, 2 (dua) indikator yang telah melampaui target adalah “Jumlah Kecelakaan di Ruas Jalan Provinsi” dan “Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi per 1000 Keberangkatan” pada Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). Karakteristik kedua indikator tersebut bersifat negatif, dimana semakin rendah nilai realisasinya mencerminkan kondisi yang lebih baik, dengan nilai capaian masing-masing indikator sebesar 185,85 persen dan 200 persen. Oleh karena itu, penetapan target

pada indikator tersebut perlu ditingkatkan melihat telah tercapainya target pada triwulan I tahun 2025 ini.

4.3.8 Program Prioritas Sasaran 8: Terjaganya Kualitas Air, Air Laut, Udara, dan Lahan

Hanya terdapat 1 (satu) program prioritas pada Sasaran 8 “Terjaganya Kualitas Air, Air Laut, Udara, dan Lahan”, yaitu Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup. Program tersebut diampu oleh Dinas Lingkungan Hidup. Terdapat 2 (dua) indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur program, dimana 1 (satu) atau 50 persen indikator telah melampaui target. Sementara itu, 1 (satu) atau 50 persen indikator lainnya masih memerlukan upaya keras untuk mencapai target.

Tabel 4.10 Capaian Program Prioritas Tahun 2025 pada Sasaran 8: Terjaganya Kualitas Air, Air Laut, Udara, dan Lahan

No	Sasaran/Program Prioritas	Indikator Kinerja	2025		Perangkat Daerah
			Realisasi	Capaian	
			Kinerja (%)	Kinerja (%)	
	Sasaran 8: Terjaganya Kualitas Air, Air Laut, Udara, dan Lahan	Indeks Kualitas Air	52.64	73.72	
		Indeks Kualitas Air Laut	85.16	104.53	
		Indeks Kualitas Udara	91.43	108.43	
		Indeks Kualitas Lahan	84.03	95.02	
1	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Indeks Pencemaran	0	200.00	Dinas Lingkungan Hidup
		Indeks Standar Pencemar Udara	0	0.00	Dinas Lingkungan Hidup

Indikator Indeks Pencemaran telah memiliki angka capaian 200 persen, sementara Indeks Standar Pencemar Udara menunjukkan angka capaian sebesar 0 (nol) persen. Oleh karena itu, penetapan target Indeks Pencemaran kedepannya perlu ditentukan lebih optimis, mengingat realisasi yang telah melampaui target pada saat ini. Hal yang menarik bahwa meskipun capaian Indeks Pencemaran telah tinggi, namun realisasinya masih 0 (nol). Hal ini dijelaskan oleh karakteristik indikator yang bersifat negatif, dimana semakin rendah nilai realisasinya maka mencerminkan kondisi yang lebih baik.

Adapun angka 0 (nol) pada Indeks Standar Pencemar Udara dapat terjadi akibat pengukuran kinerja yang dilakukan pada akhir periode. Namun begitu, indikator tersebut tetap memerlukan upaya yang lebih keras dalam rangka mewujudkan target yang telah ditetapkan sebesar 47.

4.3.9 Program Prioritas Sasaran 9: Menurunnya Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Kehutanan dan Penggunaan Lahan

Pada Sasaran 9 “Menurunnya Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Kehutanan dan Penggunaan Lahan” mencakup 5 (lima) program prioritas, yaitu terdiri dari Program Pengelolaan Hutan, Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS), Program Pendidikan dan Pelatihan, serta Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan yang diampu oleh Dinas Kehutanan. Adapun terdapat Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian yang diampu oleh Dinas Perkebunan. Seluruh program prioritas pada Sasaran 9 diukur menggunakan 7 (tujuh) indikator, dimana 6 (enam) atau 85,71 persen indikator masih memerlukan upaya keras untuk merealisasikan target dan 1 (satu) atau 14,29 persen indikator telah melampaui target.

Tabel 4.11 Capaian Program Prioritas Tahun 2025 pada Sasaran 9: Menurunnya Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Kehutanan dan Penggunaan Lahan

No	Sasaran/Program Prioritas	Indikator Kinerja	2025		Perangkat Daerah
			Realisasi	Capaian	
			Kinerja (%)	Kinerja (%)	
Sasaran 9: Menurunnya Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Kehutanan dan Penggunaan Lahan		Persentase Penurunan Emisi GRK Sektor Kehutanan dan Penggunaan Lahan dari <i>Business As Usual</i> (BAU)	50.15	205.53	
1	Program Pengelolaan Hutan	Persentase Luas kerusakan kawasan hutan	0	200.00	Dinas Kehutanan
		Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi	0	0.00	Dinas Kehutanan
2	Program Konservasi Sumber Daya Alam	Luas Kawasan Bernilai Ekosistem Penting dan	73,000.00	10.00	Dinas Kehutanan

No	Sasaran/Program Prioritas	Indikator Kinerja	2025		Perangkat Daerah
			Realisasi	Capaian	
			Kinerja (%)	Kinerja (%)	
	Hayati dan Ekosistemnya	Konservasi Provinsi Yang Dikelola			
3	Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)	Luas DAS dan Sub DAS yang Dikelola	0	0.00	Dinas Kehutanan
4	Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah Kelompok Usaha Masyarakat Yang Ditingkatkan Kapasitasnya	0	0.00	Dinas Kehutanan
		Luas Kawasan Hutan Yang Dikelola Masyarakat	0	0.00	Dinas Kehutanan
5	Program Pengendalian dan Penganggulan Bencana Pertanian	Persentase luas areal perkebunan yang dikendalikan dan ditanggulangi akibat bencana Dampak Perubahan Iklim (DPI)	0	0.00	Dinas Perkebunan

Indikator kinerja program yang telah melampaui target ialah “Persentase Luas Kerusakan Kawasan Hutan” pada Program Pengelolaan Hutan dengan angka capaian sebesar 200 persen. Apabila melihat nilai realisasinya yang bernilai 0 (nol), hal tersebut disebabkan oleh karakteristik indikator yang bersifat negatif, dimana semakin rendah nilai realisasinya maka mencerminkan kondisi yang lebih baik. Sementara itu, 6 (enam) indikator lainnya memiliki nilai capaian di bawah 25 persen. Bahkan sebagian besar memiliki capaian 0 (nol) persen akibat pengukuran kinerja yang dilakukan pada akhir periode sehingga masih diperlukan upaya keras dalam mewujudkan target akhir.

4.3.10 Program Prioritas Sasaran 10: Meningkatnya Pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan

Sasaran 10 “Meningkatnya Pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan” membawahi 2 (dua) program prioritas, yakni Program Pengelolaan Ketenagalistrikan dan Program Pengelolaan Energi Terbarukan yang seluruhnya ditangani oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral. Kedua program ini memiliki 7 (tujuh) indikator kinerja secara total. Namun, ketujuh indikator kinerja tersebut memperlihatkan kinerja, baik pada sisi realisasi maupun capaian, sebesar 0 (nol) persen.

Tabel 4.12 Capaian Program Prioritas Tahun 2025 pada Sasaran 10:
Meningkatnya Pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan

No	Sasaran/Program Prioritas	Indikator Kinerja	2025		Perangkat Daerah
			Realisasi	Capaian	
			Kinerja (%)	Kinerja (%)	
Sasaran 10: Meningkatnya Pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan		Bauran Energi Baru dan Terbarukan (EBT)	12.14	97.98	
1	Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	Persentase Desa yang dibangun PLTS pada Desa belum berlistrik PLN	0	0.00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
		Pertambahan daya listrik yang bersumber dari EBT	0	0.00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
		Persentase Rekomendasi Teknis Izin Usaha Ketenagalistrikan yang tertangani	0	0.00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
		Persentase Kelurahan/Desa yang teraliri listrik 24 Jam	0	0.00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
2	Program Pengelolaan Energi Terbarukan	Jumlah reduksi CO2e dari bidang energi	0	0.00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
		Persentase instansi pemerintah daerah yang menerapkan kebijakan bauran energi	0	0.00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
		Persentase Perusahaan Yang Menerapkan Bauran Energi	0	0.00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Capaian ketujuh indikator kinerja yang memperlihatkan nilai 0 (nol) persen dapat disebabkan karena pengukuran kinerja program dilakukan pada akhir periode. Meskipun begitu, angka capaian yang ditunjukkan juga mengindikasikan bahwa kedua program prioritas tetap memerlukan upaya keras untuk merealisasikan target akhir yang telah ditetapkan.

4.3.11 Program Prioritas Sasaran 11: Terwujudnya Birokrasi yang Profesional, Akuntabel, serta Berorientasi Pelayanan Publik yang Didukung ASN BerAKHLAK

Pada Sasaran 11 “Terwujudnya Birokrasi yang Profesional, Akuntabel, serta Berorientasi Pelayanan Publik yang Didukung ASN BerAKHLAK” mencakup 5 (lima) program prioritas. Program-program tersebut terdiri dari

Program Kepegawaian Daerah yang diampu oleh Badan Kepegawaian Daerah, Program Pengembangan Sumber Daya Manusia yang diampu oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Program Penataan Organisasi yang diampu oleh Biro Organisasi, Program Pengelolaan Aplikasi Informatika yang diampu oleh Dinas Komunikasi dan Informatika, serta Program Penyelenggaraan Pengawasan yang diampu oleh Inspektorat. Seluruh program prioritas tersebut diukur menggunakan 6 (enam) indikator kinerja. Namun, keenam indikator masih menunjukkan capaian di bawah 25 persen.

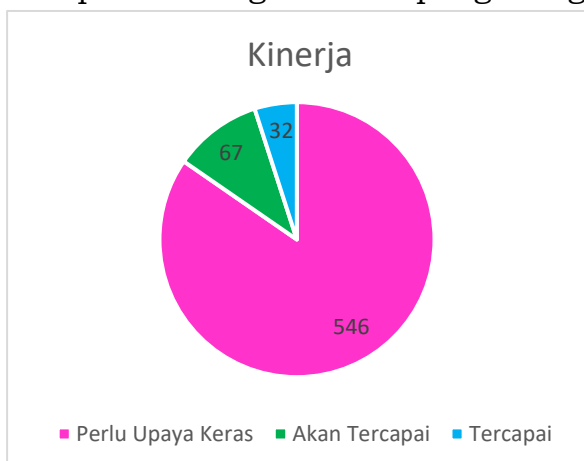
Tabel 4.13 Capaian Program Prioritas Tahun 2025 pada Sasaran 11: Terwujudnya Birokrasi yang Profesional, Akuntabel, serta Berorientasi Pelayanan Publik yang Didukung ASN BerAKHLAK

No	Sasaran/Program Prioritas	Indikator Kinerja	2025		Perangkat Daerah
			Realisasi	Capaian	
			Kinerja (%)	Kinerja (%)	
Sasaran 11: Terwujudnya Birokrasi yang Profesional, Akuntabel, serta Berorientasi Pelayanan Publik yang Didukung ASN BerAKHLAK		Indeks Kepuasan Masyarakat	86.11	99.78	
		Sistem Merit	271	98.55	
		Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	3.79	111.47	
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	78.74	100.31	
		Tingkat Maturitas SPIP	3 Skor 3,203	85.96	
1	Program Kepegawaian Daerah	Indeks NSPK Manajemen ASN	0	0.00	Badan Kepegawaian Daerah
2	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase SDM/Aparatur yang mengikuti Pengembangan Kompetensi	12	13.79	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
3	Program Penataan Organisasi	Indeks Kelembagaan	0	0.00	Biro Organisasi
		Indeks Kematangan Organisasi	0	0.00	Biro Organisasi
4	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase pemanfaatan teknologi informasi dalam administrasi pemerintahan dan pelayanan publik	0	0.00	Dinas Komunikasi dan Informatika
5	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Internal Pemda Provinsi dan Kab/Kota	0	0.00	Inspektorat

Sasaran 11 mencakup 5 (lima) program prioritas. Program-program tersebut terdiri dari Program Kepegawaian Daerah yang diampu oleh Badan Kepegawaian Daerah, Program Pengembangan Sumber Daya Manusia yang diampu oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Program Penataan Organisasi yang diampu oleh Biro Organisasi, Program Pengelolaan Aplikasi Informatika yang diampu oleh Dinas Komunikasi dan Informatika, serta Program Penyelenggaraan Pengawasan yang diampu oleh Inspektorat. Selain itu, secara keseluruhan terdapat 6 (enam) indikator kinerja program, dimana angka ketercapaian seluruh indikator masih berada di bawah 75 persen. Oleh karena itu, penting untuk terus memantau perkembangan indikator-indikator tersebut agar dapat memenuhi target tahun 2025.

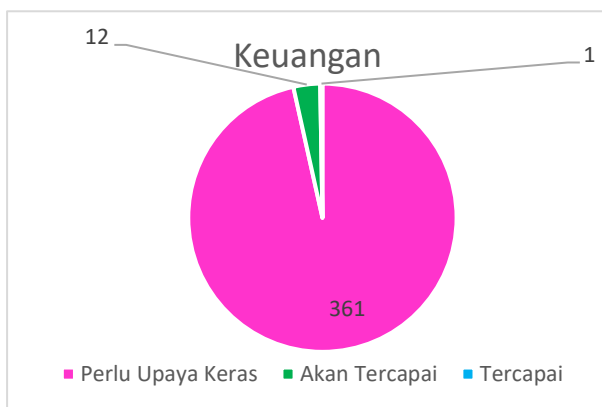
4.4 Capaian Indikator Kinerja dan Keuangan pada Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan RKPD Tahun 2025

Evaluasi terhadap kinerja dan keuangan pada masing-masing perangkat daerah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Penilaian hasil pelaksanaan pada level program tahun 2025 triwulan I dilakukan berbasis realisasi dan target kinerja maupun keuangan. Hasil pengkurungan secara kumulatif sebagai berikut.



Berdasarkan evaluasi target kinerja program pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, teridentifikasi bahwa terdapat 645 indikator program kinerja pada seluruh perangkat daerah dimana 546 indikator program atau sebesar 84.65% perlu upaya keras; 67

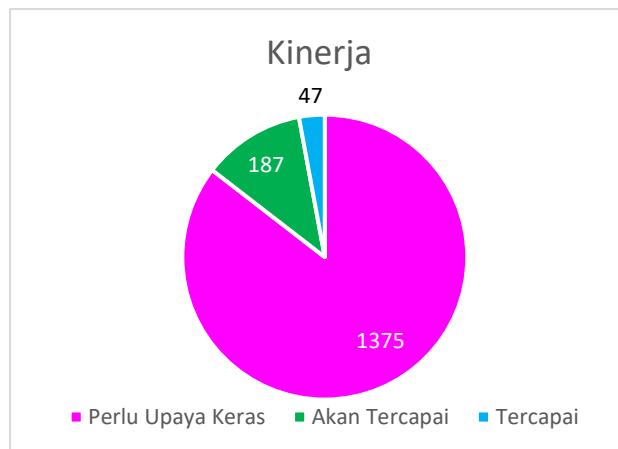
program atau 10.39% akan tercapai; serta 32 indikator program atau 4.96% telah tercapai pada triwulan I tahun 2025. Bahkan dari 539 program tersebut, 472 diantaranya belum memiliki tingkat ketercapaian. Perangkat daerah yang teridentifikasi belum memiliki realisasi kinerja indikator program di Provinsi Kalimantan Timur hingga triwulan I tahun 2025 yaitu secara berturut-turut merupakan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; Biro Hukum; Biro Kesejahteraan Rakyat; Biro Organisasi; Biro Pengadaan Barang dan Jasa; Biro Perekonomian; Biro Umum; Dinas Kelautan Dan Perikanan; Dinas Kesehatan; Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura; Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat; Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa; Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah; Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi; RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo di Balikpapan; Rumah Sakit Umum Daerah KORPRI; dan Satuan Polisi Pamong Praja. Untuk itu, mengingat bahwa masih belum terdapatnya realisasi dari masing-masing OPD tersebut hingga triwulan I tahun 2025 diperlukan upaya percepatan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan, termasuk peningkatan koordinasi antar perangkat daerah, penyesuaian jadwal pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi yang lebih intensif agar target kinerja tahunan dapat tercapai secara optimal.



Dari perspektif keuangan pada kumulatif terhadap program, teridentifikasi bahwa terdapat 374 indikator program seluruh perangkat daerah di Provinsi Kalimantan Timur. Sebesar 96.52% atau 361 indikator dinilai belum optimal direalisasikan sehingga

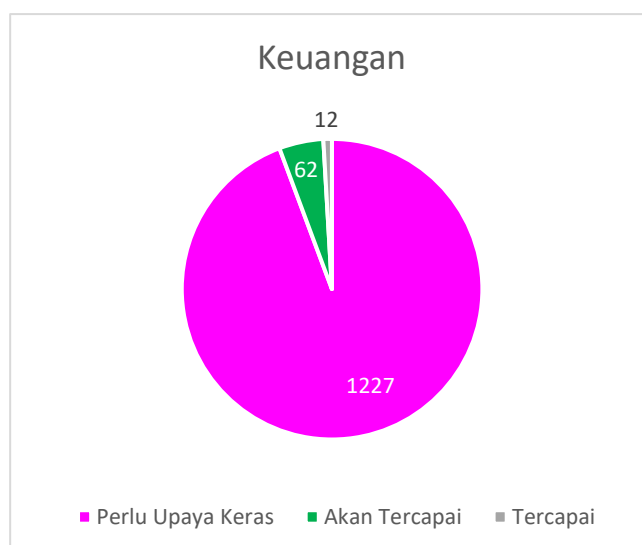
optimal hal ini diperkuat dengan situasi dimana indikator tersebut termasuk ke dalam klasifikasi perlu upaya keras; dan 0.27% telah direalisasikan dengan telah tercapai pada triwulan I tahun 2025. Dalam hal ini, perangkat daerah dengan rata-rata realisasi atau capaian keuangan tertinggi pada triwulan I tahun 2025 yaitu Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah

(48,12%); Biro Kesejahteraan Rakyat (25,51%); Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (23,76%).



Berdasarkan data dari aspek **kegiatan** seluruh perangkat daerah di Provinsi Kalimantan Timur, dari sisi kinerja, dari total 1.609 indikator kegiatan, sebanyak 1.375 kegiatan **(85,46%) masih tergolong perlu upaya keras** dalam mencapai target kinerja yang telah direncanakan. Sebanyak 187

kegiatan **(11,62%) diperkirakan akan mencapai target**, dan hanya 47 kegiatan **(2,92%) telah berhasil mencapai target** kinerja sepenuhnya. Hal ini mencerminkan masih adanya kesenjangan antara perencanaan program dengan pelaksanaan realisasi kinerja, baik dalam hal efektivitas pelaksanaan kegiatan maupun optimalisasi sumber daya.

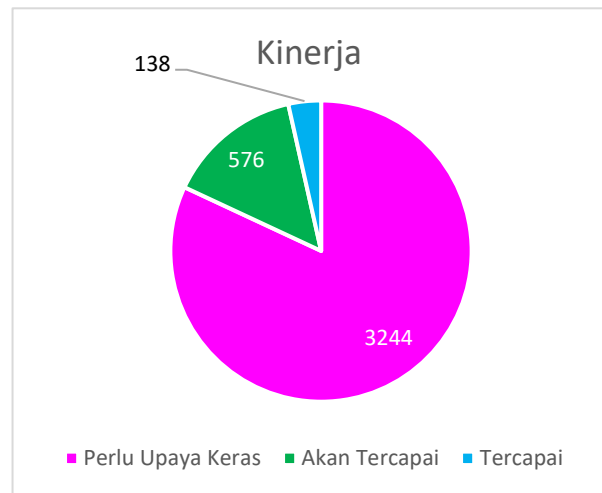


Sementara itu, dari total 1.301 kegiatan yang diukur dari sisi keuangan, sebanyak 1.227 kegiatan atau sekitar 94,31% dikategorikan sebagai perlu upaya keras dalam merealisasikan anggarannya. Sementara itu, hanya 62 kegiatan (4,77%) diproyeksikan akan mencapai target, dan sangat sedikit, yakni 12

kegiatan (0,92%), yang telah berhasil mencapai target realisasi keuangan. Hal ini mengindikasikan bahwa pelaksanaan anggaran oleh sebagian besar perangkat daerah masih mengalami hambatan yang cukup serius, baik dalam proses perencanaan, pengadaan, maupun penyerapan anggaran secara efektif dan efisien.

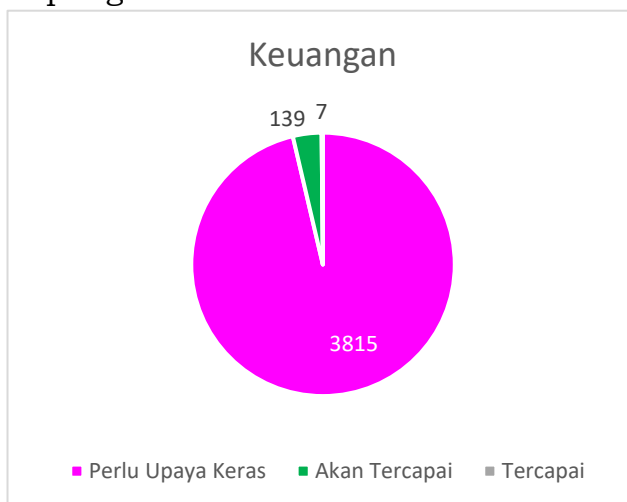
Secara umum, rendahnya tingkat pencapaian baik dari sisi keuangan maupun kinerja menunjukkan perlunya penguatan pada aspek

perencanaan, manajemen pelaksanaan, pengawasan internal, serta monitoring dan evaluasi (Monev) pada kinerja triwulan I di lingkungan perangkat daerah. Selain itu, monitoring dan evaluasi secara berkala serta pendekatan berbasis kinerja (performance-based budgeting) perlu lebih diintensifkan



agar pelaksanaan kegiatan tidak hanya terserap secara anggaran, tetapi juga memberikan output dan outcome yang sesuai dengan sasaran pembangunan daerah. Menghubungkan capaian program dan kegiatan pada level subkegiatan, dapat disimpulkan bahwa realisasi keuangan dan kinerja masih menghadapi tantangan signifikan dalam pelaksanaannya.

Dari sisi kinerja subkegiatan, capaian juga masih menunjukkan kecenderungan yang sama. Dari total 3.958 sub kegiatan, sebanyak 3.244 sub kegiatan (81,96%) masih memerlukan upaya keras untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. Sementara 576 sub kegiatan (14,55%) berada pada kategori akan tercapai, dan 138 sub kegiatan (3,5%) telah mencapai target kinerja. Meskipun terdapat sedikit perbaikan dalam sisi kinerja dibanding keuangan, persentase keberhasilan yang masih rendah mengindikasikan bahwa efektivitas pelaksanaan kegiatan masih belum optimal, baik dalam hal perencanaan, koordinasi, maupun eksekusi di lapangan.



Hal tersebut sejalan dengan capaian keuangan yang belum optimal pada triwulan I. Dari total 3.961 sub kegiatan yang dievaluasi, sebanyak 3.815 sub kegiatan atau sekitar 96,31% tergolong perlu upaya keras untuk dapat mencapai target realisasi anggaran. Sementara itu, hanya 138 sub

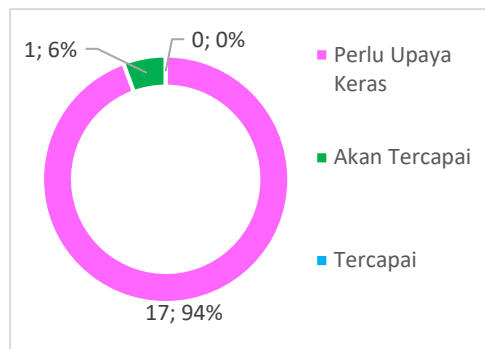
kegiatan (3,51%) yang diperkirakan akan tercapai, dan sangat sedikit, yaitu hanya 7 sub kegiatan (0,18%), yang telah berhasil mencapai target keuangan. Angka ini menunjukkan adanya hambatan serius dalam penyerapan anggaran pada triwulan awal. Faktor penghambat capaian kinerja dan keuangan pada triwulan I antara lain adanya kebijakan efisiensi anggaran yang menghambat pelaksanaan koordinasi antar pemerintah daerah dan stakeholder penyelenggaraan pemerintahan; kebijakan penundaan pekerjaan untuk menyesuaikan dengan program gubernur terpilih; lambatnya proses pengadaan, administrasi penatausahaan keuangan yang belum optimal, serta kurangnya kesiapan perangkat daerah dalam melaksanakan sub kegiatan secara tepat waktu. Berdasarkan uraian di atas, adapun capaian Indikator kinerja dan keuangan pada program, kegiatan, dan sub kegiatan masing-masing perangkat daerah diuraikan sebagaimana berikut.

4.4.1 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

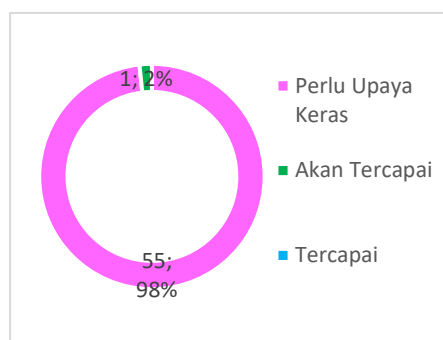
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menjalankan fungsi pada penyedia urusan pemerintah wajib yang merupakan layanan dasar. Hal tersebut menjadi daya ungkit dalam mendorong tercapainya tujuan pembangunan Kalimantan Timur yaitu “Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing”, khususnya pada sasaran “Meningkatnya Pemerataan Taraf Pendidikan Masyarakat”. Dalam pelaksanaannya, terdapat 9 (sembilan) program pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang terdiri dari Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, Program Pengelolaan Pendidikan, Program Pengembangan Kurikulum, Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Program Pengembangan Kebudayaan, Program Pengembangan Kesenian Tradisional, Program Pembinaan Sejarah, Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya, serta Program Pengelolaan Permuseuman.

Berdasarkan data capaian kinerja dan keuangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur pada Triwulan I Tahun 2025, terlihat bahwa tingkat pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan masih berada pada tahap yang memerlukan perhatian dan upaya yang signifikan. Berdasarkan uraian di atas, berikut analisis lebih mendalam mengenai

tingkat ketercapaian kinerja dan keuangan pada level program, kegiatan dan sub kegiatan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur.

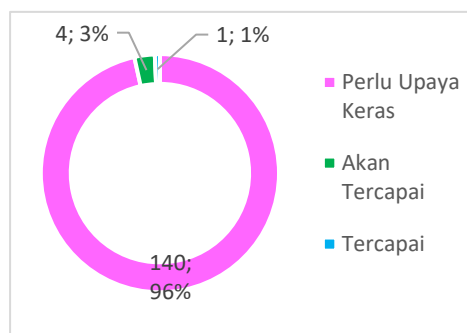


Pada level program, dari total 18 indikator yang dianggarkan, sebanyak 17 indikator program atau 94% masuk ke dalam kategori Perlu Upaya Keras, sementara 1 indikator program atau 6% berada dalam kategori Akan Tercapai. Namun hasil analisis tidak ada satu pun program yang telah dikategorikan Tercapai (0%) pada triwulan I tahun 2025.



Untuk level kegiatan, situasi serupa juga terlihat. Dari total 56 indikator kegiatan, sebanyak 55 indikator kegiatan (98%) termasuk ke dalam kategori perlu upaya keras agar dapat mencapai targetnya. Hanya 3 kegiatan (1%) yang menunjukkan indikasi akan mencapai target yang ditetapkan. Di sisi lain,

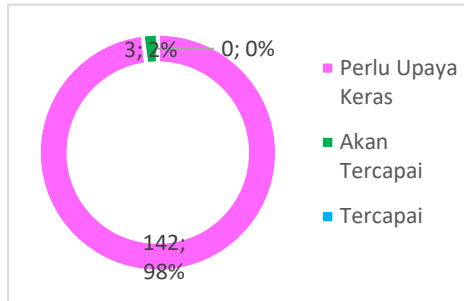
tidak terdapat kegiatan yang sepenuhnya telah Tercapai hingga akhir triwulan I. satu-satunya indikator termasuk ke dalam kategori akan tercapai yaitu berkaitan dengan Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran yg ditetapkan tepat waktu sebesar 51% pada TW I tahun 2025.



Kinerja pada tingkat sub kegiatan teridentifikasi bahwa dari 140 indikator sub kegiatan, sebanyak 140 (96%) masih berada dalam kategori Perlu Upaya Keras, dan hanya 1 sub kegiatan (3,1%) berada pada level Tercapai (1%). Hal ini mengindikasikan bahwa pelaksanaan teknis di level

operasional masih jauh dari ideal dan kemungkinan besar belum memberikan dampak signifikan terhadap sasaran kinerja tahunan. Berdasarkan uraian di atas, adapun sub kegiatan yang tingkat kinerjanya termasuk ke dalam kategori akan tercapai yaitu Jumlah Dokumen

Perencanaan Perangkat Daerah; Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN; Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD; dan Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilindungi, Dikembangkan dan Dimanfaatkan.



Dari sisi keuangan, pada sub kegiatan, dengan 142 dari 145 indikator sub kegiatan (98%) masih memerlukan upaya keras agar target realisasi keuangan dapat dicapai. Hanya 3 sub kegiatan (2%) yang menunjukkan progres ke arah akan tercapai.

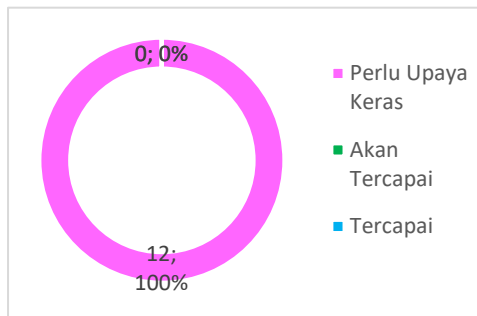
Secara keseluruhan, capaian kinerja dan keuangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur pada triwulan pertama tahun 2025 masih tergolong rendah. Persentase yang tinggi dalam kategori Perlu Upaya Keras di seluruh tingkatan menunjukkan bahwa sebagian besar program belum terlaksana secara optimal, baik dari aspek output kinerja maupun serapan anggaran. Hal ini dapat mengindikasikan adanya kendala struktural maupun administratif dalam pelaksanaan anggaran, perencanaan kegiatan, serta manajemen pelaksanaan yang perlu segera diperbaiki untuk menghindari penumpukan beban realisasi di akhir tahun anggaran.

4.4.2 Dinas Kesehatan

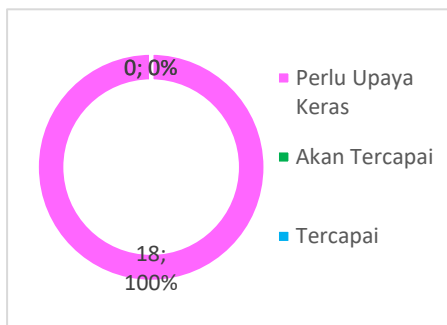
Dinas Kesehatan menjalankan fungsi pada penyedia urusan pemerintah wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, khususnya di bidang kesehatan. Fungsi tersebut menjadi salah satu penunjang utama terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah, yaitu “Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat”. Dalam rangka mewujudkan sasaran tersebut, Dinas Kesehatan melaksanakan 4 (empat) program, yakni Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat, Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman, serta Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan.

Pada level kinerja program, dari total 12 Indikator, seluruh indikator program atau 100% masih berada pada kategori Perlu Upaya Keras. Hal ini

menunjukkan bahwa sebagian besar kinerja program masih berada di bawah

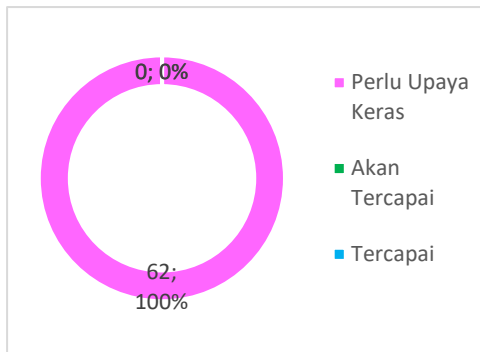


target yang ditetapkan dalam rencana kerja tahunan Dinas Kesehatan. Belum ada satu pun program yang termasuk ke dalam kategori akan tercapai maupun tercapai hingga TW I tahun 2025.



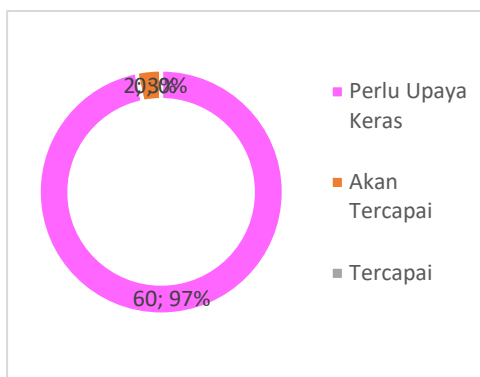
Untuk level kegiatan, dari 18 indikator, seluruh indikator masuk kategori Perlu Upaya Keras. Berpijak pada uraian di atas, indikator kegiatan tersebut yaitu Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah; Administrasi Keuangan Perangkat Daerah; Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah; Administrasi Umum Perangkat

Daerah; Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah; Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi; Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi; Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi; Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi; Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi; Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi; Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK); Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT); Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi; Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi; Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi



Kondisi serupa terlihat pada level sub kegiatan, di mana dari 62 sub kegiatan, seluruhnya termasuk ke dalam kategori perlu upaya keras. Belum ada satu pun juga yang sepenuhnya akan tercapai maupun Tercapai.

Dari aspek keuangan, pada sub kegiatan, dari total 123 indikator sub kegiatan, 120 di antaranya (97,6%) masih memerlukan percepatan untuk dapat memenuhi target penyerapan anggaran atau termasuk ke dalam kategori perlu upaya keras. Hanya 3 sub



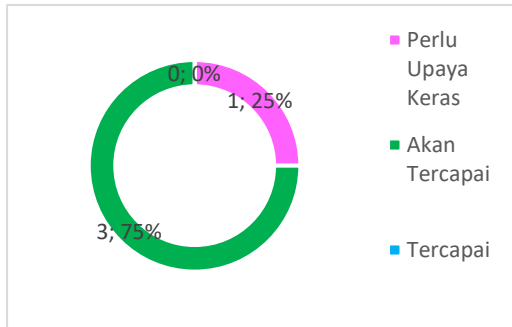
kegiatan (2,4%) yang berada pada status *Akan Tercapai*, dan tidak ada yang masuk kategori *Tercapai*. Oleh karena itu, secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa hasil analisis terkait indikator kinerja program, kegiatan dan level kegiatan Dinas Kegiatan menunjukkan bahwa pelaksanaan program,

kegiatan, dan sub kegiatan Dinas Kesehatan masih belum optimal baik dari sisi realisasi fisik (kinerja) maupun penyerapan anggaran (keuangan). Persentase yang sangat tinggi pada kategori Perlu Upaya Keras di semua level menunjukkan bahwa pelaksanaan belum sesuai ekspektasi.

4.4.3 RSUD A. Wahab Sjahranie

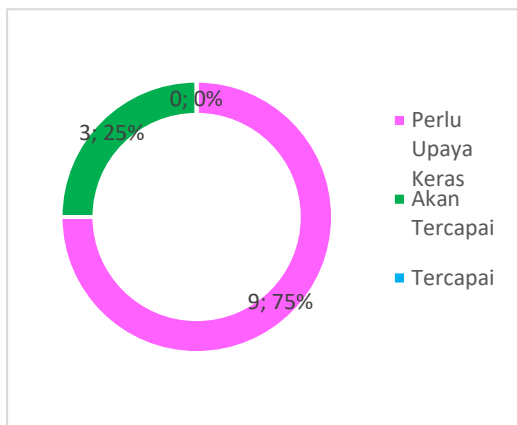
RSUD A. Wahan Sjahranie memiliki 3 program rencana kerja pemerintah daerah pada tahun 2025 yaitu program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi; program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat; program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan. Berdasarkan data capaian kinerja dan keuangan RSUD A. Wahab Sjahranie di Samarinda untuk Triwulan I Tahun 2025, terlihat bahwa pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan masih menunjukkan tantangan signifikan dalam hal pencapaian output dan penyerapan anggaran. Hal ini terlihat dari dominasi

kategori Perlu Upaya Keras pada sebagian besar indikator, baik dari aspek kinerja maupun keuangan.



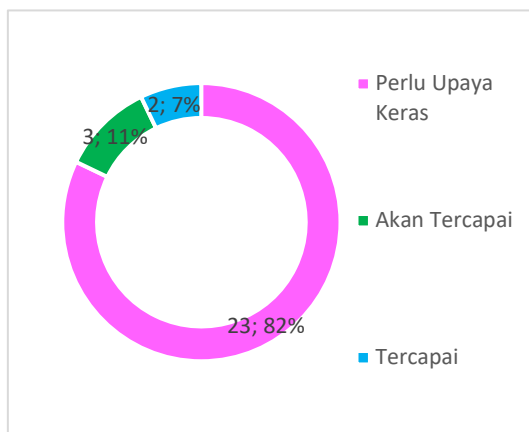
Dari perspektif kinerja, pada tingkat program, dari total 4 indikator program, sebanyak 3 program (75%) berada dalam kategori *Perlu Upaya Keras*, yang menunjukkan realisasi kinerja program masih jauh dari target triwulanan. Hanya

terdapat 1 indikator program (25%) yang masuk kategori *Akan Tercapai*, sementara belum ada program yang *Tercapai* sepenuhnya (0%). Berdasarkan analisa di atas, adapun 4 indikator kinerja program yang termasuk ke dalam klasifikasi akan tercapai yaitu Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan; Persentase Keluhan Pengguna yang ditindaklanjuti; dan Persentase capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) RS.



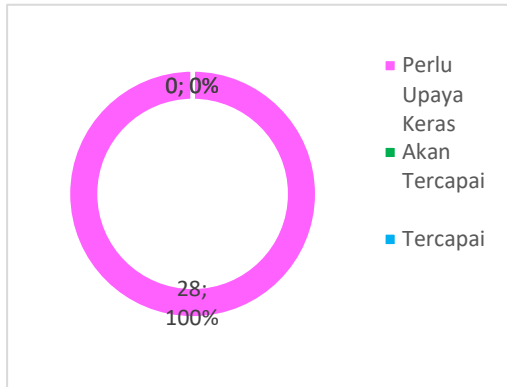
Untuk kegiatan, dari 12 kegiatan, terdapat 9 kegiatan (75%) yang masih memerlukan upaya lebih/keras agar dapat mencapai target yang diusulkan, sedangkan 3 kegiatan (25%) menunjukkan potensi untuk Akan Tercapai, serta tidak ada kegiatan yang telah mencapai target secara penuh. Sedangkan pada indikator

kinerja level sub kegiatan teridentifikasi bahwa dari total 28 sub kegiatan, sebanyak 23 sub kegiatan (82,1%) berada dalam kategori Perlu Upaya Keras, dan 3 sub kegiatan (10,7%) masuk kategori Akan Tercapai, serta hanya 2 sub



kegiatan (7,1%) yang sudah mencapai target (*Tercapai*). Kinerja Indikator kegiatan yang termasuk ke dalam kategori akan tercapai yaitu berkaitan dengan Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Rumah Sakit; Persentase Realisasi Anggaran Rumah Sakit; dan Persentase

Realisasi Target Anggaran Pendapatan dari layanan BLUD. Sedangkan kinerja sub kegiatan yang termasuk ke dalam klasifikasi telah tercapai pada TW I tahun 2025 berkaitan dengan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD.

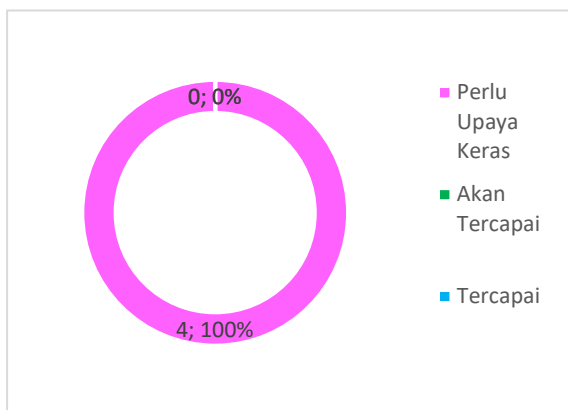


Dari sisi keuangan pada level indikator sub kegiatan RSUD A. Wahab Sjahranie teridentifikasi bahwa semua indikator perlu upaya keras untuk memastikan target keuangan terealisasi hingga akhir tahun 2025. Berpijak pada analisa di atas, RSUD A. Wahab Sjahranie

perlu segera melakukan percepatan pelaksanaan program melalui koordinasi internal, percepatan proses administrasi, serta monitoring berkala untuk mengidentifikasi hambatan dan merumuskan solusi strategis. Selain itu, keterlibatan manajemen puncak dan pelaporan rutin progres kinerja dapat menjadi kunci dalam mendorong akselerasi pencapaian target hingga akhir tahun 2025.

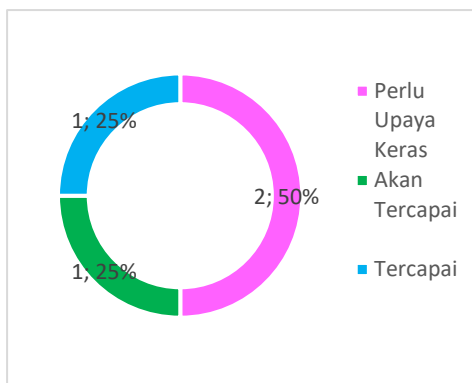
4.4.4 RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo

RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo memiliki 3 program rencana kerja pemerintah daerah pada tahun 2025 yaitu program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi; program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat; program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan.



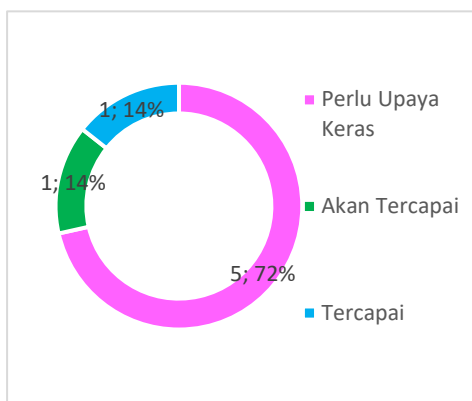
Berdasarkan data capaian kinerja dan realisasi keuangan RSUD dr. Kanudjoso Djatiwibowo di Balikpapan hingga Triwulan I, terlihat bahwa pelaksanaan program dan kegiatan belum menunjukkan hasil yang optimal, baik dari sisi output kinerja maupun serapan anggaran. Dari total

empat program yang direncanakan, seluruhnya atau 100% berada dalam kategori "Perlu Upaya Keras", yang menandakan bahwa belum ada satu pun program yang menunjukkan capaian memadai terhadap target yang telah ditetapkan. Hal ini mengindikasikan bahwa perencanaan dan implementasi program strategis rumah sakit masih menghadapi hambatan serius dalam pelaksanaannya, baik karena faktor internal seperti manajemen dan SDM, maupun faktor eksternal seperti keterlambatan pengadaan atau kebijakan anggaran.



Pada tingkat kinerja kegiatan, dari total lima indikator kegiatan yang direncanakan, dua kegiatan (50%) berada dalam kategori "Perlu Upaya Keras", sementara satu kegiatan (25%) berhasil mencapai target dan masuk dalam kategori "Tercapai". Situasi ini memberikan sedikit sinyal positif, namun

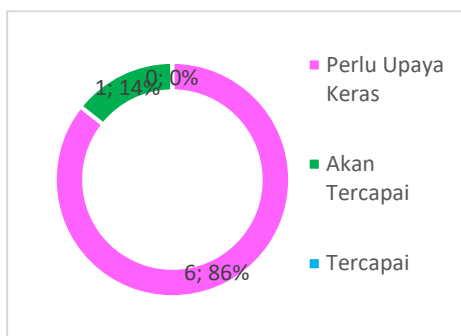
tetap menunjukkan bahwa mayoritas kegiatan belum berjalan secara efektif sesuai rencana atau target yang seharusnya. Indikator kinerja pada level kegiatan RSUD dr. Kanudjoso Djatiwibowo berkaitan dengan Tersedianya Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana. Prasarana. Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit Berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000; serta Terlaksana Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan.



Untuk level sub kegiatan, dari tujuh indikator kinerja yang direncanakan, sebanyak lima sub kegiatan (72%) tergolong "Perlu Upaya Keras", satu sub kegiatan (14%) diprediksi "Akan Tercapai", dan hanya satu sub kegiatan (14%) yang telah "Tercapai". Komposisi ini memperlihatkan bahwa

capaian operasional di tingkat yang lebih rinci masih belum menyentuh ekspektasi, dan memerlukan intervensi segera untuk menghindari akumulasi *backlog* pekerjaan di triwulan berikutnya.

Dalam hal ini, indikator kinerja pada level sub kegiatan yang termasuk ke dalam kategori perlu upaya keras secara berturut-turut adalah Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000; Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan; Jumlah Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit yang Disediakan; Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar; dan Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkatkan



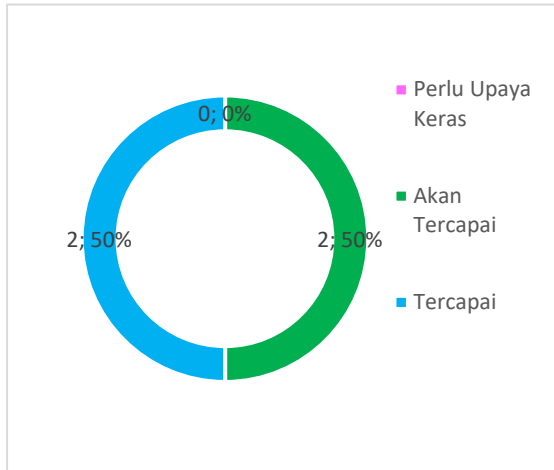
Dari sisi realisasi keuangan, situasi yang dihadapi RSUD ini tidak jauh berbeda. pada indikator sub kegiatan, enam dari tujuh sub kegiatan (86%) berada dalam kategori "Perlu Upaya Keras", dan hanya satu sub kegiatan (14,3%) yang berstatus "Akan Tercapai", tanpa

ada satu pun yang "Tercapai". Indikator pada level sub kegiatan yang termasuk ke dalam kategori perlu upaya keras di TW I tahun 2025 yaitu Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000; Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan; Jumlah Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit yang Disediakan; Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar; dan Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkatkan.

4.4.5 Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam

Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam memiliki 3 program rencana kerja pemerintah daerah pada tahun 2025 yaitu program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi; program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat; program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan. Berdasarkan data capaian kinerja dan keuangan RS Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam untuk Triwulan I Tahun 2025, terlihat bahwa pelaksanaan program,

kegiatan, dan sub kegiatan masih menunjukkan tantangan signifikan dalam hal pencapaian output dan penyerapan anggaran. Hal ini terlihat dari dominasi kategori Perlu Upaya Keras pada sebagian besar indikator, baik dari aspek kinerja maupun keuangan.

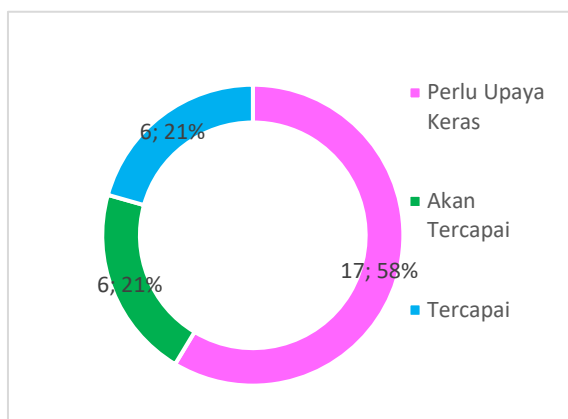


Dari perspektif kinerja, pada tingkat program, dari total 4 indikator program, sebanyak 2 indikator program (50%) berada dalam kategori akan tercapai, yang menunjukkan realisasi kinerja program optimis akan mencapai target hingga Akhir tahun 2025. Serta 2 indikator program (50%) yang masuk kategori Telah Tercapai sepenuhnya.

Berdasarkan analisa di atas, adapun 4 indikator kinerja program yang termasuk ke dalam klasifikasi akan tercapai yaitu Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan; Persentase Keluhan Pengguna yang ditindaklanjuti; dan Persentase capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) RS.

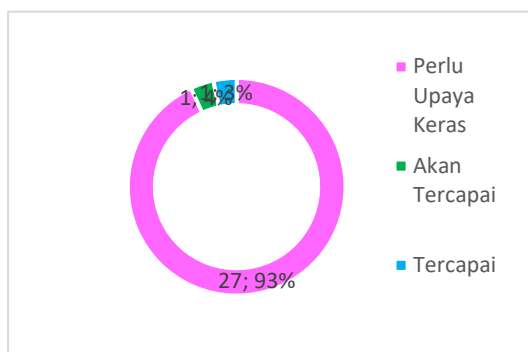


Untuk kegiatan, dari 12 kegiatan, terdapat 6 kegiatan (50%) yang masih memerlukan upaya lebih/keras agar dapat mencapai target yang diusulkan, sedangkan 5 kegiatan (42%) menunjukkan potensi untuk Akan Tercapai, serta 1 indikator kegiatan atau sebesar 8% yang telah mencapai target secara penuh oleh Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakan pada TW I Tahun 2025.



Sedangkan pada indikator kinerja level sub kegiatan teridentifikasi bahwa dari total 29 sub kegiatan, sebanyak 17 indikator kinerja sub kegiatan (58%) berada dalam kategori Perlu Upaya

Keras, dan 6 sub kegiatan (21%) masuk kategori Akan Tercapai, serta hanya 6 sub kegiatan (21%) yang sudah mencapai target (Tercapai). Kinerja Indikator kegiatan yang termasuk ke dalam kategori akan tercapai yaitu Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN; Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN; Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan; Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya; Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan; dan Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkatkan. Sedangkan kinerja sub kegiatan yang termasuk ke dalam klasifikasi telah tercapai pada TW I tahun 2025 berkaitan dengan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD.



Dari sisi keuangan pada level indikator sub kegiatan Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakan teridentifikasi bahwa 93% indikator perlu upaya keras untuk memastikan target keuangan terealisasi hingga akhir tahun 2025. Berpijak pada analisa di atas,

Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakan perlu segera melakukan percepatan pelaksanaan program melalui koordinasi internal, percepatan proses administrasi, serta monitoring berkala untuk mengidentifikasi hambatan dan merumuskan solusi strategis. Selain itu, keterlibatan manajemen puncak dan pelaporan rutin progres kinerja dapat menjadi kunci dalam mendorong akselerasi pencapaian target hingga akhir tahun 2025.

4.4.6 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat

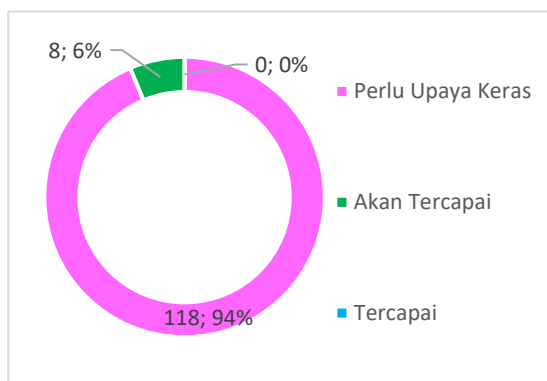
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat memiliki 15 program rencana kerja pemerintah daerah pada tahun 2025. Berdasarkan data dari Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat, capaian kinerja dan keuangan yang diukur melalui indikator program, kegiatan, dan sub kegiatan menunjukkan dominasi

kategori “Perlu Upaya Keras”, yang menandakan perlunya perhatian serius dalam pencapaian target.



Dari sisi kinerja, seluruh 20 program Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat atau 100% tercatat dalam kategori Perlu Upaya Keras, tanpa satupun yang masuk dalam kategori Akan Tercapai atau Tercapai. Bahkan hingga TW I pada tahun 2025 seluruh indikator program

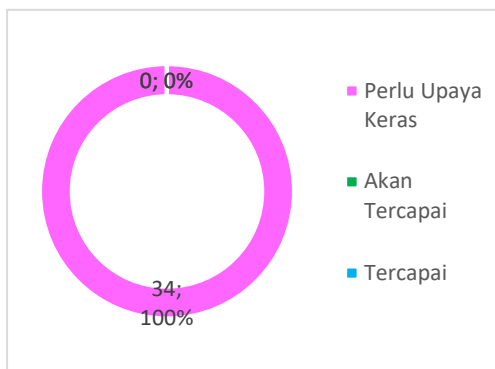
tersebut memiliki tingkat ketercapaian sebesar 0%. Hal ini menunjukkan rendahnya efektivitas perencanaan dan pelaksanaan program, lemahnya koordinasi antar unit kerja, serta belum optimalnya penyerapan anggaran pada triwulan awal.



Pada level kegiatan, dari 36 kegiatan yang dilaksanakan, 100% tercatat dalam kategori Perlu Upaya Keras, tanpa satupun yang masuk dalam kategori Akan Tercapai atau Tercapai. Bahkan hingga TW I pada tahun 2025 seluruh indikator program tersebut memiliki

tingkat ketercapaian sebesar 0%.

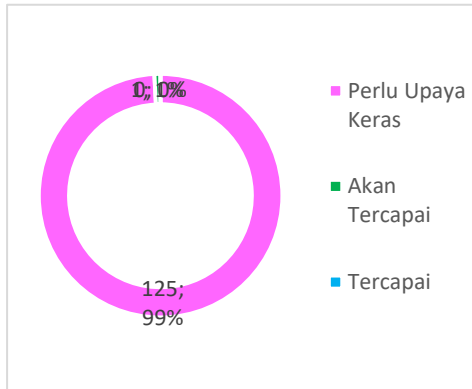
Sementara itu, dari total 118 indikator sub kegiatan, mayoritas atau sebanyak 118 sub kegiatan (94%) juga berada pada kategori Perlu Upaya



Keras, diikuti 8 sub kegiatan (6%) yang Akan Tercapai, dan tidak terdapat indikator kegiatan yang Tercapai hingga triwulan I tahun 2025. Dalam hal ini, delapan sub kegiatan yang termasuk ke dalam kategori sudah tercapai pada TW I tahun 2025 yaitu Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan

Tunjangan ASN; Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan; Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD; Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat; Jumlah

Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan; Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara; Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi; dan Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi

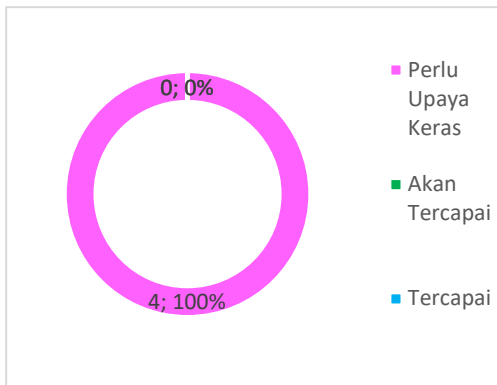


Dari sisi keuangan, pada level sub kegiatan, dari total 126 sub kegiatan, 125 (99%) masih berada dalam kategori Perlu Upaya Keras, 1 sub kegiatan (1%) berada di kategori Akan Tercapai, dan tidak ada indikator kinerja keuangan yang sepenuhnya Tercapai pada twirulan I tahun 2025. Secara

keseluruhan, baik dari sisi kinerja maupun keuangan, data ini menunjukkan bahwa realisasi pelaksanaan program dan kegiatan masih jauh dari harapan. Tingginya proporsi kategori “Perlu Upaya Keras” mengindikasikan tantangan serius dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan yang ada. Rendahnya persentase capaian pada kategori “Tercapai” baik dari segi kinerja maupun keuangan juga menunjukkan kemungkinan kendala dalam efisiensi pelaksanaan, pengelolaan sumber daya, serta koordinasi antarpihak yang terlibat. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi menyeluruh dan perbaikan strategi implementasi, termasuk penguatan pengawasan, peningkatan kapasitas pelaksana teknis, serta optimalisasi anggaran agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat mencapai hasil yang lebih optimal sesuai target yang telah ditetapkan.

4.4.7 Satuan Polisi Pamong Praja

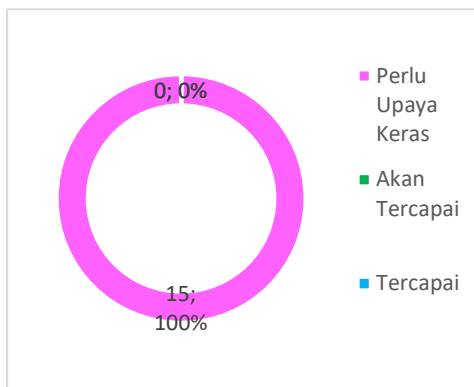
Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) Satuan Polisi Pamong Praja memiliki empat program yang diampuh dan menjadi tanggungjawab pada tahun 2025. Dalam hal ini, keempat program tersebut secara berturut-turut adalah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi; Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum; Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran; dan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi.



Berdasarkan data kinerja Satuan Polisi Pamong Praja hingga Triwulan I tahun 2025, terlihat bahwa dari total 4 indikator pada level program, hanya secara keseluruhan (100%) berada dalam kategori Perlu Upaya Keras. Dalam hal ini, keempat indikator tersebut secara berurut-turut

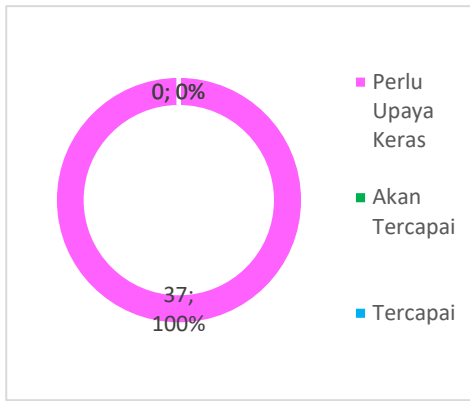
adalah Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan; Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan; dan Penurunan Jumlah Kejadian Kebakaran. Lebih mendalam, apabila dianalisa dari perspektif capaian kinerja teridentifikasi bahwa belum terdapat realisasi Persentase Kinerja pada triwulan I tahun 2025 atau sebesar 0%.

Kondisi yang sama juga terjadi pada indikator kinerja dari sisi kegiatan, terdapat 15 indikator dimana seluruhnya (100%) berada pada kategori



memerlukan upaya keras. Adapun seluruh kegiatan tersebut berkaitan dengan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah; Administrasi Keuangan Perangkat Daerah; Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah; Administrasi Umum Perangkat Daerah;

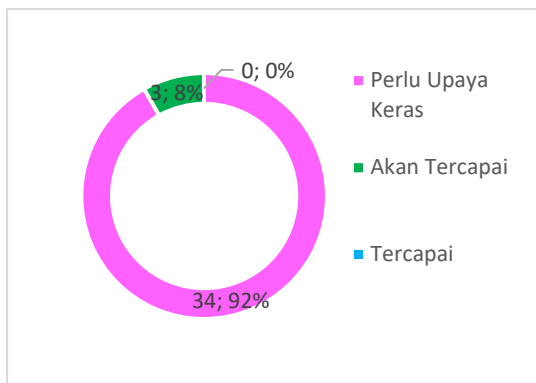
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah; Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi; Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi; Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur; Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi; Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran; Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah; Administrasi Keuangan Perangkat Daerah; Administrasi Umum Perangkat Daerah.



Pada level sub kegiatan, seluruh 37 Indikator kinerja sub kegiatan atau 100% tercatat dalam kategori Perlu Upaya Keras, tanpa satupun yang masuk dalam kategori Akan Tercapai maupun Tercapai. Data ini mencerminkan rendahnya capaian kinerja secara keseluruhan, yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti belum

optimalnya penyerapan anggaran, keterlambatan pelaksanaan di lapangan, maupun lemahnya perencanaan dan pengendalian program kerja di awal tahun.

Dari sisi keuangan pada level sub kegiatan, hampir seluruh sub kegiatan yang tercatat juga menunjukkan kondisi yang belum optimal. Hal ini



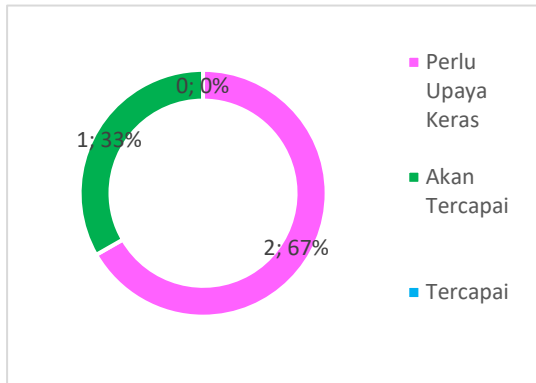
didukung dengan hasil analisis dimana, dari 37 indikator keuangan pada level sub kegiatan, sebanyak 34 indikator atau 92% masuk dalam kategori Perlu Upaya Keras. Hanya 3 sub kegiatan atau 8% yang berada dalam kategori Akan Tercapai, serta Tidak ada satupun sub

kegiatan (0%) yang berada dalam kategori Tercapai dari sisi realisasi anggaran. Kondisi ini menunjukkan bahwa tidak hanya dari sisi kinerja, namun juga dari sisi realisasi keuangan, sub kegiatan di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja masih menghadapi tantangan besar. Tingginya persentase sub kegiatan yang memerlukan upaya keras menandakan bahwa penyerapan anggaran pada triwulan I masih sangat rendah, yang berpotensi menghambat pencapaian target tahunan apabila tidak segera dilakukan percepatan pelaksanaan program sesuai dengan target yang telah ditetapkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja.

4.4.8 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

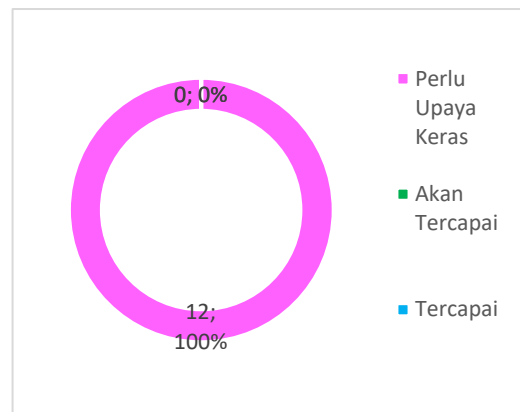
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalimantan Timur memiliki tugas utama menyelenggarakan urusan pemerintahan di

bidang penanggulangan bencana secara terpadu, mencakup aspek pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, serta rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. BPBD berperan sebagai koordinator dalam merencanakan, mengkoordinasikan, dan mengendalikan upaya penanggulangan bencana di tingkat provinsi. Dalam hal ini, terdapat hanya terdapat dua program yang menjadi tanggungjawab Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur yaitu berkaitan dengan Program

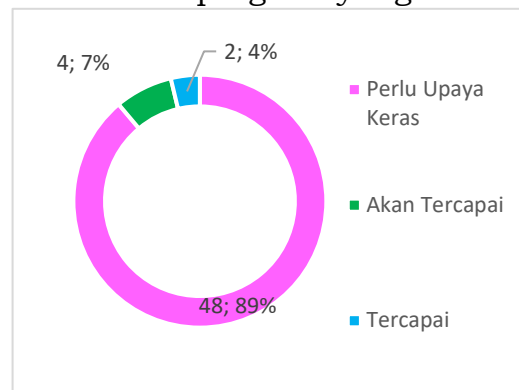


Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dengan indikator Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti dan Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan; dan program penanggulan bencana dengan indikator Persentase Pemulihan Pasca Bencana.

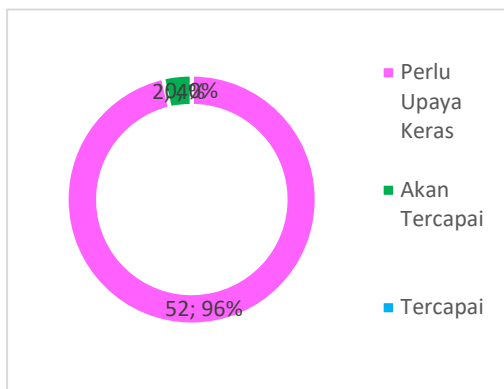
Pada Triwulan I tahun 2025, kinerja program Badan Penanggulangan Bencana Daerah menunjukkan bahwa dari 2 indikator kinerja dua diantaranya (67%) berada pada kategori memerlukan upaya yang keras sehingga diharapkan pada akhir tahun target telah tercapai. Sedangkan hanya terdapat 1 indikator (33%) yang masuk ke dalam kategori akan tercapai dan tidak terdapat indikator yang sudah tercapai. Berdasarkan analisa di atas, adapun indikator kinerja yang termasuk ke dalam kategori akan tercapai yaitu Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan. Sedangkan indikator program yang masih memerlukan upaya keras secara berurutan adalah Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti dan Persentase Pemulihan Pasca Bencana.



Dari sisi kegiatan, seluruh kegiatan atau 100% berada dalam kategori Perlu Upaya Keras, tanpa satupun yang tercatat



sebagai Akan Tercapai atau Tercapai. Di tingkat sub kegiatan, dari total 52 indikator sub kegiatan, sebanyak 48 indikator (89%) masih berada dalam kategori Perlu Upaya Keras, sementara 4 indikator (7%) berada dalam kategori Akan Tercapai, dan hanya 2 indikator (4%) yang termasuk ke dalam kategori Tercapai hingga Triwulan I tahun 2025. Berdasarkan analisa di atas, adapun dua indikator yang telah tercapai hingga TW I tahun 2025 tersebut yaitu berkaitan dengan Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD dan Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara.



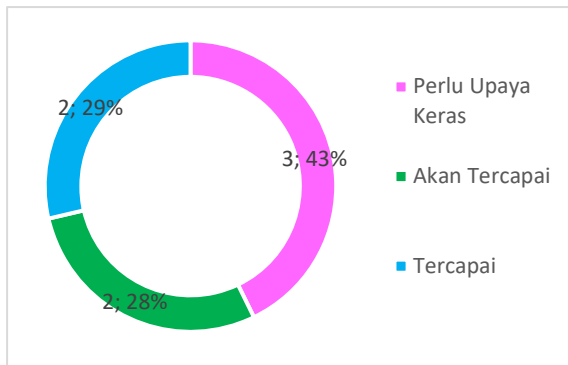
Sementara itu, dari sisi keuangan, di level sub kegiatan, dari total 54 sub kegiatan, sebanyak 52 sub kegiatan (96,30%) masuk kategori Perlu Upaya Keras, sementara hanya 2 sub kegiatan (3,70%) diperkirakan Akan Tercapai, dan tidak ada yang Tercapai. Berdasarkan hasil

analisis dan uraian di atas dapat dinyatakan bahwa BPBD Provinsi Kalimantan Timur masih menghadapi tantangan signifikan baik dari sisi kinerja maupun realisasi keuangan. Rendahnya capaian ini mengindikasikan perlunya percepatan pelaksanaan program, peningkatan koordinasi lintas unit, serta perbaikan dalam perencanaan dan pengendalian anggaran untuk menghindari akumulasi beban kinerja dan keuangan pada triwulan berikutnya.

4.4.9 Dinas Sosial

Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur memiliki tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang sosial yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi serta tugas pembantuan dari pemerintah pusat. Tugas ini mencakup perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kesejahteraan sosial, seperti penanganan fakir miskin, rehabilitasi sosial terhadap penyandang disabilitas, lanjut usia, anak terlantar, dan korban kekerasan, serta pelaksanaan perlindungan dan jaminan sosial bagi masyarakat rentan.

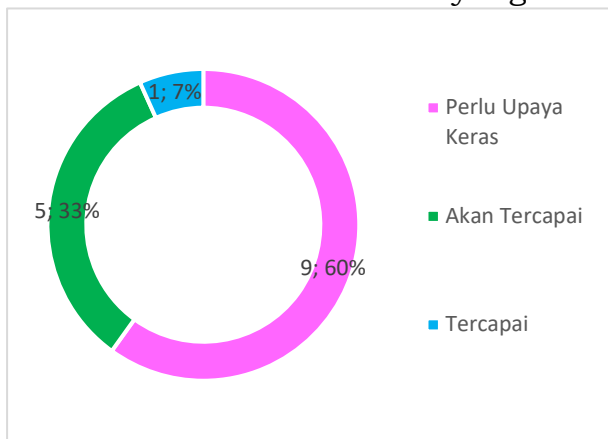
Selain itu, Dinas Sosial juga bertanggung jawab dalam penanggulangan bencana sosial dan pemberdayaan sosial masyarakat untuk meningkatkan taraf kesejahteraan.



Berdasarkan data capaian kinerja dan keuangan Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur hingga Triwulan I tahun 2025, diketahui bahwa dari total 7 indikator kinerja program, sebanyak 3 program (43%) masih berada dalam kategori Perlu Upaya Keras, 2 program

(28%) dalam kategori Akan Tercapai, dan 2 program (29%) telah masuk kategori Tercapai. Berpijak pada uraian di atas, 3 indikator yang termasuk ke dalam kategori masih diperlukan upaya keras oleh Dinas Sosial sehingga target dapat tercapai hingga akhir tahun 2025 yaitu Persentase lembaga sosial/mitra sosial yang diberdayakan; Jumlah Keluarga Miskin Yang Memiliki Usaha Ekonomi Produktif; dan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi yang dikelola dengan baik.

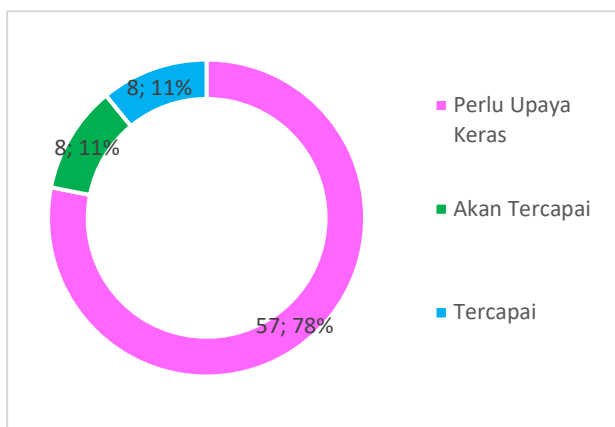
Persentase lembaga sosial atau mitra sosial yang diberdayakan menunjukkan sejauh mana peran serta aktor-aktor sosial telah ditingkatkan dalam mendukung program-program kesejahteraan. Jumlah keluarga miskin yang memiliki usaha ekonomi produktif menjadi indikator penting dalam mengukur keberhasilan program pemberdayaan ekonomi, yang bertujuan untuk mengurangi angka kemiskinan melalui penciptaan usaha yang mandiri dan berkelanjutan. Sementara itu, indikator Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi yang baik mencerminkan bentuk penghormatan



terhadap jasa para pahlawan serta komitmen pemerintah dalam menjaga fasilitas yang bernilai sejarah dan nasionalisme. Ketiga indikator tersebut termasuk dalam klaster perlindungan dan jaminan sosial, yang mencakup upaya pemberdayaan, perlindungan, serta

penghormatan terhadap kelompok rentan dan tokoh bangsa. Untuk itu, mengingat pentingnya ketiga indikator program tersebut mengharuskan adanya upaya keras pemerintah terutama dalam hal ini Dinas Sosial untuk melakukan koordinasi sehingga indikator tercapai. Sebab, ketidaktercapaian indikator program tersebut menjadi indikasi bahwa pelayanan sosial dan pemberdayaan masyarakat tidak optimal.

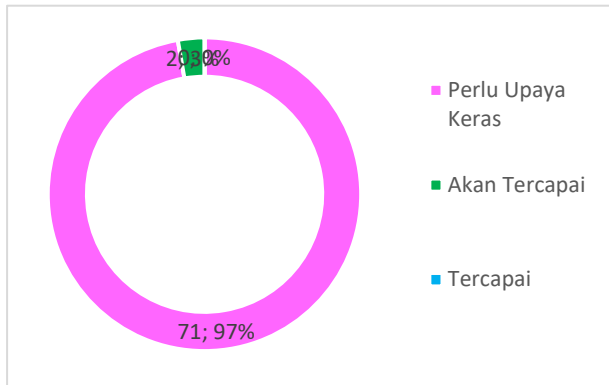
Pada tingkat kegiatan, dari 16 indikator kegiatan yang dilaksanakan, 9 kegiatan (60%) masih perlu upaya keras, 5 kegiatan diperkirakan akan tercapai, dan 1 kegiatan sudah tercapai. Berpijak pada uraian di atas, tingkat ketercapaian kegiatan dinas sosial sudah menunjukkan kondisi yang cukup baik meskipun masih diperlukan beberapa upaya yang harus diinisiasi sehingga diharapkan indikator kinerja yang termasuk kategori perlu upaya keras dan akan tercapai dapat terealisasi sesuai target di tahun 2025. Adapun indikator yang termasuk ke dalam kategori perlu upaya keras tersebut secara berturut-turut adalah Jumlah Laporan yang disusun pada kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah; Jumlah Pembuatan Laporan Administrasi Umum Dinas Sosial Prov. Kaltim; Jumlah Laporan yang disusun pada kegiatan Pengandaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah; Jumlah Kegiatan Rekomendasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang; Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang diberdayakan; Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA yang di berikan pelayanan, rehabilitasi serta bantuan sosial;



Jumlah Pengangkatan Anak Antar WNI dan Pengangkatan Anak Oleh Orang Tua Tunggal; Terlaksananya Pengentasan dan Penanganan Kemiskinan Kewenangan Provinsi; dan Jumlah Lokasi Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi.

Sedangkan pada level sub kegiatan, dari total 73 sub kegiatan, sebanyak 53 sub kegiatan (78%) memerlukan upaya keras, 8 sub kegiatan akan

tercapai, dan 8 sub kegiatan (11%) telah tercapai. Berpijak pada uraian di atas, tingginya indikator sub kegiatan yang masih berada di kategori perlu upaya keras di TW I tahun 2025 menjadi cerminan supaya OPD terkait mampu mengakselerasi kembali setiap program, kegiatan maupun sub kegiatan sehingga diharapkan penyediaan dan penjaminan aspek sosial bagi



masyarakat daerah tetap tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan oleh Dinas Sosial.

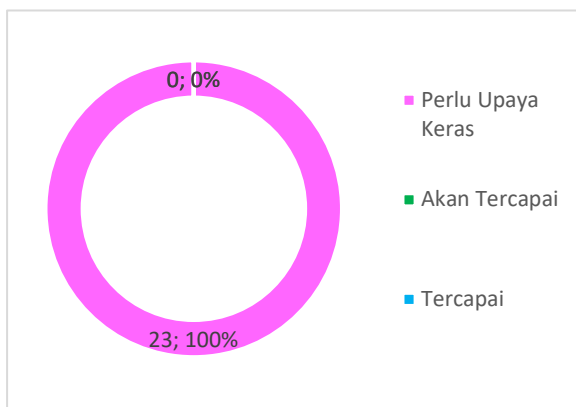
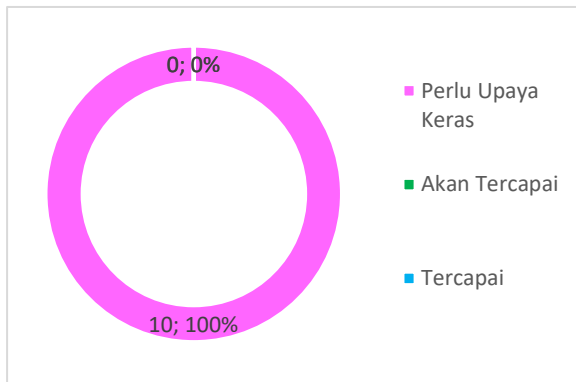
Dari sisi keuangan, pada tingkat sub kegiatan, dari total 73 indikator sub kegiatan, sebanyak 71 sub kegiatan (97%) berada pada

kategori Perlu Upaya Keras, 2 sub kegiatan berada dalam kategori Akan Tercapai, dan tidak ada sub kegiatan yang sudah Tercapai. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa meskipun dari sisi kinerja Dinas Sosial menunjukkan kemajuan dengan 27,27% program telah tercapai dan 59,09% diproyeksikan akan tercapai, namun dari sisi keuangan seluruh program dan mayoritas kegiatan serta sub kegiatan masih berada pada kategori Perlu Upaya Keras. Hal ini mengindikasikan perlunya peningkatan efisiensi dan efektivitas dalam penyerapan anggaran agar selaras dengan pencapaian target kinerja yang sudah relatif lebih baik.

4.4.10 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi menyelenggarakan peranannya sebagai OPT yang bertugas untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan tenaga kerja sekaligus menjamin peningkatan penyerapan dan lapangan kerja di Provinsi Kalimantan Timur. Untuk mencapai dan melaksanakan mandat tersebut adapun program yang menjadi tanggungjawab Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, Program Perencanaan Tenaga Kerja, Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja, Program Penempatan Tenaga Kerja, Program Hubungan Industrial, Program Pengawasan Ketenagakerjaan, Program Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi, dan Program

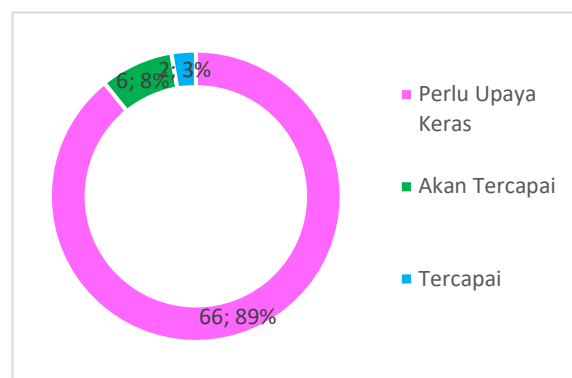
Pengembangan Kawasan Transmigrasi. Secara umum, capaian kinerja dan keuangan dari program-program tersebut masih tergolong sangat rendah.



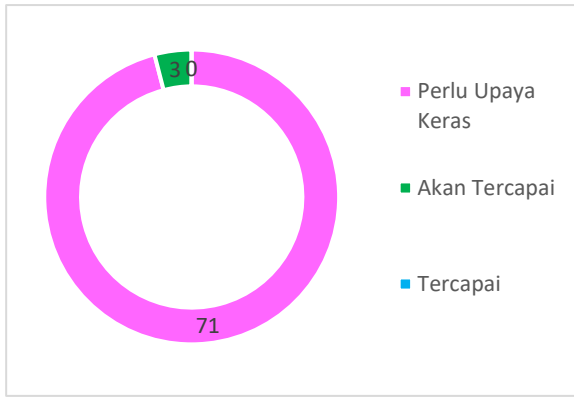
Berdasarkan data capaian kinerja dan keuangan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur hingga Triwulan I tahun 2025, dapat diketahui bahwa seluruh program yang berjumlah 10 program (100%) masih berada pada kategori Perlu Upaya Keras. Tidak ada program yang masuk kategori *Akan Tercapai* maupun *Tercapai*. Dalam hal ini indikator tersebut menunjukkan bahwa tingkat kinerja dari OPD Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi masih relatif rendah dibandingkan beberapa OPD Lainnya untuk itu diperlukan

upaya keras sehingga diharapkan indikator dengan target yang ditetapkan dapat terealisasi hingga akhir tahun 2025.

Hal yang sama juga terjadi pada tingkat kegiatan, di mana dari 23 kegiatan (100%) seluruhnya juga berada pada kategori *Perlu Upaya Keras*. Untuk level sub kegiatan, dari total 74 sub kegiatan, sebanyak 66 sub kegiatan (89%) masih



memerlukan upaya keras, 8 sub kegiatan (6%) masuk dalam kategori *Akan Tercapai*, dan hanya 2 sub kegiatan (3%) yang telah *Tercapai*. Dalam hal ini, dua indikator yang termasuk ke dalam kategori telah tercapai tersebut lebih ke arah operasional yang berkaitan dengan Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN; dan Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara

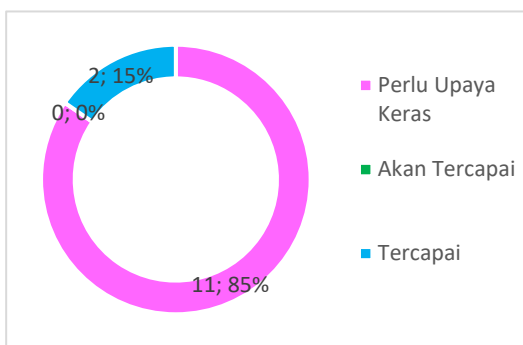


Dari sisi keuangan, kondisi yang hampir serupa juga terlihat. Dari 71 program yang tercatat, masih mayoritas indikator termasuk ke dalam kategori *Perlu Upaya Keras*. Secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa baik dari sisi kinerja maupun keuangan, Dinas

Tenaga Kerja dan Transmigrasi masih menghadapi tantangan serius dalam merealisasikan program, kegiatan, dan sub kegiatan secara optimal. Seluruh capaian program dan kegiatan masih membutuhkan perhatian khusus dan intervensi strategis untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan program dan penyerapan anggaran agar sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

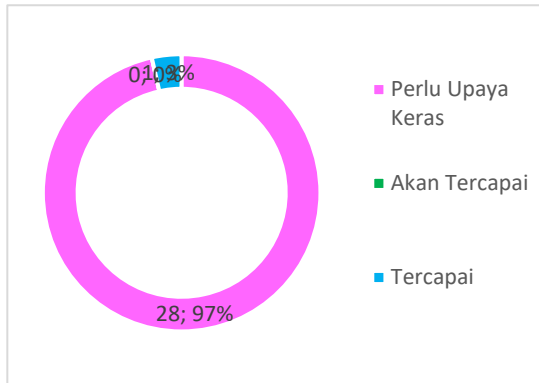
4.4.11 Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Dalam menjalankan fungsinya, Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melaksanakan 12 program. Adapun program-program tersebut terdiri dari Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, Program Perlindungan Perempuan, Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak, Program Pemenuhan Hak Anak (PHA), Program Perlindungan Khusus Anak, Program Pendaftaran Penduduk, Program Pencatatan Sipil, Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, Program Pengendalian Penduduk, Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB), dan Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS).



Pada level program, dari total 13 program yang direncanakan, 11 program atau 85% termasuk dalam kategori *Perlu Upaya Keras*. Artinya, mayoritas program belum menunjukkan progres signifikan baik dalam realisasi output maupun

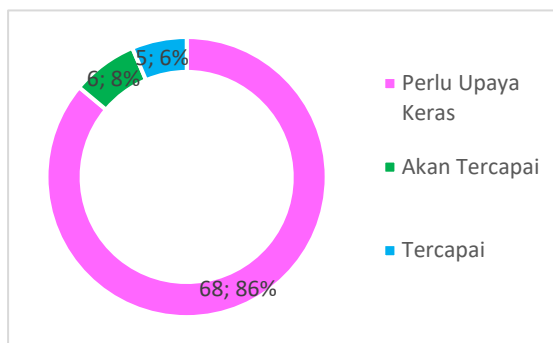
outcome yang diharapkan. Hanya 2 program (15,4%) yang berhasil dikategorikan *Tercapai*, sementara tidak ada program yang masuk dalam kategori *Akan Tercapai* (0%). Hal ini menandakan bahwa masih diperlukan langkah-langkah strategis untuk mempercepat implementasi kebijakan di bidang kependudukan dan pemberdayaan perempuan.



Pada level kegiatan, dari total 29 kegiatan, sebanyak 28 kegiatan (97%) masuk dalam kategori *Perlu Upaya Keras*, dan hanya 1 kegiatan (3%) yang telah *Tercapai*. Tidak ada kegiatan yang berada dalam status *Akan Tercapai*. Persentase yang tinggi pada kategori

Perlu Upaya Keras mencerminkan bahwa realisasi fisik atau hasil kinerja di lapangan belum maksimal.

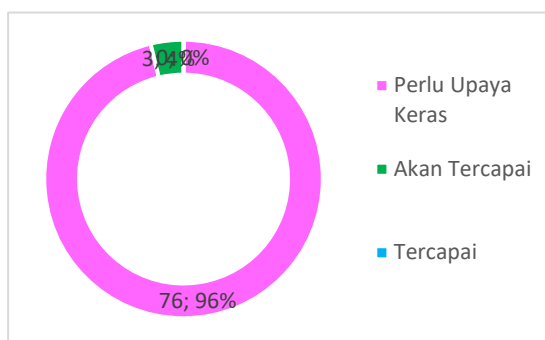
Sementara itu, pada tingkat sub kegiatan, dari 79 sub kegiatan, 68 sub kegiatan (86%) masih memerlukan *Upaya Keras* untuk mencapai target yang



telah ditetapkan. Sebanyak 6 sub kegiatan (8%) menunjukkan indikasi akan tercapai, dan hanya 5 sub kegiatan (6%) yang telah memenuhi target dan dikategorikan *Tercapai*. Hal ini menandakan bahwa kendala utama masih banyak ditemukan di level

operasional teknis, seperti pelaksanaan kegiatan langsung kepada masyarakat dan pendistribusian sumber daya.

Dari sisi realisasi keuangan, untuk sub kegiatan, dari total 79 sub kegiatan, sebanyak 76 sub kegiatan (96%) masih berada dalam kategori *Perlu*



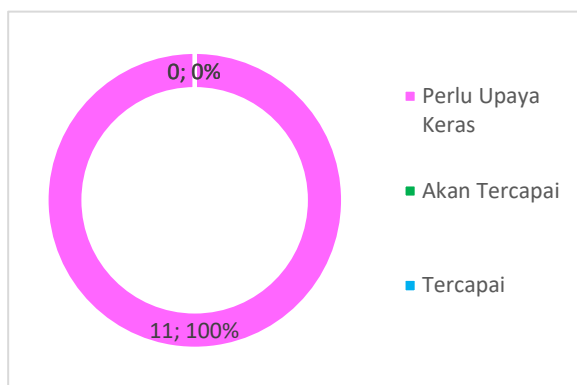
Upaya Keras. Hanya 3 sub kegiatan (4%) yang menunjukkan progres ke arah *Akan Tercapai*, dan tidak ada sub kegiatan yang telah *Tercapai* (0%). Tingginya deviasi ini mengindikasikan bahwa pelaksanaan teknis di lapangan

masih menemui berbagai hambatan, baik dari aspek administratif, perencanaan, hingga pengadaan. Secara keseluruhan, capaian kinerja dan keuangan Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Triwulan I Tahun 2025 masih tergolong rendah. Dominasi kategori *Perlu Upaya Keras* di seluruh level (program, kegiatan, dan sub kegiatan) menandakan bahwa pelaksanaan program pembangunan belum berjalan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Kondisi ini mengindikasikan adanya tantangan baik secara struktural, perencanaan teknis, koordinasi, maupun administrasi pelaksanaan.

Oleh karena itu, perlu segera dilakukan evaluasi menyeluruh atas faktor-faktor penghambat pelaksanaan, serta dilakukan langkah-langkah perbaikan seperti peningkatan koordinasi lintas unit, penyesuaian jadwal pelaksanaan, penguatan sistem monitoring dan evaluasi, serta penguatan kapasitas sumber daya pelaksana di lapangan. Tanpa langkah percepatan dan pembenahan menyeluruh, dikhawatirkan capaian target tahunan tidak akan dapat terealisasi secara optimal, yang pada akhirnya dapat berdampak pada efektivitas pelayanan publik di bidang kependudukan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak.

4.4.12 Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura

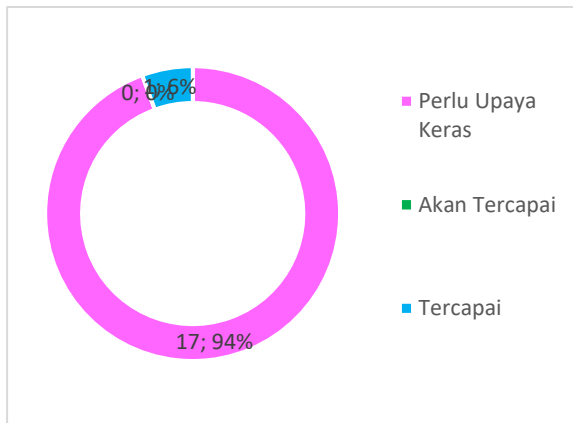
Dinas Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura menyelenggarakan 8 (delapan) program, yaitu Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat, Program Penanganan Kerawanan Pangan, Program Pengawasan Keamanan Pangan, Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian, Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian, Program



Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian, serta Program Penyuluhan Pertanian.

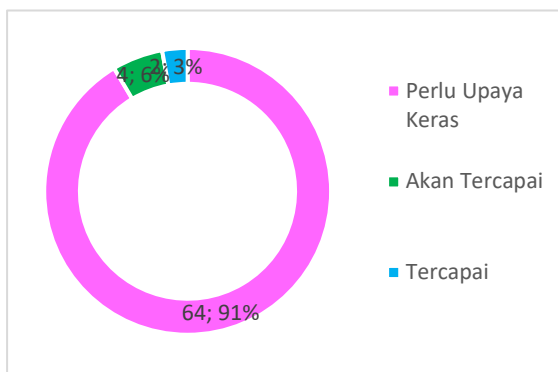
Berdasarkan data capaian kinerja dan keuangan hingga Triwulan I Tahun 2025, terlihat bahwa pelaksanaan program, kegiatan, dan

sub kegiatan masih belum optimal, baik dari sisi pencapaian fisik (kinerja) maupun penyerapan anggaran (keuangan). Seluruh entitas pelaksana yang diinisiasi dari pendekatan indikator kinerja pada level program masih berada dalam kategori *Perlu Upaya Keras*. Kondisi ini menandakan belum maksimalnya pelaksanaan kegiatan di lapangan.



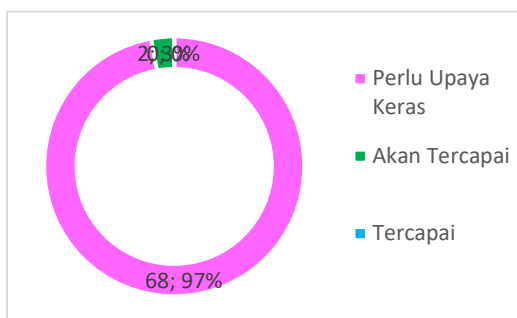
Pada tingkat kegiatan, dari total 18 indikator kegiatan, terdapat 17 kegiatan (94%) yang masuk dalam kategori *Perlu Upaya Keras*, mencerminkan lemahnya progres pelaksanaan kegiatan secara keseluruhan. Hanya 1 kegiatan (6%) yang berada pada status telah

mencapai target penuh (*Tercapai*). Kondisi ini memperlihatkan bahwa realisasi fisik kegiatan belum menunjukkan capaian yang signifikan, dan apabila tidak segera dilakukan percepatan, dikhawatirkan akan menghambat capaian target program secara keseluruhan.



Untuk sub kegiatan, dari total 70 indikator sub kegiatan, sebanyak 64 sub kegiatan (91%) dikategorikan *Perlu Upaya Keras*, sementara hanya 4 sub kegiatan (6%) berstatus *Akan Tercapai*, dan hanya 2 sub kegiatan (3%) yang telah *Tercapai*. Tingginya angka pada

kategori *Perlu Upaya Keras* menunjukkan bahwa implementasi teknis di lapangan, seperti pengadaan barang, pemberdayaan masyarakat, atau distribusi bantuan, belum berjalan optimal. Hal ini mengindikasikan adanya



kendala pada level operasional yang perlu segera diidentifikasi dan ditindaklanjuti.

Dari sisi realisasi keuangan, kondisi serapan anggaran juga menunjukkan tren yang belum optimal. Pada tingkat indikator realisasi keuangan sub kegiatan

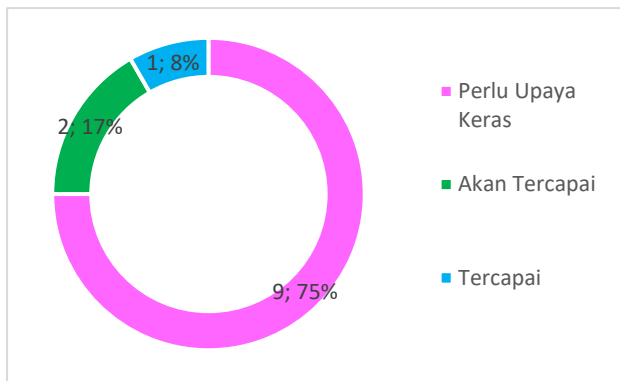
Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura menunjukkan bahwa dari total 70 sub kegiatan, sebanyak 68 sub kegiatan (97%) masih berada dalam kategori *Perlu Upaya Keras*, hanya 2 sub kegiatan (3%) yang masuk kategori *Akan Tercapai*, dan tidak ada sub kegiatan yang telah *Tercapai*. Kondisi ini mencerminkan bahwa penyerapan anggaran pada level operasional masih sangat rendah dan perlu percepatan agar tidak menumpuk di akhir tahun anggaran.

Secara keseluruhan, data capaian kinerja dan keuangan Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur pada Triwulan I Tahun 2025 menunjukkan bahwa pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan masih jauh dari optimal. Dominasi kategori *Perlu Upaya Keras* baik pada aspek kinerja maupun keuangan mengindikasikan perlunya percepatan pelaksanaan dan pembenahan menyeluruh dalam pengelolaan program. Hambatan di berbagai level pelaksanaan perlu segera diidentifikasi, mulai dari perencanaan, administrasi keuangan, pengadaan, hingga distribusi manfaat ke masyarakat. Diperlukan langkah-langkah strategis seperti penguatan manajemen pelaksanaan, peningkatan kapasitas pelaksana, serta monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan guna mendorong capaian yang lebih baik pada triwulan-triwulan berikutnya dan menghindari penumpukan realisasi di akhir tahun anggaran.

4.4.13 Dinas Lingkungan Hidup

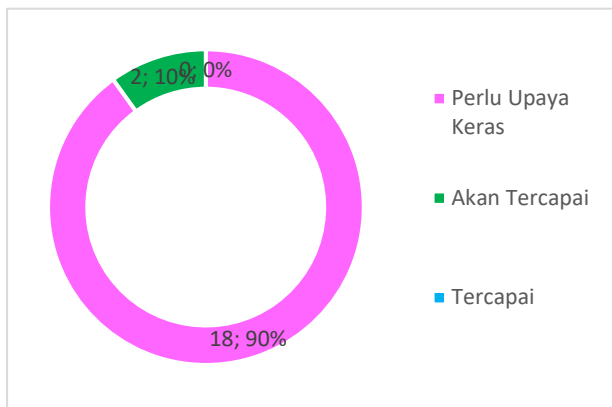
Dinas Lingkungan Hidup menyelenggarakan 10 (sepuluh) program, yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, Program Perencanaan Lingkungan Hidup, Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup, Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI), Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah B3, Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin PPLH, Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat, Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat, Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup, serta Program Pengelolaan Persampahan. Secara umum, capaian kinerja dan keuangan dari program-program tersebut

masih rendah. Sebagian besar indikator belum menunjukkan progres berarti atau masih di angka nol, dan realisasi keuangan pun masih terbatas pada kegiatan administratif.



Berpijak pada uraian di atas, dari sisi kinerja pada level program, dari total 12 program, sebanyak 9 program (75%) masih dalam kategori *Perlu Upaya Keras*, yang menunjukkan rendahnya pencapaian output dan outcome

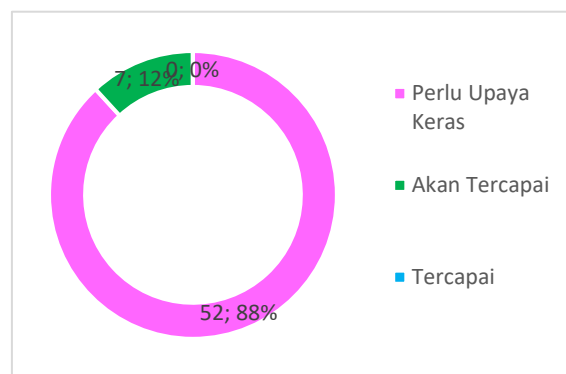
dari pelaksanaan program. Sementara itu, 2 program (17%) berada dalam kategori *Akan Tercapai*, dan hanya 1 program (8%) yang telah berhasil mencapai target dan masuk kategori *Tercapai*. Capaian ini mencerminkan bahwa mayoritas program masih membutuhkan percepatan dan perhatian dalam implementasinya agar selaras dengan rencana kerja tahunan.



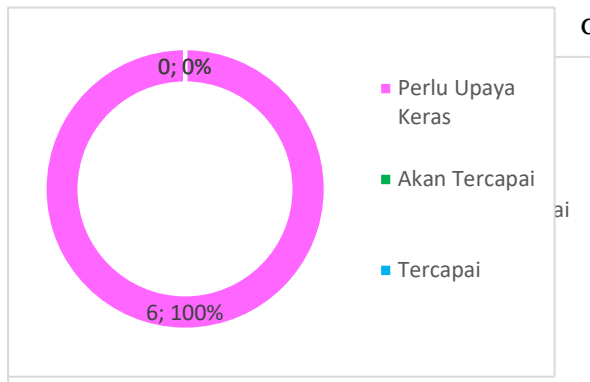
Pada tingkat kegiatan, dari total 20 kegiatan, sebanyak 18 kegiatan (90%) termasuk dalam kategori *Perlu Upaya Keras*, hanya 2 kegiatan (10%) masuk kategori *Akan Tercapai*, dan tidak ada kegiatan (0%) yang telah *Tercapai*. Persentase ini menandakan bahwa

pelaksanaan kegiatan di lapangan masih belum maksimal, dan mayoritas kegiatan masih tertinggal dari rencana target.

Pada level sub kegiatan, dari total 59 sub kegiatan, 52 sub kegiatan (88%) berada dalam kategori *Perlu Upaya Keras*, 7 sub kegiatan (12%) masuk dalam kategori *Akan Tercapai*, dan tidak ada sub kegiatan (0%) yang telah mencapai target sepenuhnya. Ini mengindikasikan bahwa implementasi teknis di lapangan, seperti pengadaan,



penyaluran, dan monitoring, masih menghadapi hambatan yang perlu segera diatasi.



Dari sisi keuangan, Untuk sub kegiatan, dari total 59 sub kegiatan, 58 sub kegiatan (98,3%) masih berada dalam kategori *Perlu Upaya Keras*, hanya 1 sub kegiatan (1,7%) berada dalam kategori *Akan Tercapai*,

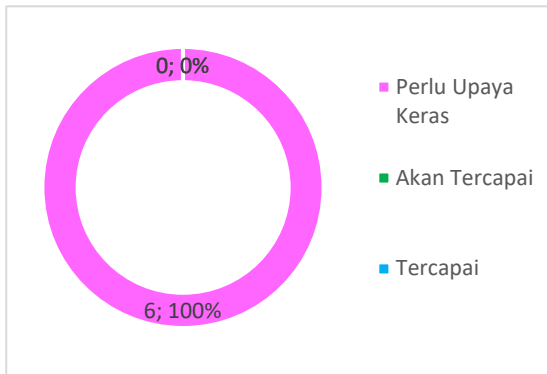
dan tidak ada sub kegiatan yang *Tercapai*. Capaian ini memperlihatkan bahwa realisasi keuangan pada level operasional sangat minim dan berpotensi menimbulkan beban realisasi tinggi pada akhir tahun anggaran jika tidak segera ditindaklanjuti.

Secara keseluruhan, capaian kinerja dan keuangan Dinas Lingkungan Hidup pada Triwulan I Tahun 2025 masih tergolong rendah. Mayoritas entitas program dan kegiatan menunjukkan realisasi yang belum optimal, baik dari sisi output kinerja maupun serapan anggaran. Hal ini mengindikasikan adanya kendala struktural dan teknis yang perlu segera diatasi, melalui perbaikan perencanaan, percepatan pelaksanaan, serta penguatan koordinasi internal dan lintas sektor untuk mendorong capaian yang lebih baik di triwulan berikutnya.

4.4.14 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa mengampu 5 (lima) program, mencakup Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, Program Penataan Desa, Program Peningkatan Kerja Sama Desa, Program Administrasi Pemerintahan Desa, dan Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat. Berdasarkan data capaian kinerja dan keuangan, secara umum seluruh program masih menunjukkan progres yang rendah. Berikut merupakan rincian capaian indikator kinerja dan keuangan.

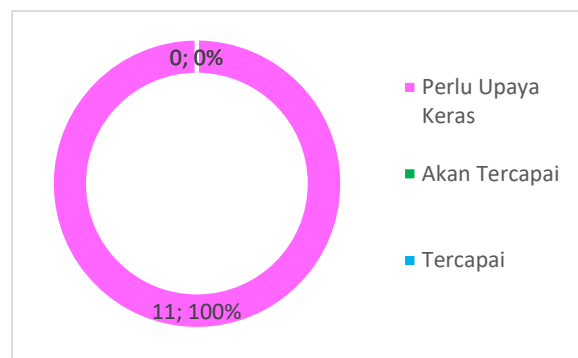
Dari sisi kinerja, dapat dilihat bahwa seluruh program yang berjumlah 6 indikator kinerja (100%) masih berada dalam kategori *Perlu Upaya Keras*, yang berarti belum menunjukkan progres yang memadai dalam



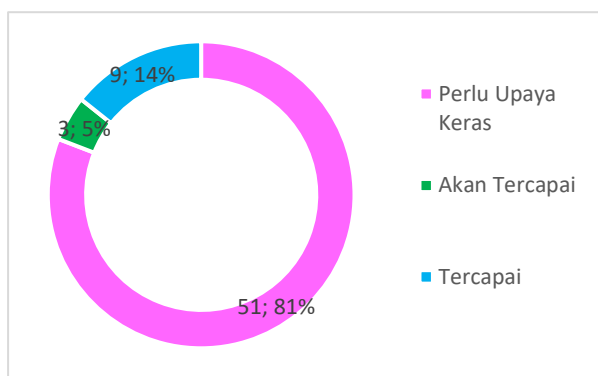
pelaksanaannya. Ini mengindikasikan bahwa perencanaan atau implementasi program belum efektif dan belum menghasilkan output yang sesuai dengan target yang telah ditentukan. Tidak ada program yang masuk kategori Akan Tercapai maupun Tercapai,

sehingga diperlukan perbaikan strategis mulai dari perencanaan indikator kinerja, pelaksanaan kegiatan, hingga sistem evaluasi yang digunakan.

Pada level kegiatan, dari total 11 indikator kinerja kegiatan, semuanya (100%) juga berada pada kategori Perlu Upaya Keras, yang artinya seluruh kegiatan yang dirancang belum menunjukkan indikasi keberhasilan maupun kedekatan



pada target. Hal ini dapat menunjukkan adanya masalah struktural atau manajerial dalam pelaksanaan kegiatan, seperti kurangnya sumber daya, lemahnya koordinasi, atau ketidaksesuaian antara rencana dan pelaksanaan teknis di lapangan.

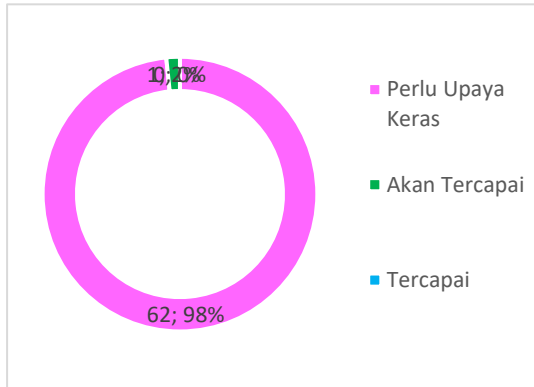


Sementara itu, sub kegiatan sebagai elemen yang paling rinci menunjukkan sedikit perkembangan. Dari 63 sub kegiatan, sebanyak 51 sub kegiatan (81%) masih tergolong Perlu Upaya Keras, namun sudah ada 3 sub

kegiatan (5%) yang berada dalam kategori Akan Tercapai, dan 9 sub kegiatan (14%) yang telah Tercapai. Meskipun jumlah sub kegiatan yang berhasil masih relatif kecil, ini menunjukkan bahwa pada tataran implementasi mikro terdapat beberapa inisiatif atau aktivitas yang sudah mulai berjalan efektif dan membuahkan hasil. Hal ini menjadi indikator positif yang bisa dijadikan

model untuk mendorong peningkatan kinerja di kegiatan dan program lainnya.

Dari sisi keuangan, situasinya justru lebih kritis dibandingkan dengan kinerja. Pada sub kegiatan, yang jumlahnya juga 63, hampir seluruhnya atau



62 sub kegiatan (98%) masih masuk kategori Perlu Upaya Keras, dan hanya 1 sub kegiatan (2%) yang menunjukkan kemajuan Akan Tercapai, sementara tidak ada yang Tercapai. Ini memperlihatkan bahwa realisasi anggaran pada tingkat paling rinci juga

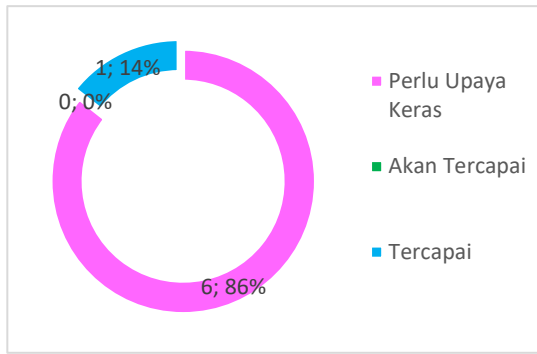
sangat rendah. Padahal, sub kegiatan merupakan pelaksana teknis di lapangan, sehingga rendahnya capaian di level ini dapat menyebabkan dampak domino terhadap capaian kegiatan dan program secara keseluruhan.

Dari uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa menghadapi tantangan besar baik dari sisi efektivitas pelaksanaan program/kegiatan (kinerja) maupun dari sisi pengelolaan dan penyerapan anggaran (keuangan). Secara umum, hampir seluruh elemen pelaksanaan masih dalam kategori Perlu Upaya Keras, baik dari sisi jumlah maupun persentasenya. Hanya terdapat sedikit titik terang di sub kegiatan kinerja, yang menunjukkan keberhasilan sebagian kecil implementasi teknis. Ke depan, perlu dilakukan evaluasi menyeluruh, peningkatan kapasitas manajemen program, percepatan proses anggaran, dan penguatan sistem monitoring serta pelaporan agar kinerja dan keuangan dapat berjalan secara sinergis untuk mencapai target yang telah ditetapkan.

4.4.15 Dinas Perhubungan

Berdasarkan data kinerja dan keuangan Dinas Perhubungan, terlihat bahwa capaian pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan masih didominasi oleh kategori *Perlu Upaya Keras*, meskipun pada aspek kinerja terdapat indikasi pencapaian yang lebih baik dibanding sisi keuangan.

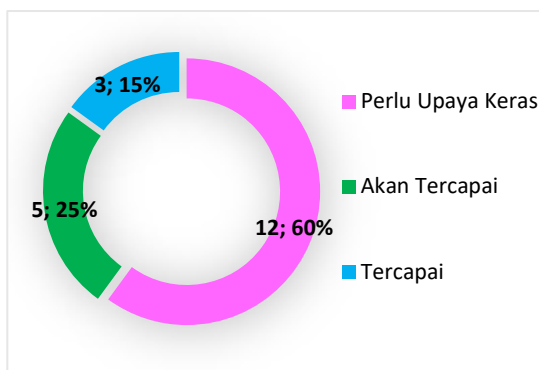
Dari sisi kinerja program, terdapat 7 indikator kinerja program. Dari jumlah tersebut, sebanyak 6 program (86%) masih dikategorikan *Perlu Upaya*



Keras, yang berarti capaian output-nya belum mendekati target yang direncanakan. Namun, terdapat 1 program (14%) yang berada dalam posisi *Akan Tercapai*. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun dominan belum optimal, sebagian kecil program telah

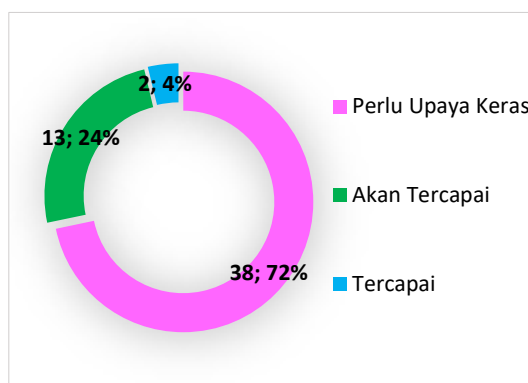
berhasil dilaksanakan sesuai harapan.

Pada level kegiatan, dari total 20 kegiatan, sebanyak 12 indikator kegiatan (60%) masih berada dalam kategori *Perlu Upaya Keras*, sedangkan



5 kegiatan (25%) sudah menunjukkan kemajuan yang cukup dan diklasifikasikan *Akan Tercapai*. Sementara itu, hanya 3 kegiatan (15%) yang telah memenuhi target dan dikategorikan *Tercapai*. Situasi ini mengindikasikan bahwa hampir sepertiga

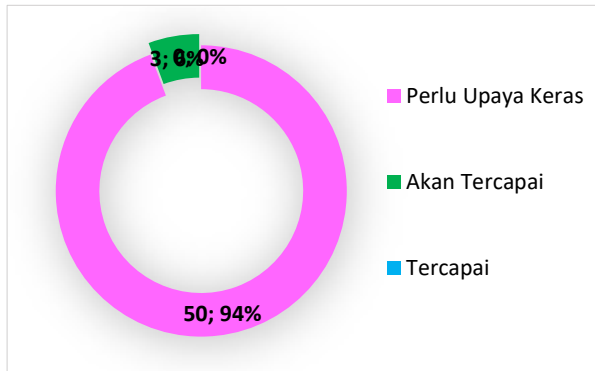
kegiatan menunjukkan kinerja yang menuju pencapaian atau telah selesai dengan baik, walaupun sebagian besar masih tertinggal dalam realisasi kinerja.



Kemudian, untuk subkegiatan, sebanyak 38 subkegiatan (72%) berada dalam kategori *Perlu Upaya Keras*. Sebanyak 13 subkegiatan (24%) berada dalam kategori *Akan Tercapai*, menunjukkan adanya kemajuan yang signifikan menuju penyelesaian. Namun,

hanya 2 subkegiatan (4%) yang benar-benar telah mencapai target. Meskipun sebagian besar masih perlu ditingkatkan, data ini menunjukkan adanya kecenderungan perbaikan kinerja di lapangan, terutama di tingkat subkegiatan yang lebih operasional.

Sementara itu, dari sisi keuangan, capaian serapan anggaran masih tergolong rendah. Pada tingkat subkegiatan, sebanyak 50 subkegiatan (94%)



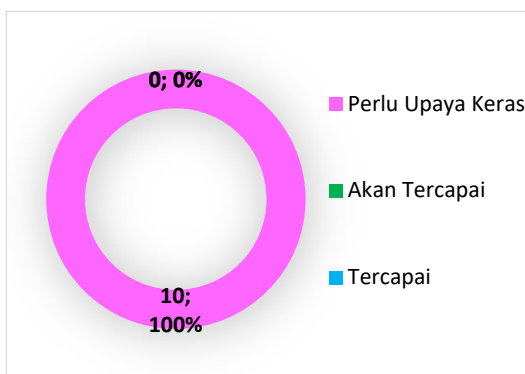
masih dikategorikan *Perlu Upaya Keras*, sementara hanya 3 subkegiatan (6%) yang berada dalam kategori *Akan Tercapai*, dan tidak ada satupun subkegiatan yang mencapai kategori *Tercapai*. Ini menunjukkan bahwa kendala

realisasi anggaran paling besar terjadi pada level operasional, yang seharusnya menjadi motor utama pelaksanaan kegiatan di lapangan.

Secara keseluruhan, Dinas Perhubungan menunjukkan bahwa meskipun sebagian program, kegiatan, dan subkegiatan telah menunjukkan kinerja yang baik, namun hal tersebut belum diimbangi dengan pencapaian keuangan. Rendahnya serapan anggaran mengindikasikan perlunya evaluasi mendalam terhadap proses perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program agar tercapai keseimbangan antara kinerja fisik dan keuangan. Diperlukan pula langkah percepatan, penguatan koordinasi lintas bidang, serta penyesuaian strategi pelaksanaan agar program-program dapat diselesaikan tepat waktu dan anggaran dapat dimanfaatkan secara optimal.

4.4.16 Dinas Komunikasi Informasi dan Informatika

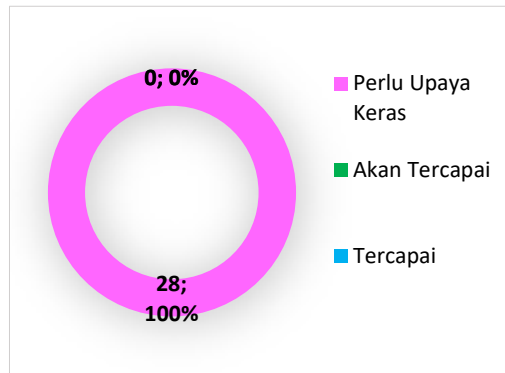
Terdapat 5 (lima) program yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika, yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, Program Pengelolaan Aplikasi Informatika, Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral, dan Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi. Berdasarkan hasil evaluasi, belum ada program yang mencapai



target. Sebagian besar indikator kinerja dan keuangan menunjukkan capaian nol atau sangat rendah. Berikut merupakan capaian dari Dinas Komunikasi dan Informatika

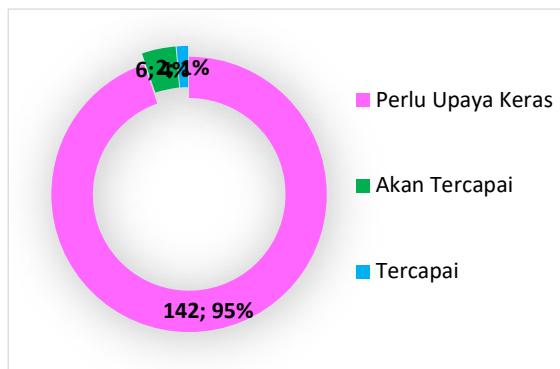
Dari sisi kinerja program, tercatat ada 10 program, dan seluruhnya (100%) berada dalam kategori *Perlu Upaya Keras*. Tidak

ada satu pun program yang masuk ke dalam kategori *Akan Tercapai* maupun *Tercapai*. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program belum menunjukkan hasil yang memadai sesuai target output yang direncanakan. Untuk kegiatan, terdapat total 28 kegiatan, dan



seluruhnya juga berada dalam kategori *Perlu Upaya Keras* (100%), tanpa satupun yang masuk kategori *Akan Tercapai* atau *Tercapai*. Ini berarti belum ada kegiatan yang menunjukkan capaian yang memuaskan, dan hampir pasti seluruh kegiatan masih jauh dari target output yang ditetapkan.

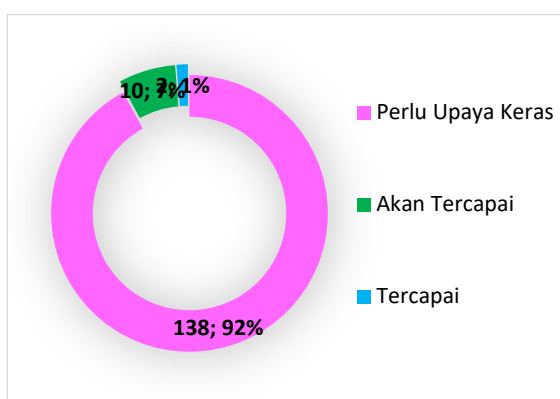
Pada level subkegiatan, total jumlahnya 150 subkegiatan, dengan



rincian 142 subkegiatan (94,67%) berada dalam kategori *Perlu Upaya Keras*, 6 subkegiatan (4%) dalam kategori *Akan Tercapai*, dan hanya 2 subkegiatan (1,33%) yang telah *Tercapai*. Meskipun ada sedikit capaian, namun persentase capaian optimal

masih sangat kecil dan menunjukkan bahwa sebagian besar subkegiatan belum terlaksana secara efektif.

Dari sisi keuangan, kondisi serapan anggaran menunjukkan gambaran yang serupa. Pada level subkegiatan, dari 150 subkegiatan, 138 subkegiatan (92%) masih dalam kategori *Perlu Upaya Keras*, 10 subkegiatan (6,67%)



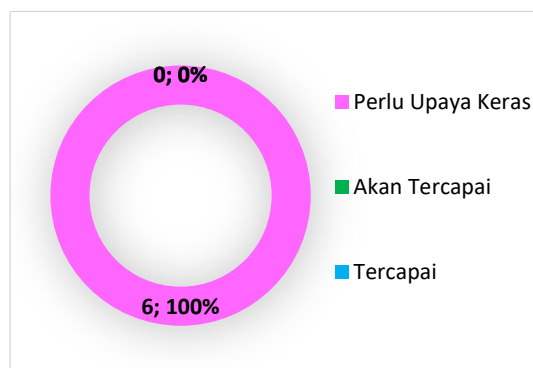
tergolong *Akan Tercapai*, dan hanya 2 subkegiatan (1,33%) yang *Tercapai*. Ini menunjukkan bahwa meskipun ada sedikit pergerakan menuju pencapaian, namun secara umum realisasi anggaran masih sangat rendah di hampir seluruh level pelaksanaan.

Secara keseluruhan, baik dari segi kinerja maupun keuangan, Dinas Komunikasi dan Informatika menunjukkan performa yang belum optimal. Dominasi kategori *Perlu Upaya Keras* di semua level (program, kegiatan, subkegiatan) mengindikasikan perlunya langkah korektif segera, baik dalam hal perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan program. Evaluasi menyeluruh perlu dilakukan untuk mengidentifikasi hambatan yang menyebabkan rendahnya capaian dan realisasi anggaran, serta merumuskan strategi percepatan agar target kinerja dan keuangan dapat tercapai secara berimbang dan tepat waktu.

4.4.17 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur melaksanakan enam program utama, yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Program Promosi Penanaman Modal, Program Pelayanan Penanaman Modal, Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, serta Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal. Berdasarkan capaian kinerja dan keuangan, seluruh program masih menunjukkan tingkat realisasi yang sangat rendah. Capaian indikator kinerja dan keuangan diperlihatkan pada tabel berikut.

Dari sisi kinerja, terdapat 6 program, dan seluruhnya atau 100% masuk dalam kategori *Perlu Upaya Keras*. Artinya, belum ada satu pun program yang menunjukkan hasil yang memadai untuk masuk dalam kategori *Akan Tercapai* maupun *Tercapai*. Indikator kinerja program keenam tersebut

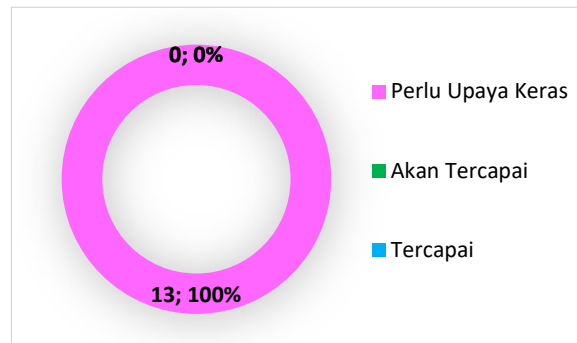


berkaitan dengan penguatan investasi baik dari sisi maupun nilai di Provinsi Kalimantan Timur. Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan; Peluang Investasi Non Migas dan Non Batubara yang Siap Ditawarkan; Kepeminatan Investasi Di Kalimantan Timur pada

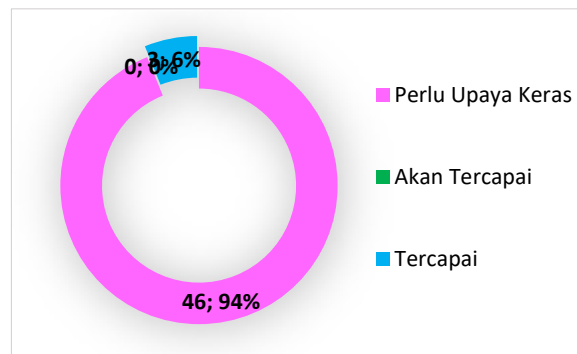
Sektor Non Migas dan Non Batubara; Persentase Realisasi Investasi PMA-

PMDN Sektor Non Migas dan Non Batubara; Persentase Pemenuhan Layanan Informasi yang Dibutuhkan oleh Pengguna Layanan.

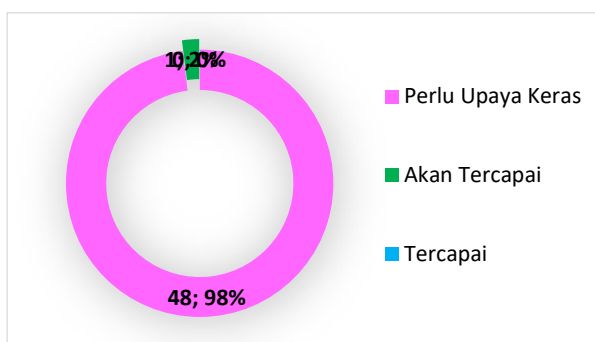
Selanjutnya, pada tingkat kegiatan, terdapat 13 kegiatan, di mana 100% kegiatan (13 kegiatan) juga berada dalam kategori Perlu Upaya Keras. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan masih jauh dari target kinerja yang ditetapkan. Sementara itu, pada tingkat subkegiatan, dari total 49 subkegiatan, sebanyak 46 subkegiatan (93,88%) termasuk dalam kategori Perlu Upaya Keras, 0 subkegiatan dalam kategori Akan Tercapai, dan hanya 3 subkegiatan (6,12%) yang berhasil Tercapai. Hasil analisis ini menggambarkan bahwa meskipun terdapat sedikit keberhasilan di level subkegiatan, namun sebagian besar subkegiatan belum mencapai kinerja yang memadai.



Dari sisi keuangan, pada tingkat subkegiatan, dari 49 subkegiatan, sebanyak 48 subkegiatan (97,96%) masih dalam kategori Perlu Upaya Keras, hanya 1 subkegiatan (2,04%) yang masuk dalam kategori Akan Tercapai, dan tidak ada subkegiatan yang telah Tercapai. Capaian ini menunjukkan bahwa penggunaan anggaran sangat rendah dan belum mencerminkan efisiensi serta efektivitas pelaksanaan anggaran di lapangan.



Secara keseluruhan, baik dari sisi kinerja maupun keuangan, capaian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu masih sangat rendah dan didominasi oleh kategori Perlu Upaya Keras di seluruh tingkat (program, kegiatan, dan subkegiatan). Hal ini menunjukkan adanya kendala signifikan dalam pelaksanaan program dan realisasi anggaran. Diperlukan upaya perbaikan



Secara keseluruhan, baik dari sisi kinerja maupun keuangan, capaian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu masih sangat rendah dan didominasi oleh kategori Perlu Upaya Keras di seluruh tingkat (program, kegiatan, dan subkegiatan). Hal ini menunjukkan adanya kendala signifikan dalam pelaksanaan program dan realisasi anggaran. Diperlukan upaya perbaikan

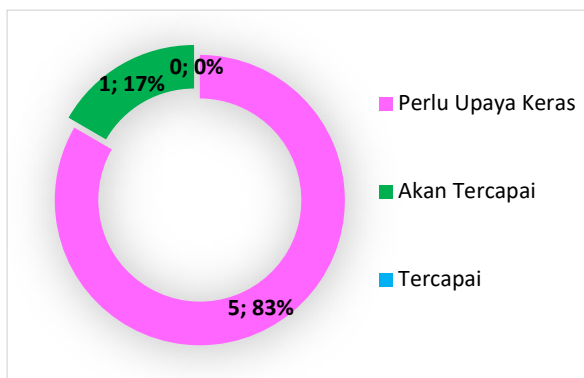
Hal ini menunjukkan adanya kendala signifikan dalam pelaksanaan program dan realisasi anggaran. Diperlukan upaya perbaikan

manajerial, monitoring yang lebih ketat, serta evaluasi menyeluruh terhadap strategi pelaksanaan agar kinerja dan penyerapan anggaran dapat ditingkatkan secara optimal dan sesuai dengan target pembangunan daerah.

4.4.18 Dinas Pemuda dan Olahraga

Dinas Pemuda dan Olahraga menyelenggarakan empat program utama, yaitu: Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan, Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan, dan Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan. Secara umum, capaian kinerja dan keuangan dari keempat program tersebut masih tergolong rendah. Capaian kinerja dan keuangan selengkapnya ditampilkan pada tabel berikut.

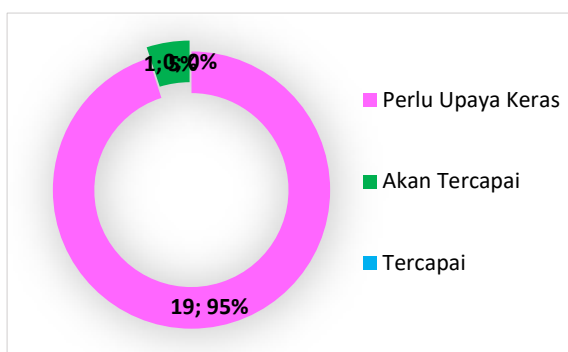
Dari sisi kinerja, terdapat total 6 program, di mana sebanyak 5 program



(83%) masih tergolong dalam kategori *Perlu Upaya Keras*, yang menunjukkan bahwa pelaksanaannya masih jauh dari target yang telah ditetapkan. Hanya 1 kinerja indikator program (17%) dari Dinas Pemuda dan Olahraga yang

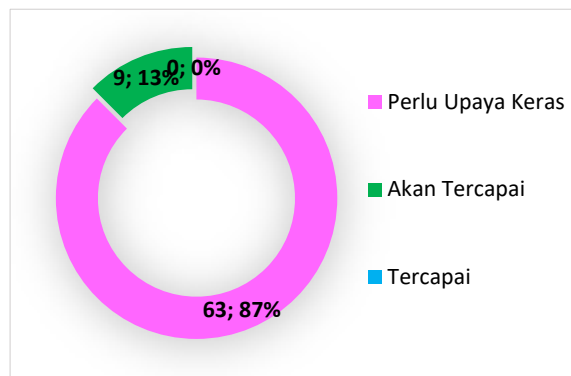
berada dalam kategori *Akan Tercapai*, yang berarti program tersebut menunjukkan progres mendekati target, namun belum sepenuhnya optimal. Tidak terdapat satupun program yang masuk kategori *Tercapai*, yang menandakan bahwa belum ada satu pun program yang benar-benar memenuhi indikator keberhasilan kinerja.

Pada tingkat kegiatan, dari total 20 kegiatan yang dilaksanakan,



sebanyak 19 kegiatan (95%) termasuk dalam kategori *Perlu Upaya Keras*, dan hanya 1 kegiatan (5%) yang dikategorikan *Akan Tercapai*. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar kegiatan belum mampu mencapai sasaran kinerja sebagaimana yang

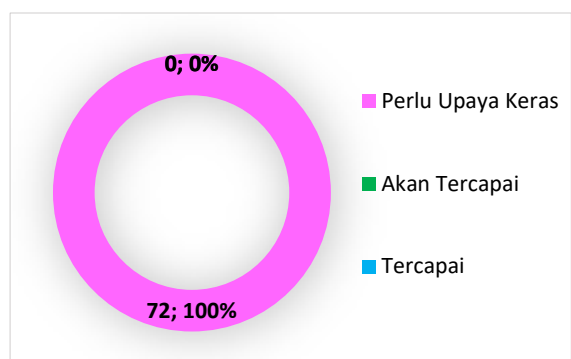
direncanakan. Sementara itu, tidak ada kegiatan yang mencapai kategori *Tercapai*, yang menjadi indikator bahwa efektivitas pelaksanaan kegiatan masih perlu ditingkatkan secara signifikan.



Lebih lanjut pada tingkat subkegiatan, dari total 72 subkegiatan, sebanyak 63 subkegiatan (87%) masih masuk dalam kategori *Perlu Upaya Keras*, yang mengindikasikan rendahnya pencapaian indikator kinerja di level paling operasional.

Hanya 9 subkegiatan (13%) yang masuk kategori *Akan Tercapai*, dan sama seperti pada level program dan kegiatan, tidak ada subkegiatan yang benar-benar *Tercapai*. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada sebagian subkegiatan yang mendekati target, namun secara umum pencapaian kinerja masih belum memuaskan.

Dari sisi keuangan, kondisi juga menunjukkan performa yang rendah.



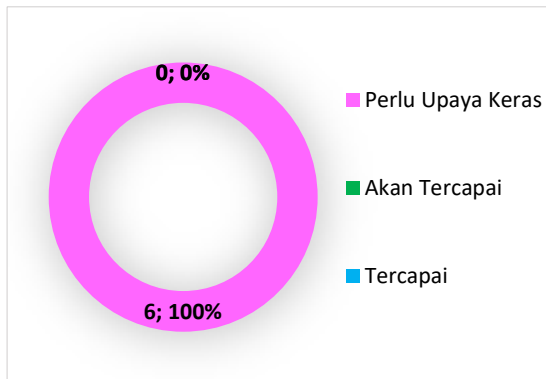
Di tingkat subkegiatan, situasi tidak jauh berbeda, karena seluruh 72 subkegiatan (100%) juga masuk dalam kategori *Perlu Upaya Keras*. Artinya, tidak ada subkegiatan yang menunjukkan realisasi anggaran yang optimal, dan ini sangat berpotensi

menghambat keberhasilan pelaksanaan program secara keseluruhan. Berdasarkan hasil analisa di atas dapat disimpulkan bahwa bahwa Dinas Pemuda dan Olahraga perlu melakukan evaluasi mendalam terhadap seluruh tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program serta kegiatan, baik dari segi pencapaian kinerja maupun efektivitas penggunaan anggaran. Diperlukan strategi perbaikan yang terintegrasi agar semua level pelaksanaan dapat bergerak menuju kategori *Akan Tercapai* bahkan *Tercapai*, demi meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang kepemudaan dan olahraga.

4.4.19 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah

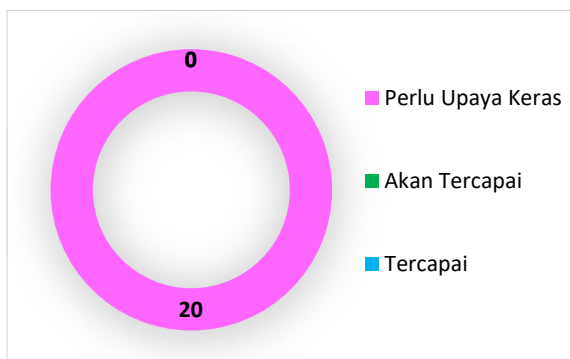
Terdapat 4 (empat) program yang diampu oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah, yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, Program Pembinaan Perpustakaan, Program Pengelolaan Arsip, dan Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip. Untuk pendetailan capaian dari keseluruhan indikator kinerja disajikan pada tabel berikut.

Berdasarkan data dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah,



evaluasi terhadap kinerja dan keuangan program, kegiatan, serta sub kegiatan menunjukkan bahwa instansi ini menghadapi tantangan yang signifikan dalam pencapaian target Kinerja dan Keuangan. Dari sisi kinerja program, terdapat 6 program yang seluruhnya

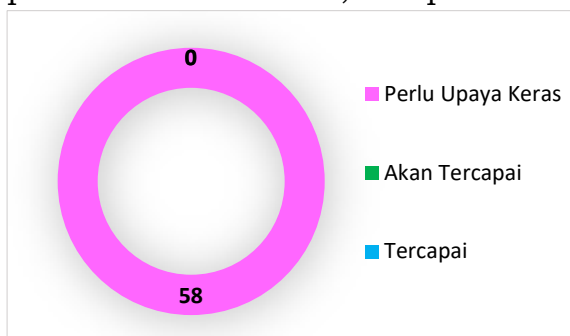
atau 100% masuk dalam kategori Perlu Upaya Keras. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada satupun indikator kinerja program yang menunjukkan sudah berhasil memenuhi kriteria akan tercapai dan telah tercapai. Kinerja ini mencerminkan adanya hambatan besar dalam perencanaan atau pelaksanaan program-program yang dirancang oleh dinas tersebut.



Pada level kegiatan, terdapat 6 indikator kinerja kegiatan, dengan 4 indikator atau 66,67% dikategorikan Perlu Upaya Keras, sedangkan 2 kegiatan atau 33,33% termasuk dalam kategori Akan Tercapai. Meskipun sebagian kecil kegiatan menunjukkan

potensi keberhasilan, tetap tidak ada kegiatan yang benar-benar berhasil

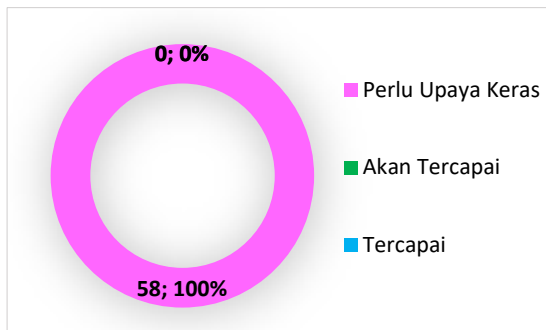
mencapai target (kategori "Tercapai").



Pada tingkat yang lebih rinci, yaitu sub kegiatan, tercatat ada 58 indikator pada sub kegiatan, dan seluruhnya (100%) masuk ke dalam kategori Perlu Upaya Keras. Ini

menjadi indikator bahwa kinerja operasional dinas ini sangat memerlukan perhatian khusus, baik dari sisi manajerial, teknis, maupun pengawasan, karena tidak satu pun sub kegiatan menunjukkan potensi keberhasilan.

Dari sisi realisasi keuangan pada tingkat sub kegiatan, dari 58 indikator



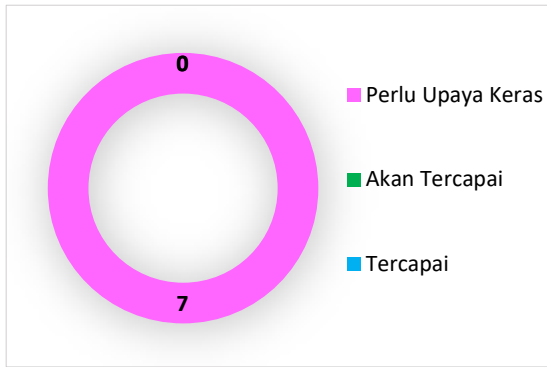
sub kegiatan yang ada, seluruhnya masuk dalam kategori Perlu Upaya Keras, atau 100%. Ini berarti tidak ada satu pun sub kegiatan yang menunjukkan realisasi anggaran mendekati atau mencapai target,

menandakan lemahnya efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan pada tingkat paling operasional. Secara keseluruhan, baik dari sisi kinerja maupun keuangan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah menunjukkan bahwa seluruh program, kegiatan, dan sub kegiatan masih berada dalam kondisi yang memerlukan perbaikan serius. Dengan 100% program dan sub kegiatan masuk kategori Perlu Upaya Keras menegaskan bahwa pentingnya perbaikan dalam perencanaan strategis, pelaksanaan teknis, serta pengelolaan anggaran. Diperlukan langkah-langkah pembenahan secara menyeluruh, mulai dari peningkatan kapasitas SDM, evaluasi metode pelaksanaan, hingga penguatan sistem monitoring dan evaluasi agar kinerja dan penyerapan anggaran dapat meningkat secara signifikan.

4.4.20 Dinas Kelautan dan Perikanan

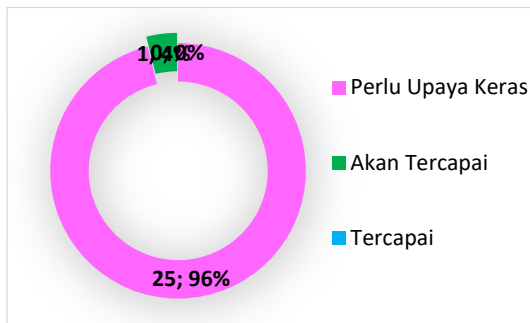
Dinas Kelautan dan Perikanan menyelenggarakan 6 (enam) program utama, yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Program Pengelolaan Perikanan Tangkap, Program Pengelolaan Perikanan Budidaya, Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, serta Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan.

Berdasarkan data dari Dinas Kelautan dan Perikanan, evaluasi terhadap kinerja dan realisasi keuangan pada Triwulan I Tahun 2025 menunjukkan



bahwa masih terdapat tantangan yang cukup besar dalam pencapaian target dan efektivitas pelaksanaan program. Dari sisi indikator kinerja program, dan seluruh program (100%) masuk dalam kategori Perlu Upaya Keras. Artinya hasil analisa ini menunjukkan belum

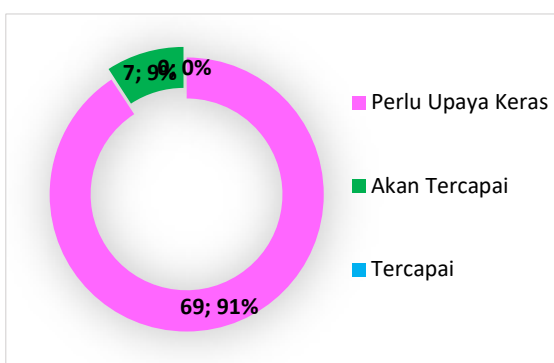
adanya program yang berstatus “Akan Tercapai” maupun “Tercapai”, yang mencerminkan belum optimalnya pelaksanaan program di tingkat makro strategis hingga TW I.



Untuk **kinerja kegiatan**, dari total **35 indikator**, sebanyak **25 kegiatan (96%)** dikategorikan **Perlu Upaya Keras**, dan hanya **2 kegiatan (4%)** yang masuk kategori **Akan Tercapai**. Tidak ada kegiatan yang benar-benar mencapai

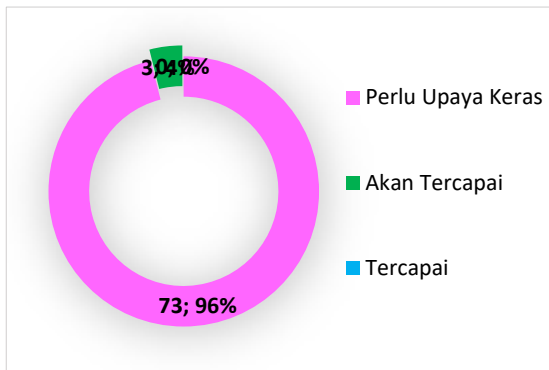
target. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas kegiatan masih jauh dari hasil dan target yang diharapkan, dengan hanya sedikit kegiatan yang menunjukkan tanda-tanda keberhasilan.

Pada level sub kegiatan, tercatat ada 76 sub kegiatan. Dari jumlah tersebut, 69 sub kegiatan (91%) berada dalam kategori Perlu Upaya Keras,



dan hanya 10 sub kegiatan (89%) yang diperkirakan Akan Tercapai. Tidak ada sub kegiatan yang masuk kategori “Tercapai”, sehingga dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan teknis kegiatan masih belum efektif dan memerlukan intervensi yang lebih serius.

Dari sisi realisasi keuangan, pada level sub kegiatan, dari 76 indikator sub kegiatan, 73 atau 96% berada dalam kategori Perlu Upaya Keras, dan hanya 3 sub kegiatan (4%) masuk kategori Akan Tercapai, sementara tidak ada sub kegiatan yang Tercapai. Ini mengindikasikan bahwa efektivitas



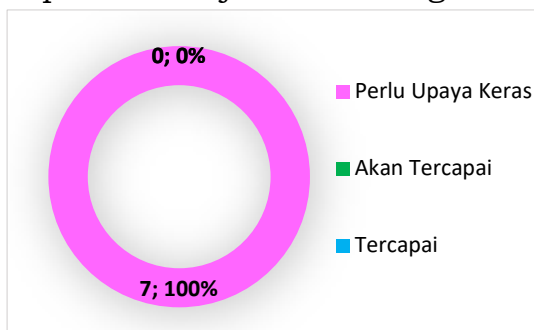
realisasi anggaran di tingkat teknis sangat rendah dan perlu perhatian serius dari sisi pengawasan dan evaluasi.

Secara keseluruhan, Dinas Kelautan dan Perikanan menunjukkan bahwa kinerja program, kegiatan, dan

sub kegiatan masih didominasi oleh capaian yang belum optimal, dengan lebih dari 90% aktivitas berada dalam kategori Perlu Upaya Keras, baik dari sisi kinerja maupun keuangan. Meskipun terdapat sedikit indikasi perbaikan di beberapa kegiatan dan program dari sisi keuangan, pencapaian di tingkat sub kegiatan—yang merupakan tulang punggung pelaksanaan anggaran—masih sangat lemah. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi mendalam terhadap proses perencanaan, pelaksanaan, serta pemantauan kegiatan dan anggaran agar pelaksanaan program kelautan dan perikanan dapat lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran.

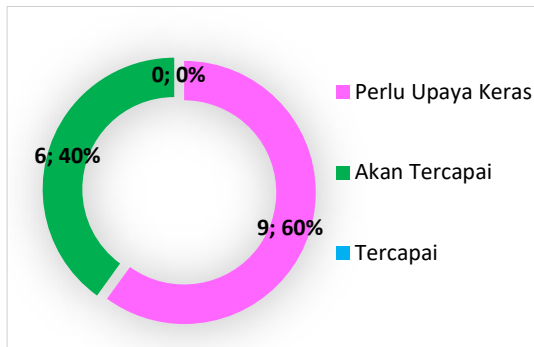
4.4.21 Dinas Pariwisata

Dinas Pariwisata menyelenggarakan 5 (lima) program yang terdiri dari Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata, Program Pemasaran Pariwisata, Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, serta Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Secara umum, seluruh program menunjukkan tingkat kinerja dan realisasi anggaran yang masih memerlukan upaya keras untuk mencapai target. Berikut merupakan capaian kinerja dan keuangan dari Dinas Pariwisata.



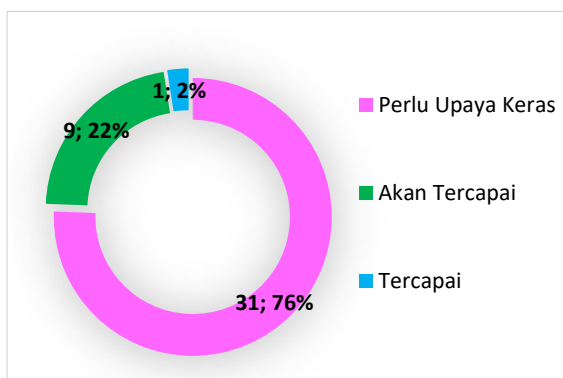
Dari sisi kinerja program, seluruh indikator kinerja program yang ada berada dalam kategori *Perlu Upaya Keras*, yang berarti 100% program belum mendekati target yang ditetapkan dan membutuhkan perhatian serius dalam

perencanaan maupun pelaksanaannya. Tidak ada satu pun program yang berada dalam kategori *Akan Tercapai* maupun *Tercapai*, menandakan lemahnya pencapaian output secara keseluruhan pada tingkat perencanaan strategis.



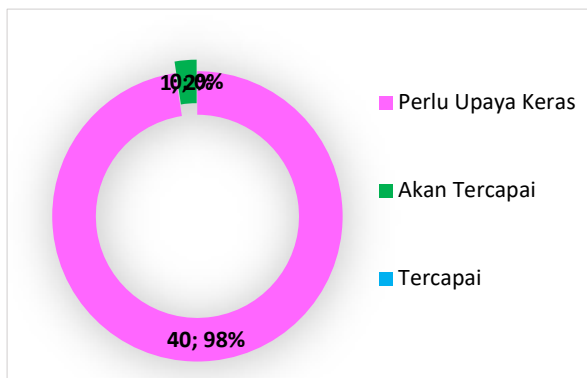
Di tingkat kegiatan, terdapat 15 indikator kegiatan yang dinilai. Sebanyak 9 kegiatan atau sekitar 60% dikategorikan *Perlu Upaya Keras*, sementara 6 kegiatan atau 40% menunjukkan capaian yang *Akan Tercapai*. Meskipun tidak ada kegiatan

yang benar-benar mencapai target, keberadaan 40% kegiatan yang berpotensi tercapai menunjukkan adanya ruang perbaikan yang dapat dioptimalkan melalui peningkatan pelaksanaan dan monitoring.



Sementara itu, pada level sub kegiatan, dari total 41 sub kegiatan, sebanyak 31 sub kegiatan atau 75,6% masih berada dalam kategori *Perlu Upaya Keras*, 9 sub kegiatan atau 21,95% termasuk *Akan Tercapai*, dan hanya 1 sub kegiatan atau sekitar

2,43% yang telah berhasil *Tercapai*. Artinya, mayoritas kegiatan teknis yang dilakukan masih belum menunjukkan kinerja optimal dan hanya sebagian kecil yang berhasil memenuhi target sepenuhnya.



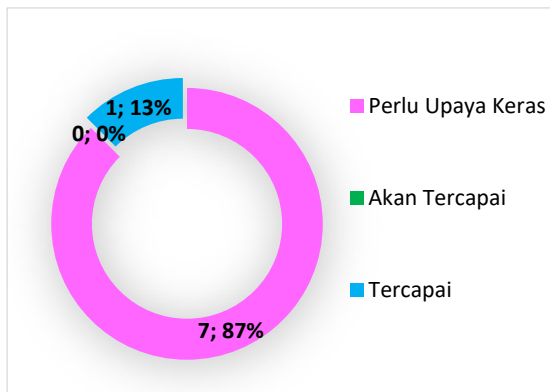
Sementara itu, dari sisi keuangan, kondisi serapan anggaran juga menunjukkan pola sama dengan kinerja. Pada tingkat sub kegiatan, teridentifikasi terdapat 10 sub kegiatan yang termasuk ke dalam kategori akan tercapai hingga

triwulan I tahun 2025. Sementara itu masih terdapat 40 indikator sub kegiatan dalam kategori *Perlu Upaya Keras*. Untuk itu, baik dari sisi kinerja

maupun keuangan, Dinas Pariwisata masih menghadapi tantangan besar dalam pencapaian target dan efektivitas penggunaan anggaran. Capaian program, kegiatan, dan sub kegiatan sebagian besar masih belum optimal, dan serapan anggaran pun menunjukkan kinerja yang sama. Oleh karena itu, dibutuhkan langkah evaluatif yang komprehensif serta perbaikan sistem pengelolaan program dan anggaran yang lebih efisien agar sasaran pembangunan di sektor pariwisata dapat tercapai secara maksimal.

4.4.22 Dinas Perkebunan

Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur melaksanakan 6 (enam) program utama, yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian, Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian, Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian, Program Perizinan Usaha Pertanian, dan Program Penyuluhan Pertanian. Secara umum, seluruh program masih menunjukkan tingkat kinerja dan serapan anggaran yang rendah, baik dari sisi kinerja maupun keuangan hingga Triwulan I tahun 2025. Secara spesifik, capaian kinerja dan keuangan tersajikan pada tabel berikut.

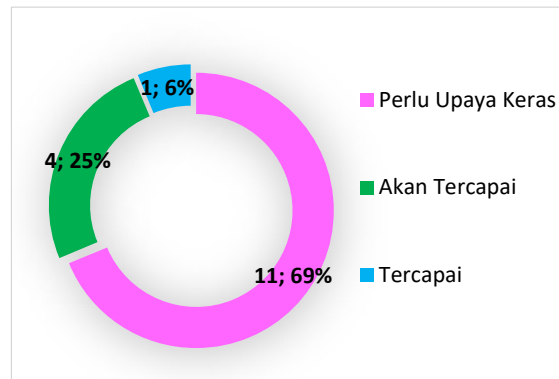


Pada aspek kinerja indikator program, dari total 8 yang tercatat, sebanyak 7 indikator program atau 87% berada dalam kategori *Perlu Upaya Keras*. Posisi ini mengindikasikan bahwa mayoritas program belum menunjukkan pencapaian kinerja yang

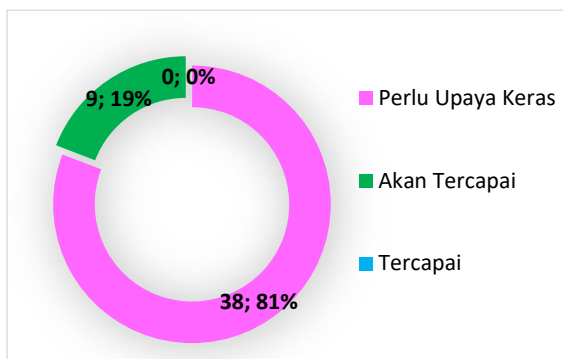
memadai dan membutuhkan perhatian serta peningkatan manajemen pelaksanaan. Sementara itu, 1 program (13%) termasuk dalam kategori *Akan Tercapai*, dan 2 program (11,76%) telah berhasil masuk dalam kategori *Tercapai*, yang menunjukkan bahwa sebagian kecil program telah berhasil memenuhi target sesuai rencana.

Untuk kinerja kegiatan, terdapat total 16 indikator kegiatan. Dari jumlah tersebut, 11 indikator atau 69% berada dalam kategori *Perlu Upaya*

Keras, 5 indikator kegiatan (25%) dalam kategori *Akan Tercapai*, dan hanya 1 kegiatan (6%) yang telah *Tercapai* pada TW I tahun 2025. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan masih perlu ditingkatkan secara signifikan agar hasilnya dapat memberikan kontribusi yang optimal terhadap capaian program.

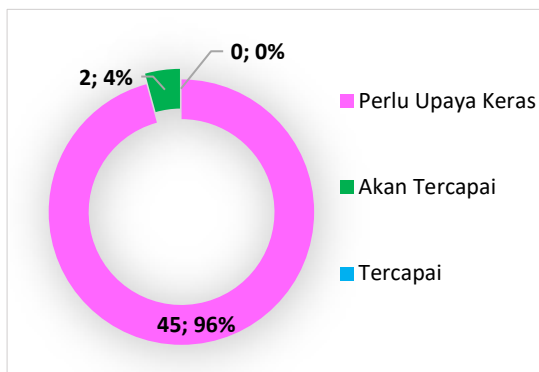


Sementara pada tingkat sub kegiatan, dari total 47 indikator sub kegiatan, tercatat bahwa sebanyak 38 sub kegiatan (81%) masih berada pada



kategori *Perlu Upaya Keras*, 9 indikator sub kegiatan (10%) berada dalam kategori *Akan Tercapai*, dan hanya tidak terdapat satupun indikator sub kegiatan (1%) yang telah mencapai target kinerja penuh (*Tercapai*) hingga TW I tahun 2025. Hasil analisis terkait

kinerja indikator baik program, kegiatan dan sub kegiatan pada Dinas Perkebunan tersebut menandakan bahwa pelaksanaan teknis di level terbawah dari struktur perencanaan masih belum menunjukkan capaian yang memuaskan dan perlu evaluasi lebih lanjut, baik dari aspek pelaksanaan maupun pengawasan.



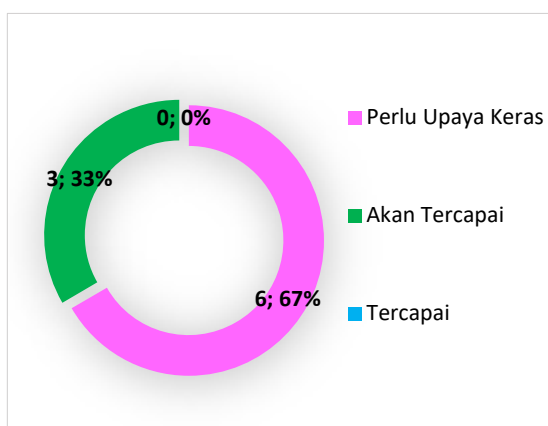
Dari perspektif keuangan, dari 46 sub kegiatan yang tercatat dalam laporan keuangan, 45 sub kegiatan (96%) berada pada kategori *Perlu Upaya Keras*, 2 sub kegiatan (4%) termasuk *Akan Tercapai*, serta belum terdapat indikator sub kegiatan pada perspektif keuangan yang

telah mencapai target penggunaan anggaran atau masuk kategori *Tercapai*. Artinya, meskipun sebagian kecil sub kegiatan menunjukkan efektivitas penggunaan anggaran, mayoritas masih belum menyerap anggaran secara maksimal.

Berpijak pada hasil analisis dan penjelasan di atas, Dinas Perkebunan masih dihadapkan pada tantangan besar dalam pelaksanaan program-program pembangunan. Dominasi kategori *Perlu Upaya Keras* pada semua level (program, kegiatan, sub kegiatan) menunjukkan bahwa upaya implementasi masih jauh dari harapan. Namun demikian, adanya sebagian kecil capaian dalam kategori *Akan Tercapai* dan *Tercapai* memberikan sinyal positif yang dapat menjadi titik tolak perbaikan secara menyeluruh. Perlu adanya peningkatan kualitas perencanaan, monitoring yang konsisten, serta penyesuaian strategi pelaksanaan agar program dan anggaran yang dirancang benar-benar memberikan dampak nyata di lapangan.

4.4.23 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

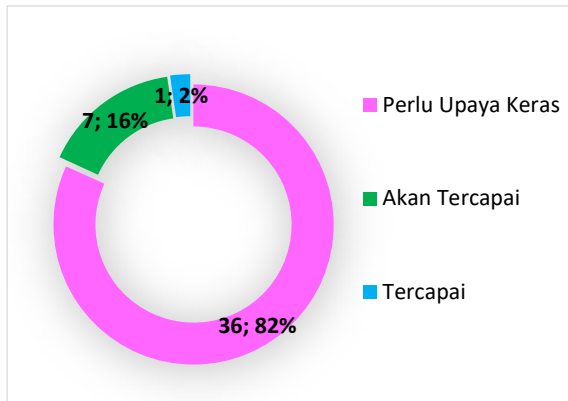
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan menyelenggarakan 6 (enam) program utama, yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian, Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian, Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, Program Perizinan Usaha Pertanian, dan Program Penyuluhan Pertanian. Secara umum, capaian kinerja dan keuangan dari keenam program tersebut masih tergolong rendah sehingga diperlukan upaya keras untuk mencapai target. Adapun capaian kinerja dan keuangan ditunjukkan oleh tabel berikut.



Pada aspek kinerja program, dari total 9 indikator program teridentifikasi terdapat 6 indikator (67%) yang kinerjanya masih berada dalam kategori *Perlu Upaya Keras*. Sebanyak 3 program (33%) termasuk dalam kategori *Akan Tercapai*, yang menunjukkan adanya potensi pencapaian jika ditindaklanjuti dengan strategi yang tepat. Tidak ada program yang mencapai kategori *Tercapai*.

Tidak ada program yang mencapai kategori *Tercapai*.

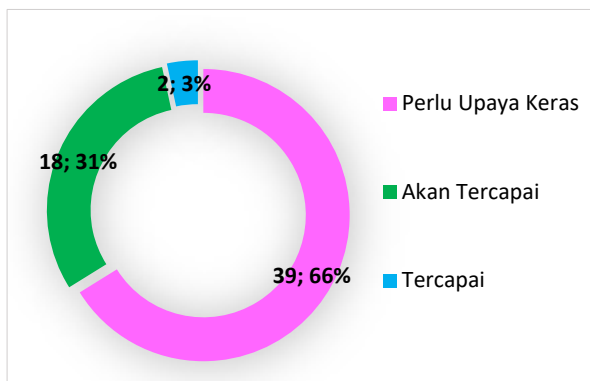
Untuk tingkat kegiatan, dari total 44 indikator kegiatan, 36 indikator kegiatan (82%) menunjukkan posisi kinerja yang berada dalam kategori *Perlu*



Upaya Keras. Sementara itu, terdapat 7 kegiatan (16%) dikategorikan *Akan Tercapai*, dan 1 lainnya (4,29%) berhasil masuk dalam kategori *Tercapai*. Hasil indentifikasi ini mengindikasikan bahwa sebagian kecil kegiatan menunjukkan performa baik namun mayoritas masih menunjukkan

posisi yang belum optimal.

Pada tingkat sub kegiatan, dari total 59 indikator sub kegiatan, sebanyak 39 sub kegiatan (66%) termasuk dalam kategori *Perlu Upaya Keras*,

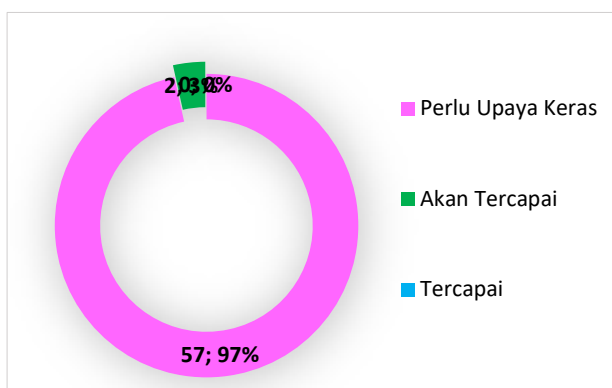


18 sub kegiatan (31%) dalam kategori *Akan Tercapai*, dan 2 sub kegiatan (3%) telah *Tercapai*. Persentase ini menunjukkan bahwa walaupun masih terdapat kelemahan dalam pelaksanaan sub kegiatan, potensi untuk perbaikan masih cukup besar,

terlihat dari tingginya proporsi sub kegiatan yang mendekati target capaian.

Dari sisi keuangan, 57 indikator sub kegiatan (97%) masih tergolong *Perlu Upaya Keras*, dan hanya 2 sub kegiatan (3%) yang *Akan Tercapai*. Kondisi ini menkonfirmasi bahwa efektivitas penggunaan anggaran di lapangan masih menjadi persoalan serius yang perlu ditangani segera, baik melalui monitoring, peningkatan kapasitas pelaksana, maupun perbaikan sistem pelaporan dan evaluasi anggaran.

Secara keseluruhan, **Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan** masih

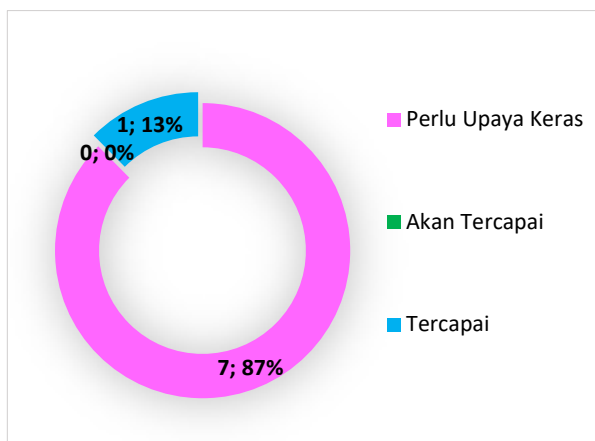


menghadapi tantangan besar dalam pencapaian target kinerja dan realisasi keuangan, khususnya di level kegiatan dan sub kegiatan. Dominasi kategori *Perlu Upaya Keras* mengindikasikan adanya kebutuhan mendesak untuk

memperbaiki perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Meskipun terdapat sejumlah kegiatan dan sub kegiatan yang menunjukkan tanda-tanda akan tercapai, perlu dilakukan langkah konkret seperti penguatan koordinasi internal, peningkatan kualitas SDM, serta penyesuaian strategi pelaksanaan agar seluruh program dan kegiatan dapat memberikan hasil yang maksimal dan berdampak nyata bagi sektor peternakan dan kesehatan hewan.

4.4.24 Dinas Kehutanan

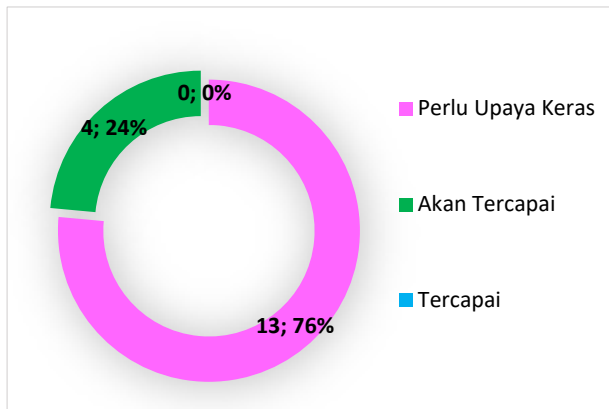
Dinas Kehutanan menyelenggarakan lima program utama, yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, Program Pengelolaan Hutan, Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan, serta Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS). Berdasarkan data capaian, seluruh program tersebut masih menunjukkan realisasi kinerja dan keuangan yang rendah secara umum hingga triwulan I tahun 2025. Berikut merupakan capaian kinerja dan keuangan dari Dinas Kehutanan.



Pada aspek **kinerja program**, terdapat 8 indikator program, di mana kinerja **7 diantaranya termasuk** dalam kategori *Perlu Upaya Keras*. Posisi ini menunjukkan bahwa mayoritas program belum menunjukkan kinerja yang memadai dan masih membutuhkan intervensi

yang kuat. Selanjutnya, terdapat **1 kinerja indikator program** dalam kategori telah *Tercapai*. Adapun tujuh indikator yang masuk ke dalam kategori perlu upaya keras yaitu 2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti; Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat direhabilitasi; Persentase luas kerusakan kawasan hutan; Luas kawasan bernilai ekosistem penting dan konservasi provinsi yang dikelola; Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat; Jumlah kelompok

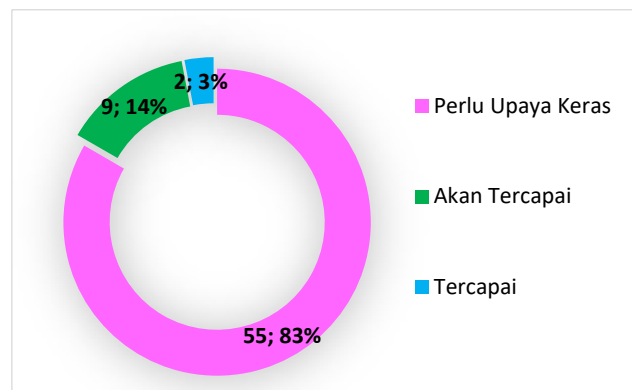
usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya; dan Luas DAS dan Sub DAS yang dikelola.



Pada tingkat kegiatan, sebanyak 13 kegiatan (76%) memerlukan upaya keras untuk mencapai target. Hanya 4 kegiatan (24%) berada pada level *Akan Tercapai*. Hal ini mengindikasikan bahwa masih banyak kegiatan yang belum berjalan sesuai rencana atau

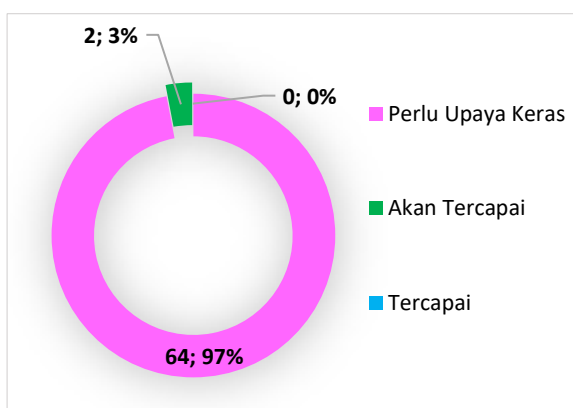
belum memberikan output yang memuaskan terhadap aspek kehutanan di Provinsi Kalimantan Timur.

Sementara itu, untuk sub kegiatan, 55 kinerja indikator sub kegiatan (83%) masih berada pada kategori *Perlu Upaya Keras*, 14% berada pada kategori *Akan Tercapai*, dan hanya 3% atau dua indikator kinerja kegiatan dari



Dinas Kehutanan yang telah mencapai target penuh. Kondisi ini mencerminkan bahwa kinerja secara menyeluruh dari unit pelaksana teknis masih sangat memerlukan peningkatan yang signifikan, baik dari sisi perencanaan, pelaksanaan, hingga monitoring dan evaluasi.

Dari sisi realisasi keuangan, pada tingkat sub kegiatan, sebanyak 64 indikator sub kegiatan (97%) memiliki capaian keuangan yang termasuk ke

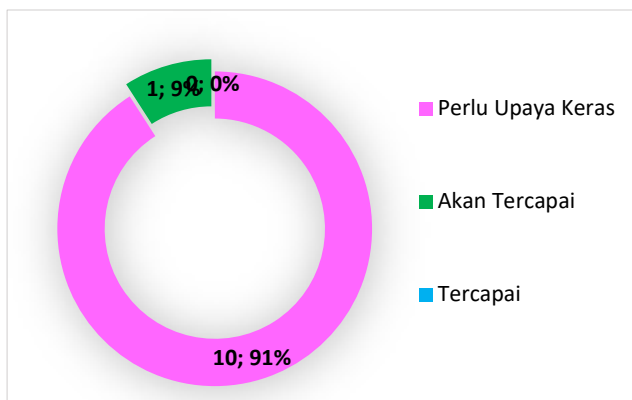


dalam klasifikasi perlu upaya keras dalam realisasi anggarannya. Hanya **2 indikator sub kegiatan (3%)** yang berada dalam kategori *Akan Tercapai*. Secara keseluruhan, **Dinas Kehutanan** menghadapi tantangan besar dalam mewujudkan efektivitas kinerja dan efisiensi penggunaan

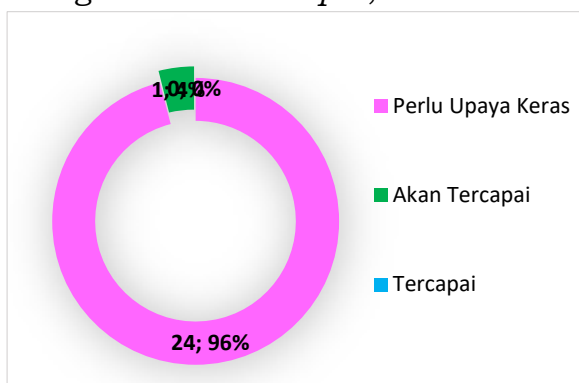
anggaran. Dominasi kategori *Perlu Upaya Keras* di seluruh jenjang dari program, kegiatan, hingga sub kegiatan baik dari sisi kinerja maupun keuangan menunjukkan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap strategi pelaksanaan program.

4.4.25 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral menyelenggarakan 5 (lima) program utama, yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, Program Pengelolaan Aspek Kegeologian, Program Pengelolaan Mineral dan Batubara, Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan, dan Program Pengelolaan Ketenagalistrikan. Berdasarkan data capaian kinerja dan keuangan dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, terlihat bahwa realisasi pelaksanaan program dan kegiatan masih didominasi oleh kategori *Perlu Upaya Keras*, baik dari aspek kinerja maupun keuangan, yang menunjukkan perlunya perhatian dan intervensi lebih lanjut agar target-target dapat tercapai secara optimal.

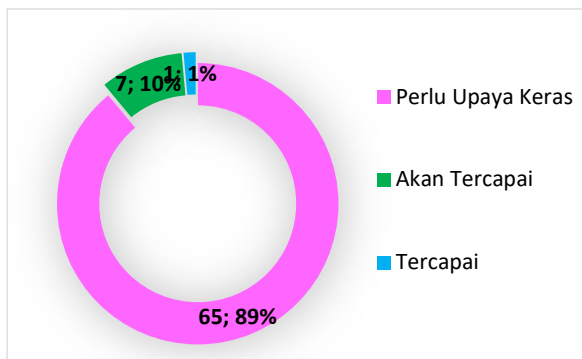


Dari sisi kinerja program, terdapat total 11 program yang dilaksanakan. Dari jumlah tersebut, 10 kinerja indikator program (91%) dikategorikan *Perlu Upaya Keras*, yang berarti sebagian besar program belum menunjukkan capaian kinerja sesuai target yang ditetapkan. Hanya 1 program (9 %) yang berada pada kategori *Akan Tercapai*, dan tidak ada program yang telah *Tercapai* (0%).



Untuk kinerja kegiatan, dari total 25 kegiatan, sebanyak 24 kegiatan (96%) masuk dalam kategori *Perlu Upaya Keras*, sedangkan hanya 1 kegiatan (4,17%) yang berada dalam kategori *Akan Tercapai*, dan tidak ada kegiatan yang mencapai status

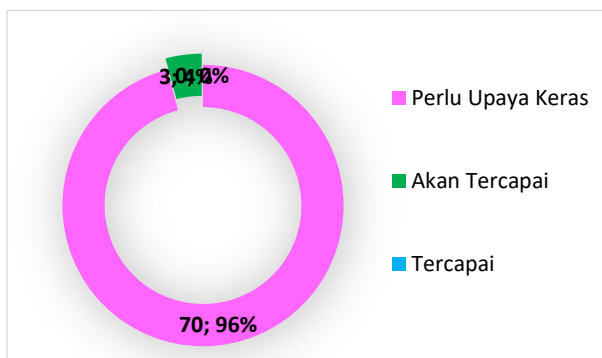
Tercapai. Hasil analisa ini menunjukkan bahwa hampir seluruh kegiatan masih memerlukan upaya signifikan agar mencapai output yang diharapkan.



Adapun untuk sub kegiatan, dari total 73 sub kegiatan, sebanyak 65 sub kegiatan (89,04%) tergolong *Perlu Upaya Keras*. Kemudian 7 sub kegiatan (9,59%) diprediksi *Akan Tercapai*, dan hanya 1 sub kegiatan (1,37%) yang *Tercapai*. Hal ini

mengindikasikan bahwa tingkat kinerja hingga ke level teknis paling bawah pun masih cukup lemah dan membutuhkan pembenahan secara sistemik.

Pada aspek realisasi keuangan di bagian sub kegiatan, dari 73 sub kegiatan, 70 sub kegiatan (95,89%) masih berada pada kategori *Perlu Upaya*



Keras, hanya 3 sub kegiatan (4,11%) yang diprediksi *Akan Tercapai*, dan tidak ada sub kegiatan yang *Tercapai*. Ini menunjukkan bahwa tidak hanya pelaksanaan kegiatan yang belum maksimal, namun juga pemanfaatan anggaran masih sangat

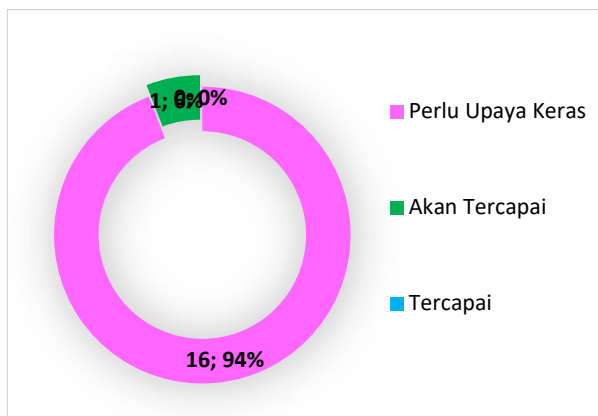
minim secara umum. Secara keseluruhan, kondisi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral menunjukkan bahwa mayoritas program, kegiatan, dan sub kegiatan belum menunjukkan kinerja dan serapan anggaran yang memadai. Dominasi kategori *Perlu Upaya Keras* di seluruh level menandakan adanya kendala serius dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun monitoring dan evaluasi. Untuk itu, perlu dilakukan evaluasi mendalam terhadap strategi pelaksanaan kegiatan dan optimalisasi realisasi anggaran agar capaian kinerja dan keuangan dapat ditingkatkan secara signifikan.

4.4.26 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah menyelenggarakan 14 program utama, mencakup bidang koperasi, UMKM,

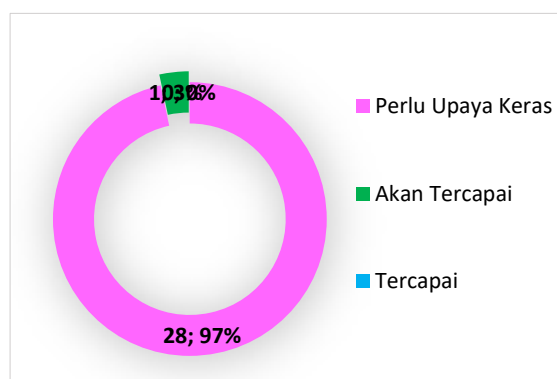
industri, perdagangan, serta perlindungan konsumen. Program-program tersebut meliputi antara lain Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi, Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi, Program Pemberdayaan UMKM, Program Pengembangan UMKM, Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan, Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan, Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, Program Pengembangan Ekspor, Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen, hingga Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri.

Berdasarkan data yang dianalisis menunjukkan bahwa kinerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah



menunjukkan bahwa dari sisi kinerja program, terdapat total 17 indikator kinerja program yang dievaluasi. , sebanyak 16 kinerja dari indikator program atau sekitar 94% termasuk dalam kategori Perlu Upaya Keras, yang menandakan bahwa sebagian besar program masih jauh dari target

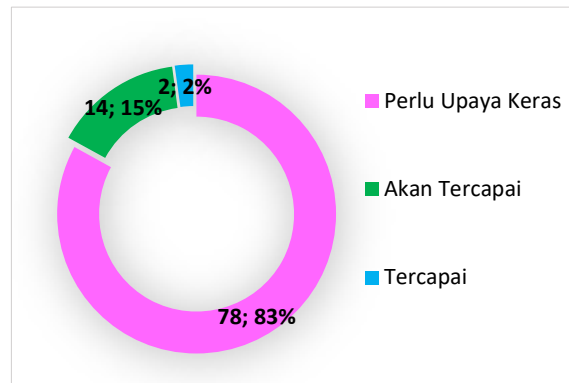
yang diharapkan dan memerlukan peningkatan signifikan baik dari sisi pelaksanaan maupun capaian output. Hanya 1 program atau 6% yang termasuk dalam kategori Akan Tercapai, yang berarti program tersebut sedang dalam proses menuju keberhasilan.



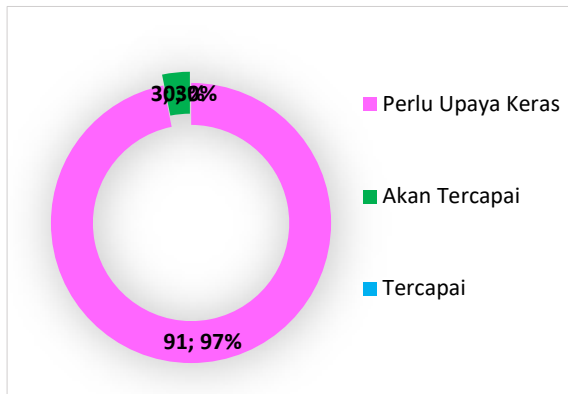
Selanjutnya, dari sisi kinerja kegiatan, terdapat total 29 Indikator kegiatan. Sebanyak 28 kegiatan atau 97% dikategorikan "Perlu Upaya Keras", yang mencerminkan rendahnya efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Hanya

1 kegiatan (3%) yang berada pada jalur yang cukup baik untuk mencapai target (Akan Tercapai).

Hal serupa juga terlihat pada sub kegiatan, di mana sebanyak 78 indikator dari sub kegiatan atau 78% termasuk dalam kategori "Perlu Upaya Keras", yang mengindikasikan lemahnya pencapaian target di tingkat pelaksanaan. Sementara itu, 14 sub kegiatan (15%) berada dalam kategori "Akan Tercapai", dan hanya 2 sub kegiatan (2%) yang telah "Tercapai".



Dari sisi keuangan, capaian realisasi anggaran menunjukkan kecenderungan serupa dengan capaian kinerja. Pada tingkat sub kegiatan, sebanyak 91 sub kegiatan (97%) belum menunjukkan performa keuangan



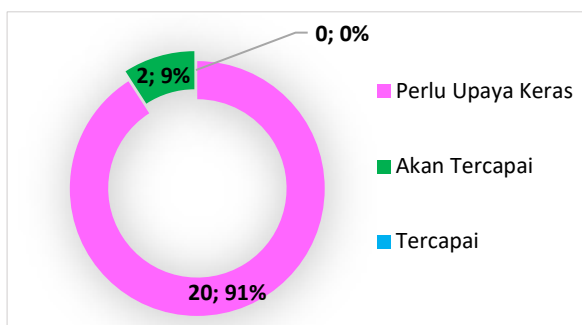
yang baik dan dikategorikan Perlu Upaya Keras. Hanya 3 sub kegiatan (3%) yang diperkirakan akan tercapai target keuangannya, dan tidak ada sub kegiatan (0%) yang sudah berhasil mencapai realisasi keuangan sesuai target. Secara keseluruhan, baik dari sisi kinerja maupun keuangan,

pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM menunjukkan bahwa mayoritas belum memenuhi target dan masih memerlukan perhatian serta upaya perbaikan yang serius. Ketimpangan antara perencanaan dan pelaksanaan ini bisa menjadi indikator adanya masalah struktural dalam perencanaan, pelaksanaan, manajemen sumber daya, atau koordinasi antar unit kerja, yang perlu segera ditangani agar efektivitas program pembangunan dapat tercapai sesuai harapan.

4.4.27 Sekretariat Daerah

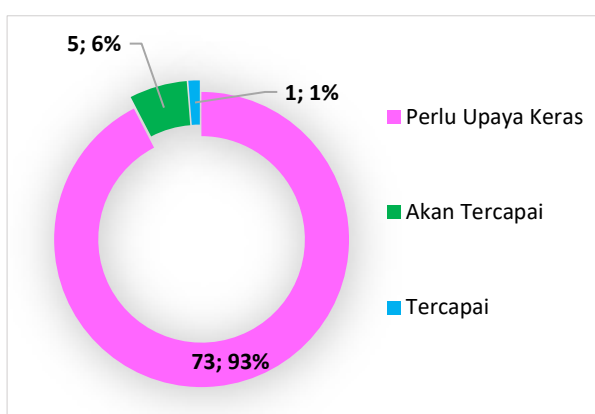
Dalam menjalankan fungsinya, Sekretariat Daerah terbagi menjadi 9 (sembilan) biro, yaitu Biro Umum, Biro Administrasi Pimpinan, Biro Hukum, Biro Organisasi, Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Biro Kesejahteraan

Rakyat, Biro Perekonomian, Biro Administrasi Pembangunan, dan Biro Pengadaan Barang dan Jasa. Secara keseluruhan, Sekretariat Daerah menjalankan 8 (delapan) program yang terdiri dari Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum, Program Penataan Organisasi, Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Program Kesejahteraan Rakyat, Program Perekonomian dan Pembangunan, Program Kebijakan Administrasi Pembangunan, serta Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa. Berdasarkan data yang dianalisis terkait evaluasi kinerja dan keuangan Sekretariat Daerah menunjukkan bahwa masih



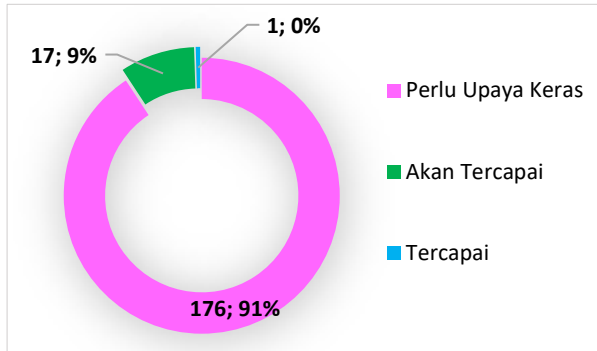
Dari sisi kinerja program, sebagian besar atau 91% masuk dalam kategori “Perlu Upaya Keras”, yang menunjukkan bahwa mayoritas program belum menunjukkan hasil yang optimal dan masih jauh dari

target kinerja yang ditetapkan. Sementara itu, hanya 2 kinerja program (9%) yang dikategorikan “Akan Tercapai”, yang berarti program tersebut menunjukkan kemajuan meskipun belum sepenuhnya berhasil mencapai sasaran. Tidak terdapat satupun program (0%) yang dinilai “Tercapai” dalam hal kinerja.



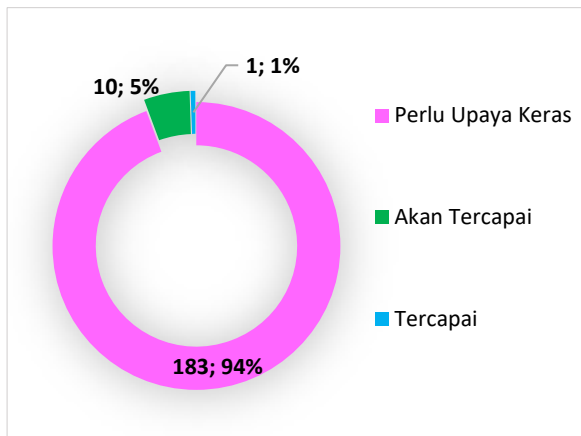
Pada level kegiatan, sebesar 93% tergolong ke dalam kategori perlu upaya keras sedangkan 6% berada dalam kategori “Akan Tercapai” dan hanya 1% yang termasuk ke dalam klasifikasi telah tercapai pada triwulan I tahun 2025. Hal ini menunjukkan bahwa dari segi

kinerja berdasarkan indikator program masih didominasi oleh kategori perlu upaya kerja.



Sementara itu, pada level sub kegiatan teridentifikasi bahwa sebesar 91% diklasifikasikan dalam kategori “Perlu Upaya Keras”, termasuk kategori “Akan Tercapai”, dan hanya 1 indikator yang termasuk dalam kategori telah tercapai.

Berdasarkan analisis di atas dapat diidentifikasi bahwa pelaksanaan sub kegiatan Sekretarian Daerah masih menghadapi tantangan besar dalam mencapai target kinerja.



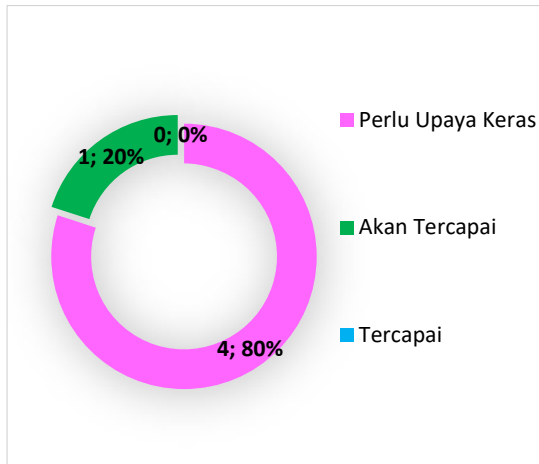
Dari sisi keuangan pada level sub kegiatan, sebesar 94% masuk dalam kategori “Perlu Upaya Keras”, dan hanya 1% yang teridentifikasi termasuk ke dalam kategori telah tercapai realisasi keuangan secara penuh. Capaian ini mengindikasikan bahwa di tingkat paling operasional,

penyerapan dan pemanfaatan anggaran masih sangat rendah dan perlu perbaikan signifikan. Secara keseluruhan, kinerja Sekretariat DPRD menunjukkan bahwa masih banyak program, kegiatan, dan sub kegiatan yang membutuhkan perhatian dan perbaikan untuk mencapai target yang telah direncanakan, terutama pada tingkat program dan sub kegiatan. Dari sisi keuangan, hampir seluruh aspek juga berada dalam kategori “Perlu Upaya Keras”, yang memperlihatkan bahwa tantangan dalam penggunaan anggaran masih cukup tinggi. Dengan demikian, perlu dilakukan evaluasi menyeluruh dan tindak lanjut strategis dalam aspek perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan agar kinerja dan serapan anggaran dapat ditingkatkan secara signifikan.

4.4.28 Sekretariat DPRD

Sekretariat DPRD melaksanakan 2 (dua) program utama, yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Program Dukungan

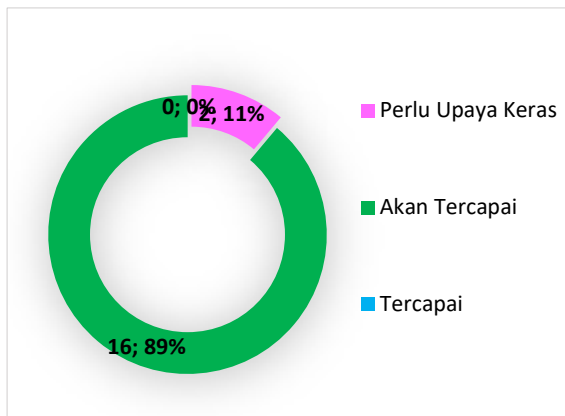
Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD. Berdasarkan tabel capaian, kedua program tersebut menunjukkan tingkat capaian kinerja dan keuangan yang berbeda. Salah satu program telah menunjukkan kinerja yang mengindikasikan bahwa target program akan tercapai, namun program lainnya belum menunjukkan capaian yang signifikan baik pada sisi kinerja maupun keuangan. Untuk selengkapnya, capaian kinerja dan keuangan program-program Sekretariat DPRD diuraikan sebagaimana berikut.



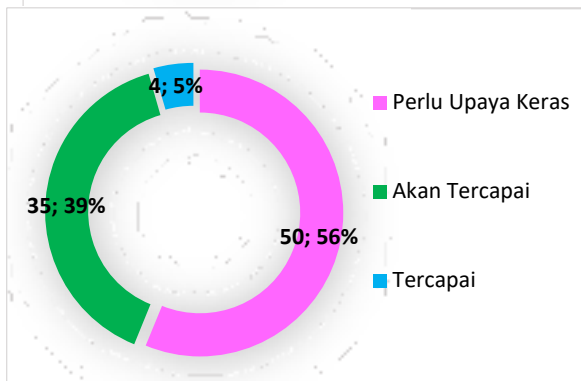
Dari sisi kinerja program, terdapat total 5 indikator program yang dinilai. Sebanyak 4 program (80%) berada dalam kategori “Perlu Upaya Keras”, yang menunjukkan bahwa mayoritas program belum mencapai target yang diharapkan dan memerlukan intervensi atau perbaikan serius. Sementara itu, hanya 1 program (20%) yang dikategorikan

“Akan Tercapai”. Hasil analisis kinerja indikator pada OPD Sekretariat DPRD tersebut menunjukkan adanya kemajuan namun belum optimal. Tidak ada

program (0%) yang berhasil “Tercapai” sepenuhnya.

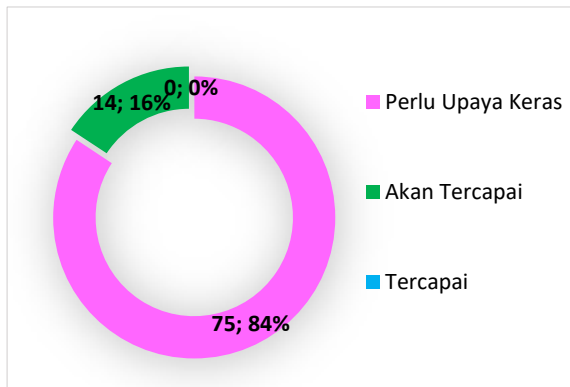


Pada tingkat kegiatan, dari total 18 kegiatan, hanya 2 kinerja indikator kegiatan (11%) yang berada dalam kategori “Perlu Upaya Keras”, sementara mayoritas yaitu 16 kegiatan (89%) dikategorikan “Akan Tercapai”, yang berarti sebagian besar kegiatan sudah menunjukkan hasil yang mendekati target kinerja, walaupun belum sepenuhnya optimal.



Sementara itu, dari total 89 sub kegiatan, sebanyak 50 sub kegiatan (56%) masih dalam kategori “Perlu Upaya

Keras” yang mengindikasikan bahwa lebih dari setengah sub kegiatan belum menunjukkan pencapaian kinerja yang memadai. Di sisi lain sebanyak 35 indikator sub kegiatan (39%) berada dalam kategori “Akan Tercapai”, dan hanya 4 sub kegiatan (5%) yang dinyatakan “Tercapai”, yang berarti pencapaiannya sudah sesuai dengan target yang ditetapkan.



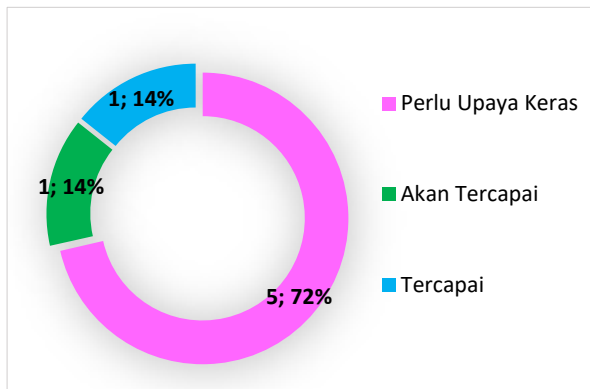
Dari aspek keuangan, sub kegiatan, dari total 89 sub kegiatan, 75 sub kegiatan (84%) dikategorikan dalam “Perlu Upaya Keras” yang mengindikasikan terkait penyerapan anggaran yang belum optimal hingga TW I tahun 2025. Sebanyak 14

indikator keuangan dari sub kegiatan (15,73%) diklasifikasikan sebagai “Akan Tercapai”, dan tidak ada sub kegiatan yang mencapai kategori “Tercapai” (0%). Dengan demikian, pengelolaan keuangan di tingkat pelaksana perlu ditingkatkan secara signifikan. Berdasarkan uraian di atas, secara kumulatif Sekretariat DPRD menunjukkan capaian yang masih perlu ditingkatkan baik dari segi kinerja maupun keuangan, terutama pada tingkat sub kegiatan dan program. Dari sisi kinerja, meskipun kegiatan menunjukkan tren yang relatif lebih baik, masih terdapat dominasi kategori "Perlu Upaya Keras" terutama pada program dan sub kegiatan. Sementara dari sisi keuangan, ketidaksesuaian antara perencanaan dan realisasi anggaran sangat terlihat, dengan mayoritas komponen masih jauh dari target yang ditetapkan. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan dalam perencanaan, pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi anggaran agar pelaksanaan kegiatan dan program menjadi lebih efektif dan efisien.

4.4.29 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

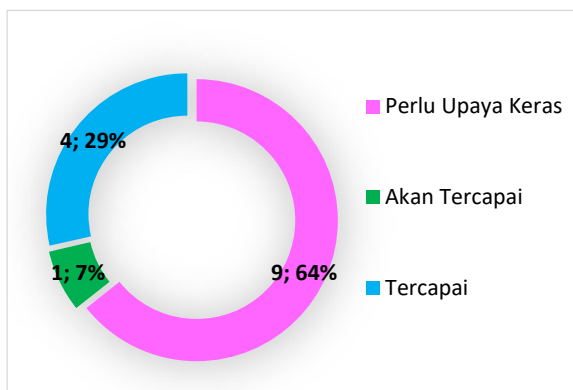
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah melaksanakan 3 (tiga) program, yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, serta Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kalimantan

Timur bertugas menyusun, mengoordinasikan, dan mengendalikan perencanaan pembangunan daerah secara terpadu. Bappeda berperan dalam merumuskan kebijakan, menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), serta memastikan sinkronisasi dengan kebijakan nasional. Selain itu, Bappeda juga melakukan evaluasi dan pengendalian pelaksanaan pembangunan guna mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.



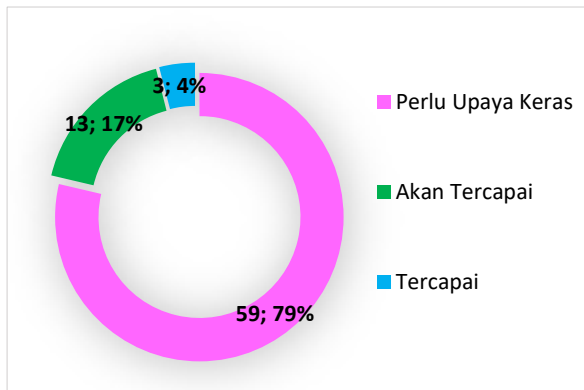
Berdasarkan data yang ditampilkan pada grafik di samping menunjukkan bahwa, dari sisi kinerja program, terdapat total 7 indikator program yang dievaluasi. Sebagian besar atau 5 program (71,43%) berada dalam kategori

“Perlu Upaya Keras”, yang menunjukkan bahwa program-program ini masih jauh dari target yang direncanakan dan membutuhkan intervensi atau peningkatan kinerja. Selanjutnya, 1 kinerja dari indikator program (14,29%) yang berada dalam kategori “Akan Tercapai”. Situasi ini menunjukkan bahwa pencapaiannya telah mendekati target namun belum optimal. Hanya 1 program (14,29%) yang dinyatakan “Tercapai” yang artinya program tersebut telah mencapai indikator kinerja yang telah ditetapkan.

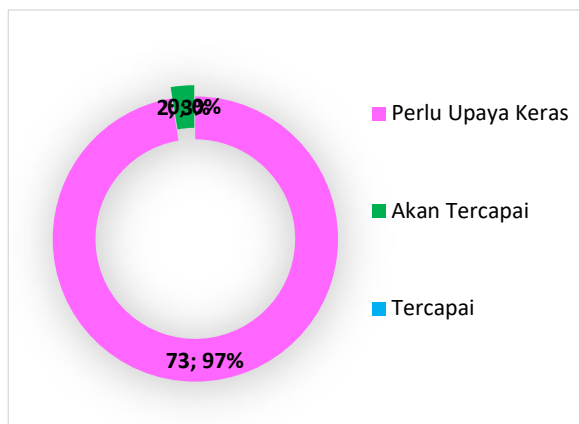


Pada tingkat kegiatan, terdapat 14 indikator kegiatan yang menjadi tanggungjawab Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). Sebanyak 9 indikator kegiatan (64%) tergolong “Perlu Upaya Keras”, sementara hanya 1 kegiatan (7%) diklasifikasikan sebagai “Akan

Tercapai”, dan 4 kegiatan (29%) telah “Tercapai”. Hasil analisis ini menunjukkan bahwa meskipun mayoritas kegiatan masih belum mencapai



(79%) berada pada kategori “Perlu Upaya Keras”, menandakan masih rendahnya capaian pada level implementasi paling detail. Sementara itu, 13 sub kegiatan (17%) termasuk dalam kategori “Akan Tercapai”, dan hanya 3 sub kegiatan (4%) yang dikategorikan “Tercapai”.



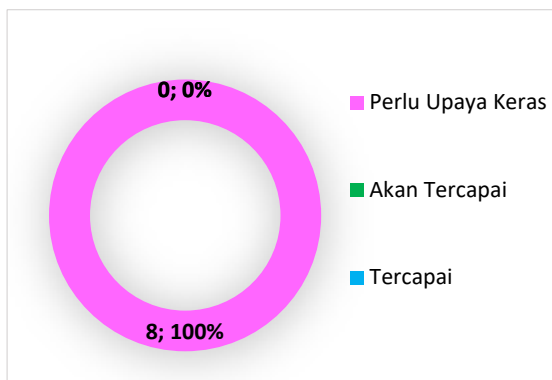
Dari sisi keuangan pada tingkat sub kegiatan, dari 76 sub kegiatan, sebanyak 73 indikator keuangan dari sub kegiatan tersebut Perlu Upaya Keras, dan 3 indikator keuangan sub kegiatan yang masuk dalam kategori akan tercapai. Hasil analisis ini menandakan bahwa pelaksanaan di

level terbawah belum mampu menyerap atau memanfaatkan anggaran secara optimal.

Berdasarkan uraian di atas, secara kumulatif Bappeda menunjukkan kinerja dan capaian keuangan yang masih perlu ditingkatkan secara signifikan, terutama pada tingkat sub kegiatan, yang mencerminkan implementasi teknis di lapangan. Meskipun ada beberapa kegiatan dan program yang telah mencapai target, proporsinya masih kecil. Permasalahan utama terlihat pada aspek keuangan, di mana seluruh komponen program, kegiatan, dan sub kegiatan masih berada dalam kategori “Perlu Upaya Keras”, mengindikasikan kurangnya efektivitas dalam pelaksanaan anggaran. Oleh karena itu, dibutuhkan langkah-langkah strategis untuk memperbaiki perencanaan, pengawasan, dan realisasi program serta kegiatan guna meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran dan pencapaian target pembangunan daerah.

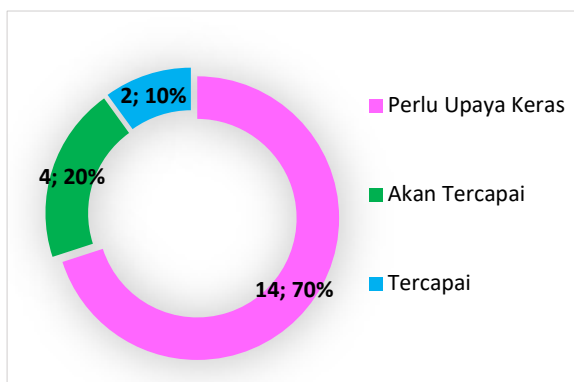
4.4.30 Badan Pendapatan Daerah

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kalimantan Timur bertugas melaksanakan fungsi perumusan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pendapatan, khususnya terkait pajak daerah, retribusi, dan penerimaan lainnya yang sah. Bapenda berperan dalam optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD) melalui pelayanan, pengawasan, dan penegakan peraturan perpajakan daerah. Selain itu, Bapenda juga melakukan pendataan, penilaian, penetapan, penagihan, dan pelaporan penerimaan daerah guna mendukung pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik di Kalimantan Timur secara berkelanjutan.



Badan Pendapatan Daerah melaksanakan 3 (tiga) program, yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, Program Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Program Pengelolaan Pendapatan Daerah. Secara umum, hampir seluruh

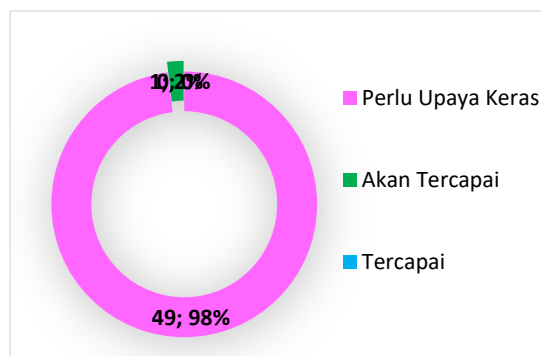
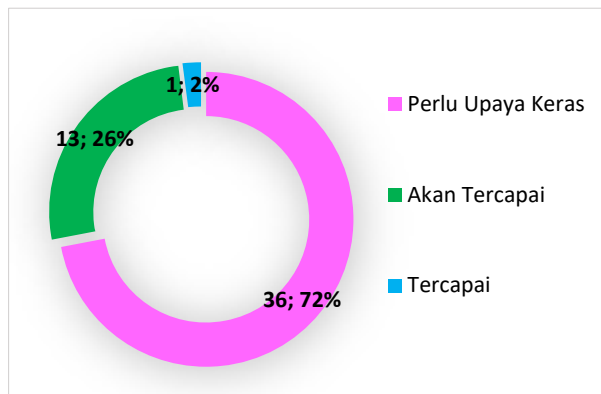
program menunjukkan tingkat realisasi kinerja dan keuangan yang masih cukup rendah. Dari aspek kinerja program, seluruh indikator program (100%) yang dilaksanakan berada dalam kategori “Perlu Upaya Keras”, yang menandakan bahwa tidak ada satupun program yang telah mencapai target kinerjanya atau bahkan mendekati capaian target.



Pada tingkat kegiatan, sebanyak 14 kinerja indikator pada level; kegiatan (70%) dikategorikan “Perlu Upaya Keras”, dan hanya 10% yang dinilai termasuk dalam kategori telah tercapai hingga Triwulan I tahun 2025. Berdasarkan hasil analisa di

atas dapat diidentifikasi bahwa bahwa meskipun terdapat sebagian kecil kegiatan yang mendekati target, pencapaian secara keseluruhan masih jauh dari harapan.

Untuk sub kegiatan, sebanyak 16 indikator sub kegiatan dari Badan Pendapatan Daerah atau sebesar (72%) termasuk dalam kategori “Perlu Upaya Keras”, 13 indikator dari sub kegiatan (26%) berada pada kategori “Akan Tercapai”, dan hanya 1 sub kegiatan (2%) yang sudah “Tercapai”. Tingat ketercapaian kinerja pada level sub kegiatan tersebut mengindikasikan bahwa pelaksanaan di tingkat teknis dan operasional terbawah pun masih menghadapi berbagai hambatan untuk mencapai target kinerja.



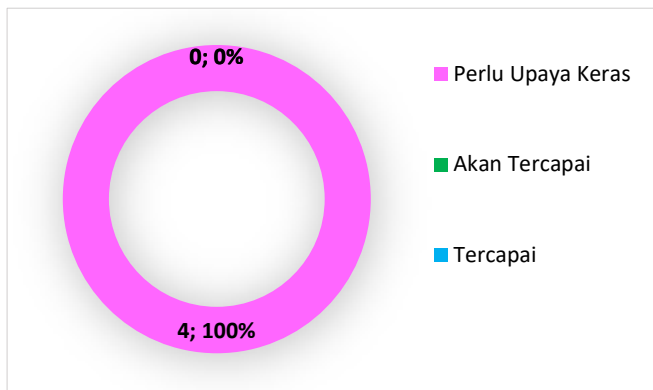
Pada sisi keuangan, di tingkat sub kegiatan, sebanyak 49 indikator sub kegiatan (98%) termasuk dalam kategori “Perlu Upaya Keras”, dan hanya 1 sub kegiatan (2%) berada pada kategori “Akan Tercapai”, sekaligus tidak ada sub kegiatan yang “Tercapai” dari sisi

keuangan. Hal ini menunjukkan kelemahan yang cukup signifikan dalam pengelolaan keuangan oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Berdasarkan uraian dari hasil analisis di atas, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah juga menghadapi tantangan dalam pencapaian kinerja maupun pengelolaan keuangan. Seluruh program tidak ada yang mencapai target, dan mayoritas kegiatan serta sub kegiatan masih jauh dari sasaran baik secara output maupun dalam pemanfaatan anggaran. Hal ini menunjukkan perlunya perbaikan menyeluruh dalam aspek perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi agar efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan daerah serta pencapaian target kerja dapat meningkat secara signifikan.

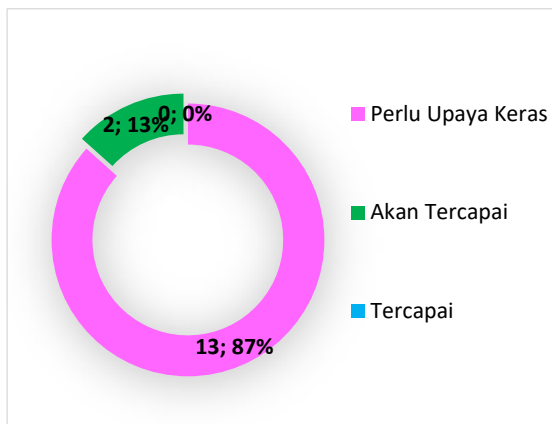
4.4.31 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menyelenggarakan tiga program utama, yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, Program Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Program Pengelolaan Barang Milik Daerah. Berdasarkan data kinerja dan keuangan yang ditampilkan, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menunjukkan capaian yang belum optimal, baik dari sisi kinerja maupun pengelolaan keuangan, yang tercermin dari dominasi kategori "Perlu Upaya Keras" di hampir seluruh indikator penilaian.



Dari aspek kinerja program, seluruh 4 program yang dijalankan masuk dalam kategori "Perlu Upaya Keras", tanpa satu pun yang masuk kategori "Akan Tercapai" ataupun "Tercapai". Hal ini mencerminkan bahwa

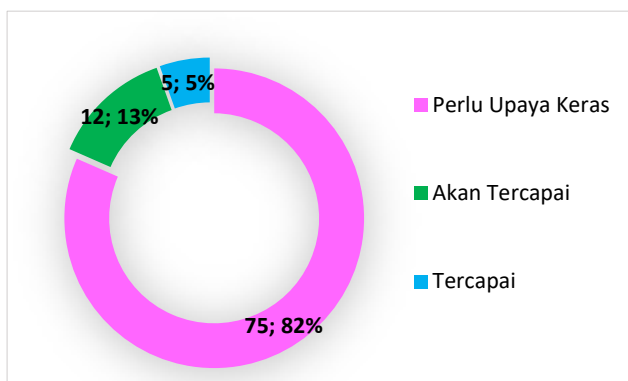
seluruh program belum menunjukkan kemajuan signifikan dalam mencapai



target kinerja yang telah ditetapkan.

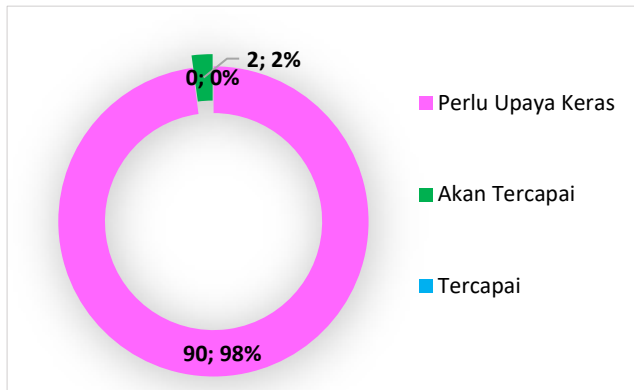
Pada tingkat kegiatan, dari total 15 kegiatan, sebanyak 13 kegiatan (87%) berada pada kategori "Perlu Upaya Keras", sementara 2 kegiatan (13%) diklasifikasikan "Akan Tercapai", dan tidak ada kegiatan yang masuk kategori "Tercapai". Ini menunjukkan bahwa

sebagian besar kegiatan masih berada pada posisi kritis yang memerlukan perhatian dan perbaikan strategis.



Untuk sub kegiatan, dari 92 sub kegiatan, sebanyak 75 sub kegiatan (82%) memerlukan upaya keras, 12 sub kegiatan (13%)

berada pada posisi akan tercapai, dan hanya 5 sub kegiatan (5%) yang sudah tercapai. Persentase sub kegiatan yang berhasil mencapai target sangat kecil, yang mengindikasikan lemahnya efektivitas di tingkat pelaksanaan teknis.



Pada aspek keuangan, sub kegiatan, dari total 92 sub kegiatan, 90 sub kegiatan (98%) berada dalam kategori “Perlu Upaya Keras”, dan hanya 2 sub kegiatan (2,2%) yang termasuk kategori “Akan Tercapai”, tanpa satu pun yang masuk kategori “Tercapai”.

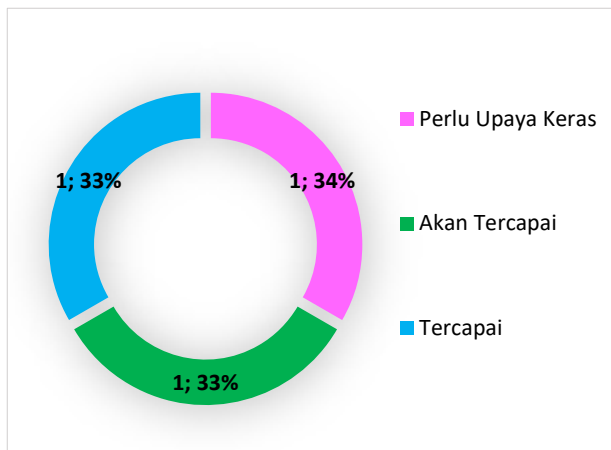
Hasil analisis ini menunjukkan bahwa kendala realisasi anggaran paling signifikan justru terjadi di level pelaksana teknis, yaitu sub kegiatan, yang seharusnya menjadi ujung tombak pelaksanaan anggaran.

Secara umum, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menghadapi tantangan serius baik dari sisi kinerja maupun realisasi anggaran. Tidak adanya capaian maksimal di semua level menunjukkan perlunya perbaikan menyeluruh, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring, hingga evaluasi. Koordinasi lintas unit, peningkatan kapasitas pelaksana, serta penguatan sistem pengawasan dan pelaporan sangat diperlukan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program serta penggunaan anggaran di masa mendatang.

4.4.32 Badan Kepegawaian Daerah

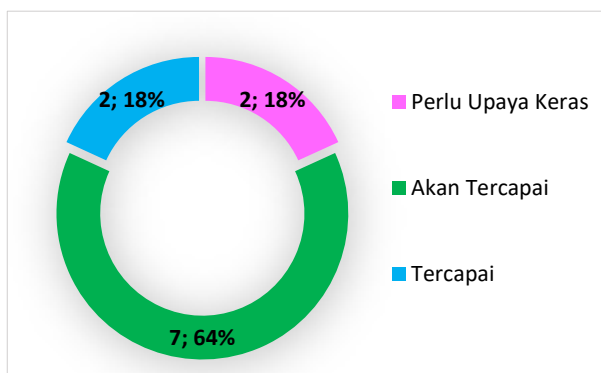
Badan Kepegawaian Daerah melaksanakan dua program utama, yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Program Kepegawaian Daerah. Secara umum, berdasarkan analisis yang dilakukan teridentifikasi bahwa Badan Kepegawaian Daerah menunjukkan capaian kinerja dan keuangan yang cukup beragam, meskipun sebagian besar masih memerlukan perbaikan, khususnya dalam aspek kinerja.

Dari sisi kinerja program, dari total 3 indikator program, sebanyak 1 indikator (34%) masih dikategorikan “Perlu Upaya Keras”, sementara 1 program (33%) berada pada kategori “Akan Tercapai”, dan 1 program lainnya



(33%) sudah berhasil “Tercapai”. Hasil analisis ini menunjukkan bahwa separuh dari program yang dijalankan masih belum menunjukkan performa optimal, meskipun ada indikasi peningkatan dari beberapa program lainnya.

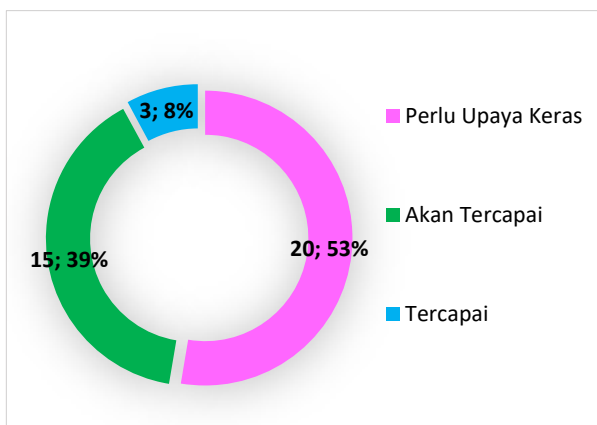
Dalam hal kegiatan, terdapat 11 kegiatan, yang terdiri dari 2 kegiatan (18%) berada pada kategori “Perlu Upaya Keras”, 7 kegiatan (64%) berada



pada kategori “Akan Tercapai”, dan 2 kegiatan (18%) telah “Tercapai”. Komposisi ini mencerminkan bahwa sebagian besar kegiatan sudah menuju capaian yang baik, meskipun masih diperlukan penguatan pelaksanaan agar lebih

banyak kegiatan yang masuk kategori tercapai.

Sementara itu, dari total 48 indikator sub kegiatan, sebanyak 20 indikator pada sub kegiatan (53%) masih memerlukan upaya keras, 15 sub



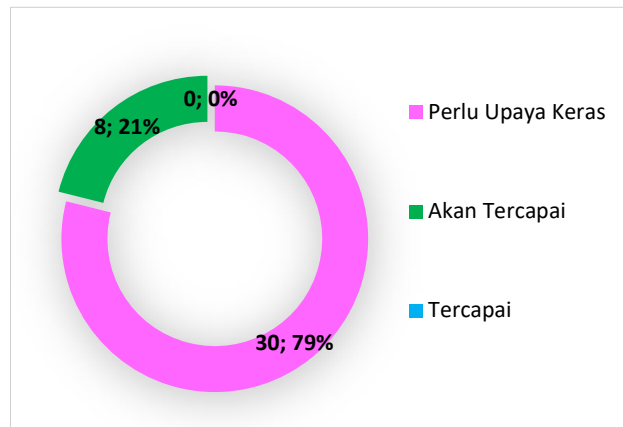
kegiatan (39%) berada dalam posisi akan tercapai, dan hanya 3 sub kegiatan (8%) yang telah tercapai. Kinerja di tingkat pelaksanaan teknis masih menjadi tantangan utama, dengan sebagian besar sub kegiatan belum menunjukkan kemajuan yang signifikan.

Pada sisi keuangan pada level sub kegiatan, dari total 38 sub kegiatan, sebanyak 30 sub kegiatan (79%) masih berada dalam kategori “Perlu Upaya Keras”, hanya 8 sub kegiatan (21%) yang berada di kategori “Akan Tercapai”, dan tidak ada yang masuk kategori “Tercapai”. Artinya, belum ada sub kegiatan yang berhasil sepenuhnya dalam hal realisasi keuangan, sehingga

menjadi perhatian khusus bagi efektivitas pelaksanaan anggaran di lapangan.

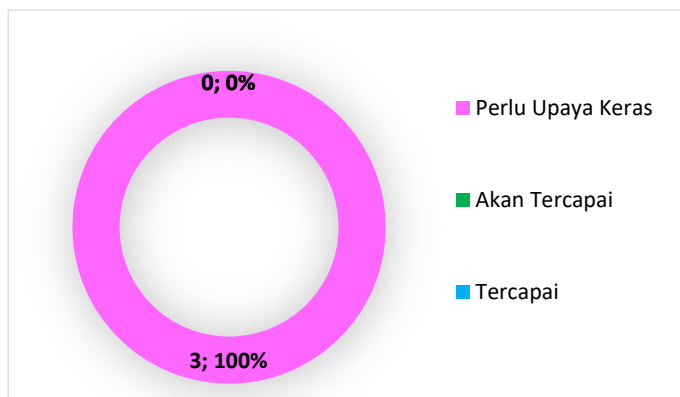
Secara agregat, Badan Kepegawaian Daerah telah menunjukkan beberapa capaian yang mulai membaik, khususnya di level kegiatan kinerja. Namun,

tantangan masih besar terutama pada aspek pengelolaan keuangan dan sub kegiatan yang mayoritas masih memerlukan upaya keras untuk mencapai target. Diperlukan strategi peningkatan kapasitas pelaksana teknis, penguatan sistem monitoring dan evaluasi, serta perencanaan dan akselerasi pelaksanaan program dan kegiatan secara menyeluruh.



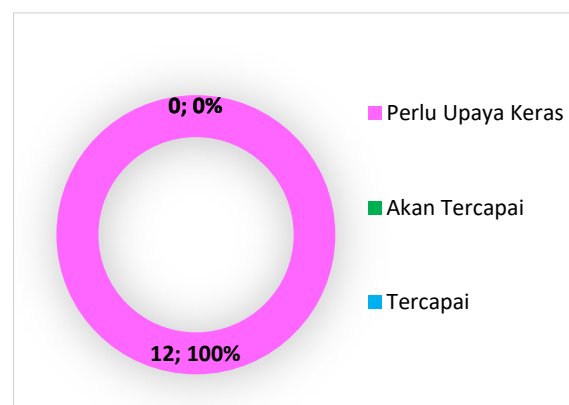
4.4.33 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia melaksanakan 2 (dua)

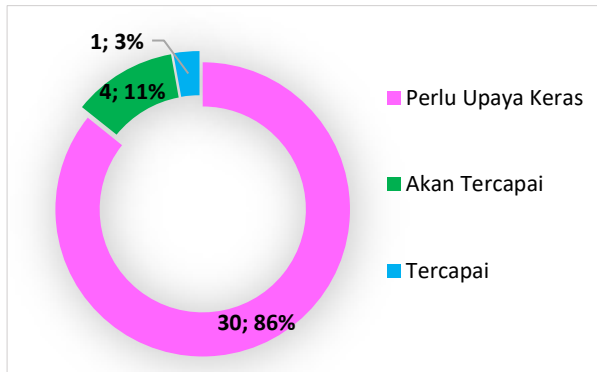


program utama, yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Program Pengembangan Sumber Daya Manusia. Secara umum, kedua program tersebut menunjukkan tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran

di bawah 25 persen. Berdasarkan uraian di atas, dari segi kinerja program, seluruh 3 program (100%) yang dilaksanakan berada dalam kategori “Perlu Upaya Keras”. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada program yang menunjukkan kinerja mendekati atau mencapai target yang telah ditetapkan.



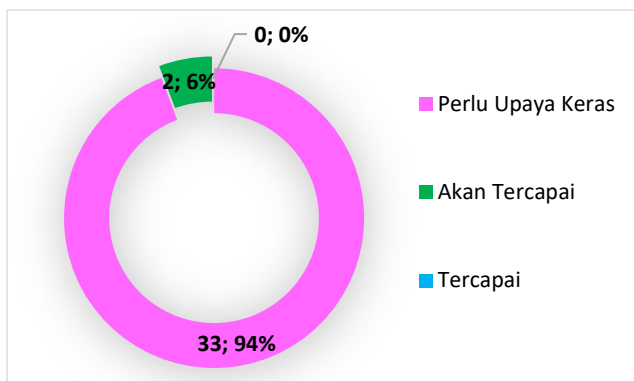
Hal serupa terjadi pada kegiatan, di mana terdapat 12 kegiatan yang seluruhnya juga dikategorikan “Perlu Upaya Keras”. Tidak terdapat satu pun kegiatan yang masuk dalam kategori “Akan Tercapai” maupun “Tercapai”, yang menandakan rendahnya capaian output atau hasil kegiatan secara menyeluruh.



menyeluruh.

Sementara itu, pada Level sub kegiatan, dari total 35 sub kegiatan, sebanyak 30 sub kegiatan (86%) masih memerlukan upaya keras, dan hanya 4 sub kegiatan (11%) yang berada pada kategori “Akan

Tercapai”, sementara 1 (3%) yang berada pada kategori “Tercapai”. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi teknis dari kegiatan di lapangan belum berjalan efektif dan memerlukan perhatian serius.



Dari sisi pengelolaan keuangan pada level sub kegiatan, dari 35 sub kegiatan, sebanyak 33 sub kegiatan (94%) masuk dalam kategori “Perlu Upaya Keras”, hanya 2 sub kegiatan (6%) yang berada pada kategori “Akan

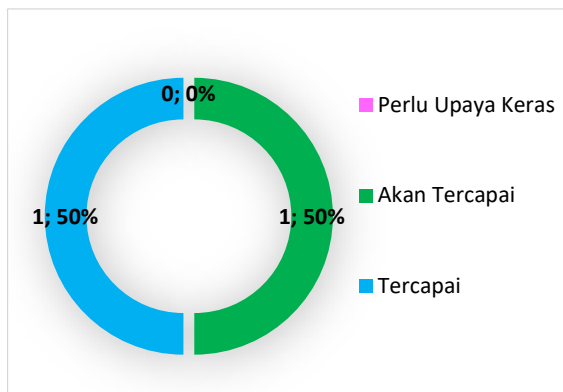
Tercapai”, dan tidak ada yang mencapai kategori “Tercapai”. Angka ini mengindikasikan bahwa pelaksanaan dan pencairan anggaran di tingkat paling operasional sangat minim dan membutuhkan evaluasi menyeluruh.

Secara kumulatif, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia menunjukkan performa yang masih sangat rendah, baik dari sisi kinerja maupun pengelolaan keuangan. Seluruh program dan kegiatan membutuhkan perhatian dan intervensi serius dari pihak terkait, baik dalam bentuk penguatan kapasitas, perbaikan sistem perencanaan dan pelaksanaan, maupun peninjauan ulang terhadap strategi pencapaian kinerja. Fokus utama ke depan seharusnya diarahkan pada perbaikan implementasi sub kegiatan dan efisiensi penggunaan anggaran agar dapat

mendukung target-target yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis kelembagaan.

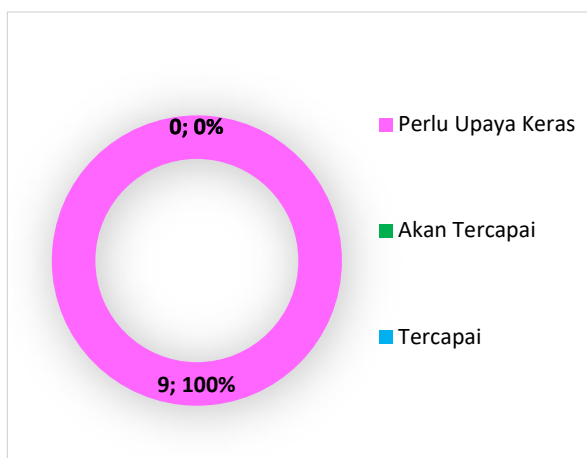
4.4.34 Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah

Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah melaksanakan 2 (dua) program, yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi



dan Program Penelitian dan Pengembangan Daerah. Berdasarkan capaian yang analisis, keseluruhan program masih menunjukkan tingkat kinerja dan realisasi keuangan yang cukup rendah. Lebih detail, dari sisi kinerja indikator program, seluruhnya termasuk ke dalam kategori “Perlu

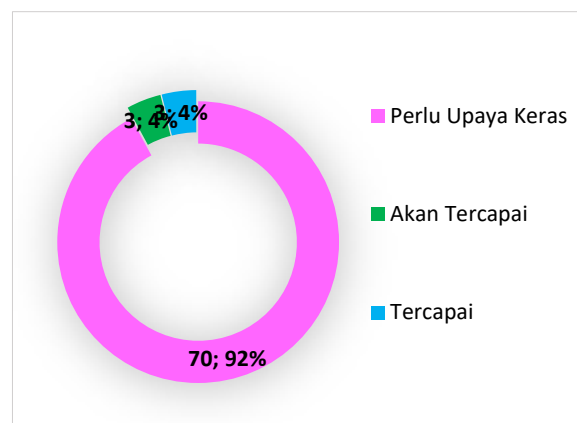
Upaya Keras”, menandakan bahwa target program belum tercapai dan masih jauh dari harapan.



Lebih lanjut, dari 9 kegiatan yang dijalankan, semuanya (100%) juga masuk dalam kategori “Perlu Upaya Keras”, tanpa satu pun yang berada pada kategori “Akan Tercapai” maupun “Tercapai”. Situasi ini mengindikasikan bahwa secara keseluruhan, kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Penelitian

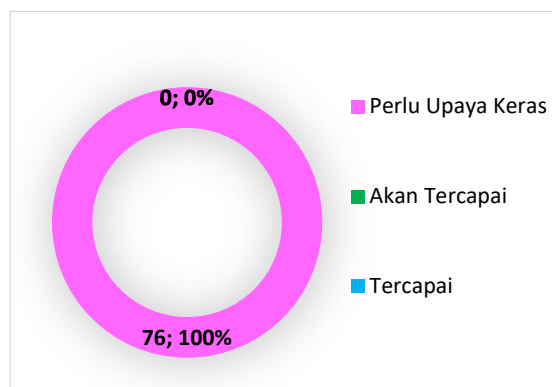
dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) belum menunjukkan hasil yang optimal.

Pada level sub kegiatan, dari total 76 indikator sub kegiatan yang menjadi tugas dan tanggungjawab dari Balitbangda, sebanyak 70 kinerja indikator sub kegiatan (92%) masih



dalam kategori “Perlu Upaya Keras”, sementara hanya 3 sub kegiatan (34%) yang berada dalam kategori “Akan Tercapai” dan 3 sub kegiatan lainnya (4%) sudah “Tercapai” pada Triwulan I tahun 2025. Walaupun terdapat sedikit capaian yang telah mendekati atau mencapai target, dominasi sub kegiatan dalam kategori perlu upaa keras menunjukkan adanya hambatan signifikan dalam pelaksanaan teknis di lapangan.

Dari perspektif keuangan, di level sub kegiatan, dari total 76 indikator sub kegiatan, sebanyak seluruhnya (100%) masih dikategorikan “Perlu Upaya

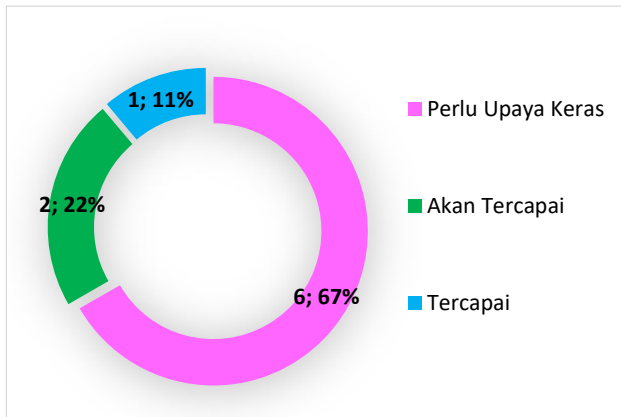


Keras”, Tidak ada satu pun dari indikator pada level sub kegiatan tersebut yang mencapai kategori “akan tercapai” maupun “Telah Tercapai”, yang menandakan bahwa pelaksanaan anggaran di tingkat paling detail sekalipun masih belum efektif dan jauh

dari sasaran. Berdasarkan hasil analisis di atas, secara kumulatif dapat disimpulkan bahwa Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah menghadapi tantangan besar dalam mencapai target kinerja dan realisasi anggaran. Dominasi kategori “Perlu Upaya Keras” di seluruh aspek, mulai dari program, kegiatan, hingga sub kegiatan baik pada kinerja maupun keuangan mengindikasikan perlunya evaluasi menyeluruh, peningkatan kapasitas pelaksana, serta perbaikan dalam perencanaan dan eksekusi program. OPD ini juga dinilai perlu segera mengambil langkah strategis dan teknis untuk memastikan program dan anggaran yang dirancang dapat memberikan hasil yang nyata dan terukur.

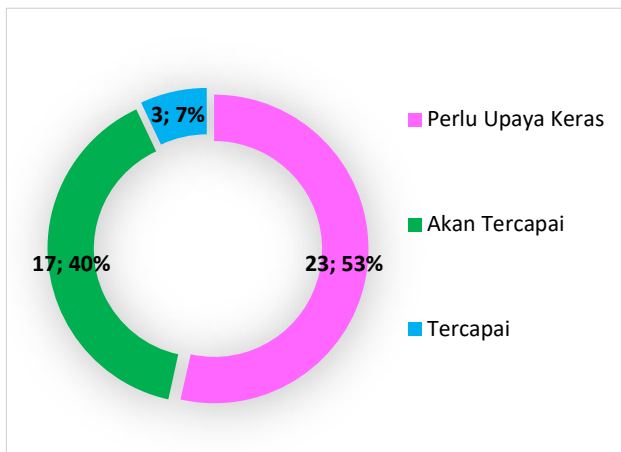
4.4.35 Badan Penghubung Provinsi

Badan Penghubung Provinsi melaksanakan 2 (dua) program, yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Program Pelayanan Penghubung. Secara umum, kedua program menunjukkan tingkat kinerja dan realisasi anggaran yang baik, dimana salah satu program telah mencapai target dan program lainnya mengindikasikan bahwa target akan tercapai. Capaian kinerja dan keuangan diuraikan sebagaimana berikut.



Berdasarkan data kinerja dan keuangan Badan Penghubung Provinsi, analisis mendalam dapat dijabarkan secara berurutan dari sisi kinerja hingga keuangan, dimulai dari tingkat program, kegiatan, dan sub kegiatan. Dari sisi kinerja program, terdapat total

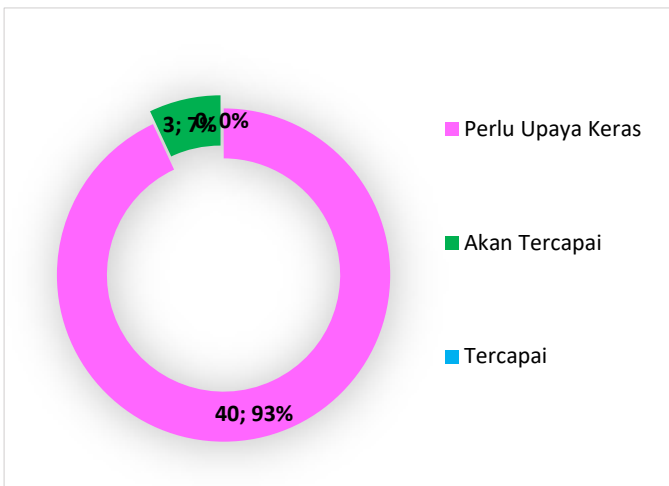
2 indikator program yang dievaluasi. Hasilnya menunjukkan bahwa sebagian besar program telah berada dalam kondisi yang cukup optimal. Sebanyak 1 program atau 50% masuk dalam kategori akan tercapai, yang menunjukkan



bahwa ada potensi untuk memenuhi target asalkan dilakukan upaya lanjutan yang memadai. Pada tingkat kegiatan, dari total 9 indikator kinerja pada level kegiatan, sebanyak 6 indikator atau 67% juga dikategorikan Perlu Upaya Keras.

Posisi ini mencerminkan bahwa dua pertiga kegiatan belum berjalan efektif dan perlu peninjauan strategi pelaksanaan. Sementara itu, 2 kegiatan atau 22% masuk dalam kategori Akan Tercapai, dan hanya 1 kegiatan atau 11% yang telah Tercapai.

Berdasarkan analisis di atas dapat diidentifikasi bahwa kinerja dari Badan

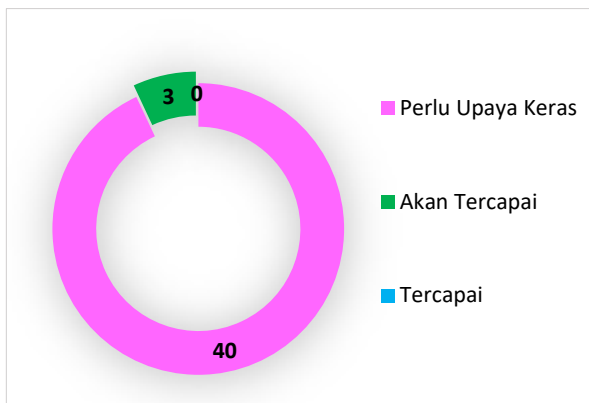


Penghubung Provinsi baik dari level program maupun kegiatan masih menunjukkan rendahnya pencapaian target dalam pelaksanaan kegiatan.

Lebih lanjut, pada tingkat sub kegiatan, dari total, terdapat 23 sub kegiatan atau 53% yang masuk kategori Perlu

Upaya Keras. Situasi ini juga menunjukkan bahwa lebih dari separuh sub kegiatan mengalami hambatan atau belum memenuhi indikator keberhasilan yang ditentukan. Selain itu, 17 sub kegiatan atau (40%) berada pada kategori Akan Tercapai, dan hanya 3 sub kegiatan atau 6,98% yang berada dalam kategori Tercapai. Dengan demikian, hasil ini juga memperlihatkan bahwa keberhasilan pada level kegiatan maupun sub kegiatan secara umum masih sangat terbatas.

Dari sisi keuangan program, pada tingkat sub kegiatan, kondisi keuangan dinilai juga belum optimal terutama dalam aspek pendistribusian.



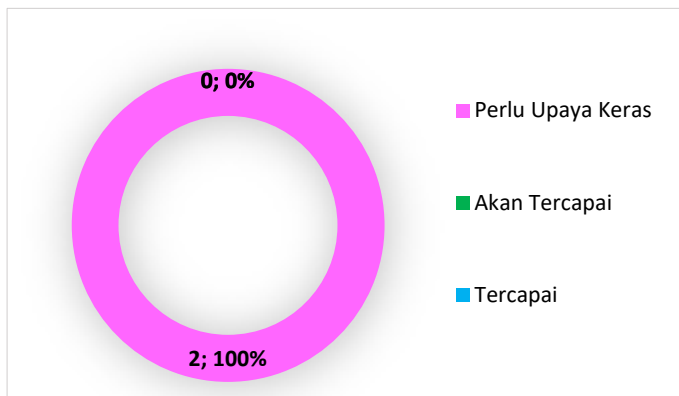
Dari 43 sub kegiatan, sebanyak 40 sub kegiatan atau 93% dikategorikan Perlu Upaya Keras, yang menunjukkan bahwa hampir seluruh sub kegiatan mengalami kendala besar dalam realisasi keuangan. Hanya 3 sub kegiatan atau 6,98% yang masuk dalam

kategori Akan Tercapai, dan tidak ada satu pun sub kegiatan yang Tercapai secara keuangan.

Dengan demikian, secara kumulatif kinerja dan keuangan Badan Penghubung Provinsi pada Triwulan I tahun 2025 menunjukkan bahwa mayoritas program, kegiatan, dan sub kegiatan berada dalam kondisi yang memerlukan perhatian khusus. Dari sisi kinerja, dominasi kategori “Perlu Upaya Keras” menandakan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap perencanaan dan implementasi. Sementara dari sisi keuangan, tingginya persentase kegiatan dan sub kegiatan yang belum menyerap anggaran dengan baik menunjukkan rendahnya efektivitas penggunaan anggaran. Kondisi ini harus segera ditindaklanjuti dengan langkah-langkah strategis yang mencakup perbaikan manajemen program, peningkatan kapasitas pelaksana, serta penguatan mekanisme monitoring dan evaluasi, agar tujuan pembangunan dan pelayanan publik dapat tercapai secara maksimal.

4.4.36 Inspektorat

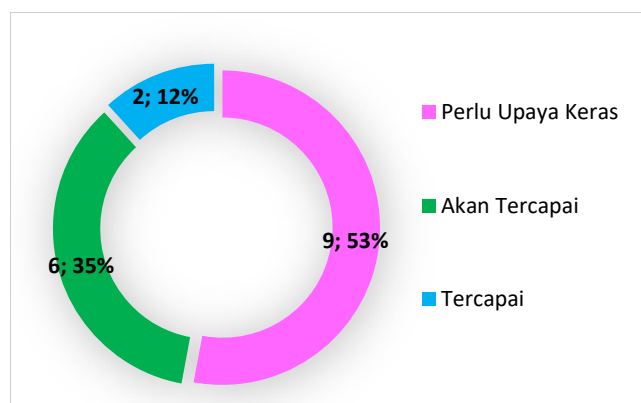
Inspektorat Kalimantan Timur bertugas mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah melalui kegiatan pengawasan internal, audit, reuiu, evaluasi, pemantauan, dan konsultasi terhadap kinerja perangkat daerah. Inspektorat berperan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, mendorong efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran, serta mencegah terjadinya penyimpangan dan tindak korupsi. Selain itu, Inspektorat juga memberikan rekomendasi perbaikan tata kelola pemerintahan guna mewujudkan akuntabilitas, transparansi, dan integritas dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kalimantan Timur. Berpijak pada uraian di atas, Inspektorat menyelenggarakan 3 (tiga) program utama, yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, Program Penyelenggaraan Pengawasan, dan Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi. Tingkat kinerja dan realisasi anggaran yang ditunjukkan oleh ketiga program tersebut relatif masih rendah secara umum. Adapun kinerja program-program Inspektorat diuraikan sebagaimana berikut ini.



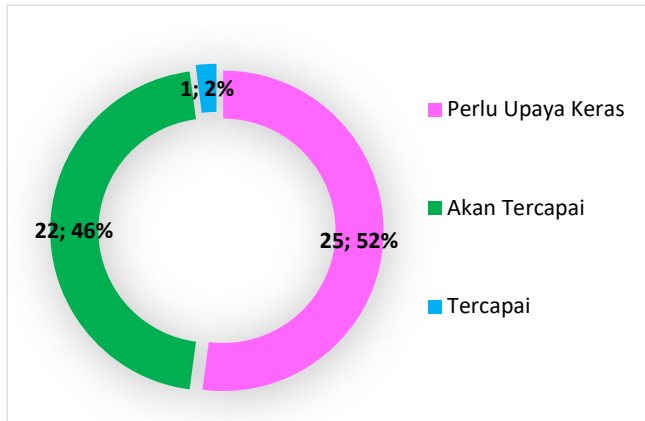
Berdasarkan data kinerja dan keuangan dari Inspektorat, Pada aspek kinerja program, terdapat total 2 program (100%) dan program ini masuk dalam kategori “Perlu Upaya Keras”, menandakan bahwa target program belum tercapai dan

masih jauh dari harapan.

Pada tingkat kegiatan, dari total 9 indikator kegiatan, 9 indikator atau 53% dikategorikan Perlu Upaya Keras, sedangkan 6 indikator pada level kegiatan atau 35% dikategorikan Akan Tercapai. Sementara itu, 1 indikator



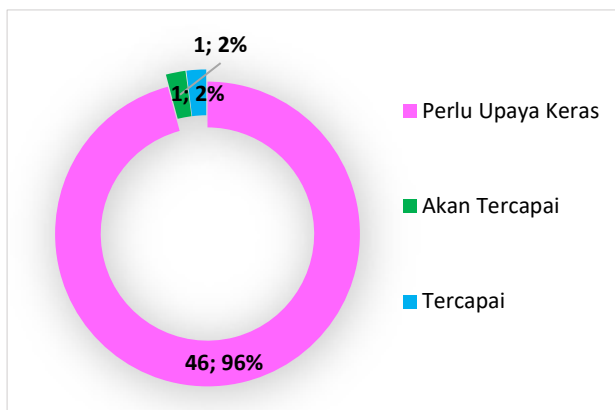
kegiatan atau 12% telah mencapai kategori Tercapai, menunjukkan adanya peningkatan yang lebih baik dibandingkan pada level program.



Sedangkan di level sub kegiatan, dari total 48 sub kegiatan, sebanyak 25 sub kegiatan atau 52% termasuk dalam kategori Perlu Upaya Keras. Ini berarti lebih dari separuh sub kegiatan belum berjalan sesuai harapan. 22 sub

kegiatan atau 46% masuk kategori Akan Tercapai, dan hanya 1 sub kegiatan atau 2,% yang benar-benar Tercapai, menunjukkan bahwa pada tingkat paling operasional, masih sangat diperlukan perbaikan kinerja yang serius.

Disisi keuangan, pada tingkat sub kegiatan, terdapat 48 sub kegiatan, dengan 46 sub kegiatan atau 96% berada dalam kategori Perlu Upaya Keras, menunjukkan bahwa hampir seluruh sub kegiatan menghadapi kendala serius dalam realisasi keuangan. Hanya 1 sub kegiatan atau 2% yang berada dalam kategori Akan Tercapai, dan 1 sub kegiatan atau 2% yang sudah Tercapai.



Berdasarkan hasil analisa di atas, secara kumulatif kinerja dan keuangan Inspektorat menunjukkan tren yang masih harus ditingkatkan. Kinerja program dan sub kegiatan masih didominasi oleh kategori Perlu Upaya Keras, dengan hanya sedikit

capaian yang benar-benar memenuhi target. Dari sisi keuangan, realisasi anggaran pun belum optimal di semua level baik program, kegiatan, maupun sub kegiatan yang ditunjukkan oleh tingginya jumlah kategori Perlu Upaya Keras, terutama pada sub kegiatan yang mencapai hampir 96%. Oleh karena itu, perbaikan diperlukan dalam hal perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi agar efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program serta

penggunaan anggaran dapat meningkat signifikan ke depan. Melalui upaya tersebut diharapkan Inspektorat dapat mencapai seluruh indikator program, kegiatan maupun sub kegiatan hingga akhir tahun 2025.

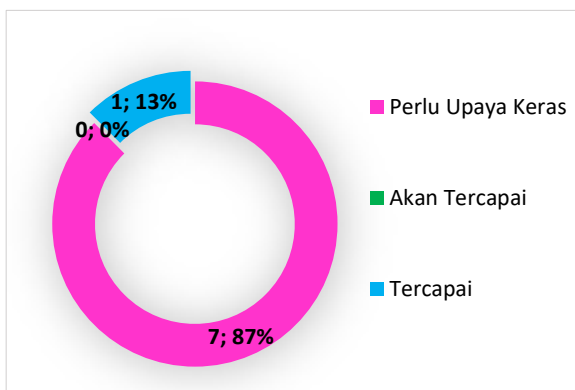
4.4.37 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Kalimantan Timur merupakan lembaga pemerintah daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Lembaga ini memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas politik, ketahanan nasional, serta harmonisasi kehidupan berbangsa dan bernegara di wilayah Provinsi Kalimantan Timur. Kesbangpol bertugas menyusun, melaksanakan, mengoordinasikan, dan mengevaluasi kebijakan di bidang kesatuan bangsa, ideologi Pancasila, kewaspadaan dini, pembinaan politik dalam negeri, serta fasilitasi organisasi kemasyarakatan dan partai politik.

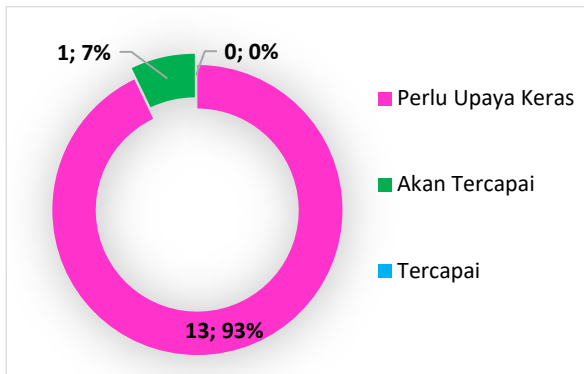
Berpijak pada uraian di atas, terdapat enam program yang menjadi tanggungjawab dan beban kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi; Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi; Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan; Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan; Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik; Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan; Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya; dan Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas

Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial.

Berdasarkan data kinerja dan keuangan dari Kesbangpol masih menunjukkan kondisi yang belum optimal. Pada aspek kinerja program, terdapat total 8 indikator program yang diampuh, dimana 7 indikator program



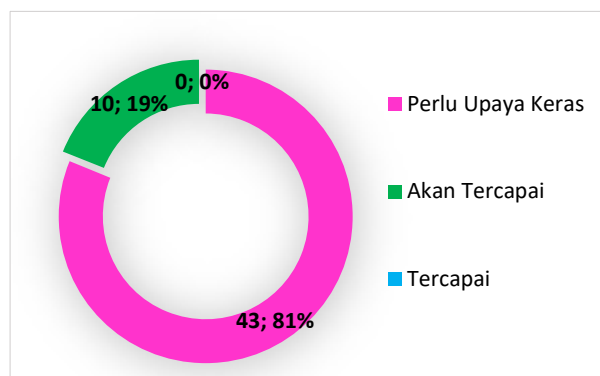
menunjukkan kinerja masih relatif masih rendah atau belum optimal hingga TW I tahun 2025 yang dibuktikan dengan masuknya indikator tersebut ke dalam kategori “Perlu Upaya Keras”. Hasil identifikasi ini juga mengindikasikan maupun memperkuat pernyataan bahwa bahwa target program belum tercapai dan masih jauh dari harapan.



Pada tingkat kegiatan, dari total 14 indikator kegiatan, 13 indikator atau 93% dikategorikan Perlu Upaya Keras, sedangkan 1 indikator pada level kegiatan atau 7% dikategorikan Akan akan tercapai. Sementara itu, hasil identifikasi menunjukkan

belum terdapat indikator kegiatan yang termasuk ke dalam kategori Tercapai hingga triwulan I tahun 2025.

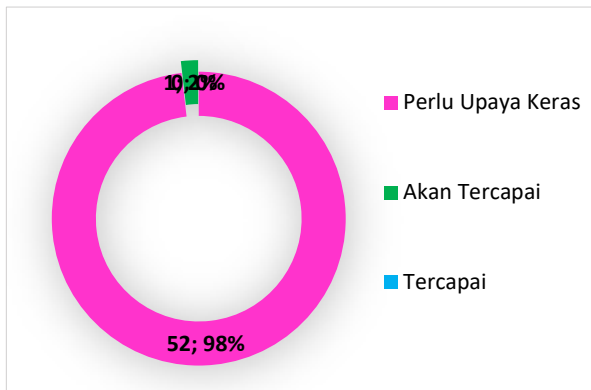
Sedangkan di level sub kegiatan, dari total 53 sub kegiatan, sebanyak 43 sub kegiatan atau 81% termasuk dalam kategori Perlu Upaya Keras. Hal



berarti mayoritas sub kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kalimantan Timur belum berjalan sesuai harapan sehingga termasuk ke dalam kategori perlu upaya keras. Sementara itu 10 indikator sub kegiatan atau 19% masuk kategori

Akan Tercapai, dan tidak terdapat indikator sub kegiatan yang benar-benar telah tercapai hingga triwulan I tahun 2025. Hasil analisis ini juga menunjukkan bahwa pada tingkat paling operasional, masih sangat diperlukan perbaikan kinerja yang serius sehingga diharapkan tupoksi dan tanggungjawab dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Kalimantan Timur dapat terealisasi hingga akhir tahun 2025.

Disisi keuangan, pada tingkat sub kegiatan, seanyak 53 indikator sub kegiatan atau 98% berada dalam kategori Perlu Upaya Keras. Hasil ini menunjukkan bahwa hampir seluruh sub kegiatan pada keuangan juga menghadapi kendala serius dalam realisasi keuangan. Hanya 1 sub kegiatan



atau 2% yang berada dalam kategori Akan Tercapai, dan tidak terdapat indikator yang sudah tercapai pada TW I tahun 2025.

Berdasarkan hasil analisa di atas, secara kumulatif kinerja dan keuangan Badan Kesatuan Bangsa

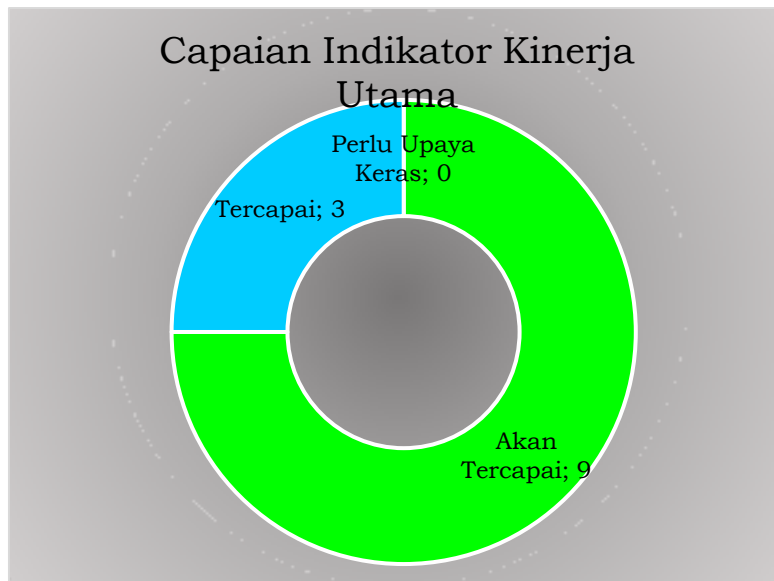
dan Politik (Kesbangpol) menunjukkan tren yang masih harus ditingkatkan. Kinerja program dan sub kegiatan masih didominasi oleh kategori Perlu Upaya Keras, dengan hanya sedikit capaian yang benar-benar memenuhi target. Dari sisi keuangan, realisasi anggaran pun belum optimal di semua level baik program, kegiatan, maupun sub kegiatan yang ditunjukkan oleh tingginya jumlah kategori Perlu Upaya Keras, terutama pada sub kegiatan yang 98% pada sisi keuangan perlu upaya keras. Oleh karena itu, perbaikan diperlukan dalam hal perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi agar efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program serta penggunaan anggaran dapat meningkat signifikan ke depan. Melalui upaya tersebut diharapkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) dapat mencapai seluruh indikator program, kegiatan maupun sub kegiatan hingga akhir tahun 2025.

4.5 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

4.5.1 Capaian Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah

Dalam dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 Indikator kinerja utama (IKU) terbagi ke dalam dua indikator yang terdiri dari Indikator kinerja tujuan dan indikator kinerja sasaran strategis. Dalam hal ini, pada indikator kinerja tujuan ditetapkan 4 (empat) tujuan utama pembangunan daerah yang dievaluasi melalui 7 (tujuh) indikator kinerja. Keempat tujuan tersebut meliputi: 1) Mewujudkan sumber daya manusia berdaya saing; 2) Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas; 3) Meningkatkan kualitas lingkungan hidup; dan 4) Mewujudkan reformasi birokrasi. Kinerja atas keempat tujuan pembangunan tersebut diukur menggunakan tujuh

indikator, dimana pada triwulan I teridentifikasi 3 indikator telah tercapai serta 3 indikatornya termasuk ke dalam klasifikasi akan tercapai.



Gambar 4.2 Capaian IKU Kaltim 2025

Pengukuran dilakukan dengan membandingkan realisasi 2024 dengan target 2025. Hal tersebut disebabkan belum terdapat publikasi data indikator IKU untuk triwulan I. Membandingkan dengan target 2025, bertujuan untuk mengevaluasi besaran penetapan target dengan realisasi kondisi terkini pada kinerja tujuan dan sasaran strategis. Diperlukan penguatan penetapan besaran target pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Persentase Penurunan Emisi dari BAU, dan Indeks Reformasi Birokrasi. Sedangkan pada indikator lainnya, diperkirakan akan tercapai. Adapun penjelasan secara mendalam terkait dengan tujuan dan indikator kinerja utama sebagai berikut.

Tabel 4.14 Capaian Indikator Kinerja Utama

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	2025		
			Target RKP	Realisasi	Capaian
INDIKATOR KINERJA TUJUAN					
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	78.60	78.79	100.24
2	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	Persen	6,28- 6,58	6.17	93.77
3	Tingkat Kemiskinan	Persen	5,05 - 5,67	5.78	85.54
4	Indeks Gini	Indeks	0,310 - 0,321	0.321	96.45
5	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	80.19	76.63	95.56
6	Persentase Penurunan Emisi dari BAU	Persen	27.53	49.19	178.68
7	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	74,00 (B)	85,16 (A)	115.08
INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS					

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	2025		
			Target RKPD	Realisasi	Capaian
8	Prevalensi Stunting	Persen	19.80	22.2	87.88
9	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	4,60 - 5,14	5.14	88.26
10	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	67.64	61.41	90.79
11	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI)	Indeks	8.39	7.89	94.04
12	Bauran Energi Baru Terbarukan (EBT)	Persen	12.39	12.14	97.98

Keterangan:

Perlu Upaya Keras
Akan Tercapai
Tercapai



1) Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing

Tujuan ini dievaluasi melalui indikator kinerja Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dengan capaian sebesar 100,24% pada triwulan I tahun 2025. Situasi ini mengindikasikan bahwa indikator tujuan utama termasuk ke dalam kalsifikasi indikator telah tercapai. Capaian indikator tersebut menggambarkan adanya peningkatan yang signifikan dalam mutu sumber daya manusia yang dipengaruhi oleh adanya perbaikan di sektor pendidikan, pelayanan kesehatan, serta aspek kesejahteraan sosial. Selain itu, implementasi program investasi yang berfokus pada penguatan kualitas SDM yang meliputi peningkatan akses terhadap pendidikan dan pengembangan infrastruktur kesehatan mampu memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan capaian IPM.

2) Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas Evaluasi

Kinerja tujuan ini diukur melalui 3 (tiga) indikator, meliputi: Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) dengan capaian sebesar 93,77%, Tingkat Kemiskinan dengan capaian sebesar 85,54%, dan Indeks Gini dengan capaian sebesar 96,45%. Hasil kalkulasi ketiga indikator tujuan utama ini secara bersama-sama termasuk ke dalam kategori 2 yaitu indikator yang akan tercapai pada akhir tahun 2025. Dari perspektif lain, hasil ini mencerminkan bahwa pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur yang tetap stabil, sekaligus menunjukkan adanya efektivitas implementasi kebijakan dalam mengurangi tingkat kemiskinan dan memperbaiki distribusi pendapatan.

3) Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup

Capaian kinerja pada tujuan ini diukur melalui indikator kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang mencapai 95,56% serta Persentase Penurunan Emisi dari skenario Business as Usual (BAU) dengan capaian sebesar 178,68%. Capaian ini menggambarkan bahwa berbagai program pelestarian lingkungan telah berjalan dengan baik, khususnya dalam aspek peningkatan kualitas air, udara, dan lahan.

4) Mewujudkan Reformasi Birokrasi Evaluasi

Kinerja tujuan ini diukur melalui Indeks Reformasi Birokrasi dengan capaian sebesar 115,08%. Capaian indikator ini mengindikasikan bahwa pelaksanaan reformasi birokrasi di Kalimantan Timur telah berlangsung secara efektif. Selain itu, peningkatan kinerja ini menggambarkan adanya kemajuan dalam aspek transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi tata kelola pemerintahan, yang didorong oleh implementasi berbagai kebijakan strategis di bidang administrasi publik.

Sementara itu, dari indikator kinerja strategis terdapat 5 indikator utama pemerintah yaitu Prevalensi Stunting; Tingkat Pengangguran Terbuka; Indeks Pemberdayaan Gender (IDG); Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI); dan Bauran Energi Baru Terbarukan (EBT). Hasil kalkulasi tingkat ketercapaian kinerja teridentifikasi bahwa hingga triwulan I tahun 2025 kelima indikator kinerja tersebut memiliki tingkat ketercapaian 88,26% hingga 97,98% sekaligus menempatkannya pada klasifikasi indikator akan tercapai.

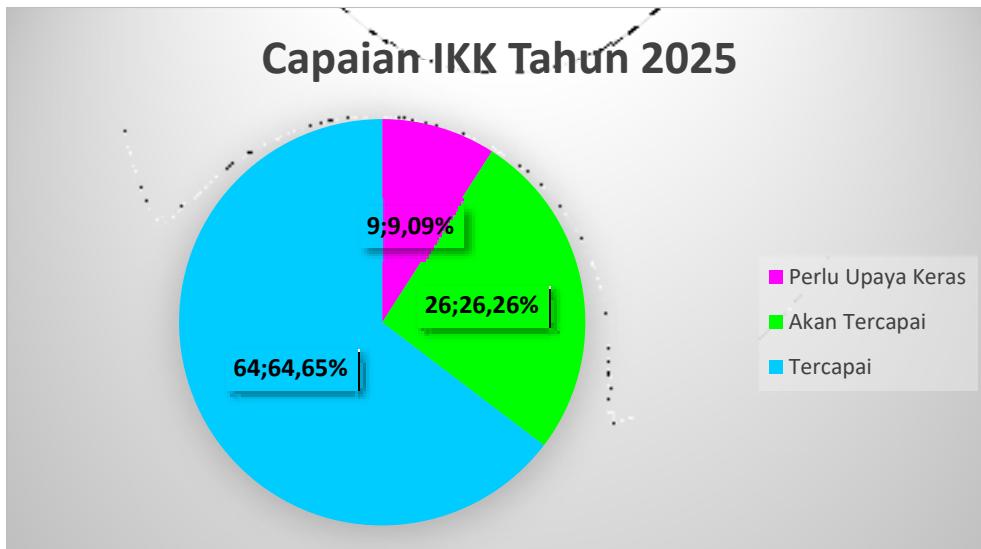
Indikator kinerja sasaran strategi mengenai prevalensi stunting di Provinsi Kalimantan Timur bertujuan untuk mengukur efektivitas intervensi pemerintah daerah dalam menurunkan angka stunting, memastikan tercapainya target penurunan prevalensi sesuai dengan rencana pembangunan daerah, serta mengevaluasi capaian program gizi, kesehatan ibu dan anak, sanitasi, serta ketahanan pangan keluarga secara menyeluruh. Indikator ini juga berfungsi sebagai dasar pengambilan keputusan untuk perbaikan strategi dan alokasi sumber daya secara tepat sasaran. Dalam hal ini hingga triwulan I teridentifikasi tingkat ketercapaian sebesar 87,88%.

Begitu pun dengan tingkat pengangguran terbuka, bertujuan untuk mengukur sejauh mana kebijakan dan program pembangunan ekonomi, peningkatan keterampilan tenaga kerja, serta penciptaan lapangan kerja berhasil menurunkan jumlah pengangguran. Indikator ini juga digunakan untuk mengevaluasi efektivitas sinergi antara pemerintah daerah, dunia usaha, dan lembaga pendidikan dalam menyerap angkatan kerja, serta sebagai dasar perumusan strategi penanggulangan pengangguran yang lebih tepat dan berkelanjutan. Hasil analisis dan kalkulasi perhitungan tingkat ketercapaian teridentifikasi mencapai 88,26% hingga triwulan I tahun 2025.

Pada indikator Bauran Energi Baru Terbarukan (EBT), tingkat ketercapaian mencapai sebesar 97,88% serta menetapkannya sebagai indikator kinerja sasaran strategis tertinggi pada triwulan I tahun 2025. Bauran Energi Baru Terbarukan (EBT), bertujuan untuk meningkatkan porsi pemanfaatan sumber energi yang ramah lingkungan dalam sistem energi nasional maupun daerah, mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil, serta mendukung tercapainya target penurunan emisi gas rumah kaca. Selain itu, pengembangan bauran EBT juga diarahkan untuk memperkuat ketahanan dan kemandirian energi, membuka peluang investasi hijau, menciptakan lapangan kerja baru, serta mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di Provinsi Kalimantan Timur.

4.5.2 Capaian Indikaor Kinerja Kunci Pemerintah Daerah

Indikator Kinerja Kunci atau yang lebih dikenal dengan singkatan IKK merupakan target kinerja yang diletakan pada masing-masing perangkat daerah berbasis bidang urusan untuk pencapaian pembangunan daerah. Penerapan IKK telah menjadi bagian integral dari sistem perencanaan pembangunan nasional dan daerah. Pada tahun 2025, ditergetkan 99 indikator kinerja untuk menunjang Indikator Kinerja Kunci daerah yang tersebar ke 34 bidang urusan pemerintah. Secara kumulatif, hasil capaian pada IKK sebagai berikut.



Gambar 4.3 Capaian IKK Tahun 2025

Pada triwulan I tahun 2025, sebanyak 64 indikator atau setara 67.68% target IKK telah tercapai; dan 25.25% pada kategori akan tercapai. Kondisi ini mengindikasikan bahwa sebagian besar target kinerja dari penerapan Indikator Kinerja Kunci (IKK) telah tercapai dan memerlukan peningkatan indikator kinerja yang lebih optimis, namun pada pengimplementasinya masih terdapat juga capaian kinerja yang perlu upaya keras sebesar 7.07%. Dengan demikian, kondisi ini perlu dianalisis untuk untuk mengembangkan strategi yang efektif dalam mengoptimalkan penggunaan IKK.

Indikator kinerja kunci dengan capaian tertinggi pada triwulan I yaitu urusan pemerintahan bidang tenaga kerja terkait tingkat produktivitas tenaga kerja sebesar 4125.86%. Namun diperlukan konfirmasi terhadap data realisasi yaitu sebesar 288.81%, dimana terdapat indikasi perbedaan pola pengukuran realisasi dengan target. Selanjutnya pada urusan pemerintahan bidang pariwisata dengan indikator tingkat hunian akomodasi sebesar 2466.07%. Hal tersebut didorong dengan adanya IKN sebagai objek wisata nasional baru di Kaltim. Pada bidang pengadaan dengan indikator persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif sebesar 1144%, juga memerlukan penetapan target yang lebih optimis. Beberapa indikator yang juga memerlukan peningkatan target secara lebih optimis adalah Persentase perusahaan yang menerapkan tata Kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan); Persentase Cadangan Pangan;

Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri; Persentase peningkatan investasi di provinsi; Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan; dan Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Besar yang dikeluarkan oleh instansi terkait.

Adapun hasil analisis atas bidang urusan pemerintah yang capaiannya masih perlu upaya keras atau realisasi di bawah 25% sebagai berikut.

- 1. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,** pada indikator rasio kekerasan terhadap perempuan per 10.000 perempuan memiliki deviasi ketercapaian sebesar -5.21% oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan dan Keluarga Berencana (DKPPPA).
- 2. Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana,** pada indikator persentase kebutuhan ber-kb yang tidak terpenuhi (*unmet need*) memiliki deviasi tingkat ketercapaian sebesar -96.88% oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan dan Keluarga Berencana (DKPPPA).
- 3. Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga,** pada indikator Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan tingkat ketercapaian masih sebesar 5.45% pada triwulan I tahun 2025 oleh Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora).
- 4. Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata,** pada indikator Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan masih sebesar 2.41% oleh Dinas Pariwisata.
- 5. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian,** pada indikator Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular tercatat memiliki deviasi tingkat ketercapaian sebesar -13465.45% oleh Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan (DPKH) Provinsi Kalimantan Timur.
- 6. Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan,** pada indikator pertumbuhan nilai ekspor non migas memiliki deviasi tingkat ketercapaian sebesar -15.89% oleh Dinas Koperasi UMKM Dan Perindustrian (Disperindagkop).

7. Perencanaan dan Keuangan, terjadi pada tiga indikator yaitu: (a) berkaitan Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures) dengan capaian sebesar 23.66%. Capaian indikator ini juga masih angka sementara (*unaudited*), yang selanjutnya masih tahapan menunggu hasil audit BPK.

Berdasarkan uraian di atas, mengacu pada bidang urusan pemerintah terdapat dua kategori yaitu urusan wajib layanan dasar dan urusan umum. Pada urusan wajib layanan dasar yaitu pada bidang urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak masih terdapat 1 indikator capaian yang deviasinya jauh target yaitu berkaitan dengan Rasio kekerasan terhadap perempuan per 10.000 perempuan. Sedangkan pada urusan umum, juga masih terdapat indikator yang belum optimal, yaitu pada bidang perencanaan dan keuangan yang diperkirakan karena menunggu hasil audit dari BPK. Secara lebih detail, analisis terhadap capaian IKK per indikator urusan pemerintahan, diuraikan sebagai berikut.

4.5.2.1 Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan

Pada Bidang Pendidikan diampuh oleh Disdikbud, dengan ditetapkan dua indiktaor dalam RKPD Kaltim pada indikator prioritas provinsi berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dengan target: Tingkat partisipasi warga negara usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah; dan Tingkat Partisipasi warga negara usia 4-18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus, Target kedua indikator tersebut secara bersamaan optimis akan tercapai hingga akhir tahun ini dikarenakan kedua indikator kunci urusan pemerintah bidang pendidikan tersebut termasuk ke dalam kategori akan tercapai. Adapun hasil capaian sebagai berikut.

Pada indikator “Tingkat partisipasi warga negara usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah” teridentifikasi memiliki tingkat kecapaian sebesar 81.50%. Tingkat partisipasi warga negara usia 16–18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah mengacu pada persentase penduduk dalam kelompok usia tersebut yang sedang mengikuti jenjang

pendidikan menengah, seperti SMA, SMK, atau yang setara. Indikator ini umumnya diukur melalui Angka Partisipasi Sekolah (APS) yang menggambarkan sejauh mana remaja usia sekolah menengah tetap berada dalam sistem pendidikan.

Tabel 4.15 Capaian IKK Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan

No	Indikator Kinerja Kunci (IKK)	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Perangkat Daerah
1.1	Tingkat partisipasi warga negara usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah	%	100.00	81.5	81.50	Disdikbud
1.2	Tingkat Partisipasi warga negara usia 4-18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus	%	100.00	53.57	53.57	Disdikbud

Selanjutnya pada indikator Tingkat Partisipasi warga negara usia 4-18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus juga ditargetkan sebesar 100%. Target pada triwulan I tahun 2025, masih memiliki tingkat relaisasi/ketercapaian sebesar 53.57%. Berdasarkan analisa di atas, pendidikan bagi penyandang disabilitas masih menjadi masalah serius di Provinsi Kalimantan Timur. Hal ini didasari pada situasi dimana masih terdapat **banyak sekolah di Kalimantan Timur yang belum dilengkapi dengan fasilitas yang ramah disabilitas** seperti akses kursi roda, alat bantu belajar, dan guru terlatih untuk mengajar anak-anak dengan kebutuhan khusus. Akibatnya, anak-anak penyandang disabilitas seringkali terabaikan dan tidak memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas.¹

6.5.2.2 Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan

Bidang kesehatan diampuh oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur. Pada bidang kesehatan, terdapat 4 indikator kinerja kunci secara berturut-turut yaitu 1). Rasio daya tampung rumah sakit rujukan di Provinsi; 2). Persentase RS rujukan Provinsi yang terakreditasi; 3). Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisisi kesehatan akibat

¹ <https://www.uinsi.ac.id/2025/04/24/ketimpangan-pendidikan-di-kalimantan-timur-mencari-solusi-untuk-akses-yang-merata-bagian-1/>

bencana dan/atau berpotensi bencana; dan 4). Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB Provinsi. Hasil analisis secara menyeluruh teridentifikasi bahwa tiga indikator kunci memiliki tingkat ketercapaian sebesar 100% pada triwulan I tahun 2025. Secara lebih detail, analisis terhadap capaian IKK per indikator urusan pemerintah bidang kesehatan diuraikan sebagai berikut.

Tabel 4.16 Capaian IKK Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan

No	Indikator Kinerja Kunci (IKK)	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Perangkat Daerah
2.1	Rasio daya tampung rumah sakit rujukan di Provinsi	%	1.91	1.72	90.05	Dinkes
2.2	Persentase RS rujukan Provinsi yang terakreditasi	%	100.00	100	100.00	Dinkes
2.3	Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana	%	100.00	100	100.00	Dinkes
2.4	Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB Provinsi	%	100.00	100	100.00	Dinkes

Pada indikator ke I, menunjukkan kemampuan rumah sakit dalam memberikan pelayanan, dimana Rasio daya tampung rumah sakit rujukan dapat dicapai melebihi yang ditargetkan. Target dari RKPD untuk indikator ini sebesar 1.91% dengan tingkat capaian untuk indikator ini sebesar 90.05%, sehingga termasuk ke dalam kategori optimis akan tercapai. Pada dasarnya, perhitungan daya tampung mengukur jumlah tempat tidur pada rumah sakit milik pemerintah provinsi Kaltim terhadap jumlah penduduk. Begitu pula pada inidikator ke II sampai dengan ke IV telah ditargetkan 100% dan telah tercapai. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh RSD dibawa kewenangan provinsi telah terakreditasi, memiliki cakupan untuk palayanan kondisi darurat; dan telah dilakukan penanganan menyeluruh pada semua korban bencana dan Kejadian Luar Biasa (KLB) pada wilayah Kaltim.

6.5.2.3 Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pada bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang diampuh oleh Dinas PUPR&PERA, terdapat 5 indikator yang telah dilaksanakan dengan realisasi masih relatif lebih rendah dibandingkan dengan target. Namun demikian, dari perspektif capaian, tiga diantaranya termasuk ke dalam kategori telah tercapai, sedangkan sisanya berada pada kategori akan tercapai. Berdasarkan uraian di atas, indikator tersebut secara berturut-turut adalah: (1) Rasio luas kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir; (2) Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS kewenangan Provinsi; (3) Rasio luas daerah irigasi kewenangan Provinsi yang dilayani oleh jaringan irigasi; (4) Rasio kemantapan jalan provinsi; dan (5) Rasio tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah Provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli. Adapun hasil capaian untuk masing-masing indikator yang termasuk ke dalam urusan pemerintah di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sebagai berikut.

Pada indikator Rasio luas kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir memiliki realisasi sebesar 74.19% pada tahun 2024. Dari sisi tingkat ketercapaian teridentifikasi bahwa indikator kinerja kunci urusan pemerintah bidang pekerjaan umum dan penataan ruang ini masih berada pada situasi aman disebabkan tingkat capaian yang relatif tinggi mencapai 89.82% pada triwulan I tahun 2025 serta menempatkannya pada kategori akan tercapai. Hal yang sama terjadi pada indikator rasio kemantapan jalan provinsi yang memiliki realisasi yang lebih kecil dibandingkan dengan target RKPD, namun hal ini relatif masih aman mengingat situasi dimana capaian hingga triwulan I tahun 2025 termasuk ke dalam indikator akan tercapai disebabkan memiliki capaian sebesar 95.34% serta masih di atas tingkat capaian 25%.

Tabel 4.17 Capaian IKK Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Indikator Kinerja Kunci (IKK)	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Perangkat Daerah
3.1	Rasio luas kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir	%	82.6	74.19	89.82	Dinas PUPR&PERA
3.2	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS kewenangan Provinsi	%	77.06	77.35	100.38	Dinas PUPR&PERA
3.3	Rasio luas daerah irigasi kewenangan Provinsi yang dilayani oleh jaringan irigasi	%	62.97	64.44	102.33	Dinas PUPR&PERA
3.4	Rasio kemantapan jalan provinsi	%	86.23	82.21	95.34	Dinas PUPR&PERA
3.5	Rasio tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah Provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli	%	60.13	60.35	100.37	Dinas PUPR&PERA

Pada indikator “Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS kewenangan Provinsi” memiliki capaian sebesar 100.38%. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan penanaman mangrove dengan tujuan meminimalisir hantaman gelombang besar, sekaligus juga berpotensi dapat mempercepat akresi pantai karena akar-akar pohon bakau akan menahan sedimen/lumpur yang terbawa arus.

Mendukung kemandirian pangan, dilakukan pengembangan irigasi dengan indikator “Rasio luas daerah irigasi kewenangan Provinsi yang dilayani oleh jaringan irigasi”. Memiliki tingkat ketercapaian sebesar 102.33%. Nilai tersebut telah melebihi target RKPD yang ditetapkan hanya sebesar 62.97%. Untuk itu, target ini dapat ditingkat mengingat tujuan utama irigasi adalah memenuhi kebutuhan air tanaman, meningkatkan hasil panen, dan memperluas areal tanam untuk kebutuhan pokok. Begitu pula pada indikator “Rasio tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah Provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli” memiliki realisasi

60.35% tenaga kerja dengan target sebesar 60.13. Indikator kinerja kunci ini memiliki tingkat ketercapaian sebesar 104.70% yang mengindikasikan indikator tersebut termasuk ke dalam klasifikasi telah tercapai.

6.5.2.4 Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Sama halnya pembangunan infrastruktur yang diampuh oleh Dinas PUPR&PERA, pada indikator “Persentase Luas kawasan kumuh 10 – 15 Ha yang ditangani” untuk menunjang Perumahan Dan Kawasan Permukiman juga memiliki capaian sebesar 72.19%. Kondisi ini mengindikasikan bahwa indikator ini termasuk ke dalam klasifikasi akan tercapai.

Tabel 4.18 Capaian IKK Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

No	Indikator Kinerja Kunci (IKK)	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Perangkat Daerah
4.1	Persentase Luas kawasan kumuh 10 – 15 Ha yang ditangani	%	76.87	55.49	72.19	Dinas PUPR&PERA

Permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni yang ditandai dengan ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat. Data yang diperoleh, Kaltim menargetkan penanganan luas kawasan kumuh sebesar 76.87% dengan realisasi sebesar 55.49%. Faktor penghambat adalah luasan kawan kumuh yang cenderung bertambah setiap tahunnya; kesulitan relokasi masyarakat yang tinggal pada wilayah kumuh tersebut; dan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) untuk permukiman dan perumahan masih belum berjalan secara optimal.

6.5.2.5 Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

Gangguan Trantibum (Gangguan ketenteraman dan ketertiban umum) adalah semua kondisi yang disebabkan oleh perilaku tidak tertib yang mengakibatkan atau berpotensi mengakibatkan terganggunya kepentingan umum. Kewenangan ini merupakan tugas Satuan Polisi Pamong Praja

dimana memungkinkan Pemerintah Provinsi melaksanakan tugas dalam kondisi yang tenang, tertib dan teratur sesuai dengan kewenangannya dalam rangka penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur. Selanjutnya, untuk target penanganan bencana dilaksanakan oleh BPBD Kaltim.

Tabel 4.19 Capaian IKK Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

No	Indikator Kinerja Kunci (IKK)	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Perangkat Daerah
5.1	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	%	100.00	100	100.00	Satpol PP
5.2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	100.00	100	100.00	Satpol PP
5.3	Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal	%	100.00	100	100.00	BPBD
5.4	Persentase penanganan pra bencana	%	100.00	100	100.00	BPBD
5.5	Persentase penanganan tanggap darurat bencana	%	100.00	100	100.00	BPBD

Terdapat 5 indikator kinerja kunci (IKK) yang termasuk ke dalam urusan pemerintah Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat. Seluruh target indikator kinerja daerah pada Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat 100% ditargetkan dan telah di capain sesuai dengan target tersebut. Indikator yang ditetapkan adalah Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan; Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan; Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal; Persentase penanganan pra bencana; dan Persentase penanganan tanggap darurat bencana.

6.5.2.6 Urusan Pemerintahan Bidang Sosial

Pada urusan pemerintah bidang sosial terdapat 5 indikator kinerja kunci yang termasuk di dalamnya yaitu Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti; Persentase

Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya didalam panti; Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti; Persentase gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti; dan Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi. Dalam hal ini, kelima target IKK pada urusan pemerintah bidang sosial tersebut telah mencapai tingkat ketercapaian sebesar 100%.

Tabel 4.20 Capaian IKK Urusan Pemerintahan Bidang Sosial

No	Indikator Kinerja Kunci (IKK)	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Perangkat Daerah
6.1	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	%	100.00	100	100.00	Dinsos
6.2	Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya didalam panti	%	100.00	100	100.00	Dinsos
6.3	Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	%	100.00	100	100.00	Dinsos
6.4	Persentase gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	%	100.00	100	100.00	Dinsos
6.5	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi	%	100.00	100	100.00	Dinsos

Dari persektif klasifikasi maupun kategori, capaian kelima indikator kinerja kunci (IKK) tersebut meliputi Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya didalam panti; Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti; Persentase gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti; dan Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi secara bersamaan dan konsisten termasuk ke dalam kategori telah tercapai.

6.5.2.7 Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja

Pada urusan pemerintah bidang tenaga kerja terdapat 6 indikator kinerja kunci (IKK) dengan masing-masing indikator berturut-turut adalah Persentase kabupaten/kota yang menyusun rencana tenaga kerja; Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi; Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja; Persentase perusahaan yang menerapkan tata Kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan); Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi; Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundang-undangan bidang ketenagakerjaan. **Berdasarkan analisis teridentifikasi bahwa 5 dari 6 indikator urusan pemerintah bidang tenaga kerja berada pada klasifikasi tingkat ketercapaian lebih dari 100% (telah tercapai) pada triwulan I.** Secara lebih detail, analisis terhadap capaian IKK per indikator urusan pemerintah bidang kesehatan diuraikan sebagai berikut.

Tabel 4.21 Capaian IKK Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja

No	Indikator Kinerja Kunci (IKK)	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Perangkat Daerah
7.1	Persentase kabupaten/kota yang menyusun rencana tenaga kerja	%	90.00	80	88.89	Disnakertrans
7.2	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	%	50.00	94.75	189.50	Disnakertrans
7.3	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	%	7	288.81	4125.86	Disnakertrans
7.4	Persentase perusahaan yang menerapkan tata Kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	%	20.00	69.2	346.00	Disnakertrans
7.5	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja lintas daerah	%	27.6	47.82	173.26	Disnakertrans

No	Indikator Kinerja Kunci (IKK)	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Perangkat Daerah
	kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi					
7.6	Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundang-undangan bidang ketenagakerjaan	%	85	85.33	100.39	Disnakertrans

Pada indikator Persentase kabupaten/kota yang menyusun rencana tenaga kerja tingkat ketercapaian hingga triwulan I tahun 2025 sebesar 88.89%. Hal ini relatif lebih kecil dibandingkan dengan 5 indikator lainnya pada urusan pemerintah bidang tenaga kerja. **Meskipun demikian, apabila didekati dari tingkat capaian diprediksi indikator ini berpotensi akan tercapai hingga akhir tahun 2025 mengingat tingkat ketercapaiannya yang sudah relatif tinggi di triwulan I.** Sementara itu, untuk indikator tingkat produktivitas tenaga kerja memiliki tingkat ketercapaian hingga 4125.86%. Capaian ini juga menetapkannya sebagai indikator kinerja kunci tertinggi di Provinsi Kalimantan Timur.

6.5.2.8 Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

Kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan masalah serius yang memerlukan perhatian dan tindakan bersama. Terdapat 3 indikator pada IKK bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak. Pada indikator Persentase ARG pada belanja langsung APBD telah mencapai target serta menempatkannya pada kategori indikator kinerja kunci yang telah tercapai di triwulan I tahun 2025. Anggaran Responsif Gender (ARG) dalam pendekatan pengelolaan anggaran publik bertujuan untuk mengintegrasikan dimensi gender dalam proses perencanaan, alokasi, dan penggunaan anggaran, termasuk didalamnya alokasi belanja yang mencakup kepentingan semua golongan gender (khususnya perempuan). Begitupula pada indikator Rasio kekerasan terhadap anak per 10.000 anak yang telah mencapai target menjadi landasan menempatkannya ke dalam kategori sudah tercapai.

Berbeda dengan indikator lainnya, pada indikator Rasio kekerasan terhadap perempuan per 10.000 perempuan masih memiliki deviasi tingkat ketercapiannya sebesar -5.21 persen serta menetapkannya sebagai satu-satunya indikator kinerja kunci pada urusan pemerintah bidang pemberdayaan dan perlindungan anak yang harus dilakukan upaya keras sehingga diharapkan realisasi dapat mencapai target pada akhir tahun 2025. Adanya deviasi capaian pada indikator rasio kekerasan terhadap perempuan per 10.000 perempuan di Kalimantan Timur didukung dengan fakta dimana Berdasarkan data SIMFONI PPA, tercatat sebanyak 1002 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak terjadi di Kalimantan Timur yang paling banyak terjadi di Kota Samarinda dengan jumlah 245 kasus sepanjang tahun 2024. Sedangkan hingga Maret 2025 terdapat 224 kasus kekerasan dengan jumlah terbanyak ada di Kota Samarinda sebesar 50 kasus. Faktor penghambat capaian adalah implementasi layanan perlindungan dan pendampingan bagi perempuan dan anak korban kekerasan seksual belum berjalan optimal; ketertutupan informasi kasus dimana sebagian besar terjadi dalam ranah privat (rumah tangga); dan kondisi sosial-ekonomi yang menyebabkan konflik internal **Angka ini menunjukkan bahwa kekerasan masih menjadi tantangan pembangunan yang memerlukan perhatian dan penanganan lintas sektor secara terintegrasi.**²

Tabel 4.22 Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

No	Indikator Kinerja Kunci (IKK)	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Perangkat Daerah
8.1	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	%	15	28.67	191.13	DKPPPA
8.2	Rasio kekerasan terhadap anak per 10.000 anak	%	1.99	0.51	174.37	DKPPPA
8.3	Rasio kekerasan terhadap perempuan per 10.000 perempuan	%	23.23	47.67	-5.21	DKPPPA

Berdasarkan hasil analisa di atas, solusi terhadap persoalan kekerasan terhadap perempuan dan anak tidak bisa dilakukan secara parsial, tetapi

² <https://www.kemenpppa.go.id/page/view/NTgzNA==>

harus dibangun melalui pendekatan kolaboratif antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat sipil. Untuk menjawab berbagai tantangan terkait perempuan dan anak, pemerintah menginisiasi serta memfokuskan upaya pada tiga program prioritas, yaitu; Pengembangan Ruang Bersama Indonesia (RBI) sebagai penguatan pelaksanaan Desa/Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA/KRPPA) dan integrasi dengan program pembangunan desa lainnya; Perluasan Pemanfaatan Call Center SAPA 129 untuk memastikan layanan pengaduan kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat diakses lebih luas dan responsif; dan Pengembangan Satu Data Perempuan dan Anak Berbasis Desa.

6.5.2.9 Urusan Pemerintahan Bidang Pangan

Indikator pada bidang pangan diampuh oleh DPTPH Kaltim, dengan indikator Persentase Cadangan Pangan. Ditargetkan 88.83%, dengan realisasi 372.73%, sehingga memiliki capaian sangat tinggi. Cadangan pangan dimaksudkan untuk mengantisipasi kekurangan ketersediaan pangan, kelebihan ketersediaan pangan, gejolak harga pangan dan atau keadaan darurat. Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh pemerintah provinsi, dengan memperhatikan dinamika penduduk; ketergantungan beras; produksi pangan lokal. Faktor pendorong capaian adalah bertambahnya prosentase daerah tahan pangan di Kaltim; dan kolaborasi penyediaan benih, pupuk dan pestisida.

Tabel 4.23 Capaian IKK Urusan Pemerintahan Bidang Pangan

No	Indikator Kinerja Kunci (IKK)	Satuan	Target RPD	Realisasi 2024	Capaian (%)	Perangkat Daerah
9.1	Persentase Cadangan Pangan	%	92.07	372.73	404.83	DPTPH

6.5.2.10 Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup

Terdapat dua indikator idang lingkungan hidup yang diampuh oleh DLH Kaltim, yaitu Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi; dan Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin

lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi. Dengan hasil capaian sangat tinggi sebagai berikut.

Tabel 4.24 Capaian IKK Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup

No	Indikator Kinerja Kunci (IKK)	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Perangkat Daerah
10.1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi	%	80.19	76.64	95.57	DLH
10.2	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	%	98	96.91	98.89	DLH

IKLH merupakan indeks komposit untuk menilai kualitas lingkungan yang perhitungannya mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup. IKLH merupakan 232 indikator penting dalam mengukur kondisi kualitas lingkungan hidup berdasarkan aspek kualitas air, udara, tutupan lahan, dan kualitas air laut. Nilai tersebut berada dalam kondisi baik, namun perlu ditingkatkan lagi.

Berdasarkan hasil analisa di atas, teridentifikasi bahwa seluruh indikator kunci pada urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup berada pada kategori akan tercapai. Dalam hal ini, adapun masing-masing capaian untuk setiap indikator dari urusan pemerintahan pada bidang lingkungan hidup secara berturut-turut sebesar Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi (95.57%), dan Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi (98.89%) pada triwulan I tahun 2025. Tingginya tingkat ketercapaian ini mengindikasikan bahwa kedua indikator tersebut optimis dapat mencapai target hingga akhir tahun 2025.

6.5.2.11 Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil adalah urusan pemerintah yang berkolaborasi dengan daerah kabupaten/kota yang

bertugas mengurus segala administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, termasuk didalamnya pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat, seperti perekaman data kependudukan, pembuatan akta kelahiran, akta kematian, akta perkawinan, dan lain-lain. Sehingga dapat diperoleh informasi komposisi penduduk per wilayah. Terdapat dua indikator dengan hasil pengukuran sebagai berikut.

Tabel 4.25 Capaian IKK Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	Indikator Kinerja Kunci (IKK)	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Perangkat Daerah
11.1	Penyajian data kependudukan skala Provinsi dalam satu tahun	%	100.00	100	100.00	DKPPPA
11.2	Pemanfaatan data kependudukan	%	44.11	33.33	75.56	DKPPPA

Hasil analisis menunjukkan bahwa pada indikator “Penyajian data kependudukan skala Provinsi dalam satu tahun” telah mencapai target yang ditetapkan dengan tingkat ketercapaian sebesar 100% hingga triwulan I tahun 2025. Situasi ini menjadi landasan bahwa indikator kunci tersebut masuk ke dalam klasifikasi telah tercapai. Namun pada indikator “Pemanfaatan data kependudukan” teridentifikasi memiliki tingkat ketercapaian sebesar 75.56% atau termasuk ke dalam kategori akan tercapai. Dengan terwujudnya database kependudukan yang valid dapat dipergunakan sebagai data/bahan/masukan/dasar untuk pembangunan database kependudukan provinsi dan kabupaten/kota dalam mendukung tertib administrasi kependudukan, tertib administrasi pelayanan publik, pelaksanaan pemilu dan untuk pelaksanaan pemilu Kepala Daerah serta dalam jangka panjang digunakan sebagai data dasar dalam rangka kebijakan strategis wilayah berbasis demografi kependudukan.

6.5.2.12 Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

Bidang Pemberdayaan masyarakat desa adalah lingkup urusan pemerintah dengan upaya untuk meningkatkan kualitas hidup dan

kemandirian penduduk dan status desa di pedesaan. Terdapat dua indikator target kinerja pada bidang tersebut yaitu indikator kinerja kunci mengenai . Adapun hasil analisis atas tingkat ketercapaian masing-masing IKK sebagai berikut.

Tabel 4.26 Capaian IKK Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

No	Indikator Kinerja Kunci (IKK)	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Perangkat Daerah
12.1	Persentase pengentasan desa tertinggal	%	50.00	1	198.00	DPMPD
12.2	Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	%	8.50	68	800.00	DPMPD

Pada indikator “Persentase pengentasan desa tertinggal” teridentifikasi telah mencapai target dengan tingkat ketercapaian mencapai 198%. Desa Tertinggal atau yang disebut Desa Pra-Madya adalah Desa yang memiliki potensi sumberdaya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum dan/atau kurang mengelolanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa. Pada status desa berdasarkan indeks Desa Membangun (IDM) skor desa tertinggal adalah kurang dan sama dengan (\leq) 0,5989 dan lebih besar ($>$) dari 0,4907, atau berada pada level 4 dari 5 peringkat desa. Nilai realisasi di Kaltim telah mencapai 1% yang menjadi dasar bahwasanya telah terlaksananya upaya kolaborasi pemerintah dalam pembangunan fisik dan kualitas masyarakat desa.

Begitu pula pada capaian indikator “Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri” dengan tingkat ketercapaian mencapai 800% pada triwulan I tahun 2025. Desa Mandiri merupakan kesuksesan dari pembangunan desa, baik dari sisi fisik/infrastruktur desa dan meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya. Kategori desa mandiri, jika nilai IDM desa tersebut lebih besar dari 0,8155. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa target persentase peningkatan status desa mandiri masih potensial untuk ditingkatkan mengingat bahwa tingginya tingkat ketercapaian indikator kinerja kunci tersebut pada fase triwulan I.

6.5.2.13 Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana adalah urusan pemerintah untuk kordinasi dalam tugas perencanaan dan mengendalikan jumlah penduduk, yang diampuh oleh DKPPPA Kaltim. Dengan 3 indikator kinerja sebagai berikut.

Tabel 4.27 Capaian IKK Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

No	Indikator Kinerja Kunci (IKK)	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Perangkat Daerah
13.1	TFR (Angka Kelahiran Total)	%	2.02	2.18	107.92	DKPPPA
13.2	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (<i>Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR</i>)	%	68.01	54.92	80.75	DKPPPA
13.3	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (<i>unmet need</i>)	%	7.38	21.91	-96.88	DKPPPA

Indikator pertama adalah TFR. TFR adalah indikator demografi standar yang digunakan untuk memperkirakan jumlah rata-rata anak yang dimiliki oleh seorang perempuan selama masa suburnya di usia 15-49 tahun berdasarkan tren kelahiran. Sejalan dengan uraian di atas, hasil perhitungan kinerja indikator tersebut telah tercapai dengan tingkat ketercapaian sebesar 107.92% pada triwulan I tahun 2025.

Indikator “Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (*Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR*)” memiliki capaian 80.75% hingga triwulan I tahun 2025 atau dalam istilah lain termasuk ke dalam indikator akan tercapai hingga akhir tahun 2025. Indikator tersebut digunakan untuk melihat seberapa besar pemakaian kontrasepsi modern di suatu wilayah. Selanjutnya, pada indikator “Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (*unmet need*)” masih perlu optimalisasi kinerja, dengan capaian sangat rendah sebesar -90.88%. Unmet Need adalah kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi, merupakan persentase perempuan kawin 15-49 tahun (PUS) yang tidak ingin mempunyai anak lagi atau ingin menjarangkan kelahiran

berikutnya tetapi tidak menggunakan kontrasepsi apapun. Tingginya angka Unmet need adalah menjadi permasalahan penting dalam kependudukan yang masih perlu menjadi perhatian dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat atau keluarga dalam kebutuhan yang tidak terpenuhi oleh Wanita usia subur yang tidak menginginkan kehamilan atau menunda kelahiran untuk yang diinginkan. Kondisi ini dapat mempengaruhi pengendalian kependudukan. Sehingga optimalisasi Keluarga Berencana melalui pendampingan dan bimbingan kepada calon peserta KB untuk mendapatkan informasi yang diperlukan serta peningkatan akses dan kualitas pelayanan KB sangat mutlak diperlukan.

6.5.2.14 Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan

Pada bidang perhubungan terdapat satu indikator kinerja, yaitu “Rasio konektivitas provinsi”, dengan realisasi yang sama dengan target, sehingga capaian sebesar 100%. Rasio konektivitas provinsi merupakan angka dengan interval 0-1, dimana angka 1 menunjukkan konektivitas sempurna antar wilayah. Kaltim memiliki 237 angka sebesar 0.846 dengan kategori tinggi. Hal ini didukung oleh adanya terminal, pelabuhan, dan bandara udara yang tersebar pada kabupaten/kota di Kaltim. Konektivitas dibutuhkan untuk mendukung industri, perdagangan dan jasa antar kawasan dengan dukungan prasarana transportasi logistik kewilayahan yang saling terhubung.

Tabel 4.28 Capaian IKK Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan

No	Indikator Kinerja Kunci (IKK)	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Perangkat Daerah
14.1	Rasio konektivitas provinsi	Angka	0.864	0.846	100.00	Dishub

6.5.2.15 Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika

Pada bidang Komunikasi dan Informatika ditetapkan tiga indikator target yang sepenuhnya diampuh oleh Diskominfo Kaltim. Indikator tersebut adalah Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo; Persentase Layanan Publik yang Diselenggarakan Secara Online Dan Terintegrasi;

Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Provinsi. Seluruh target telah direalisasikan atau termasuk ke dalam indikator kinerja kunci (IKK) telah tercapai dengan tingkat ketercapaian $\geq 100\%$ hingga triwulan I tahun 2025.

Tabel 4.29 Capaian IKK Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika

No	Indikator Kinerja Kunci (IKK)	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Perangkat Daerah
15.1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	100.00	100	100.00	Diskominfo
15.2	Persentase Layanan Publik yang Diselenggarakan Secara Online Dan Terintegrasi	%	56.00	100	178.57	Diskominfo
15.3	Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Provinsi	%	64.00	84.33	131.77	Diskominfo

Pada target “Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo” dan “Persentase Layanan Publik yang Diselenggarakan Secara Online Dan Terintegrasi” teridentifikasi memiliki tingkat ketercapaian sebesar 100%. Kondisi ini menindikasikan diperlukan pembaruan target kinerja, yang mencakup sinkronisasi data antar perangkat daerah dan digitalisasi layanan publik. Selanjutnya, pada indikator “Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Provinsi” telah memiliki tingkat ketercapaian sebesar 131.77%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan kinerja pada bidang Komunikasi Dan Informatika sudah sangat baik.

6.5.2.16 Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah

Bidang Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah memiliki dua indikator kinerja yang dilaksanakan oleh Disperindakop Kaltim, yang berbasis pelaporan telah tercapai dengan kategori sangat tinggi. Dalam hal ini, adapun dua indikator kunci yang menjadi tanggungjawab Disperindakop yaitu meningkatnya koperasi yang berkualitas, dan meningkatnya usaha kecil yang menjadi wirausaha.

Tabel 4.30 Capaian IKK Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah

No	Indikator Kinerja Kunci (IKK)	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Perangkat Daerah
16.1	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	%	40	50	125.00	Disperindagkop
16.2	Meningkatnya Usaha Kecil yang menjadi wirausaha	%	75	100	133.33	Disperindagkop

Koperasi adalah perserikatan yang bertujuan memenuhi keperluan para anggotanya dengan cara menjual barang keperluan sehari-hari dengan harga murah (tidak bermaksud mencari untung). Siapapun bisa menjadi anggota koperasi dan keanggotaan koperasi ini sifatnya sukarela dan terbuka. Untuk indikator Meningkatkan Koperasi yang berkualitas telah mencapai target memiliki tingkat ketercapaian hingga triwulan I tahun 2025 mencapai 125% sehingga masuk ke dalam kategori telah tercapai. Begitupun dengan, indikator Meningkatkan Usaha Kecil yang menjadi wirausaha telah mencapai target pada triwulan I tahun 2025 dengan tingkat ketercapaian mencapai 133.33%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan kinerja pada bidang koperasi, usaha kecil dan menengah.

6.5.2.17 Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal

Terdapat penetapan yang pesimis terhadap Persentase peningkatan investasi di provinsi dimana sampai dengan tahun 2026, hanya ditargetkan terjadi peningkatan sebesar 1% terhadap jumlah investasi di Kaltim. Dengan

keberadaan IKN, membuka peluang tingginya nilai realisasi investasi yang masuk di Kaltim.

Tabel 4.31 Capaian IKK Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal

No	Indikator Kinerja Kunci (IKK)	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Perangkat Daerah
17.1	Persentase peningkatan investasi di provinsi	%	1	6.175	617.50	DPMPTSP

Investasi diartikan sebagai penanaman modal, baik untuk pembangunan, maupun produktifitas usaha. Investasi atau penanaman modal adalah suatu kegiatan menanamkan aset pada suatu bisnis atau usaha dengan harapan akan memberikan manfaat tersendiri di masa depan. Hasil analisis menunjukkan bahwa tingkat ketercapaian pada IKK ini telah tercapai dengan persentase tingkat ketercapaian mencapai 617.50% pada triwulan I tahun 2025.

6.5.2.18 Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga

Pada bidang Kepemudaan Dan Olahraga terdapat 3 indikator kinerja. indikator pada bidang tersebut adalah Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri; Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan; dan Peningkatan Prestasi Olahraga. Capaian pada bidang urusan Kepemudaan Dan Olahraga sebagai berikut.

Tabel 4.32 Capaian IKK Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga

No	Indikator Kinerja Kunci (IKK)	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Perangkat Daerah
18.1	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	%	1.31	0.37	28.24	Dispora
18.2	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	%	27.32	1.49	5.45	Dispora
18.3	Peningkatan Prestasi Olahraga	Medali	135	232	171.85	Dispora

Pada indikator “Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri” memiliki capaian sebesar 28.24% serta termasuk ke dalam indikator akan tercapai. Sementara itu, untuk tingkat indikator kinerja kunci Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan teridentifikasi masih rendah. Rendahnya partisipasi pemuda juga terlihat pada indikator “Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan” ditunjukkan dengan hasil analisis tingkat ketercapaian pada indikator kinerja tersebut sebesar 5.45% pada triwulan I tahun 2025. Partisipasi dari pemuda adalah bentuk dari demokrasi serta mencakup partisipasi dalam kelompok masyarakat dan pembangunan sosial politik sebagai wujud pengabdian masyarakat dan lingkungan. **Rendahnya nilai tersebut dapat menyebabkan tidak teregenerasinya kegiatan ekonomi kreatif, inovasi dan sosial pada wilayah Kaltim.** Namun pada indikator “Peningkatan Prestasi Olahraga” teridentifikasi memiliki tingkat ketercapaian relatif tinggi sebesar 171.85% pada triwulan I tahun 2025 atau termasuk ke dalam indikator kinerja kunci yang telah mencapai target.

6.5.2.19 Urusan Pemerintahan Bidang Statistik

Bidang statistik diampuh oleh Diskominfo Kaltim, yang merupakan bagian pemerintahan dengan penerapan ilmu yang memiliki peran penting dalam mengumpulkan, menganalisis, menginterpretasi, dan mengambil kesimpulan dari data. Pada bidang ini seluruh indikator yaitu menyusun perencanaan pembangunan daerah; dan Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi memiliki target 100 dan telah terealisasi secara menyeluruh pada perangkat daerah di Kaltim. Kondisi tersebut mengindikasikan diperlukan kebaruan/peningkatan target kerja, dimana data merupakan hal utama dalam menentukan target dan bahan evaluasi.

Tabel 4.33 Capaian IKK Urusan Pemerintahan Bidang Statistik

No	Indikator Kinerja Kunci (IKK)	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Perangkat Daerah
19.1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%	100	100	100.00	Diskominfo
19.2	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	%	100	100	100.00	Diskominfo

6.5.2.20 Urusan Pemerintahan Bidang Persandian

Diskominfo mengampuh bidang persandian yang merupakan bidang yang mengelola urusan persandian, tugas dan fungsinya adalah menjaga keamanan informasi milik pemerintah daerah. Hanya terdapat satu indikator, yaitu Tingkat keamanan informasi pemerintah, dengan capaian sangat tinggi pada triwulan I tahun 2025. Hasil analisis menunjukkan bahwa tingkat ketercapaian pada indikator kinerja kunci ini mencapai 103.92% dan termasuk pada indikator telah tercapai pada triwulan I tahun 2025.

Tabel 4.34 Capaian IKK Urusan Pemerintahan Bidang Persandian

No	Indikator Kinerja Kunci (IKK)	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Perangkat Daerah
20.1	Tingkat keamanan informasi pemerintah	%	64	66.51	103.92	Diskominfo

6.5.2.21 Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan

Bidang Kebudayaan diampuh oleh Disdikbud, dengan satu indikator yaitu Terlestarikannya Cagar Budaya. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya pasal 1, disebutkan Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan. Kaltim merupakan wilayah yang kaya akan warisan cagar

budaya, dari sejarah turunan. Capaian pada bidang urusan tersebut adalah sebagai berikut.

Tabel 4.35 Capaian IKK Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan

No	Indikator Kinerja Kunci (IKK)	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Perangkat Daerah
21.1	Terlestarikannya Cagar Budaya	%	63.50	77	121.26	Disdikbud

Berdasarkan hasil analisa di atas, teridentifikasi bahwa indikator kinerja kunci pada urusan pemerintah bidang kebudayaan yaitu terlestarikannya cagar budaya memiliki tingkat ketercapaian sebesar 121.26% pada triwulan I tahun 2025. Kondisi ini relatif tinggi serta menempatkannya pada kategori indikator yang sudah tercapai.

6.5.2.22 Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan

Bidang Perpustakaan berkaitan tugas pemerintah untuk peningkatan literasi masyarakat. Diukur dengan indikator Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat dan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat. Dimana kedua indikator tersebut telah melampaui target yang ditetapkan sehingga diperlukan penetapan target yang lebih optimis.

Tabel 4.36 Capaian IKK Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan

No	Indikator Kinerja Kunci (IKK)	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Perangkat Daerah
22.1	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Skor	47.00	69.53	147.94	DPKD
22.2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks	40.00	78.34	195.85	DPKD

Indikator kinerja pembangunan mengenai nilai kegemaran membaca masyarakat adalah tingkat perilaku atau kebiasaan masyarakat dalam memperoleh pengetahuan dan informasi dari berbagai bentuk media yang dapat dilakukan secara mandiri oleh pemerintah daerah dalam jangka waktu tertentu. Metodologi yang digunakan adalah metode survei dengan pengukuran dimensi utama adalah: Frekuensi membaca, Durasi membaca dan Jumlah buku yang dibaca. Kaltim merupakan wilayah di Indonesia

dengan tingkat kegemaran membaca diatas rata-rata. Hasil analisis kinerja juga teridentifikasi sudah tercapai dengan tingkat ketercapaian 147.94% pada triwulan I tahun 2025 serta termasuk ke dalam klasifikasi sudah tercapai. Begitupula pada indikator kinerja kunci Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat juga telah tercapai pada triwulan I tahun 2025 dengan tingkat ketercapaian mencapai 195.85%. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) adalah data tingkat pembangunan literasi 246 masyarakat yang diperoleh dari unsur-unsur pembangun literasi masyarakat (UPLM) yang bersumber dari data sekunder dan aspek masyarakat (AM) dalam upaya membina dan mengembangkan perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat guna meningkatkan literasi masyarakat yang dipublikasikan oleh BPS.

6.5.2.23 Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan

Bidang Kearsipan mencakup proses pengorganisasian, pemeliharaan, dan penyimpanan dokumen dan informasi dalam suatu sistem yang terstruktur. Tujuan utama dari kearsipan adalah untuk memastikan aksesibilitas, keamanan, dan keberlanjutan dokumen dan informasi yang disimpan. Terdapat 2 indikator pada bidang urusan tersebut, dengan hasil capaian sebagai berikut.

Tabel 4.37 Capaian IKK Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan

No	Indikator Kinerja Kunci (IKK)	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Perangkat Daerah
23.1	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	%	77.00	74.88	97.25	DPKD
23.2	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	%	4.50	6.55	145.56	DPKD

Pada indikator “Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan” memiliki tingkat ketercapaian tinggi mencapai 97.25% pada triwulan I tahun 2025. Kondisi ini mencerminkan bahwa indikator kunci tersebut berpotensi akan tercapai hingga tahun 2025. Sedangkan pada indikator Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat” telah mencapai target, namun diindikasikan memiliki penetapan target yang terlalu pesimis. Hal ini didukung dengan hasil kalkulasi dari nilai tingkat ketercapaian yang sudah mencapai 145.56% pada triwulan I tahun 2025.

6.5.2.24 Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan

Bidang Kelautan Dan Perikanan merupakan semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan dan potensi laut. Oleh sebab itu, bidang tersebut memiliki dua indikator yang menyoar hasil produksi baik perikanan tangkap maupun perikanan budidaya; dan perikaku pelaku usaha terhadap regulasi di Kaltim. Hasil capaian sebagai berikut.

Tabel 4.38 Capaian IKK Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan

No	Indikator Kinerja Kunci (IKK)	Satuan	Target RPD	Realisasi 2024	Capaian (%)	Perangkat Daerah
24.1	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) dari seluruh kabupaten/kota di wilayah provinsi (sumber data: <i>one data</i> KKP)	Ton	376,000	456,424.44	121.39	DKP
24.2	Persentase kepatuhan pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	%	100.00	105.72	105.72	DKP

Potensi sumber daya ikan di Provinsi Kaltim cukup besar terlihat dari produksi perikanan tangkap dan budidaya yang cenderung mengalami peningkatan pada setiap tahunnya. Masing-masing wilayah di Kaltim, juga memiliki keberagaman produksi perikanan. Misalkan kukar dan samarinda dengan perikanan tangkap udang; Bontang dengan hasil ikan teri; kukar dengan budidaya patin; PPU dengan budidaya rumput laut; Paser dengan budidaya ikan bandeng; dan hasil perikanan lainnya. Hal tersebut menyebabkan realisasi target pada indikator Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) dari seluruh kabupaten/kota di wilayah provinsi (sumber data: one data KKP) telah mencapai target, dimana tercatat tingkat ketercapaian mencapai 121.39% pada triwulan I tahun 2025. Sedangkan untuk capaian indikator Persentase kepatuhan pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku juga menunjukkan pola yang sama yaitu capaian telah tercapai pada triwulan I dengan nilai tingkat ketercapaian sebesar 105.72%.

6.5.2.25 Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata

Sektor pariwisata adalah sektor yang memiliki keterkaitan dengan sektor lainnya, misalnya pada industri, perdagangan, akomodasi, dan sektor lainnya. Terdapat empat indikator pada bidang pariwisata, yaitu Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan; Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke provinsi; Tingkat hunian akomodasi; dan Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku. Dengan hasil capaian sebagai berikut.

Tabel 4.39 Capaian IKK Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata

No	Indikator Kinerja Kunci (IKK)	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Perangkat Daerah
25.1	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	%	12.00	45.41	378.42	Dispar
25.2	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke provinsi	%	63.00	1.52	2.41	Dispar
25.3	Tingkat hunian akomodasi	%	1.68	41.43	2466.07	Dispar

No	Indikator Kinerja Kunci (IKK)	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Perangkat Daerah
25.4	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	%	0.84	1.12	133.33	Dispar

Pada indikator kinerja kunci Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan pada urusan pemerintah bidang pariwisata memiliki tingkat ketercapaian tinggi yaitu mencapai 378.42% pada triwulan I tahun 2025. Kondisi ini mengindikasikan bahwa indikator kinerja tersebut termasuk ke dalam klasifikasi telah tercapai. Sedangkan pada target “Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke provinsi” masih belum mencapai target, dimana tingkat ketercapaian mencapai 2.41% atau termasuk ke dalam klasifikasi indikator kinerja kunci yang masih butuh upaya keras hingga mencapai target. **Rendahnya tingkat ketercapaian indikator kinerja kunci ini disebabkan oleh oleh faktor penghambat yaitu promosi daya tarik wisata belum dilakukan secara masif; kurangnya amenities pada destinasi wisata; pengembangan daya tarik wisata masih belum optimal; Skema kemitraan untuk pelatihan vokasi/sertifikasi, pengembangan inovasi dan teknologi tepat guna (TTG), serta sistem pembiayaan dan inkubasi usaha pariwisata dan ekonomi kreatif belum optimal.**

6.5.2.26 Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian

Bidang Pertanian diartikan secara luas. Pertanian adalah suatu kegiatan manusia dalam memanfaatkan sumber daya hayati untuk dapat menghasilkan bahan pangan, sumber energi, bahan baku industri dan untuk mengelola lingkungannya. Kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang termasuk didalamnya sebagai budidaya tanaman atau bercocok tanam serta pembesaran hewan ternak. Sehingga menyasar target pada hasil/produksi tani dan ternak. Dengan capaian sebagai berikut.

Tabel 4.40 Capaian IKK Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian

No	Indikator Kinerja Kunci (IKK)	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Perangkat Daerah
26.1	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	Ton/Ha	3.69	3.7	100.27	DPTPH
26.2	Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular	%	-2.75	370.3	-13465.45	DPKH

Capaian pada bidang pertanian, terdapat indikator “Produktivitas pertanian per hektar per tahun” dengan capaian 100.27% atau termasuk ke dalam klasifikasi telah tercapai. Lahan produktif di Kaltim mencakup area perkebunan, pertanian tanaman pangan dan hortikultura, serta areal hutan. Pengembangan sektor pertanian telah menjadi bagian utama dari pembangunan provinsi sebagai upaya meningkatkan ketahanan pangan dan mendukung transformasi ekonomi. Hasil pertanian di Kaltim, didominasi oleh subsektor perkebunan; subsektor kehutanan; dan subsektor tanaman hultikultura.

Namun hasil capaian adalah pada indikator “Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular” sebesar -13514.60% atau dalam istilah lainnya perlu upaya keras untuk mencapai target yang ditetapkan. Rendahnya tingkat ketercapain ini salah satunya didasari dengan fakta dimana terdapatnya peningkatan kasus rabies pada tahun 2024. Sebaran wilayah dengan dampak terbesar adalah di Kota Balikpapan, Kota Samarinda, Kab. Kutai Kartanegara dan Kutai Timur.

6.5.2.27 Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan

Bidang kehutanan diampuh oleh Dinas Kehutanan Kaltim yang mencakup Kehutanan pengelolaan, pelestarian, dan pemanfaatan hutan. Pada bidang kehutanan dilekatkan tiga target, yaitu: Peningkatan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui Perhutanan Sosial; Persentase kerusakan hutan per tahun (deforestasi); dan Persentase Luas Lahan Kritis yang Direhabilitasi. Dengan hasil capaian sebagai berikut.

Tabel 4.41 Capaian IKK Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan

No	Indikator Kinerja Kunci (IKK)	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Perangkat Daerah
27.1	Peningkatan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui Perhutanan Sosial	%	75.75	163.64	216.03	Dishut
27.2	Persentase kerusakan hutan per tahun (deforestasi)	%	1.00	0.16	184.00	Dishut
27.3	Persentase Luas Lahan Kritis yang Direhabilitasi	%	93.07	108.84	116.94	Dishut

Seluruh indikator kinerja kunci pada bidang kehutanan telah mencapai melebihi target yang ditentukan. Hal ini didukung dengan tingkat ketercapaian yang mencapai lebih dari 100%. **Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa permasalahan dari kinerja kunci ini yaitu penetapan target indikator yang pesimis.** Situasi ini disebabkan tingkat ketercapaian sudah melebihi 100% sedangkan program tersebut baru berlangsung di triwulan I tahun 2025.

6.5.2.28 Urusan Pemerintahan Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral

Energi Dan Sumber Daya Mineral mencakup urusan pemerintah untuk pengelolaan sumber daya alam yang tidak bisa diperbaharui atau biasa disebut nonrenewable resources. Jumlah sumber daya tersebut terbatas, sehingga pemerintah berperan penting untuk pengelolaan sumber daya tersebut. Adapun hasil kalkulasi dari perhitungan tingkat ketercapaian indikator kinerja kunci pada urusan pemerintah bidang energi dan sumber daya mineral sebagai berikut. Pada bidang ini terdapat dua indikator kinerja yaitu: Persentase Usaha Tambang Sesuai Kewenangan Provinsi yang Tidak Melanggar Perda; dan Persentase Desa Yang Teraliri Listrik dengan tingkat ketercapaian kinerja mencapai 100% pada triwulan I tahun 2025. Hasil kalkulasi atau perhitungan tingkat ketercapaian kinerja kunci ini menempatkannya sebagai indikator yang telah tercapai.

Tabel 4.42 Capaian IKK Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

No	Indikator Kinerja Kunci (IKK)	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Perangkat Daerah
28.1	Persentase Usaha Tambang Sesuai Kewenangan Provinsi yang Tidak Melanggar Perda	%	100.00	100	100.00	DESDM
28.2	Persentase Desa Yang Teraliri Listrik	%	100.00	100	100.00	DESDM

6.5.2.29 Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan

Disperindagkop mengampuh bidang perdagangan dengan 7 indikator kinerja. Urusan pemerintah bidang perdagangan mencakup perdagangan yang dilakukan di dalam negeri maupun perdagangan internasional (luar negeri), termasuk didalamnya keberadaan komoditi, pengaduan konsumen dan stabilitas pasokan barang untuk memenuhi kebutuhan dalam lingkup Kaltim. Namun, beberapa capaian masih belum optimal dan termasuk ke dalam klasifikasi memerlukan upaya keras. Adapun hasil kalkulasi dan perhitungan tingkat ketercapaian setiap indikator pada urusan pemerintah bidang perindustrian sebagai berikut.

Tabel 4.43 Capaian IKK Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan

No	Indikator Kinerja Kunci (IKK)	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Perangkat Daerah
29.1	Pertumbuhan Nilai Ekspor Non Migas	%	55.77	-8.86	-15.89	Disperindagkop
29.2	Persentase penanganan pengaduan konsumen	%	100.00	85	85.00	Disperindagkop
29.3	Persentase komoditi potensial yang sesuai dengan ketentuan berlaku	%	74.00	73.21	98.93	Disperindagkop
29.4	Tertib Usaha	%	100.00	100	100.00	Disperindagkop
29.5	Persentase kinerja realisasi pupuk	%	90.00	75.2	83.56	Disperindagkop
29.6	Persentase Barang Beredar Yang Diawasi Yang Sesuai Dengan Ketentuan Perundang-Undangan	%	79.00	84	106.33	Disperindagkop
29.7	Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga	%	1.15	1.06	92.17	Disperindagkop

No	Indikator Kinerja Kunci (IKK)	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Perangkat Daerah
	barang kebutuhan pokok					

Berdasarkan hasil analisis perhitungan di atas, teridentifikasi pada indikator pertumbuhan nilai ekspor non migas di Provinsi Kalimantan Timur mencapai tingkat ketercapaian sebesar -15.89% pada triwulan I tahun 2025. Hasil kinerja ini tentunya relatif belum optimal dan termasuk ke dalam kategori memerlukan upaya keras untuk mencapai target. Indikator Pertumbuhan Nilai Ekspor Non Migas di Provinsi Kalimantan Timur pada Triwulan I Tahun 2025 belum mencapai target yang ditetapkan disebabkan oleh beberapa faktor strategis. **Penurunan permintaan global, terutama dari negara mitra utama seperti Tiongkok dan India yang mengalami perlambatan ekonomi, berdampak langsung pada turunnya volume ekspor. Selain itu, harga komoditas ekspor unggulan seperti kelapa sawit dan karet juga mengalami tren penurunan akibat kelebihan pasokan di pasar internasional.** Di sisi lain, kendala infrastruktur dan logistik, seperti terbatasnya kapasitas pelabuhan dan mahalnya biaya pengiriman, turut menurunkan daya saing produk ekspor daerah. Belum optimalnya hilirisasi industri juga menjadi hambatan, karena sebagian besar ekspor masih berupa bahan mentah atau setengah jadi yang memiliki nilai tambah rendah. Faktor lain yang turut memengaruhi adalah hambatan perdagangan internasional berupa regulasi non-tarif dan isu keberlanjutan lingkungan dari negara tujuan ekspor. Ketidakpastian geopolitik global serta fluktuasi nilai tukar rupiah semakin memperlemah kinerja ekspor pada periode ini.

6.5.2.30 Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian

Bidang Perindustrian memiliki 4 indikator yang menjadi urusan pemerintah provinsi yaitu Disperindakop. Indikator yang menjadi kinerja adalah Pertambahan Jumlah Industri Besar di Provinsi; Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP; Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha

Industri (IUI) Besar yang dikeluarkan oleh instansi terkait; dan Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini. Hasil pengukuran menunjukkan bawah masih terdapat satu indikator yang belum sesuai dengan target kinerja.

Berdasarkan perhitungan tingkat ketercapaian IKK urusan pemerintah bidang perindustrian di bawah, teridentifikasi bahwa dua indikator secara bersamaan yang terdiri dari Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Besar yang dikeluarkan oleh instansi terkait; dan Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini telah tercapai dengan masing-masing tingkat ketercapaian mencapai 392.16% dan 131,58% pada triwulan I tahun 2025.

Tabel 4.44 Capaian IKK Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian

No	Indikator Kinerja Kunci (IKK)	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Perangkat Daerah
30.1	Pertambahan Jumlah Industri Besar di Provinsi	%	16	13.14	82.13	Disperindagkop
30.2	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	%	118.00	116.72	98.92	Disperindagkop
30.3	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Besar yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	25.5	100	392.16	Disperindagkop
30.4	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	%	95	125	131.58	Disperindagkop

Sementara itu, dua indikator lainnya seperti Pertambahan Jumlah Industri Besar di Provinsi, dan Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP secara berturut-turut termasuk ke dalam kalsifikasi indikator akan tercapai dengan masing-masing tingkat ketercapaian mencapai 82.13% dan 98.92%. Pada indikator petambahan jumlah industri besar, menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kalimantan Timur, Distribusi perusahaan IBS di Kalimantan Timur

menunjukkan konsentrasi yang signifikan di beberapa wilayah. Kota Balikpapan mendominasi dengan 101 perusahaan atau sekitar 33,01% dari total IBS di provinsi ini. Posisi berikutnya ditempati oleh Kota Samarinda dengan 59 perusahaan (19,28%), diikuti oleh Kabupaten Kutai Kartanegara (40 perusahaan, 13,07%), Kutai Timur (34 perusahaan), Paser (22 perusahaan), dan Berau (17 perusahaan). Wilayah lainnya seperti Kutai Barat memiliki 12 perusahaan, Penajam Paser Utara dan Bontang masing-masing 10 perusahaan, sementara Mahakam Ulu hanya memiliki 1 perusahaan.

6.5.2.31 Perencanaan Dan Keuangan

Pada bidang Perencanaan Dan Keuangan terdapat 8 indikator kinerja daerah, yang diampuh oleh BPKAD dan Bapenda. Indikator pada bidang tersebut adalah Rasio Belanja Pegawai Di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan; Rasio PAD; Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures); Opini Laporan Keuangan; Budget execution: Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD; Revenue mobilization: Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD; Assets Management; dan Cash Management: Rasio Anggaran Sisa Terhadap Total Belanja Dalam APBD Tahun Sebelumnya.

Tabel 4.45 Capaian IKK Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan dan Keuangan

No	Indikator Kinerja Kunci (IKK)	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Perangkat Daerah
31.1	Rasio Belanja Pegawai Di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	%	9.67	5.09	52.64	BPKAD
31.2	Rasio PAD	%	53.14	46.48	87.47	Bapenda
31.3	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	%	64.93	15.36	23.66	BPKAD
31.4	Opini Laporan Keuangan	Opini	WTP	WTP	100.00	BPKAD
31.5	Budget execution: Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	%	100	1.02	1.02	BPKAD
31.6	Revenue mobilization: Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	%	100	4.39	4.39	BPKAD
31.7	Assets Management	Aspek	4	4	100.00	BPKAD

No	Indikator Kinerja Kunci (IKK)	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Perangkat Daerah
31.8	Cash Management: Rasio Anggaran Sisa Terhadap Total Belanja Dalam APBD Tahun Sebelumnya	%	15.51	5.73	36.94	BPKAD

Hasil perhitungan dan kalkulasi tingkat ketercapaian teridentifikasi bahwa 2 indikator seperti opini laporan keuangan dan asset management sudah tercapai, sedangkan untuk 3 indikator lainnya masuk pada klasifikasi akan tercapai. Adapaun ketiga indikator kinerja kunci tersebut secara berturut-turut adalah Rasio Belanja Pegawai Di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan; Rasio PAD; dan *Cash Management* atau Rasio Anggaran Sisa Terhadap Total Belanja Dalam APBD Tahun Sebelumnya dengan masing-masing tingkat ketercapaian mencapai 52.64%; 87,47% dan 36,94% pada triwulan I tahun 2025. Sedangkan sisanya seperti Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi *transfer expenditures*); Budget execution: Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD; dan Revenue mobilization: Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD secara bersamaan termasuk ke dalam klasifikasi indikator kinerja yang perlu upaya keras untuk dapat mencapai target. **Rendahnya tingkat ketercapaian pada *Budget execution*: Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD disebabkan oleh sejumlah faktor, antara lain keterlambatan dalam proses pengadaan barang dan jasa, serta lambatnya pelaksanaan program atau kegiatan oleh perangkat daerah, turut berkontribusi terhadap rendahnya serapan anggaran.**

6.5.2.32 Pengadaan

Pada dasarnya pengadaan barang/jasa pada lingkup pemerintahan diharapkan dapat memberikan pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya dan kontribusi dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri, peningkatan peran Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah serta pembangunan berkelanjutan dalam wilayah Kaltim. Terdapat 3 indikator pada bidang pengadaan yang diampuh oleh Biro PBJ Sekda Kaltim, yaitu Persentase Jumlah Pengadaan yang Dilakukan Dengan Metode

Kompetitif; Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan; dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah. Dengan hasil capaian sebagai berikut.

Tabel 4.46 Capaian IKK Urusan Pemerintahan Bidang Pengadaan

No	Indikator Kinerja Kunci (IKK)	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Perangkat Daerah
32.1	Persentase Jumlah Pengadaan yang Dilakukan Dengan Metode Kompetitif	%	3.8	43.49	1144.47	Biro PBJ
32.2	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	%	75	88.96	118.61	Biro PBJ
32.3	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah	%	35	21.63	61.80	Biro PBJ

Berdasarkan ketiga indikator kinerja kunci di atas teridentifikasi bahwa dua diantaranya sudah tercapai. Adapun kedua indikator yang tingkat ketercapaiannya termasuk ke dalam klasifikasi tercapai secara berturut-turut adalah Persentase Jumlah Pengadaan yang Dilakukan Dengan Metode Kompetitif (1144.47%); dan Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan (118.61%).

6.5.2.33 Kepegawaian

Bidang kepegawaian meliputi berbagai aspek seperti perencanaan SDM, manajemen kinerja, pendidikan SDM, produktifitas SDM dan jabatan ASN pada lingkup Pemprov Kaltim. Terdapat 3 indikator dengan tingkat capaian yang berbeda, sebagai berikut.

Tabel 4.47 Capaian IKK Urusan Pemerintahan Bidang Kepegawaian

No	Indikator Kinerja Kunci (IKK)	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Perangkat Daerah
33.1	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	90.00	65.94	73.27	BKD
33.2	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	87.00	27.63	31.76	BKD
33.3	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	87.00	84.89	97.57	BKD

Berdasarkan ketiga indikator kinerja kunci di atas teridentifikasi bahwa seluruhnya termasuk ke dalam klasifikasi akan tercapai. Pada indikator Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) memiliki tingkat ketercapaian sebesar 73.27% pada triwulan I tahun 2025. Sedangkan untuk indikator kinerja Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan); dan Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) masing-masing memiliki tingkat ketercapaian mencapai 31.76% dan 97.57%.

6.5.2.34 Transparansi Dan Partisipasi Publik

Transparansi Dan Partisipasi Publik didasarkan pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dimana terdapat dua indikator pada bidang tersebut dengan capaian sebagai berikut.

Tabel 4.48 Capaian IKK Urusan Pemerintahan Bidang Transparansi Dan Partisipasi Publik

No	Indikator Kinerja Kunci (IKK)	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Perangkat Daerah
34.1	Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level	3	3 (3,2)	106.67	Inspektorat

No	Indikator Kinerja Kunci (IKK)	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Perangkat Daerah
34.2	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern (APIP)	Level	3	3 (3,0)	100.00	Inspektorat

Tingkat Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah tingkatan atau struktur kematangan penyelenggaraan SPIP dengan karakteristik yang berbeda antara satu tingkat dengan tingkat lainnya. Kerangka maturitas SPIP terpola dalam enam tingkatan yaitu: belum ada, rintisan, berkembang, terdefinisi, terkelola dan terukur, optimum. Tingkatan dimaksud setara masing-masing dengan level 0, 1, 2, 3, 4 dan 5. Dengan capaian tersebut, direkomendasikan untuk peningkatan level. Berdasarkan uraian di atas, teridentifikasi bahwa tingkat ketercapaian pada indikator tersebut mencapai 106.67% pada triwulan I tahun 2025

Indikator Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern (APIP) diatur dalam Peraturan Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penilaian Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. Terdapat level 1-5, dimana Kaltim menduduki level 3 yaitu Level delivered dalam kapabilitas APIP menunjukkan bahwa APIP telah melaksanakan aktivitas pengawasan (assurance dan consulting) sesuai dengan standar dan praktik profesional. Dalam kondisi ini, hasil pengawasan APIP sudah berkualitas dan memberikan keyakinan memadai atas ketataan dan 3E, peringatan dini dan peningkatan efektivitas MR, serta perbaikan tata kelola bagi organisasi K/L/D. Berdasarkan uraian di atas, teridentifikasi bahwa tingkat ketercapaian pada indikator tersebut telah tercapai mencapai 100,00% pada triwulan I tahun 2025.

BAB V

FAKTOR PENDORONG DAN PENGHAMBAT

5.1 Faktor Pendorong

Hingga triwulan I tahun 2025, capaian kinerja dan realisasi anggaran RKPD Provinsi Kalimantan Timur dipengaruhi oleh sejumlah faktor teknis yang saling berkaitan antara satu dan lainnya. Dalam konteks faktor yang mendorong capaian tersebut diantaranya *pertama*, proses perencanaan dokumen RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 telah disusun dengan memperhatikan dokumen Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026. Hal ini membuat dokumen RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 benar-benar secara implementatif menjadi penjabaran pelaksanaan tahun kedua RPD Provinsi Kalimantan Timur, setidaknya hingga triwulan I pelaksanaannya.

Kedua, RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 telah direncanakan dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal daerah, urgensi pelaksanaan berbagai program, serta indikator kinerja yang realistis dan terukur. Hal ini pada akhirnya memberikan landasan yang cukup kuat bagi setiap perangkat daerah dalam implementasi berbagai program yang direncanakan dalam RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025, setidaknya hingga triwulan I.

Ketiga, kesiapan kelembagaan dan administratif turut mendorong dapat dilaksanakannya berbagai program sejak awal tahun. Hal ini karena penetapan APBD Tahun Anggaran 2025 yang dilakukan tepat waktu pada 30 Desember 2024 serta percepatan penyusunan dan pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) oleh masing-masing perangkat daerah.

Keempat, penggunaan sistem informasi perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi, seperti Evdoren dan SIPD memberi dukungan yang cukup dalam perwujudan transparansi, efisiensi, dan kemudahan dalam pemantauan serta pelaporan kinerja oleh setiap perangkat daerah.

5.2 Penghambat Capaian Kinerja

Meski pelaksanaan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 menunjukkan sejumlah capaian positif hingga triwulan I, namun terdapat berbagai persoalan teknis yang juga pada akhirnya menjadi faktor penghambat dari capaian kinerja dan realisasi anggaran. Beberapa faktor tersebut diantaranya

Pertama, dikeluarkannya kebijakan efisiensi belanja pada pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 oleh Presiden Republik Indonesia. Kebijakan tersebut didasarkan pada Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 yang kemudian ditindaklanjuti oleh Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/833/SJ tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja dalam APBD Tahun Anggaran 2025. Meski memuat semangat yang positif, tetapi kehadiran kebijakan efisiensi yang secara efektif diberlakukan pada tahun berjalan RKPD Tahun 2025 memberi pengaruh yang signifikan terhadap capaian kinerja program dan serapan anggaran. Hal ini karena kebijakan efisiensi membuat pemerintah daerah harus segera melakukan penyesuaian terhadap belanja operasional dan kegiatan yang harus segera dirasionalisasi melalui revisi terhadap DPA yang sebelumnya telah ditetapkan. Kondisi tersebut pada akhirnya membuat berbagai program yang seharusnya dilaksanakan pada triwulan I tahun 2025 menjadi tertunda dan berdampak pula pada realisasi anggaran yang menjadi tidak cukup maksimal hingga triwulan I tahun 2025.

Kedua, tidak adanya kejelasan kriteria paket pengadaan barang dan jasa mana saja yang harus diprioritaskan, ditunda, atau dikecualikan. Hal ini mengakibatkan ketidakpastian dikalangan perangkat daerah terkait dengan status dan kelanjutan paket-paket belanja barang dan jasa yang telah direncanakan yang pada akhirnya menghambat proses pelaksanaan dan serapan anggaran.

Ketiga, tidak tersedianya petunjuk tertulis yang jelas di level pemerintah daerah sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 jo Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900/833/SJ.

Berkenaan dengan hal tersebut, meski kebijakan efisiensi bersifat nasional dan wajib dilaksanakan, tanpa adanya pedoman operasional yang spesifik di tingkat pemerintah daerah cukup membuat perangkat daerah kesulitan dalam menginterpretasikan dan mengimplementasikan kebijakan tersebut secara seragam. Alhasil, terjadi perbedaan persepsi antar perangkat daerah mengenai ruang lingkup efisiensi, item belanja yang harus disesuaikan, serta prosedur administratif yang harus ditempuh. Faktor penghambat sebagaimana dijelaskan pada poin pertama juga merupakan akibat dari hal ini.

Keempat, terjadi keterlambatan dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa oleh sebagian perangkat daerah. Berkenaan dengan hal tersebut, meskipun terdapat perangkat daerah telah melakukan pengadaan dini, tetapi masih ditemukan sejumlah perangkat daerah yang belum menyelesaikan tahapan administrasi dan kontraktual kegiatan secara keseluruhan, khususnya pada program-program pembangunan yang berbasis fisik. Kondisi ini pada akhirnya berakibat pada terhambatnya pelaksanaan program dan kegiatan sehingga penyerapan anggaran pun menjadi tidak cukup optimal hingga triwulan 1 tahun 2025.

Kelima, waktu pelaksanaan sejumlah kegiatan mengalami penundaan karena harus menunggu kesiapan dari pihak kabupaten/kota, stakeholder terkait, atau penerima manfaat. Keterlambatan ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain belum tersusunnya dokumen pendukung dari kabupaten/kota, belum adanya kepastian lokasi atau data sasaran, serta belum siapnya komitmen kelembagaan dari para pihak yang terlibat. Dalam konteks kegiatan yang bersifat kolaboratif atau lintas wilayah, pelaksanaan tidak dapat dimulai sebelum seluruh pihak berada dalam posisi siap, baik secara administratif, teknis, maupun kelembagaan. Kondisi ini menyebabkan waktu pelaksanaan menjadi tidak sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan, berpotensi memengaruhi capaian output kegiatan, serta berdampak pada pergeseran realisasi fisik dan keuangan secara keseluruhan.

Keenam, persoalan diatas berkelindan dengan terjadinya perubahan dari e-katalog versi 5 ke versi 6 yang membawa dampak cukup signifikan terhadap

proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah daerah. Hal ini karena perubahan tersebut tidak hanya mencakup aspek teknis sistem, tetapi juga prosedur, struktur data, dan mekanisme transaksi dalam platform pengadaan.

Ketujuh, kesalahan dalam penempatan anggaran kas menjadi salah satu faktor penghambat realisasi keuangan di sejumlah perangkat daerah. Permasalahan ini umumnya terjadi akibat ketidaksesuaian antara rencana kebutuhan belanja dengan alokasi kas yang tercantum dalam dokumen rencana penarikan dana atau kalender kas daerah. Akibatnya, meskipun kegiatan telah direncanakan dan dokumen pelaksanaan anggaran telah tersedia, pencairan dana tidak dapat dilakukan karena ketersediaan kas belum dialokasikan pada waktu yang tepat. Dampaknya adalah tertundanya pelaksanaan kegiatan, keterlambatan pembayaran kepada pihak ketiga, dan terganggunya arus kas secara keseluruhan. Pada akhirnya kondisi ini berimplikasi pada rendahnya serapan anggaran dan tidak tercapainya target pelaksanaan program sesuai dengan jadwal.

Kedelapan, minimnya forum koordinasi rutin pada awal tahun, baik di tingkat internal perangkat daerah maupun antarperangkat daerah, menjadi salah satu faktor yang turut memengaruhi rendahnya capaian program hingga triwulan I tahun 2025. Ketiadaan forum tersebut menyebabkan terbatasnya komunikasi lintas sektor dalam menyamakan persepsi, menyusun langkah operasional, serta mengidentifikasi potensi hambatan pelaksanaan program sejak dini. Akibatnya, banyak perangkat daerah menjalankan kegiatan tanpa sinkronisasi yang memadai,

Kesembilan, persoalan klasik terkait dengan kapasitas sumber daya manusia juga masih terjadi hingga saat ini. Tidak semua perangkat daerah memiliki sumber daya manusia yang kompeten dalam bidang perencanaan, penganggaran dan pengadaan. Hal ini turut memperlambat proses administrasi dan teknis pelaksanaan berbagai program dan kegiatan di lapangan.

BAB VI

RUMUSAN PERMASALAHAN HASIL EVALUASI

6.1 Permasalahan Capaian Tujuan Pembangunan

Evaluasi terhadap pencapaian empat tujuan pembangunan sebagaimana ditetapkan dalam dokumen RKPD Provinsi Tahun 2025 telah dilakukan. Dari berbagai hasil yang dicapai, dapat disampaikan beberapa hal yang masih menjadi permasalahan atau setidaknya tantangan dalam pencapaian tujuan pembangunan tersebut. *Pertama*, dalam konteks pembangunan manusia masih ditemukan tantangan struktural yang cukup kompleks dan saling berkelindan. Ketimpangan pembangunan antar wilayah misalnya, hal tersebut mencerminkan belum meratanya akses terhadap pendidikan, kesehatan dan ekonomi yang pada akhirnya secara potensial dapat memperlebar kesenjangan sosial. Ketergantungan yang tinggi pada sektor ekstraktif juga cenderung menciptakan pola pembangunan yang tidak inklusif serta rentan terhadap fluktuasi pasar global. Tidak hanya itu, potensi degradasi sebagai akibat dari eksploitasi sumber daya alam yang tidak terkendali juga sangat mengancam keberlanjutan ekosistem dan kualitas hidup masyarakat kedepannya.

Kedua, dalam upaya mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas masih ditemukan sejumlah permasalahan mendasar yang perlu menjadi perhatian serius. Ketergantungan yang tinggi terhadap sektor pertambangan misalnya, hal ini mencerminkan struktur ekonomi yang belum cukup terdiversifikasi. Ketimpangan pembangunan antar wilayah juga menjadi salah satu hambatan besar karena aktivitas pertumbuhan ekonomi saat ini masih terkonsentrasi di wilayah tertentu dan belum mampu mendorong pemerataan kesejahteraan. Tidak hanya itu, belanja pemerintah daerah juga dapat dinilai belum sepenuhnya inklusif dan strategis.

Ketiga, dalam hal kualitas lingkungan hidup. Keberlanjutan capaian dari berbagai indikator kinerja yang saat ini telah dicapai sangat bergantung pada sejumlah faktor kunci. Diantaranya, penguatan kebijakan dan komitmen pemerintah daerah dalam pengelolaan lingkungan, peningkatan kapasitas

pengawasan dan penegakan hukum lingkungan, serta efektivitas pengendalian terhadap berbagai dampak negatif yang ditimbulkan sebagai akibat dari aktivitas pada sektor ekstraktif. Tanpa berbagai upaya tersebut, capaian kualitas lingkungan hidup potensial tidak dapat dipertahankan bahkan mengalami berbagai kemunduran yang pada akhirnya menghambat pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

Keempat, dalam konteks reformasi birokrasi masih ditemukan berbagai tantangan yang membuat transformasi tata kelola pemerintahan masih terbilang berjalan lambat. Resistensi terhadap perubahan budaya kerja misalnya, menunjukkan bahwa masih terdapat sebagian aparatur yang belum sepenuhnya dapat beradaptasi dengan prinsip-prinsip profesionalisme, akuntabilitas dan pelayanan publik yang berorientasi pada hasil. Selain itu, keterbatasan anggaran guna mendukung berbagai program reformasi birokrasi juga diyakini menjadi salah satu kendala dalam penerapan kebijakan secara optimal. Lebih lanjut, sistem pengawasan internal dan eksternal juga masih memerlukan penguatan sehingga mampu mendorong terwujudnya integritas, transparansi dan efektivitas dari pelaksanaan reformasi birokrasi di semua lini pemerintahan.

6.2 Permasalahan Capaian Sasaran Pembangunan

Selain evaluasi terhadap pencapaian empat tujuan pembangunan daerah, evaluasi terhadap sebelas sasaran pembangunan sebagaimana ditetapkan dalam dokumen RKPD Provinsi Tahun 2025 juga telah dilakukan. Seperti halnya capaian tujuan, masih ditemukan berbagai permasalahan atau setidaknya tantangan dalam pencapaian tujuan sasaran pembangunan tersebut, *pertama*, dalam upaya meningkatkan pemerataan taraf pendidikan masyarakat masih dijumpai sejumlah tantangan krusial yang menghambat pencapaian sasaran. Salah satunya adalah soal disparitas kualitas pendidikan diantar wilayah. Umumnya wilayah perkotaan memiliki akses yang lebih baik dalam hal fasilitas, sumber belajar maupun mutu layanan pendidikan dibandingkan daerah-daerah terpencil atau tertinggal. Selain itu, keterbatasan jumlah serta

distribusi tenaga pendidik yang belum merata juga masih menjadi persoalan dan turut memperlebar kesenjangan dalam akses dan kualitas pendidikan.

Kedua, dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masih terdapat tantangan signifikan yang perlu diatasi. Keterbatasan akses terhadap fasilitas dan layanan kesehatan di wilayah terpencil misalnya, menyebabkan terjadinya kesenjangan dalam pemenuhan hak atas layanan kesehatan yang berkualitas. Kondisi ini diperburuk oleh rendahnya tingkat literasi gizi di kalangan masyarakat yang pada akhirnya memberi dampak pada pola konsumsi tidak sehat dan meningkatkan resiko gangguan kesehatan, khususnya bagi kelompok rentan.

Ketiga, dalam upaya menurunkan tingkat pengangguran masih terdapat hambatan struktural yang signifikan, terutama terkait kesenjangan keterampilan (skill mismatch) antara pencari kerja dan kebutuhan riil dunia usaha dan industri. Masih dijumpai pula ketidaksesuaian antara output sistem pendidikan dan pelatihan dengan kompetensi yang dibutuhkan pasar kerja. Hal ini pada akhirnya menyebabkan rendahnya daya serap tenaga kerja.

Keempat, dalam upaya meningkatkan daya saing perempuan masih terdapat tantangan sosial dan struktural yang harus segera diatasi. Stereotip gender masih cukup mengakar dalam masyarakat acapkali membatasi peran perempuan dalam banyak sektor, baik pada ranah publik maupun urusan domestik. Tidak hanya itu, minimnya akses perempuan terhadap posisi-posisi strategis dalam kepemimpinan di pemerintahan, dunia usaha, hingga organisasi sosial juga cukup mencerminkan belum optimalnya representasi dan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan.

Kelima, dalam rangka mewujudkan diversifikasi ekonomi yang berkelanjutan, tantangan utama yang hingga kini masih dihadapi adalah tingginya ketergantungan Provinsi Kalimantan Timur terhadap sektor pertambangan. Kondisi ini menghambat pengembangan sektor-sektor produktif lainnya yang sebenarnya memiliki potensi besar untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan nilai tambah domestik.

Keenam, dalam upaya meningkatkan keberdayaan masyarakat miskin tantangan utama yang hingga kini dihadapi adalah ketimpangan dalam distribusi pendapatan serta terbatasnya akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan dan infrastruktur. Kondisi ini pada akhirnya memperlebar jurang sosial dan ekonomi antar kelompok masyarakat hingga menghambat terciptanya mobilitas sosial yang adil.

Ketujuh, dalam upaya meningkatkan kualitas dan ketersediaan infrastruktur. Salah satu isu utama yang mengemuka adalah soal belum optimalnya pemeliharaan infrastruktur secara berkelanjutan yang pada akhirnya memberi dampak pada penurunan fungsi dan umur layanan berbagai fasilitas publik. Tidak hanya itu, keterbatasan akses infrastruktur di wilayah-wilayah terpencil juga menghambat konektivitas, distribusi layanan dasar, serta pertumbuhan ekonomi lokal.

Kedelapan, dalam upaya menjaga kualitas air, air laut, udara dan lahan. Pencemaran yang ditimbulkan oleh aktivitas industri, termasuk sektor ekstraktif dan manufaktur menjadi tantangan yang mengancam keberlanjutan lingkungan hidup karena memberi tekanan yang cukup besar terhadap ekosistem. Tidak hanya itu, deforestasi yang terjadi sebagai akibat dari alih fungsi lahan juga turut memperburuk kondisi lingkungan dan mengganggu keseimbangan alam. Kondisi tersebut diperparah oleh lemahnya penegakan hukum dan pengawasan lingkungan yang pada akhirnya memperbesar risiko degradasi lingkungan secara sistemik.

Kesembilan, dalam upaya menurunkan GRK di sektor kehutanan dan penggunaan lahan. Indikasi aktivitas pembalakan liar (*illegal logging*) serta perubahan lahan yang tidak terkendali menjadi faktor signifikan yang membuat terjadinya peningkatan emisi GRK.

Kesepuluh, dalam rangka meningkatkan pemanfaatan EBT masih terdapat tantangan krusial yang perlu diatasi guna mendukung transisi menuju sistem energi yang berkelanjutan. Salah satunya adalah tingginya biaya investasi awal dalam pengembangan dan integrasi EBT ke dalam bauran energi. Tidak hanya itu, keterbatasan infrastruktur pendukung (jaringan transmisi, sistem

penyimpanan energi, dan teknologi konversi yang efisien) turut menghambat upaya akselerasi pemanfaatan EBT secara luas.

Kesebelas, dalam upaya mewujudkan birokrasi yang profesional, akuntabel dan berorientasi pada pelayanan publik yang prima serta didukung oleh ASN BerAKHLAK. Masih ditemui sejumlah tantangan strategis seperti sikap resisten oleh sebagian aparatur sipil negara terhadap perubahan dalam budaya organisasi. Hal ini mengindikasikan bahwa belum sepenuhnya semangat reformasi birokrasi dan transformasi digital terinternalisasikan dalam praktik kerja aparatus sehari-hari. Selain itu, kesenjangan digital juga masih terjadi di wilayah terpencil yang turut membatasi akses dan pemanfaatan teknologi informasi secara merata baik oleh aparatur maupun oleh masyarakat sebagai pengguna layanan.

BAB VII

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

7.1 Kesimpulan

Terhadap berbagai uraian evaluasi hasil RKPD Provinsi Kalimantan Timur triwulan I Tahun 2025 sebagaimana telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan:

1. Perkembangan indikator makro Provinsi Kalimantan Timur dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan perkembangan yang umumnya positif,
 - a) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menunjukkan peningkatan dalam lima tahun terakhir, dan telah berada dalam kategori "tinggi". Namun laju pertumbuhannya masih di bawah rata-rata nasional yang mengindikasikan masih perlunya percepatan pembangunan manusia yang lebih merata di seluruh daerah terutama daerah terpencil.
 - b) Angka Kemiskinan mengalami kecenderungan penurunan dalam lima tahun terakhir, yang mencerminkan adanya perbaikan kondisi sosial ekonomi di Kalimantan Timur. Namun masih terdapat tantangan struktural di daerah terpencil dan keterbatasan akses layanan dasar.
 - c) Angka Pengangguran menunjukkan kecenderungan penurunan dalam lima tahun terakhir. Namun, Kalimantan Timur masih dihadapkan pada ketimpangan distribusi kesempatan kerja dan kesenjangan keterampilan tenaga kerja yang belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan industri.
 - d) Pertumbuhan Ekonomi menunjukkan pemulihan yang kuat pasca pandemi, terutama didorong oleh pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Namun Kalimantan Timur masih rentan terhadap fluktuasi harga komoditas global dan belum sepenuhnya ditopang oleh sektor ekonomi yang beragam.
 - e) Ketimpangan Pendapatan menunjukkan kecenderungan penurunan dalam lima tahun terakhir, dan lebih rendah

dibandingkan rata-rata nasional. Namun, masih terdapat disparitas antar daerah dan masih adanya keterbatasan inklusivitas dalam struktur ekonomi di Kalimantan Timur, terutama di daerah yang bergantung pada sektor sumber daya alam yang ekstraktif.

- f) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita terus meningkat dalam lima tahun terakhir, dan menempatkan Kalimantan Timur sebagai provinsi dengan capaian tertinggi kedua secara nasional. Namun, pemerataan manfaat ekonomi antar kelompok dan daerah masih menjadi tantangan untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.
2. Pada RKPD ditetapkan keuangan Kaltim sebesar Rp21,000,000,000,000, sedangkan implementasi pada APBD menjadi 20,980,499,012,000, turunnya nilai tersebut disebabkan perbuahan pagu pada pendapatan yang bersumber dari penyesuaian dana transfer ke daerah yang merupakan kewenangan pemerintah pusat. Capaian pendapatan daerah Kaltim triwulan I sebesar 16.78% (dihitung dari target RKPD) atau sebesar Rp3,372,711,574,151, sedangkan realisasi belanja Kaltim sebesar 5.48% atau Rp1,148,050,536,344. Nilai tersebut relatif sangat kecil jika dibandingkan dengan capaian penerimaan daerah. Disamping itu, terdapat nilai SILPA dari 2024 sebesar Rp2,597,623,141,500. Kondisi tersebut menyebabkan diperlukan perubahan pada APBD 2025.
3. Kinerja Tujuan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2025 triwulan 1 telah berada pada kemajuan yang positif. Terdapat 3 indikator kinerja tujuan yang telah tercapai (Indeks Pembangunan Manusia, Persentase Penurunan Emisi dari Business As Usual (BAU), dan Indeks Reformasi Birokrasi), dan 4 indikator kinerja tujuan yang diproyeksi akan tercapai pada akhir tahun rencana (Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE), Tingkat Kemiskinan, Indeks Gini, dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup). Pencapaian ini menggambarkan efektivitas program pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam mewujudkan SDM berdaya saing, pertumbuhan ekonomi berkualitas, peningkatan kualitas lingkungan, dan reformasi birokrasi. Namun,

masih terdapat tantangan struktural seperti ketimpangan wilayah, dominasi sektor ekstraktif, dan hambatan dalam reformasi kelembagaan yang masih memerlukan perhatian serius untuk menjamin keberlanjutan capaian pembangunan ke depan.

4. Kinerja Sasaran Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2025 triwulan 1 menunjukkan kemajuan signifikan dalam beberapa sektor strategis. Dari keseluruhan indikator tersebut, sebanyak 7 indikator (31,82%) menunjukkan capaian dalam kategori tercapai sementara 15 indikator lainnya (68,18%) masuk dalam kategori akan tercapai. Pencapaian ini menunjukkan adanya efektivitas kebijakan sektoral dan intervensi pembangunan yang terarah. Namun, tantangan substansial masih dihadapi oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, terutama pada isu stunting, ketimpangan pendidikan dan akses infrastruktur, kesenjangan keterampilan tenaga kerja, dan kualitas lingkungan hidup.
5. Berbagai capaian hasil pelaksanaan RKPD Provinsi Kalimantan Timur triwulan I Tahun 2025 tidak terlepas dari berbagai dinamika yang mempengaruhi, baik itu yang sifatnya mendorong maupun yang sifatnya menghambat. Pada satu sisi, capaian hasil RKPD Provinsi Kalimantan Timur triwulan I Tahun 2025 didorong oleh sejumlah faktor penting seperti proses perencanaan yang telah disusun secara harmonis dengan RPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2025; perencanaan yang dilakukan dengan memperhatikan kemampuan fiskal, urgensi program serta indikator kinerja yang realistis; serta penetapan APBD dan penyusunan DPA yang dilakukan tepat waktu. Pada sisi yang lain, terdapat sejumlah kendala yang turut menjadi penghambat berbagai capaian kinerja dan realisasi anggaran RKPD Provinsi Kalimantan Timur hingga triwulan I Tahun 2025. Diantaranya, keterlambatan dalam proses pengadaan barang dan jasa; minimnya forum koordinasi rutin diawal tahun; keterbatasan kapasitas SDM; belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi; hingga kebijakan efisiensi belanja yang diberlakukan pada tahun

anggaran berjalan berdasarkan Instruksi Presiden dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri.

6. Meski sejumlah capaian telah diraih, masih dijumpai berbagai permasalahan struktural, sosial dan teknis yang menyelimuti pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Timur hingga triwulan I Tahun 2025. Dalam konteks capaian tujuan pembangunan, secara umum empat tujuan pembangunan menghadapi berbagai persoalan yang saling berkaitan seperti ketimpangan antar wilayah, ketergantungan pada asektor ekonomi ekstraktif, degradasi lingkungan dan lambatnya tranformasi birokrasi. Dalam koneksi capaian sebelas sasaran pembangunan juga menghadapi masalah atau setidaknya tantangan serupa. Diantaranya mencakup disparitas kualitas pendidikan, rendahnya literasi kesehatan, ketidaksesuaian kompetensi tenaga kerja dengan kebutuhan pasar, serta masih kuatnya stereotip gender. Di bidang ekonomi permasalahan didominasi pada sektor pertambangan, belum optimalnya diversifikasi dan terbatasnya akses terhadap layanan dasar serta infrastruktur di wilayah terpencil. Di sisi lingkungan hidup, pencemaran, deforestasi dan lemahnya penegakan hukum menjadi hambatan serius dalam menjaga keberlanjutan ekosistem. Lebih lanjut, pemanfaatan energi terbarukan dan penguatan birokrasi digital juga masih terkendala oleh keterbatasan investasi serta akses teknologi.

7.2 Rekomendasi

Berdasarkan evaluasi RKPD Provinsi Kalimantan Timur hingga triwulan I Tahun 2025, dapat disampaikan beberapa rekomendasi sebagai berikut:

1. Semangat kebijakan efisiensi keuangan perlu diwujudkan secara lebih baik dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan ke depan.
2. Perlu dipastikan bahwa proses perencanaan dan penetapan anggaran hasil rasionalisasi pasca kebijakan efisiensi dapat dilakukan tepat waktu.
3. Perlu dilakukan koreksi terhadap berbagai target kinerja dengan memperhatikan pagu RKPD Tahun 2025 yang telah dilakukan

rasionalisasi pasca kebijakan efisiensi agar target kinerja menjadi lebih terukur, relevan dan realistis untuk dicapai pada akhir tahun anggaran 2025.

4. Penetapan target secara triwulan diperlukan agar pelaksanaan program dan anggaran dapat diukur secara lebih jelas serta memudahkan proses pengendalian kinerja secara berkala.
5. Diperlukan penyusunan strategi yang terencana dan terukur untuk mendorong peningkatan realisasi anggaran pelaksanaan RKPD Tahun 2025 pada triwulan-triwulan selanjutnya. Strategi tersebut harus difokuskan pada percepatan pelaksanaan program dan kegiatan prioritas, penyelesaian hambatan administratif maupun teknis, serta penguatan koordinasi antar perangkat daerah guna memastikan efisiensi dan efektivitas penyerapan anggaran sesuai target kinerja yang telah ditetapkan.
6. Perlu disusun mekanisme evaluasi real-time dalam durasi waktu tertentu agar kebijakan efisiensi tidak menyebabkan stagnasi pelaksanaan program.
7. Perlu disusun strategi pelaksanaan program yang adaptif terhadap kebijakan efisiensi tanpa harus mengorbankan pencapaian tujuan dan sasaran strategis daerah.
8. Perlu dilakukan efisiensi operasional melalui digitalisasi dengan cara mengalihkan sebagian besar kegiatan yang bersifat rutin dan berulang (pelatihan, sosialisasi, monitoring, dst) ke platform digital untuk menekan biaya operasional.
9. Organisasi perangkat daerah perlu didorong untuk melakukan inovasi pelayanan publik berbiaya rendah tetapi tetap berdampak besar melalui pemanfaatan teknologi, kolaborasi dan pendekatan komunitas.
10. Perlu dialokasikan anggaran khusus untuk mendukung pengembangan dan pengelolaan basis data pembangunan yang komprehensif dan terintegrasi. Basis data tersebut memiliki peran strategis dalam memperkuat proses perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, serta pengambilan keputusan berbasis bukti (evidence-based policy). Dengan tersedianya data yang akurat, mutakhir, dan mudah diakses, maka

efektivitas dan akuntabilitas pembangunan daerah dapat lebih ditingkatkan.

11. Perlu dikedepankan inovasi pembiayaan dan kolaborasi multipihak untuk mendukung program prioritas yang berdampak efisiensi.
12. Tambahan penerimaan daerah seyogianya diarahkan secara prioritas untuk mendukung sektor-sektor strategis, khususnya pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Ketiga bidang tersebut merupakan fondasi utama dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, serta daya saing daerah. Alokasi yang proporsional dan tepat sasaran terhadap sektor-sektor tersebut diharapkan mampu memberikan dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat dan mendorong percepatan pembangunan daerah secara berkelanjutan.
13. Penyusunan Perubahan RKPD diarahkan untuk memperkuat pencapaian Asta Cita dan mendukung pelaksanaan program-program unggulan daerah. Perubahan ini dilakukan sebagai respons terhadap dinamika pembangunan dan kebutuhan aktual masyarakat, sekaligus sebagai upaya penyesuaian terhadap prioritas pembangunan yang strategis. Dengan demikian, Perubahan RKPD diharapkan mampu menjaga konsistensi arah pembangunan daerah, meningkatkan efektivitas pelaksanaan program, serta memastikan tercapainya target-target pembangunan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan jangka menengah daerah.
14. Perlu ditetapkan ukuran persentase minimal dan persentase maksimal terhadap capaian indikator kinerja sebagai dasar untuk menilai apakah suatu perencanaan dilakukan secara pesimis atau tidak. Hal ini dilakukan untuk mencegah miss interpretasi terhadap berbagai capaian kinerja perangkat daerah dengan capaian kinerja yang jauh melebihi dari angka 100%.

LAMPIRAN
LAMPIRAN REALISASI KINERJA DAN KEUANGAN SELURUH PROGRAM,
KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN RKPD TAHUN 2025 TRIWULAN I

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan (Rp)	Persen (%)
1.01.2.22.0.00.01.0000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan								
1.01.2.22.0.00.01.0000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan								
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	Indeks	91,50	24,00	26,23	1.849.622.574.075,00	316.472.822.150,00	17,11
		Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti	%	100,00	0,00	0			
1.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran yg ditetapkan tepat waktu	%	100,00	51,00	51	6.088.917.700,00	201.138.234,00	3,3
1.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	3,00	2,00	66,67	3.645.101.272,00	156.378.234,00	4,29
1.01.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	2,00	0,00	0	373.023.522,00	0,00	0
1.01.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	2,00	0,00	0	373.022.488,00	0,00	0
1.01.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	2,00	0,00	0	373.022.488,00	0,00	0
1.01.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	2,00	0,00	0	373.127.956,00	0,00	0
1.01.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	2,00	0,00	0	432.542.290,00	44.760.000,00	12,29
1.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	4,00	0,00	0	519.077.684,00	0,00	0
1.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu	%	100,00	6,67	6,67	1.575.007.147.518,00	245.335.998.214,00	15,58
1.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	6.520,00	0,00	100	1.513.474.675.701,00	244.914.698.214,00	17,21
1.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12,00	8,00	66,67	2.235.480.000,00	234.360.000,00	10,48
1.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	4,00	0,00	0	570.678.000,00	41.130.000,00	7,21
1.01.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	8,00	0,00	0	429.498.000,00	0,00	0
1.01.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	10,00	0,00	0	58.162.490,00	0,00	0
1.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	243,00	60,00	24,69	58.238.653.327,00	145.810.000,00	0,25
1.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah SDM Aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	%	100,00	16,46	16,46	1.451.158.344,00	267.935.000,00	18,46
1.01.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	20,00	0,00	5	500.082.900,00	27.075.000,00	5,6
1.01.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	243,00	0,00	67,49	951.075.444,00	240.860.000,00	27,31
1.01.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Pendapatan Daerah yang dikelola Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	%	100,00	0,00	0	1.213.452.202,00	0,00	0
1.01.01.1.04.0004	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	Dokumen	243,00	0,00	0	507.164.704,00	0,00	0
1.01.01.1.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan	12,00	0,00	0	706.287.498,00	0,00	0
1.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah SDM Aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	%	100,00	2,25	2,25	15.439.653.225,00	368.054.304,00	2,38
1.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	210,00	0,00	0	807.870.000,00	0,00	0
1.01.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	12,00	0,00	0	5.605.170.035,00	0,00	0
1.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	732,00	22,00	3,01	3.811.453.532,00	142.874.441,00	4,27
1.01.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	5.000,00	0,00	0	5.215.159.658,00	225.179.863,00	4,74

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan (Rp)	Persen (%)
1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pelaksanaan Penunjang Kinerja Pegawai	%	100,00	0,00	0	8.064.858.925,00	0,00	0
1.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12,00	0,00	8,33	2.474.537.140,00	0,00	0
1.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	8,00	0,00	0	458.597.335,00	0,00	0
1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12,00	0,00	0	2.084.400.000,00	0,00	0
1.01.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	500,00	0,00	0	3.047.324.450,00	0,00	0
1.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Data Aset	%	100,00	0,00	0	134.483.751.146,00	0,00	0
1.01.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	11,00	0,00	0	3.988.894.041,00	0,00	0
1.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	1,00	0,00	0	88.458.300,00	0,00	0
1.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	36,00	0,00	0	2.775.604.645,00	0,00	0
1.01.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	8,00	0,00	0	127.630.794.160,00	0,00	0
1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pelaksanaan penyediaan jasa penunjang	%	100,00	13,27	13,27	94.058.217.455,00	70.299.696.398,00	74,74
1.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	2,00	0,00	0	117.240.000,00	0,00	0
1.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12,00	1,00	8,33	6.912.878.650,00	1.036.121.638,00	14,99
1.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	8,00	0,00	0	592.471.454,00	0,00	0
1.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	13,00	0,00	0	86.435.627.351,00	69.263.574.760,00	38,58
1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	%	100,00	0,00	0	12.815.417.560,00	0,00	0
1.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	3,00	0,00	0	130.254.700,00	0,00	0
1.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	56,00	0,00	0	1.123.252.000,00	0,00	0
1.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	10,00	0,00	0	279.021.900,00	0,00	0
1.01.01.1.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Unit	1,00	0,00	0	83.500.000,00	0,00	0
1.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2,00	0,00	0	11.199.388.960,00	0,00	0
1.01.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase BLUD yang Ditingkatkan Pelayanannya Berbasis Industri	%	100,00	0,00	0	1.000.000.000,00	0,00	0
1.01.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	UnitKerja	14,00	0,00	0	1.000.000.000,00	0,00	0
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	%	69,05	0,00	0	1.732.802.791.102,00	83.000.000,00	0
		Persentase Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus	%	100,00	0,00	0			0
		Persentase Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	%	72,00	0,00	0			0
		Persentase Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	%	79,64	0,00	0			0
		Persentase Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	%	77,15	0,00	0			0
		Persentase Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	%	77,00	0,00	0			0
		Persentase Tingkat Penyerapan Lulusan SMK	%	91,00	0,00	0			0
		Persentase Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	%	83,44	0,00	0			0
1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	APM SMA/SMK	%	100,00	0,00	0	813.713.926.550,00	0,00	0
		Indeks Iklim Kebinekaan SMA	%	79,31	0,00	0			0
		APK SMA/SMK	%	100,00	0,00	0			0
		Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	%	82,00	0,00	0			0

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan (Rp)	Persen (%)
		Indeks Inklusivitas SMA	%	65,86	0,00	0			
		Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	%	73,00	0,00	0			
		Angka Kelulusan SMA	%	100,00	0,00	0			
		Indeks Iklim Keamanan SMA	%	84,44	0,00	0			
1.01.02.1.01.0001	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	Unit	3,00	0,00	0	56.191.716.672,00	0,00	0
1.01.02.1.01.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	Ruang	5,00	0,00	0	11.209.399.000,00	0,00	0
1.01.02.1.01.0010	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	Ruang	3,00	0,00	0	2.379.060.700,00	0,00	0
1.01.02.1.01.0013	Pembangunan Asrama Sekolah	Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun	Unit	1,00	0,00	0	21.433.052.000,00	0,00	0
1.01.02.1.01.0014	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Unit	37,00	0,00	0	63.979.241.074,00	0,00	0
1.01.02.1.01.0019	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	2,00	0,00	0	5.665.483.000,00	0,00	0
1.01.02.1.01.0020	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	2,00	0,00	0	2.535.013.000,00	0,00	0
1.01.02.1.01.0028	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	1,00	0,00	0	322.014.000,00	0,00	0
1.01.02.1.01.0036	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	Paket	4,00	0,00	0	42.108.501.130,00	0,00	0
1.01.02.1.01.0041	Pengadaan Alat Praktikum dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktikum dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Paket	8,00	0,00	0	26.160.913.614,00	0,00	0
1.01.02.1.01.0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Pesertadidik	20.000,00	0,00	0	238.677.673.759,00	0,00	0
1.01.02.1.01.0049	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	PesertaDidik	5.000,00	0,00	0	12.054.169.211,00	0,00	0
1.01.02.1.01.0050	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Orang	160,00	0,00	0	1.388.699.900,00	0,00	0
1.01.02.1.01.0051	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Orang	660,00	0,00	0	5.530.386.232,00	0,00	0
1.01.02.1.01.0052	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	SatuanPendidikan	145,00	0,00	0	952.894.968,00	0,00	0
1.01.02.1.01.0053	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	SatuanPendidikan	145,00	0,00	0	182.007.271.000,00	0,00	0
1.01.02.1.01.0054	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Orang	2.273,00	0,00	0	27.455.800.000,00	0,00	0
1.01.02.1.01.0060	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen	10,00	0,00	0	3.873.856.940,00	0,00	0
1.01.02.1.01.0061	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Dokumen	5,00	0,00	0	997.771.000,00	0,00	0
1.01.02.1.01.0063	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	Komunitas	22,00	0,00	0	2.483.399.030,00	0,00	0
1.01.02.1.01.0065	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	4,00	0,00	0	3.599.055.840,00	0,00	0
1.01.02.1.01.0067	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	Unit	2,00	0,00	0	1.588.962.600,00	0,00	0
1.01.02.1.01.0068	Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	Unit	8,00	0,00	0	5.361.131.500,00	0,00	0
1.01.02.1.01.0069	Rehabilitasi sedang/berat Asrama Sekolah	Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	Unit	1,00	0,00	0	100.000.000,00	0,00	0
1.01.02.1.01.0070	Pembangunan Ruang Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	Ruang	20,00	0,00	0	35.196.733.400,00	0,00	0
1.01.02.1.01.0071	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	2,00	0,00	0	207.973.000,00	0,00	0
1.01.02.1.01.0072	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Ruang	20,00	0,00	0	50.472.607.000,00	0,00	0
1.01.02.1.01.0073	Rehabilitasi sedang/berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Di Rehabilitasi sedang/berat	Unit	2,00	0,00	0	498.347.760,00	0,00	0
1.01.02.1.01.0075	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Orang	300,00	0,00	0	6.063.399.500,00	0,00	0

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan (Rp)	Persen (%)
1.01.02.1.01.0078	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Penyelenggarakan Proses Belajar	SatuanPendidikan	236,00	0,00	0	3.219.399.720,00	0,00	0
1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Rerata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	%	77,00	0,00	0	826.785.260.500,00	0,00	0
		Indeks Inklusivitas SMK	%	62,51	0,00	0			
		Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi	Orang	25.000,00	0,00	0			
		APK SMA/SMK	%	100,00	0,00	0			
		Rerata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	%	69,00	0,00	0			
		Angka Kelulusan SMK	%	100,00	0,00	0			
		APM SMA/SMK	%	100,00	0,00	0			
		Indeks Iklim Kebinekaan SMK	%	75,94	0,00	0			
		Indeks Iklim Keamanan SMK	%	82,60	0,00	0			
1.01.02.1.02.0001	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	Unit	2,00	0,00	0	83.295.870.000,00	0,00	0
1.01.02.1.02.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	Ruang	20,00	0,00	0	35.595.030.800,00	0,00	0
1.01.02.1.02.0004	Pembangunan Ruang Praktik Siswa	Jumlah Ruang Praktik Siswa yang Telah Dibangun	Ruang	13,00	0,00	0	27.803.727.400,00	0,00	0
1.01.02.1.02.0005	Pembangunan Ruang Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	Ruang	18,00	0,00	0	13.554.763.200,00	0,00	0
1.01.02.1.02.0006	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	Ruang	22,00	0,00	0	2.787.224.000,00	0,00	0
1.01.02.1.02.0007	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	Ruang	6,00	0,00	0	4.069.072.800,00	0,00	0
1.01.02.1.02.0009	Pembangunan Asrama Sekolah	Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun	Unit	4,00	0,00	0	20.497.250.000,00	0,00	0
1.01.02.1.02.0010	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Unit	47,00	0,00	0	162.359.788.190,00	0,00	0
1.01.02.1.02.0016	Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi	Ruang	21,00	0,00	0	22.461.342.640,00	0,00	0
1.01.02.1.02.0018	Rehabilitasi Ruang Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Direhabilitasi	Ruang	10,00	0,00	0	2.805.243.600,00	0,00	0
1.01.02.1.02.0028	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	Paket	30,00	0,00	0	21.259.570.720,00	0,00	0
1.01.02.1.02.0032	Pengadaan Sarana Mobilitas Sekolah	Jumlah Sarana Mobilitas Sekolah yang Tersedia	Unit	7,00	0,00	0	4.315.057.178,00	0,00	0
1.01.02.1.02.0033	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Paket	70,00	0,00	0	69.387.197.280,00	0,00	0
1.01.02.1.02.0037	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Pesertadidik	100,00	0,00	0	39.257.626.952,00	0,00	0
1.01.02.1.02.0041	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	PesertaDidik	1.000,00	0,00	0	6.800.906.036,00	0,00	0
1.01.02.1.02.0042	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Orang	240,00	0,00	0	1.688.059.836,00	0,00	0
1.01.02.1.02.0043	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Orang	807,00	0,00	0	5.688.641.800,00	0,00	0
1.01.02.1.02.0045	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	SatuanPendidikan	120,00	0,00	0	1.166.502.256,00	0,00	0
1.01.02.1.02.0046	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	SatuanPendidikan	87,00	0,00	0	120.158.689.500,00	0,00	0
1.01.02.1.02.0047	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Orang	2.172,00	0,00	0	26.285.800.000,00	0,00	0
1.01.02.1.02.0053	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen	1,00	0,00	0	1.390.159.730,00	0,00	0
1.01.02.1.02.0054	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Dokumen	1,00	0,00	0	1.016.808.223,00	0,00	0
1.01.02.1.02.0059	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	1,00	0,00	0	1.753.125.518,00	0,00	0
1.01.02.1.02.0060	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Peserta Didik	Jumlah peserta didik yang memiliki sertifikasi kompetensi	Orang	1.000,00	0,00	0	22.209.783.127,00	0,00	0
1.01.02.1.02.0062	Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	Unit	35,00	0,00	0	15.316.374.680,00	0,00	0
1.01.02.1.02.0063	Rehabilitasi Ruang Praktik Peserta Didik	Jumlah Ruang Praktik Peserta Didik yang Telah Direhabilitasi	Ruang	22,00	0,00	0	3.099.219.600,00	0,00	0
1.01.02.1.02.0064	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Ruang	84,00	0,00	0	77.289.153.400,00	0,00	0

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan (Rp)	Persen (%)
1.01.02.1.02.0069	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	Ruang	117,00	0,00	0	25.544.833.600,00	0,00	0
1.01.02.1.02.0072	Penyelenggaraan Proses Belajar Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	Satuan Pendidikan	217,00	0,00	0	7.928.438.434,00	0,00	0
1.01.02.1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Indeks Iklim Kebinekaan SDLB	%	78,21	0,00	0	92.303.604.052,00	83.000.000,00	0,09
		Indeks Iklim Kebinekaan SIMPLB	%	78,00	0,00	0			
		Rerata kompetensi Literasi SIMPLB berdasarkan Asesmen Nasional	%	83,00	0,00	0			
		Indeks Iklim Keamanan SMALB	%	81,29	0,00	0			
		Indeks Iklim Keamanan SMPLB	%	85,62	0,00	0			
		Indeks Iklim Kebinekaan SMALB	%	74,68	0,00	0			
		Rerata kompetensi Numerasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional	%	70,00	0,00	0			
		Indeks Inklusivitas SDLB	%	68,87	0,00	0			
		Indeks Inklusivitas SMPLB	%	73,03	0,00	0			
		Rerata kompetensi Literasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional	%	66,12	0,00	0			
		APK SLB	%	100,00	0,00	0			
		Rerata kompetensi Numerasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional	%	63,47	0,00	0			
		Indeks Iklim Keamanan SDLB	%	83,23	0,00	0			
		Rerata kompetensi Literasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional	%	77,00	0,00	0			
		Rerata kompetensi Numerasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional	%	86,00	0,00	0			
		Indeks Inklusivitas SMALB	%	75,00	0,00	0			
		Angka Kelulusan SLB	%	100,00	0,00	0			
1.01.02.1.03.0007	Pembangunan Asrama Sekolah	Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun	Unit	1,00	0,00	0	6.530.674.000,00	0,00	0
1.01.02.1.03.0008	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Unit	7,00	0,00	0	32.029.392.000,00	0,00	0
1.01.02.1.03.0010	Pembangunan Kantin Sekolah	Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun	Unit	0,00	0,00	0	1.700.000.000,00	0,00	0
1.01.02.1.03.0014	Pembangunan Ruang Bina Persepsi Bunyi dan Irama untuk Tunarungu (B)	Jumlah Ruang Bina Persepsi Bunyi dan Irama untuk Tunarungu (B) yang Telah Dibangun	Ruang	4,00	0,00	0	1.304.004.000,00	0,00	0
1.01.02.1.03.0015	Pembangunan Ruang Bina Diri untuk Tunagrahita (C)	Jumlah Ruang Bina Diri untuk Tunagrahita (C) yang Telah Dibangun	Ruang	4,00	0,00	0	1.304.004.000,00	0,00	0
1.01.02.1.03.0016	Pembangunan Ruang Bina Diri dan Bina Gerak untuk Tunadaksa (D) yang Telah Dibangun	Jumlah Ruang Bina Diri dan Bina Gerak untuk Tunadaksa (D) yang Telah Dibangun	Ruang	4,00	0,00	0	1.304.004.000,00	0,00	0
1.01.02.1.03.0017	Pembangunan Ruang Bina Pribadi dan Sosial untuk Tunalaras (E) yang Telah Dibangun	Jumlah Ruang Bina Pribadi dan Sosial untuk Tunalaras (E) yang Telah Dibangun	Ruang	5,00	0,00	0	1.630.005.000,00	0,00	0
1.01.02.1.03.0035	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	Paket	2,00	0,00	0	572.769.244,00	0,00	0
1.01.02.1.03.0040	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Paket	3,00	0,00	0	715.603.713,00	0,00	0
1.01.02.1.03.0044	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus	Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Peserta Didik	377,00	0,00	0	458.671.271,00	0,00	0
1.01.02.1.03.0048	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Peserta Didik	1.000,00	0,00	0	5.888.391.336,00	0,00	0
1.01.02.1.03.0049	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Khusus	Orang	200,00	0,00	0	1.739.698.760,00	0,00	0
1.01.02.1.03.0050	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Orang	200,00	0,00	0	1.012.085.460,00	0,00	0
1.01.02.1.03.0051	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Satuan Pendidikan	119,00	0,00	0	551.646.925,00	0,00	0
1.01.02.1.03.0052	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	11,00	0,00	0	8.000.000.000,00	0,00	0
1.01.02.1.03.0053	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	Orang	200,00	0,00	0	3.289.800.000,00	83.000.000,00	2,6
1.01.02.1.03.0056	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Orang	130,00	0,00	0	792.613.261,00	0,00	0
1.01.02.1.03.0057	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	Konten Digital	3,00	0,00	0	772.052.140,00	0,00	0

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan (Rp)	Persen (%)
1.01.02.1.03.0058	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	Orang	65,00	0,00	0	451.399.100,00	0,00	0
1.01.02.1.03.0060	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Dokumen	2,00	0,00	0	901.959.510,00	0,00	0
1.01.02.1.03.0065	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Peserta Didik	Jumlah peserta didik yang memiliki sertifikasi kompetensi	Orang	70,00	0,00	0	649.546.357,00	0,00	0
1.01.02.1.03.0066	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	1,00	0,00	0	572.387.380,00	0,00	0
1.01.02.1.03.0069	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Unit	4,00	0,00	0	6.106.103.362,00	0,00	0
1.01.02.1.03.0070	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Bertambah	Ruang	20,00	0,00	0	12.566.014.398,00	0,00	0
1.01.02.1.03.0071	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	Satuan Pendidikan	35,00	0,00	0	479.263.075,00	0,00	0
1.01.02.1.03.0073	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Orang	195,00	0,00	0	981.515.760,00	0,00	0
1.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	%	100,00	0,00	0	15.968.254.683,00	0,00	0
1.01.03.1.01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal Sekolah Menengah	%	95,00	0,00	0	10.096.374.483,00	0,00	0
1.01.03.1.01.0004	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah yang Meningkatkan Kompetensinya	Orang	22,00	0,00	0	1.595.047.885,00	0,00	0
1.01.03.1.01.0006	Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Menengah	Jumlah model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Menengah yang tersusun	Dokumen	1,00	0,00	0	6.919.027.990,00	0,00	0
1.01.03.1.01.0007	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah yang Tersusun	Dokumen	1,00	0,00	0	1.582.298.608,00	0,00	0
1.01.03.1.02	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus	Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal Sekolah Khusus	%	95,00	0,00	0	5.871.880.200,00	0,00	0
1.01.03.1.02.0002	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Khusus	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Tersusun	Dokumen	2,00	0,00	0	718.868.310,00	0,00	0
1.01.03.1.02.0003	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Tersedia	Buku	420,00	0,00	0	1.370.200.846,00	0,00	0
1.01.03.1.02.0004	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Meningkatkan Kompetensinya	Orang	240,00	0,00	0	959.188.980,00	0,00	0
1.01.03.1.02.0005	Pelaksanaan penilaian/penelaahan buku teks muatan lokal Pendidikan Khusus	Jumlah buku teks muatan lokal Pendidikan Khusus yang telah dinilai/ditelaah	Buku	12,00	0,00	0	1.144.373.931,00	0,00	0
1.01.03.1.02.0006	Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Khusus	Jumlah model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Khusus yang tersusun	Dokumen	4,00	0,00	0	1.305.748.133,00	0,00	0
1.01.03.1.02.0007	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus	Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Tersusun	Dokumen	1,00	0,00	0	373.500.000,00	0,00	0
1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase Tenaga Pendidik yang memiliki Ijazah diploma dan sarjana	%	100,00	0,00	0	16.359.087.608,00	0,00	0
1.01.04.1.01	Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi	Jumlah Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang Memiliki Ijazah Diploma dan Sarjana	%	100,00	0,00	0	16.359.087.608,00	0,00	0
1.01.04.1.01.0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Dokumen	12,00	0,00	0	7.782.750.225,00	0,00	0
1.01.04.1.01.0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Laporan	4,00	0,00	0	8.576.337.383,00	0,00	0
2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase Kebudayaan yang dikembangkan	%	89,00	0,00	0	7.530.410.149,00	171.000.000,00	2,27
2.22.02.1.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Pelaku Kebudayaan yang dibina dan difasilitasi	%	65,00	0,00	0	2.113.973.927,00	171.000.000,00	8,09
2.22.02.1.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilindungi, Dikembangkan dan Dimanfaatkan	Objek	50,00	48,00	96	2.113.973.927,00	171.000.000,00	8,09
2.22.02.1.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	Jumlah Pelestari yang diapresiasi	%	75,00	0,00	0	5.416.436.222,00	0,00	0
2.22.02.1.02.0003	Pemberian Penghargaan Kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai Dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan	Sertifikat	105,00	0,00	0	5.416.436.222,00	0,00	0
2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase Kesenian Tradisional yang dikembangkan	%	71,00	0,00	0	10.973.882.712,00	68.000.000,00	0,62
2.22.03.1.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah	Jumlah Pelaku Seni yang tersertifikasi	%	75,00	0,00	0	10.973.882.712,00	68.000.000,00	

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan (Rp)	Persen (%)
	Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesenian yang ditingkatkan Kapasitasnya	%	70,00	0,00	0			0,62
2.22.03.1.01.0001	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	Orang	400,00	0,00	0	2.069.808.032,00	0,00	0
2.22.03.1.01.0002	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mengikuti Proses Standardisasi	Sertifikat	100,00	0,00	0	1.039.936.780,00	0,00	0
2.22.03.1.01.0003	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Lembaga	10,00	0,00	0	7.864.137.900,00	68.000.000,00	0,86
2.22.04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Persentase Lembaga Sejarah yang Dibina	%	78,50	0,00	0	815.945.684,00	481.628.000,00	59,03
2.22.04.1.01	Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi	Jumlah Data dan Informasi Sejarah yang diakses masyarakat	%	80,00	0,00	0	815.945.684,00	481.628.000,00	59,03
2.22.04.1.01.0003	Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang dapat diakses Masyarakat	Dokumen	100,00	0,00	14	815.945.684,00	481.628.000,00	59,03
2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Jumlah pelestarian Objek Pemajuan Kebudayaan	OPK	37,00	0,00	0	7.147.280.972,00	0,00	0
		Persentase Cagar Budaya yang dikelola dan Dilestarikan	%	63,50	0,00	0			0
2.22.05.1.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	Jumlah Objek Benda dan Tak Benda yang ditetapkan	%	75,00	0,00	0	5.547.307.485,00	0,00	0
2.22.05.1.01.0002	Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	Objek	5,00	0,00	0	5.547.307.485,00	0,00	0
2.22.05.1.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	Jumlah Cagar Budaya yang dimanfaatkan	%	60,00	0,00	0	1.599.973.487,00	0,00	0
2.22.05.1.02.0003	Pemanfaatan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan	Objek	40,00	0,00	0	800.000.000,00	0,00	0
2.22.05.1.02.0004	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Pelestari Cagar Budaya	Jumlah Tenaga Pelestari Cagar Budaya yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya	Orang	140,00	0,00	0	799.973.487,00	0,00	0
2.22.06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Persentase Pengelolaan Permuseuman	%	66,00	0,00	0	2.502.715.820,00	0,00	0
2.22.06.1.01	Pengelolaan Museum Provinsi	Jumlah Museum yang difasilitasi	%	50,00	0,00	0	2.502.715.820,00	0,00	0
2.22.06.1.01.0003	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	Unit	1,00	0,00	0	2.502.715.820,00	0,00	0
1.01.2.22.0.00.01.0002	UPTD Taman Budaya								
2.22.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti	%	100,00	0,00	0	7.780.306.896,00	661.089.000,00	8,5
		Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	Indeks	91,50	24,00	26,23			
2.22.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu	%	100,00	21,99	21,99	192.600.000,00	42.360.000,00	21,99
2.22.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12,00	0,00	0	192.600.000,00	42.360.000,00	21,99
2.22.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pelaksanaan Penunjang Kinerja Pegawai	%	100,00	0,56	0,56	1.613.871.416,00	26.370.000,00	1,63
2.22.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1,00	0,00	0	53.334.576,00	0,00	0
2.22.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	3,00	0,00	0	63.302.140,00	0,00	0
2.22.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1,00	0,00	0	11.874.700,00	0,00	0
2.22.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12,00	0,00	0	1.485.360.000,00	26.370.000,00	2,25
2.22.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	Jumlah Laporan Data Aset	%	100,00	0,00	0	2.479.726.680,00	0,00	0
	Urusan Pemerintah Daerah								
2.22.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	20,00	0,00	0	154.049.880,00	0,00	0
2.22.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1,00	0,00	0	2.325.676.800,00	0,00	0
2.22.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	Pelaksanaan penyediaan jasa penunjang	%	100,00	9,99	9,99	2.671.763.800,00	592.359.000,00	22,17
	Pemerintahan Daerah								
2.22.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12,00	0,00	0	8.498.600,00	0,00	0
2.22.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12,00	0,00	0	291.705.200,00	0,00	0
2.22.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12,00	0,00	0	2.371.560.000,00	592.359.000,00	24,98
2.22.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	%	100,00	0,00	0	822.345.000,00	0,00	0

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan (Rp)	Persen (%)
2.22.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	10,00	0,00	0	253.850.000,00	0,00	0
2.22.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	20,00	0,00	0	78.535.000,00	0,00	0
2.22.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1,00	0,00	0	489.960.000,00	0,00	0
2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase Kebudayaan yang dikembangkan	%	89,00	0,00	0	3.560.022.080,00	105.815.800,00	2,97
2.22.02.1.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Pelaku Kebudayaan yang dibina dan difasilitasi	%	65,00	0,00	0	2.000.000.000,00	0,00	0
2.22.02.1.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilindungi, Dikembangkan dan Dimanfaatkan	Objek	8,00	0,00	0	2.000.000.000,00	0,00	0
2.22.02.1.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	Jumlah Pelestari yang diapresiasi	%	75,00	0,00	0	1.560.022.080,00	105.815.800,00	6,78
2.22.02.1.02.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	Objek	12,00	0,00	0	1.560.022.080,00	105.815.800,00	7,41
2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase Kesenian Tradisional yang dikembangkan	%	71,00	0,00	0	680.528.650,00	50.200.000,00	7,38
2.22.03.1.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Seni yang tersertifikasi	%	75,00	0,00	0	680.528.650,00	50.200.000,00	7,38
2.22.03.1.01.0001	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	Orang	360,00	0,00	0	680.528.650,00	50.200.000,00	7,38
1.01.2.22.0.00.01.0003	UPTD Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan								
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	Indeks	91,50	24,00	26,23	35.855.031.394,00	469.870.281,00	1,31
		Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti	%	100,00	0,00	0			
1.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu	%	100,00	18,54	18,54	185.640.000,00	34.410.000,00	18,54
1.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12,00	3,00	25	185.640.000,00	34.410.000,00	18,54
1.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah SDM Aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	%	100,00	0,00	0	50.316.000,00	0,00	0
1.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	2,00	0,00	0	50.316.000,00	0,00	0
1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pelaksanaan Penunjang Kinerja Pegawai	%	100,00	1,60	1,6	2.310.330.139,00	53.595.000,00	2,32
1.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	2,00	0,00	0	15.887.116,00	0,00	0
1.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	9,00	1,00	11,11	466.376.473,00	19.625.000,00	4,21
1.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1,00	0,00	0	65.812.550,00	0,00	0
1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12,00	3,00	25	1.762.254.000,00	33.970.000,00	1,93
1.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Data Aset	%	100,00	0,00	0	118.142.955,00	0,00	0
1.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	10,00	0,00	0	118.142.955,00	0,00	0
1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pelaksanaan penyediaan jasa penunjang	%	100,00	9,91	9,91	32.986.755.300,00	381.865.281,00	1,16
1.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12,00	3,00	25	14.051.200,00	0,00	0
1.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12,00	3,00	25	31.592.734.100,00	41.875.281,00	0,13
1.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12,00	3,00	25	1.379.970.000,00	339.990.000,00	24,64
1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	%	100,00	0,00	0	203.847.000,00	0,00	0
1.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	9,00	3,00	33,33	56.862.000,00	0,00	0
1.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	44,00	0,00	0	31.785.000,00	0,00	0

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan (Rp)	Persen (%)
1.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1,00	0,00	0	115.200.000,00	0,00	0
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	%	79,64	0,00	0	24.702.343.640,00	0,00	0
		Persentase Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	%	77,15	0,00	0			
		Persentase Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	%	77,00	0,00	0			
		Persentase Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	%	72,00	0,00	0			
		Persentase Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus	%	100,00	0,00	0			
		Persentase Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	%	83,44	0,00	0			
		Persentase Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	%	69,05	0,00	0			
1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Persentase Tingkat Penyerapan Lulusan SMK	%	91,00	0,00	0	13.540.805.974,00	0,00	0
		APK SMA/SMK	%	100,00	0,00	0			
		Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	%	73,00	0,00	0			
		Indeks Inklusivitas SMA	%	65,86	0,00	0			
		Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	%	82,00	0,00	0			
		Indeks Iklim Kebinekaan SMA	%	79,31	0,00	0			
		Angka Kelulusan SMA	%	100,00	0,00	0			
		APM SMA/SMK	%	100,00	0,00	0			
Indeks Iklim Keamanan SMA	%	84,44	0,00	0					
1.01.02.1.01.0041	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Paket	2,00	0,00	0	10.173.666.824,00	0,00	0
1.01.02.1.01.0049	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	PesertaDidik	576,00	0,00	0	1.214.263.030,00	0,00	0
1.01.02.1.01.0057	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Orang	200,00	0,00	0	1.199.358.120,00	0,00	0
1.01.02.1.01.0058	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	KontenDigital	40,00	0,00	0	208.480.000,00	0,00	0
1.01.02.1.01.0059	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	Orang	120,00	0,00	0	745.038.000,00	0,00	0
1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	APK SMA/SMK	%	100,00	0,00	0	9.518.936.032,00	0,00	0
		Indeks Iklim Keamanan SMK	%	82,60	0,00	0			
		Indeks Inklusivitas SMK	%	62,51	0,00	0			
		Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi	Orang	25.000,00	0,00	0			
		Rerata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	%	69,00	0,00	0			
		Indeks Iklim Kebinekaan SMK	%	75,94	0,00	0			
		APM SMA/SMK	%	100,00	0,00	0			
		Angka Kelulusan SMK	%	100,00	0,00	0			
		Rerata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	%	77,00	0,00	0			
1.01.02.1.02.0033	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Paket	2,00	0,00	0	6.508.065.878,00	0,00	0
1.01.02.1.02.0041	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	PesertaDidik	348,00	0,00	0	857.994.034,00	0,00	0
1.01.02.1.02.0050	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Orang	200,00	0,00	0	1.199.358.120,00	0,00	0
1.01.02.1.02.0051	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	KontenDigital	40,00	0,00	0	208.480.000,00	0,00	0
1.01.02.1.02.0052	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	Orang	120,00	0,00	0	745.038.000,00	0,00	0
1.01.02.1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Indeks Inklusivitas SMALB	%	75,00	0,00	0	1.642.601.634,00	0,00	0
		APK SLB	%	100,00	0,00	0			
		Indeks Iklim Kebinekaan SMPLB	%	78,00	0,00	0			
		Angka Kelulusan SLB	%	100,00	0,00	0			
		Indeks Iklim Kebinekaan SDLB	%	78,21	0,00	0			

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan (Rp)	Persen (%)
		Indeks Iklim Keamanan SDLB	%	83,23	0,00	0			0
		Indeks Inklusivitas SDLB	%	68,87	0,00	0			0
		Indeks Iklim Kebinekaan SMALB	%	74,68	0,00	0			0
		Rerata kompetensi Numerasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional.	%	63,47	0,00	0			0
		Rerata kompetensi Literasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional	%	83,00	0,00	0			0
		Rerata kompetensi Numerasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional	%	70,00	0,00	0			0
		Indeks Inklusivitas SMPLB	%	73,03	0,00	0			0
		Rerata kompetensi Numerasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional.	%	86,00	0,00	0			0
		Indeks Iklim Keamanan SMPLB	%	85,62	0,00	0			0
		Rerata kompetensi Literasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional	%	66,12	0,00	0			0
		Indeks Iklim Keamanan SMALB	%	81,29	0,00	0			0
		Rerata kompetensi Literasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional.	%	77,00	0,00	0			0
1.01.02.1.03.0040	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Paket	2,00	0,00	0	835.703.514,00	0,00	0
1.01.02.1.03.0056	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Orang	66,00	0,00	0	494.158.120,00	0,00	0
1.01.02.1.03.0057	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	KontenDigital	11,00	0,00	0	61.340.000,00	0,00	0
1.01.02.1.03.0058	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	Orang	33,00	0,00	0	251.400.000,00	0,00	0
1.01.2.22.0.00.01.0004	UPTD Museum Negeri Mulawarman								
2.22.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti	%	100,00	0,00	0	5.867.846.698,00	865.406.835,00	14,75
		Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	Indeks	91,50	24,00	26,23			
2.22.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu	%	100,00	25,00	25	138.120.000,00	34.530.000,00	25
2.22.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12,00	3,00	25	138.120.000,00	34.530.000,00	25
2.22.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah SDM Aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	%	100,00	0,00	0	22.260.458,00	0,00	0
2.22.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1,00	0,00	0	22.260.458,00	0,00	0
2.22.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pelaksanaan Penunjang Kinerja Pegawai	%	100,00	2,82	2,82	1.337.601.762,00	85.723.830,00	6,41
2.22.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1,00	0,00	0	64.727.159,00	0,00	0
2.22.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	3,00	0,00	0	258.814.603,00	0,00	0
2.22.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1,00	0,00	0	14.652.000,00	0,00	0
2.22.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12,00	0,00	0	999.408.000,00	85.723.830,00	11,62
2.22.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Data Aset	%	100,00	0,00	0	200.000.000,00	0,00	0
2.22.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1,00	0,00	0	200.000.000,00	0,00	0
2.22.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pelaksanaan penyediaan jasa penunjang	%	100,00	35,92	35,92	3.074.704.478,00	714.128.005,00	23,23
2.22.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1,00	1,00	100	81.550.000,00	81.550.000,00	100
2.22.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12,00	2,40	20	816.564.000,00	163.018.005,00	19,96
2.22.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	12,00	0,00	0	194.970.970,00	0,00	0

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan (Rp)	Persen (%)
2.22.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12,00	2,88	24	1.981.619.508,00	469.560.000,00	23,7
2.22.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	%	100,00	5,05	5,05	1.095.160.000,00	31.025.000,00	2,83
2.22.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	15,00	2,55	17	184.235.000,00	31.025.000,00	16,84
2.22.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2,00	0,00	0	200.000.000,00	0,00	0
2.22.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	5,00	0,00	0	710.925.000,00	0,00	0
2.22.06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Persentase Pengelolaan Permuseuman	%	66,00	0,00	0	2.151.312.822,00	0,00	0
2.22.06.1.01	Pengelolaan Museum Provinsi	Jumlah Museum yang difasilitasi	%	50,00	0,00	0	2.151.312.822,00	0,00	0
2.22.06.1.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan	Unit	1,00	0,00	0	553.820.000,00	0,00	0
2.22.06.1.01.0002	Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman	Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman yang Ditingkatkan Mutu dan Kapasitasnya	Orang	22,00	0,00	0	233.312.822,00	0,00	0
2.22.06.1.01.0003	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	Unit	1,00	0,00	0	988.180.000,00	0,00	0
2.22.06.1.01.0004	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia	Unit	2,00	0,00	0	258.000.000,00	0,00	0
2.22.06.1.01.0005	Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Direvitalisasi	Unit	1,00	0,00	0	118.000.000,00	0,00	0
1.01.2.22.0.00.01.0005	Dinas Pendidikan Wilayah I								
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	Indeks	91,50	24,00	26,23	4.528.176.550,00	0,00	0
		Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti	%	100,00	0,00	0			0
1.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu	%	100,00	0,00	0	350.600.000,00	0,00	0
1.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12,00	0,00	0	192.000.000,00		0
1.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	12,00	0,00	0	158.600.000,00		0
1.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah SDM Aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	%	100,00	0,00	0	179.877.000,00	0,00	0
1.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	2,00	0,00	0	44.925.000,00		0
1.01.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	12,00	0,00	0	134.952.000,00		0
1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pelaksanaan Penunjang Kinerja Pegawai	%	100,00	0,00	0	936.033.250,00	0,00	0
1.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5,00	0,00	0	143.033.250,00		0
1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12,00	0,00	0	793.000.000,00		0
1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pelaksanaan penyediaan jasa penunjang	%	100,00	0,00	0	2.888.996.300,00	0,00	0
1.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12,00	0,00	0	240.976.300,00		0
1.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12,00	0,00	0	2.648.020.000,00		0
1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	%	100,00	0,00	0	172.670.000,00	0,00	0
1.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	15,00	0,00	0	114.878.000,00		0
1.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	80,00	0,00	0	57.792.000,00		0
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Tingkat Penyerapan Lulusan SMK	%	91,00	0,00	0	37.099.140.175,00	0,00	

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan (Rp)	Persen (%)
		Persentase Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	%	79,64	0,00	0			0
		Persentase Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	%	77,15	0,00	0			0
		Persentase Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	%	72,00	0,00	0			0
		Persentase Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	%	83,44	0,00	0			0
		Persentase Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	%	77,00	0,00	0			0
		Persentase Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus	%	100,00	0,00	0			0
		Persentase Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	%	69,05	0,00	0			0
1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Indeks Inklusivitas SMA	%	65,86	0,00	0	16.938.261.452,00	0,00	0
		Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	%	73,00	0,00	0			0
		Angka Kelulusan SMA	%	100,00	0,00	0			0
		Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	%	82,00	0,00	0			0
		Indeks Iklim Keamanan SMA	%	84,44	0,00	0			0
		Indeks Iklim Kebinekaan SMA	%	79,31	0,00	0			0
		APK SMA/SMK	%	100,00	0,00	0			0
		APM SMA/SMK	%	100,00	0,00	0			0
1.01.02.1.01.0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Pesertadidik	12.973,00	0,00	0	13.729.407.000,00		0
1.01.02.1.01.0049	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	PesertaDidik	3.840,00	0,00	0	1.780.761.284,00		0
1.01.02.1.01.0051	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Orang	340,00	0,00	0	1.428.093.168,00		0
1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi	Orang	25.000,00	0,00	0	18.749.084.984,00	0,00	0
		Rerata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	%	77,00	0,00	0			0
		Rerata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	%	69,00	0,00	0			0
		Angka Kelulusan SMK	%	100,00	0,00	0			0
		Indeks Inklusivitas SMK	%	62,51	0,00	0			0
		APM SMA/SMK	%	100,00	0,00	0			0
		Indeks Iklim Keamanan SMK	%	82,60	0,00	0			0
		Indeks Iklim Kebinekaan SMK	%	75,94	0,00	0			0
		APK SMA/SMK	%	100,00	0,00	0			0
1.01.02.1.02.0037	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Pesertadidik	12.784,00	0,00	0	15.048.195.000,00		0
1.01.02.1.02.0041	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	PesertaDidik	4.960,00	0,00	0	2.299.004.816,00		0
1.01.02.1.02.0043	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Orang	340,00	0,00	0	1.401.885.168,00		0
1.01.02.1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Rerata kompetensi Numerasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional.	%	63,47	0,00	0	1.411.793.739,00	0,00	0
		Angka Kelulusan SLB	%	100,00	0,00	0			0
		Indeks Iklim Keamanan SDLB	%	83,23	0,00	0			0
		Indeks Iklim Kebinekaan SDLB	%	78,21	0,00	0			0
		Rerata kompetensi Literasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional	%	66,12	0,00	0			0
		Indeks Inklusivitas SDLB	%	68,87	0,00	0			0
		Rerata kompetensi Numerasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional.	%	86,00	0,00	0			0
		APK SLB	%	100,00	0,00	0			0
		Indeks Inklusivitas SMPLB	%	73,03	0,00	0			0
		Indeks Iklim Keamanan SMPLB	%	85,62	0,00	0			0

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan (Rp)	Persen (%)
		Rerata kompetensi Numerasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional	%	70,00	0,00	0			
		Indeks Inklusivitas SMALB	%	75,00	0,00	0			
		Indeks Iklim Kebinekaan SMPLB	%	78,00	0,00	0			
		Indeks Iklim Keamanan SMALB	%	81,29	0,00	0			
		Indeks Iklim Kebinekaan SMALB	%	74,68	0,00	0			
		Rerata kompetensi Literasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional	%	77,00	0,00	0			
		Rerata kompetensi Literasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional	%	83,00	0,00	0			
1.01.02.1.03.0044	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus	Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	PesertaDidik	525,00	0,00	0	847.032.187,00		0
1.01.02.1.03.0048	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	PesertaDidik	80,00	0,00	0	238.920.096,00		0
1.01.02.1.03.0050	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Orang	60,00	0,00	0	325.841.456,00		0
1.01.2.22.0.00.01.0006	Dinas Pendidikan Wilayah II								
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	Indeks	91,50	24,00	26,23	1.640.559.314,00	0,00	0
		Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti	%	100,00	0,00	0			0
1.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu	%	100,00	0,00	0	167.160.000,00	0,00	0
1.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12,00	0,00	0	167.160.000,00		0
1.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah SDM Aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	%	100,00	0,00	0	56.646.000,00	0,00	0
1.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	3,00	0,00	0	56.646.000,00		0
1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pelaksanaan Penunjang Kinerja Pegawai	%	100,00	0,00	0	894.203.544,00	0,00	0
1.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5,00	0,00	0	115.793.544,00		0
1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12,00	0,00	0	778.410.000,00		0
1.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Data Aset	%	100,00	0,00	0	237.726.870,00	0,00	0
1.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	3,00	0,00	0	237.726.870,00		0
1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pelaksanaan penyediaan jasa penunjang	%	100,00	0,00	0	131.364.900,00	0,00	0
1.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12,00	0,00	0	55.044.900,00		0
1.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12,00	0,00	0	76.320.000,00		0
1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	%	100,00	0,00	0	153.458.000,00	0,00	0
1.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	14,00	0,00	0	140.628.000,00		0
1.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	12,00	0,00	0	12.830.000,00		0
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	%	72,00	0,00	0	24.699.206.885,00	0,00	0
		Persentase Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	%	79,64	0,00	0			0
		Persentase Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	%	83,44	0,00	0			0
		Persentase Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus	%	100,00	0,00	0			0

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan (Rp)	Persen (%)
		Persentase Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	%	77,15	0,00	0			
		Persentase Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	%	69,05	0,00	0			
		Persentase Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	%	77,00	0,00	0			
		Persentase Tingkat Penyerapan Lulusan SMK	%	91,00	0,00	0			
1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Indeks Iklim Kebinekaan SMA	%	79,31	0,00	0	12.649.501.916,00	0,00	0
		Angka Kelulusan SMA	%	100,00	0,00	0			
		Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	%	73,00	0,00	0			
		APM SMA/SMK	%	100,00	0,00	0			
		Indeks Iklim Keamanan SMA	%	84,44	0,00	0			
		APK SMA/SMK	%	100,00	0,00	0			
		Indeks Inklusivitas SMA	%	65,86	0,00	0			
		Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	%	82,00	0,00	0			
1.01.02.1.01.0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Pesertadidik	1.000,00	0,00	0	10.397.422.008,00	0,00	0
1.01.02.1.01.0049	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	PesertaDidik	500,00	0,00	0	1.372.376.728,00	0,00	0
1.01.02.1.01.0051	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Orang	131,00	0,00	0	879.703.180,00	0,00	0
1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Indeks Inklusivitas SMK	%	62,51	0,00	0	11.469.372.254,00	0,00	0
		Indeks Iklim Kebinekaan SMK	%	75,94	0,00	0			
		APM SMA/SMK	%	100,00	0,00	0			
		Angka Kelulusan SMK	%	100,00	0,00	0			
		Rerata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	%	69,00	0,00	0			
		Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi	Orang	25.000,00	0,00	0			
		APK SMA/SMK	%	100,00	0,00	0			
		Rerata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	%	77,00	0,00	0			
		Indeks Iklim Keamanan SMK	%	82,60	0,00	0			
1.01.02.1.02.0037	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Pesertadidik	1.000,00	0,00	0	9.916.892.808,00	0,00	0
1.01.02.1.02.0041	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	PesertaDidik	450,00	0,00	0	908.977.262,00	0,00	0
1.01.02.1.02.0043	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Orang	108,00	0,00	0	643.502.184,00	0,00	0
1.01.02.1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Indeks Inklusivitas SMPLB	%	73,03	0,00	0	580.332.715,00	0,00	0
		Indeks Inklusivitas SDLB	%	68,87	0,00	0			
		Rerata kompetensi Numerasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional.	%	86,00	0,00	0			
		Rerata kompetensi Literasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional.	%	77,00	0,00	0			
		Rerata kompetensi Numerasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional.	%	63,47	0,00	0			
		APK SLB	%	100,00	0,00	0			
		Angka Kelulusan SLB	%	100,00	0,00	0			
		Rerata kompetensi Numerasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional	%	70,00	0,00	0			
		Indeks Iklim Keamanan SMALB	%	81,29	0,00	0			
		Indeks Iklim Keamanan SDLB	%	83,23	0,00	0			
		Indeks Iklim Kebinekaan SMPLB	%	78,00	0,00	0			
		Indeks Iklim Kebinekaan SDLB	%	78,21	0,00	0			
		Rerata kompetensi Literasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional	%	66,12	0,00	0			
		Indeks Iklim Kebinekaan SMALB	%	74,68	0,00	0			
		Indeks Iklim Keamanan SMPLB	%	85,62	0,00	0			

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan (Rp)	Persen (%)
		Rerata kompetensi Literasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional	%	83,00	0,00	0			
		Indeks Inklusivitas SMALB	%	75,00	0,00	0			
1.01.02.1.03.0044	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus	Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	PesertaDidik	1.000,00	0,00	0	395.426.000,00	0,00	0
1.01.02.1.03.0048	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	PesertaDidik	80,00	0,00	0	184.906.715,00	0,00	0
1.01.2.22.0.00.01.0007	Dinas Pendidikan Wilayah III								
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	Indeks	91,50	24,00	26,23	2.345.746.513,00	110.880.000,00	4,73
		Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti	%	100,00	0,00	0			
1.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu	%	100,00	0,00	0	152.040.000,00	0,00	0
1.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12,00	0,00	0	152.040.000,00	0,00	0
1.01.01.1.05	Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	Jumlah SDM Aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	%	100,00	0,00	0	786.390.576,00	0,00	0
1.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	2,00	0,00	0	46.830.000,00	0,00	0
1.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	230,00	0,00	0	739.560.576,00	0,00	0
1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pelaksanaan Penunjang Kinerja Pegawai	%	100,00	0,00	0	646.158.909,00	0,00	0
1.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	6,00	0,00	0	139.888.909,00	0,00	0
1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12,00	0,00	0	506.270.000,00	0,00	0
1.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Data Aset	%	100,00	0,00	0	127.636.928,00	0,00	0
1.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	54,00	0,00	0	127.636.928,00	0,00	0
1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pelaksanaan penyediaan jasa penunjang	%	100,00	12,18	12,18	515.538.100,00	110.880.000,00	21,51
1.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12,00	0,00	0	60.317.100,00	0,00	0
1.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12,00	0,00	0	455.221.000,00	110.880.000,00	24,36
1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	%	100,00	0,00	0	117.982.000,00	0,00	0
1.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	10,00	0,00	0	94.922.000,00	0,00	0
1.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	34,00	0,00	0	23.060.000,00	0,00	0
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus	%	100,00	0,00	0	31.695.611.158,00	0,00	0
		Persentase Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	%	72,00	0,00	0			
		Persentase Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	%	69,05	0,00	0			
		Persentase Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	%	83,44	0,00	0			
		Persentase Tingkat Penyerapan Lulusan SMK	%	91,00	0,00	0			
		Persentase Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	%	77,00	0,00	0			
		Persentase Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	%	77,15	0,00	0			
		Persentase Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	%	79,64	0,00	0			
1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	%	73,00	0,00	0	19.467.384.317,00	0,00	

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan (Rp)	Persen (%)
		Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	%	82,00	0,00	0			0
		Indeks Iklim Keamanan SMA	%	84,44	0,00	0			
		Angka Kelulusan SMA	%	100,00	0,00	0			
		APM SMA/SMK	%	100,00	0,00	0			
		APK SMA/SMK	%	100,00	0,00	0			
		Indeks Iklim Kebinekaan SMA	%	79,31	0,00	0			
		Indeks Inklusivitas SMA	%	65,86	0,00	0			
1.01.02.1.01.0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Pesertadidik	15.000,00	0,00	0	17.139.354.780,00	0,00	0
1.01.02.1.01.0049	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	PesertaDidik	1.000,00	0,00	0	1.281.139.937,00	0,00	0
1.01.02.1.01.0051	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Orang	270,00	0,00	0	966.889.600,00	0,00	0
1.01.02.1.01.0052	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	SatuanPendidikan	54,00	0,00	0	80.000.000,00	0,00	0
1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Rerata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	%	69,00	0,00	0	11.637.061.903,00		0
		Rerata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	%	77,00	0,00	0			
		APM SMA/SMK	%	100,00	0,00	0			
		Indeks Iklim Kebinekaan SMK	%	75,94	0,00	0			
		Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi	Orang	25.000,00	0,00	0			
		Indeks Iklim Keamanan SMK	%	82,60	0,00	0			
		Angka Kelulusan SMK	%	100,00	0,00	0			
		APK SMA/SMK	%	100,00	0,00	0			
		Indeks Inklusivitas SMK	%	62,51	0,00	0			
1.01.02.1.02.0037	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Pesertadidik	15.000,00	0,00	0	9.220.746.113,00	0,00	0
1.01.02.1.02.0041	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	PesertaDidik	500,00	0,00	0	939.912.950,00	0,00	0
1.01.02.1.02.0043	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Orang	616,00	0,00	0	1.100.053.190,00	0,00	0
1.01.02.1.02.0045	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	SatuanPendidikan	44,00	0,00	0	376.349.650,00	0,00	0
1.01.02.1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus	APK SLB	%	100,00	0,00	0	591.164.938,00		0
		Indeks Iklim Keamanan SMALB	%	81,29	0,00	0			
		Indeks Iklim Kebinekaan SMPLB	%	78,00	0,00	0			
		Indeks Iklim Kebinekaan SDLB	%	78,21	0,00	0			
		Angka Kelulusan SLB	%	100,00	0,00	0			
		Indeks Iklim Keamanan SDLB	%	83,23	0,00	0			
		Rerata kompetensi Literasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional	%	66,12	0,00	0			
		Indeks Iklim Keamanan SMPLB	%	85,62	0,00	0			
		Rerata kompetensi Numerasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional.	%	63,47	0,00	0			
		Rerata kompetensi Numerasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional	%	70,00	0,00	0			
		Rerata kompetensi Literasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional	%	83,00	0,00	0			
		Indeks Inklusivitas SMPLB	%	73,03	0,00	0			
		Indeks Inklusivitas SDLB	%	68,87	0,00	0			
		Indeks Iklim Kebinekaan SMALB	%	74,68	0,00	0			
		Rerata kompetensi Numerasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional.	%	86,00	0,00	0			
		Indeks Inklusivitas SMALB	%	75,00	0,00	0			
		Rerata kompetensi Literasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional.	%	77,00	0,00	0			

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan (Rp)	Persen (%)
1.01.02.1.03.0044	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus	Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	PesertaDidik	1.000,00	0,00	0	345.072.000,00	0,00	0
1.01.02.1.03.0048	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	PesertaDidik	25,00	0,00	0	112.491.438,00	0,00	0
1.01.02.1.03.0050	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Orang	25,00	0,00	0	133.601.500,00	0,00	0
1.01.2.22.0.00.01.0008	Dinas Pendidikan Wilayah IV								
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti	%	100,00	0,00	0	15.807.035.985,00	3.841.440.000,00	24,3
		Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	Indeks	91,50	24,00	26,23			
1.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu	%	100,00	0,00	0	151.960.000,00	0,00	0
1.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12,00	0,00	0	103.560.000,00	0,00	0
1.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	4,00	0,00	0	48.400.000,00	0,00	0
1.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah SDM Aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	%	100,00	0,00	0	89.972.000,00	0,00	0
1.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	2,00	0,00	0	28.752.000,00	0,00	0
1.01.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	12,00	0,00	0	61.220.000,00	0,00	0
1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pelaksanaan Penunjang Kinerja Pegawai	%	100,00	0,00	0	1.128.117.765,00	0,00	0
1.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	8,00	0,00	0	157.851.765,00	0,00	0
1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12,00	0,00	0	970.266.000,00	0,00	0
1.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Data Aset	%	100,00	0,00	0	651.559.220,00	0,00	0
1.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	3,00	0,00	0	76.073.620,00	0,00	0
1.01.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1,00	0,00	0	575.485.600,00	0,00	0
1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pelaksanaan penyediaan jasa penunjang	%	100,00	14,19	14,19	13.620.700.000,00	3.841.440.000,00	28,2
1.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12,00	0,00	0	87.100.000,00	0,00	0
1.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12,00	0,00	0	13.533.600.000,00	3.841.440.000,00	28,38
1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	%	100,00	0,00	0	164.727.000,00	0,00	0
1.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	8,00	0,00	0	113.579.000,00	0,00	0
1.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	30,00	0,00	0	21.140.000,00	0,00	0
1.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1,00	0,00	0	30.008.000,00	0,00	0
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	%	72,00	0,00	0	13.929.525.372,00	0,00	0
		Persentase Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	%	77,00	0,00	0			
		Persentase Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	%	69,05	0,00	0			
		Persentase Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK	%	100,00	0,00	0			
		Persentase Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	%	77,15	0,00	0			0

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan (Rp)	Persen (%)
		Persentase Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	%	83,44	0,00	0			
		Persentase Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	%	79,64	0,00	0			
		Persentase Tingkat Penyerapan Lulusan SMK	%	91,00	0,00	0			
1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	%	73,00	0,00	0	9.216.572.096,00	0,00	0
		APK SMA/SMK	%	100,00	0,00	0			
		Indeks Iklim Kebinekaan SMA	%	79,31	0,00	0			
		Indeks Inklusivitas SMA	%	65,86	0,00	0			
		Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	%	82,00	0,00	0			
		APM SMA/SMK	%	100,00	0,00	0			
		Indeks Iklim Keamanan SMA	%	84,44	0,00	0			
		Angka Kelulusan SMA	%	100,00	0,00	0			
1.01.02.1.01.0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Pesertadidik	5.620,00	0,00	0	6.621.690.000,00	0,00	0
1.01.02.1.01.0049	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	PesertaDidik	1.428,00	0,00	0	1.370.410.096,00	0,00	0
1.01.02.1.01.0051	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Orang	327,00	0,00	0	1.224.472.000,00	0,00	0
1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	APM SMA/SMK	%	100,00	0,00	0	4.354.930.172,00	0,00	0
		Rerata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	%	77,00	0,00	0			
		Indeks Iklim Kebinekaan SMK	%	75,94	0,00	0			
		Angka Kelulusan SMK	%	100,00	0,00	0			
		APK SMA/SMK	%	100,00	0,00	0			
		Rerata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	%	69,00	0,00	0			
		Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi	Orang	25.000,00	0,00	0			
		Indeks Iklim Keamanan SMK	%	82,60	0,00	0			
		Indeks Inklusivitas SMK	%	62,51	0,00	0			
1.01.02.1.02.0037	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Pesertadidik	2.278,00	0,00	0	3.158.021.000,00	0,00	0
1.01.02.1.02.0041	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	PesertaDidik	593,00	0,00	0	618.257.172,00	0,00	0
1.01.02.1.02.0043	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Orang	102,00	0,00	0	578.652.000,00	0,00	0
1.01.02.1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Indeks Iklim Kebinekaan SMALB	%	74,68	0,00	0	358.023.104,00	0,00	0
		Indeks Inklusivitas SDLB	%	68,87	0,00	0			
		Indeks Iklim Kebinekaan SMPLB	%	78,00	0,00	0			
		Rerata kompetensi Literasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional	%	83,00	0,00	0			
		Indeks Inklusivitas SMALB	%	75,00	0,00	0			
		Angka Kelulusan SLB	%	100,00	0,00	0			
		APK SLB	%	100,00	0,00	0			
		Indeks Iklim Keamanan SMALB	%	81,29	0,00	0			
		Rerata kompetensi Numerasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional.	%	63,47	0,00	0			
		Indeks Iklim Keamanan SDLB	%	83,23	0,00	0			
		Indeks Inklusivitas SMPLB	%	73,03	0,00	0			
		Indeks Iklim Kebinekaan SDLB	%	78,21	0,00	0			
		Rerata kompetensi Literasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional.	%	77,00	0,00	0			
		Rerata kompetensi Literasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional	%	66,12	0,00	0			
		Rerata kompetensi Numerasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional	%	70,00	0,00	0			
		Rerata kompetensi Numerasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional.	%	86,00	0,00	0			

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan (Rp)	Persen (%)
		Indeks Iklim Keamanan SMP/SLB	%	85,62	0,00	0			
1.01.02.1.03.0044	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus	Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	PesertaDidik	125,00	0,00	0	200.270.000,00	0,00	0
1.01.02.1.03.0048	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	PesertaDidik	36,00	0,00	0	71.873.104,00	0,00	0
1.01.02.1.03.0050	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Orang	30,00	0,00	0	85.880.000,00	0,00	0
1.01.2.22.0.00.01.0009	Dinas Pendidikan Wilayah V								
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti	%	100,00	0,00	0	13.162.973.885,00	2.825.661.410,00	21,47
		Indeks Kualitas Layanan Keskretariatian	Indeks	91,50	24,00	26,23			
1.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu	%	100,00	7,75	7,75	283.560.000,00	18.240.000,00	6,43
1.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12,00	0,00	0	117.720.000,00	18.240.000,00	15,49
1.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	4,00	0,00	0	165.840.000,00	0,00	0
1.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah SDM Aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	%	100,00	0,00	0	186.792.000,00	0,00	0
1.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	3,00	0,00	0	52.992.000,00	0,00	0
1.01.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	5,00	0,00	0	133.800.000,00	0,00	0
1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pelaksanaan Penunjang Kinerja Pegawai	%	100,00	3,78	3,78	852.076.010,00	51.693.410,00	6,07
1.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	8,00	0,00	0	168.276.010,00	0,00	0
1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12,00	0,00	0	683.800.000,00	51.693.410,00	7,56
1.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Data Aset	%	100,00	3,77	3,77	723.698.475,00	26.400.000,00	3,65
1.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	24,00	0,00	0	373.748.475,00	0,00	0
1.01.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	2,00	0,00	0	349.950.000,00	26.400.000,00	7,54
1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pelaksanaan penyediaan jasa penunjang	%	100,00	12,49	12,49	10.988.193.900,00	2.729.328.000,00	24,84
1.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12,00	0,00	0	57.633.900,00	0,00	0
1.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12,00	0,00	0	10.930.560.000,00	2.729.328.000,00	24,97
1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	%	100,00	0,00	0	128.653.500,00	0,00	0
1.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	7,00	0,00	0	105.193.500,00	0,00	0
1.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	34,00	0,00	0	23.460.000,00	0,00	0
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus	%	100,00	0,00	0	13.748.000.338,00	0,00	
		Persentase Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	%	83,44	0,00	0			
		Persentase Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	%	72,00	0,00	0			
		Persentase Tingkat Penyerapan Lulusan SMK	%	91,00	0,00	0			
		Persentase Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	%	77,00	0,00	0			0

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan (Rp)	Persen (%)
		Persentase Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	%	69,05	0,00	0			
		Persentase Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	%	77,15	0,00	0			
		Persentase Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	%	79,64	0,00	0			
1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA	%	100,00	0,00	0	8.024.648.152,00	0,00	0
		Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	%	73,00	0,00	0			
		Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	%	82,00	0,00	0			
		APK SMA/SMK	%	100,00	0,00	0			
		Indeks Iklim Keamanan SMA	%	84,44	0,00	0			
		Indeks Inklusivitas SMA	%	65,86	0,00	0			
		APM SMA/SMK	%	100,00	0,00	0			
		Indeks Iklim Kebinekaan SMA	%	79,31	0,00	0			
1.01.02.1.01.0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Pesertadidik	5.000,00	0,00	0	5.928.375.000,00	0,00	0
1.01.02.1.01.0049	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	PesertaDidik	773,00	0,00	0	957.023.152,00	0,00	0
1.01.02.1.01.0051	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Orang	248,00	0,00	0	1.139.250.000,00	0,00	0
1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	APK SMA/SMK	%	100,00	0,00	0	5.558.711.834,00	0,00	0
		Indeks Inklusivitas SMK	%	62,51	0,00	0			
		Angka Kelulusan SMK	%	100,00	0,00	0			
		Indeks Iklim Kebinekaan SMK	%	75,94	0,00	0			
		APM SMA/SMK	%	100,00	0,00	0			
		Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi	Orang	25.000,00	0,00	0			
		Rerata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	%	77,00	0,00	0			
		Rerata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	%	69,00	0,00	0			
		Indeks Iklim Keamanan SMK	%	82,60	0,00	0			
1.01.02.1.02.0037	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Pesertadidik	4.000,00	0,00	0	3.431.214.000,00	0,00	0
1.01.02.1.02.0041	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	PesertaDidik	330,00	0,00	0	874.777.484,00	0,00	0
1.01.02.1.02.0043	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Orang	255,00	0,00	0	1.252.720.350,00	0,00	0
1.01.02.1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Indeks Inklusivitas SMPLB	%	73,03	0,00	0	164.640.352,00	0,00	0
		Indeks Iklim Keamanan SDLB	%	83,23	0,00	0			
		Indeks Iklim Kebinekaan SMPLB	%	78,00	0,00	0			
		Rerata kompetensi Literasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional	%	66,12	0,00	0			
		Indeks Iklim Keamanan SMPLB	%	85,62	0,00	0			
		Indeks Inklusivitas SMALB	%	75,00	0,00	0			
		Indeks Inklusivitas SDLB	%	68,87	0,00	0			
		Indeks Iklim Kebinekaan SMALB	%	74,68	0,00	0			
		Angka Kelulusan SLB	%	100,00	0,00	0			
		Indeks Iklim Keamanan SMALB	%	81,29	0,00	0			
		Indeks Iklim Kebinekaan SDLB	%	78,21	0,00	0			
		Rerata kompetensi Literasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional.	%	77,00	0,00	0			
		APK SLB	%	100,00	0,00	0			
		Rerata kompetensi Numerasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional.	%	86,00	0,00	0			
		Rerata kompetensi Literasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional	%	83,00	0,00	0			
		Rerata kompetensi Numerasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional	%	70,00	0,00	0			

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan (Rp)	Persen (%)
		Rerata kompetensi Numerasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional	%	63,47	0,00	0			
1.01.02.1.03.0044	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus	Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	PesertaDidik	70,00	0,00	0	92.040.000,00	0,00	0
1.01.02.1.03.0048	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	PesertaDidik	40,00	0,00	0	39.680.352,00	0,00	0
1.01.02.1.03.0050	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Orang	40,00	0,00	0	32.920.000,00	0,00	0
1.01.2.22.0.00.01.0010	Dinas Pendidikan Wilayah VI								
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	Indeks	91,50	24,00	26,23	4.536.240.841,00	0,00	0
		Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti	%	100,00	0,00	0			0
1.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu	%	100,00	0,00	0	139.776.000,00	0,00	0
1.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12,00	0,00	0	139.776.000,00		0
1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pelaksanaan Penunjang Kinerja Pegawai	%	100,00	0,00	0	1.731.995.841,00	0,00	0
1.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1,00	0,00	0	19.054.568,00		0
1.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	23,00	0,00	0	697.722.216,00		0
1.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	3,00	0,00	0	22.755.057,00		0
1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12,00	0,00	0	992.464.000,00		0
1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pelaksanaan penyediaan jasa penunjang	%	100,00	0,00	0	2.297.664.000,00	0,00	0
1.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12,00	0,00	0	14.448.000,00		0
1.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12,00	0,00	0	91.056.000,00		0
1.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12,00	0,00	0	2.192.160.000,00		0
1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	%	100,00	0,00	0	366.805.000,00	0,00	0
1.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	7,00	0,00	0	66.805.000,00		0
1.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1,00	0,00	0	300.000.000,00		0
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus	%	100,00	0,00	0	15.015.918.999,00	0,00	0
		Persentase Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	%	72,00	0,00	0			
		Persentase Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	%	77,15	0,00	0			
		Persentase Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	%	83,44	0,00	0			
		Persentase Tingkat Penyerapan Lulusan SMK	%	91,00	0,00	0			
		Persentase Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	%	77,00	0,00	0			
		Persentase Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	%	79,64	0,00	0			
		Persentase Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	%	69,05	0,00	0			
1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Indeks Inklusivitas SMA	%	65,86	0,00	0	9.023.128.714,00	0,00	0
		Indeks Iklim Kebinekaan SMA	%	79,31	0,00	0			
		Indeks Iklim Keamanan SMA	%	84,44	0,00	0			
		APK SMA/SMK	%	100,00	0,00	0			
		Angka Kelulusan SMA	%	100,00	0,00	0			0

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan (Rp)	Persen (%)
		Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	%	82,00	0,00	0			
		Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	%	73,00	0,00	0			
		APM SMA/SMK	%	100,00	0,00	0			
1.01.02.1.01.0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Pesertadidik	6.474,00	0,00	0	6.787.721.594,00		0
1.01.02.1.01.0049	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	PesertaDidik	1.604,00	0,00	0	981.132.320,00		0
1.01.02.1.01.0051	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Orang	100,00	0,00	0	742.705.680,00		0
1.01.02.1.01.0052	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	SatuanPendidikan	20,00	0,00	0	511.569.120,00		0
1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	APM SMA/SMK	%	100,00	0,00	0	5.000.421.765,00	0,00	
		APK SMA/SMK	%	100,00	0,00	0			
		Rerata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	%	77,00	0,00	0			
		Indeks Inklusivitas SMK	%	62,51	0,00	0			
		Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi	Orang	25.000,00	0,00	0			0
		Indeks Iklim Kebinekaan SMK	%	75,94	0,00	0			
		Indeks Iklim Keamanan SMK	%	82,60	0,00	0			
		Angka Kelulusan SMK	%	100,00	0,00	0			
		Rerata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	%	69,00	0,00	0			
1.01.02.1.02.0037	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Pesertadidik	2.637,00	0,00	0	3.100.146.545,00		0
1.01.02.1.02.0041	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	PesertaDidik	1.652,00	0,00	0	710.632.320,00		0
1.01.02.1.02.0043	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Orang	100,00	0,00	0	742.705.680,00		0
1.01.02.1.02.0045	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	SatuanPendidikan	14,00	0,00	0	446.937.220,00		0
1.01.02.1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Indeks Iklim Keamanan SDLB	%	83,23	0,00	0	992.368.520,00	0,00	
		APK SLB	%	100,00	0,00	0			
		Rerata kompetensi Literasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional.	%	77,00	0,00	0			
		Rerata kompetensi Literasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional	%	83,00	0,00	0			
		Indeks Iklim Keamanan SMALB	%	81,29	0,00	0			
		Rerata kompetensi Literasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional	%	66,12	0,00	0			
		Indeks Iklim Kebinekaan SMALB	%	74,68	0,00	0			
		Indeks Iklim Kebinekaan SMPLB	%	78,00	0,00	0			
		Indeks Inklusivitas SDLB	%	68,87	0,00	0			0
		Angka Kelulusan SLB	%	100,00	0,00	0			
		Indeks Iklim Kebinekaan SDLB	%	78,21	0,00	0			
		Indeks Iklim Keamanan SMPLB	%	85,62	0,00	0			
		Indeks Inklusivitas SMALB	%	75,00	0,00	0			
		Indeks Inklusivitas SMPLB	%	73,03	0,00	0			
		Rerata kompetensi Numerasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional.	%	86,00	0,00	0			
		Rerata kompetensi Numerasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional.	%	63,47	0,00	0			
		Rerata kompetensi Numerasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional	%	70,00	0,00	0			
1.01.02.1.03.0044	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus	Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	PesertaDidik	212,00	0,00	0	341.744.000,00		0
1.01.02.1.03.0048	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	PesertaDidik	100,00	0,00	0	372.459.700,00		0

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan (Rp)	Persen (%)
1.01.02.1.03.0050	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Orang	50,00	0,00	0	278.164.820,00		0
1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan								
1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan								
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Sekretariat	Indeks	90,00	0,00	0	111.921.761.505,00	20.506.469.253,00	18,32
		Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti	%	100,00	0,00	0			
1.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang ditetapkan tepat waktu	%	100,00	0,00	0	1.727.585.050,00	0,00	0
1.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	7,00	0,00	0	948.574.000,00	0,00	0
1.02.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	2,00	0,00	0	200.000.000,00	0,00	0
1.02.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	8,00	0,00	0	579.011.050,00	0,00	0
1.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu	%	100,00	0,00	0	93.212.101.060,00	15.948.418.265,00	17,11
1.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	500,00	0,00	0	92.367.601.060,00	15.808.228.265,00	18,01
1.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	1,00	0,00	0	613.200.000,00	139.510.000,00	22,75
1.02.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1,00	0,00	0	17.840.000,00	680.000,00	3,81
1.02.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	1,00	0,00	0	19.040.000,00	0,00	0
1.02.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	12,00	0,00	0	26.240.000,00	0,00	0
1.02.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	1,00	0,00	0	168.180.000,00	0,00	0
1.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	%	100,00	0,00	0	475.940.000,00	42.000.000,00	8,82
1.02.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1,00	0,00	0	156.000.000,00	0,00	0
1.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	150,00	0,00	0	319.940.000,00	42.000.000,00	13,13
1.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12,00	0,00	0	4.778.528.824,00	284.608.793,00	5,96
1.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	7,00	0,00	0	39.987.072,00	0,00	0
1.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5,00	0,00	0	936.960.052,00	0,00	0
1.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	3,00	0,00	0	272.523.700,00	0,00	0
1.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	12,00	0,00	0	29.988.000,00	6.785.000,00	22,63
1.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12,00	0,00	0	3.499.070.000,00	277.823.793,00	9,11
1.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100,00	0,00	0	768.820.000,00	0,00	0
1.02.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	1,00	0,00	0	768.820.000,00	0,00	0
1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Pelaksanaan penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12,00	0,00	0	3.456.993.272,00	4.186.633.146,00	121,11
1.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1,00	0,00	0	19.478.000,00	0,00	0
1.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1,00	0,00	0	1.465.767.800,00	196.238.088,00	13,39
1.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1,00	0,00	0	1.971.747.472,00	3.990.395.058,00	60,59
1.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	%	100,00	0,00	0	7.501.793.299,00	44.809.049,00	0,6
1.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	49,00	0,00	0	383.895.999,00	44.809.049,00	11,67

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan (Rp)	Persen (%)
1.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	10,00	0,00	0	6.783.145.840,00	0,00	0
1.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	90,00	0,00	0	334.751.460,00	0,00	0
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Angka Kesakitan	rasio	10,70	0,00	0	148.127.921.389,00	26.398.806.442,00	17,82
		Angka Kesakitan (Dinas Kesehatan)	Rasio	10,70	0,00	0			
		Penyediaan fasilitas pelayanan, sarana, prasarana dan alat kesehatan untuk UKP rujukan, UKM dan UKM rujukan tingkat daerah provinsi (RS Mata)	%	98,00	0,00	0			
		Persentase Alat-alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan yang disediakan dan dipelihara (UPTD Labkes)	%	85,00	0,00	0			
		Persentase capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) RS (RSID Atma Husada Mahakam)	%	93,78	0,00	0			
		Persentase capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) RS (RS Kanujoso)	%	88,50	0,00	0			
		Angka Kesakitan	%	10,70	0,00	0			
		Persentase capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit (RS AWS)	%	89,00	0,00	0			
		Persentase jumlah fasilitas kesehatan yang dioptimalkan (UPTD Labkes)	%	100,00	0,00	0			
		Persentase Unit/Instalasi layanan Rumah Sakit yang memenuhi standar (UPTD RS Korpri)	%	80,00	0,00	0			
				0,00	0,00	0			
1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang memenuhi SPA minimal 60%	%	15,00	0,00	0	24.601.140.568,00	61.491.702,00	0,25
1.02.02.1.01.0006	Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll)	Jumlah Pelayanan Kesehatan Di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll) yang Dilakukan Pengembangan	Layanan	4,00	0,00	0	1.660.500.000,00	0,00	0
1.02.02.1.01.0007	Pengembangan Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center	Jumlah Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center yang Dilakukan Pengembangan	Unit	45,00	0,00	0	594.634.568,00	0,00	0
1.02.02.1.01.0010	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	Unit	32,00	0,00	0	10.000.000.000,00	0,00	0
1.02.02.1.01.0017	Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	Unit	30,00	0,00	0	11.940.000,00	0,00	0
1.02.02.1.01.0020	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh Antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	Unit	8,00	0,00	0	41.726.000,00	0,00	0
1.02.02.1.01.0025	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Jumlah dokumen distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	Dokumen	2,00	0,00	0	2.032.218.000,00	61.491.702,00	3,35
1.02.02.1.01.0027	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	Paket	12,00	0,00	0	10.260.122.000,00	0,00	0
1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase terlaksananya layanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan	%	100,00	0,00	0	122.279.864.821,00	26.275.905.340,00	21,49
1.02.02.1.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar	Orang	2.096.543,00	0,00	0	1.750.000.000,00	0,00	0
1.02.02.1.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	200,00	0,00	0	1.450.000.000,00	5.995.000,00	0,45
1.02.02.1.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Dokumen	1,00	0,00	0	3.889.622.404,00	8.705.655,00	0,24
1.02.02.1.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	Dokumen	1,00	0,00	0	761.930.000,00	0,00	0

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan (Rp)	Persen (%)
1.02.02.1.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	Dokumen	1,00	0,00	0	985.689.850,00	0,00	0
1.02.02.1.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	1,00	0,00	0	11.345.163.260,00	18.307.000,00	0,16
1.02.02.1.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Dokumen	1,00	0,00	0	2.553.457.829,00	1.804.000,00	0,08
1.02.02.1.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dokumen	1,00	0,00	0	2.552.955.365,00	8.370.000,00	0,35
1.02.02.1.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Dokumen	1,00	0,00	0	1.732.943.228,00	0,00	0
1.02.02.1.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Dokumen	6,00	0,00	0	1.000.000.000,00	5.440.000,00	0,58
1.02.02.1.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen	2,00	0,00	0	16.651.178.310,00	34.226.685,00	0,21
1.02.02.1.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	Dokumen	1,00	0,00	0	749.920.141,00	0,00	0
1.02.02.1.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Dokumen	1,00	0,00	0	1.545.762.000,00	0,00	0
1.02.02.1.02.0016	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dokumen	2,00	0,00	0	71.541.554.434,00	26.152.950.200,00	36,56
1.02.02.1.02.0017	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dokumen	1,00	0,00	0	700.000.000,00	0,00	0
1.02.02.1.02.0019	Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	Dokumen	1,00	0,00	0	1.899.760.000,00	8.240.000,00	0,46
1.02.02.1.02.0021	Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota	Dokumen	2,00	0,00	0	865.000.000,00	5.346.800,00	0,62
1.02.02.1.02.0023	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersedia, Terkelola dan Terintegrasi dengan Rumah Sakit dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Unit	6,00	0,00	0	204.928.000,00	26.520.000,00	15,86
1.02.02.1.02.0025	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional	Jumlah Paket Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	Paket	10,00	0,00	0	100.000.000,00	0,00	0
1.02.02.1.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase keterisian data (kelengkapan dan ketepatan) Sistem Informasi Kesehatan	%	95,00	0,00	0	446.700.000,00	16.123.000,00	3,61
1.02.02.1.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Dokumen	1,00	0,00	0	446.700.000,00	16.123.000,00	4,34
1.02.02.1.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase RS yang mencapai akreditasi Paripurna	%	80,00	0,00	0	800.216.000,00	45.286.400,00	5,66
1.02.02.1.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	Unit	5,00	0,00	0	218.950.000,00	25.801.400,00	15,64
1.02.02.1.04.0002	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit	Jumlah Rumah Sakit yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar	Unit	5,00	0,00	0	396.166.000,00	0,00	0
1.02.02.1.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan	Unit	25,00	0,00	0	185.100.000,00	19.485.000,00	12,32
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya	%	45,00	0,00	0	2.029.860.000,00	13.242.200,00	0,65
1.02.03.1.01	Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan SDM Provinsi dan Kab/Kota	Dokumen	1,00	0,00	0	726.420.000,00	0,00	0
1.02.03.1.01.0001	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Orang	1.620,00	0,00	0	726.420.000,00	0,00	0
1.02.03.1.02	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Kab/kota yang melakukan pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi Teknis SDM kesehatan	Kab/Kota	5,00	0,00	0	1.303.440.000,00	13.242.200,00	1,02
1.02.03.1.02.0001	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkatkan	Orang	1.000,00	0,00	0	1.091.960.000,00	0,00	0
1.02.03.1.02.0002	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dokumen	5,00	0,00	0	211.480.000,00	13.242.200,00	6,52

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan (Rp)	Persen (%)
1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase sarana farmasi dan alat kesehatan yang memiliki izin operasional sesuai standar	%	100,00	0,00	0	493.598.500,00	0,00	0
1.02.04.1.01	Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)	Persentase pengawasan dan pembinaan PBF Cabang dan Cabang PAK dalam pemenuhan ketentuan perizinan	%	100,00	0,00	0	443.206.500,00	0,00	0
1.02.04.1.01.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK	Jumlah PBF Cabang dan Cabang PAK yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindaklanjuti Penerbitan Perizinan	Sarana	60,00	0,00	0	443.206.500,00	0,00	0
1.02.04.1.02	Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)	Persentase pengawasan dan pembinaan yang dilakukan dalam penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)	%	100,00	0,00	0	50.392.000,00	0,00	0
1.02.04.1.02.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional	Jumlah Usaha Kecil Obat Tradisional yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindaklanjuti Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional	Sarana	3,00	0,00	0	50.392.000,00	0,00	0
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase kabupaten/kota yang difasilitasi dalam pemberdayaan masyarakat bidang Kesehatan	%	80,00	0,00	0	3.187.104.212,00	23.460.000,00	0,74
1.02.05.1.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Kabupaten/Kota yang di fasilitasi Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor	%	80,00	0,00	0	528.404.200,00	0,00	0
1.02.05.1.01.0001	Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Dokumen	1,00	0,00	0	528.404.200,00	0,00	0
1.02.05.1.02	Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Kabupaten/Kota yang di fasilitasi dalam Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah	%	80,00	0,00	0	2.223.665.702,00	23.460.000,00	1,06
1.02.05.1.02.0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Dokumen	1,00	0,00	0	1.656.071.792,00	23.460.000,00	1,42
1.02.05.1.02.0002	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penumbuhan Kesadaran dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Dokumen	1,00	0,00	0	567.593.910,00	0,00	0
1.02.05.1.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Kabupaten/Kota yang di fasilitasi dalam Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi	%	80,00	0,00	0	435.034.310,00	0,00	0
1.02.05.1.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM	Dokumen	1,00	0,00	0	435.034.310,00	0,00	0
1.02.0.00.0.00.01.0003	UPTD Balai Latihan Kesehatan								
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti	%	100,00	0,00	0	9.945.141.319,00	419.671.329,00	4,22
1.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	Indeks	98,00	0,00	0			
1.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu	%	100,00	0,00	0	123.480.000,00	28.830.000,00	23,35
1.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12,00	0,00	0	123.480.000,00	28.830.000,00	23,35
1.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	%	100,00	0,00	0	356.682.000,00	0,00	0
1.02.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	3,00	0,00	0	136.782.000,00	0,00	0
1.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	54,00	0,00	0	219.900.000,00	0,00	0
1.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12,00	0,00	0	2.145.958.149,00	6.767.000,00	0,32
1.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1,00	0,00	0	77.716.080,00	0,00	0
1.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	16,00	0,00	0	1.161.121.296,00	0,00	0
1.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	3,00	0,00	0	134.124.574,00	1.500.000,00	1,12
1.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	7,00	0,00	0	143.232.199,00	2.600.000,00	1,82
1.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12,00	0,00	0	629.764.000,00	2.667.000,00	0,42

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan (Rp)	Persen (%)
1.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100,00	0,00	0	119.631.000,00	0,00	0
1.02.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	3,00	0,00	0	119.631.000,00	0,00	0
1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12,00	0,00	0	2.973.108.400,00	374.816.329,00	12,61
1.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12,00	0,00	0	13.112.000,00	2.000.000,00	15,25
1.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12,00	0,00	0	1.084.996.400,00	147.416.329,00	13,59
1.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12,00	0,00	0	1.875.000.000,00	225.400.000,00	12,02
1.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi dengan baik	%	98,00	0,00	0	4.226.281.770,00	9.258.000,00	0,22
1.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	14,00	0,00	0	88.986.000,00	0,00	0
1.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	276,00	0,00	0	294.445.270,00	9.258.000,00	3,14
1.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	24,00	0,00	0	3.842.850.500,00	0,00	0
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya	%	45,00	0,00	0	3.059.529.281,00	5.800.000,00	0,19
1.02.03.1.02	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Pelatihan bagi tenaga kesehatan yang dilaksanakan dalam kurun waktu 1 tahun	Pelatihan	165,00	0,00	0	3.059.529.281,00	5.800.000,00	0,19
1.02.03.1.02.0001	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkatkan	Orang	300,00	0,00	0	3.059.529.281,00	5.800.000,00	0,22
1.02.0.00.0.00.01.0004	UPTD Rumah Sakit Mata Prov. Kaltim								
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Keseekretariatan	Indeks	90,00	0,00	0	14.207.137.205,00	1.998.116.762,00	14,06
		Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti	%	100,00	25,00	25			
1.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu	%	100,00	0,00	0	135.000.000,00	0,00	0
1.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12,00	0,00	0	135.000.000,00	0,00	0
1.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	%	98,00	0,00	0	1.077.930.000,00	0,00	0
1.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	110,00	0,00	0	1.077.930.000,00	0,00	0
1.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyelenggaraan Administrasi Umum di Rumah Sakit	%	100,00	0,00	0	1.772.629.105,00	0,00	0
1.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	3,00	0,00	0	48.921.551,00	0,00	0
1.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	9,00	0,00	0	271.707.554,00	0,00	0
1.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	36,00	0,00	0	1.452.000.000,00	0,00	0
1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jumlah Laporan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100,00	25,00	25	5.510.050.800,00	533.934.644,00	9,69
1.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12,00	3,00	25	1.225.387.200,00	175.245.240,00	14,3
1.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12,00	3,00	25	4.284.663.600,00	358.689.404,00	8,37
1.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor yang berfungsi dengan baik	%	100,00	4,68	4,68	1.631.527.300,00	40.000.000,00	2,45
1.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	9,00	0,84	9,37	427.118.500,00	40.000.000,00	9,37
1.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	30,00	0,00	0	1.204.408.800,00	0,00	0
1.02.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Capaian Realisasi Keuangan Badan Layanan Umum Daerah	%	98,00	34,21	35	4.080.000.000,00	1.424.182.118,00	34,91
1.02.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	UnitKerja	3,00	1,05	35	4.080.000.000,00	1.424.182.118,00	34,91

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan (Rp)	Persen (%)
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Capaian Realisasi Pelayanan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan. UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	%	98,00	4,73	4,83	14.760.295.589,00	49.395.000,00	0,33
1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Capaian Realisasi Pelayanan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan. UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	%	98,00	4,73	4,83	14.491.617.055,00	49.395.000,00	0,34
1.02.02.1.01.0001	Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	Unit	1,00	0,00	0	5.322.789.600,00	0,00	0
1.02.02.1.01.0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Rumah Sakit	Unit	3,00	0,00	0	198.960.000,00	0,00	0
1.02.02.1.01.0010	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	Unit	18,00	0,00	0	8.628.893.215,00	0,00	0
1.02.02.1.01.0017	Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	Unit	80,00	11,59	14	340.974.240,00	49.395.000,00	14,49
1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Capaian Realisasi Pelayanan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan. UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	%	98,00	0,00	0	268.678.534,00	0,00	0
1.02.02.1.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Dokumen	2,00	0,00	0	193.478.534,00	0,00	0
1.02.02.1.02.0022	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Dokumen	1,00	0,00	0	75.200.000,00	0,00	0
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Ditingkatkan Kompetensinya	%	50,00	0,00	0	470.401.000,00	0,00	0
1.02.03.1.02	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Kab/kota yang melakukan pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi Teknis SDM kesehatan	Kab/Kota	5,00	0,00	0	470.401.000,00	0,00	0
1.02.03.1.02.0001	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	Orang	50,00	0,00	0	470.401.000,00	0,00	0
1.02.0.00.0.00.01.0005	UPTD Laboratorium Kesehatan								
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti	%	100,00	25,00	25	11.076.142.480,00	2.145.401.852,00	19,37
		Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	Indeks	90,00	20,00	22,22			
1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Bulan	12,00	3,00	25	3.576.142.480,00	338.556.069,00	9,47
1.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12,00	3,00	25	1.020.000.000,00	84.361.269,00	8,27
1.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	24,00	0,00	0	2.556.142.480,00	254.194.800,00	10,82
1.02.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Terpenuhinya Layanan BLUD Sesuai Standar	%	100,00	25,00	25	7.500.000.000,00	1.806.845.783,00	24,09
1.02.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja	1,00	0,00	0	7.500.000.000,00	1.806.845.783,00	24,09
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Angka Kesakitan	%	10,70	0,00	0	826.457.520,00	0,00	0
1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Bulan Tersedianya Kelengkapan Sarana, Prasarana dan Alkes Sesuai Standar Laboratorium	Bulan	12,00	0,00	0	826.457.520,00	0,00	0
1.02.02.1.01.0010	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	Unit	23,00	0,00	0	283.656.908,00	0,00	0
1.02.02.1.01.0017	Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	Unit	38,00	0,00	0	542.800.612,00	0,00	0
1.02.0.00.0.00.01.0007	Rumah Sakit Umum Daerah KORPRI								
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (RSUD KORPRI)	Indeks	90,00	0,00	0	15.354.371.116,00	1.158.587.365,00	7,55
		Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti (RSUD KORPRI)	%	100,00	0,00	0			
1.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Pelaksanaan Administrasi Keuangan (RSUD KORPRI)	%	100,00	0,00	0	126.720.000,00	0,00	0
1.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12,00	0,00	0	126.720.000,00	0,00	0

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan (Rp)	Persen (%)
1.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (RSUD KORPRI)	%	100,00	0,00	0	1.814.652.867,00	0,00	0
1.02.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	2,00	0,00	0	188.391.867,00	0,00	0
1.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	102,00	0,00	0	1.626.261.000,00	0,00	0
1.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Capaian Penyelenggaraan Administrasi Umum di Rumah Sakit (RSUD KORPRI)	%	100,00	0,00	0	2.012.232.706,00	1.771.000,00	0,09
1.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	3,00	0,00	0	73.980.161,00	0,00	0
1.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	19,00	0,00	0	338.081.488,00	0,00	0
1.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	7,00	0,00	0	115.491.795,00	0,00	0
1.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	3,00	0,00	0	359.164.078,00	0,00	0
1.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2,00	0,00	0	224.165.184,00	0,00	0
1.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12,00	0,00	0	901.350.000,00	1.771.000,00	0,23
1.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintah Daerah (RSUD KORPRI)	%	100,00	0,00	0	747.211.499,00	0,00	0
1.02.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	7,00	0,00	0	215.639.107,00	0,00	0
1.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	39,00	0,00	0	531.572.392,00	0,00	0
1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Laporan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (RSUD KORPRI)	%	100,00	0,00	0	7.843.987.128,00	1.156.816.365,00	14,75
1.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12,00	3,00	25	1.155.030.400,00	135.136.365,00	11,7
1.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12,00	3,00	25	6.688.956.728,00	1.021.680.000,00	15,27
1.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah yang dilakukan secara rutin/berkala (RSUD KORPRI)	%	100,00	0,00	0	809.566.916,00	0,00	0
1.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	11,00	0,00	0	389.488.000,00	0,00	0
1.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	75,00	0,00	0	420.078.916,00	0,00	0
1.02.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Capaian Realisasi Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (RSUD KORPRI)	%	85,00	0,00	0	2.000.000.000,00	0,00	0
1.02.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	UnitKerja	1,00	0,00	0	2.000.000.000,00	0,00	0
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Unit/Instalasi layanan Rumah Sakit yang memenuhi standar (RSUD KORPRI)	%	80,00	0,00	0	10.320.852.884,00	4.414.275,00	0,04
1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan/penunjang pada unit/instalasi sesuai standar (RSUD KORPRI)	%	90,00	0,00	0	9.634.152.150,00	4.414.275,00	0,05
1.02.02.1.01.0010	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	Unit	158,00	0,00	0	5.069.984.932,00	0,00	0
1.02.02.1.01.0017	Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	Unit	403,00	3,00	0,74	364.238.900,00	4.414.275,00	1,21
1.02.02.1.01.0026	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	Unit	1,00	0,00	0	1.336.317.444,00	0,00	0
1.02.02.1.01.0027	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	Paket	10,00	0,00	0	2.863.610.874,00	0,00	0
1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Unit Pelayanan yang Menerapkan Standar Pelayanan (RSUD KORPRI)	%	100,00	0,00	0	558.208.234,00	0,00	0
1.02.02.1.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Dokumen	12,00	0,00	0	290.947.234,00	0,00	0

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan (Rp)	Persen (%)
1.02.02.1.02.0022	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Dokumen	12,00	0,00	0	267.261.000,00	0,00	0
1.02.02.1.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase Penerapan Sistem Informasi Kesehatan Terintegrasi (RSUD KORPRI)	%	95,00	0,00	0	128.492.500,00	0,00	0
1.02.02.1.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Dokumen	2,00	0,00	0	128.492.500,00	0,00	0
1.02.0.00.0.00.01.0009	RSUD A. Wahab Sjahranie di Samarinda								
1.02.0.00.0.00.01.0009	RSUD A. Wahab Sjahranie di Samarinda								
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	Indeks	82,00	34,90	42,56	822.339.531.979,00	187.151.387.422,00	22,76
		Persentase Keluhan Pengguna yang ditindaklanjuti	%	100,00	34,90	34,9			
1.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Rumah Sakit	Dokumen	51,00	19,00	37	651.359.783,00	0,00	0
1.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	13,00	10,00	77	464.558.000,00	0,00	0
1.02.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	38,00	9,00	24	186.801.783,00	0,00	0
1.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran Rumah Sakit	%	88,00	38,00	43,18	270.316.250.589,00	66.118.651.086,00	24,46
1.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	1.401,00	1.150,00	82,08	269.616.233.879,00	66.118.651.086,00	24,52
1.02.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	4,00	0,00	0	309.600.000,00	0,00	0
1.02.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1,00	1,00	100	195.600.000,00	0,00	0
1.02.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	12,00	3,00	25	194.816.710,00	0,00	0
1.02.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Rumah Sakit	Dokumen	20,00	0,00	0	5.300.000,00	0,00	0
1.02.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	2,00	0,00	0	5.300.000,00	0,00	0
1.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Penunjang Administrasi Kepegawaian yang di penuhi Rumah Sakit	Kegiatan	45,00	9,00	20	127.073.820,00	0,00	0
1.02.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	10,00	1,00	10	61.573.820,00	0,00	0
1.02.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	1,00	0,00	0	4.400.000,00	0,00	0
1.02.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	550,00	0,00	0	34.700.000,00	0,00	0
1.02.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	20,00	0,00	0	26.400.000,00	0,00	0
1.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Ketersediaan Penunjang Kegiatan Administrasi Umum yang di fasilitasi	Paket	90,00	0,00	0	2.950.911.624,00	0,00	0
1.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	86,00	0,00	0	1.543.533.071,00	0,00	0
1.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1,00	0,00	0	366.474.473,00	0,00	0
1.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	3,00	0,00	0	229.754.080,00	0,00	0
1.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	112,00	0,00	0	811.150.000,00	0,00	0
1.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Ketersediaan dari Pengadaan Barang dan Penunjang milik Rumah Sakit	Unit	286,00	0,00	0	2.152.061.463,00	0,00	0
1.02.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	14,00	0,00	0	278.208.104,00	0,00	0
1.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	207,00	0,00	0	1.456.115.579,00	0,00	0
1.02.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	65,00	0,00	0	417.737.780,00	0,00	0
1.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Barang Penunjang Milik Rumah Sakit yang dilakukan pemeliharaan	Unit	77,00	0,00	0	1.136.574.700,00	0,00	0
1.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	40,00	0,00	0	279.921.000,00	0,00	0
1.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	15,00	0,00	0	293.506.200,00	0,00	0
1.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	13,00	0,00	0	563.147.500,00	0,00	0

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan (Rp)	Persen (%)
1.02.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Realisasi Target Anggaran Pendapatan dari layanan BLUD	%	89,00	22,00	25	545.000.000.000,00	121.032.736.336,00	22,21
1.02.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	UnitKerja	1,00	1,00	100	545.000.000.000,00	121.032.736.336,00	22,21
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) RS	%	89,00	86,00	97	19.918.662.671,00	0,00	0
1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Nilai ASPAK/Tingkat Kelengkapan Data Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan (SPA)	Nilai	90,00	0,00	0	18.343.661.403,00	0,00	0
1.02.02.1.01.0010	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	Unit	59,00	0,00	0	17.170.400.283,00	0,00	0
1.02.02.1.01.0017	Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	Unit	2.260,00	0,00	0	1.173.261.120,00	0,00	0
1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Angka Kunjungan Rawat Jalan yang terlayani	%	100,00	0,00	0	1.274.282.741,00	0,00	0
1.02.02.1.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dokumen	4,00	0,00	0	519.732.741,00	0,00	0
1.02.02.1.02.0022	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Dokumen	16,00	0,00	0	754.550.000,00	0,00	0
1.02.02.1.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase layanan RS terintegrasi secara sistem	%	60,00	0,00	0	300.718.527,00	0,00	0
1.02.02.1.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Dokumen	26,00	0,00	0	300.718.527,00	0,00	0
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) yang dilatih dan ditingkatkan kompetensinya	%	68,00	3,20	4,71	1.854.406.350,00	0,00	0
1.02.03.1.02	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase peningkatan kompetensi karyawan melalui pelatihan 20 JPL/Thn di RS	%	66,00	2,10	3,18	1.854.406.350,00	0,00	0
1.02.03.1.02.0001	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	Orang	814,00	17,00	2,09	1.854.406.350,00	0,00	0
1.02.0.00.0.00.01.0010	RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo di Balikpapan								
1.02.0.00.0.00.01.0010	RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo di Balikpapan								
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	- Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti - Indeks kualitas layanan kesekretariatan	% Indeks	100,00 70,00	0,00 0,00	0 0	608.498.385.842,00	181.458.521.096,00	29,82
1.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan	12,00	3,00	25	135.177.934.992,00	47.478.852.432,00	35,12
1.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	1.152,00	1.135,00	98,52	135.177.934.992,00	47.478.852.432,00	22,28
1.02.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	UnitKerja	22,00	23,00	104,55	473.320.450.850,00	133.979.668.664,00	28,31
1.02.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	UnitKerja	22,00	23,00	104,55	473.320.450.850,00	133.979.668.664,00	28,31
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit	%	88,50	0,00	0	14.774.606.008,00	0,00	0
1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Tersedianya Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana. Prasarana. Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit Berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	Unit	1.701,00	0,00	0	14.774.606.008,00	0,00	0
1.02.02.1.01.0001	Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	Unit	1,00	0,00	0	8.305.020,00	0,00	0
1.02.02.1.01.0010	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	Unit	199,00	0,00	0	14.444.944.396,00	0,00	0
1.02.02.1.01.0016	Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit	Jumlah Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit yang Disediakan	Unit	1,00	0,00	0	319.136.592,00	0,00	0
1.02.02.1.01.0017	Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	Unit	1.500,00	0,00	0	2.220.000,00	0,00	0
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase SDM kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya	%	60,00	0,00	0	30.000.000,00	0,00	0
1.02.03.1.02	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Terlaksana Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	%	60,00	0,00	0	30.000.000,00	0,00	0
1.02.03.1.02.0001	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	Orang	4,00	0,00	0	30.000.000,00	0,00	0
1.02.0.00.0.00.01.0011	Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam								
1.02.0.00.0.00.01.0011	Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam								
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti	%	100,00	100,00	100	109.786.872.425,00	18.617.274.528,00	16,96

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan (Rp)	Persen (%)
1.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	Indeks	84,00	75,99	90			
		Persentase tersedianya dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi sesuai dengan waktu yang ditetapkan	%	100,00	60,00	60	443.138.000,00	2.810.000,00	0,63
1.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	5,00	0,00	0	140.058.000,00	0,00	0
1.02.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	5,00	1,00	20	303.080.000,00	2.810.000,00	0,93
1.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Gaji dan pelaksanaan penatausahaan keuangan tepat Waktu (RSJD Atma Husada Mahakam)	%	100,00	41,67	41,67	70.584.150.337,00	12.829.430.093,00	18,18
1.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	430,00	310,00	72,09	70.155.070.337,00	12.810.120.093,00	19,34
1.02.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12,00	3,00	25	253.080.000,00	19.310.000,00	7,63
1.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	4,00	0,00	0	176.000.000,00	0,00	0
1.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan pakaian kerja pegawai (RSJD Atma Husada Mahakam)	%	100,00	0,00	0	832.963.050,00	0,00	0
1.02.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	3,00	3,00	100	832.963.050,00	0,00	0
1.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Rumah Sakit	Dokumen	109,00	34,00	31	1.717.930.994,00	35.163.891,00	2,05
X.XX.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	13,00	0,00	0	36.606.722,00	0,00	0
1.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	9,00	0,00	0	120.178.412,00	0,00	0
1.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	13,00	0,00	0	218.799.260,00	0,00	0
1.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1,00	0,00	0	35.346.600,00	0,00	0
1.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	161,00	34,00	21	1.307.000.000,00	35.163.891,00	3,26
1.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketepatan Pengadaan sesuai perencanaan (RSJD Atma Husada Mahakam)	%	100,00	0,00	0	7.487.327.495,00	0,00	0
1.02.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	12,00	0,00	0	5.323.048.000,00	0,00	0
1.02.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	9,00	0,00	0	367.650.887,00	0,00	0
1.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	432,00	0,00	0	1.796.628.608,00	0,00	0
1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Nilai Survei kepuasan pegawai terhadap kenyamanan ditempat kerja (RSJD Atma Husada Mahakam)	%	78,40	0,00	0	5.156.354.050,00	3.325.688.956,00	64,5
1.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1,00	1,00	100	7.500.000,00	7.500.000,00	100
1.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	48,00	12,00	25	1.794.374.050,00	378.909.596,00	21,12
1.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	2,00	3,00	150	3.354.480.000,00	2.939.279.360,00	40,41
1.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Pada RSJD Atma Husada Mahakam Yang Berfungsi Dengan Baik	%	72,21	81,48	113	565.008.499,00	21.996.260,00	3,89
1.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	1,00	1,00	100	42.319.999,00	873.838,00	2,06
1.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	26,00	22,00	84,62	522.688.500,00	21.122.422,00	4,04
1.02.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase pendapatan hasil pelayanan terhadap target BLUD (RSJD Atma Husada Mahakam)	%	100,00	23,23	23	23.000.000.000,00	2.402.185.328,00	10,44
1.02.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	UnitKerja	15,00	15,00	100	23.000.000.000,00	2.402.185.328,00	10,44
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) RS (RSJD Atma Husada Mahakam)	%	93,78	100,00	106,63	4.210.876.575,00	60.581.430,00	1,44
1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Nilai Aspak	%	95,00	93,15	98	3.453.797.055,00	17.619.030,00	0,51
1.02.02.1.01.0002	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	Unit	10,00	0,00	0	148.964.000,00	0,00	0

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan (Rp)	Persen (%)
1.02.02.1.01.0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Rumah Sakit	Unit	1,00	1,00	100	485.359.080,00	17.619.030,00	3,63
1.02.02.1.01.0010	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	Unit	37,00	0,00	0	1.896.366.725,00	0,00	0
1.02.02.1.01.0016	Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit	Jumlah Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit yang Disediakan	Unit	2.410,00	0,00	0	617.383.250,00	0,00	0
1.02.02.1.01.0017	Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	Unit	305,00	0,00	0	182.172.300,00	0,00	0
1.02.02.1.01.0027	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	Paket	3,00	0,00	0	123.551.700,00	0,00	0
1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Angka Kunjungan Rawat Jalan	Orang	28.950,00	8.792,00	30	750.838.000,00	42.962.400,00	5,72
1.02.02.1.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Dokumen	4,00	0,00	0	750.838.000,00	42.962.400,00	5,72
1.02.02.1.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Presentase Jumlah Modul Sistem Informasi Yang Terintegrasi	%	100,00	20,00	20	6.241.520,00	0,00	0
1.02.02.1.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Dokumen	4,00	1,00	25	6.241.520,00	0,00	0
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase SDM Kesehatan Yang Ditingkatkan Kompetensinya (RSJD Atma Husada Mahakam)	%	93,00	43,00	46,24	1.453.016.000,00	9.265.251,00	0,64
1.02.03.1.02	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Diklat Dan Atau Penelitian Yang Dilaksanakan	Laporan	57,00	5,00	9	1.453.016.000,00	9.265.251,00	0,64
1.02.03.1.02.0001	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkatkan	Orang	430,00	183,00	42,56	1.453.016.000,00	9.265.251,00	0,76
1.03.1.04.5.05.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat								
1.03.1.04.5.05.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat								
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	Indeks	74,60	0,00	0	141.828.550.712,00	25.460.218.589,00	17,95
		Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti	%	100,00	0,00	0			
1.03.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang ditetapkan Tepat Waktu	%	84,00	0,00	0	1.602.629.283,00	0,00	0
1.03.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2,00	0,00	0	661.015.687,00	0,00	0
1.03.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	4,00	0,00	0	199.999.698,00	0,00	0
1.03.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	4,00	0,00	0	49.999.795,00	0,00	0
1.03.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	4,00	0,00	0	191.614.412,00	0,00	0
1.03.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	20,00	0,00	15	499.999.691,00	0,00	0
1.03.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang Mendapatkan Layanan Administrasi Keuangan Tepat Waktu	%	100,00	0,00	0	123.737.585.095,00	13.690.711.333,00	11,06
1.03.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	11.648,00	2.912,00	25	121.960.121.470,00	13.690.711.333,00	11,23
1.03.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	6,00	0,00	0	1.573.320.000,00	0,00	0
1.03.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	1,00	0,00	0	59.146.340,00	0,00	0
1.03.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	1,00	0,00	0	41.876.505,00	0,00	0
1.03.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	1,00	0,00	0	64.236.710,00	0,00	0
1.03.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	1,00	0,00	0	38.884.070,00	0,00	0
1.03.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD yang dilakukan penatausahaan	%	100,00	0,00	0	882.840.381,00	0,00	0
1.03.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1,00	0,00	0	15.405.525,00	0,00	0
1.03.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1,00	0,00	0	853.509.331,00	0,00	0

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan (Rp)	Persen (%)
1.03.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1,00	0,00	0	13.925.525,00	0,00	0
1.03.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	%	100,00	0,00	0	1.135.118.440,00	0,00	0
1.03.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	2,00	0,00	0	528.129.000,00	0,00	0
1.03.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	1,00	0,00	0	33.464.720,00	0,00	0
1.03.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	1,00	0,00	0	34.964.720,00	0,00	0
1.03.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	30,00	0,00	0	450.000.000,00	0,00	0
1.03.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	200,00	0,00	0	88.560.000,00	0,00	0
1.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Umum	%	100,00	0,00	0	5.468.052.528,00	309.500.000,00	5,66
1.03.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1,00	0,00	0	99.999.948,00	0,00	0
1.03.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	7,00	3,00	42,86	3.006.168.295,00	219.500.000,00	7,3
1.03.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	3,00	0,00	0	99.212.620,00	0,00	0
1.03.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	40,00	1,00	2,5	243.140.005,00	0,00	0
1.03.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	5,00	1,00	20	221.911.900,00	0,00	0
1.03.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12,00	3,00	25	1.716.500.000,00	90.000.000,00	5,24
1.03.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1,00	0,00	0	46.760.000,00	0,00	0
1.03.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	1,00	0,00	0	34.359.760,00	0,00	0
1.03.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	%	100,00	0,00	0	104.746.420,00	0,00	0
1.03.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	1,00	0,00	0	39.877.000,00	0,00	0
1.03.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	1,00	0,00	0	64.869.420,00	0,00	0
1.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100,00	0,00	0	2.986.051.100,00	10.828.563.112,00	362,64
1.03.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12,00	3,00	25	89.637.600,00	0,00	0
1.03.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12,00	3,00	25	2.896.413.500,00	482.985.872,00	16,68
1.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi dengan Baik	%	100,00	0,00	0	5.911.527.465,00	631.444.144,00	10,68
1.03.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	31,00	0,00	0	1.484.167.500,00	0,00	0
1.03.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	4,00	1,00	25	786.601.000,00	37.600.000,00	4,78
1.03.01.1.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Unit	1,00	0,00	0	3.640.000,00	0,00	0
1.03.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	3,00	1,00	33,33	588.992.000,00	197.124.144,00	33,47
1.03.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	4,00	1,00	25	3.048.126.965,00	396.720.000,00	13,02
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Panjang pantai kritis yang ditangani **	Km	0,52	0,00	0	172.827.858.706,00	0,00	0
		Pengurangan luas genangan banjir perkotaan	Ha	147,00	0,00	0			
		Luas sawah yang terlayani jaringan irigasi teknis pada daerah irigasi kewenangan provinsi (Ha)	Ha	10.285,00	0,00	0			
		Penambahan kapasitas air baku untuk air bersih	lt/detik	875,00	0,00	0			
1.03.02.1.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Panjang segmen sungai yang ditangani	meter	3.129,00	0,00	0	154.759.190.386,00	0,00	0
		Pantai Kritis yang ditangani **	Lokasi	5,00	0,00	0			
		Infrastruktur Air Baku yang ditangani	Unit	11,00	0,00	0			
1.03.02.1.01.0075	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi yang Ditingkatkan Kapasitasnya melalui Koordinasi dan Sinkronisasi	Lembaga	1,00	0,00	0	283.051.640,00	0,00	0

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan (Rp)	Persen (%)
1.03.02.1.01.0079	Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	KM	3,13	0,00	0	35.318.689.500,00	0,00	0
1.03.02.1.01.0087	Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi	Dokumen	1,00	0,00	0	203.811.640,00	0,00	0
1.03.02.1.01.0090	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi yang Dibina dan Diberdayakan	Lembaga	6,00	0,00	0	4.616.271.157,00	0,00	0
1.03.02.1.01.0096	Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Dibangun	KM	0,52	0,00	0	17.615.449.614,00	0,00	0
1.03.02.1.01.0103	Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi	Dokumen	12,00	0,00	0	1.718.835.440,00	0,00	0
1.03.02.1.01.0116	Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku	Jumlah Sumur Air Tanah untuk Air Baku yang Dibangun	Titik	3,00	0,00	0	7.104.859.500,00	0,00	0
1.03.02.1.01.0120	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun	Unit	0,00	0,00	0	10.006.373,00	0,00	0
1.03.02.1.01.0121	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun	Dokumen	2,00	0,00	0	11.736.218.902,00	0,00	0
1.03.02.1.01.0122	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun	Dokumen	8,00	0,00	0	4.593.900.000,00	0,00	0
1.03.02.1.01.0123	Pembangunan Unit Air Baku	Jumlah Unit Air Baku yang Dibangun	Unit	8,00	0,00	0	71.558.096.620,00	0,00	0
1.03.02.1.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Panjang Jaringan Irigasi berfungsi Baik	meter	3.236,00	0,00	0	18.068.668.320,00	0,00	0
1.03.02.1.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	KM	3,06	0,00	0	11.032.978.320,00	0,00	0
1.03.02.1.02.0016	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa	Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Direhabilitasi	KM	0,18	0,00	0	2.214.690.000,00	0,00	0
1.03.02.1.02.0032	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun	Dokumen	10,00	0,00	0	4.821.000.000,00	0,00	0
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Kesiapan Infrastruktur Air Curah Lintas Kabupaten/Kota	%	83,40	0,00	0	6.286.770.600,00	0,00	0
1.03.03.1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah komponen infrastruktur SPAM Regional yang ditangani	unit	1,00	0,00	0	6.286.770.600,00	0,00	0
1.03.03.1.01.0014	Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang Dibina dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Kabupaten/Kota	10,00	0,00	0	544.814.600,00	0,00	0
1.03.03.1.01.0015	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	Dokumen	2,00	0,00	0	5.498.910.000,00	0,00	0
1.03.03.1.01.0017	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota yang dibangun	Liter/Detik	0,00	0,00	0	20.000.000,00	0,00	0
1.03.03.1.01.0021	Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang difasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Kabupaten/Kota	5,00	0,00	0	223.046.000,00	0,00	0
1.03.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase Kesiapan/Daya Dukung Infrastruktur Persampahan Dalam Penanganan Sampah Domestik	%	25,00	0,00	0	1.513.523.900,00	0,00	0
1.03.04.1.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Jumlah dokumen kesiapan infrastruktur pengelolaan persampahan regional	Dokumen	1,00	0,00	0	1.513.523.900,00	0,00	0
1.03.04.1.01.0014	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan	Orang	30,00	0,00	0	353.183.900,00	0,00	0
1.03.04.1.01.0016	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan yang disusun	Dokumen	1,00	0,00	0	1.160.340.000,00	0,00	0
1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Kesiapan Infrastruktur Air Limbah Lintas Kabupaten/Kota	%	42,00	0,00	0	2.330.070.300,00	0,00	0
1.03.05.1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	Jumlah dokumen kriteria kesiapan pengolahan air limbah domestik regional	Dokumen	2,00	0,00	0	2.330.070.300,00	0,00	0
1.03.05.1.01.0014	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Orang	30,00	0,00	0	353.183.900,00	0,00	0

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan (Rp)	Persen (%)
1.03.05.1.01.0015	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun	Dokumen	2,00	0,00	0	1.340.930.000,00	0,00	0
1.03.05.1.01.0016	Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang difasilitasi Kerja sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	kabupaten/kota	2,00	0,00	0	635.956.400,00	0,00	0
1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase panjang drainase yang ditangani	%	13,91	0,00	0	17.865.028.396,00	0,00	0
1.03.06.1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi	Panjang Drainase yang Berfungsi Baik	meter	924,00	0,00	0	17.865.028.396,00	0,00	0
1.03.06.1.01.0008	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun	Sistem Drainase Perkotaan	5,00	0,00	0	16.294.828.396,00	0,00	0
1.03.06.1.01.0013	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Dokumen	5,00	0,00	0	1.570.200.000,00	0,00	0
1.03.07	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Persentase penanganan infrastruktur permukiman di kawasan strategis provinsi	%	75,00	0,00	0	55.409.724.300,00	0,00	0
1.03.07.1.01	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah permukiman di KSP dan sekitarnya yang ditingkatkan penyediaan infrastruktur	Kawasan	2,00	0,00	0	55.409.724.300,00	0,00	0
1.03.07.1.01.0030	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi yang dioptimalisasi	Unit	5,00	0,00	0	55.409.724.300,00	0,00	0
1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Jumlah Gedung Untuk Kepentingan Strategis Provinsi yang Ditangani	%	83,58	0,00	0	528.438.341.868,00	0,00	0
1.03.08.1.01	Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah Bangunan Gedung yang selesai dilakukan Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai	unit	9,00	0,00	0	528.438.341.868,00	0,00	0
1.03.08.1.01.0012	Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung kepada Penyelenggara Bangunan Gedung, dan Masyarakat	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung kepada Penyelenggara Bangunan Gedung, dan Masyarakat	Orang	30,00	0,00	0	48.537.268,00	0,00	0
1.03.08.1.01.0013	Pelaksanaan Pengelolaan Rumah Negara	Jumlah Rumah Negara yang Dikelola	Rumah Negara	0,00	0,00	0	20.000.000,00	0,00	0
1.03.08.1.01.0015	Pendaftaran Huruf Daftar Nomor (HDNo) Bangunan Gedung Negara	Jumlah Bangunan Gedung Negara yang Terdaftar Huruf Daftar Nomor (HDNo)	Bangunan Gedung Negara	0,00	0,00	0	20.000.000,00	0,00	0
1.03.08.1.01.0016	Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi yang Diubahsuaikan	Bangunan Gedung	25,00	0,00	0	509.051.817.400,00	0,00	0
1.03.08.1.01.0017	Penyelenggaraan Penerbitan dan Perpanjangan Lisensi Arsitek	Jumlah Lisensi Arsitek yang Diterbitkan dan Diperpanjang	Lisensi	15,00	0,00	0	101.875.500,00	0,00	0
1.03.08.1.01.0018	Pembinaan dan Pengawasan Pembangunan Bangunan Gedung Negara kepada Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pembinaan dan Pengawasan Pembangunan Bangunan Gedung Negara	Kabupaten/Kota	10,00	0,00	0	226.147.200,00	0,00	0
1.03.08.1.01.0019	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Dokumen	26,00	0,00	0	18.969.964.500,00	0,00	0
1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase jumlah kawasan yang ditata	%	66,67	0,00	0	7.949.967.934,00	0,00	0
1.03.09.1.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Kawasan	1,00	0,00	0	7.949.967.934,00	0,00	0
1.03.09.1.01.0008	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata	Kawasan	1,00	0,00	0	3.624.863.600,00	0,00	0
1.03.09.1.01.0009	Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang Disusun	Dokumen	1,00	0,00	0	1.094.340.000,00	0,00	0
1.03.09.1.01.0010	Supervisi Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang mendapatkan Supervisi dalam Penataan	Dokumen	1,00	0,00	0	3.185.750.134,00	0,00	0
1.03.09.1.01.0012	Pembinaan Penataan Bangunan dan Lingkungan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pembinaan Penataan Bangunan dan Lingkungan	kabupaten/kota	10,00	0,00	0	45.014.200,00	0,00	0
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penambahan Ruas Jalan Baru	ruas	2,00	0,00	0	2.303.232.171.304,00	0,00	0

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan (Rp)	Persen (%)
1.03.10.1.01	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Rasio Kemantapan Jalan Provinsi	%	86,23	0,00	0	2.303.232.171.304,00	0,00	0
		Panjang jalan dengan kondisi mantap	Km	792,61	0,00	0			
1.03.10.1.01.0024	Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Provinsi	Panjang jalan baru yang terbangun	Km	43,50	0,00	0	62.529.606.532,00	0,00	0
		Panjang Jalan Kewenangan Provinsi yang Penyelenggaraannya Diawasi	KM	88,29	0,00	0			
1.03.10.1.01.0031	Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Direkonstruksi	KM	88,29	0,00	0	1.057.782.413.780,00	0,00	0
1.03.10.1.01.0032	Pembangunan Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dibangun	Jembatan	6,00	0,00	0	267.503.550.980,00	0,00	0
1.03.10.1.01.0040	Pelebaran Jalan Menuju Standar	Panjang Jalan yang Dilebarkan Menuju Standar	KM	10,00	0,00	0	73.119.470.980,00	0,00	0
1.03.10.1.01.0041	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	Dokumen	37,00	0,00	0	38.755.668.316,00	0,00	0
1.03.10.1.01.0042	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun	KM	23,07	0,00	0	798.684.329.030,00	0,00	0
1.03.10.1.01.0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	KM	938,85	0,00	0	3.156.765.490,00	0,00	0
1.03.10.1.01.0044	Pengelolaan Leger Jalan	Jumlah Dokumen Leger Jalan yang Dikelola	Dokumen	1,00	0,00	0	1.700.366.196,00	0,00	0
1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Bersertifikat	%	60,13	0,00	0	15.076.565.326,00	0,00	0
1.03.11.1.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Jumlah tenaga kerja konstruksi kualifikasi ahli yang bersertifikat	orang	1.000,00	0,00	0	11.468.511.480,00	0,00	0
1.03.11.1.01.0009	Penyediaan Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Jumlah Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Disediakan	Orang	120,00	0,00	0	1.268.439.340,00	0,00	0
1.03.11.1.01.0010	Penyediaan Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	Jumlah Dokumen Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Disediakan	Dokumen	1,00	0,00	0	64.000.000,00	0,00	0
1.03.11.1.01.0011	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Dilatih	Orang	1.000,00	0,00	0	3.706.494.016,00	0,00	0
1.03.11.1.01.0012	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya	Lembaga	11,00	0,00	0	2.172.578.120,00	0,00	0
1.03.11.1.01.0013	Penyediaan SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	Jumlah Dokumen SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Disediakan	Dokumen	1,00	0,00	0	64.000.000,00	0,00	0
1.03.11.1.01.0014	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli Difasilitasi Sertifikasi	Orang	1.000,00	0,00	0	3.991.000.004,00	0,00	0
1.03.11.1.01.0015	Pemantauan dan Evaluasi Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Dipantau dan Dievaluasi Pelatihannya	Orang	1.000,00	0,00	0	129.000.000,00	0,00	0
1.03.11.1.01.0016	Identifikasi Potensi Kerja Sama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Diidentifikasi Potensi Kerja Sama dan Pemberdayaannya	Lembaga	10,00	0,00	0	73.000.000,00	0,00	0
1.03.11.1.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi	Jumlah layanan yang disediakan	Layanan	1,00	0,00	0	335.306.128,00	0,00	0
1.03.11.1.02.0006	Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan	LayananInformasi	1,00	0,00	0	73.000.000,00	0,00	0
1.03.11.1.02.0007	Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Disediakan	PerangkatPendukung	1,00	0,00	0	138.108.416,00	0,00	0
1.03.11.1.02.0008	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi yang Disediakan	Dokumen	1,00	0,00	0	60.509.040,00	0,00	0
1.03.11.1.02.0009	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan SIPJAKI	Jumlah Pengelola SIPJAKI yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Orang	60,00	0,00	0	63.688.672,00	0,00	0
1.03.11.1.03	Kebijakan Khusus Terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi pada APBD Provinsi	Dokumen	3,00	0,00	0	3.272.747.718,00	0,00	0
1.03.11.1.03.0004	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan	PaketPekerjaan	200,00	0,00	0	530.975.368,00	0,00	0
1.03.11.1.03.0005	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Pemanfaatan Produk	BangunanKonstruksi	50,00	10,00	20	241.421.010,00	0,00	0
1.03.11.1.03.0006	Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk	Lembaga	11,00	0,00	0	1.942.136.820,00	0,00	0
1.03.11.1.03.0007	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Usaha	BadanUsaha	100,00	24,00	24	231.301.010,00	0,00	0

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan (Rp)	Persen (%)
1.03.11.1.03.0008	Penyusunan Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Provinsi	Jumlah Dokumen Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Provinsi yang Disusun	Dokumen	1,00	0,00	0	326.913.510,00	0,00	0
1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Skoring Penyelenggaraan Penataan Ruang	%	83,90	0,00	0	13.160.866.399,00	0,00	0
1.03.12.1.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi	Skor Kegiatan Penetapan RTRW dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi	%	13,35	0,00	0	2.046.786.628,00	0,00	0
1.03.12.1.01.0003	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Pergub selain RTRW Provinsi	Dokumen	3,00	0,00	0	1.824.166.128,00	0,00	0
1.03.12.1.01.0009	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan Pedoman Bidang Penataan ruang	Jumlah pemangku kepentingan yang mengikuti kegiatan sosialisasi	Orang	50,00	0,00	0	222.620.500,00	0,00	0
1.03.12.1.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang	Skor Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang	%	27,88	0,00	0	4.045.653.673,00	0,00	0
1.03.12.1.02.0004	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	Jumlah Laporan Peningkatan Pemahaman dan Tanggung Jawab Masyarakat	Laporan	1,00	0,00	0	491.479.790,00	0,00	0
1.03.12.1.02.0005	Peningkatan kompetensi SDM bidang penataan ruang	Jumlah SDM yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan	Orang	80,00	0,00	0	311.384.510,00	0,00	0
1.03.12.1.02.0006	Monitoring dan Evaluasi Penyusunan dan Penetapan RTRW dan RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi penyusunan dan penetapan RTRW dan RDTR Kabupaten/Kota	Dokumen	1,00	0,00	0	372.100.320,00	0,00	0
1.03.12.1.02.0008	Pemberian Bimbingan, Supervisi dan Konsultasi Penyusunan Rencana Tata Ruang kepada Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Bimbingan, Supervisi, dan Konsultasi Penyusunan RTRW dan RDTR kepada Kabupaten/Kota	Laporan	2,00	0,00	0	929.118.763,00	0,00	0
1.03.12.1.02.0011	Koordinasi Fasilitas Pembahasan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah berita acara pembahasan RTRW Kab/Kota	BeritaAcara	3,00	0,00	0	349.538.210,00	0,00	0
1.03.12.1.02.0013	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Provinsi	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Provinsi	Dokumen	1,00	0,00	0	1.592.032.080,00	0,00	0
1.03.12.1.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	Skor Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	%	26,73	0,00	0	3.587.202.455,00	0,00	0
1.03.12.1.03.0003	Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Berusaha	Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku	Layanan	6,00	0,00	0	313.999.542,00	0,00	0
1.03.12.1.03.0004	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	Jumlah laporan kegiatan koordinasi penyelenggaraan penataan ruang	Laporan	1,00	0,00	0	685.684.122,00	0,00	0
1.03.12.1.03.0005	Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Non Berusaha	Jumlah layanan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku	Layanan	6,00	0,00	0	275.599.830,00	0,00	0
1.03.12.1.03.0006	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	Dokumen	4,00	0,00	0	819.479.445,00	0,00	0
1.03.12.1.03.0007	Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang	Dokumen	2,00	0,00	0	1.492.439.516,00	0,00	0
1.03.12.1.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	Skor Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	%	15,94	0,00	0	3.481.223.643,00	0,00	0
1.03.12.1.04.0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Dokumen	2,00	0,00	0	912.599.119,00	0,00	0
1.03.12.1.04.0005	Pelaksanaan Audit Tata Ruang	Jumlah kasus indikasi pelanggaran pemanfaatan Ruang	Kasus	3,00	0,00	0	441.079.853,00	0,00	0
1.03.12.1.04.0006	Pengawasan TURBINLAK dan Pengawasan Fungsi dan Manfaat	Dokumen hasil Penilaian kinerja Pengaturan, Pembinaan dan Pelaksanaan Penataan Ruang dan Penilaian Kinerja Fungsi dan Manfaat	Dokumen	1,00	0,00	0	282.968.035,00	0,00	0
1.03.12.1.04.0008	Pengenaan Sanksi Administratif terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang dalam RTR	Jumlah Kasus yang dikenakan sanksi administratif	Kasus	1,00	0,00	0	283.791.833,00	0,00	0
1.03.12.1.04.0011	Penilaian Perwujudan RTR	Jumlah dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Perwujudan RTR	Dokumen	2,00	0,00	0	914.786.137,00	0,00	0
1.03.12.1.04.0012	Penyelesaian Sengketa Penataan Ruang	Jumlah dokumen penyelesaian sengketa penatan ruang	BeritaAcara	1,00	0,00	0	346.999.333,00	0,00	0
1.03.12.1.04.0014	Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK	Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Dokumen	1,00	0,00	0	298.999.333,00	0,00	0
1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase Penyelenggaraan SPM Perumahan	%	47,89	0,00	0	356.240.000,00	0,00	0
1.04.02.1.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Jumlah Dokumen Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Dokumen	2,00	0,00	0	336.240.000,00	0,00	0
1.04.02.1.01.0007	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Provinsi	Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Provinsi	Dokumen	1,00	0,00	0	336.240.000,00	0,00	0
1.04.02.1.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Jumlah Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi yang Terbangun	Unit	100,00	0,00	0	10.000.000,00	0,00	0

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan (Rp)	Persen (%)
1.04.02.1.03.0011	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Provinsi	Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Provinsi	UnitRumah	0,00	0,00	0	10.000.000,00	0,00	0
1.04.02.1.04	Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Perumahan	Laporan	1,00	0,00	0	10.000.000,00	0,00	0
1.04.02.1.04.0003	Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Provinsi	Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Provinsi	Dokumen	1,00	0,00	0	10.000.000,00	0,00	0
1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Pengurangan Luas Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi	Ha	156,59	0,00	0	122.417.786.239,00	0,00	0
1.04.03.1.01	Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Laporan	4,00	0,00	0	1.571.019.476,00	0,00	0
1.04.03.1.01.0017	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	Laporan	4,00	0,00	0	1.571.019.476,00	0,00	0
1.04.03.1.02	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Luas kawasan kumuh kewenangan provinsi yang ditangani	Ha	48,58	0,00	0	120.846.766.763,00	0,00	0
1.04.03.1.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan/ Pemukiman Kembali Permukiman Kumuh dan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan/Permukiman Kembali Permukiman Kumuh dan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Laporan	3,00	0,00	0	1.276.918.000,00	0,00	0
1.04.03.1.02.0003	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Diperbaiki	UnitRumah	1.000,00	0,00	0	28.927.462.000,00	0,00	0
1.04.03.1.02.0014	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Luas Permukiman Kumuh Dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Dipugar	Ha	89,66	0,00	0	90.642.386.763,00	0,00	0
1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase Penanganan PSU Permukiman	%	52,57	0,00	0	33.124.018.000,00	0,00	0
1.04.05.1.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Jumlah lokasi permukiman yang disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum untuk Menunjang Fungsi Permukiman	Lokasi	6,00	0,00	0	33.124.018.000,00	0,00	0
1.04.05.1.01.0006	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	Jumlah Lokasi PSU Permukiman yang Dilaksanakan Perbaikan	Lokasi	9,00	0,00	0	33.124.018.000,00	0,00	0
1.03.1.04.0.00.01.0003	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah II								
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti	%	100,00	0,00	0	26.338.645.874,00	895.589.370,00	3,4
		Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	indeks	74,60	0,00	0			
1.03.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang Mendapatkan Layanan Administrasi Keuangan Tepat Waktu	%	100,00	0,00	0	532.160.000,00	57.300.000,00	10,77
1.03.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	1,00	1,00	100	478.680.000,00	28.650.000,00	6,34
1.03.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	1,00	0,00	0	17.442.000,00	0,00	0
1.03.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	1,00	0,00	0	6.436.000,00	0,00	0
1.03.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	12,00	3,00	25	17.922.000,00	0,00	0
1.03.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	12,00	3,00	25	11.680.000,00	0,00	0
1.03.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD yang dilakukan penatausahaan	%	100,00	0,00	0	8.020.448.187,00	0,00	0
1.03.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	12,00	3,00	25	10.494.000,00	0,00	0
1.03.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	12,00	3,00	25	7.992.772.187,00	0,00	0
1.03.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	12,00	3,00	25	17.182.000,00	0,00	0
1.03.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	%	100,00	0,00	0	487.238.000,00	0,00	0
1.03.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	12,00	3,00	25	15.282.000,00	0,00	0

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan (Rp)	Persen (%)
1.03.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	12,00	3,00	25	21.956.000,00	0,00	0
1.03.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	33,00	0,00	0	240.000.000,00	0,00	0
1.03.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	14,00	0,00	0	210.000.000,00	0,00	0
1.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Umum	%	100,00	0,00	0	1.420.681.357,00	151.694.050,00	10,68
1.03.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1,00	0,00	0	12.261.532,00	0,00	0
1.03.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	9,00	0,00	0	406.964.911,00	0,00	0
1.03.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	3,00	3,00	100	291.936.466,00	43.871.625,00	15,23
1.03.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2,00	0,00	0	37.258.000,00	0,00	0
1.03.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	1.477,00	450,00	30,47	11.520.600,00	0,00	0
1.03.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12,00	3,00	25	632.500.000,00	31.975.400,00	5,61
1.03.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1,00	0,00	0	13.594.648,00	0,00	0
1.03.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	1,00	0,00	0	14.645.200,00	0,00	0
1.03.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	%	100,00	0,00	0	13.425.717.090,00	0,00	0
1.03.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	3,00	0,00	0	593.516.000,00	0,00	0
1.03.01.1.07.0003	Pengadaan Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	Unit	14,00	0,00	0	12.832.201.090,00	0,00	0
1.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100,00	0,00	0	312.982.200,00	77.028.720,00	24,61
1.03.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12,00	3,00	25	11.500.000,00	0,00	0
1.03.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12,00	3,00	25	301.482.200,00	38.514.360,00	12,78
1.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi dengan Baik	%	100,00	0,00	0	2.139.419.040,00	609.566.600,00	28,49
1.03.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	35,00	12,00	34,29	247.934.000,00	30.000.000,00	12,1
1.03.01.1.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	Unit	32,00	7,00	21,88	1.104.402.240,00	199.909.300,00	18,1
1.03.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	139,00	28,00	20,14	49.520.000,00	0,00	0
1.03.01.1.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Unit	10,00	0,00	0	13.812.000,00	0,00	0
1.03.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	5,00	1,00	20	723.750.800,00	74.874.000,00	10,35
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Penambahan kapasitas air baku untuk air bersih	Lt/detik	875,00	0,00	0	5.840.177.100,00	2.243.578.200,00	38,42
		Pengurangan luas genangan banjir perkotaan	Ha	147,00	0,00	0			
		Luas sawah yang terlayani jaringan irigasi teknis pada daerah irigasi kewenangan provinsi	Ha	10.285,00	0,00	0			
1.03.02.1.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Panjang segmen sungai yang ditangani	meter	3.129,00	0,00	0	499.991.700,00	0,00	0
1.03.02.1.01.0105	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara	Unit	1,00	0,00	0	499.991.700,00	0,00	0
1.03.02.1.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Panjang Jaringan Irigasi berfungsi Baik	km	3.236,00	809,00	25	5.340.185.400,00	2.243.578.200,00	42,01
1.03.02.1.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	KM	21,00	11,45	54,52	5.340.185.400,00	1.121.789.100,00	21,01
1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase panjang drainase yang ditangani	%	13,91	0,00	0	5.999.922.000,00	0,00	0
1.03.06.1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi	Panjang Drainase yang Berfungsi Baik	meter	924,00	0,00	0	5.999.922.000,00	0,00	0
1.03.06.1.01.0010	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara	Sistem Drainase Perkotaan	9,00	1,00	11,11	5.999.922.000,00	0,00	0
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Rasio Kemantapan Jalan Provinsi	%	86,23	0,00	0	46.494.977.150,00	7.423.916.000,00	15,97

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan (Rp)	Persen (%)
1.03.10.1.01	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Panjang jalan dengan kondisi mantap	Km	792,61	199,00	25	46.494.977.150,00	7.423.916.000,00	15,97
1.03.10.1.01.0026	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	Jembatan	60,00	15,00	25	6.879.209.600,00	854.224.000,00	12,42
1.03.10.1.01.0030	Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	KM	6,00	2,60	43,33	28.111.331.650,00	2.109.832.700,00	7,51
1.03.10.1.01.0033	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	KM	11,00	0,77	6,96	11.504.435.900,00	747.901.300,00	6,5
1.03.1.04.0.00.01.0005	UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi								
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti	%	100,00	0,00	0	5.421.466.398,00	0,00	0
		Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	indeks	74,60	0,00	0			
1.03.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang Mendapatkan Layanan Administrasi Keuangan Tepat Waktu	%	100,00	0,00	0	181.232.000,00	0,00	0
1.03.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	1,00	0,00	0	104.040.000,00	0,00	0
1.03.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	1,00	0,00	0	24.384.000,00	0,00	0
1.03.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	1,00	0,00	0	24.306.000,00	0,00	0
1.03.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	12,00	0,00	0	10.220.000,00	0,00	0
1.03.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	1,00	0,00	0	18.282.000,00	0,00	0
1.03.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD yang dilakukan penatausahaan	%	100,00	0,00	0	41.648.000,00	0,00	0
1.03.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1,00	0,00	0	5.162.000,00	0,00	0
1.03.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1,00	0,00	0	18.256.000,00	0,00	0
1.03.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1,00	0,00	0	18.230.000,00	0,00	0
1.03.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	%	100,00	0,00	0	461.396.986,00	0,00	0
1.03.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	2,00	0,00	0	126.246.986,00	0,00	0
1.03.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	1,00	0,00	0	23.188.000,00	0,00	0
1.03.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	1,00	0,00	0	962.000,00	0,00	0
1.03.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	31,00	0,00	0	311.000.000,00	0,00	0
1.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Umum	%	100,00	0,00	0	3.346.830.568,00	0,00	0
1.03.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1,00	0,00	0	53.167.021,00	0,00	0
1.03.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1,00	0,00	0	16.349.780,00	0,00	0
1.03.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	4,00	0,00	0	161.503.091,00	0,00	0
1.03.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	7,00	0,00	0	2.490.354.825,00	0,00	0
1.03.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1,00	0,00	0	20.659.760,00	0,00	0
1.03.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	2,00	0,00	0	18.682.091,00	0,00	0
1.03.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12,00	0,00	0	566.294.000,00	0,00	0
1.03.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1,00	0,00	0	19.196.000,00	0,00	0
1.03.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	1,00	0,00	0	624.000,00	0,00	0
1.03.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	%	100,00	0,00	0	502.381.744,00	0,00	0
1.03.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	1,00	0,00	0	39.877.000,00	0,00	0
1.03.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	44,00	0,00	0	462.504.744,00	0,00	0
1.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100,00	0,00	0	337.949.800,00	0,00	0

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan (Rp)	Persen (%)
1.03.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12,00	0,00	0	18.008.000,00	0,00	0
1.03.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12,00	3,00	25	319.941.800,00	0,00	0
1.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi dengan Baik	%	100,00	0,00	0	550.027.300,00	0,00	0
1.03.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	11,00	0,00	0	165.533.000,00	0,00	0
1.03.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	86,00	0,00	0	73.028.700,00	0,00	0
1.03.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1,00	0,00	0	311.465.600,00	0,00	0
1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Cakupan Pengujian Standar Mutu Konstruksi (Lab)	%	71,11	0,00	0	472.483.600,00	0,00	0
1.03.11.1.03	Kebijakan Khusus Terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi pada APBD Provinsi	Dokumen	3,00	0,00	0	472.483.600,00	0,00	0
1.03.11.1.03.0005	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Pemanfaatan Produk	BangunanKonstruksi	3,00	0,00	0	472.483.600,00	0,00	0
1.03.1.04.5.05.01.0002	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah I								
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	indeks	74,60	0,00	0	6.838.397.786,00	521.843.215,00	7,63
		Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti	%	100,00	0,00	0			
1.03.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang Mendapatkan Layanan Administrasi Keuangan Tepat Waktu	%	100,00	80,00	80	339.886.000,00	0,00	0
1.03.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	1,00	0,25	25	323.880.000,00	0,00	0
1.03.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	12,00	3,00	25	16.006.000,00	0,00	0
1.03.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD yang dilakukan penatausahaan	%	100,00	0,00	0	45.104.588,00	0,00	0
1.03.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1,00	0,00	0	14.860.000,00	0,00	0
1.03.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1,00	0,00	0	16.299.088,00	0,00	0
1.03.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1,00	0,00	0	13.945.500,00	0,00	0
1.03.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	%	100,00	0,00	0	377.861.000,00	0,00	0
1.03.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1,00	0,00	0	62.721.000,00	0,00	0
1.03.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	1,00	0,00	0	15.140.000,00	0,00	0
1.03.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	10,00	0,00	0	150.000.000,00	0,00	0
1.03.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	10,00	0,00	0	150.000.000,00	0,00	0
1.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Umum	%	100,00	0,00	0	1.290.298.308,00	39.715.144,00	3,08
1.03.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	3,00	0,00	0	129.893.789,00	0,00	0
1.03.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	7,00	0,00	0	449.619.187,00	0,00	0
1.03.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2,00	0,00	0	46.060.360,00	0,00	0
1.03.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	1,00	0,00	0	9.696.000,00	0,00	0
1.03.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12,00	0,00	0	597.330.000,00	39.715.144,00	6,65
1.03.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1,00	0,00	0	53.500.972,00	0,00	0
1.03.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	1,00	0,00	0	4.198.000,00	0,00	0
1.03.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	%	100,00	0,00	0	2.255.745.790,00	0,00	0

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan (Rp)	Persen (%)
1.03.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	5,00	0,00	0	1.477.064.000,00	0,00	0
1.03.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	39,00	0,00	0	778.681.790,00	0,00	0
1.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100,00	0,00	0	495.836.400,00	0,00	0
1.03.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12,00	0,00	0	17.954.000,00	0,00	0
1.03.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12,00	0,00	0	477.882.400,00	0,00	0
1.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi dengan Baik	%	100,00	0,00	0	2.033.665.700,00	482.128.071,00	23,71
1.03.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	26,00	3,00	11,54	165.682.800,00	25.533.700,00	15,41
1.03.01.1.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	Unit	19,00	1,00	5,26	935.139.000,00	208.405.170,00	22,29
1.03.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	67,00	0,00	0	79.680.000,00	0,00	0
1.03.01.1.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Unit	1,00	0,00	0	6.409.900,00	0,00	0
1.03.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	4,00	3,00	75	846.754.000,00	248.189.201,00	29,31
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Penambahan kapasitas air baku untuk air bersih	lt/detik	875,00	0,00	0	8.000.009.100,00	1.635.309.276,00	20,44
		Luas sawah yang terlayani jaringan irigasi teknis pada daerah irigasi kewenangan provinsi (Ha)	Ha	10.285,00	0,00	0			
		Pengurangan luas genangan banjir perkotaan	Ha	147,00	0,00	0			
1.03.02.1.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Panjang segmen sungai yang ditangani	meter	3.129,00	675,55	21,59	2.500.012.400,00	539.841.396,00	21,59
1.03.02.1.01.0078	Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Direhabilitasi	Unit	2,00	0,00	0	500.001.000,00	0,00	0
1.03.02.1.01.0099	Rehabilitasi Kanal Banjir	Panjang Kanal Banjir yang Direhabilitasi	KM	1,20	0,24	20	1.499.996.300,00	292.868.172,00	19,52
1.03.02.1.01.0107	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang Dipelihara	KM	0,18	0,09	50,28	500.015.100,00	246.973.224,00	49,39
1.03.02.1.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Panjang Jaringan Irigasi berfungsi Baik	meter	3.236,00	647,20	20	5.499.996.700,00	1.095.467.880,00	19,92
1.03.02.1.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	KM	5,78	1,16	20,07	5.499.996.700,00	1.095.467.880,00	19,92
1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Jumlah Gedung Untuk Kepentingan Strategis Provinsi yang Ditangani	%	83,58	0,00	0	653.065.900,00	0,00	0
1.03.08.1.01	Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah Bangunan Gedung yang selesai dilakukan Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsual	unit	1,00	0,00	0	653.065.900,00	0,00	0
1.03.08.1.01.0020	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Provinsi yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala	BangunanGedung	2,00	0,00	0	653.065.900,00	0,00	0
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Rasio Kemantapan Jalan Status Provinsi	%	86,23	0,00	0	52.667.889.900,00	3.955.411.681,00	7,51
1.03.10.1.01	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Panjang jalan dengan kondisi mantap	Km	792,61	0,00	0	52.667.889.900,00	3.955.411.681,00	7,51
1.03.10.1.01.0026	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	Jembatan	6,00	3,00	50	1.502.948.790,00	155.265.956,00	10,33
1.03.10.1.01.0030	Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	KM	8,50	0,10	1,18	7.998.835.910,00	0,00	0
1.03.10.1.01.0033	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	KM	30,00	1,47	4,9	43.166.105.200,00	3.800.145.725,00	8,8
1.03.1.04.5.05.01.0004	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah III								
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	%	72,20	0,00	0	3.406.660.778,00	51.804.884,00	1,52
		Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti	%	100,00	0,00	0			
1.03.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang Mendapatkan Layanan Administrasi Keuangan Tepat Waktu	%	100,00	0,00	0	356.449.500,00	0,00	0
1.03.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	1,00	0,00	0	327.240.000,00	0,00	0
1.03.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	1,00	0,00	0	4.820.760,00	0,00	0
1.03.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	1,00	0,00	0	10.407.600,00	0,00	0
1.03.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	1,00	0,00	0	8.910.380,00	0,00	0
1.03.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	1,00	0,00	0	5.070.760,00	0,00	0

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan (Rp)	Persen (%)
1.03.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD yang dilakukan penatausahaan	%	100,00	0,00	0	207.878.760,00	0,00	0
1.03.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1,00	0,00	0	4.820.760,00	0,00	0
1.03.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1,00	0,00	0	198.033.000,00	0,00	0
1.03.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1,00	0,00	0	5.025.000,00	0,00	0
1.03.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	%	100,00	0,00	0	261.387.120,00	0,00	0
1.03.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1,00	0,00	0	38.487.120,00	0,00	0
1.03.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	1,00	0,00	0	4.950.000,00	0,00	0
1.03.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	1,00	0,00	0	4.950.000,00	0,00	0
1.03.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	5,00	0,00	0	75.000.000,00	0,00	0
1.03.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	5,00	0,00	0	138.000.000,00	0,00	0
1.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Umum	%	100,00	0,00	0	873.887.962,00	0,00	0
1.03.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	3,00	0,00	0	31.112.030,00	0,00	0
1.03.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	2,00	0,00	0	63.434.016,00	0,00	0
1.03.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	2,00	1,00	50	14.742.756,00	0,00	0
1.03.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2,00	1,00	50	54.896.565,00	0,00	0
1.03.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	3,00	1,00	33,33	56.603.794,00	0,00	0
1.03.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	1,00	1,00	100	3.878.400,00	0,00	0
1.03.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12,00	2,00	17	636.862.000,00	0,00	0
1.03.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1,00	0,00	0	7.758.570,00	0,00	0
1.03.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	1,00	0,00	0	4.599.831,00	0,00	0
1.03.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	%	100,00	0,00	0	42.098.908,00	0,00	0
1.03.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	2,00	0,00	0	42.098.908,00	0,00	0
1.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100,00	0,00	0	292.522.540,00	0,00	0
1.03.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12,00	0,00	0	32.502.000,00	0,00	0
1.03.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12,00	2,00	16,67	226.269.000,00	0,00	0
1.03.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	1,00	0,00	0	33.751.540,00	0,00	0
1.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi dengan Baik	%	100,00	0,00	0	1.372.435.988,00	51.804.884,00	3,77
1.03.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	47,00	2,00	4,26	70.900.000,00	0,00	0
1.03.01.1.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	Unit	16,00	0,00	0	693.601.800,00	0,00	0
1.03.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	66,00	0,00	0	63.480.676,00	0,00	0
1.03.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	12,00	12,00	100	533.754.812,00	51.804.884,00	9,71
1.03.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	6,00	0,00	0	10.698.700,00	0,00	0
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Luas sawah yang terlayani jaringan irigasi teknis pada daerah irigasi kewenangan provinsi (Ha)	Ha	10.285,00	0,00	0	6.999.997.100,00	985.107.240,00	14,07

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan (Rp)	Persen (%)
1.03.02.1.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Panjang Jaringan Irigasi berfungsi Baik	meter	3.236,00	0,00	0	6.999.997.100,00	985.107.240,00	14,07
1.03.02.1.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	KM	2,22	0,00	0	2.333.456.700,00	0,00	0
1.03.02.1.02.0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	KM	87,00	18,37	21,11	4.666.540.400,00	985.107.240,00	21,11
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Rasio Kemantapan Jalan Status Provinsi	%	86,23	0,00	0	69.731.191.330,00	2.318.670.675,00	3,33
1.03.10.1.01	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Panjang jalan dengan kondisi mantap	km	792,61	0,00	0	69.731.191.330,00	2.318.670.675,00	3,33
1.03.10.1.01.0026	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	Jembatan	20,00	0,00	0	1.999.996.320,00	0,00	0
1.03.10.1.01.0030	Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	KM	1,90	0,00	0	3.410.440.000,00	0,00	0
1.03.10.1.01.0033	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	KM	74,00	2,67	3,61	64.320.755.010,00	2.318.670.675,00	3,6
1.05.0.00.0.00.01.0000	Satuan Polisi Pamong Praja								
1.05.0.00.0.00.01.0000	Satuan Polisi Pamong Praja								
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	Indeks	90,00	0,00	0	40.362.061.575,00	5.840.903.478,00	14,47
1.05.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang ditetapkan tepat waktu	%	100,00	0,00	0	921.167.576,00	99.983.720,00	10,85
1.05.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	4,00	0,00	0	485.357.226,00	59.018.300,00	13,79
1.05.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	6,00	0,00	0	435.810.350,00	40.965.420,00	10,28
1.05.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran	%	100,00	0,00	0	37.289.618.720,00	3.453.354.870,00	9,26
1.05.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	222,00	0,00	0	36.833.716.620,00	3.366.832.970,00	11,2
1.05.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12,00	0,00	0	348.950.000,00	56.700.000,00	16,25
1.05.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	3,00	0,00	0	106.952.100,00	3.100.000,00	2,9
1.05.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM Aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	%	100,00	0,00	0	408.243.700,00	0,00	0
1.05.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	3,00	0,00	0	339.383.700,00	0,00	0
1.05.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	1,00	0,00	0	15.660.000,00	0,00	0
1.05.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	11,00	0,00	0	53.200.000,00	0,00	0
1.05.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana kantor yang berfungsi baik	%	100,00	0,00	0	683.082.439,00	110.189.034,00	16,13
1.05.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1,00	0,00	0	10.875.742,00	0,00	0
1.05.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	4,00	0,00	0	25.192.697,00	0,00	0
1.05.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12,00	0,00	0	647.014.000,00	82.550.385,00	14,48
1.05.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan BMD	%	100,00	0,00	0	4.322.000,00	0,00	0
1.05.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	3,00	0,00	0	4.322.000,00	0,00	0
1.05.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang tepat waktu	%	100,00	0,00	0	484.790.140,00	2.131.275.854,00	439,63
1.05.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12,00	0,00	0	261.625.340,00	50.486.317,00	19,3
1.05.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12,00	0,00	0	223.164.800,00	2.080.789.537,00	29,77
1.05.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan untuk berfungsi baik	%	100,00	0,00	0	570.837.000,00	46.100.000,00	8,08
1.05.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	1,00	0,00	0	23.136.000,00	0,00	0
1.05.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	21,00	0,00	0	420.557.000,00	46.100.000,00	10,96
1.05.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	95,00	0,00	0	29.860.000,00	0,00	0
1.05.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1,00	0,00	0	97.284.000,00	0,00	0
1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	%	100,00	0,00	0	2.277.661.924,00	351.165.586,00	15,42

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan (Rp)	Persen (%)
1.05.02.1.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Pelanggaran dan pengaduan trantibum dalam Kab/Kota yang ditangani	Kasus	4,00	0,00	0	1.679.550.003,00	313.427.086,00	18,66
		Jumlah Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan	Orang	150,00	0,00	0			
1.05.02.1.01.0010	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Pelindungan Masyarakat	Jumlah SDM Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Orang	150,00	0,00	0	425.362.652,00	63.411.710,00	20,58
1.05.02.1.01.0014	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	Dokumen	2,00	0,00	0	136.123.590,00	15.595.934,00	11,46
1.05.02.1.01.0015	Penyediaan Layanan Dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Pemberian Pelayanan Dasar Kepada Warga Yang Terdampak Penegakan Perda dan Perkada	Laporan	2,00	0,00	0	700.000,00	0,00	0
1.05.02.1.01.0016	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Laporan	2,00	0,00	0	572.126.630,00	126.979.930,00	22,19
1.05.02.1.01.0017	Pencegahan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan dan Pengawasan	laporan	4,00	0,00	0	545.237.131,00	107.439.512,00	19,71
1.05.02.1.02	Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakan	PerdadanPerkada	5,00	0,00	0	549.511.921,00	37.738.500,00	6,87
1.05.02.1.02.0001	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Laporan	5,00	0,00	0	325.324.440,00	2.380.000,00	0,77
1.05.02.1.02.0002	Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Laporan	5,00	0,00	0	61.583.375,00	12.190.000,00	19,79
1.05.02.1.02.0003	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Sesuai SOP	Laporan	5,00	0,00	0	66.659.000,00	23.168.500,00	34,76
1.05.02.1.02.0009	Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Pemberkasan Hasil Penyidikan atas Pelanggaran Perda	Dokumen	1,00	0,00	0	95.945.106,00	0,00	0
1.05.02.1.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas PPNS	Orang	1,00	0,00	0	48.600.000,00	0,00	0
1.05.02.1.03.0001	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda	Laporan	1,00	0,00	0	48.600.000,00	0,00	0
1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Penurunan Jumlah Kejadian Kebakaran	Jumlah	222,00	0,00	0	397.084.983,00	57.599.898,00	14,51
1.05.04.1.01	Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	Jumlah Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran dan Non Kebakaran	Dokumen	4,00	0,00	0	397.084.983,00	57.599.898,00	14,51
1.05.04.1.01.0002	Penyusunan dan Pemutakhiran Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran yang sah dan legal	Dokumen	1,00	0,00	0	129.492.100,00	3.400.000,00	2,63
1.05.04.1.01.0004	Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi Antar Daerah Berbatasan, Antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi Antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	Dokumen	5,00	0,00	0	129.868.205,00	46.015.498,00	35,43
1.05.04.1.01.0019	Pemutakhiran Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran	Jumlah Dokumen Informasi Daerah (Kabupaten/Kota) Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran yang Sah dan Legal	Dokumen	1,00	0,00	0	83.145.000,00	0,00	0
1.05.04.1.01.0023	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Laporan	1,00	0,00	0	54.579.678,00	8.184.400,00	15
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						513.340.518,00	5.840.903.478,00	1.137,82
X.XX.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						112.165.988,00	99.983.720,00	89,14
X.XX.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1,00	0,00	0	8.554.570,00	0,00	0
X.XX.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1,00	0,00	0	8.554.570,00	0,00	0
X.XX.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	16,00	0,00	0	95.056.848,00	0,00	0
X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						146.905.140,00	3.453.354.870,00	2.350,74

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan (Rp)	Persen (%)
X.XX.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	12,00	0,00	0	146.905.140,00	26.721.900,00	18,19
X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						254.269.390,00	110.189.034,00	43,34
X.XX.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1,00	0,00	0	254.269.390,00	27.638.649,00	10,87
1.05.0.00.0.00.03.0000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah								
1.05.0.00.0.00.03.0000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah								
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti	%	80,00	0,00	0	22.106.416.375,00	3.814.586.079,00	17,26
		Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	Indeks	85,00	0,00	38,41			
1.05.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang ditetapkan tepat waktu	%	100,00	19,47	19,47	1.244.381.231,00	40.000.000,00	3,21
1.05.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	6,00	0,00	0	324.549.164,00	0,00	0
1.05.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1,00	1,00	100	63.830.000,00	0,00	0
1.05.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1,00	0,00	0	67.359.671,00	0,00	0
1.05.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1,00	0,00	0	3.620.000,00	0,00	0
1.05.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1,00	0,00	0	3.539.671,00	0,00	0
1.05.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	8,00	0,00	0	555.745.000,00	40.000.000,00	7,29
1.05.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	3,00	1,00	33	225.737.725,00	0,00	0
1.05.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu	%	100,00	0,00	0	17.547.494.555,00	2.498.178.489,00	14,24
1.05.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	97,00	25,00	25,77	16.953.815.985,00	2.498.178.489,00	14,74
1.05.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12,00	0,00	0	378.360.000,00	0,00	0
1.05.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12,00	0,00	0	83.559.710,00	0,00	0
1.05.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	12,00	0,00	0	85.360.000,00	0,00	0
1.05.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	12,00	0,00	0	5.607.944,00	0,00	0
1.05.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	4,00	0,00	0	21.253.944,00	0,00	0
1.05.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	4,00	0,00	0	19.536.972,00	0,00	0
1.05.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	%	100,00	0,00	0	9.340.000,00	0,00	0
1.05.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1,00	0,00	0	480.000,00	0,00	0
1.05.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1,00	0,00	0	8.400.000,00	0,00	0
1.05.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1,00	0,00	0	460.000,00	0,00	0
1.05.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM Aparatur yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	%	100,00	0,00	0	15.233.027,00	0,00	0
1.05.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1,00	0,00	0	20.780,00	0,00	0
1.05.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	4,00	0,00	0	480.000,00	0,00	0
1.05.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	2,00	0,00	0	480.000,00	0,00	0
1.05.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	18,00	0,00	0	10.408.247,00	0,00	0

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan (Rp)	Persen (%)
1.05.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	25,00	0,00	0	3.844.000,00	0,00	0
1.05.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Fasilitas Operasional Kantor	%	100,00	0,00	0	1.135.320.789,00	47.706.000,00	4,2
1.05.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1,00	0,00	0	2.848.563,00	0,00	0
1.05.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	8,00	0,00	0	134.297.165,00	47.706.000,00	35,52
1.05.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	14,00	0,00	0	171.752.951,00	0,00	0
1.05.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	7,00	0,00	0	30.527.470,00	0,00	0
1.05.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	143,00	0,00	0	790.196.000,00	0,00	0
1.05.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	6,00	0,00	0	5.218.640,00	0,00	0
1.05.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	1,00	0,00	0	480.000,00	0,00	0
1.05.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	%	100,00	0,00	0	32.000,00	0,00	0
1.05.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	2,00	0,00	0	32.000,00	0,00	0
1.05.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kelancaran Pelaksanaan Urusan Kantor	%	100,00	0,00	0	1.566.593.700,00	1.147.411.090,00	73,24
1.05.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1,00	0,00	0	1.590.000,00	0,00	0
1.05.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12,00	3,00	25	429.017.700,00	84.479.784,00	19,69
1.05.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12,00	3,00	25	1.135.986.000,00	1.062.931.306,00	26,21
1.05.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor yang berfungsi dengan baik	%	100,00	0,00	0	588.021.073,00	81.290.500,00	13,82
1.05.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	44,00	0,00	0	469.000.100,00	81.290.500,00	17,33
1.05.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	44,00	0,00	0	66.822.500,00	0,00	0
1.05.01.1.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Unit	2,00	2,00	100	2.933.333,00	0,00	0
1.05.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	3,00	0,00	0	49.265.140,00	0,00	0
1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Pemulihan Pasca Bencana	%	100,00	0,00	0	36.029.583.625,00	0,00	0
1.05.03.1.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi	Tersedianya fasilitator KIE di setiap Kabupaten/Kota	%	100,00	0,00	0	125.254.975,00	0,00	0
1.05.03.1.01.0004	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Ancaman)	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan dan aparat di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota yang menerima sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi rawan bencana (per jenis ancaman) lintas Kabupaten/Kota	Orang	40,00	0,00	0	125.254.975,00	0,00	0
1.05.03.1.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	%	100,00	0,00	0	21.314.304.415,00	0,00	0
1.05.03.1.02.0013	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan bencana	Jumlah laporan yang memuat kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana	Kawasan	4,00	0,00	0	385.368.100,00	0,00	0
1.05.03.1.02.0023	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah warga negara dan aparat di kawasan risiko bencana tinggi lintas Kabupaten/Kota yang terlibat geladi kesiapsiagaan mengetahui dan memahami mekanisme dan prosedur tetap (SOP) pengendalian operasi penanganan darurat bencana	Orang	1.000,00	0,00	0	197.518.700,00	0,00	0
1.05.03.1.02.0027	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana	Jumlah personil TRC tingkat Provinsi yang memiliki sertifikasi kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana	Orang	30,00	0,00	0	165.312.074,00	0,00	0
1.05.03.1.02.0028	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana	Jumlah keluarga yang berada di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota yang memperoleh peralatan perlindungan diri dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Keluarga	60,00	0,00	0	136.666.150,00	0,00	0

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan (Rp)	Persen (%)
1.05.03.1.02.0029	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Dokumen Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB) dengan proses bisnis dan prosedur tetap yang dilegalkan dan mendapatkan dukungan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana	Dokumen	3,00	0,00	0	20.251.339.391,00	0,00	0
1.05.03.1.02.0030	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan dan aparaturnya di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota yang meningkat kemampuan dan ketrampilannya dalam pencegahan dan mitigasi bencana	Orang	30,00	0,00	0	178.100.000,00	0,00	0
1.05.03.1.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	%	100,00	0,00	0	1.041.169.330,00	0,00	0
1.05.03.1.03.0025	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	Laporan	12,00	0,00	0	81.000.000,00	0,00	0
1.05.03.1.03.0028	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Orang	800,00	0,00	0	543.059.330,00	0,00	0
1.05.03.1.03.0030	Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	Laporan	12,00	0,00	0	417.110.000,00	0,00	0
1.05.03.1.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	%	100,00	0,00	0	13.548.854.905,00	0,00	0
1.05.03.1.04.0006	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Keluarga	60,00	0,00	0	124.942.790,00	0,00	0
1.05.03.1.04.0007	Penanganan Pasca Bencana Provinsi	Jumlah Dokumen Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) yang Disusun	Dokumen	7,00	0,00	0	13.093.780.795,00	0,00	0
1.05.03.1.04.0016	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Daerah	Jumlah Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	Dokumen	1,00	0,00	0	2.289.470,00	0,00	0
1.05.03.1.04.0018	Penguatan Kelembagaan Bencana Daerah	Jumlah Dokumen yang dilegalkan	Dokumen	2,00	0,00	0	781.000,00	0,00	0
1.05.03.1.04.0019	Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	Jumlah dokumen kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di seluruh tahapan (pra, saat dan pascabencana)	Dokumen	1,00	0,00	0	42.152.000,00	0,00	0
1.05.03.1.04.0022	Penyusunan, Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah dan jenis Data dan Informasi Kebencanaan yang terintegrasi dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)	Dokumen	1,00	0,00	0	36.497.500,00	0,00	0
1.05.03.1.04.0023	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan dalam Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) tahun	kabupaten/kota	10,00	0,00	0	248.411.350,00	0,00	0
1.06.0.00.0.00.01.0000	Dinas Sosial								
1.06.0.00.0.00.01.0000	Dinas Sosial								
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	%	84,00	21,00	25	62.957.258.591,00	12.591.921.997,00	20,00
		Persentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti	%	100,00	25,00	25			
1.06.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan / Dokumen Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	Laporan	5,00	2,00	40	1.372.351.380,00	41.277.460,00	3,01
X.XX.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	7,00	2,00	28,57	547.708.012,00	27.267.500,00	5,33
X.XX.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	2,00	0,00	0	67.800.000,00	0,00	0
1.06.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	2,00	0,00	0	17.400.000,00	0,00	0
1.06.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	5,00	2,00	40	577.129.900,00	14.009.960,00	2,43
X.XX.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	2,00	0,00	0	162.313.468,00	0,00	0
1.06.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan yang disusun pada kegiatan Administrasi Keuangan Dinas Sosial Prov. Kaltim	Laporan	6,00	2,00	33,33	52.632.012.218,00	8.095.143.654,00	15,38
1.06.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	346,00	346,00	100	51.614.545.844,00	8.014.831.654,00	15,6
1.06.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	2,00	2,00	100	502.320.000,00	77.520.000,00	15,43
1.06.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	2,00	0,00	0	201.943.660,00	780.000,00	0,45

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan (Rp)	Persen (%)
1.06.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	2,00	0,00	0	11.553.019,00	312.000,00	2,7
1.06.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	4,00	0,00	0	216.413.357,00	0,00	0
1.06.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	2,00	0,00	0	85.236.338,00	1.700.000,00	1,99
1.06.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan yang disusun pada kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah	Laporan	3,00	0,00	0	12.090.358,00	0,00	0
1.06.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1,00	0,00	0	4.067.020,00	0,00	0
1.06.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1,00	0,00	0	3.956.318,00	0,00	0
1.06.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1,00	0,00	0	4.067.020,00	0,00	0
1.06.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan pada Pengadaan Pakaian dan Pendidikan dan Pelatihan kepegawaian dalam menunjang administrasi Kepegawaian perangkat daerah	Kegiatan	4,00	1,00	25	405.758.723,00	75.096.044,00	18,51
1.06.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1,00	0,00	0	118.170.000,00	0,00	0
1.06.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	2,00	0,00	0	58.183.000,00	0,00	0
1.06.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	3,00	1,00	33,33	168.080.723,00	75.096.044,00	44,68
X.XX.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	22,00	0,00	0	61.325.000,00	0,00	0
1.06.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pembuatan Laporan Administrasi Umum Dinas Sosial Prov. Kaltim	Laporan	6,00	1,00	16,67	3.568.720.933,00	172.644.850,00	4,84
1.06.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1,00	0,00	0	74.189.245,00	0,00	0
1.06.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1,00	1,00	100	1.528.397.990,00	45.000.000,00	2,94
1.06.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1,00	0,00	0	330.873.880,00	11.848.000,00	3,58
1.06.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	2,00	0,00	0	1.319.692.838,00	111.619.350,00	8,96
1.06.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1,00	0,00	0	110.804.980,00	0,00	0
1.06.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	1,00	0,00	0	204.762.000,00	4.177.500,00	2,04
1.06.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan yang disusun pada kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Laporan	3,00	0,00	0	1.260.195.533,00	0,00	0
1.06.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	4,00	0,00	0	766.404.000,00	0,00	0
1.06.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	28,00	0,00	0	86.332.103,00	0,00	0
1.06.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	61,00	0,00	0	407.459.430,00	0,00	0
1.06.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan yang disusun pada kegiatan Penyediaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	4,00	4,00	100	2.125.871.446,00	4.058.570.841,00	190,91
1.06.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1,00	1,00	33,33	46.566.224,00	7.596.000,00	16,31
1.06.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1,00	1,00	100	624.964.600,00	125.835.073,00	20,13
1.06.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	1,00	1,00	100	5.994.730,00	0,00	0
1.06.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1,00	1,00	100	1.448.345.892,00	3.925.139.768,00	58,16
1.06.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan yang disusun pada kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Dinas Sosial Prov. Kaltim	Laporan	6,00	3,00	50	1.580.258.000,00	149.189.148,00	9,44
1.06.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	3,00	3,00	100	483.424.000,00	115.879.448,00	23,97

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan (Rp)	Persen (%)
1.06.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	31,00	3,00	9,68	174.344.000,00	6.192.700,00	3,55
1.06.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	200,00	15,00	7,5	623.460.000,00	27.117.000,00	4,35
1.06.01.1.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Unit	8,00	0,00	0	28.600.000,00	0,00	0
1.06.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1,00	0,00	0	25.310.000,00	0,00	0
1.06.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1,00	0,00	0	245.120.000,00	0,00	0
1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase lembaga sosial/mitra sosial yang diberdayakan	%	64,00	0,00	0	2.634.874.132,00	48.393.942,00	1,84
1.06.02.1.01	Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Kegiatan Rekomendasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Dokumen	15,00	2,00	13,33	157.510.048,00	25.780.942,00	16,37
1.06.02.1.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Dokumen	15,00	2,00	13,33	157.510.048,00	25.780.942,00	19,01
1.06.02.1.02	Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang diberdayakan	PSKS	4,00	0,00	0	2.477.364.084,00	22.613.000,00	0,91
1.06.02.1.02.0001	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi	Orang	40,00	0,00	0	394.111.940,00	0,00	0
1.06.02.1.02.0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi yang Meningkatkan Kapasitasnya	Orang	105,00	0,00	0	1.093.847.410,00	0,00	0
1.06.02.1.02.0003	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Provinsi	Keluarga	10,00	0,00	0	119.053.940,00	0,00	0
1.06.02.1.02.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Provinsi	Lembaga	30,00	0,00	0	870.350.794,00	22.613.000,00	2,73
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PMKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam Pant	%	100,00	100,00	100	21.344.454.223,00	352.180.149,00	1,65
1.06.04.1.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Pant	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar yang di berikan pelayanan, rehabilitasi serta bantuan sosial	Orang	50,00	50,00	100	1.804.028.330,00	135.953.182,00	7,54
1.06.04.1.01.0001	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang	50,00	50,00	100	1.193.309.530,00	115.088.182,00	9,64
1.06.04.1.01.0002	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Orang	50,00	0,00	0	245.096.750,00	16.455.000,00	6,71
1.06.04.1.01.0003	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Orang	20,00	0,00	0	26.905.800,00	0,00	0
1.06.04.1.01.0004	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	Orang	1,00	0,00	0	2.450.760,00	0,00	0
1.06.04.1.01.0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Pant	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Pant Kewenangan Provinsi	Orang	50,00	0,00	0	22.822.215,00	0,00	0
1.06.04.1.01.0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Orang	50,00	0,00	0	139.800.000,00	4.410.000,00	3,37
1.06.04.1.01.0007	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	Orang	50,00	0,00	0	94.785.000,00	0,00	0
1.06.04.1.01.0008	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Provinsi	Orang	10,00	0,00	0	1.700.000,00	0,00	0
1.06.04.1.01.0009	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Orang	50,00	0,00	0	8.500.000,00	0,00	0
1.06.04.1.01.0010	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang	10,00	0,00	0	42.000.000,00	0,00	0
1.06.04.1.01.0011	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang	2,00	0,00	0	16.800.000,00	0,00	0
1.06.04.1.01.0012	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitas Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar	Dokumen	1,00	0,00	0	9.858.275,00	0,00	0
1.06.04.1.05	Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Pant	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA yang di berikan pelayanan, rehabilitasi serta bantuan sosial	Orang	8.000,00	50,00	0,63	19.540.425.893,00	216.226.967,00	1,11

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan (Rp)	Persen (%)
1.06.04.1.05.0001	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang	7.500,00	0,00	0	15.251.851.850,00	0,00	0
1.06.04.1.05.0002	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Orang	200,00	0,00	0	374.947.890,00	0,00	0
1.06.04.1.05.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Orang	175,00	0,00	0	305.187.700,00	0,00	0
1.06.04.1.05.0007	Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar	Jumlah Orang yang Diberikan Bimbingan Keterampilan Dasar Kewenangan Provinsi	Orang	25,00	0,00	0	368.365.480,00	0,00	0
1.06.04.1.05.0010	Pemulangan ke Daerah Asal	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Provinsi yang Dipulangkan ke Daerah Asal	Orang	100,00	50,00	50	472.292.075,00	82.742.582,00	18,56
1.06.04.1.05.0011	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA	Dokumen	20,00	10,00	50	2.767.780.898,00	133.484.385,00	5,15
1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Jumlah Keluarga Miskin Yang Memiliki Usaha Ekonomi Produktif	Orang	10.360,00	0,00	0	21.108.112.272,00	18.904.350,00	0,09
1.06.05.1.01	Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal	Jumlah Pengangkatan Anak Antar WNI dan Pengangkatan Anak Oleh Orang Tua Tunggal	Orang	18,00	0,00	0	164.961.500,00	9.850.000,00	5,97
1.06.05.1.01.0001	Pengangkatan Anak antar WNI	Jumlah Anak yang mendapatkan Orang tua Asuh/Orang Tua Angkat sesuai ketentuan yang berlaku kewenangan Provinsi	Orang	15,00	0,00	0	146.681.500,00	9.850.000,00	6,72
1.06.05.1.01.0002	Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal	Jumlah Anak yang mendapatkan Orang Tua Tunggal sesuai ketentuan yang berlaku kewenangan Provinsi	Orang	3,00	0,00	0	18.280.000,00	0,00	0
1.06.05.1.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	Terlaksananya Pengentasan dan Penanganan Kemiskinan Kewenangan Provinsi	Orang	13.542,00	0,00	0	20.943.150.772,00	9.054.350,00	0,04
1.06.05.1.02.0001	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Provinsi	Keluarga	9.042,00	0,00	0	13.060.500.000,00	0,00	0
1.06.05.1.02.0002	Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Lintas Kabupaten/Kota	Keluarga	9.042,00	0,00	0	673.790.737,00	0,00	0
1.06.05.1.02.0003	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Provinsi	Orang	4.500,00	0,00	0	7.208.860.035,00	9.054.350,00	0,13
1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase penanganan korban bencana alam yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi	%	100,00	100,00	100	9.472.597.558,00	1.663.903.500,00	17,57
1.06.06.1.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	Jumlah Kegiatan Penanganan Korban Bencana Alam dan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pasca bencana	Orang	17.870,00	6.314,00	35,33	9.472.597.558,00	1.663.903.500,00	17,57
1.06.06.1.01.0001	Penyediaan Permakanan	Jumlah Pengungsi yang mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam masa tanggap darurat kewenangan Provinsi	Orang	17.100,00	6.314,00	36,92	6.353.887.210,00	1.555.253.500,00	24,62
1.06.06.1.01.0002	Penyediaan Sandang	Jumlah orang yang mendapatkan pakaian dan kelengkapan lainnya yang tersedia pada masa tanggap darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Provinsi	Orang	1.000,00	0,00	0	349.591.900,00	0,00	0
1.06.06.1.01.0003	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Kapasitas Tempat penampungan pengungsi Kewngn Provinsi	Unit	290,00	20,00	6,9	692.818.750,00	81.650.000,00	12,72
1.06.06.1.01.0004	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah orang yang mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Provinsi	Orang	900,00	0,00	0	222.035.350,00	0,00	0
1.06.06.1.01.0005	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang mendapatkan layanan dukungan psikososial kewenangan Provinsi	Orang	600,00	357,00	59,5	1.854.264.348,00	27.000.000,00	1,52
1.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi yang dikelola dengan baik	lokasi	1,00	0,00	0	853.068.208,00	0,00	0
1.06.07.1.01	Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Jumlah Lokasi Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Lokasi	1,00	0,00	0	853.068.208,00	0,00	0
1.06.07.1.01.0001	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Jumlah dokumen hasil rehabilitasi serta pemeliharaan sarana dan prasarana Taman Makam Pahlawan	Dokumen	1,00	0,00	0	559.034.319,00	0,00	0
1.06.07.1.01.0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Jumlah Makam yang terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Makam	1,00	0,00	0	76.593.889,00	0,00	0
1.06.07.1.01.0003	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Jumlah Tenaga pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Laporan	1,00	0,00	0	217.440.000,00	0,00	0

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan (Rp)	Persen (%)
1.06.0.00.0.00.01.0002	UPTD Panti Sosial Tresna Werdha Nirwana Puri								
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD PMKS LANJUT USIA)	%	84,00	21,00	25	1.705.576.269,00	183.086.947,00	10,73
		Persentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti	%	100,00	25,00	25			
1.06.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pembayaran Gaji, Tunjangan, Honorarium ASN dan NON ASN	laporan	1,00	1,00	100	79.320.000,00	17.250.000,00	21,75
1.06.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	1,00	1,00	100	79.320.000,00	17.250.000,00	21,75
1.06.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Pengadaan Pakaian dan Pendidikan dan Pelatihan kepegawaian perangkat daerah	Kegiatan	1,00	0,00	0	66.560.000,00	0,00	0
1.06.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1,00	0,00	0	66.560.000,00	0,00	0
1.06.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dalam menunjang akuntabilitas daerah	Kegiatan	4,00	3,00	75	469.091.971,00	57.512.419,00	12,26
1.06.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1,00	0,00	0	31.402.765,00	0,00	0
1.06.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5,00	1,00	20	191.531.676,00	43.001.419,00	22,45
1.06.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	3,00	1,00	33	39.207.530,00	3.872.000,00	9,88
1.06.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	2,00	1,00	50	206.950.000,00	10.639.000,00	5,14
1.06.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	2,00	0,00	0	179.104.698,00	0,00	0
1.06.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	7,00	0,00	0	168.678.335,00	0,00	0
1.06.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	60,00	0,00	0	10.426.363,00	0,00	0
1.06.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	2,00	2,00	100	599.711.600,00	97.320.528,00	16,23
1.06.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1,00	1,00	100	386.462.000,00	59.511.628,00	15,4
1.06.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	2,00	1,00	50	213.249.600,00	37.808.900,00	17,73
1.06.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Peralatan dan Gedung Kantor yang dipelihara setiap bulannya	Unit	305,00	10,00	3,28	311.788.000,00	11.004.000,00	3,53
1.06.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	8,00	1,00	12,5	180.550.000,00	1.332.000,00	0,74
1.06.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	290,00	9,00	3,1	101.238.000,00	9.672.000,00	9,55
1.06.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	7,00	0,00	0	30.000.000,00	0,00	0
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PMKS Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam Panti	%	100,00	100,00	100	5.768.100.747,00	821.965.290,00	14,25
1.06.04.1.03	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang dibina, dilayani, dilindungi dan direhabilitasi oleh Dinas Sosial	Orang	126,00	126,00	100	5.768.100.747,00	821.965.290,00	14,25
1.06.04.1.03.0001	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang	126,00	126,00	100	2.753.225.100,00	454.541.990,00	16,51
1.06.04.1.03.0002	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Orang	126,00	0,00	0	134.820.000,00	0,00	0
1.06.04.1.03.0003	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Orang	126,00	0,00	0	1.045.024.830,00	0,00	0
1.06.04.1.03.0004	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	Orang	30,00	0,00	0	29.680.080,00	0,00	0
1.06.04.1.03.0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Orang	126,00	0,00	0	61.015.000,00	0,00	0
1.06.04.1.03.0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Orang	126,00	126,00	100	579.739.200,00	24.200.000,00	4,17
1.06.04.1.03.0007	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	Orang	126,00	126,00	100	1.011.737.660,00	332.948.000,00	32,91

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan (Rp)	Persen (%)
1.06.04.1.03.0008	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Lanjut Usia Terlantar Kewenangan Provinsi	Orang	56,00	0,00	0	1.582.577,00	0,00	0
1.06.04.1.03.0009	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Orang	40,00	40,00	100	6.000.000,00	2.250.000,00	37,5
1.06.04.1.03.0010	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang	12,00	0,00	0	50.400.000,00	0,00	0
1.06.04.1.03.0011	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang	3,00	0,00	0	12.600.000,00	0,00	0
1.06.04.1.03.0012	Pemulasaraan	Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi	Orang	20,00	4,00	20	82.276.300,00	8.025.300,00	9,75
1.06.0.00.0.00.01.0003	UPTD Panti Sosial Perlindungan Anak Dharma								
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesenekaritatan (UPTD PMKS ANAK BALITA TERLANTAR)	%	84,00	21,00	25	1.934.691.425,00	208.669.391,00	10,79
		Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti	%	100,00	25,00	25			
1.06.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pembayaran Gaji, Tunjangan, Honorarium ASN dan NON ASN	Laporan	1,00	1,00	100	75.800.000,00	10.520.000,00	13,88
1.06.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12,00	2,00	17	75.800.000,00	10.520.000,00	13,88
1.06.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pengadaan Pakaian dan Pendidikan dan Pelatihan kepegawaian perangkat daerah	Kegiatan	1,00	0,00	0	38.184.000,00	0,00	0
1.06.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1,00	0,00	0	38.184.000,00	0,00	0
1.06.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dalam menunjang akuntabilitas daerah	Kegiatan	4,00	2,00	50	400.712.201,00	21.551.000,00	5,38
1.06.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1,00	0,00	0	15.513.224,00	0,00	0
1.06.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5,00	1,00	20	170.471.157,00	17.820.000,00	10,45
1.06.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1,00	0,00	0	10.839.820,00	0,00	0
1.06.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12,00	1,00	8,33	203.888.000,00	3.731.000,00	1,83
1.06.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan	Laporan	2,00	0,00	0	124.415.964,00	0,00	0
1.06.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	1,00	0,00	0	124.415.835,00	0,00	0
1.06.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1,00	0,00	0	129,00	0,00	0
1.06.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, surat menyurat dan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang Disediakan	Laporan	3,00	3,00	100	1.013.408.921,00	150.251.391,00	14,83
1.06.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1,00	1,00	100	3.372.170,00	500.000,00	14,83
1.06.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1,00	1,00	100	344.756.751,00	39.271.391,00	11,39
1.06.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1,00	1,00	100	665.280.000,00	110.480.000,00	16,61
1.06.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Peralatan dan Gedung Kantor yang dipelihara setiap bulannya	Unit	41,00	9,00	21,95	282.170.339,00	26.347.000,00	9,34
1.06.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	9,00	6,00	66,67	194.989.250,00	22.307.000,00	11,44
1.06.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	9,00	3,00	33,33	57.931.089,00	4.040.000,00	6,97
1.06.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	23,00	0,00	0	29.250.000,00	0,00	0
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PMKS Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam Panti	%	100,00	100,00	100	3.065.306.575,00	523.414.900,00	17,08
1.06.04.1.02	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerLantar di dalam Panti	Jumlah Anak Terlantar yang dibina, dilayani, dilindungi dan di rehabilitasi oleh Dinas Sosial (UPTD PSPAD)	Orang	80,00	80,00	100	3.065.306.575,00	523.414.900,00	17,08
1.06.04.1.02.0001	Pengasuhan	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Pengasuhan Kewenangan Provinsi	Orang	80,00	0,00	0	19.872.000,00	0,00	0

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan (Rp)	Persen (%)
1.06.04.1.02.0002	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang	80,00	80,00	100	1.737.108.000,00	285.595.400,00	16,44
1.06.04.1.02.0003	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Orang	80,00	80,00	100	771.811.180,00	128.737.000,00	16,68
1.06.04.1.02.0004	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Orang	80,00	80,00	100	123.659.290,00	20.760.000,00	16,79
1.06.04.1.02.0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Orang	80,00	0,00	0	9.636.470,00	0,00	0
1.06.04.1.02.0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Orang	80,00	80,00	100	62.534.770,00	10.000.000,00	15,99
1.06.04.1.02.0007	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	Orang	80,00	80,00	100	114.000.000,00	19.000.000,00	16,67
1.06.04.1.02.0008	Fasilitasi Pembuatan Akta Kelahiran, Nomor Induk Kependudukan, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, dan Kartu Identitas Anak bagi Anak Terlantar Kewenangan Provinsi	Orang	5,00	0,00	0	6.280.000,00	0,00	0
1.06.04.1.02.0009	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Orang	65,00	65,00	100	161.104.865,00	59.322.500,00	36,82
1.06.04.1.02.0010	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang	5,00	0,00	0	16.800.000,00	0,00	0
1.06.04.1.02.0011	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang	4,00	0,00	0	16.800.000,00	0,00	0
1.06.04.1.02.0012	Akses Layanan Pengasuhan kepada Keluarga Penganti	Jumlah Orang Mendapatkan Pengasuhan Keluarga Pengganti Kewenangan Provinsi	Orang	2,00	0,00	0	8.400.000,00	0,00	0
1.06.04.1.02.0013	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Dokumen	20,00	0,00	0	17.300.000,00	0,00	0
1.06.0.00.0.00.01.0004	UPTD Panti Sosial Asuhan Anak Harapan								
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD PMKS ANAK TERLANTAR)	%	84,00	21,00	25	1.918.938.242,00	153.499.186,00	8
		Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti	%	100,00	25,00	25			
1.06.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pembayaran Gaji, Tunjangan, Honorarium ASN dan NON ASN	Laporan	1,00	1,00	100	76.680.000,00	11.500.000,00	15
1.06.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	1,00	1,00	100	76.680.000,00	11.500.000,00	15
1.06.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Pengadaan Pakaian dan Pendidikan dan Pelatihan kepegawaian perangkat daerah	Laporan	1,00	0,00	0	55.449.000,00	0,00	0
1.06.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1,00	0,00	0	55.449.000,00	0,00	0
1.06.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dalam menunjang akuntabilitas daerah	Kegiatan	4,00	1,00	25	711.463.706,00	680.000,00	0,1
1.06.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1,00	0,00	0	32.876.957,00	0,00	0
1.06.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1,00	0,00	0	497.108.549,00	0,00	0
1.06.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1,00	0,00	0	21.302.200,00	0,00	0
1.06.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1,00	1,00	100	160.176.000,00	680.000,00	0,42
1.06.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan	Unit	2,00	0,00	0	7.475.228,00	0,00	0
1.06.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	1,00	0,00	0	6.123.228,00	0,00	0
1.06.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1,00	0,00	0	1.352.000,00	0,00	0
1.06.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, surat menyurat dan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang Disediakan	Laporan	3,00	3,00	100	779.621.808,00	109.319.186,00	14,02
1.06.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1,00	1,00	100	6.874.808,00	1.000.000,00	14,55
1.06.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1,00	0,00	0	239.740.800,00	44.823.186,00	18,7

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan (Rp)	Persen (%)
1.06.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	1,00	0,00	0	112.831.000,00	15.176.000,00	13,45
1.06.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1,00	0,00	0	420.175.200,00	48.320.000,00	11,5
1.06.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Peralatan dan Gedung Kantor yang dipelihara setiap bulannya	Unit	51,00	4,00	8	288.248.500,00	32.000.000,00	11,1
1.06.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	9,00	4,00	44,44	224.880.000,00	32.000.000,00	14,23
1.06.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	23,00	0,00	0	24.370.000,00	0,00	0
1.06.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1,00	0,00	0	38.998.500,00	0,00	0
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PMKS Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam Panti	%	100,00	100,00	100	4.581.061.758,00	744.682.750,00	16,26
1.06.04.1.02	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Jumlah Anak Terlantar yang dibina, dilayani, dilindungi dan di rehabilitasi oleh Dinas Sosial (UPTD PSAAH)	Orang	100,00	100,00	100	4.581.061.758,00	744.682.750,00	16,26
1.06.04.1.02.0001	Pengasuhan	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Pengasuhan Kewenangan Provinsi	Orang	100,00	0,00	0	5.200.000,00	0,00	0
1.06.04.1.02.0002	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang	100,00	100,00	100	2.274.966.000,00	338.211.254,00	14,87
1.06.04.1.02.0003	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Orang	100,00	0,00	0	598.050.500,00	0,00	0
1.06.04.1.02.0004	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Orang	100,00	0,00	0	450.396.397,00	0,00	0
1.06.04.1.02.0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Orang	100,00	100,00	100	420.335.883,00	387.305.496,00	92,14
1.06.04.1.02.0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Orang	100,00	0,00	0	163.882.109,00	0,00	0
1.06.04.1.02.0007	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	Orang	100,00	0,00	0	12.002.175,00	0,00	0
1.06.04.1.02.0008	Fasilitasi Pembuatan Akta Kelahiran, Nomor Induk Kependudukan, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, dan Kartu Identitas Anak bagi Anak Terlantar Kewenangan Provinsi	Orang	18,00	0,00	0	2.372.000,00	0,00	0
1.06.04.1.02.0009	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Orang	100,00	100,00	100	509.449.694,00	19.166.000,00	3,76
1.06.04.1.02.0010	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang	13,00	0,00	0	56.410.000,00	0,00	0
1.06.04.1.02.0011	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang	9,00	0,00	0	39.714.000,00	0,00	0
1.06.04.1.02.0012	Akses Layanan Pengasuhan kepada Keluarga Penganti	Jumlah Orang Mendapatkan Pengasuhan Keluarga Pengganti Kewenangan Provinsi	Orang	3,00	0,00	0	12.850.000,00	0,00	0
1.06.04.1.02.0013	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Dokumen	1,00	0,00	0	35.433.000,00	0,00	0
1.06.0.00.0.00.01.0005	UPTD Panti Sosial Bina Remaja								
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD PMKS REMAJA, ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM)	%	84,00	21,00	25	1.978.410.850,00	254.631.500,00	12,87
		Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti	%	100,00	25,00	25			
1.06.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pembayaran Gaji, Tunjangan, Honorarium ASN dan NON ASN	Laporan	1,00	1,00	100	84.840.000,00	11.500.000,00	13,55
1.06.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	1,00	1,00	100	84.840.000,00	11.500.000,00	13,55
1.06.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pengadaan Pakaian dan Pendidikan dan Pelatihan kepegawaian perangkat daerah	Kegiatan	1,00	0,00	0	77.403.300,00	0,00	0
1.06.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1,00	0,00	0	77.403.300,00	0,00	0
1.06.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dalam menunjang akuntabilitas daerah	Kegiatan	4,00	1,00	25	569.020.814,00	58.909.600,00	10,35
1.06.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1,00	0,00	0	47.145.602,00	0,00	0

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan (Rp)	Persen (%)
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD PMKS GELANDANGAN DAN PENGEMIS)	%	84,00	21,00	25	1.396.536.877,00	222.876.423,00	15,96
		Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti	%	100,00	25,00	25			
1.06.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pembayaran Gaji, Tunjangan, Honorarium ASN dan NON ASN	Laporan	1,00	1,00	100	69.960.000,00	4.420.000,00	6,32
1.06.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	1,00	1,00	100	69.960.000,00	4.420.000,00	6,32
1.06.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pengadaan Pakaian dan Pendidikan dan Pelatihan kepegawaian perangkat daerah	Kegiatan	1,00	0,00	0	32.935.800,00	0,00	0
1.06.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1,00	0,00	0	32.935.800,00	0,00	0
1.06.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dalam menunjang akuntabilitas daerah	Kegiatan	4,00	7,00	175	290.485.427,00	59.196.300,00	20,38
1.06.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1,00	1,00	100	4.777.456,00	1.972.700,00	41,29
1.06.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1,00	3,00	300	94.267.859,00	49.681.600,00	52,7
1.06.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1,00	0,00	0	2.558.192,00	0,00	0
1.06.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1,00	3,00	300	188.881.920,00	7.542.000,00	3,99
1.06.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, surat menyurat dan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang Disediakan	Laporan	2,00	2,00	100	735.000.400,00	114.954.763,00	15,64
1.06.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1,00	1,00	100	104.737.600,00	16.669.363,00	15,92
1.06.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1,00	1,00	100	630.262.800,00	98.285.400,00	15,59
1.06.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Peralatan dan Gedung Kantor yang dipelihara setiap bulannya	Unit	31,00	24,00	77	268.155.250,00	44.305.360,00	16,52
1.06.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	7,00	6,00	86	98.229.750,00	26.400.000,00	26,88
1.06.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	20,00	18,00	90	67.142.000,00	17.905.360,00	26,67
1.06.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1,00	0,00	0	102.783.500,00	0,00	0
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PMKS Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam Panti	%	100,00	33,00	33	2.035.563.123,00	133.088.139,00	6,54
1.06.04.1.04	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	Jumlah PMKS Lainnya di Luar HIV/AIDS yang dibina, dilayani, dilindungi dan direhabilitasi oleh Dinas Sosial (UPTD PSKW-HM)	Orang	60,00	33,00	55	2.035.563.123,00	133.088.139,00	6,54
1.06.04.1.04.0001	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang	60,00	33,00	55	1.416.613.700,00	117.091.314,00	8,27
1.06.04.1.04.0002	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Orang	60,00	33,00	55	235.083.070,00	1.935.000,00	0,82
1.06.04.1.04.0003	Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses	Jumlah Orang yang Terakses Asrama/Wisma Layak Huni Kewenangan Provinsi	Orang	60,00	33,00	55	19.800.000,00	0,00	0
1.06.04.1.04.0004	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan pemenuhan kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Orang	60,00	6,00	10	8.870.328,00	520.000,00	5,86
1.06.04.1.04.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Orang	60,00	33,00	55	82.900.000,00	840.000,00	1,01
1.06.04.1.04.0006	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	Orang	60,00	5,00	8	21.355.325,00	105.325,00	0,49
1.06.04.1.04.0007	Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar	Jumlah Orang yang Diberikan Bimbingan Keterampilan Dasar Kewenangan Provinsi	Orang	60,00	33,00	55	194.162.000,00	10.046.500,00	5,17
1.06.04.1.04.0008	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Gelandangan bagi Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Provinsi	Orang	60,00	0,00	0	10.200.000,00	0,00	0

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan (Rp)	Persen (%)
1.06.04.1.04.0009	Akses Kelayakan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Orang	60,00	5,00	8	21.668.700,00	2.550.000,00	11,77
1.06.04.1.04.0010	Pemulangan ke Daerah Asal	Jumlah Gelandangan dan Pengemis/Keluarga yang Dipulangkan ke Daerah asal Kewenangan Provinsi	Orang	60,00	0,00	0	24.910.000,00	0,00	0
2.07.3.32.0.00.01.0000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi								
2.07.3.32.0.00.01.0000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi								
2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti	%	100,00	0,00	0	75.194.689.027,00	10.606.430.039,00	14,11
		Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	Indeks	84,00	0,00	0			
2.07.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi	Dokumen	10,00	2,00	20	2.329.582.547,00	63.123.609,00	2,71
2.07.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	3,00	2,00	66,67	1.418.562.621,00	63.123.609,00	4,45
2.07.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	2,00	0,00	0	87.318.226,00	0,00	0
2.07.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	5,00	1,00	20	823.701.700,00	0,00	0
2.07.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan	Dokumen	1,00	0,00	0	48.660.540.862,00	8.598.806.512,00	17,67
2.07.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	229,00	0,00	100	47.698.601.862,00	8.516.106.512,00	17,85
2.07.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	1,00	0,00	0	605.103.800,00	75.520.000,00	12,48
2.07.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1,00	0,00	0	27.440.000,00	0,00	0
2.07.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	1,00	0,00	0	305.715.200,00	7.180.000,00	2,35
2.07.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	1,00	0,00	0	23.680.000,00	0,00	0
2.07.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	1,00	0,00	0	337.110.500,00	0,00	0
2.07.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	2,00	0,00	0	244.114.100,00	0,00	0
2.07.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	1,00	0,00	0	15.829.500,00	0,00	0
2.07.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	6,00	0,00	0	77.017.400,00	0,00	0
2.07.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	5,00	0,00	0	149.500,00	0,00	0
2.07.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengadministrasian Umum Perangkat Daerah	Dokumen	1,00	0,00	0	4.623.697.232,00	149.381.585,00	3,23
2.07.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	5,00	0,00	0	24.954.864,00	3.852.810,00	15,44
2.07.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	10,00	0,00	0	664.918.114,00	0,00	0
2.07.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	23,00	0,00	0	460.756.112,00	21.166.558,00	4,59
2.07.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	8,00	0,00	13	74.966.022,00	5.642.500,00	7,53
2.07.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	15,00	0,00	0	1.742.500,00	0,00	0
2.07.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12,00	3,00	25	1.787.778.120,00	118.719.717,00	6,64
2.07.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	1,00	0,00	0	1.608.581.500,00	0,00	0
2.07.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dokumen	1,00	0,00	0	558.693.357,00	0,00	0
2.07.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	2,00	0,00	0	362.776.231,00	0,00	0
2.07.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	1,00	0,00	0	149.500,00	0,00	0
2.07.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1,00	0,00	0	195.618.126,00	0,00	0

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan (Rp)	Persen (%)
2.07.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	unitUnit	1,00	0,00	0	149.500,00	0,00	0
2.07.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen	1,00	0,00	0	17.600.795.992,00	1.704.858.059,00	9,69
2.07.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12,00	3,00	25	7.719.492,00	1.372.000,00	17,77
2.07.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12,00	3,00	25	544.551.000,00	276.212.646,00	50,72
2.07.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	1,00	0,00	0	149.500,00	0,00	0
2.07.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12,00	3,00	25	17.048.376.000,00	1.427.273.413,00	8,37
2.07.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen	1,00	0,00	0	1.084.268.537,00	90.260.274,00	8,32
2.07.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	2,00	1,00	50	45.831.999,00	12.940.088,00	28,23
2.07.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	16,00	3,00	18,75	269.913.000,00	51.067.186,00	18,92
2.07.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	1,00	0,00	100	108.437.238,00	26.253.000,00	24,21
2.07.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1,00	0,00	0	659.787.300,00	0,00	0
2.07.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2,00	0,00	0	149.500,00	0,00	0
2.07.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1,00	0,00	0	149.500,00	0,00	0
2.07.02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase Kabupaten Kota yang difasilitasi menyusun rencana tenaga kerja	Persen	70,00	0,00	0	1.380.420.208,00	0,00	0
2.07.02.1.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Yang Difasilitasi	Dokumen	8,00	0,00	0	1.380.420.208,00	0,00	0
2.07.02.1.01.0001	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	Dokumen	7,00	0,00	0	930.672.240,00	0,00	0
2.07.02.1.01.0004	Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah SDM Kabupaten/Kota yang membidangi ketenagakerjaan mampu menjadi fasilitator Penyusunan RTK Mikro	Orang	20,00	0,00	0	449.747.968,00	0,00	0
2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Lulusan Pelatihan Kerja yang dimagangkan dan bekerja	Persen	66,50	0,00	0	3.148.909.819,00	165.044.185,00	5,24
2.07.03.1.01	Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Kluster Kompetensi	Jumlah Peserta Pelatihan Pemagangan Yang Bekerja	Orang	60,00	0,00	0	2.795.669.695,00	165.044.185,00	5,9
2.07.03.1.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Kluster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n	Orang	352,00	0,00	0	2.634.915.423,00	85.404.185,00	3,24
2.07.03.1.01.0002	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	Lembaga	20,00	0,00	0	160.754.272,00	79.640.000,00	49,54
2.07.03.1.02	Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Laporan LPK Yang Terakreditasi	Laporan	15,00	0,00	0	85.752.000,00	0,00	0
2.07.03.1.02.0001	Survey dan Penilaian Akreditasi Kepada Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja yang Terakreditasi	LPK	15,00	0,00	0	85.752.000,00	0,00	0
2.07.03.1.03	Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Menengah	Jumlah Laporan Perusahaan Menengah yang ditingkatkan Produktivitasnya	Laporan	1,00	0,00	0	115.406.834,00	0,00	0
2.07.03.1.03.0001	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Menengah	Jumlah Perusahaan Menengah yang Mendapatkan Konsultasi Peningkatan Produktivitas	Perusahaan	23,00	0,00	0	115.406.834,00	0,00	0
2.07.03.1.04	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Laporan hasil Pengukuran Produktivitas tingkat Daerah Provinsi	Laporan	1,00	0,00	0	152.081.290,00	0,00	0
2.07.03.1.04.0001	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan daya saing Tenaga Kerja di Tingkat daerah	Dokumen	1,00	0,00	0	152.081.290,00	0,00	0
2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Pencari Kerja yang ditempatkan	Persen	27,60	0,00	0	1.993.866.790,00	14.559.993,00	0,73
2.07.04.1.01	Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pencari Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan	Orang	270,00	0,00	0	1.029.275.637,00	14.039.993,00	1,36
2.07.04.1.01.0001	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan Antar Kerja	Jumlah SDM Pelayanan Antar Kerja yang Tersedia dan/atau Ditingkatkan Kompetensinya	Orang	285,00	0,00	0	205.550.955,00	12.363.493,00	6,01
2.07.04.1.01.0003	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	Orang	270,00	0,00	0	248.150.955,00	1.676.500,00	0,68
2.07.04.1.01.0004	Pembinaan Operasionalisasi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja AKAD (Antar Kerja Antar Daerah) dan AKL (Antar Kerja Lokal)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Operasionalisasi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja AKAD dan AKL	Orang	12.000,00	0,00	0	93.000.000,00	0,00	0

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan (Rp)	Persen (%)
2.07.04.1.01.0005	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui Program Perluasan Kesempatan Kerja	Orang	180,00	0,00	0	482.573.727,00	0,00	0
2.07.04.1.02	Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LPTKS yang mendapatkan izin	Lembaga	16,00	0,00	0	71.360.000,00	0,00	0
2.07.04.1.02.0002	Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	Jumlah LPTKS yang dilakukan Pengawasan dan Pengendalian sesuai dengan Aturan yang Berlaku	Lembaga	16,00	0,00	0	71.360.000,00	0,00	0
2.07.04.1.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah Event Pengelolaan Informasi Pasar kerja	event	2,00	0,00	0	782.266.925,00	520.000,00	0,07
2.07.04.1.03.0001	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Dokumen	1,00	0,00	0	127.300.000,00	0,00	0
2.07.04.1.03.0002	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja Yang Terdaftar Dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (KarirHub)	Orang	55.000,00	0,00	0	160.870.000,00	520.000,00	0,32
2.07.04.1.03.0003	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	Orang	230,00	0,00	0	494.096.925,00	0,00	0
2.07.04.1.05	Pengesahan RPTKA Perpanjangan yang Tidak Mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah TKA yang diterbitkan Notifikasinya	Orang	30,00	0,00	0	110.964.228,00	0,00	0
2.07.04.1.05.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengesahan RPTKA yang tidak Mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah TKA yang telah Mendapatkan Pengesahan RPTKA	Orang	30,00	0,00	0	110.964.228,00	0,00	0
2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Perusahaan Lintas Kabupaten/Kota yang Menerapkan Tata Kelola Kerja yang Layak (PP/PKB, Struktur Skala Upah dan Terdaftar Peserta BPJS Ketenagakerjaan)	Persen	72,00	0,00	0	2.762.598.859,00	113.760.000,00	4,12
2.07.05.1.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk yang Mempunyai Wilayah Kerja lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Surat Keputusan Peraturan Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang diterbitkan	SK	105,00	0,00	0	772.073.940,00	23.166.000,00	3
2.07.05.1.01.0001	Pengesahan Peraturan Perusahaan yang terkait dengan Hubungan Industrial	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Peraturan Perusahaan dan Terdaftar di WLKP Online	Perusahaan	50,00	0,00	0	450.915.960,00	11.580.000,00	2,57
2.07.05.1.01.0002	Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama yang terkait dengan Hubungan Industrial	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama dan Terdaftar Di WLKP Online	Perusahaan	50,00	0,00	0	240.157.980,00	0,00	0
2.07.05.1.01.0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar Sebagai Peserta Jamsostek	Laporan	1,00	0,00	0	81.000.000,00	11.586.000,00	14,3
2.07.05.1.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Perusahaan yang dilakukan Pembinaan dalam rangka pencegahan dan penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	Perusahaan	50,00	0,00	0	1.056.158.694,00	38.958.000,00	3,69
2.07.05.1.02.0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	Perkara	1,00	0,00	0	655.865.126,00	5.090.000,00	0,78
2.07.05.1.02.0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselamatkan	Perkara	10,00	0,00	0	47.200.000,00	4.890.000,00	10,36
2.07.05.1.02.0003	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	AsosiasidanSerikatPekerja	20,00	0,00	0	107.220.985,00	0,00	0
2.07.05.1.02.0004	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Provinsi	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	Lembaga	8,00	0,00	0	245.872.583,00	28.978.000,00	11,79
2.07.05.1.03	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)	Jumlah Surat Keputusan Penetapan Upah Minimum Provinsi dan Upah Minimum Kabupaten/Kota	SK	10,00	0,00	0	934.366.225,00	51.636.000,00	5,53
2.07.05.1.03.0001	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)	Jumlah Penetapan UMP	SuratKeputusan	1,00	0,00	0	407.136.265,00	51.636.000,00	12,68
2.07.05.1.03.0003	Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK)	Jumlah penetapan UMK	SuratKeputusan	9,00	0,00	0	368.658.975,00	0,00	0
2.07.05.1.03.0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Terdaftar dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	Orang	11.000,00	0,00	0	158.570.985,00	0,00	0
2.07.06	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	Persentase perusahaan yang diperiksa dan diawasi	Persen	18,23	0,00	0	3.493.229.746,00	426.893.600,00	12,22
2.07.06.1.01	Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	Jumlah Perusahaan yang diperiksa dan diawasi	Perusahaan	4.000,00	0,00	0	3.493.229.746,00	426.893.600,00	12,22
2.07.06.1.01.0001	Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan (Termasuk Perusahaan yang Mempekerjakan TKA)	Perusahaan	325,00	0,00	0	1.444.291.524,00	121.253.500,00	8,4
2.07.06.1.01.0002	Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan	Jumlah Kasus Permasalahan Hukum yang Diselesaikan	Kasus	1,00	0,00	0	345.162.400,00	5.197.500,00	1,51
2.07.06.1.01.0003	Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menerapkan K3	Perusahaan	547,00	0,00	0	1.703.775.822,00	300.442.600,00	17,63

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan (Rp)	Persen (%)
3.32.02	PROGRAM Perencanaan KAWASAN TRANSMIGRASI	Jumlah pencadangan tanah untuk kawasan transmigrasi lintas daerah Kab/Kota dalam satu daerah provinsi	Kawasan	1,00	0,00	0	783.503.370,00	0,00	0
3.32.02.1.01	Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Jumlah Dokumen Pencadangan Tanah Yang Ditetapkan	Dokumen	1,00	0,00	0	783.503.370,00	0,00	0
3.32.02.1.01.0001	Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi yang Bisa Dibangun dan Dikerjakamkan dengan Daerah Lain	Dokumen	1,00	0,00	0	341.650.100,00	0,00	0
3.32.02.1.01.0002	Advokasi dan Musyawarah Penetapan Kawasan	Jumlah Kasus yang Dapat Diselesaikan untuk Mendukung Penetapan Kawasan Transmigrasi	KawasanTrans migrasi	1,00	0,00	0	80.385.500,00	0,00	0
3.32.02.1.01.0003	Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Luas Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Hektar	277.645,24	0,00	0	13.500.000,00	0,00	0
3.32.02.1.01.0004	Penatausahaan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Dokumen Usulan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Dokumen	1,00	0,00	0	347.967.770,00	0,00	0
3.32.03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Jumlah rencana kawasan transmigrasi (RKT) lintas Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi	Kawasan	1,00	0,00	0	72.750.000,00	0,00	0
3.32.03.1.01	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Penataan Persebaran Penduduk di Kawasan Transmigrasi	Dokumen	1,00	0,00	0	72.750.000,00	0,00	0
3.32.03.1.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi Antar Pemerintah Daerah Kabupaten/kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi Antar Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Laporan	1,00	0,00	0	31.500.000,00	0,00	0
3.32.03.1.01.0002	Penyiapan Lingkungan Hunian Fisik, Sosial, Ekonomi bagi Penduduk Setempat dan Transmigran	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Kelayakan Lingkungan dan Permukiman Transmigrasi (Yang Memenuhi Kriteria Layak Huni, Layak Usaha dan Layak Berkembang)	Dokumen	1,00	0,00	0	9.300.000,00	0,00	0
3.32.03.1.01.0004	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	Jumlah Transmigran yang Ditempatkan	KepalaKeluarga	70,00	0,00	0	8.400.000,00	0,00	0
3.32.03.1.01.0006	Pelatihan Transmigrasi	Jumlah Calon Transmigran/Transmigran yang Mendapatkan Pelatihan	Orang	50,00	0,00	0	150.000,00	0,00	0
3.32.03.1.01.0013	Pelayanan Kesehatan Transmigran	Jumlah Transmigran yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Transmigran	KK	10,00	0,00	0	9.900.000,00	0,00	0
3.32.03.1.01.0018	Monitoring Dan Evaluasi Ke Lokasi Transmigrasi	Jumlah Lokasi Transmigrasi yang Dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi	Lokasi	2,00	0,00	0	13.500.000,00	0,00	0
3.32.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase transmigran yang ditingkatkan ketrampilannya berdasarkan penempatan di dalam kawasan	Persen	100,00	0,00	0	143.746.552,00	0,00	0
3.32.04.1.01	Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Pemantapan	Jumlah Dokumen Kegiatan Pegaturan, Pembinaan, Bantuan, Fasilitasi, Mediasi, Advokasi, Pelayanan, Bimbingan, Pendampingan dan Pelatihan	Dokumen	1,00	0,00	0	143.746.552,00	0,00	0
3.32.04.1.01.0001	Penguatan SDM dalam rangka Pemantapan Satuan Pemukiman	Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina	KepalaKeluarga	60,00	0,00	0	111.596.552,00	0,00	0
3.32.04.1.01.0002	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Pemantapan Satuan Pemukiman	Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam Rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan	SatuanPermukiman	1,00	0,00	0	32.150.000,00	0,00	0
2.07.3.32.0.00.01.0002	UPTD Balai Latihan Kerja Industri Balikpapan								
2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD BLKI Balikpapan)	Indeks	84,00	0,00	0	4.996.631.488,00	0,00	0
		Persentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti (UPTD BLKI Balikpapan)	Persen	100,00	0,00	0			
2.07.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan (UPTD.BLKI Balikpapan)	Dokumen	1,00	0,00	0	214.769.380,00	0,00	0
2.07.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	1,00	0,00	0	120.169.380,00	0,00	0
2.07.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	1,00	0,00	0	47.300.000,00	0,00	0
2.07.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian (UPTD BLKI Balikpapan)	Dokumen	1,00	0,00	0	311.716.473,00	0,00	0
2.07.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	24,00	0,00	0	26.366.473,00	0,00	0
2.07.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	5,00	0,00	0	285.350.000,00	0,00	0

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan (Rp)	Persen (%)
2.07.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengadministrasian Umum Perangkat Daerah (UPDT BLKI Balikpapan)	Dokumen	1,00	0,00	0	1.078.684.435,00	0,00	0
2.07.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	12,00	0,00	0	11.029.373,00	0,00	0
2.07.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	6,00	0,00	0	248.477.774,00	0,00	0
2.07.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	3,00	0,00	0	167.317.142,00	0,00	0
2.07.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12,00	0,00	0	57.667.302,00	0,00	0
2.07.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12,00	0,00	0	6.799.200,00	0,00	0
2.07.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12,00	0,00	0	355.610.000,00	0,00	0
2.07.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (UPTD BLKI Balikpapan)	Dokumen	1,00	0,00	0	119.631.000,00	0,00	0
2.07.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	1,00	0,00	0	119.631.000,00	0,00	0
2.07.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPTD BLKI Balikpapan)	Dokumen	1,00	0,00	0	1.900.465.000,00	0,00	0
2.07.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12,00	0,00	0	7.000.000,00	0,00	0
2.07.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12,00	0,00	0	452.625.000,00	0,00	0
2.07.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	12,00	0,00	0	156.000.000,00	0,00	0
2.07.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1,00	0,00	0	1.284.840.000,00	0,00	0
2.07.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Uptd BLKI Balikpapan)	Dokumen	1,00	0,00	0	1.371.365.200,00	0,00	0
2.07.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	1,00	0,00	0	2.000.000,00	0,00	0
2.07.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	2,00	0,00	0	65.000.000,00	0,00	0
2.07.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1,00	0,00	0	677.080.800,00	0,00	0
2.07.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1,00	0,00	0	364.034.400,00	0,00	0
2.07.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1,00	0,00	0	263.250.000,00	0,00	0
2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Lulusan Pelatihan Kerja yang bekerja (BLKI Balikpapan)	Persen	76,50	0,00	8	21.943.624.104,00	467.481.600,00	2,13
2.07.03.1.01	Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Kluster Kompetensi	Persentase Lulusan Pelatihan Kerja Yang Kompeten (UPTD. BLKI. Balikpapan)	Persen	80,00	6,15	8	21.943.624.104,00	467.481.600,00	2,13
2.07.03.1.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Kluster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n	Orang	1.040,00	80,00	7,69	18.756.592.104,00	233.740.800,00	1,25
2.07.03.1.01.0002	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	Lembaga	20,00	0,00	0	579.012.000,00	0,00	0
2.07.03.1.01.0003	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan kerja	Unit	5,00	0,00	0	2.608.020.000,00	0,00	0
2.07.3.32.0.00.01.0003	UPTD Balai Latihan Kerja Industri Bontang								
2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD BLKI Bontang)	Indeks	84,00	0,00	0	3.577.846.980,00	201.020.000,00	5,62
		Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti (UPTD BLKI Bontang)	Persen	100,00	0,00	0			
2.07.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan (UPTD BLKI Bontang)	Dokumen	1,00	0,00	0	138.881.670,00	0,00	0
2.07.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12,00	0,00	0	138.881.670,00	0,00	0

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan (Rp)	Persen (%)
2.07.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian (UPTD BLKI Bontang)	Dokumen	1,00	0,00	0	18.800.760,00	0,00	0
2.07.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	20,00	0,00	0	18.800.760,00	0,00	0
2.07.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengadministrasian Umum Perangkat Daerah (UPTD BLKI Bontang)	Dokumen	1,00	0,00	0	893.872.042,00	0,00	0
2.07.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	12,00	0,00	0	10.489.654,00	0,00	0
2.07.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	6,00	0,00	0	347.489.112,00	0,00	0
2.07.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12,00	0,00	0	13.676.096,00	0,00	0
2.07.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12,00	0,00	0	20.429.180,00	0,00	0
2.07.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12,00	0,00	0	501.788.000,00	0,00	0
2.07.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPTD BLKI Bontang)	Dokumen	1,00	0,00	0	2.145.627.508,00	201.020.000,00	9,37
2.07.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12,00	3,00	25	7.954.000,00	0,00	0
2.07.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12,00	0,00	0	545.999.500,00	0,00	0
2.07.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	1,00	0,00	0	367.160.008,00	0,00	0
2.07.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12,00	3,00	25	1.216.560.000,00	201.020.000,00	16,52
2.07.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen	1,00	0,00	0	380.665.000,00	0,00	0
2.07.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	1,00	0,00	0	48.565.000,00	0,00	0
2.07.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	1,00	0,00	0	5.000.000,00	0,00	0
2.07.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	1,00	0,00	0	97.500.000,00	0,00	0
2.07.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1,00	0,00	0	60.000.000,00	0,00	0
2.07.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1,00	0,00	0	69.600.000,00	0,00	0
2.07.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1,00	0,00	0	100.000.000,00	0,00	0
2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Lulusan Pelatihan Kerja yang bekerja (BLKI Bontang)	Persen	77,00	0,00	0	10.024.691.701,00	486.124.200,00	4,85
2.07.03.1.01	Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Kluster Kompetensi	Persentase Lulusan Pelatihan Kerja Yang Kompeten	Persen	80,00	0,00	0	10.024.691.701,00	486.124.200,00	4,85
2.07.03.1.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Kluster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n	Orang	672,00	0,00	7	8.843.668.303,00	486.124.200,00	5,5
2.07.03.1.01.0002	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	Lembaga	20,00	0,00	0	454.102.000,00	0,00	0
2.07.03.1.01.0003	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan kerja	Unit	18,00	0,00	0	726.921.398,00	0,00	0
2.08.2.14.2.12.01.0000	Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak								
2.08.2.14.2.12.01.0000	Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak								
2.08.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	indeks	84,00	0,00	0	26.494.666.928,00	3.702.143.093,00	13,97
		Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti	%	100,00	0,00	0			
2.08.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	%	71,00	0,00	0	994.815.101,00	0,00	0
2.08.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	6,00	1,00	16,67	126.560.000,00	0,00	0
2.08.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	2,00	1,00	50	175.597.068,00	0,00	0

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan (Rp)	Persen (%)
2.08.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1,00	0,00	0	8.000.000,00	0,00	0
2.08.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1,00	1,00	100	8.000.000,00	0,00	0
2.08.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1,00	0,00	0	8.000.000,00	0,00	0
2.08.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	23,00	5,00	21,74	166.999.610,00	0,00	0
2.08.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	1,00	0,00	0	286.549.943,00	0,00	0
2.08.01.1.01.0009	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	BeritaAcara	2,00	1,00	50	215.108.480,00	0,00	0
2.08.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran	%	94,50	10,39	11	16.585.614.124,00	2.825.544.957,00	17,04
2.08.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	71,00	41,00	57,75	16.116.374.124,00	2.789.392.957,00	19,99
2.08.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	2,00	1,00	50	261.240.000,00	23.400.000,00	8,96
2.08.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	12,00	3,00	25	40.000.000,00	10.552.000,00	26,38
2.08.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1,00	0,00	0	30.000.000,00	2.200.000,00	7,33
2.08.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	18,00	0,00	0	59.000.000,00	0,00	0
2.08.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	2,00	0,00	0	79.000.000,00	0,00	0
2.08.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang mendapat pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Orang	82,00	0,00	0	987.429.861,00	0,00	0
2.08.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	3,00	0,00	0	284.373.000,00	0,00	0
2.08.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	78,00	0,00	0	526.627.901,00	0,00	0
2.08.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	10,00	0,00	0	176.428.960,00	0,00	0
2.08.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kantor yang berfungsi dengan baik	Unit	113,00	10,00	9	2.612.085.937,00	117.129.298,00	4,48
2.08.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1,00	0,00	0	25.478.425,00	0,00	0
2.08.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	6,00	1,00	17	57.186.964,00	1.000.000,00	1,75
2.08.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2,00	0,00	0	853.471.714,00	1.950.000,00	0,23
2.08.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	96,00	0,00	0	15.791.600,00	0,00	0
2.08.01.1.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Laporan	1,00	0,00	0	68.352.922,00	4.500.000,00	6,58
2.08.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	3,00	0,00	0	1.481.172.312,00	109.679.298,00	7,4
2.08.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1,00	0,00	0	110.632.000,00	0,00	0
2.08.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Unit	33,00	0,00	0	1.649.365.310,00	83.820.000,00	5,08
2.08.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	1,00	0,00	0	581.662.000,00	0,00	0
2.08.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	30,00	1,00	3	1.067.703.310,00	83.820.000,00	7,85
2.08.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis	4,00	0,00	0	3.066.160.176,00	648.696.709,00	21,16
2.08.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1,00	0,00	0	10.902.000,00	2.580.000,00	23,67

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan (Rp)	Persen (%)
2.08.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1,00	0,00	0	809.182.200,00	89.919.069,00	11,11
2.08.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	1,00	0,00	0	9.360.000,00	0,00	0
2.08.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1,00	0,00	0	2.236.715.976,00	556.197.640,00	24,87
2.08.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Saranan dan Prasarana yang berfungsi dengan baik	Unit	87,00	0,00	0	599.196.419,00	26.952.129,00	4,5
2.08.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	1,00	0,00	0	56.004.999,00	7.405.200,00	13,22
2.08.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	24,00	0,00	0	288.655.420,00	19.546.929,00	6,77
2.08.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	60,00	0,00	0	94.332.000,00	0,00	0
2.08.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1,00	0,00	0	160.204.000,00	0,00	0
2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Jumlah Perempuan kepala keluarga (PEKKA) didampingi untuk peningkatan kapasitas dalam kewirausahaan	orang	300,00	0,00	0	2.527.267.258,00	38.143.588,00	1,51
2.08.02.1.01	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	Penguatan kelembagaan PUG kewenangan Provinsi	Lembaga	10,00	0,00	0	563.730.648,00	33.048.588,00	5,86
2.08.02.1.01.0006	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan PUG tingkat provinsi	Laporan	1,00	0,00	0	337.599.560,00	0,00	0
2.08.02.1.01.0007	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	Jumlah SDM tingkat Provinsi yang memperoleh advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG	Dokumen	1,00	0,00	0	126.131.500,00	0,00	0
2.08.02.1.01.0008	Sosialisasi kebijakan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	Jumlah peserta sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG tingkat Provinsi	Orang	30,00	30,00	100	99.999.588,00	33.048.588,00	33,05
2.08.02.1.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi KeMasyarakatan Kewenangan Provinsi	Jumlah organisasi kemasyarakatan menuju LPLPP	lembagaundefi ned	1,00	0,00	0	658.937.430,00	0,00	0
2.08.02.1.02.0003	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	Jumlah pengelola organisasi kemasyarakatan/profesi/dunia usaha/media tingkat provinsi yg mengikuti peningkatan kapasitas dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	Orang	200,00	0,00	0	260.999.568,00	0,00	0
2.08.02.1.02.0004	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	Jumlah organisasi kemasyarakatan/ profesi/ dunia usaha/ media tingkat provinsi yg diadvokasi dan didampingi dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	Lembaga	1,00	0,00	0	397.937.862,00	0,00	0
2.08.02.1.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah Perempuan kepala keluarga (PEKKA) didampingi untuk peningkatan kapasitas dalam kewirausahaan	orang	300,00	0,00	0	1.304.599.180,00	5.095.000,00	0,39
2.08.02.1.03.0004	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah LPLPP (Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan) dalam bentuk & Pusat Pembelajaran Perempuan & (PUTARAN) yang terstandarisasi tingkat Provinsi	Lembaga	1,00	0,00	0	139.040.455,00	0,00	0
2.08.02.1.03.0005	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah perempuan SIAP (Suara dan Aksi Perempuan Pelopor) di bidang Ekonomi/Lestari/Sehat/Pintar/Kepemimpinan/Hukum pd LPLPP Tingkat Provinsi	Orang	100,00	130,00	130	999.559.157,00	0,00	0
2.08.02.1.03.0006	Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah Pusat Informasi Sahabat Perempuan (Prisma) yg terbentuk di provinsi	Unit	1,00	0,00	0	165.999.568,00	5.095.000,00	3,07
2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani	%	24,96	100,00	400,64	3.066.626.186,00	198.766.861,00	6,48
2.08.03.1.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Penguatan kelembagaan perlindungan perempuan	lembaga	10,00	0,00	0	1.596.900.000,00	106.523.861,00	6,67
2.08.03.1.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	Dokumen	1,00	0,00	0	829.500.000,00	106.523.861,00	12,84

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan (Rp)	Persen (%)
2.08.03.1.01.0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	PerangkatDaerah	20,00	0,00	0	767.400.000,00	0,00	0
2.08.03.1.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih dalam unit pelayanan terpadu	%	80,00	100,00	125	1.111.658.820,00	92.243.000,00	8,3
2.08.03.1.02.0001	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan Masyarakat	Orang	40,00	4,00	10	868.280.000,00	90.973.000,00	10,48
2.08.03.1.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Layanan	50,00	0,00	0	243.378.820,00	1.270.000,00	0,52
2.08.03.1.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	Penguatan kapasitas penyedia layanan Perlindungan Perempuan	lembaga	10,00	0,00	0	358.067.366,00	0,00	0
2.08.03.1.03.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Jumlah Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	Orang	60,00	0,00	0	358.067.366,00	0,00	0
2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase capaian data gender dan anak	%	80,00	0,00	0	1.006.499.454,00	6.111.500,00	0,61
2.08.05.1.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Data Gender dan Anak Provinsi yang Tersedia	Data	20,00	0,00	0	1.006.499.454,00	6.111.500,00	0,61
2.08.05.1.01.0001	Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Provinsi yang Tersedia	Dokumen	4,00	0,00	0	505.249.714,00	2.680.000,00	0,53
2.08.05.1.01.0002	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi	Dokumen	6,00	0,00	0	501.249.740,00	3.431.500,00	0,68
2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Predikat kabupaten / kota layak anak	Persen	90,00	0,00	0	1.592.898.889,00	79.413.819,00	4,99
2.08.06.1.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	Jumlah lembaga yang mendapatkan Penguatan pelembagaan PHA	Lembaga	10,00	0,00	0	634.899.068,00	0,00	0
2.08.06.1.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Dokumen	1,00	0,00	0	303.899.539,00	0,00	0
2.08.06.1.01.0003	Advokasi, Sosialisasi dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	umlah perangkat daerah yang mempunyai dokumen pembangunan daerah yang responsif hak anak dan berperan aktif dalam Gugus Tugas KLA tingkat Provinsi yang berfungsi	perangkatdaerah	3,00	0,00	0	330.999.529,00	0,00	0
2.08.06.1.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah lembaga layanan penguatan dalam peningkatan kualitas hidup anak	Lembaga	10,00	0,00	0	957.999.821,00	79.413.819,00	8,29
2.08.06.1.02.0005	Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Kegiatan kerjasama antar Lembaga penyedia layanan pemenuhan hak anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota	Kegiatan	1,00	3,00	300	563.999.910,00	79.413.819,00	14,08
2.08.06.1.02.0006	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak	Jumlah kegiatan KIE Pemenuhan Hak Anak	Kegiatan	3,00	0,00	0	393.999.911,00	0,00	0
2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase penyelesaian kasus kekerasan terhadap anak	%	3,88	100,00	2,577.32	2.780.495.074,00	102.554.500,00	3,69
2.08.07.1.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Layanan Anak yang mendapatkan Pelatihan	lembaga	1,00	0,00	0	1.600.000.000,00	92.480.000,00	5,78
2.08.07.1.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	Dokumen	1,00	0,00	0	900.000.000,00	0,00	0
2.08.07.1.01.0005	Penyusunan kebijakan perlindungan khusus anak kewenangan Provinsi	Jumlah kebijakan perlindungan khusus anak di tingkat Provinsi	Kebijakan	1,00	0,00	0	700.000.000,00	92.480.000,00	13,21
2.08.07.1.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah layanan pengaduan masyarakat bagi anak korban kekerasan yang Memerlukan Perlindungan Khusus	Layanan	80,00	0,00	0	486.735.074,00	10.074.500,00	2,07
2.08.07.1.02.0005	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan Kewenangan Provinsi	Orang	40,00	10,00	25	172.716.590,00	10.074.500,00	5,83
2.08.07.1.02.0007	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK Kewenangan Provinsi	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan Kewenangan Provinsi	Layanan	50,00	10,00	20	314.018.484,00	0,00	0
2.08.07.1.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	jumlah dokumen penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan anak	dokumen	1,00	0,00	0	693.760.000,00	0,00	0
2.08.07.1.03.0006	Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak Kewenangan Provinsi	Jumlah KIE Perlindungan AMPK Kewenangan Provinsi	Dokumen	1,00	0,00	0	693.760.000,00	0,00	0

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan (Rp)	Persen (%)
2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase cakupan kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk	Persen	80,00	0,00	0	705.455.220,00	4.005.000,00	0,57
2.12.02.1.02	Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan	Jumlah dokumen fasilitasi layanan pendaftaran penduduk	Dokumen	1,00	0,00	0	550.712.216,00	4.005.000,00	0,73
2.12.02.1.02.0001	Fasilitasi Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	Laporan	3,00	0,00	0	461.805.112,00	4.005.000,00	0,92
2.12.02.1.02.0002	Sosialisasi Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Laporan	1,00	0,00	0	88.907.104,00	0,00	0
2.12.02.1.03	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan	Jumlah dokumen peningkatan kapasitas layanan pendaftaran penduduk	Dokumen	1,00	0,00	0	154.743.004,00	0,00	0
2.12.02.1.03.0001	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk	Laporan	1,00	0,00	0	82.913.300,00	0,00	0
2.12.02.1.03.0002	Bimbingan Teknis terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk	Laporan	1,00	0,00	0	71.829.704,00	0,00	0
2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase cakupan kepemilikan dokumen pencatatan sipil	Persen	100,00	0,00	0	724.664.060,00	29.750.000,00	4,11
2.12.03.1.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi	Jumlah dokumen penyelenggaraan pencatatan sipil	Dokumen	2,00	0,00	0	380.172.620,00	29.750.000,00	7,83
2.12.03.1.02.0001	Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil	Laporan	1,00	0,00	0	297.004.620,00	29.750.000,00	10,02
2.12.03.1.02.0002	Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	Laporan	1,00	0,00	0	83.168.000,00	0,00	0
2.12.03.1.03	Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Jumlah dokumen pemberian konsultasi penyelenggaraan pencatatan sipil	Dokumen	2,00	0,00	0	344.491.440,00	0,00	0
2.12.03.1.03.0001	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pencatatan Sipil	Laporan	1,00	0,00	0	88.920.000,00	0,00	0
2.12.03.1.03.0002	Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	Laporan	1,00	0,00	0	255.571.440,00	0,00	0
2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Publikasi data kependudukan skala provinsi	Kali	2,00	0,00	0	500.594.593,00	0,00	0
2.12.04.1.02	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	Persentase jumlah OPD yang memanfaatkan data kependudukan	Persen	28,00	0,00	0	309.785.413,00	0,00	0
2.12.04.1.02.0001	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan	Laporan	1,00	0,00	0	81.644.927,00	0,00	0
2.12.04.1.02.0002	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan	Laporan	1,00	0,00	0	36.125.496,00	0,00	0
2.12.04.1.02.0005	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil pemanfaatan data kependudukan	Dokumen	3,00	0,00	0	192.014.990,00	0,00	0
2.12.04.1.03	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	Jumlah dokumen pembinaan dan pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Dokumen	1,00	0,00	0	190.809.180,00	0,00	0
2.12.04.1.03.0001	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Laporan	1,00	0,00	0	37.760.000,00	0,00	0
2.12.04.1.03.0002	Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Jumlah Sumber Daya Manusia yang Mengikuti Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Orang	60,00	0,00	0	153.049.180,00	0,00	0
2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Angka Kelahiran Total	%	60,00	0,00	0	607.890.285,00	0,00	0
2.14.02.1.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan	sektor	5,00	0,00	0	607.890.285,00	0,00	0
2.14.02.1.01.0003	Advokasi dan Sosialisasi GDPK	Jumlah Laporan Pelaksanaan Advokasi dan Sosialisasi GDPK	Laporan	3,00	0,00	0	277.901.588,00	0,00	0
2.14.02.1.01.0016	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Formal, Nonformal dan Informal Pada Jenjang SLTA-MA melalui Sekolah Siaga Kependudukan/SSK dan Pojok Kependudukan/PJK	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal, Nonformal dan Informal Pada Jenjang SLTA-MA Melalui Sekolah Siaga Kependudukan/SSK dan Pojok Kependudukan/PJK	Laporan	2,00	0,00	0	329.988.697,00	0,00	0
2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Angka prevalensi kontrasepsi modern	%	68,42	0,00	0	641.647.945,00	0,00	0
2.14.03.1.01	Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Rasio akseptor KB	%	0,76	0,00	0	641.647.945,00	0,00	0
2.14.03.1.01.0007	Pengembangan dan Penyediaan Materi Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi dan Hak-Hak Reproduksi sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan dan Penyediaan Materi Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi dan Hak-Hak Reproduksi sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal	Dokumen	1,00	0,00	0	99.999.613,00	0,00	0

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan (Rp)	Persen (%)
2.14.03.1.01.0010	Fasilitasi Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program Bangga Kencana	Jumlah fasilitasi Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	Daerah	1,00	0,00	0	170.648.532,00	0,00	0
2.14.03.1.01.0012	Pelaksanaan Advokasi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Mitra Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Mitra Kerja	Daerah	1,00	0,00	0	370.999.800,00	0,00	0
2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	%	65,54	0,00	0	1.118.899.108,00	90.779.956,00	8,11
2.14.04.1.01	Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah organisasi perempuan yang mendapatkan pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	Organisasi	4,00	0,00	0	1.019.899.556,00	90.779.956,00	8,9
2.14.04.1.01.0003	Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Dokumen	1,00	0,00	0	920.900.000,00	18.660.000,00	2,03
2.14.04.1.01.0008	Fasilitasi Pengembangan Kelompok Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R) di Kampung KB	Jumlah PIK-R yang Mengikuti Pengembangan Kelompok Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R) di Kampung KB	Organisasi	2,00	2,00	100	98.999.556,00	72.119.956,00	72,85
2.14.04.1.02	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase organisasi pemberdayaan dan peningkatan organisasi kemasyarakatan dalam pembangunan ketahanan keluarga	%	40,00	0,00	0	98.999.552,00	0,00	0
2.14.04.1.02.0003	Sosialisasi dan Promosi Tentang Pemberdayaan Ekonomi Keluarga dan Pengelolaan Keuangan Keluarga	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi dan Promosi Tentang Pemberdayaan Ekonomi Keluarga dan Pengelolaan Keuangan Keluarga	Laporan	1,00	0,00	0	98.999.552,00	0,00	0
2.09.3.27.0.00.01.0000	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura								
2.09.3.27.0.00.01.0000	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura								
2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	Skor Skor	97,60 86,30	0,00 0,00	0 0	4.229.173.741,00	22.139.800,00	0,52
2.09.03.1.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Informasi Sistem Laporan Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan	Laporan	12,00	0,00	0	1.139.149.413,00	22.139.800,00	1,94
2.09.03.1.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Laporan	1,00	0,00	0	243.137.409,00	13.480.000,00	5,85
2.09.03.1.01.0007	Pengembangan usaha Pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah laporan Pengembangan usaha pengolahan pangan berbasis sumber daya lokal	Laporan	1,00	0,00	0	288.815.851,00	0,00	0
2.09.03.1.01.0008	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan pokok strategis	Laporan	1,00	0,00	0	105.525.490,00	0,00	0
2.09.03.1.01.0009	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Provinsi	Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Provinsi	Laporan	5,00	0,00	0	98.355.202,00	7.319.800,00	8,03
2.09.03.1.01.0010	Penyusunan Prognosa Neraca Pangan Wilayah Provinsi	Informasi Prognosa Neraca Pangan Wilayah Provinsi	Dokumen	1,00	0,00	0	152.405.230,00	1.340.000,00	0,9
2.09.03.1.01.0012	Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Provinsi	Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Provinsi	Laporan	1,00	0,00	0	151.641.632,00	0,00	0
2.09.03.1.01.0013	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	Dokumen	1,00	0,00	0	99.268.599,00	0,00	0
2.09.03.1.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi	Persentase Cadangan Pangan Yang Tersedia	%	88,83	0,00	0	648.545.176,00	0,00	0
2.09.03.1.02.0004	Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi yang Terpelihara	Ton	50,00	0,00	0	335.314.100,00	0,00	0
2.09.03.1.02.0006	Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Jumlah penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Ton	100,00	0,00	0	226.599.076,00	0,00	0
2.09.03.1.02.0008	Koordinasi Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Laporan	1,00	0,00	0	86.632.000,00	0,00	0
2.09.03.1.04	Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi	Media Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Media	3,00	0,00	0	2.441.479.152,00	0,00	0
2.09.03.1.04.0001	Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Dokumen	2,00	0,00	0	586.298.166,00	0,00	0
2.09.03.1.04.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	Laporan	2,00	0,00	0	1.387.371.543,00	0,00	0
2.09.03.1.04.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun	Laporan	1,00	0,00	0	467.809.443,00	0,00	0
2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase daerah rawan pangan Jumlah Kecamatan yang Meningkatkan Status Ketahanan Pangsannya	% Kecamatan	0,00 1,00	0,00 0,00	0 0	1.120.534.907,00	1.760.000,00	0,16
2.09.04.1.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi	FSVA	Laporan	1,00	0,00	0	166.339.285,00	0,00	0

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan (Rp)	Persen (%)
2.09.04.1.01.0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi yang Dimutakhirkan	Dokumen	1,00	0,00	0	166.339.285,00	0,00	0
2.09.04.1.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi	Wilayah Rawan Pangan Yang Ditangani	Kecamatan	10,00	0,00	0	954.195.622,00	1.760.000,00	0,18
2.09.04.1.02.0002	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan Pada Kerawanan Pangan yang Mencakup Lebih Dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Dokumen	1,00	0,00	0	364.851.756,00	1.760.000,00	0,53
2.09.04.1.02.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Provinsi	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Provinsi	Laporan	1,00	0,00	0	473.431.958,00	0,00	0
2.09.04.1.02.0005	Penyusunan Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Provinsi	Jumlah Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Provinsi	Dokumen	1,00	0,00	0	115.911.908,00	0,00	0
2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan	%	85,00	0,00	0	1.025.506.441,00	0,00	0
2.09.05.1.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Registrasi, Sertifikat dan Rekomendasi Keamanan Pangan Segar	Dokumen	16,00	0,00	0	1.025.506.441,00	0,00	0
2.09.05.1.01.0006	Sertifikasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan	Jumlah sertifikasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Sertifikat	12,00	0,00	0	101.120.712,00	0,00	0
2.09.05.1.01.0007	Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	Jumlah Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	Dokumen	4,00	0,00	0	74.845.518,00	0,00	0
2.09.05.1.01.0008	Rekomendasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang diterbitkan	Dokumen	1,00	0,00	0	82.677.977,00	0,00	0
2.09.05.1.01.0009	Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Dokumen	1,00	0,00	0	462.840.522,00	0,00	0
2.09.05.1.01.0010	Penyediaan sarana dan prasarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah sarana dan prasarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Dokumen	1,00	0,00	0	236.828.804,00	0,00	0
2.09.05.1.01.0011	Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah dokumen pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Dokumen	1,00	0,00	0	67.192.908,00	0,00	0
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (DPTPH)	Indeks	83,00	0,00	0	71.910.238.569,00	14.158.917.647,00	19,69
		Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti (DPTPH)	%	100,00	0,00	0			
3.27.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan penganggaran yang ditetapkan tepat waktu (Dinas)	%	90,00	27,78	30,87	1.226.099.184,00	40.661.430,00	3,32
3.27.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	5,00	3,00	60	901.775.556,00	33.328.970,00	3,86
3.27.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	2,00	1,00	50	6.215.700,00	0,00	0
3.27.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	2,00	1,00	50	6.215.700,00	0,00	0
3.27.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	4,00	0,00	0	52.370.544,00	0,00	0
3.27.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	4,00	0,00	0	259.521.684,00	7.332.460,00	2,83
3.27.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran (Dinas)	%	91,25	14,06	15,41	65.341.162.352,00	11.466.616.905,00	17,55
3.27.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	352,00	352,00	100	64.585.633.232,00	11.338.705.005,00	19,63
3.27.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12,00	3,00	25	540.480.000,00	126.360.000,00	23,38
3.27.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12,00	2,00	16,67	97.182.258,00	1.551.900,00	1,6
3.27.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	3,00	0,00	0	6.280.530,00	0,00	0
3.27.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	18,00	2,00	11,11	103.337.908,00	0,00	0
3.27.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	4,00	0,00	0	8.248.424,00	0,00	0
3.27.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD yang berfungsi dengan baik (Dinas)	%	45,50	0,00	0	56.928.424,00	4.580.000,00	8,05
3.27.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1,00	0,00	0	4.562.808,00	0,00	0
3.27.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1,00	0,00	0	28.202.808,00	2.290.000,00	8,12
3.27.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1,00	0,00	0	24.162.808,00	2.290.000,00	9,48

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan (Rp)	Persen (%)
3.27.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi (Dinas)	%	85,00	0,00	0	215.286.040,00	94.405.500,00	43,85
3.27.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1,00	1,00	100	98.172.000,00	94.405.500,00	96,16
3.27.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	1,00	0,00	0	10.107.020,00	0,00	0
3.27.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	1,00	0,00	0	14.607.020,00	0,00	0
3.27.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	5,00	0,00	0	92.400.000,00	0,00	0
3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana Kantor yang berfungsi dengan baik (Dinas)	%	90,00	0,00	0	1.128.203.959,00	115.343.708,00	10,22
3.27.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	15,00	3,00	20	19.497.140,00	3.836.000,00	19,67
3.27.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1,00	0,00	0	132.134.669,00	5.585.004,00	4,23
3.27.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	3,00	0,00	0	32.021.840,00	0,00	0
3.27.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	4,00	0,00	0	7.756.800,00	320.000,00	4,13
3.27.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12,00	0,00	0	906.630.000,00	103.312.704,00	11,67
3.27.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	4,00	0,00	0	30.163.510,00	2.290.000,00	7,59
3.27.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan BMD (Dinas)	%	90,00	0,00	0	1.705.638.510,00	0,00	0
3.27.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	3,00	0,00	0	119.631.000,00	0,00	0
3.27.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	60,00	0,00	0	1.586.007.510,00	0,00	0
3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu (Dinas)	%	90,00	0,00	0	1.498.956.800,00	2.424.988.164,00	161,78
3.27.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1,00	0,00	0	21.390.000,00	0,00	0
3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1,00	0,00	0	388.926.800,00	76.557.964,00	19,68
3.27.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1,00	0,00	0	1.088.640.000,00	2.348.430.200,00	29,48
3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi baik (Dinas)	%	90,00	0,00	0	737.963.300,00	12.321.940,00	1,67
3.27.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	2,00	0,00	0	138.750.400,00	4.482.460,00	3,23
3.27.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	52,00	5,00	9,62	246.903.000,00	7.520.681,00	3,05
3.27.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	106,00	0,00	0	133.825.000,00	0,00	0
3.27.01.1.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Unit	2,00	0,00	0	21.078.900,00	318.799,00	1,51
3.27.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	4,00	0,00	0	131.406.000,00	0,00	0
3.27.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	4,00	0,00	0	66.000.000,00	0,00	0
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Tingkat Pemenuhan Sarana Pertanian Tanaman Pangan	%	35,50	0,00	0	23.128.988.186,00	250.924.043,00	1,08
		Tingkat Pemenuhan Sarana Pertanian Hortikultura	%	39,29	0,00	0			
3.27.02.1.01	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Jumlah Luas Lahan yang Difasilitasi Sarana Produksi Pertanian Hortikultura (Dinas)	Ha	809,00	0,00	0	23.128.988.186,00	250.924.043,00	1,08
		Jumlah Luas Lahan yang Difasilitasi Sarana Produksi Pertanian Tanaman Pangan (Dinas)	Ha	8.750,00	0,00	0			
3.27.02.1.01.0001	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Laporan	1,00	0,00	0	20.241.555.512,00	104.084.882,00	0,51
3.27.02.1.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Dokumen	2,00	0,00	0	1.797.737.846,00	146.839.161,00	8,53

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan (Rp)	Persen (%)
3.27.02.1.01.0004	Pengawasan Sebaran Sarana Pascapanen Tanaman Pangan	Jumlah pengawasan ketersediaan dan sebaran sarana pascapanen tanaman pangan	laporan	1,00	0,00	0	8.365.380,00	0,00	0
3.27.02.1.01.0006	Pengawasan Sebaran Sarana Pascapanen Hortikultura	Jumlah pengawasan ketersediaan dan sebaran sarana pascapanen hortikultura	laporan	1,00	0,00	0	681.200.838,00	0,00	0
3.27.02.1.01.0007	Pengawasan Sebaran Sarana Pengolahan Hasil Hortikultura	Jumlah pengawasan ketersediaan dan sebaran sarana pengolahan hasil hortikultura	laporan	1,00	0,00	0	400.128.610,00	0,00	0
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Tingkat Pemenuhan Prasarana Pertanian Hortikultura	%	34,00	0,00	0	2.546.687.896,00	132.728.352,00	5,21
		Tingkat Pemenuhan Prasarana Pertanian Tanaman Pangan	%	41,39	0,00	0			
3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian	Jumlah Kelompok Tani Yang Menerima Bantuan Tanamana Pangan	Kel. Tani	200,00	0,00	0	2.546.687.896,00	132.728.352,00	5,21
		Jumlah Fasilitas Hortikultura Yang Diberikan	Unit	2,00	0,00	0			
3.27.03.1.01.0001	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Jumlah Rencana Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Dokumen	1,00	0,00	0	449.687.908,00	11.583.096,00	2,58
3.27.03.1.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jalan Usaha Tani	Dokumen	1,00	0,00	0	51.620.760,00	0,00	0
3.27.03.1.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	Dokumen	1,00	0,00	0	51.620.760,00	0,00	0
3.27.03.1.01.0009	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Laporan	1,00	0,00	0	805.520.748,00	121.145.256,00	15,36
3.27.03.1.01.0014	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Hortikultura	Jumlah prasarana pascapanen hortikultura yang dikendalikan dan dimanfaatkan	Unit	2,00	0,00	0	74.318.600,00	0,00	0
3.27.03.1.01.0016	Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di tingkat Provinsi	Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di tingkat Provinsi	Dokumen	1,00	0,00	0	999.658.360,00	0,00	0
3.27.03.1.01.0025	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan	Jumlah prasarana pengolahan hasil tanaman pangan yang dikendalikan dan dimanfaatkan	Unit	1,00	0,00	0	114.260.760,00	0,00	0
2.09.3.27.0.00.01.0002	UPTD Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura								
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD PSBTPH TPH)	Indeks	82,00	0,00	0	1.730.702.249,00	183.984.849,00	10,63
		Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti (UPTD PSBTPH TPH)	%	100,00	0,00	0			
3.27.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran (UPTD PSBTPH)	%	91,25	0,00	7,67	81.000.000,00	13.500.000,00	16,67
3.27.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	1,00	0,00	0	81.000.000,00	13.500.000,00	16,67
3.27.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi (UPTD PSBTPH)	%	85,00	0,00	69,41	231.375.000,00	28.449.300,00	12,3
3.27.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	37,00	0,00	54,05	231.375.000,00	28.449.300,00	12,79
3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik (UPTD PSBTPH)	%	90,00	8,00	8,89	239.760.419,00	6.752.522,00	2,82
3.27.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	4,00	0,00	0	4.885.698,00	0,00	0
3.27.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12,00	0,00	0	49.654.721,00	0,00	0
3.27.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12,00	0,00	8,33	18.750.000,00	1.092.522,00	5,83
3.27.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12,00	0,00	25	166.470.000,00	5.660.000,00	4,15
3.27.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan BMD (UPTD PSBTPH)	%	90,00	0,00	0	269.665.130,00	0,00	0
3.27.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	27,00	0,00	0	269.665.130,00	0,00	0
3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu (UPTD PSBTPH)	%	90,00	0,00	33,33	775.765.000,00	134.518.027,00	17,34
3.27.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1,00	0,00	0	4.500.000,00	0,00	0
3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1,00	0,00	0	199.105.000,00	39.158.027,00	19,67
3.27.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1,00	0,00	0	572.160.000,00	95.360.000,00	16,67
3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi baik (UPTD PSBTPH)	%	90,00	0,00	0	133.136.700,00	765.000,00	0,57

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan (Rp)	Persen (%)
3.27.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	13,00	0,00	0	58.600.500,00	0,00	0
3.27.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	39,00	0,00	2,56	28.996.000,00	765.000,00	2,64
3.27.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	12,00	0,00	0	45.540.200,00	0,00	0
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Jumlah legalitas tanaman pangan dan hortikultura yang terawasi	Sertifikat	195,00	26,85	13,77	1.530.417.599,00	25.814.780,00	1,69
		Jumlah varietas daerah yang diidentifikasi	Varietas	3,00	0,00	0			
3.27.02.1.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Jumlah Produsen Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura yang Diterbitkan Sertifikat Kompetensi/Rekomendasi (UPTD PSBTPH)	Sertifikat	195,00	58,00	29,74	1.471.892.599,00	25.814.780,00	1,75
3.27.02.1.02.0001	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	Jumlah Sertifikat Benih	Sertifikat	95,00	20,00	21,05	763.104.006,00	7.775.000,00	1,16
3.27.02.1.02.0005	Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan	Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga	laporan	120,00	38,00	31,67	708.788.593,00	18.039.780,00	3,12
3.27.02.1.03	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi	Jumlah Varietas Daerah yang Dinilai (UPTD PSBTPH)	Varietas	3,00	0,00	33,33	58.525.000,00	0,00	0
3.27.02.1.03.0002	Penilaian Kultivar SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme	Jumlah Kultivar SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme yang Dinilai	Varietas Unggul Baru (VUB)	3,00	0,00	33,33	58.525.000,00	0,00	0
2.09.3.27.0.00.01.0003	UPTD Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura								
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD PTPH)	Indeks	81,50	0,00	22,21	3.543.707.499,00	213.822.134,00	6,03
		Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti (UPTD PTPH)	%	100,00	0,00	0			
3.27.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran (UPTD PTPH)	%	88,00	0,00	0	88.560.000,00	0,00	0
3.27.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	1,00	0,00	0	88.560.000,00	0,00	0
3.27.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi (UPTD PTPH)	%	83,80	0,00	0	134.082.000,00	0,00	0
3.27.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1,00	0,00	0	89.082.000,00	0,00	0
3.27.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	3,00	0,00	0	45.000.000,00	0,00	0
3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik (UPTD PTPH)	%	81,05	0,00	0	547.959.661,00	2.997.500,00	0,55
3.27.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1,00	0,00	0	6.959.800,00	0,00	0
3.27.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	7,00	0,00	0	140.630.914,00	0,00	0
3.27.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2,00	0,00	0	12.782.456,00	204.000,00	1,6
3.27.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	2,00	0,38	19	3.878.400,00	0,00	0
3.27.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4,00	0,00	0	383.708.091,00	2.793.500,00	0,85
3.27.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan BMD (UPTD PTPH)	%	80,00	0,00	0	279.159.178,00	0,00	0
3.27.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	9,00	0,00	0	279.159.178,00	0,00	0
3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu (UPTD PTPH)	%	88,80	0,00	0	1.401.910.720,00	204.829.134,00	14,61
3.27.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1,00	0,00	0	3.000.000,00	0,00	0
3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1,00	0,00	0	325.150.720,00	26.389.134,00	8,12
3.27.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1,00	0,00	0	1.073.760.000,00	178.440.000,00	16,62
3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi baik (UPTD PTPH)	%	89,50	0,00	0	1.092.035.940,00	5.995.500,00	0,55
3.27.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	5,00	0,00	0	111.852.500,00	5.995.500,00	5,36

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan (Rp)	Persen (%)
3.27.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2,00	0,00	0	980.183.440,00	0,00	0
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Pengawasan Jumlah Pestisida dan Pupuk	Kios	40,00	0,00	12	503.981.155,00	8.170.000,00	1,62
3.27.02.1.01	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Jumlah Kios Pupuk dan Pestisida yang diawasi	Kios	40,00	0,00	15	151.794.012,00	5.680.000,00	3,74
3.27.02.1.01.0001	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Laporan	45,00	0,00	0	151.794.012,00	5.680.000,00	4,21
3.27.02.1.03	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi	Jumlah Pelaksanaan Pengembangan Teknologi (UPTD PTPH)	Laporan	10,00	0,00	0	352.187.143,00	2.490.000,00	0,71
3.27.02.1.03.0004	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme	Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme	Laporan	3,00	0,00	0	352.187.143,00	2.490.000,00	0,76
3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Rasio luas serangan OPT Tanaman Pangan dan Hortikultura yang dapat ditangani terhadap luas serangan OPT	%	75,50	0,00	49,21	1.341.700.296,00	16.076.000,00	1,2
3.27.05.1.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	Jumlah Luasan Penanganan Pengendalian OPT dan DPI (UPTD PTPH)	Ha	15.050,00	0,00	49,29	1.341.700.296,00	16.076.000,00	1,2
3.27.05.1.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	Ha	15.100,00	0,00	49,13	921.909.280,00	12.756.000,00	1,48
3.27.05.1.01.0002	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani	Ha	55,00	0,00	0	419.791.016,00	3.320.000,00	0,83
2.09.3.27.0.00.01.0004	UPTD Balai Benih Induk Tanaman Pangan dan Hortikultura								
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti (UPTD BBI TPH)	%	100,00	0,00	0	22.052.362.357,00	253.041.228,00	15,6
		Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD BBI TPH)	Indeks	81,50	0,00	0			
3.27.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran (UPTD BBITPH)	%	100,00	0,00	0	105.960.000,00	17.660.000,00	16,67
3.27.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12,00	0,00	0	105.960.000,00	17.660.000,00	16,67
3.27.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	%	100,00	0,00	0	255.903.000,00	5.400.000,00	2,11
3.27.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1,00	0,00	0	60.903.000,00	0,00	0
3.27.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	13,00	0,00	0	195.000.000,00	5.400.000,00	2,77
3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana Kantor yang berfungsi dengan baik (UPTD BBITPH)	%	100,00	0,00	0	290.229.394,00	45.711.300,00	15,75
3.27.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	5,00	0,00	0	9.996.355,00	230.000,00	2,3
3.27.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12,00	0,00	0	19.977.317,00	732.500,00	3,67
3.27.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12,00	0,00	0	2.499.722,00	0,00	0
3.27.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12,00	0,00	0	257.756.000,00	44.748.800,00	20,12
3.27.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan BMD (UPTD BBITPH)	%	100,00	0,00	0	20.457.166.663,00	0,00	0
3.27.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	3,00	0,00	0	26.848.697,00	0,00	0
X.XX.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	167,00	0,00	0	20.430.317.966,00	0,00	0
3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu (UPTD BBITPH)	%	100,00	0,00	0	563.480.300,00	118.656.353,00	21,06
3.27.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1,00	0,00	0	3.000.000,00	2.000.000,00	66,67
3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1,00	0,00	0	337.160.300,00	79.536.353,00	23,59
3.27.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1,00	0,00	0	223.320.000,00	37.120.000,00	16,62
3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi baik	%	100,00	0,00	0	379.623.000,00	65.613.575,00	17,28
3.27.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	7,00	0,00	0	149.995.000,00	15.544.575,00	10,36
3.27.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	47,00	0,00	0	79.628.000,00	850.000,00	1,07

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan (Rp)	Persen (%)
3.27.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	4,00	0,00	0	150.000.000,00	49.219.000,00	32,81
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Pemenuhan Benih Sumber Tanaman Pangan	%	11,55	0,00	0	1.845.817.944,00	34.828.950,00	1,89
		Persentase Pemenuhan Benih Sumber dan Sebar Hortikultura	%	30,33	0,00	0			
3.27.02.1.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Luas Lahan Yang Menggunakan Benih Bersertifikat (UPTD BBITPH)	Ha	935,00	0,00	0	1.845.817.944,00	34.828.950,00	1,89
3.27.02.1.02.0007	Perbanyak Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang	Jumlah benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Batang yang diperbanyak	Batang	50.000,00	0,00	0	1.171.834.379,00	22.745.600,00	2
3.27.02.1.02.0013	Perbanyak Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih	Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak	Ton	25,00	0,00	0	673.983.565,00	12.083.350,00	1,89
2.09.3.27.0.00.01.0005	UPTD Balai Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian								
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD BPPSDMP)	Indeks	82,00	80,00	97,56	2.128.705.033,00	94.800.000,00	4,45
		Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti (UPTD BPPSDMP)	%	100,00	100,00	100			
3.27.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran (UPTD BPPSDMP)	%	90,00	4,47	4,97	93.000.000,00	0,00	0
3.27.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	1,00	0,00	0	93.000.000,00	0,00	0
3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik (UPTD BPPSDMP)	%	90,00	80,00	88,89	144.232.915,00	0,00	0
3.27.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1,00	0,00	0	13.312.915,00	0,00	0
3.27.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1,00	0,00	0	130.920.000,00	0,00	0
3.27.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan BMD (BPPSDMP)	%	90,00	80,00	88,89	103.209.360,00	0,00	0
3.27.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1,00	0,00	0	103.209.360,00	0,00	0
3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu (UPTD BPPSDMP)	%	95,00	0,00	84,21	1.154.173.242,00	94.800.000,00	8,21
3.27.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1,00	0,00	0	13.333.480,00	0,00	0
3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1,00	0,00	0	210.180.500,00	0,00	0
3.27.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	1,00	0,00	0	34.019.262,00	0,00	0
3.27.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1,00	0,00	0	896.640.000,00	94.800.000,00	10,57
3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi baik (UPTD BPPSDMP)	%	90,00	0,00	88,89	634.089.516,00	0,00	0
3.27.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	29,00	0,00	0	107.811.500,00	0,00	0
3.27.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1,00	0,00	0	526.278.016,00	0,00	0
3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Sumber Daya Manusia Pertanian yang Meningkatkan Kapasitasnya	%	77,00	0,00	0	4.587.478.128,00	0,00	0
3.27.07.1.01	Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah Penyuluh Pertanian ASN dan Swadaya yang Mengikuti Pelatihan (UPTD BPPSDMP)	Orang	270,00	0,00	0	1.367.427.700,00	0,00	0
3.27.07.1.01.0003	Penguatan Kelembagaan penyuluhan pertanian	Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian yang ditingkatkan kapasitasnya	Unit	20,00	0,00	0	143.390.800,00	0,00	0
3.27.07.1.01.0004	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian	Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya	Orang	300,00	0,00	0	1.224.036.900,00	0,00	0
3.27.07.1.02	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penerapan Penyuluhan Pertanian (UPTD BPPSDMP)	Laporan	7,00	0,00	0	2.941.462.428,00	0,00	0
3.27.07.1.02.0001	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Dokumen	2,00	0,00	0	2.691.102.372,00	0,00	0
3.27.07.1.02.0002	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan	Kelompok	9,00	0,00	0	250.360.056,00	0,00	0
3.27.07.1.03	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	Kelembagaan Korporasi Petani dan Sekolah Lapang yang Meningkatkan kapasitasnya (UPTD BPPSDMP)	Unit	9,00	0,00	0	278.588.000,00	0,00	0
3.27.07.1.03.0005	Pendampingan dan pengawalan korporasi petani	Jumlah korporasi petani yang didampingi	Unit	5,00	0,00	0	244.670.000,00	0,00	0

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan (Rp)	Persen (%)
3.27.07.1.03.0006	Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Korporasi Petani	Jumlah korporasi petani yang dibentuk dan beroperasi	Unit	1,00	0,00	0	33.918.000,00	0,00	0
2.11.0.00.0.00.01.0000	Dinas Lingkungan Hidup								
2.11.0.00.0.00.01.0000	Dinas Lingkungan Hidup								
2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti	Indeks %	88,50 100,00	4,71 100,00	5,32 100	33.162.600.106,00	5.161.780.451,00	15,57
2.11.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase perencanaan, penganggaran, evaluasi, dan pelaporan yang diselesaikan	%	100,00	0,00	0	861.904.571,00	0,00	0
2.11.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	3,00	0,00	0	497.455.438,00	0,00	0
2.11.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	2,00	0,00	0	51.594.937,00	0,00	0
2.11.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	2,00	0,00	0	23.199.640,00	0,00	0
2.11.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	4,00	1,00	25	197.397.586,00	0,00	0
2.11.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	4,00	1,00	25	92.256.970,00	0,00	0
2.11.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penatausahaan keuangan	%	100,00	0,00	0	23.600.152.419,00	3.745.471.047,00	15,87
2.11.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	831,00	209,00	25,15	22.584.780.872,00	3.670.091.047,00	16,25
2.11.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	1,00	0,00	0	475.964.000,00	62.620.000,00	13,16
2.11.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	2,00	0,00	0	308.357.547,00	12.760.000,00	4,14
2.11.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	1,00	0,00	0	80.950.000,00	0,00	0
2.11.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	2,00	0,00	0	60.750.000,00	0,00	0
2.11.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	2,00	0,00	0	89.350.000,00	0,00	0
2.11.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase barang milik daerah pada SKPD yang telah ditatausahakan	%	100,00	0,00	0	58.808.520,00	0,00	0
2.11.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	3,00	0,00	0	2.599.010,00	0,00	0
2.11.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1,00	0,00	0	27.740.000,00	0,00	0
2.11.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	2,00	0,00	0	28.469.510,00	0,00	0
2.11.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai yang mendapatkan pelayanan kepegawaian	%	100,00	0,00	0	591.205.617,00	0,00	0
2.11.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	230,00	0,00	0	191.848.167,00	0,00	0
2.11.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	1,00	0,00	0	91.067.450,00	0,00	0
2.11.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	1,00	0,00	0	24.000.000,00	0,00	0
2.11.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	20,00	0,00	0	284.290.000,00	0,00	0
2.11.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administasi umum	%	100,00	0,00	0	1.865.320.983,00	0,00	0
2.11.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	2,00	0,00	0	30.831.938,00	0,00	0
2.11.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	4,00	0,00	0	315.804.000,00	0,00	0
2.11.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	4,00	0,00	0	98.819.520,00	0,00	0
2.11.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	10,00	0,00	0	5.000.000,00	0,00	0
2.11.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan \Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	100,00	0,00	0	1.414.865.525,00	0,00	0
2.11.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase barang milik daerah yang diadakan	%	100,00	0,00	0	1.344.543.300,00	0,00	0

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan (Rp)	Persen (%)
2.11.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	2,00	0,00	0	85.770.000,00	0,00	0
2.11.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	5,00	0,00	0	1.258.773.300,00	0,00	0
2.11.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa kantor	%	100,00	25,00	25	3.625.218.700,00	1.416.309.404,00	39,07
2.11.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12,00	0,00	0	11.946.000,00	0,00	0
2.11.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12,00	3,00	25	1.699.991.500,00	200.221.533,00	11,78
2.11.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12,00	3,00	25	1.913.281.200,00	1.216.087.871,00	63,56
2.11.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	%	67,00	0,00	0	1.215.445.996,00	0,00	0
2.11.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	30,00	0,00	0	513.895.050,00	0,00	0
2.11.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	54,00	0,00	0	248.080.946,00	0,00	0
2.11.01.1.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Unit	1,00	0,00	0	49.950.000,00	0,00	0
2.11.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1,00	0,00	0	403.520.000,00	0,00	0
2.11.02	PROGRAM Perencanaan LINGKUNGAN HIDUP	Persentase kebijakan perencanaan lingkungan hidup yang direkomendasikan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan dan wilayah (%)	%	100,00	0,00	0	1.982.881.342,00	12.140.000,00	0,61
2.11.02.1.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi	Persentase pelaksanaan perlindungan dan pengendalian lingkungan hidup terhadap dokumen RPPLH	%	100,00	0,00	0	1.508.082.369,00	5.000.000,00	0,33
2.11.02.1.01.0002	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang telah Mengakomodir RPPLH Provinsi	Dokumen	1,00	0,00	0	731.710.621,00	5.000.000,00	0,68
2.11.02.1.01.0004	Penyusunan RPPLH Provinsi	jumlah dokumen RPPLH di Provinsi yang berisi arahan/muatan RPPLH Provinsi dan Kabupaten/Kota yang lintas administrasi	Dokumen	1,00	0,00	0	776.371.748,00	0,00	0
2.11.02.1.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi	Persentase penyelenggaraan dokumen perencanaan Lingkungan Hidup Strategis	%	100,00	0,00	0	474.798.973,00	7.140.000,00	1,5
2.11.02.1.02.0002	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Provinsi yang Disusun	Dokumen	1,00	0,00	0	167.247.973,00	7.140.000,00	4,27
2.11.02.1.02.0007	Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Provinsi yang Terintegrasi dengan Perencanaan Darat dan Laut yang Disusun	Dokumen	1,00	0,00	0	307.551.000,00	0,00	0
2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Pencemaran	s(tercemarran)Indeks	5,00	0,00	0	8.230.269.367,00	128.112.185,00	1,56
		Indeks Standar Pencemar Udara	(Baik)Indeks	47,00	0,00	0			
2.11.03.1.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	%	100,00	0,00	0	6.156.790.922,00	63.862.185,00	1,04
2.11.03.1.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Dokumen	216,00	40,00	18,52	2.452.881.187,00	0,00	0
2.11.03.1.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi GRK dari sektor lingkungan hidup yang Dilaksanakan	Dokumen	5,00	0,00	0	3.703.909.735,00	63.862.185,00	1,72
2.11.03.1.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase pemenuhan baku mutu	Persen	81,00	0,00	0	1.247.311.425,00	64.250.000,00	5,15
2.11.03.1.02.0001	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat lintas Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	Laporan	2,00	1,00	50	146.027.799,00	0,00	0
2.11.03.1.02.0002	Pengisolasian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Lokasi Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Diisolasi	Lokasi	275,00	0,00	0	1.101.283.626,00	64.250.000,00	5,83
2.11.03.1.03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase Penurunan kerusakan lingkungan	%	45,00	0,00	0	826.167.020,00	0,00	0
2.11.03.1.03.0006	Koordinasi dan Sinkronisasi restorasi	Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi restorasi lintas kabupaten/kota yang dilaksanakan	Kegiatan	3,00	0,00	0	437.387.020,00	0,00	0
2.11.03.1.03.0009	Koordinasi dan Sinkronisasi rehabilitasi	jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi lintas kabupaten/kota yang dilaksanakan	Kegiatan	9,00	0,00	0	243.080.000,00	0,00	0
2.11.03.1.03.0012	Koordinasi dan Sinkronisasi remediasi	jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi remediasi lintas kabupaten/kota yang dilaksanakan	Kegiatan	1,00	0,00	0	145.700.000,00	0,00	0
2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Luas kawasan yang memiliki nilai keanekaragaman hayati tinggi di dalam kawasan hutan ataupun diluar kawasan hutan yang dikelola	Ha	319,29	0,00	0	1.149.999.900,00	18.556.400,00	1,61

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan (Rp)	Persen (%)
2.11.04.1.01	Pengelolaan Keekaragaman Hayati Provinsi	Persentase luas kawasan yang memiliki nilai penting bagi konservasi keekaragaman hayati	%	60,00	0,00	0	1.149.999.900,00	18.556.400,00	1,61
2.11.04.1.01.0001	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keekaragaman Hayati	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun	Dokumen	1,00	0,00	0	499.999.900,00	18.556.400,00	3,71
2.11.04.1.01.0006	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keekaragaman Hayati	Jumlah Orang yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keekaragaman Hayati	Orang	60,00	0,00	0	240.320.000,00	0,00	0
2.11.04.1.01.0007	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keekaragaman Hayati	Jumlah Sarana dan Prasarana Keekaragaman Hayati yang Dikelola	Unit	1,00	0,00	0	159.680.000,00	0,00	0
2.11.04.1.01.0009	Pengelolaan Taman Keekaragaman Hayati Lainnya	Unit taman Kehati lainnya yang Dikelola Lingkup Kewenangan Provinsi	Unit	1,00	0,00	0	250.000.000,00	0,00	0
2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase limbah B3 yang dikumpulkan oleh pengumpul limbah dari total limbah B3 yang dihasilkan (%)	%	52,00	0,00	0	696.650.139,00	4.370.000,00	0,63
2.11.05.1.01	Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah pengumpulan limbah B3 sesuai peraturan oleh pelaku usaha	Usaha	25,00	0,00	0	696.650.139,00	4.370.000,00	0,63
2.11.05.1.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Pengumpulan Limbah B3 lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Dokumen	4,00	0,00	0	302.450.492,00	1.790.000,00	0,59
2.11.05.1.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan Yang Bukan Kewenangan Provinsi Serta Pelaksanaan Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Sesuai Kewenangannya	Dokumen	7,00	0,00	0	394.199.647,00	2.580.000,00	0,65
2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase pengawasan terhadap izin dan/atau persetujuan lingkungan yang diterbitkan pemerintah provinsi	%	55,00	13,88	25,24	2.398.467.258,00	62.813.600,00	2,62
2.11.06.1.01	Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase penyelesaian sanksi administratif yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi	%	67,50	0,00	0	2.398.467.258,00	62.813.600,00	2,62
2.11.06.1.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan operasi yang diberikan	Dokumen	46,00	10,00	21,74	675.799.582,00	9.107.200,00	1,35
2.11.06.1.01.0005	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Jumlah PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya	Orang	35,00	0,00	0	145.590.884,00	0,00	0
2.11.06.1.01.0006	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	BadanUsaha	160,00	25,00	15,63	1.577.076.792,00	53.706.400,00	3,41
2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Jumlah Kelompok masyarakat/lembaga yang meningkat kesadaran untuk menjaga lingkungan hidup	Kelompok	120,00	70,00	58,33	1.763.704.760,00	26.480.000,00	1,5
2.11.08.1.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase peningkatan usulan calon penerima penghargaan lingkungan hidup	%	50,00	25,00	50	1.763.704.760,00	26.480.000,00	1,5
2.11.08.1.01.0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	Dokumen	135,00	70,00	51,85	1.763.704.760,00	26.480.000,00	1,5
2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase penghargaan lingkungan hidup yang diberikan pada masyarakat/ lembaga pendidikan/dunia usaha dari hasil pembinaan (%)	%	84,42	0,00	0	744.976.131,00	0,00	0
2.11.09.1.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Peningkatan Jumlah Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/ Filantropi yang mendapatkan penghargaan dalam rangka PPLH di tingkat Provinsi	%	20,00	0,00	0	744.976.131,00	0,00	0
2.11.09.1.01.0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	Entitas	65,00	0,00	0	744.976.131,00	0,00	0
2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase pengaduan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup kewenangan provinsi yang diselesaikan (%)	%	100,00	0,00	0	1.695.759.728,00	23.324.738,00	1,38
2.11.10.1.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi	Persentase pengaduan di bidang PPLH yang ditindaklanjuti	%	100,00	0,00	0	1.695.759.728,00	23.324.738,00	1,38

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan (Rp)	Persen (%)
2.11.10.1.01.0003	Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan Provinsi	Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan Provinsi	Perkara	15,00	0,00	0	178.719.431,00	0,00	0
2.11.10.1.01.0005	Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan Provinsi	Jumlah sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan Provinsi	Perkara	8,00	0,00	0	533.382.262,00	7.216.838,00	1,35
2.11.10.1.01.0007	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi yang ditindaklanjuti/ditangani	Pengaduan	20,00	0,00	0	983.658.035,00	16.107.900,00	1,64
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase sampah yang dikelola (%)	%	89,00	0,00	0	2.234.999.269,00	22.509.985,00	1,01
2.11.11.1.01	Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Capaian penanganan sampah di kab/kota se-Kaltim	%	70,00	0,00	0	2.234.999.269,00	22.509.985,00	1,01
2.11.11.1.01.0009	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Provinsi	Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah provinsi yang disusun dan ditetapkan	Dokumen	1,00	0,00	0	273.600.000,00	0,00	0
2.11.11.1.01.0014	Koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota	Dokumen	3,00	0,00	0	1.961.399.269,00	22.509.985,00	1,15
2.13.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa								
2.13.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa								
2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Pelayanan Kesekretariatan	Indeks	84,00	0,00	0	12.806.533.376,00	3.936.714.665,00	30,74
		Presentase Keluhan yang di tindaklanjuti	%	100,00	0,00	0			
2.13.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	3,00	0,00	0	17.616.366.443,00	2.350.639.379,00	13,34
2.13.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2,00	0,00	0	311.884.637,00	25.307.342,00	8,11
2.13.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1,00	0,00	0	129.794.080,00	1.650.000,00	1,27
2.13.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1,00	0,00	0	109.982.166,00	1.320.000,00	1,2
2.13.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	2,00	0,00	0	142.510.700,00	20.093.633,00	14,1
2.13.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	1,00	0,00	0	287.631.790,00	0,00	0
2.13.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
X.XX.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	85,00	0,00	0	16.634.563.070,00	2.302.268.404,00	17,01
2.13.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	1,00	1,00	100	457.320.000,00	87.280.000,00	19,09
2.13.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	1,00	0,00	0	153.542.500,00	12.110.800,00	7,89
2.13.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1,00	1,00	100	61.956.000,00	390.000,00	0,63
2.13.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	1,00	1,00	100	31.776.784,00	5.500.000,00	17,31
2.13.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	18,00	3,00	16,67	243.663.000,00	48.815.800,00	24,03
2.13.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	1,00	0,00	0	6.609.500,00	0,00	0
2.13.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								
2.13.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1,00	0,00	0	5.503.800,00	0,00	0
2.13.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1,00	0,00	0	61.414.190,00	0,00	0
2.13.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								
2.13.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	3,00	1,00	33	204.775.777,00	0,00	0
2.13.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	1,00	1,00	100	598.985.260,00	10.613.000,00	1,77
2.13.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	1,00	0,00	0	173.075.520,00	0,00	0

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan (Rp)	Persen (%)
2.13.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	25,00	0,00	0	391.114.640,00	0,00	0
2.13.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kantor Yang Berfungsi Dengan Baik	Buah	150,00	0,00	0	2.583.387.770,00	128.478.461,00	4,97
2.13.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	3,00	0,00	0	66.349.698,00	0,00	0
2.13.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	3,00	0,00	0	75.628.647,00	0,00	0
2.13.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	3,00	0,00	0	108.469.708,00	0,00	0
2.13.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	5,00	1,00	20	620.833.107,00	23.019.550,00	3,71
2.13.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	3,00	1,00	33	137.838.610,00	1.649.000,00	1,2
2.13.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1,00	1,00	100	1.449.570.000,00	99.868.711,00	6,89
2.13.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1,00	0,00	0	69.782.000,00	0,00	0
2.13.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	1,00	1,00	100	54.916.000,00	3.941.200,00	7,18
2.13.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Unit	3,00	0,00	0	300.858.363,00	0,00	0
2.13.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	1,00	0,00	0	250.000,00	0,00	0
2.13.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	1,00	0,00	0	250.000,00	0,00	0
2.13.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	1,00	0,00	0	6.631.390,00	0,00	0
2.13.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	15,00	1,00	6,67	293.726.973,00	0,00	0
2.13.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis	2,00	0,00	0	3.208.366.700,00	1.266.987.225,00	39,49
2.13.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1,00	1,00	100	994.506.000,00	156.621.824,00	15,75
2.13.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	1,00	1,00	100	427.417.700,00	34.243.500,00	8,01
2.13.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1,00	1,00	100	1.786.443.000,00	1.076.121.901,00	60,24
2.13.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Kantor Yang Berfungsi Dengan Baik	Unit	20,00	0,00	0	3.342.380.199,00	25.900.000,00	0,77
2.13.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	6,00	0,00	0	131.241.999,00	0,00	0
2.13.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	5,00	1,00	20	415.772.000,00	13.600.000,00	3,27
2.13.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	5,00	1,00	20	553.967.200,00	4.800.000,00	0,87
2.13.01.1.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Unit	3,00	1,00	33,33	114.885.000,00	7.500.000,00	6,53
2.13.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	25,00	0,00	0	2.126.514.000,00	0,00	0
2.13.02	PROGRAM PENATAAN DESA	Presentase desa yang difasilitasi penataan desanya	%	2,14	0,00	0	704.749.342,00	34.015.193,00	4,83
2.13.02.1.01	Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat	Jumlah Desa yang difasilitasi Penataan Desanya	Desa	18,00	0,00	0	704.749.342,00	34.015.193,00	4,83
2.13.02.1.01.0001	Identifikasi, Inventarisasi dan Fasilitasi Penataan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat yang menjadi kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi, Inventarisasi dan Fasilitasi Penataan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat yang menjadi kewenangan Provinsi yang Dilaksanakan	Dokumen	1,00	0,00	0	149.999.342,00	5.504.800,00	3,67
2.13.02.1.01.0003	Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa	Dokumen	1,00	0,00	0	554.750.000,00	28.510.393,00	5,14
2.13.03	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Presentase peningkatan status desa yang menjadi maju	%	2,97	0,00	0	6.662.525.436,00	126.145.633,00	1,89
2.13.03.1.01	Fasilitasi Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi	Terlaksananya fasilitasi kerjasama antar desa yang menjadi kewenangan provinsi	Kab/Kota	10,00	0,00	0	6.662.525.436,00	126.145.633,00	1,89
2.13.03.1.01.0001	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Desa Lintas Kabupaten/Kota	Dokumen	3,00	0,00	0	6.073.591.480,00	126.145.633,00	2,1

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan (Rp)	Persen (%)
2.13.03.1.01.0002	Fasilitasi Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	Jumlah Dokumen Kerja Sama dengan pihak ketiga yang Dilaksanakan	Dokumen	1,00	0,00	0	85.084.660,00	0,00	0
2.13.03.1.01.0003	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Dokumen	1,00	0,00	0	503.849.296,00	0,00	0
2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Presentase desa yang mampu menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa secara optimal	%	35,00	0,00	0	5.982.997.693,00	129.266.206,00	2,16
2.13.04.1.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang mampu menyelenggarakan pemerintahan desa secara optimal	Desa	296,00	0,00	0	5.982.997.693,00	129.266.206,00	2,16
2.13.04.1.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/wali kota yang Mengatur Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/wali Kota yang Mengatur Desa	Dokumen	1,00	0,00	0	50.865.289,00	2.060.000,00	4,05
2.13.04.1.01.0004	Fasilitasi Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa	jumlah Dokumen hasil Fasilitasi Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa	Dokumen	2,00	0,00	0	1.846.999.174,00	0,00	0
2.13.04.1.01.0005	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Dokumen	1,00	0,00	0	586.895.756,00	4.780.000,00	0,81
2.13.04.1.01.0006	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Dokumen	1,00	0,00	0	203.749.992,00	29.597.515,00	14,53
2.13.04.1.01.0007	Fasilitasi Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah orang yang Mengikuti Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Orang	185,00	0,00	0	70.124.749,00	0,00	0
2.13.04.1.01.0008	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Dokumen	1,00	0,00	0	467.499.865,00	21.185.891,00	4,53
2.13.04.1.01.0010	Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa	jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Dibina	Orang	50,00	0,00	0	650.782.416,00	15.050.000,00	2,31
2.13.04.1.01.0011	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah orang yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Orang	50,00	0,00	0	352.374.760,00	0,00	0
2.13.04.1.01.0015	Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Dokumen	3,00	0,00	0	1.220.404.982,00	56.592.800,00	4,73
2.13.04.1.01.0016	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Dokumen	1,00	0,00	0	533.300.710,00	0,00	0
2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Presentase desa dan kelurahan yang mampu mendayagunakan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat, masyarakat hukum adat, dan kelompok masyarakat	%	3,25	0,00	0	6.497.891.083,00	197.228.482,00	3,04
2.13.05.1.01	Pemberdayaan Lembaga keMasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah desa dan kelurahan yang mampu mendayagunakan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat, masyarakat hukum adat, dan kelompok masyarakat	Desa	27,00	0,00	0	6.497.891.083,00	197.228.482,00	3,04
2.13.05.1.01.0001	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Dokumen	1,00	0,00	0	1.609.589.944,00	0,00	0
2.13.05.1.01.0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Dokumen	1,00	0,00	0	423.393.649,00	46.435.380,00	10,97
2.13.05.1.01.0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan kapasitas Kelembagaannya	Lembaga	4,00	0,00	0	1.004.075.852,00	46.886.982,00	4,67
2.13.05.1.01.0004	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Unit	6,00	0,00	0	480.599.302,00	3.303.600,00	0,71
2.13.05.1.01.0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Laporan	1,00	0,00	0	1.071.599.935,00	59.079.220,00	5,7
2.13.05.1.01.0007	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Laporan	1,00	0,00	0	75.000.000,00	0,00	0
2.13.05.1.01.0008	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	Dokumen	1,00	0,00	0	123.999.829,00	0,00	0

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan (Rp)	Persen (%)
2.13.05.1.01.0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Laporan	1,00	0,00	0	1.416.633.100,00	41.523.300,00	2,93
2.13.05.1.01.0010	Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Membangun Kerja Sama Antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Membangun Kerja Sama Antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Keluarga	35,00	0,00	0	147.999.865,00	0,00	0
2.13.05.1.01.0011	Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni Serta Kesadaran Hukum Tentang Kepemilikan Rumah	Keluarga	35,00	0,00	0	144.999.607,00	0,00	0
2.15.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perhubungan								
2.15.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perhubungan								
2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	Indeks	74,00	0,00	0	34.842.546.139,00	5.911.839.838,00	16,97
		Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti	%	100,00	0,00	0			0
2.15.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang ditetapkan Tepat Waktu	%	92,00	15,39	17	975.040.852,00	22.827.224,00	2,34
2.15.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	4,00	0,00	0	458.846.984,00	22.827.224,00	5,07
2.15.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	2,00	0,00	0	104.713.445,00	0,00	0
2.15.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	2,00	0,00	0	39.910.912,00	0,00	0
2.15.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	4,00	2,00	50	143.811.970,00	0,00	0
2.15.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	20,00	3,00	15	227.757.541,00	0,00	0
2.15.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran	%	94,00	2,73	3	26.665.933.599,00	4.222.841.900,00	15,84
2.15.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	79,00	90,00	113,92	25.832.738.573,00	4.069.299.000,00	18,5
2.15.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12,00	3,00	25	667.920.000,00	138.610.000,00	20,75
2.15.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12,00	3,00	25	80.150.000,00	13.392.900,00	16,71
2.15.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	2,00	0,00	0	2.730.000,00	520.000,00	19,05
2.15.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	18,00	4,00	22,22	77.538.500,00	1.020.000,00	1,32
2.15.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	12,00	3,00	25	4.856.526,00	0,00	0
2.15.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD Yang Berfungsi Dengan Baik	%	92,00	0,00	0	73.528.900,00	0,00	0
2.15.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1,00	0,00	0	47.053.800,00	0,00	0
2.15.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	2,00	0,00	0	7.070.000,00	0,00	0
2.15.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	4,00	0,00	0	19.405.100,00	0,00	0
2.15.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Kepatuhan Wajib Retribusi Daerah	%	100,00	100,00	100	73.402.000,00	0,00	0
2.15.01.1.04.0007	Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan	12,00	2,00	16,67	73.402.000,00	0,00	0
2.15.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM Aparatur yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	%	20,00	5,34	27	463.157.450,00	22.254.000,00	4,8
2.15.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	2,00	0,00	0	183.348.950,00	0,00	0
2.15.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	1,00	0,00	0	9.999.000,00	8.554.000,00	85,55
2.15.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	1,00	0,00	0	56.339.500,00	9.450.000,00	19,71
2.15.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	20,00	7,00	35	213.470.000,00	4.250.000,00	2,08
2.15.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana Kantor Yang Berfungsi Dengan Baik	%	92,00	0,00	0	1.670.871.523,00	77.508.930,00	4,64
2.15.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	11,00	0,00	0	49.999.716,00	0,00	0

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan (Rp)	Persen (%)
2.15.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	8,00	4,00	50	309.963.436,00	0,00	0
2.15.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	6,00	1,00	16,67	201.333.127,00	53.753.500,00	26,7
X.XX.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12,00	3,00	25	1.091.513.580,00	22.025.530,00	2,23
2.15.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	2,00	0,00	0	15.424.000,00	0,00	0
2.15.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	2,00	0,00	0	2.637.664,00	1.729.900,00	65,58
2.15.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelayanan Jasa Penunjang Tepat Waktu	%	100,00	25,00	25	3.022.017.815,00	1.550.707.784,00	51,31
X.XX.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12,00	3,00	25	24.994.000,00	6.000.000,00	24,01
2.15.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12,00	2,00	16,67	991.999.500,00	96.518.192,00	9,73
2.15.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12,00	3,00	25	2.005.024.315,00	1.448.189.592,00	24,79
2.15.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi baik	%	92,00	0,00	0	1.898.594.000,00	15.700.000,00	0,83
2.15.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	2,00	0,00	0	84.720.000,00	0,00	0
2.15.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	9,00	3,00	33,33	111.843.000,00	10.000.000,00	8,94
2.15.01.1.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Unit	1,00	0,00	0	2.600.000,00	0,00	0
X.XX.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	214,00	11,00	5,14	1.699.431.000,00	5.700.000,00	0,34
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Layanan Lalu Lintas Jalan Provinsi dan AKDP	%	86,00	0,00	0	156.787.444.877,00	190.513.773,00	0,12
		Jumlah Kecelakaan di Ruas Jalan Provinsi	Kejadian	165,00	25,00	184,85			
		Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Per 1000 Keberangkatan	Angka	0,01	0,00	0			
2.15.02.1.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Persentase Ruas Jalan Provinsi yang Dipasang Fasilitas Keselamatan Jalan	%	85,00	0,00	0	150.660.899.335,00	76.841.575,00	0,05
2.15.02.1.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi yang Tersedia	Unit	22.060,00	0,00	0	150.660.899.335,00	76.841.575,00	0,05
2.15.02.1.05	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah Pelaksanaan Rekomendasi MRLJ Jaringan Jalan Provinsi yang dipatuhi	Dokumen	4,00	0,00	0	598.467.080,00	12.580.000,00	2,1
2.15.02.1.05.0001	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi	Laporan	10,00	1,00	10	304.999.580,00	12.580.000,00	4,12
2.15.02.1.05.0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	Laporan	4,00	0,00	0	293.467.500,00	0,00	0
2.15.02.1.07	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Persentase Prasarana yang Laik Fungsi dan Sarana yang Laik Uji	%	74,00	23,60	32	797.166.335,00	35.972.499,00	4,51
2.15.02.1.07.0004	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi	Laporan	3,00	0,00	0	283.807.275,00	0,00	0
2.15.02.1.07.0005	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Laporan	10,00	1,00	10	424.359.620,00	20.959.239,00	5,8
2.15.02.1.07.0015	Pelaksanaan Pengawasan Melalui Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah laporan Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Laporan	9,00	1,00	11,11	88.999.440,00	15.013.260,00	16,87
2.15.02.1.08	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Angkutan Umum Orang/Barang AKDP yang Tersedia	Unit	17,00	0,00	0	1.911.205.650,00	8.152.700,00	0,43
2.15.02.1.08.0002	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi	Jumlah Laporan pengendalian dan pengawasan KeTersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Provinsi	Laporan	4,00	0,00	0	76.206.000,00	8.152.700,00	10,7
2.15.02.1.08.0003	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Unit	17,00	0,00	0	1.834.999.650,00	0,00	0

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan (Rp)	Persen (%)
2.15.02.1.09	Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Perencanaan Multimoda yang Tersedia	Dokumen	3,00	0,00	0	1.999.399.637,00	38.790.999,00	1,94
2.15.02.1.09.0001	Perumusan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi	Dokumen	2,00	0,00	0	1.908.480.085,00	38.790.999,00	2,03
2.15.02.1.09.0002	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi	Dokumen	1,00	0,00	0	90.919.552,00	0,00	0
2.15.02.1.13	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Penyelenggara Angkutan Orang dalam Trayek yang Patuh Perizinan	Unit	120,00	23,00	19	521.307.960,00	11.902.000,00	2,28
2.15.02.1.13.0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang telah memenuhi persyaratan perizinan	Unit	120,00	23,00	19,17	215.483.670,00	11.902.000,00	5,52
2.15.02.1.13.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi	Laporan	4,00	0,00	0	305.824.290,00	0,00	0
2.15.02.1.14	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Melampaui Lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Penyelenggara Angkutan Taksi yang Patuh Perizinan	Unit	310,00	380,00	123	298.998.880,00	6.274.000,00	2,1
2.15.02.1.14.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah operasi kewenangan Provinsi	Jumlah laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah operasi kewenangan Provinsi	Laporan	4,00	1,00	25	148.999.440,00	0,00	0
2.15.02.1.14.0004	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah kerja dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai Wilayah kerja dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang memenuhi persyaratan perizinan	Unit	310,00	380,00	122,58	149.999.440,00	6.274.000,00	4,18
2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Rasio Konektivitas Angkutan Laut dan SDP	Angka	0,98	0,00	0	4.866.287.846,00	70.176.359,00	1,44
2.15.03.1.03	Penerbitan Izin Trayek Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi yang Bersangkutan	Jumlah Angkutan Sungai Danau yang Patuh Perizinan	Unit	105,00	30,00	29	330.699.252,00	17.643.013,00	5,34
2.15.03.1.03.0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Semenuhi Syarat Perizinan	Unit	105,00	30,00	28,57	191.598.544,00	5.180.000,00	2,7
2.15.03.1.03.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi	Laporan	1,00	0,00	0	139.100.708,00	12.463.013,00	9,85
2.15.03.1.04	Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi yang Terletak pada Jaringan Jalan Provinsi dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Provinsi	Jumlah Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Sungai Danau yang Tersedia	Dokumen	1,00	0,00	0	840.985.995,00	9.945.300,00	1,18
2.15.03.1.04.0002	Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi pada Jaringan Jalan Provinsi dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Provinsi	Jumlah Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi pada Jaringan Jalan Provinsi dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Provinsi	Dokumen	1,00	0,00	0	840.985.995,00	9.945.300,00	1,19
2.15.03.1.06	Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	Jumlah Badan Usaha Pelayaran yang Patuh Perizinan	BadanUsaha	65,00	42,00	65	251.906.738,00	0,00	0
2.15.03.1.06.0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen terkait Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Dokumen	65,00	42,00	64,62	118.800.000,00	0,00	0

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan (Rp)	Persen (%)
2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	Indeks	92,00	0,00	0	34.557.908.261,00	4.160.065.410,00	12,04
2.18.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yg ditetapkan tepat waktu	%	100,00	10,00	10	1.004.459.380,00	50.783.752,00	5,06
2.18.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	5,00	5,00	100	473.793.180,00	39.406.152,00	8,32
2.18.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	2,00	2,00	100	10.367.600,00	1.825.000,00	17,6
2.18.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	2,00	2,00	100	10.367.600,00	0,00	0
2.18.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	1,00	0,00	0	5.200.000,00	0,00	0
2.18.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	5,00	0,00	0	504.731.000,00	9.552.600,00	1,96
2.18.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu	%	100,00	0,00	0	17.277.002.312,00	2.175.886.062,00	12,59
2.18.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	100,00	0,00	0	16.626.182.202,00	2.113.346.062,00	12,71
2.18.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	85,00	0,00	0	386.160.000,00	62.540.000,00	16,2
2.18.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	1.000,00	0,00	0	259.000.000,00	0,00	0
2.18.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	1,00	0,00	0	2.682.100,00	0,00	0
2.18.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	1,00	0,00	0	1.978.010,00	0,00	0
2.18.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	1,00	0,00	0	1.000.000,00	0,00	0
2.18.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah orang pengurusan dan inventarisir barang milik daerah	Orang	1,00	0,00	0	30.200.000,00	0,00	0
2.18.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1,00	0,00	0	1.300.000,00	0,00	0
2.18.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1,00	0,00	0	1.300.000,00	0,00	0
2.18.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	24,00	0,00	0	27.600.000,00	0,00	0
2.18.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	%	100,00	0,00	0	461.854.555,00	0,00	0
2.18.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	3,00	0,00	0	305.180.615,00	0,00	0
2.18.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	1,00	0,00	0	33.163.940,00	0,00	0
2.18.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	1,00	0,00	0	10.210.000,00	0,00	0
2.18.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	9,00	0,00	0	113.300.000,00	0,00	0
2.18.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan kegiatan administrasi umum yang terlaksana	Laporan	439,00	0,00	0	3.439.133.257,00	164.843.296,00	4,79
2.18.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	7,00	0,00	0	27.359.391,00	4.672.000,00	17,08
2.18.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	2,00	0,00	0	1.196.974.308,00	32.440.000,00	2,71
2.18.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12,00	0,00	0	53.245.858,00	7.390.000,00	13,88
2.18.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	120,00	0,00	0	11.635.200,00	1.446.000,00	12,43
2.18.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	233,00	0,00	0	1.687.588.628,00	104.495.296,00	6,19
2.18.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1.000,00	0,00	0	181.702.092,00	14.400.000,00	7,93
2.18.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	30,00	0,00	0	280.627.780,00	0,00	0

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan (Rp)	Persen (%)
2.18.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit pengadaan belanja modal untuk sarana dan prasarana	Unit/Tahun	87,00	0,00	0	3.595.640.854,00	504.500.000,00	14,03
2.18.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	9,00	0,00	0	2.123.776.924,00	504.500.000,00	23,75
2.18.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	1,00	0,00	0	1.034.402.528,00	0,00	0
2.18.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	33,00	0,00	0	437.461.402,00	0,00	0
2.18.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan untuk kegiatan urusan administrasi perkantoran yang terlaksana	Laporan	86,00	0,00	0	2.418.643.380,00	1.257.313.695,00	51,98
2.18.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12,00	0,00	0	9.807.930,00	0,00	0
2.18.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	48,00	0,00	0	597.592.000,00	68.066.335,00	11,39
2.18.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	1,00	0,00	0	33.443.450,00	0,00	0
2.18.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12,00	0,00	0	1.777.800.000,00	1.189.247.360,00	66,89
2.18.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	%	100,00	0,00	0	6.330.974.523,00	6.738.605,00	0,11
2.18.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	29,00	0,00	0	271.970.000,00	6.738.605,00	2,48
2.18.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	244,00	0,00	0	144.794.203,00	0,00	0
2.18.01.1.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Unit	2,00	0,00	0	45.000.000,00	0,00	0
2.18.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	3,00	0,00	0	688.032.000,00	0,00	0
2.18.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1,00	0,00	0	5.181.178.320,00	0,00	0
2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Peluang Investasi Non Migas dan Non Batubara yang Siap Ditawarkan	Dokumen/PRO	2,00	0,00	0	2.776.544.151,00	17.182.620,00	0,62
2.18.02.1.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi	Potensi Investasi yang direncanakan	Potensi/Investasi	2,00	0,00	0	2.776.544.151,00	17.182.620,00	0,62
2.18.02.1.02.0001	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi	Dokumen	2,00	0,00	0	695.479.607,00	8.709.320,00	1,28
2.18.02.1.02.0005	Penyusunan Peta Potensi Investasi Provinsi	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Provinsi	Dokumen	3,00	0,00	0	2.081.064.544,00	8.473.300,00	0,41
2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Kepeminatan Investasi Di Kalimantan Timur pada Sektor Non Migas dan Non Batubara	Minat	12,00	0,00	0	3.044.966.719,00	80.898.300,00	2,66
2.18.03.1.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Kegiatan Promosi (Kegiatan)	Kegiatan	12,00	0,00	0	3.044.966.719,00	80.898.300,00	2,66
2.18.03.1.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Provinsi	Dokumen	7,00	0,00	0	1.720.244.459,00	54.950.800,00	3,19
2.18.03.1.01.0003	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Dokumen	5,00	0,00	0	1.324.722.260,00	25.947.500,00	2,16
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL			0,00	0,00	0	3.343.635.718,00	63.653.948,00	1,9
2.18.04.1.02	Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangn Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Perizinan dan non Perizinan yg diterbitkan	(Izin&NonIzin)	7.500,00	0,00	0	3.343.635.718,00	63.653.948,00	1,9
2.18.04.1.02.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Provinsi	Dokumen	9,00	0,00	0	851.547.568,00	43.388.468,00	5,28
2.18.04.1.02.0006	Penyediaan dan pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah Pelaku Usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	PelakuUsaha	10,00	0,00	0	488.613.680,00	9.161.880,00	2,02
2.18.04.1.02.0007	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Tersedianya Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	PelakuUsaha	110,00	0,00	0	900.000.006,00	2.201.200,00	0,24
2.18.04.1.02.0008	Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha	KegiatanUsaha	5,00	0,00	0	1.103.474.464,00	8.902.400,00	0,82
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Realisasi Investasi PMA-PMDN Sektor Non Migas dan Non Batubara	%	100,00	0,00	0	2.130.120.293,00	29.970.100,00	1,41
2.18.05.1.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Pelaku Usaha yang melaporkan LKPM	Laporan	1.614,00	0,00	0	2.130.120.293,00	29.970.100,00	1,41

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan (Rp)	Persen (%)
2.18.05.1.01.0004	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	Kegiatanusaha	7,87	0,00	0	556.999.648,00	4.820.000,00	1,02
2.18.05.1.01.0005	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Kegiatanusaha	60,00	0,00	0	637.157.586,00	22.125.100,00	4,41
2.18.05.1.01.0006	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	PelakuUsaha	400,00	0,00	0	935.963.059,00	3.025.000,00	0,33
2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Pemenuhan Layanan Informasi yang Dibutuhkan oleh Pengguna Layanan	%	100,00	0,00	0	827.848.858,00	35.675.344,00	4,31
2.18.06.1.01	Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi	Penyajian data terhadap informasi	Data	210,00	0,00	0	827.848.858,00	35.675.344,00	4,31
2.18.06.1.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Dokumen	7,00	0,00	0	827.848.858,00	35.675.344,00	4,55
2.19.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pemuda dan Olah Raga								
2.19.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pemuda dan Olah Raga								
2.19.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	Indeks	91,00	25,00	27,47	90.488.100.266,00	7.965.592.259,00	8,8
2.19.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang Ditetapkan Tepat Waktu	Dokumen	10,00	3,00	30	1.071.955.400,00	0,00	0
2.19.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	3,00	1,00	33	438.460.000,00	0,00	0
2.19.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	2,00	0,00	0	75.351.400,00	0,00	0
2.19.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	2,00	0,00	0	56.340.000,00	0,00	0
2.19.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	3,00	1,00	33	334.212.000,00	0,00	0
2.19.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	4,00	0,00	0	167.592.000,00	0,00	0
2.19.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran	%	95,00	5,06	5,33	30.165.254.514,00	4.373.398.139,00	14,5
2.19.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	182,00	84,00	46	29.291.898.514,00	4.373.398.139,00	14,93
2.19.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12,00	0,00	0	714.480.000,00	0,00	0
2.19.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12,00	3,00	25	47.840.000,00	0,00	0
2.19.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	12,00	0,00	0	39.000.000,00	0,00	0
2.19.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	12,00	3,00	25	72.036.000,00	0,00	0
2.19.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD Yang Berfungsi Dengan Baik	%	95,00	0,00	0	97.193.600,00	0,00	0
2.19.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	2,00	0,00	0	33.853.600,00	0,00	0
2.19.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1,00	0,00	0	20.140.000,00	0,00	0
2.19.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	4,00	0,00	0	43.200.000,00	0,00	0
2.19.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	%	95,00	0,00	0	447.444.672,00	0,00	0
2.19.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	1,00	0,00	0	23.215.612,00	0,00	0
2.19.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	50,00	0,00	0	344.355.600,00	0,00	0
2.19.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	88,00	0,00	0	56.889.460,00	0,00	0
2.19.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	84,00	0,00	0	22.984.000,00	0,00	0

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan (Rp)	Persen (%)
2.19.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	%	95,00	0,00	0	16.015.550.749,00	0,00	0
2.19.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1,00	0,00	0	45.244.212,00	0,00	0
2.19.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5,00	0,00	0	12.096.716.033,00	0,00	0
2.19.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1,00	0,00	0	49.937.632,00	0,00	0
2.19.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	4,00	0,00	0	509.688.300,00	0,00	0
2.19.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	4,00	0,00	0	312.293.722,00	0,00	0
2.19.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	3,00	0,00	0	39.883.810,00	0,00	0
2.19.01.1.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Laporan	12,00	0,00	0	399.960.000,00	0,00	0
2.19.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	95,00	0,00	0	2.396.250.000,00	0,00	0
2.19.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1,00	0,00	0	149.977.040,00	0,00	0
2.19.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	1,00	0,00	0	15.600.000,00	0,00	0
2.19.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan BMD	%	95,00	0,00	0	62.236.287,00	0,00	0
2.19.01.1.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit	5,00	0,00	0	62.236.287,00	0,00	0
2.19.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	Persen	95,00	0,00	0	20.696.463.600,00	3.592.194.120,00	17,36
2.19.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12,00	0,00	0	2.030.613.600,00	268.511.480,00	13,22
2.19.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12,00	0,00	0	18.665.850.000,00	3.323.682.640,00	13,25
2.19.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi baik	%	95,00	0,00	0	21.932.001.444,00	0,00	0
2.19.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	18,00	0,00	0	112.270.500,00	0,00	0
2.19.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	30,00	0,00	0	571.942.744,00	0,00	0
2.19.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	10,00	0,00	0	841.156.000,00	0,00	0
2.19.01.1.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Unit	1,00	0,00	0	156.952.600,00	0,00	0
2.19.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1,00	0,00	0	618.301.200,00	0,00	0
2.19.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1,00	0,00	0	19.513.428.000,00	0,00	0
2.19.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1,00	0,00	0	117.950.400,00	0,00	0
2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri Persentase Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	% %	1,31 27,32	0,00 0,00	0 0	41.786.938.467,00	0,00	0
2.19.02.1.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi	Jumlah Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan di Provinsi Kalimantan Timur	Orang	5.580,00	0,00	0	36.597.415.727,00	0,00	0
2.19.02.1.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi	Jumlah Pemuda Kader Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	Orang	1.470,00	0,00	0	1.661.529.155,00	0,00	0
2.19.02.1.01.0005	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Provinsi	Jumlah Sarana dan Prasarana Kepemudaan Provinsi yang Terkelola dan Termanfaatkan	Unit	7,00	0,00	0	23.000.000,00	0,00	0
2.19.02.1.01.0010	Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda	Jumlah yang menerima penghargaan pemuda	Orang	20,00	0,00	0	1.282.924.200,00	0,00	0
2.19.02.1.01.0011	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi provinsi Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Provinsi	Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di provinsi	Dokumen	6,00	0,00	0	3.429.871.343,00	0,00	0

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan (Rp)	Persen (%)
2.19.02.1.01.0012	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat provinsi	Persentase efektifitas penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi pengembangan kepemimpinan pemuda	Persentase	28,00	0,00	0	3.239.770.450,00	0,00	0
2.19.02.1.01.0013	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi	Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi Dari Seluruh Kabupaten/Kota Yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda	Orang	50,00	0,00	0	543.837.500,00	0,00	0
2.19.02.1.01.0014	Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat provinsi	Jumlah pemuda di tingkat provinsi yang haknya terpenuhi	Orang	5.938,00	0,00	0	9.057.488.079,00	0,00	0
2.19.02.1.01.0015	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha Muda Tingkat Provinsi	Jumlah Wirausaha Muda Tingkat Provinsi Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda	Orang	5.000,00	150,00	3	17.358.995.000,00	0,00	0
2.19.02.1.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Pemuda yang terlibat dalam Organisasi Kepemudaan yang di fasilitasi dalam mengikuti kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi	Organisasi	170,00	0,00	0	5.189.522.740,00	0,00	0
2.19.02.1.02.0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda	Persentase organisasi kepemudaan yang diberdayakan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda	Persentase	6,00	0,00	0	395.201.140,00	0,00	0
2.19.02.1.02.0004	Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan manajemen kelembagaan organisasi kepemudaan tingkat provinsi	Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan manajemen kelembagaan organisasi kepemudaan tingkat provinsi	Organisasi	120,00	0,00	0	4.794.321.600,00	0,00	0
2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Jumlah Perolehan medali pada Event Olahraga Nasional dan Internasional	Keping/Medali	135,00	0,00	0	193.110.502.515,00	220.350.000,00	0,11
2.19.03.1.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Atlet Pelajar yang mendapatkan Pembinaan dan Pengembangan	Orang	24,00	0,00	0	2.548.292.077,00	0,00	0
2.19.03.1.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha	Jumlah Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha yang Dikembangkan	Unit	1,00	0,00	0	1.560.707.613,00	0,00	0
2.19.03.1.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga oleh Perkumpulan Olahraga dan Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus	Dokumen	2,00	0,00	0	987.584.464,00	0,00	0
2.19.03.1.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	Jumlah Atlet Daerah yang Mengikuti Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	Orang	600,00	0,00	0	5.349.421.497,00	0,00	0
2.19.03.1.02.0004	Keikutsertaan anggota kontingen provinsi dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	Jumlah anggota kontingen provinsi yang ikut serta dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	Orang	600,00	0,00	0	3.737.926.584,00	0,00	0
2.19.03.1.02.0005	Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat Provinsi	Jumlah Pekan dan Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat Provinsi	Kegiatan	1,00	0,00	0	911.198.205,00	0,00	0
2.19.03.1.02.0006	Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi yang terselenggara	Jumlah Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi yang terselenggara	Kegiatan	5,00	0,00	0	700.296.708,00	0,00	0
2.19.03.1.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional	Jumlah Atlet Olahraga Prestasi yang mendapatkan Pembinaan dan Pengembangan	Orang	630,00	0,00	0	85.532.315.236,00	0,00	0
2.19.03.1.03.0001	Seleksi Atlet Daerah	Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi	Orang	350,00	0,00	0	344.986.500,00	0,00	0
2.19.03.1.03.0006	Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga	Jumlah penerima Penghargaan olahraga	Orang	100,00	0,00	0	3.310.305.162,00	0,00	0
2.19.03.1.03.0007	Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Pelatda	1,00	0,00	0	3.420.162.500,00	0,00	0
2.19.03.1.03.0008	Penyediaan data Keolahragaan terpadu di provinsi	Jumlah dokumen penyediaan data Keolahragaan terpadu di provinsi	Dokumen	1,00	0,00	0	1.132.717.549,00	0,00	0
2.19.03.1.03.0009	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi Provinsi	Jumlah Olahragawan Atlet Berprestasi Provinsi yang Dibina dan Diberikan Pengembangan	Orang	430,00	195,00	45,35	77.324.143.525,00	0,00	0
2.19.03.1.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Jumlah insan olahraga yang mengikuti pembinaan dan pengembangan organisasi keolahragaan	Orang	150,00	0,00	0	99.680.473.705,00	220.350.000,00	0,22
		Jumlah Partisipasi Insan Olahraga Dalam Kegiatan yang diselenggarakan	Orang	7.000,00	0,00	0			
2.19.03.1.04.0003	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait	Dokumen	4,00	1,00	25	99.367.382.215,00	220.350.000,00	0,46
2.19.03.1.04.0005	Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di provinsi	Jumlah dokumen pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di provinsi	Dokumen	4,00	0,00	0	313.091.490,00	0,00	0
2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase Organisasi Kepramukaan yang Aktif	%	8,66	0,00	0	14.722.000.000,00	0,00	0
2.19.04.1.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Jumlah Pramuka yang Terlibat dalam Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Orang	4.500,00	0,00	0	14.722.000.000,00	0,00	0

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan (Rp)	Persen (%)
2.19.04.1.01.0005	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Provinsi	Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Provinsi	Laporan	40,00	0,00	0	14.722.000.000,00	0,00	0
2.19.0.00.0.00.01.0002	UPTD Pengelolaan Prasarana Olahraga								
2.19.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	Indeks	91,00	0,00	0	77.035.620.752,00	2.265.338.666,00	2,94
2.19.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	%	95,00	0,00	0	2.682.412.980,00	0,00	0
2.19.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	10,00	0,00	0	263.150.213,00	0,00	0
2.19.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	10,00	0,00	0	1.026.289.900,00	0,00	0
2.19.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1,00	0,00	0	90.955.975,00	0,00	0
2.19.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	5,00	0,00	0	81.599.092,00	0,00	0
2.19.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12,00	0,00	0	1.220.417.800,00	0,00	0
2.19.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan BMD	%	95,00	0,00	0	41.025.232.422,00	0,00	0
2.19.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	3,00	0,00	0	246.428.422,00	0,00	0
2.19.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	4,00	0,00	0	40.778.804.000,00	0,00	0
2.19.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	%	95,00	3,00	3,16	7.301.547.950,00	1.067.888.666,00	14,63
2.19.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12,00	3,00	25	6.740.895.950,00	1.067.888.666,00	15,84
2.19.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	1,00	0,00	0	560.652.000,00	0,00	0
2.19.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi baik	%	95,00	1,00	1,05	26.026.427.400,00	1.197.450.000,00	4,6
2.19.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	16,00	0,00	0	223.110.800,00	0,00	0
2.19.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	8,00	0,00	0	22.525.000,00	0,00	0
2.19.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	4,00	1,00	25	25.780.791.600,00	1.197.450.000,00	4,64
2.23.2.24.0.00.01.0000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah								
2.23.2.24.0.00.01.0000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah								
2.23.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	Indeks	82,00	0,00	0	33.423.500.900,00	5.273.264.896,00	
		Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti	%	96,00	0,00	0			15,78
2.23.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan, penganggaran, dan hasil evaluasi kinerja perangkat daerah yang diselesaikan tepat waktu	Dokumen	17,00	0,00	0	282.773.830,00	0,00	0
2.23.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	10,00	0,00	0	109.382.730,00	0,00	0
2.23.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	5,00	0,00	0	92.871.100,00	0,00	0
2.23.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	2,00	0,00	0	80.520.000,00	0,00	0
2.23.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran	%	98,00	0,00	0	26.813.146.524,00	4.434.374.146,00	16,54
2.23.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	127,00	0,00	0	26.177.666.524,00	4.434.374.146,00	18,62
2.23.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	1,00	0,00	0	435.480.000,00	0,00	0
2.23.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	1,00	0,00	0	50.058.645,00	0,00	0
2.23.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1,00	0,00	0	49.927.175,00	0,00	0
2.23.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	22,00	0,00	0	100.014.180,00	0,00	0
2.23.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Berfungsi dengan Baik	%	85,00	0,00	0	45.380.058,00	0,00	0

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan (Rp)	Persen (%)
2.23.01.1.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Laporan	4,00	0,00	0	45.380.058,00	0,00	0
2.23.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	%	100,00	0,00	0	208.800.000,00	0,00	0
2.23.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	3,00	0,00	0	135.600.000,00	0,00	0
2.23.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	20,00	0,00	0	73.200.000,00	0,00	0
2.23.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	%	100,00	0,00	0	3.110.504.057,00	0,00	0
2.23.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	5,00	0,00	0	49.970.355,00	0,00	0
2.23.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5,00	0,00	0	2.507.850.305,00	0,00	0
2.23.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	20,00	0,00	0	13.511.562,00	0,00	0
2.23.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	10,00	0,00	0	43.918.348,00	0,00	0
2.23.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	1,00	0,00	0	51.731.387,00	0,00	0
2.23.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	2,00	0,00	0	443.522.100,00	0,00	0
2.23.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah ketersediaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Unit	2,00	0,00	0	402.503.731,00	0,00	0
2.23.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	2,00	0,00	0	402.503.731,00	0,00	0
2.23.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	%	100,00	0,00	0	2.057.560.000,00	838.890.750,00	40,77
2.23.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1,00	0,00	0	9.780.000,00	0,00	0
2.23.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1,00	0,00	0	987.860.000,00	191.744.634,00	19,41
2.23.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1,00	0,00	0	1.059.920.000,00	647.146.116,00	18,94
2.23.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan BMD yang digunakan dan berfungsi baik	%	100,00	0,00	0	502.832.700,00	0,00	0
2.23.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	31,00	0,00	0	284.292.700,00	0,00	0
2.23.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2,00	0,00	0	124.430.000,00	0,00	0
2.23.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	50,00	0,00	0	94.110.000,00	0,00	0
2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	indeks	40,00	0,00	0	10.126.659.056,00	0,00	0
		Nilai Kegemaran Membaca Masyarakat (TGM)	nilai	47,00	0,00	0			
2.23.02.1.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	Pendayagunaan Layanan Perpustakaan secara online dan Onsite	Orang	240.000,00	0,00	0	4.308.670.976,00	0,00	0
		Jumlah Perpustakaan Yang Dibina Sesuai dengan SNP	Perpustakaan	70,00	0,00	0			
		Penyediaan Koleksi Bahan Pustaka dan Naskah Kuno Yang Dikembangkan dan Dilestarikan	Eksemplar	3.100,00	0,00	0			
2.23.02.1.01.0002	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah perpustakaan yang Dikembangkan dalam mewujudkan standar nasional perpustakaan di wilayah provinsi sesuai kewenangannya	Perpustakaan	30,00	0,00	0	1.644.351.806,00	0,00	0
2.23.02.1.01.0003	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi	Jumlah koleksi perpustakaan khas daerah tingkat provinsi yang Dikembangkan	Eksemplar	300,00	0,00	0	232.799.870,00	0,00	0
2.23.02.1.01.0006	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah tenaga perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi	Orang	80,00	0,00	0	450.399.540,00	0,00	0
2.23.02.1.01.0007	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi yang Dikembangkan Melalui Peningkatan Koleksi	Layanan	5,00	0,00	0	333.985.330,00	0,00	0
2.23.02.1.01.0008	Pengembangan Perpustakaan Deposit	Jumlah Perpustakaan Deposit yang Dikembangkan	Perpustakaan	5,00	0,00	0	99.999.393,00	0,00	0

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan (Rp)	Persen (%)
2.23.02.1.01.0009	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dikelola dan Dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	Eksemplar	2.900,00	0,00	0	787.962.400,00	0,00	0
2.23.02.1.01.0015	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah perpustakaan elektronik yang dikembangkan dan dipelihara dengan Manajemen Layanan TIK	Perpustakaan	3,00	0,00	0	434.773.293,00	0,00	0
2.23.02.1.01.0016	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan	Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan	Dokumen	2,00	0,00	0	118.999.704,00	0,00	0
2.23.02.1.01.0017	Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Provinsi	Jumlah Perpustakaan umum dan khusus yang dibina sesuai kewenangan provinsi dalam mewujudkan standar nasional perpustakaan	Perpustakaan	21,00	0,00	0	205.399.640,00	0,00	0
2.23.02.1.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi	Penyelenggaraan Gerakan gemar membaca dalam mewujudkan masyarakat yang kreatif dan inovatif	Kegiatan	18,00	0,00	0	5.817.988.080,00	0,00	0
2.23.02.1.02.0001	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus	Lokus	12,00	0,00	0	279.399.859,00	0,00	0
2.23.02.1.02.0002	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Perpustakaan yang Dibangun di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Perpustakaan	11,00	0,00	0	474.799.736,00	0,00	0
2.23.02.1.02.0003	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Orang	25,00	0,00	0	356.399.992,00	0,00	0
2.23.02.1.02.0004	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Provinsi yang Dikembangkan	Perpustakaan	6,00	0,00	0	4.508.188.968,00	0,00	0
2.23.02.1.02.0006	Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Provinsi yang dipilih dan didukung kegiatannya	Orang	3,00	0,00	0	199.199.525,00	0,00	0
2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Jumlah OPD yang memperoleh nilai Pengawasan Kearsipan Kategori baik	OPD	7,00	0,00	0	2.617.097.787,00	0,00	0
2.24.02.1.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi	Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip Secara Tertib	%	80,00	0,00	0	1.107.849.328,00	0,00	0
2.24.02.1.01.0004	Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah arsip dinamis yang telah disusutkan	Arsip	2.500,00	0,00	0	130.069.512,00	0,00	0
2.24.02.1.01.0006	Penciptaan dan Pemeliharaan Arsip Dinamis	Jumlah Daftar Arsip Dinamis	Arsip	1.500,00	0,00	0	59.982.305,00	0,00	0
2.24.02.1.01.0008	Pembinaan Kearsipan kewenangan Provinsi	Jumlah ORMAS, ORPOL, OPD/BUMD yang telah mengimplementasi pengelolaan arsip dinamis	Instansi	38,00	0,00	0	531.600.008,00	0,00	0
2.24.02.1.01.0012	Penyelenggaraan pengawasan kearsipan yang menjadi kewenangan provinsi	Jumlah OPD dan BUMD yang telah mendapatkan pengawasan kearsipan	Lembaga	15,00	0,00	0	386.197.503,00	0,00	0
2.24.02.1.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi	Persentase Arsip Statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik	%	96,50	0,00	0	337.595.201,00	0,00	0
2.24.02.1.02.0001	Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga kepada ANRI	Jumlah Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga yang dikumpulkan dan Disampaikan Kepada ANRI	Arsip	150,00	0,00	0	41.599.318,00	0,00	0
2.24.02.1.02.0005	Akuisisi Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang dilakukan Akuisisi	Arsip	300,00	0,00	0	295.995.883,00	0,00	0
2.24.02.1.03	Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi	Prosentase Arsip Statis yang tersedia dalam SIKN	%	6,00	0,00	0	1.171.653.258,00	0,00	0
2.24.02.1.03.0001	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN	Pengguna	1.150,00	0,00	0	472.766.893,00	0,00	0
2.24.02.1.03.0002	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi	Laporan	10,00	0,00	0	698.886.365,00	0,00	0
2.24.03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban Nasional	%	77,00	0,00	0	1.211.191.257,00	0,00	0
2.24.03.1.01	Pemusnahan Arsip dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	Jumlah Penyusutan Arsip Berdasarkan Jadwal Retensi Arsip	Berkas	5.200,00	0,00	0	339.953.013,00	0,00	0
2.24.03.1.01.0003	Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun	Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan	Berkas	1.750,00	0,00	0	155.588.885,00	0,00	0
2.24.03.1.01.0004	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Jumlah Arsip yang dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Arsip	2.500,00	0,00	0	184.364.128,00	0,00	0
2.24.03.1.02	Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Provinsi	Penanggulangan dan Penanganan arsip akibat bencana	Kegiatan	6,00	0,00	0	73.192.622,00	0,00	0
2.24.03.1.02.0001	Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	Jumlah Arsip yang dilakukan Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	Arsip	750,00	0,00	0	29.975.287,00	0,00	0
2.24.03.1.02.0002	Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana	Jumlah Arsip yang dilakukan Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	Arsip	750,00	0,00	0	43.217.335,00	0,00	0
2.24.03.1.03	Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah arsip yang diselamatkan bagi perangkat daerah yang digabung dan/atau dibubarkan	Arsip	13.940,00	0,00	0	277.560.423,00	0,00	0

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan (Rp)	Persen (%)
2.24.03.1.03.0001	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan Atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Provinsi	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan Atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Provinsi	Daftar	3,00	0,00	0	125.389.533,00	0,00	0
2.24.03.1.03.0002	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan Atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Provinsi	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan Atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Provinsi	Arsip	2,00	0,00	0	94.799.800,00	0,00	0
2.24.03.1.03.0003	Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendampingan Penyelamatan bagi Pemekaran Lintas Kabupaten/Kota	Arsip	3,00	0,00	0	57.371.090,00	0,00	0
2.24.03.1.04	Autentifikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media yang Dikelola oleh Lembaga Kearsipan Provinsi	Jumlah Penilaian Arsip Statis dan alih media yang diautentifikasi	Arsip	1.300,00	0,00	0	239.400.207,00	0,00	0
2.24.03.1.04.0001	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Jumlah Daftar Autentisitas Arsip yang Dinilai dan Ditetapkan Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Arsip	200,00	0,00	0	147.960.136,00	0,00	0
2.24.03.1.04.0002	Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Jumlah Daftar Arsip yang dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Arsip	850,00	0,00	0	91.440.071,00	0,00	0
2.24.03.1.05	Pencarian Arsip Statis Provinsi yang Dinyatakan Hilang	Penelusuran Arsip Statis Provinsi yang dinyatakan hilang sesuai NSPK	Laporan	1,00	0,00	0	281.084.992,00	0,00	0
2.24.03.1.05.0001	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang	Jumlah Daftar Autentisitas Statis Arsip yang Dinyatakan Hilang Berdasarkan Penilaian dan penetapan	Arsip	8,00	0,00	0	72.112.686,00	0,00	0
2.24.03.1.05.0002	Evaluasi dan Penetapan Hasil Alih Media yang dinyatakan Hilang	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media yang Dinyatakan Hilang	Arsip	500,00	0,00	0	135.997.020,00	0,00	0
2.24.03.1.05.0003	Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)	Jumlah Daftar Pencarian Arsip (DPA) yang Dilakukan Penetapan dan Pengumuman	Arsip	5,00	0,00	0	72.975.286,00	0,00	0
3.25.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kelautan Dan Perikanan								
3.25.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kelautan Dan Perikanan								
3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti	%	100,00	0,00	0	58.227.477.997,00	9.391.315.068,00	16,13
		Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	Indeks	91,40	0,00	0			
3.25.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yang ditetapkan tepat waktu	%	100,00	25,00	25	1.632.112.186,00	20.085.369,00	1,23
3.25.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	8,00	0,00	0	559.703.423,00	0,00	0
3.25.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	2,00	1,00	50	189.906.540,00	0,00	0
3.25.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	2,00	1,00	50	148.071.372,00	2.340.000,00	1,58
3.25.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	3,00	1,00	33,33	492.535.340,00	17.745.369,00	3,89
3.25.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	1,00	0,25	25	241.895.511,00	0,00	0
3.25.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran	%	100,00	0,00	0	48.279.683.166,00	6.446.435.509,00	13,35
3.25.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	282,00	0,00	0	46.615.419.621,00	6.273.222.469,00	17,5
3.25.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	1,00	0,00	0	726.960.000,00	160.330.000,00	22,05
3.25.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	1,00	0,00	0	275.027.474,00	2.483.040,00	0,9
3.25.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	1,00	0,00	0	273.149.675,00	10.400.000,00	4,12
3.25.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1,00	0,00	0	194.523.708,00	0,00	0
3.25.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	1,00	0,00	0	40.203.510,00	0,00	0
3.25.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	1,00	0,00	0	54.399.568,00	0,00	0
3.25.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	1,00	0,00	0	99.999.610,00	0,00	0

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan (Rp)	Persen (%)
3.25.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Berfungsi dengan Baik	%	20,00	0,00	0	215.922.414,00	7.620.000,00	3,53
3.25.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1,00	0,00	0	50.964.000,00	0,00	0
3.25.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1,00	0,00	0	89.976.414,00	7.620.000,00	8,47
3.25.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1,00	0,00	0	74.982.000,00	0,00	0
3.25.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	%	20,00	0,00	0	518.438.000,00	9.220.000,00	1,78
3.25.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	1,00	0,00	0	61.782.000,00	4.220.000,00	6,83
3.25.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	1,00	0,00	0	66.656.000,00	5.000.000,00	7,5
3.25.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	36,00	0,00	0	390.000.000,00	0,00	0
3.25.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	%	100,00	0,00	0	2.295.507.231,00	118.174.037,00	5,15
3.25.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1,00	0,00	0	37.490.585,00	0,00	0
3.25.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	10,00	0,00	0	10.000.000,00	0,00	0
3.25.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1,00	0,00	0	119.977.976,00	0,00	0
3.25.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	4,00	0,00	0	102.878.670,00	4.442.536,00	4,32
3.25.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	2,00	0,00	0	28.240.000,00	3.600.000,00	12,75
3.25.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1,00	0,00	0	1.996.920.000,00	110.131.501,00	6,27
3.25.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan BMD	%	100,00	0,00	0	481.048.794,00	0,00	0
3.25.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	4,00	0,00	0	150.000.000,00	0,00	0
3.25.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	33,00	0,00	0	286.597.205,00	0,00	0
3.25.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	13,00	0,00	0	44.451.589,00	0,00	0
3.25.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	%	100,00	0,00	0	2.407.653.840,00	2.723.034.831,00	113,1
3.25.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1,00	0,00	0	21.120.000,00	2.015.000,00	9,54
3.25.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1,00	0,00	0	2.386.533.840,00	472.367.591,00	19,79
3.25.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi baik	%	100,00	0,00	0	2.397.112.366,00	66.745.322,00	2,78
3.25.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	31,00	0,00	0	726.647.300,00	43.706.722,00	6,01
3.25.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	102,00	0,00	0	169.313.300,00	9.608.700,00	5,68
3.25.01.1.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Unit	20,00	0,00	0	34.351.766,00	13.429.900,00	39,1
3.25.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2,00	0,00	0	1.466.800.000,00	0,00	0
3.25.02	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Persentase Luas Wilayah laut dan pesisir yang dikelola sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku	%	75,45	0,00	0	4.846.263.014,00	53.636.899,00	1,11
3.25.02.1.01	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Jumlah Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Kawasan	1,00	0,00	0	2.550.406.488,00	0,00	0
3.25.02.1.01.0002	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola	Ha	327.819,31	0,00	0	1.143.690.584,00	0,00	0
3.25.02.1.01.0003	Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil yang Direhabilitasi	Ha	6,00	0,00	0	689.599.562,00	0,00	0
3.25.02.1.01.0004	Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Memperoleh Informasi Terkait Mitigasi Bencana Melalui Program Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil	Orang	60,00	0,00	0	91.399.552,00	0,00	0
3.25.02.1.01.0008	Sosialisasi Perizinan Berusaha dalam rangka Pemanfaatan Ruang Laut mendukung Ekonomi Biru	Jumlah Pelaku usaha yang tersosialisasi dalam rangka Pemanfaat Ruang Laut Mendukung Ekonomi Biru	PelakuUsaha	120,00	0,00	0	392.532.660,00	0,00	0

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan (Rp)	Persen (%)
3.25.02.1.01.0009	Penyediaan Data dan Informasi Spasial Ekosistem Blue Carbon Padang Lamun dan Mangrove di luar kawasan hutan	Peta Tematik Padang Lamun dan Mangrove di luar Kawasan Hutan	Dokumen	1,00	0,00	0	162.987.338,00	0,00	0
3.25.02.1.01.0015	Penyediaan Data dan Informasi Pergaraman	Jumlah data dan Informasi pergaraman yang tersedia	Dokumen	1,00	0,00	0	70.196.792,00	0,00	0
3.25.02.1.02	Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Jumlah Rekomendasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Rekomendasi	8,00	0,00	0	949.911.270,00	53.636.899,00	5,65
3.25.02.1.02.0004	Penerbitan Rekomendasi Izin Pelaksanaan Reklamasi di Perairan Pesisir	Jumlah Rekomendasi Perizinan dalam Pelaksanaan Reklamasi di Perairan Pesisir yang Diterbitkan	Rekomendasi	1,00	0,01	1	80.554.941,00	45.298.899,00	56,23
3.25.02.1.02.0006	Pencatatan dan Pengadministrasian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Sumber daya Pesisir dan Laut sebagai database perizinan berusaha	Jumlah database perizinan Berusaha yang dicatat atau didokumentasikan	Dokumen	1,00	0,06	5,82	344.519.497,00	8.338.000,00	2,42
3.25.02.1.02.0007	Pengelolaan Perizinan Berusaha Sektor Kelautan dan Perikanan	Jumlah Dokumen Pertimbangan Teknis Pengelolaan Perizinan Berusaha Sektor Kelautan dan Perikanan	Dokumen	6,00	0,00	0	524.836.832,00	0,00	0
3.25.02.1.03	Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Kelompok	15,00	0,00	0	1.345.945.256,00	0,00	0
3.25.02.1.03.0001	Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	Orang	90,00	0,00	0	385.500.066,00	0,00	0
3.25.02.1.03.0002	Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Kelompok Masyarakat yang Mengikuti Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Kelompok	1,00	0,00	0	138.008.854,00	0,00	0
3.25.02.1.03.0003	Pelibatan Masyarakat dalam Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Masyarakat yang Terlibat dalam Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Orang	90,00	0,00	0	407.594.473,00	0,00	0
3.25.02.1.03.0004	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah kelompok Masyarakat yang memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Kelompok	6,00	0,00	0	414.841.863,00	0,00	0
3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Ton	195.000,00	0,00	0	15.911.198.591,00	226.082.797,00	1,42
3.25.03.1.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	Jumlah Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	Kegiatan	1,00	0,00	0	8.090.526.046,00	42.577.000,00	0,53
3.25.03.1.01.0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Dokumen	1,00	0,00	0	122.332.896,00	0,00	0
3.25.03.1.01.0010	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Unit	282,00	0,00	0	7.968.193.150,00	42.577.000,00	0,54
3.25.03.1.02	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Kegiatan	1,00	0,00	0	2.884.919.650,00	18.555.700,00	0,64
3.25.03.1.02.0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Perairan Darat	Dokumen	1,00	0,00	0	89.513.000,00	0,00	0
3.25.03.1.02.0004	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Perairan Darat	Unit	20,00	0,00	0	2.795.406.650,00	18.555.700,00	0,66
3.25.03.1.03	Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Rekomendasi	185,00	0,00	0	426.388.996,00	15.750.000,00	3,69
3.25.03.1.03.0005	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan Tangkap untuk kapal penangkap dan pengangkut ikan ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil	Jumlah data dan informasi perizinan usaha untuk kapal penangkap dan pengangkut ikan ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil yang tersedia	Dokumen	185,00	0,00	0	426.388.996,00	15.750.000,00	3,69
3.25.03.1.05	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Dokumen	820,00	0,00	0	1.301.256.010,00	102.001.300,00	7,84
3.25.03.1.05.0004	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Bukti Pencatatan Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 5 GT	Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Bukti Pencatatan Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 5 GT yang ditetapkan	Dokumen	820,00	0,00	0	1.301.256.010,00	102.001.300,00	8,93
3.25.03.1.06	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Jumlah Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Pelabuhan	6,00	0,00	0	2.713.930.890,00	20.162.397,00	0,74
3.25.03.1.06.0002	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia	Unit	4,00	0,00	0	2.038.654.962,00	13.231.200,00	0,65
3.25.03.1.06.0003	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana	Layanan	6,00	0,00	0	675.275.928,00	6.931.197,00	1,03
3.25.03.1.09	Pendaftaran Kapal Perikanan di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah Pendaftaran Kapal Perikanan di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Rekomendasi	125,00	0,00	0	425.246.677,00	27.036.400,00	6,36

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan (Rp)	Persen (%)
3.25.03.1.09.0003	Penerbitan surat rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP)	Jumlah Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP) yang Diterbitkan	Rekomendasi	125,00	0,00	0	425.246.677,00	27.036.400,00	6,36
3.25.03.1.10	Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Beroperasi di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Buku Kapal Perikanan yang menjadi Kewenangan Provinsi	Dokumen	15,00	0,00	0	68.930.322,00	0,00	0
3.25.03.1.10.0003	Penerbitan surat rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP)	Jumlah Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP) yang Diterbitkan	Rekomendasi	15,00	0,00	0	68.930.322,00	0,00	0
3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Ton	201.000,00	0,00	0	11.556.651.781,00	143.941.980,00	1,25
3.25.04.1.02	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya di Laut Sampai Dengan 12 Mil serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	Jumlah Rekomendasi Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya di Laut Sampai Dengan 12 Mil Serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	Rekomendasi	4,00	0,00	0	217.486.726,00	0,00	0
3.25.04.1.02.0001	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Perizinan Berusaha Bidang Pembudidayaan Ikan yang Diterbitkan	Rekomendasi	4,00	0,00	0	217.486.726,00	0,00	0
3.25.04.1.05	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Lokasi Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	Lokasi	10,00	0,00	0	4.049.025.172,00	96.174.880,00	2,38
3.25.04.1.05.0001	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	1,00	0,24	23,94	317.219.128,00	73.873.880,00	23,29
3.25.04.1.05.0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Unit	2,00	0,00	0	462.281.000,00	0,00	0
3.25.04.1.05.0004	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Unit	3,00	1,50	50	2.247.849.689,00	5.180.000,00	0,23
3.25.04.1.05.0007	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Pembudidaya	Orang	120,00	4,61	3,84	466.279.073,00	16.080.000,00	3,45
3.25.04.1.05.0013	Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen Hasil Pelaksanaan Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	90,00	0,17	0,19	555.396.282,00	1.041.000,00	0,19
3.25.04.1.06	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat	Jumlah Pengembangan Budidaya Ikan Lokal Kalimantan Timur	Dokumen	1,00	0,00	0	7.290.139.883,00	47.767.100,00	0,66
3.25.04.1.06.0003	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Unit	15,00	7,50	50	6.659.672.463,00	47.767.100,00	0,72
3.25.04.1.06.0004	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Unit	4,00	0,00	0	630.467.420,00	0,00	0
3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	%	100,00	0,00	0	3.573.371.880,00	218.712.077,00	6,12
3.25.05.1.01	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Persentase Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	%	100,00	0,00	0	2.589.368.807,00	121.446.305,00	4,69
3.25.05.1.01.0007	Penanganan perkara Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (TPKP) di wilayah kerja PPNs Perikanan Provinsi	Jumlah perkara Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (TPKP) di wilayah kerja PPNs Perikanan Provinsi yang ditangani	Perkara	4,00	0,00	0	844.280.891,00	67.569.000,00	8,33
3.25.05.1.01.0013	Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi	Jumlah pelaku Usaha pembudidayaan ikan di Laut sampai dengan 12 Mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	PelakuUsaha	13,00	0,10	0,74	280.884.978,00	2.089.890,00	0,74
3.25.05.1.01.0014	Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi	Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	PelakuUsaha	153,00	5,09	3,33	979.790.388,00	27.615.812,00	2,82
3.25.05.1.01.0016	Pengawasan usaha pemanfaatan sumber daya kelautan kewenangan provinsi	Jumlah Pelaku usaha pemanfaatan sumber daya kelautan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	PelakuUsaha	6,00	0,20	3,33	244.802.913,00	20.496.603,00	8,37
3.25.05.1.01.0017	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	Jumlah POKMASWAS yang ditumbuhkan, dan dikembangkan	KelompokMasyarakat	20,00	0,40	2	239.609.637,00	3.675.000,00	1,53
3.25.05.1.02	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Persentase Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	%	100,00	0,00	0	984.003.073,00	97.265.772,00	9,88
3.25.05.1.02.0004	Pengawasan Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan sesuai kewenangan provinsi	Jumlah pelaku Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	PelakuUsaha	65,00	14,18	21,82	406.856.580,00	70.964.078,00	17,44
3.25.05.1.02.0005	Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya sesuai kewenangan provinsi	Jumlah pelaku usaha Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang diriksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	PelakuUsaha	6,00	2,00	33,33	259.575.879,00	19.908.204,00	7,67

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan (Rp)	Persen (%)
3.25.05.1.02.0006	Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya sesuai kewenangan provinsi	Jumlah pelaku Usaha pembudidayaan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	PelakuUsaha	27,00	0,96	3,56	317.570.614,00	6.393.490,00	2,01
3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Jumlah Produk Olahan Hasil Perikanan berkualitas (SNI) yang dipasarkan	Produk	11,00	0,00	0	1.340.802.812,00	133.096.332,00	9,93
3.25.06.1.01	Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Kegiatan	1,00	0,00	0	145.428.376,00	78.160.012,00	53,74
3.25.06.1.01.0004	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Data dan Informasi Usaha Subsektor Pengolahan Ikan, Subsektor Pemasaran Ikan, dan Usaha Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan berdasarkan skala usaha dan risiko	Dokumen	1,00	0,01	1	145.428.376,00	78.160.012,00	53,74
3.25.06.1.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Jumlah UKM Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	UMKM	10,00	0,00	0	1.158.323.656,00	54.936.320,00	4,74
3.25.06.1.02.0003	Pelaksanaan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	Jumlah Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	Kegiatan	6,00	0,00	0	1.158.323.656,00	54.936.320,00	4,74
3.25.06.1.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Lokasi	1,00	0,00	0	37.050.780,00	0,00	0
3.25.06.1.03.0002	Pemberian Insentif dan Fasilitasi bagi Pelaku Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Unit Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Diberikan Insentif dan Fasilitasi	UnitUsaha	1,00	0,00	0	37.050.780,00	0,00	0
3.25.0.00.0.00.01.0002	UPTD Penerapan Mutu Hasil Perikanan								
3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti	%	100,00	0,00	0	950.695.347,00	248.479.962,00	26,14
		Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	Indeks	91,40	0,00	0			
3.25.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran	%	100,00	0,00	0	69.480.000,00	16.130.000,00	23,22
3.25.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	1,00	0,00	0	69.480.000,00	16.130.000,00	23,22
3.25.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	%	20,00	0,00	0	137.410.000,00	0,00	0
3.25.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	15,00	0,00	0	137.410.000,00	0,00	0
3.25.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	%	100,00	0,00	0	437.266.523,00	72.422.200,00	16,56
3.25.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1,00	0,00	0	5.176.202,00	1.457.000,00	28,15
3.25.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1,00	0,00	0	44.013.870,00	4.170.000,00	9,47
3.25.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1,00	0,00	0	5.287.249,00	700.000,00	13,24
3.25.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1,00	0,00	0	11.638.002,00	0,00	0
3.25.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	1,00	0,00	0	1.939.200,00	322.000,00	16,6
3.25.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1,00	0,00	0	369.212.000,00	65.773.200,00	21,48
3.25.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan BMD	%	100,00	0,00	0	73.038.724,00	0,00	0
3.25.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	9,00	0,00	0	73.038.724,00	0,00	0
3.25.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	%	100,00	0,00	0	138.718.800,00	158.827.762,00	114,5
3.25.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1,00	0,00	0	834.000,00	0,00	0
3.25.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1,00	0,00	0	137.884.800,00	14.536.583,00	10,54
3.25.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi baik	%	100,00	0,00	0	94.781.300,00	1.100.000,00	1,16

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan (Rp)	Persen (%)
3.25.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	5,00	0,00	0	34.930.000,00	1.100.000,00	3,15
3.25.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	74,00	0,00	0	59.851.300,00	0,00	0
3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase hasil uji produk perikanan yang memenuhi standar keamanan pangan asal perikanan	%	80,00	0,00	0	439.723.208,00	0,00	0
3.25.06.1.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Persentase hasil uji produk perikanan yang memenuhi standar keamanan pangan asal perikanan	%	80,00	0,00	0	439.723.208,00	0,00	0
3.25.06.1.02.0004	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Kegiatan yang diberikan kepada unit usaha berupa pembinaan, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap mutu dan keamanan hasil perikanan yang berdaya saing serta pemberdayaan usaha dalam rangka menghasilkan produk yang aman dan bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan berdaya saing berdasarkan skala usaha dan risiko	Kegiatan	3,00	0,00	0	439.723.208,00	0,00	0
3.25.0.00.0.00.01.0003	UPTD Balai Benih Udang Sentral Air Payau dan Air Laut Manggar								
3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti	%	100,00	0,00	0	2.039.412.475,00	523.522.298,00	25,67
		Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	Indeks	91,40	0,00	0			
3.25.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran	%	100,00	0,00	0	89.160.000,00	39.720.000,00	44,55
3.25.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	1,00	0,00	0	89.160.000,00	19.860.000,00	22,27
3.25.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	%	20,00	0,00	0	89.500.000,00	0,00	0
3.25.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	5,00	0,00	0	89.500.000,00	0,00	0
3.25.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	%	100,00	0,00	0	1.085.689.525,00	84.037.220,00	7,74
3.25.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1,00	0,00	0	8.140.760,00	0,00	0
3.25.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1,00	0,00	0	498.599.701,00	0,00	0
3.25.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1,00	0,00	0	9.999.194,00	0,00	0
3.25.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1,00	0,00	0	10.733.470,00	0,00	0
3.25.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	1,00	0,00	0	3.878.400,00	0,00	0
3.25.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1,00	0,00	0	554.338.000,00	42.018.610,00	7,58
3.25.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	%	100,00	0,00	0	474.558.000,00	399.765.078,00	84,24
3.25.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1,00	0,02	2	2.224.000,00	0,00	0
3.25.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1,00	0,20	20	472.334.000,00	79.280.939,00	16,78
3.25.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi baik	%	100,00	0,00	0	300.504.950,00	0,00	0
3.25.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	13,00	0,00	0	63.210.250,00	0,00	0
3.25.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	56,00	0,00	0	137.294.700,00	0,00	0
3.25.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1,00	0,00	0	100.000.000,00	0,00	0
3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Produksi Ketersediaan Benih Udang/Ikan Air Laut	Ekor	#####	0,00	0	2.329.121.432,00	0,00	0
3.25.04.1.06	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat	Jumlah Produksi Ketersediaan Benih Udang/Ikan Air Laut	Ekor	#####	0,00	0	2.329.121.432,00	0,00	0
3.25.04.1.06.0003	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Unit	17,00	0,09	0,53	2.103.387.752,00	0,00	0
3.25.04.1.06.0004	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Unit	1,00	0,00	0	225.733.680,00	0,00	0
3.25.0.00.0.00.01.0004	UPTD Sentral Pembenuhan Air Payau dan Air Laut Sebelu								
3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti	%	100,00	0,00	0	3.264.029.085,00	644.060.855,00	19,73
		Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	Indeks	91,40	0,00	0			
3.25.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran	%	100,00	0,00	0	100.630.000,00	22.260.000,00	22,12

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan (Rp)	Persen (%)
3.25.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	1,00	0,22	22,12	100.630.000,00	22.260.000,00	22,12
3.25.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	%	20,00	0,00	0	229.200.000,00	0,00	0
3.25.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	18,00	0,00	0	229.200.000,00	0,00	0
3.25.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	%	100,00	0,00	0	745.932.214,00	40.314.000,00	5,4
3.25.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1,00	0,00	0	47.744.336,00	0,00	0
3.25.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1,00	0,03	3	87.793.563,00	2.240.000,00	2,55
3.25.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1,00	0,00	50	7.718.715,00	0,00	0
3.25.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1,00	0,00	50	24.999.600,00	0,00	0
3.25.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1,00	0,07	7	577.676.000,00	38.074.000,00	6,59
3.25.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan BMD	%	100,00	0,00	0	224.886.871,00	0,00	0
3.25.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	1,00	0,00	0	37.417.717,00	0,00	0
3.25.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	17,00	0,00	0	187.469.154,00	0,00	0
3.25.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	%	100,00	0,00	0	186.375.600,00	563.725.055,00	302,47
3.25.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1,00	0,21	20,63	945.200,00	0,00	0
3.25.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1,00	0,29	29,13	185.430.400,00	38.246.733,00	20,63
3.25.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi baik	%	100,00	0,00	0	1.777.004.400,00	17.761.800,00	1
3.25.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	5,00	0,50	10,06	132.077.000,00	13.290.000,00	10,06
3.25.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	47,00	2,16	4,59	97.505.900,00	4.471.800,00	4,59
3.25.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	3,00	0,00	0	1.547.421.500,00	0,00	0
3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Produksi Ketersediaan Benih Udang/Ikan Air Laut/Payau/Tawar	Ekor	4.393.750,00	0,00	0	3.574.128.378,00	6.750.000,00	0,19
3.25.04.1.06	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat	Jumlah Produksi Ketersediaan Benih Udang/Ikan Air Payau/Laut/Tawar	Ekor	4.393.750,00	1.807.655,00	41,14	3.574.128.378,00	6.750.000,00	0,19
3.25.04.1.06.0003	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Unit	2,00	0,01	0,53	1.276.837.449,00	6.750.000,00	0,53
3.25.04.1.06.0004	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Unit	1,00	0,00	0	2.297.290.929,00	0,00	0
3.26.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pariwisata								
3.26.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pariwisata								
3.26.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti	%	100,00	0,00	0	25.343.542.380,00	4.132.635.809,00	16,31
		Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	Indeks	81,00	0,00	0			
3.26.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang Ditetapkan Tepat Waktu	%	90,00	20,00	22,22	1.498.200.000,00	199.936.461,00	13,35
3.26.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	6,00	2,00	33,33	1.000.000.000,00	199.936.461,00	20,36
3.26.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	3,00	0,00	0	200.000.000,00	0,00	0
3.26.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	3,00	0,00	0	298.200.000,00	0,00	0
3.26.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang Mendapatkan Layanan Administrasi Keuangan Tepat Waktu	%	82,00	20,00	24,39	14.333.287.048,00	2.385.072.467,00	16,64
3.26.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	74,00	74,00	100	13.861.087.048,00	2.349.382.467,00	20,29
3.26.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12,00	3,00	25	472.200.000,00	35.690.000,00	7,56
3.26.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM Aparatur yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	%	70,00	0,00	0	4.487.944,00	0,00	0

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan (Rp)	Persen (%)
3.26.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	6,00	0,00	0	4.487.944,00	0,00	0
3.26.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan barang dan Jasa	Bulan	12,00	3,00	25	5.898.310.488,00	228.128.421,00	3,87
3.26.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	16,00	4,00	25	50.029.411,00	6.766.300,00	13,52
3.26.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	30,00	8,00	26,67	4.047.308.244,00	59.539.600,00	1,47
3.26.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2,00	1,00	50	10.321.000,00	0,00	0
3.26.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	10,00	2,00	20	90.021.833,00	18.927.900,00	21,03
3.26.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	130,00	10,00	7,69	1.700.630.000,00	142.894.621,00	8,8
3.26.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Bulan	12,00	3,00	25	3.197.558.900,00	1.275.048.046,00	39,88
3.26.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12,00	3,00	25	735.878.900,00	133.966.526,00	18,2
3.26.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	8,00	2,00	25	513.800.000,00	11.946.800,00	2,33
3.26.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12,00	3,00	25	1.947.880.000,00	1.129.134.720,00	26,66
3.26.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi dengan Baik	%	80,00	6,00	7,5	411.698.000,00	44.450.414,00	10,8
3.26.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	23,00	6,00	26,09	411.698.000,00	44.450.414,00	10,8
3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase Pengembangan Daya Tarik Wisata	%	63,33	2,00	3,16	5.470.407.569,00	129.539.800,00	2,37
3.26.02.1.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	Persentase Daya Tarik Wisata yang dikelola (%)	%	66,67	0,00	0	1.806.321.190,00	0,00	0
3.26.02.1.01.0001	Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	Lokasi	2,00	0,00	0	344.996.190,00	0,00	0
3.26.02.1.01.0006	Perencanaan Daya Tarik Wisata Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Provinsi yang sah dan legal ditetapkan Kepala Daerah	Dokumen	2,00	0,00	0	1.461.325.000,00	0,00	0
3.26.02.1.02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Persentase Kawasan Strategis yang Dikelola	%	100,00	0,00	0	923.353.134,00	51.935.000,00	5,62
3.26.02.1.02.0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Unit	4,00	0,00	0	923.353.134,00	51.935.000,00	5,62
3.26.02.1.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Persentase Destinasi yang Dikelola	%	100,00	0,00	0	2.190.733.245,00	39.909.800,00	1,82
3.26.02.1.03.0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi yang Tersedia dan Terpelihara	Unit	3,00	0,00	0	807.488.000,00	0,00	0
3.26.02.1.03.0010	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Orang Pengelola Pariwisata Strategis Provinsi yang Dikembangkan	Orang	120,00	0,00	0	1.109.505.748,00	37.749.800,00	3,4
3.26.02.1.03.0012	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Laporan	1,00	0,00	0	273.739.497,00	2.160.000,00	0,79
3.26.02.1.04	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Persentase Rekomendasi Tanda Daftar Usaha pariwisata yang Diterbitkan	%	100,00	0,00	0	550.000.000,00	37.695.000,00	6,85
3.26.02.1.04.0006	Pembinaan dan Pengawasan untuk memastikan Kepatuhan Pelaku Usaha Melaksanakan Standar Usaha Risiko Menengah Rendah	Jumlah usaha yang dibina dan diawasi	Usaha	10,00	0,00	0	200.000.000,00	37.695.000,00	18,85
3.26.02.1.04.0009	Fasilitas Pendampingan Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Tingkat Risiko Menengah Tinggi)	Jumlah Industri/Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Memperoleh Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Tingkat Menengah Tinggi)	UnitUsaha	10,00	0,00	0	175.000.000,00	0,00	0
3.26.02.1.04.0010	Pengelolaan Investasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Laporan Pengelolaan Investasi Pariwisata Provinsi	Laporan	1,00	0,00	0	175.000.000,00	0,00	0
3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Rata - rata lama tinggal Wisatawan Mancanegara	Hari	2,70	0,00	0	4.949.848.966,00	327.000.000,00	6,61
3.26.03.1.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Rata - rata lama tinggal Wisatawan Nusantara	Hari	1,65	0,00	0	4.949.848.966,00	327.000.000,00	6,61
3.26.03.1.01.0001	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Dokumen	9,00	1,00	11,11	3.136.618.356,00	123.315.000,00	4,07
3.26.03.1.01.0005	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Dokumen	6,00	0,00	0	822.143.430,00	20.980.000,00	2,55

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan (Rp)	Persen (%)
3.26.03.1.01.0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Kegiatan	5,00	0,00	0	991.087.180,00	182.705.000,00	18,43
3.26.04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Persentase Pelaku ekonomi kreatif yang berkembang	%	88,00	5,00	5,68	5.964.912.031,00	125.979.874,00	2,11
3.26.04.1.01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	Persentase Sarana dan Prasarana Kota Kreatif yang Berfungsi dengan Baik	%	88,00	22,00	25	3.734.227.431,00	39.521.435,00	1,06
3.26.04.1.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif	Laporan	3,00	0,00	0	249.984.728,00	12.486.435,00	4,99
3.26.04.1.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Usaha Kreatif Terutama bagi Usaha Pemula	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Usaha Kreatif Terutama bagi Usaha Pemula	Laporan	1,00	0,00	0	254.769.213,00	0,00	0
3.26.04.1.01.0006	Perluasan Pasar Produk Kreatif Baik di Pasar Ekspor maupun Pasar Domestik	Jumlah dokumen promosi yang dilakukan dalam rangka Perluasan Akses Pasar Produk Kreatif Baik Pasar Ekspor dan Pasar Domestik	Dokumen	2,00	0,00	0	3.229.473.490,00	27.035.000,00	0,84
3.26.04.1.02	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Persentase Subsektor Ekonomi Kreatif yang Dikembangkan	%	80,00	22,00	27,5	2.230.684.600,00	86.458.439,00	3,88
3.26.04.1.02.0005	Pengembangan Sistem Pemasaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Sistem Pemasaran Ekonomi Kreatif	Dokumen	1,00	0,00	0	99.900.000,00	0,00	0
3.26.04.1.02.0010	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Dokumen	10,00	0,00	0	838.320.000,00	67.033.439,00	8
3.26.04.1.02.0017	Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah	Dokumen	2,00	0,00	0	99.999.620,00	0,00	0
3.26.04.1.02.0018	Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual	Jumlah produk Hasil Pencatatan atas Hak Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif	Produk	3,00	0,00	0	223.400.000,00	19.425.000,00	8,7
3.26.04.1.02.0019	Penyediaan Infrastruktur Ekonomi Kreatif	Jumlah Infrastruktur Ekonomi Kreatif	Unit	1,00	0,00	0	969.064.980,00	0,00	0
3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase SDM Parekrif yang Tersertifikasi	%	66,00	0,00	0	6.749.814.054,00	108.872.100,00	1,61
3.26.05.1.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Meningkatkan Kapasitasnya	%	64,00	16,00	25	5.555.614.054,00	108.872.100,00	1,96
3.26.05.1.01.0004	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Orang	590,00	30,00	5,08	2.718.376.918,00	73.845.000,00	2,82
3.26.05.1.01.0008	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Laporan	5,00	0,00	0	500.000.000,00	17.230.000,00	3,45
3.26.05.1.01.0014	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata	Orang	200,00	0,00	0	1.232.528.000,00	0,00	0
3.26.05.1.01.0017	Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang mendapat Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Orang	80,00	0,00	0	754.806.456,00	17.797.100,00	2,36
3.26.05.1.01.0018	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Laporan	4,00	0,00	0	349.902.680,00	0,00	0
3.26.05.1.02	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Persentase Pelaku Ekraf yang Berkembang Kapasitasnya	%	66,00	0,00	0	1.194.200.000,00	0,00	0
3.26.05.1.02.0001	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Orang	60,00	0,00	0	1.194.200.000,00	0,00	0
3.27.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perkebunan								
3.27.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perkebunan								
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Dinas Perkebunan)	Indeks	84,88	16,20	19,09	37.325.683.917,00	6.567.676.360,00	17,6
		Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti (Dinas Perkebunan)	%	100,00	100,00	100			
3.27.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yang ditetapkan tepat waktu	%	100,00	25,00	25	2.220.857.726,00	174.806.290,00	7,87
3.27.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	3,00	0,00	0	861.732.144,00	161.386.710,00	19,2
3.27.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	2,00	1,00	50	96.277.580,00	2.175.600,00	3,25
3.27.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	2,00	1,00	50	6.207.600,00	3.092.460,00	49,82

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan (Rp)	Persen (%)
3.27.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	3,00	2,00	66,67	703.634.256,00	7.191.520,00	1,07
3.27.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	6,00	0,00	0	553.006.146,00	960.000,00	0,19
3.27.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu	%	100,00	100,00	100	27.339.906.414,00	4.746.163.135,00	17,36
3.27.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	137,00	84,00	61	26.600.937.884,00	4.630.319.335,00	19,94
3.27.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	1,00	0,00	0	547.920.000,00	105.510.000,00	19,26
3.27.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	1,00	0,00	0	128.325.552,00	3.713.300,00	2,89
3.27.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	1,00	0,00	0	11.499.514,00	1.225.000,00	10,65
3.27.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	12,00	3,00	25	28.370.612,00	4.893.500,00	17,25
3.27.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	12,00	3,00	25	22.852.852,00	502.000,00	2,2
3.27.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Berfungsi dengan Baik	%	75,00	27,37	36,49	173.195.602,00	0,00	0
3.27.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	2,00	0,00	0	17.857.156,00	0,00	0
3.27.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1,00	0,00	0	145.200.579,00	0,00	0
3.27.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	4,00	0,00	0	10.137.867,00	0,00	0
3.27.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase retribusi perkebunan	%	100,00	6,94	7	9.060.580,00	0,00	0
3.27.01.1.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan	1,00	0,00	0	9.060.580,00	0,00	0
3.27.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	%	59,52	1,33	2,23	750.608.623,00	650.000,00	0,09
3.27.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Berserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Berserta Atribut Kelengkapan	Paket	2,00	0,00	0	228.925.295,00	0,00	0
3.27.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	1,00	0,00	0	38.748.000,00	0,00	0
3.27.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	1,00	0,00	0	24.735.328,00	0,00	0
3.27.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	41,00	0,00	0	458.200.000,00	650.000,00	0,14
3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Unit kerja PD yang memiliki pelayan tepat waktu	Unit	4,00	1,00	25	2.649.012.373,00	155.011.855,00	5,85
3.27.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1,00	0,00	0	55.009.830,00	0,00	0
3.27.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	4,00	1,00	25	771.144.891,00	18.038.714,00	2,34
3.27.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	4,00	1,00	25	432.462.000,00	33.360.000,00	7,71
3.27.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	4,00	1,00	25	84.525.652,00	1.880.000,00	2,22
3.27.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	12,00	0,00	0	11.520.000,00	0,00	0
3.27.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1,00	0,00	0	1.294.350.000,00	101.733.141,00	8,89
3.27.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jenis barang yang diadakan untuk menunjang urusan Perangkat Daerah	Jenis	7,00	0,00	0	1.395.458.331,00	0,00	0
3.27.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	19,00	0,00	0	1.395.458.331,00	0,00	0
3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis jasa/pelayanan untuk menunjang urusan pemerintah daerah	Jenis	4,00	0,00	0	2.154.303.538,00	1.463.704.973,00	67,94
3.27.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1,00	0,00	0	36.540.000,00	0,00	0
3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1,00	0,00	0	708.411.948,00	118.931.283,00	16,79
3.27.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	1,00	0,00	0	143.471.590,00	7.326.000,00	5,11

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan (Rp)	Persen (%)
3.27.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1,00	0,00	0	1.265.880.000,00	1.337.447.690,00	28,82
3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	%	90,00	58,68	65,2	633.280.730,00	27.340.107,00	4,32
3.27.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	23,00	0,00	0	368.152.730,00	27.340.107,00	7,43
3.27.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1,00	0,00	0	176.418.000,00	0,00	0
3.27.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	69,00	0,00	0	88.710.000,00	0,00	0
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Tingkat Pemenuhan Sarana Perkebunan	%	25,41	0,00	0	20.336.416.914,00	39.952.900,00	0,2
3.27.02.1.01	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Jumlah sarana perkebunan yang diawasi	Jenis	10,00	0,00	0	20.336.416.914,00	39.952.900,00	0,2
3.27.02.1.01.0001	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Laporan	1,00	0,00	0	20.246.416.914,00	39.952.900,00	0,2
3.27.02.1.01.0003	Pengawasan Sebaran Sarana Pascapanen Perkebunan	Jumlah pengawasan ketersediaan dan sebaran sarana pascapanen Perkebunan	laporan	1,00	0,00	0	57.886.500,00	0,00	0
3.27.02.1.01.0005	Pengawasan Sebaran Sarana Pengolahan Hasil Perkebunan	Jumlah pengawasan ketersediaan dan sebaran sarana pengolahan hasil Perkebunan	laporan	1,00	0,00	0	32.113.500,00	0,00	0
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Luas Kebun yang dibangun	Ha	49.000,00	0,00	0	732.112.900,00	11.501.000,00	1,57
3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian	Jumlah prasarana pertanian perkebunan yang ditata	Jenis	2,00	0,00	0	732.112.900,00	11.501.000,00	1,57
3.27.03.1.01.0001	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Jumlah Rencana Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Dokumen	1,00	0,00	0	449.035.260,00	0,00	0
3.27.03.1.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jalan Usaha Tani	Dokumen	1,00	0,00	0	193.033.500,00	11.501.000,00	5,96
3.27.03.1.01.0020	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Perkebunan	Jumlah prasarana pengolahan hasil perkebunan yang dikendalikan dan dimanfaatkan	Unit	1,00	0,00	0	90.044.140,00	0,00	0
3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase luas areal perkebunan yang dikendalikan dan ditanggulangi akibat bencana Dampak Perubahan Iklim (DPI)	%	100,00	0,00	0	5.107.708.743,00	198.742.536,00	3,89
3.27.05.1.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	Jumlah pelaku usaha yang melakukan aksi mitigasi GRK dan penanganan konflik usaha perkebunan	PelakuUsaha	225,00	0,00	0	5.107.708.743,00	198.742.536,00	3,89
3.27.05.1.01.0002	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani	Ha	124.000,00	0,00	0	3.104.031.670,00	155.147.536,00	5,14
3.27.05.1.01.0003	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Ha	725,00	0,00	0	2.003.677.073,00	43.595.000,00	2,27
3.27.06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase perusahaan yang mendapat sertifikat penilaian usaha perkebunan (PUP)	%	55,45	0,00	0	1.256.502.962,00	62.513.755,00	4,98
3.27.06.1.01	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaku usaha perkebunan yang dibina dan dimitrakan	PelakuUsaha	75,00	0,00	0	1.256.502.962,00	62.513.755,00	4,98
3.27.06.1.01.0005	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian	Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi	Laporan	2,00	0,00	0	1.256.502.962,00	62.513.755,00	5,29
3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Kelembagaan Petani yang Kapasitasnya Meningkatkan	%	52,99	0,00	0	3.704.416.939,00	158.805.795,00	4,29
		Persentase Sumber Daya Manusia Pertanian yang Meningkatkan Kapasitasnya	%	23,03	0,00	0			
3.27.07.1.01	Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah pengembangan kompetensi penyuluh pertanian ASN yang dilaksanakan	Kegiatan	2,00	0,00	0	589.005.471,00	0,00	0
3.27.07.1.01.0004	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian	Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya	Orang	42,00	0,00	0	589.005.471,00	0,00	0
3.27.07.1.02	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	Jumlah pekebun yang dikembangkan kompetensinya dan menerapkan inovasi pertanian	Orang	416,00	0,00	0	1.786.587.652,00	101.153.400,00	5,66
3.27.07.1.02.0001	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Dokumen	1,00	0,00	0	952.522.332,00	99.203.400,00	10,97
3.27.07.1.02.0002	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan	Kelompok	21,00	0,00	0	834.065.320,00	1.950.000,00	0,27
3.27.07.1.03	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	Jumlah kelembagaan ekonomi petani yang dikembangkan	Lembaga	18,00	0,00	0	1.328.823.816,00	57.652.395,00	4,34
3.27.07.1.03.0005	Pendampingan dan pengawalan korporasi petani	Jumlah korporasi petani yang didampingi	Unit	1,00	0,00	0	624.720.888,00	46.201.410,00	7,84
3.27.07.1.03.0006	Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Korporasi Petani	Jumlah korporasi petani yang dibentuk dan beroperasi	Unit	1,00	0,00	0	704.102.928,00	11.450.985,00	1,63

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan (Rp)	Persen (%)
3.27.0.00.0.00.01.0002	UPTD Pengawasan Benih Pekebunan								
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD Pengawasan Benih Perkebunan (PBP))	Indeks	86,20	12,40	14	1.625.496.035,00	168.362.909,00	10,36
		Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti (UPTD Pengawasan Benih Perkebunan (PBP))	%	100,00	25,00	25			
3.27.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu (UPTD Pengawasan Benih Perkebunan (PBP))	%	100,00	15,32	15,32	84.960.000,00	13.020.000,00	15,32
3.27.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	1,00	0,15	15,32	84.960.000,00	13.020.000,00	15,32
3.27.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Retribusi Sertifikasi Pemeriksaan dan Pengujian Benih Tanaman Perkebunan	%	100,00	0,00	0	2.565.220,00	0,00	0
3.27.01.1.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan	1,00	0,00	0	2.565.220,00	0,00	0
3.27.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (UPTD Pengawasan Benih Perkebunan (PBP))	%	62,00	0,00	0	174.000.000,00	0,00	0
3.27.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	11,00	0,00	0	174.000.000,00	0,00	0
3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Unit kerja PD yang memiliki pelayan tepat waktu (UPTD Pengawasan Benih Perkebunan (PBP))	Unit	1,00	0,05	4,63	433.976.359,00	19.107.000,00	4,4
3.27.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1,00	0,00	0	4.027.485,00	0,00	0
3.27.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	4,00	0,00	0	149.462.323,00	0,00	0
3.27.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1,00	0,08	8	70.712.731,00	5.520.000,00	7,81
3.27.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	4,00	0,00	0	12.713.020,00	0,00	0
3.27.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	4,00	0,00	0	7.756.800,00	0,00	0
3.27.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1,00	0,08	8,07	189.304.000,00	13.587.000,00	8,07
3.27.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jenis barang yang diadakan untuk menunjang urusan Perangkat Daerah (UPTD Pengawasan Benih Perkebunan (PBP))	Jenis	2,00	0,00	0	22.705.756,00	0,00	0
3.27.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	8,00	0,00	0	22.705.756,00	0,00	0
3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis jasa/pelayanan untuk menunjang urusan pemerintah daerah (UPTD Pengawasan Benih Perkebunan (PBP))	Jenis	4,00	0,69	17,18	792.972.700,00	136.235.909,00	17,18
3.27.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1,00	1,00	100	4.830.000,00	4.830.000,00	100
3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1,00	0,00	0	145.422.700,00	24.385.909,00	16,77
3.27.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1,00	0,00	16,65	642.720.000,00	107.020.000,00	16,65
3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik (UPTD Pengawasan Benih Perkebunan (PBP))	%	50,00	0,00	0	114.316.000,00	0,00	0
3.27.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	2,00	0,00	0	24.406.000,00	0,00	0
3.27.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1,00	0,00	0	50.000.000,00	0,00	0
3.27.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	59,00	0,00	0	39.910.000,00	0,00	0
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Jumlah benih perkebunan yang diawasi peredarannya	Benih	6.000.000,00	470.400,00	7,84	1.260.805.619,00	92.164.260,00	7,31
3.27.02.1.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Jumlah benih bersertifikat yang diedarkan	Benih	5.000.000,00	392.000,00	7,84	1.260.805.619,00	92.164.260,00	7,31
3.27.02.1.02.0001	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	Jumlah Sertifikat Benih	Sertifikat	200,00	10,76	5,38	756.973.942,00	40.710.700,00	5,33

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan (Rp)	Persen (%)
3.27.02.1.02.0005	Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan	Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga	laporan	1,00	0,12	11,69	503.831.677,00	51.453.560,00	11,69
3.27.0.00.0.00.01.0003	UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan								
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan (P2TP))	Indeks	83,75	0,00	0	1.801.663.432,00	287.140.434,00	15,94
		Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti (UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan (P2TP))	%	100,00	0,00	0			
3.27.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu (UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan (P2TP))	%	100,00	0,00	83	84.960.000,00	13.020.000,00	15,32
3.27.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	1,00	0,15	15	84.960.000,00	13.020.000,00	15,32
3.27.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase retribusi jasa usaha Sewa ruang, Operasional Laboratorium	%	100,00	0,00	15	1.000.000,00	0,00	0
3.27.01.1.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan	1,00	0,00	0	1.000.000,00	0,00	0
3.27.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan (P2TP))	%	53,00	0,00	0	96.000.000,00	0,00	0
3.27.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	11,00	0,00	0	96.000.000,00	0,00	0
3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Unit kerja PD yang memiliki pelayan tepat waktu (UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan (P2TP))	Unit	1,00	0,10	10	487.333.764,00	45.743.536,00	9,39
3.27.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1,00	0,22	22	9.080.076,00	2.032.200,00	22,38
3.27.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	4,00	0,23	5,75	154.292.950,00	8.971.500,00	5,81
3.27.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	4,00	0,00	9	36.478.270,00	3.304.000,00	9,06
3.27.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	6,00	1,03	17,17	21.500.068,00	4.388.476,00	20,41
3.27.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	2,00	0,00	17	3.878.400,00	0,00	0
3.27.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1,00	0,00	11	262.104.000,00	27.047.360,00	10,84
3.27.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jenis barang yang diadakan untuk menunjang urusan Perangkat Daerah (UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan (P2TP))	Jenis	3,00	0,00	0	99.145.668,00	0,00	0
3.27.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1,00	0,00	0	60.120.000,00	0,00	0
3.27.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1,00	0,00	0	39.025.668,00	0,00	0
3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis jasa/pelayanan untuk menunjang urusan pemerintah daerah (UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan (P2TP))	Jenis	4,00	0,00	16,25	804.490.000,00	130.745.648,00	16,25
3.27.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1,00	0,00	100	5.200.000,00	5.200.000,00	100
3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1,00	0,00	13	227.130.000,00	30.535.648,00	13,44
3.27.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1,00	0,00	17	572.160.000,00	95.010.000,00	16,61
3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik (UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan (P2TP))	%	70,00	52,22	74,6	228.734.000,00	97.631.250,00	42,68
3.27.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	1,00	0,00	0	24.350.000,00	0,00	0

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan (Rp)	Persen (%)
3.27.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1,00	0,00	52	174.400.000,00	89.991.250,00	51,6
3.27.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	40,00	8,00	20	29.984.000,00	7.640.000,00	25,48
3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase luas areal perkebunan yang dikendalikan dan ditanggulangi akibat serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT)	%	60,00	0,00	0	1.203.230.191,00	31.772.000,00	2,64
3.27.05.1.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	Jumlah pelaku usaha yang melakukan aksi pengendalian OPT	PelakuUsaha	28,00	0,00	0	1.203.230.191,00	31.772.000,00	2,64
3.27.05.1.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	Ha	1.120,00	0,00	0	1.203.230.191,00	31.772.000,00	2,81
3.27.0.00.0.00.01.0004	UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan								
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti (UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan (PBTP))	%	100,00	100,00	100	4.641.101.994,00	69.595.706,00	1,5
		Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan (PBTP))	Indeks	82,75	10,42	12,59			
3.27.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu (UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan (PBTP))	%	100,00	0,00	0	84.960.000,00	13.020.000,00	15,32
3.27.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	1,00	0,00	0	84.960.000,00	13.020.000,00	15,32
3.27.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase retribusi jasa usaha bibit perkebunan	%	100,00	0,00	0	49.927.263,00	0,00	0
3.27.01.1.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan	1,00	0,00	0	49.927.263,00	0,00	0
3.27.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan (PBTP))	%	50,00	0,00	0	120.000.000,00	0,00	0
3.27.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	8,00	0,00	0	120.000.000,00	0,00	0
3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Unit kerja PD yang memiliki pelayan tepat waktu (UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan (PBTP))	Unit	1,00	0,00	0	565.833.151,00	23.350.400,00	4,13
3.27.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1,00	0,00	0	7.987.738,00	1.982.000,00	24,81
3.27.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	4,00	0,00	0	274.792.445,00	0,00	0
3.27.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	4,00	0,00	0	35.880.000,00	6.288.000,00	17,53
3.27.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	4,00	0,00	0	33.825.768,00	0,00	0
3.27.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	1,00	0,00	0	1.939.200,00	320.000,00	16,5
3.27.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1,00	0,00	0	211.408.000,00	14.760.400,00	6,98
3.27.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jenis barang yang diadakan untuk menunjang urusan Perangkat Daerah (UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan (PBTP))	Jenis	6,00	0,00	0	2.427.038.400,00	0,00	0
3.27.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1,00	0,00	0	150.000.000,00	0,00	0
3.27.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	12,00	0,00	0	2.277.038.400,00	0,00	0
3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis jasa/pelayanan untuk menunjang urusan pemerintah daerah (UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan (PBTP))	Jenis	4,00	0,12	3	886.258.000,00	24.500.306,00	2,76
3.27.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1,00	0,00	0	4.630.000,00	4.630.000,00	100
3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1,00	0,00	0	209.508.000,00	19.870.306,00	9,48
3.27.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1,00	0,00	0	672.120.000,00	0,00	0
3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik (UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan (PBTP))	%	65,00	0,00	0	507.085.180,00	8.725.000,00	1,72

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan (Rp)	Persen (%)
3.27.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	2,00	0,00	0	45.684.700,00	0,00	0
3.27.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1,00	0,00	0	163.800.000,00	0,00	0
3.27.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	5,00	0,05	1	297.600.480,00	8.725.000,00	2,93
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase pemenuhan kebutuhan benih unggul bermutu untuk perkebunan rakyat	%	96,50	0,00	0	4.499.999.354,00	397.552.285,00	8,83
3.27.02.1.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Jumlah benih tanaman perkebunan yang disediakan	Benih	50.000,00	0,00	0	4.499.999.354,00	397.552.285,00	8,83
3.27.02.1.02.0005	Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan	Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga	laporan	2,00	0,00	0	4.499.999.354,00	397.552.285,00	8,97
3.27.0.00.0.00.02.0000	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan								
3.27.0.00.0.00.02.0000	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan								
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang di Tindak Lanjuti	%	100,00	0,00	0	42.397.366.433,00	7.188.374.831,00	16,95
		Indek Kualitas Layanan Kesekretariatan	%	95,17	0,00	0			
3.27.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yang ditetapkan tepat waktu	%	92,00	50,00	54,35	1.781.554.677,00	21.614.000,00	1,21
3.27.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	8,00	4,00	50	548.090.512,00	12.497.000,00	2,28
3.27.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	2,00	1,00	50	30.638.800,00	0,00	0
3.27.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	2,00	1,00	50	12.083.264,00	0,00	0
3.27.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	5,00	1,00	20	101.397.391,00	0,00	0
3.27.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	9,00	0,00	0	1.089.344.710,00	9.117.000,00	0,9
3.27.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat Pemenuhan Administrasi Realisasi Anggaran	Skor	91,00	5,09	5,59	32.982.245.841,00	5.278.357.843,00	16
3.27.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	182,00	182,00	100	31.965.778.615,00	5.095.853.343,00	18,69
3.27.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12,00	3,00	25	720.783.625,00	168.390.000,00	23,36
3.27.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12,00	3,00	25	7.709.856,00	0,00	0
3.27.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	1,00	0,00	0	11.964.952,00	0,00	0
3.27.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	1,00	0,00	0	252.742.919,00	14.114.500,00	6,12
3.27.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	2,00	0,00	0	23.265.874,00	0,00	0
3.27.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tingkat Pengelolaan administrasi BMD	Skor	83,00	37,50	45	143.599.900,00	9.975.485,00	6,95
3.27.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1,00	1,00	100	10.477.000,00	515.000,00	4,92
3.27.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	2,00	0,00	0	80.405.900,00	2.719.000,00	3,38
3.27.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	4,00	1,00	25	52.717.000,00	6.741.485,00	15,21
3.27.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat Pengelolaan kepegawaian	Skor	83,00	15,83	19,07	668.142.443,00	36.032.000,00	5,39
3.27.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	3,00	1,00	33,33	268.939.656,00	0,00	0
3.27.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	1,00	0,00	0	15.680.000,00	0,00	0

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan (Rp)	Persen (%)
3.27.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	4,00	1,00	25	136.100.723,00	36.032.000,00	28,35
3.27.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	17,00	0,00	0	247.422.064,00	0,00	0
3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan administrasi umum	%	83,00	0,00	19,07	1.238.499.345,00	128.677.524,00	10,39
3.27.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	4,00	1,00	25	31.134.806,00	0,00	0
3.27.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	9,00	0,00	0	217.162.113,00	0,00	0
3.27.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	8,00	0,00	0	130.350.426,00	5.012.000,00	3,85
3.27.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	17,00	0,00	0	33.252.000,00	0,00	0
3.27.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12,00	3,00	25	826.600.000,00	123.665.524,00	16,32
3.27.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah	%	83,00	0,00	17,64	1.894.439.236,00	0,00	0
3.27.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	78,00	0,00	0	1.894.439.236,00	0,00	0
3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	83,00	25,00	30,12	1.690.132.036,00	1.698.666.679,00	100,5
3.27.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	4,00	1,00	25	16.668.000,00	1.043.000,00	6,26
3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12,00	3,00	25	435.259.180,00	71.671.602,00	16,47
3.27.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12,00	3,00	25	1.238.204.856,00	1.625.952.077,00	27,41
3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	%	83,00	14,64	17,64	1.998.752.955,00	15.051.300,00	0,75
3.27.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	18,00	0,00	0	319.453.400,00	13.776.300,00	4,31
3.27.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	168,00	18,00	10,71	125.061.150,00	1.275.000,00	1,02
3.27.01.1.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Unit	8,00	0,00	0	23.024.400,00	0,00	0
3.27.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	7,00	2,00	28,57	1.531.214.005,00	0,00	0
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Tingkat Kemanfaatan Sarana terhadap capaian kinerja teknis kegiatan pakan, perbibitan dan produksi peternakan	Skor	88,00	5,07	5,76	43.766.051.962,00	338.481.907,00	0,77
		Tingkat Kemanfaatan Sarana terhadap capaian kinerja teknis kegiatan Agribisnis Peternakan	Skor	97,29	0,00	0			
3.27.02.1.01	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Jumlah nilai pengeluaran komoditas ternak	Rupiah	920,00	154,00	17	2.995.563.353,00	99.128.600,00	3,31
		Jumlah produksi pupuk asal KOHE	Ton	410.000,00	600,00	0			
		Persentase pemanfaatan Jumlah Biogas	%	47,62	0,00	0			
		Jumlah Keluarga Miskin terfasilitasi	KK	660,00	0,00	0			
		Persentase Kapasitas usaha pengolahan hasil peternakan	%	27,00	0,00	0			
3.27.02.1.01.0001	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Laporan	4,00	0,00	0	1.838.561.446,00	6.166.000,00	0,34
3.27.02.1.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Dokumen	3,00	0,00	0	1.157.001.907,00	92.962.600,00	8,13
3.27.02.1.04	Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Persentase Akseptor IB dari Indukan	%	13,00	0,00	0	3.243.163.352,00	98.480.758,00	3,04
		Persentase Calving Rate	%	61,50	0,00	0			
		Jumlah bibit sapi ber-SKLB	Ekor	225,00	0,00	0			
		Jumlah Usaha Ternak (aneka ternak/plasma nutfah)	UnitUsaha	119,00	0,00	0			
		Penurunan jumlah DOC kualitasnya dibawah Standar	%	1,85	0,00	0			
		Pertumbuhan Upgrade Closed house	%	61,50	0,00	0			
3.27.02.1.04.0001	Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Dokumen	1,00	0,00	0	1.881.588.247,00	45.729.000,00	2,49

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan (Rp)	Persen (%)
3.27.02.1.04.0004	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	laporan	3,00	0,00	0	1.361.575.105,00	52.751.758,00	3,99
3.27.02.1.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah Pengolahan Pakan, bank pakan	Unit	31,00	0,00	0	4.711.894.924,00	80.679.400,00	1,71
		Luasan HPT	Ha	1.225,00	0,00	0			
3.27.02.1.05.0004	Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia dan yang diproduksi	laporan	2,00	0,00	0	2.751.279.055,00	29.532.000,00	1,09
3.27.02.1.05.0005	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan, Pakan	Jumlah benih/bibit ternak dan HPT, bahan pakan, pakan yang beredar	Dokumen	4,00	1,00	25	1.960.615.869,00	51.147.400,00	2,68
3.27.02.1.06	Pengawasan Peredaran Obat Hewan di Tingkat Distributor	Persentase unit usaha yang mengedarkan obat hewan bermutu/ berkhasiat/aman	%	47,00	0,00	0	743.219.568,00	17.781.116,00	2,39
3.27.02.1.06.0001	Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	Jumlah Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan yang Beredar	Laporan	4,00	0,00	0	743.219.568,00	17.781.116,00	2,51
3.27.02.1.07	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Jumlah Pengadaan Ternak	Indukan/Bibit	4.700,00	0,00	0	32.072.210.765,00	42.412.033,00	0,13
3.27.02.1.07.0004	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah provinsi lain	Ekor	4.704,00	0,00	0	32.072.210.765,00	42.412.033,00	0,13
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Tingkat pemenuhan prasarana peternakan	Skor	99,72	69,49	69,69	15.727.562.222,00	32.572.804,00	0,21
3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian	Luas kawasan pemanfaatan untuk peternakan	Ha	155,00	140,00	90	15.727.562.222,00	32.572.804,00	0,21
		Jumlah Akses pembiayaan	MilyarRupiah	120,00	21,00	18			
		Jumlah Investasi di Bidang Peternakan	unit	4,00	0,00	0			
3.27.03.1.01.0001	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Jumlah Rencana Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Dokumen	1,00	0,00	0	15.727.562.222,00	32.572.804,00	0,21
3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Tingkat pengendalian wilayah dari PHMSZ	Skor	92,41	0,00	0	11.928.802.539,00	91.467.532,00	0,77
		Tingkat pengendalian kesehatan masyarakat veteriner	Skor	95,81	29,40	30,69			
3.27.04.1.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah wilayah tidak terjadi kasus PHMSZ (cakupan 103 kecamatan di KALTIM,absolut)	Kecamatan	68,00	0,00	0	6.410.364.433,00	53.103.360,00	0,83
		Persentase pelayanan kesehatan hewan	%	45,80	0,00	0			
		Persentase wilayah (103 kecamatan) yang terkendali dari zoonosis	%	22,50	0,97	4,31			
		Tingkat kesembuhan GANGREP	%	80,00	0,00	0			
3.27.04.1.01.0003	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali	Laporan	12,00	3,00	25	2.176.928.353,00	20.595.000,00	0,95
3.27.04.1.01.0004	Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada Hewan	Wilayah	35,00	6,00	17,14	586.051.428,00	11.245.000,00	1,92
3.27.04.1.01.0005	Pelayanan Jasa Medik Veteriner Rumah Sakit Hewan dan Klinik Hewan	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner Rumah Sakit Hewan dan Klinik Hewan	Laporan	12,00	0,00	0	3.230.451.920,00	21.263.360,00	0,67
3.27.04.1.01.0009	Pengelolaan Partisipasi Masyarakat dalam Pengendalian Zoonosis	Jumlah kader zoonosis	Orang	50,00	0,00	0	416.932.732,00	0,00	0
3.27.04.1.02	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi	Persentase kepatuhan pemenuhan persyaratan administrasi dan teknis kesehatan hewan untuk pemasukan dan/atau pengeluaran hewan	%	80,00	0,00	0	1.812.464.494,00	38.364.172,00	2,12
		Persentase penurunan resiko masuknya PHMSZ	%	2,85	0,00	0			
3.27.04.1.02.0004	Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) di Perbatasan Tempat Pemeriksaan HPM	Jumlah pengawasan dan pemeriksaan kesehatan HPM di Perbatasan Tempat Pemeriksaan HPM	Laporan	12,00	3,00	25	1.472.267.649,00	27.012.172,00	1,83
3.27.04.1.02.0005	Analisis Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya	Jumlah analisis Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya	Laporan	2,00	0,00	0	340.196.845,00	11.352.000,00	3,51
3.27.04.1.03	Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan	Persentase unit usaha yang menerapkan kesrawan	%	1,41	0,00	0	3.439.895.012,00	0,00	0
		Persentase mutu dan keamanan pangan segar asal hewan yang memenuhi persyaratan (ASUH)	%	86,00	0,00	0			
		Jumlah zona/kompartemen bebas kasus PHMSZ	Unit	36,00	0,00	0			
		Jumlah konsumsi Pangan asal ternak balita potensi stunting	Gram/Hari	30,50	0,00	0			
		Persentase pemotongan ternak sapi betina produktif	%	23,50	7,46	168,26			
3.27.04.1.03.0001	Pemenuhan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit	Jumlah Zona/Kompartemen Bebas Penyakit yang Memenuhi Persyaratan Teknis Sertifikasi	Unit	13,00	0,00	0	728.732.704,00	0,00	0
3.27.04.1.03.0002	Pembinaan Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Unit Usaha Produk Hewan	Jumlah Unit Usaha Produk Hewan yang Memenuhi Persyaratan Teknis Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner	Laporan	2,00	0,00	0	418.226.300,00	0,00	0
3.27.04.1.03.0004	Pendampingan penerapan teknis kesejahteraan Hewan pada Unit Usaha Produk Hewan	Jumlah Unit Usaha yang telah dilakukan Pendampingan penerapan teknis Kesejahteraan pada Unit Usaha Produk Hewan	UnitUsaha	9,00	0,00	0	314.665.683,00	0,00	0

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan (Rp)	Persen (%)
3.27.04.1.03.0005	Pembinaan Penerapan persyaratan hygiene sanitasi pada unit usaha produk hewan	Jumlah unit usaha produk hewan yang telah dibina untuk penerapan persyaratan hygiene sanitasi	UnitUsaha	10,00	0,00	0	896.019.100,00	0,00	0
3.27.04.1.03.0006	Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan	Jumlah unit usaha produk hewan yang diawasi terhadap penerapan cara yang baik	UnitUsaha	30,00	0,00	0	798.833.532,00	0,00	0
3.27.04.1.03.0007	Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap Kesehatan masyarakat veteriner dan Kesejahteraan Hewan	Jumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan peningkatan kesadaran terhadap Kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan	Orang	400,00	0,00	0	283.417.693,00	0,00	0
3.27.04.1.04	Sertifikasi Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase kepatuhan pemenuhan persyaratan administrasi dan teknis kesmavet untuk pemasukan dan/atau pengeluaran produk hewan	%	60,00	15,00	25	266.078.600,00	0,00	0
3.27.04.1.04.0003	Pengelolaan Penerbitan Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran, Sertifikat Veteriner, dan SKKH/SKPH Hewan, Produk Hewan, dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)	Jumlah Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran, Sertifikat Veteriner, dan SKKH/SKPH HPM	Dokumen	60,00	0,00	0	266.078.600,00	0,00	0
3.27.06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Tingkat peran aktif pelaku usaha dalam usaha peternakan	Skor	99,59	86,91	87,27	259.872.040,00	20.471.500,00	7,88
3.27.06.1.01	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PKS usaha Peternakan yang diberikan advice	%	65,80	29,00	44	259.872.040,00	20.471.500,00	7,88
		Jumlah peran swasta dalam usaha bidang peternakan	UnitUsaha	126,00	123,00	98			
3.27.06.1.01.0002	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian di Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian di Lintas Kabupaten/Kota	Dokumen	790,00	0,00	0	123.303.460,00	12.357.000,00	11,16
3.27.06.1.01.0005	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian	Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi	Laporan	4,00	1,00	25	136.568.580,00	8.114.500,00	5,94
3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Peningkatan Kapasitas SDM dan Kelembagaan peternakan	Skor	99,73	0,00	0	3.254.022.490,00	159.346.474,00	4,9
3.27.07.1.02	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	Jumlah pembudidaya unggas	RTUP	49.310,00	0,00	0	614.175.878,00	28.532.719,00	4,65
		jumlah peternak milenial	Orang	100,00	0,00	0			
		Rasio SD komoditas/ produk peternakan	rasio	1,15	0,00	0			
3.27.07.1.02.0001	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Dokumen	3,00	0,00	0	280.980.382,00	17.828.110,00	6,55
3.27.07.1.02.0002	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan	Kelompok	15,00	0,00	0	333.195.496,00	10.704.609,00	3,35
3.27.07.1.03	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	Jumlah Desa Korporasi Ternak	Unit	13,00	0,00	0	2.639.846.612,00	130.813.755,00	4,96
3.27.07.1.03.0005	Pendampingan dan pengawalan korporasi petani	Jumlah korporasi petani yang didampingi	Unit	22,00	0,00	0	1.956.093.952,00	107.226.000,00	5,52
3.27.07.1.03.0006	Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Korporasi Petani	Jumlah korporasi petani yang dibentuk dan beroperasi	Unit	13,00	0,00	0	683.752.660,00	23.587.755,00	3,59
3.27.0.00.0.00.02.0002	UPTD Pembibitan dan Hijauan Pakan Ternak								
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indek Kualitas Layanan Kesekretariatan	Skor	95,17	0,00	0	8.663.528.153,00	378.377.640,00	4,37
		Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang di Tindak Lanjuti	%	100,00	0,00	0			
3.27.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat Pemenuhan Administrasi Realisasi Anggaran	Skor	91,00	10,00	10,99	147.070.380,00	0,00	0
3.27.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12,00	3,00	25	145.200.000,00	0,00	0
3.27.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12,00	3,00	25	1.870.380,00	0,00	0
3.27.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tingkat Pengelolaan administrasi BMD	Skor	83,00	10,00	12,05	50.879.625,00	0,00	0
3.27.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1,00	1,00	100	1.870.380,00	0,00	0
3.27.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	2,00	0,00	0	43.248.865,00	0,00	0
3.27.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1,00	0,00	0	5.760.380,00	0,00	0
3.27.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat Pengelolaan kepegawaian	Skor	83,00	10,00	12,05	112.972.300,00	0,00	0
3.27.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	2,00	0,00	0	49.300.000,00	0,00	0
3.27.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	5,00	0,00	0	63.672.300,00	0,00	0

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan (Rp)	Persen (%)
3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan administrasi umum	%	83,00	10,00	12,05	383.431.644,00	81.917.600,00	21,36
3.27.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	7,00	3,00	42,86	20.338.395,00	0,00	0
3.27.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12,00	3,00	25	25.660.679,00	0,00	0
3.27.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	6,00	3,00	50	24.232.570,00	0,00	0
3.27.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12,00	3,00	25	313.200.000,00	40.958.800,00	13,08
3.27.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah	%	83,00	10,00	12	162.038.546,00	0,00	0
3.27.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	17,00	6,00	35,29	162.038.546,00	0,00	0
3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	83,00	10,00	12,05	958.989.200,00	257.810.040,00	26,88
3.27.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1,00	0,00	0	14.780.000,00	0,00	0
3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12,00	3,00	25	154.132.800,00	16.247.020,00	10,54
3.27.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12,00	3,00	25	790.076.400,00	112.658.000,00	14,26
3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	%	83,00	10,00	12,05	6.848.146.458,00	38.650.000,00	0,56
3.27.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	18,00	1,00	5,56	141.945.500,00	7.930.000,00	5,59
3.27.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	64,00	3,00	4,69	168.735.200,00	11.395.000,00	6,75
3.27.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	4,00	0,00	0	6.537.465.758,00	0,00	0
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Tingkat Kemanfaatan Sarana terhadap capaian kinerja teknis kegiatan Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Skor	98,73	49,31	49,94	2.903.839.939,00	236.968.000,00	8,16
3.27.02.1.03	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi	Jumlah produksi bibit/benih HPT yang terdistribusi Jumlah PAD Calving Interval Jumlah produksi pupuk angka kelahiran Jumlah Produksi Hijauan Pakan Ternak dan pakan tambahan Angaka Mortalitas atau Kematian Ternak/Hewan Pesentase Jumlah ternak yang ber-SKLB Jumlah Populasi Ternak/Hewan	Stek/pols Rupiah Bulan Ton % Ton % % ST	15.000,00 ##### 16,66 20,00 26,10 1.800,00 2,05 5,00 194,00	138,67 ##### 12,00 6,00 13,58 422,31 1,50 0,00 184,40	1 27 127,97 30 52 23 126,83 0 95	2.903.839.939,00	236.968.000,00	8,16
3.27.02.1.03.0003	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Hewan	Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Hewan	Laporan	12,00	3,00	25	1.420.271.920,00	37.788.000,00	2,66
3.27.02.1.03.0004	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme	Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme	Laporan	12,00	3,00	25	1.483.568.019,00	80.696.000,00	5,44
3.27.0.00.0.00.02.0003	UPTD Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner								
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indek Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang di Tindak Lanjuti	Skor %	95,17 100,00	0,00 0,00	0 0	3.595.239.736,00	369.842.048,00	10,29
3.27.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat Pemenuhan Administrasi Realisasi anggaran	Skor	91,00	10,00	11	124.791.000,00	36.920.000,00	29,59
3.27.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12,00	3,00	25	118.920.000,00	18.460.000,00	15,52
3.27.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12,00	3,00	25	5.871.000,00	0,00	0

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan (Rp)	Persen (%)
3.27.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tingkat Pengelolaan administrasi BMD	Skor	83,00	5,00	6	31.954.300,00	0,00	0
3.27.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1,00	1,00	100	5.301.140,00	0,00	0
3.27.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	2,00	0,00	0	15.531.140,00	0,00	0
3.27.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	4,00	0,00	0	11.122.020,00	0,00	0
3.27.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat Pengelolaan kepegawaian	Skor	83,00	10,00	12,05	109.737.000,00	0,00	0
3.27.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	4,00	0,00	0	37.737.000,00	0,00	0
3.27.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	12,00	0,00	0	72.000.000,00	0,00	0
3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan administrasi umum	%	83,00	5,00	6,02	299.090.881,00	13.128.640,00	4,39
3.27.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	2,00	0,00	0	10.344.647,00	0,00	0
3.27.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	13,00	0,00	0	36.754.568,00	0,00	0
3.27.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	8,00	0,00	0	33.171.666,00	0,00	0
3.27.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	2,00	0,00	0	3.960.000,00	0,00	0
3.27.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12,00	3,00	25	214.860.000,00	6.564.320,00	3,06
3.27.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah	%	83,00	4,00	4,82	1.993.167.358,00	0,00	0
3.27.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	44,00	0,00	0	1.993.167.358,00	0,00	0
3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	83,00	8,00	9,64	704.867.700,00	301.212.060,00	42,73
3.27.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	4,00	1,00	25	17.356.000,00	4.000.000,00	23,05
3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12,00	3,00	25	196.454.000,00	32.606.030,00	16,6
3.27.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12,00	3,00	25	491.057.700,00	114.000.000,00	23,22
3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	%	83,00	4,00	4,82	331.631.497,00	18.581.348,00	5,6
3.27.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	7,00	0,00	0	101.120.000,00	5.970.674,00	5,9
3.27.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	84,00	0,00	0	160.631.497,00	3.320.000,00	2,07
3.27.01.1.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Unit	2,00	0,00	0	46.900.000,00	0,00	0
3.27.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1,00	0,00	0	22.980.000,00	0,00	0
3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Tingkat Layanan Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Skor	99,18	2,58	2,6	2.070.872.486,00	556.990.400,00	26,9
3.27.04.1.03	Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan	Nilai Kepuasan pelanggan	Skor	86,00	0,00	0	2.070.872.486,00	556.990.400,00	26,9
		Jumlah Ruang lingkup pengujian	Absolut	45,00	0,00	0			
		Jumlah PAD	Rupiah	#####	#####	14			
3.27.04.1.03.0003	Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Dokumen	500,00	123,00	24,6	2.070.872.486,00	278.495.200,00	13,45
3.28.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kehutanan								
3.28.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kehutanan								
3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	Indeks	83,00	83,00	100			
		2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	%	100,00	0,00	0	191.636.278.204,00	34.510.713.023,00	18,01

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan (Rp)	Persen (%)
3.28.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase Perencanaan, Penganggaran, evaluasi dan Pelaporan yang diselesaikan	%	100,00	8,00	8	2.684.333.108,00	157.790.000,00	5,88
3.28.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	4,00	1,00	25	783.653.644,00	133.479.000,00	17,03
3.28.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	2,00	0,00	0	174.904.762,00	15.052.500,00	8,61
3.28.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	2,00	0,00	0	90.138.682,00	7.857.500,00	8,72
3.28.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	2,00	0,00	0	622.570.304,00	0,00	0
3.28.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	4,00	0,00	0	1.013.065.716,00	1.401.000,00	0,14
3.28.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Penatausahaan Keuangan	%	100,00	25,00	25	160.327.874.683,00	29.198.432.289,00	18,21
3.28.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	771,00	215,00	28	158.550.358.655,00	28.883.896.289,00	19,65
3.28.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12,00	3,00	25	934.080.000,00	231.270.000,00	24,76
3.28.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	21,00	21,00	100	134.534.282,00	83.266.000,00	61,89
3.28.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	1,00	0,00	0	83.628.382,00	0,00	0
3.28.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	4,00	0,00	0	267.928.474,00	0,00	0
3.28.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	1,00	0,00	0	357.344.890,00	0,00	0
3.28.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Presentase Barang Milik Daerah Pada SKPD yang telah Ditatausahakan	%	100,00	0,00	0	770.535.752,00	27.420.000,00	3,56
3.28.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1,00	0,00	0	44.440.443,00	0,00	0
3.28.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1,00	0,00	0	179.500.000,00	0,00	0
3.28.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	4,00	0,00	0	252.354.550,00	15.660.000,00	6,21
3.28.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1,00	0,00	0	294.240.759,00	11.760.000,00	4
3.28.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian	%	100,00	5,00	5	1.314.642.960,00	29.427.000,00	2,24
3.28.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	4,00	0,00	0	499.266.000,00	0,00	0
3.28.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	1,00	0,00	0	83.000.980,00	0,00	0
3.28.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	2,00	0,00	0	191.115.980,00	29.427.000,00	15,4
3.28.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	30,00	0,00	0	541.260.000,00	0,00	0
3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum	%	100,00	25,00	25	4.926.976.873,00	186.624.737,00	3,79
3.28.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1,00	0,00	0	35.346.370,00	0,00	0
3.28.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5,00	0,00	0	1.859.958.917,00	5.000.000,00	0,27
3.28.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	3,00	0,00	0	44.923.426,00	8.137.000,00	18,11
3.28.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	12,00	3,00	25	11.635.200,00	1.939.200,00	16,67
3.28.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12,00	3,00	25	2.474.760.000,00	136.371.937,00	5,51
3.28.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1,00	0,00	0	282.796.980,00	0,00	0
3.28.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	1,00	0,00	0	217.555.980,00	35.176.600,00	16,17
3.28.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Barang Milik Daerah yang Di adakan	%	100,00	50,00	50	3.496.251.885,00	1.504.000.000,00	43,02

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan (Rp)	Persen (%)
3.28.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	4,00	4,00	100	1.504.800.000,00	1.504.000.000,00	99,95
3.28.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	496,00	0,00	0	1.991.451.885,00	0,00	0
3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelayanan Jasa Kantor	%	100,00	25,00	25	3.561.531.500,00	3.326.729.711,00	93,41
3.28.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12,00	0,00	0	2.780.000,00	0,00	0
3.28.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12,00	3,00	25	842.911.500,00	193.513.151,00	22,96
3.28.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	1,00	0,00	0	405.000.000,00	95.238.000,00	23,52
3.28.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12,00	3,00	25	2.310.840.000,00	3.037.978.560,00	21,82
3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	%	100,00	10,00	10	14.554.131.443,00	80.289.286,00	0,55
3.28.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	2,00	0,00	0	59.920.804,00	4.200.000,00	7,01
3.28.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	67,00	2,00	2,99	964.874.019,00	73.209.286,00	7,59
3.28.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	161,00	3,00	1,86	111.764.460,00	2.880.000,00	2,58
3.28.01.1.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Unit	2,00	0,00	0	195.604.000,00	0,00	0
3.28.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	3,00	0,00	0	13.221.968.160,00	0,00	0
3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat direhabilitasi Persentase luas kerusakan kawasan hutan	%	0,71 1,00	0,00 0,00	0 0	46.864.755.134,00	560.875.945,00	1,2
3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	Dokumen	20,00	0,00	0	812.139.319,00	0,00	0
3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	Dokumen	2,00	0,00	0	812.139.319,00	0,00	0
3.28.03.1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Luas Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	Ha	5.153.407,17	0,00	0	7.305.016.642,00	55.308.945,00	0,76
3.28.03.1.03.0001	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	Dokumen	4,00	0,00	0	1.213.353.347,00	0,00	0
3.28.03.1.03.0002	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Mengenai Pemanfaatan Hutan di Kawasan HL Provinsi Secara Berkala	Dokumen	2,00	0,00	0	1.004.315.406,00	0,00	0
3.28.03.1.03.0010	Penilaian Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Produksi yang Disahkan	Dokumen	50,00	0,00	0	1.424.600.000,00	16.894.400,00	1,84
3.28.03.1.03.0013	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	Dokumen	26,00	1,00	3,85	3.662.747.889,00	38.414.545,00	1,05
3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara	Ha	250,00	0,00	0	13.241.213.540,00	245.674.370,00	1,86
3.28.03.1.04.0001	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	Dokumen	5,00	0,00	0	458.362.550,00	22.664.000,00	5,51
3.28.03.1.04.0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	Ha	568,00	2,00	0	10.832.561.274,00	130.942.200,00	1,21
3.28.03.1.04.0008	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Laporan	20,00	0,00	0	1.950.289.716,00	92.068.170,00	5,54
3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas kerusakan kawasan hutan	<Ha	25.000,00	0,00	0	21.285.002.220,00	133.776.830,00	0,63
3.28.03.1.05.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Dokumen	8,00	0,00	0	9.129.446.634,00	0,00	0
3.28.03.1.05.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penangulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	Laporan	7,00	0,00	0	10.548.617.988,00	32.507.232,00	0,31
3.28.03.1.05.0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	Ha	7.929.179,00	0,00	0	1.195.373.408,00	101.269.598,00	10,93
3.28.03.1.05.0008	Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Hasil Hutan Ilegal	Jumlah operasi peredaran hasil hutan ilegal (illegal logging dan TSL)	Operasi	2,00	0,00	0	411.564.190,00	0,00	0
3.28.03.1.07	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Jumlah hasil izin usaha industri primer hasil hutan kayu dengan kapasitas izin 6.000 M3 per tahun yang aktif	M	164.993,00	0,00	0	1.469.519.299,00	14.079.900,00	0,96

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan (Rp)	Persen (%)
3.28.03.1.07.0005	Pengendalian PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi	Laporan kegiatan Pengendalian PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah dan Tindaklanjutnya berupa peneanaan Sanksi Adminsitratif	UnitManagem en	29,00	0,00	0	341.004.198,00	14.079.900,00	4,13
3.28.03.1.07.0006	Pemantauan Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH) untuk PBPHH (Kayu dan HHBK) skala usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi	Tertib pelaporan RKOPHH untuk Pemegang PBPHH (Kayu dan HHBK) skala usaha kecil dan menengah	UnitManagem en	48,00	0,00	0	1.128.515.101,00	0,00	0
3.28.03.1.09	Perbenihan Tanaman Hutan	1. Jumlah SK pengada/pengedar benih dan/atau bibit terdaftar; 2. Jumlah sertifikat sumber benih yang terverifikasi	SK;Sertifika	105,00	0,00	0	2.751.864.114,00	112.035.900,00	4,07
3.28.03.1.09.0002	Sertifikasi Sumber Benih	Jumlah Sertifikat Sumber Benih yang Diterbitkan	Sertifikat	12,00	0,00	0	373.119.800,00	0,00	0
3.28.03.1.09.0005	Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit	Jumlah Data (Asal Usul, Jenis Mutu) Benih Atau Bibit yang Beredar	Laporan	25,00	15,00	60	518.893.074,00	33.211.300,00	7,81
3.28.03.1.09.0007	Pembuatan dan Pengadaan Bibit untuk Rehabilitasi Lahan	Jumlah bibit berkualitas yang tersedia untuk Rehabilitasi Lahan	Batang	95.626,00	0,00	0	1.491.836.012,00	12.964.800,00	0,88
3.28.03.1.09.0010	Pelayanan Perizinan berusaha berbasis risiko bidang perbenihan tanaman hutan	Jumlah penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko (perorangan dan badan usaha non Perhutani) kegiatan usaha pengadaan dan pengedaran benih, pengadaan dan pengedaran bibit, serta pengadaan dan pengedaran benih dan bibit dalam provinsi	UnitUsaha	35,00	14,00	40	368.015.228,00	65.859.800,00	20,54
3.28.04	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Luas kawasan bernilai ekosistem penting dan konservasi provinsi yang dikelola	Ha	730.007,98	73.000,00	10	2.591.130.890,00	48.890.000,00	1,89
3.28.04.1.03	Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	Luas KBEP yang dikelola	Ha	665.142,00	66.514,20	10	2.591.130.890,00	48.890.000,00	1,89
3.28.04.1.03.0005	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Kelompok/Masyarakat yang Diberdayakan	Orang	570,00	0,00	0	1.417.280.890,00	46.500.000,00	3,28
3.28.04.1.03.0006	Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	Luas Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting yang Dikelola	Ha	100.000,00	0,00	0	1.173.850.000,00	2.390.000,00	0,29
3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat	Ha	20.000,00	0,00	0	40.402.556.733,00	5.628.711.979,00	13,93
3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	Kelompok	17,00	0,00	0	40.402.556.733,00	5.628.711.979,00	13,93
3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	Kelompok	17,00	0,00	0	2.464.900.150,00	43.082.658,00	1,75
3.28.05.1.01.0004	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	Orang	183,00	0,00	0	1.519.272.295,00	0,00	0
3.28.05.1.01.0006	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	Unit	5,00	0,00	0	7.871.350.303,00	0,00	0
3.28.05.1.01.0007	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan	Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya	Orang	350,00	0,00	0	25.890.505.683,00	5.465.693.176,00	21,11
3.28.05.1.01.0008	Penyiapan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial	Hektar	20.000,00	0,00	0	2.656.528.302,00	119.936.145,00	4,51
3.28.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	Luas DAS dan Sub DAS yang dikelola	Ha	196.336,00	0,00	0	3.789.275.000,00	37.441.400,00	0,99
3.28.06.1.01	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah DAS yang dikelola	DAS	1,00	0,00	0	3.789.275.000,00	37.441.400,00	0,99
3.28.06.1.01.0004	Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	Orang	300,00	0,00	0	1.428.275.000,00	24.535.800,00	1,72
3.28.06.1.01.0005	Pengembangan Kelembagaan Pengelolaan DAS	Jumlah Lembaga yang Dibentuk dan Dikembangkan dalam Forum Pengelolaan DAS	Lembaga	1,00	0,00	0	300.000.000,00	0,00	0
3.28.06.1.01.0007	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah	Jumlah dokumen rencana pengelolaan DAS yang ditetapkan	Dokumen	1,00	0,00	0	650.000.000,00	6.166.600,00	1,04
3.28.06.1.01.0008	Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS	Jumlah dokumen sinkronisasi dan koordinasi optimalisasi DAS	Dokumen	8,00	0,00	0	1.411.000.000,00	6.739.000,00	0,5
3.28.0.00.0.00.01.0002	UPTD Taman Hutan Raya Bukit Soeharto								
3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	%	100,00	24,00	24	3.599.712.706,00	184.422.744,00	5,12
3.28.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	Indeks	83,00	20,75	25	140.640.000,00	23.440.000,00	16,67
3.28.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12,00	3,00	25	140.640.000,00	23.440.000,00	16,67
3.28.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian	%	100,00	0,00	0	313.602.000,00	0,00	0

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan (Rp)	Persen (%)
3.28.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Berserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Berserta Atribut Kelengkapan	Paket	2,00	0,00	0	118.602.000,00	0,00	0
3.28.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	40,00	0,00	0	195.000.000,00	0,00	0
3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum	%	100,00	0,00	0	192.848.258,00	1.320.000,00	0,68
3.28.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1,00	0,00	0	21.572.146,00	0,00	0
3.28.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1,00	0,00	0	44.539.635,00	1.000.000,00	2,25
3.28.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1,00	0,00	0	12.839.023,00	0,00	0
3.28.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1,00	0,00	0	37.119.054,00	0,00	0
3.28.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	12,00	3,00	25	3.878.400,00	320.000,00	8,25
3.28.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12,00	0,00	0	72.900.000,00	0,00	0
3.28.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Barang Milik Daerah yang Di adakan	%	100,00	0,00	0	1.319.565.718,00	0,00	0
3.28.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	91,00	0,00	0	1.288.790.493,00	0,00	0
3.28.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	2,00	0,00	0	30.775.225,00	0,00	0
3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pelayanan Jasa Kantor	%	100,00	25,00	25	769.742.600,00	155.408.744,00	20,19
3.28.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12,00	3,00	25	245.650.600,00	49.808.744,00	20,28
3.28.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12,00	3,00	25	524.092.000,00	105.600.000,00	20,15
3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	%	100,00	25,00	25	863.314.130,00	4.254.000,00	0,49
3.28.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	62,00	15,00	24,19	336.401.930,00	4.254.000,00	1,26
3.28.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	44,00	0,00	0	27.240.000,00	0,00	0
3.28.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1,00	0,00	0	499.672.200,00	0,00	0
3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu	Ton	900,00	474,35	52,71	186.868.048,00	1.000.000,00	0,54
		Presentase Luas kerusakan kawasan hutan	%	1,00	0,00	0			
		Persentase Luas Lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat direhabilitasi	%	0,71	0,00	0			
3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	Dokumen	1,00	0,00	0	186.868.048,00	1.000.000,00	0,54
3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	Dokumen	1,00	0,00	0	186.868.048,00	1.000.000,00	0,54
3.28.04	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Luas Kawasan Bernilai Ekosistem Penting dan Konservasi Provinsi yang dikelola	Hektar	730,01	0,00	0	9.738.727.302,00	19.814.000,00	0,2
3.28.04.1.01	Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi	Luas Kawasan Tahura Provinsi yang dikelola	Hektar	64,81	0,00	0	9.473.372.240,00	16.720.000,00	0,18
3.28.04.1.01.0008	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di sekitar TAHURA Provinsi	Jumlah Desa yang Diberdayakan Melalui Peningkatan Usaha Ekonomi Produktif	Desa	2,00	0,00	0	136.432.537,00	0,00	0
3.28.04.1.01.0014	Pemulihan Ekosistem TAHURA Provinsi	Luas Areal Tahura yang Dilakukan Pemulihan Ekosistem	Ha	400,00	0,00	0	7.552.321.949,00	16.720.000,00	0,22
3.28.04.1.01.0015	Pengamanan Kawasan TAHURA Provinsi	Luas Kawasan TAHURA Provinsi yang diamankan	Ha	64,81	0,00	0	1.784.617.754,00	0,00	0
3.28.04.1.03	Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	Luas KBEP yang dikelola	Hektar	1,00	0,00	0	265.355.062,00	3.094.000,00	1,17
3.28.04.1.03.0005	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Kelompok/Masyarakat yang Diberdayakan	Orang	60,00	0,00	0	142.600.418,00	0,00	0
3.28.04.1.03.0006	Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	Luas Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting yang Dikelola	Ha	25,00	0,00	0	122.754.644,00	3.094.000,00	2,52
3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat	Hektar	20.000,00	0,00	0	919.762.251,00	2.998.000,00	0,33
		Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	Kelompok	20,00	0,00	0			
3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	Kelompok	4,00	0,00	0	919.762.251,00	2.998.000,00	0,33

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan (Rp)	Persen (%)
3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	Kelompok	5,00	0,00	0	691.066.700,00	0,00	0
3.28.05.1.01.0008	Penyiapan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial	Hektar	10,00	0,00	0	228.695.551,00	2.998.000,00	1,31
3.28.0.00.0.00.01.0003	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Barat								
3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	%	100,00	25,00	25	2.145.739.358,00	302.042.681,00	14,08
		Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	Indeks	83,00	21,00	25,3			
3.28.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penatausahaan Keuangan	%	100,00	25,00	25	143.280.000,00	23.880.000,00	16,67
3.28.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12,00	3,00	25	143.280.000,00	23.880.000,00	16,67
3.28.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian	%	100,00	0,00	0	134.015.327,00	40.000,00	0,03
3.28.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	2,00	0,00	0	81.865.327,00	40.000,00	0,05
3.28.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	6,00	0,00	0	52.150.000,00	0,00	0
3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum	%	100,00	0,00	0	605.875.691,00	81.582.598,00	13,47
3.28.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1,00	0,00	0	7.808.600,00	0,00	0
3.28.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12,00	0,00	0	83.565.749,00	0,00	0
3.28.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12,00	0,00	0	514.501.342,00	81.582.598,00	15,86
3.28.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Di adakan	%	100,00	0,00	0	88.728.336,00	0,00	0
3.28.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	9,00	0,00	0	88.728.336,00	0,00	0
3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelayanan Jasa Kantor	%	100,00	0,00	25	757.748.324,00	175.869.083,00	23,21
3.28.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12,00	0,00	25	15.164.724,00	8.790.000,00	57,96
3.28.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12,00	0,00	25	141.218.000,00	17.079.083,00	12,09
3.28.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12,00	0,00	25	601.365.600,00	150.000.000,00	24,94
3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	%	100,00	0,00	0	416.091.680,00	20.671.000,00	4,97
3.28.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	26,00	0,00	0	149.238.000,00	12.510.000,00	8,38
3.28.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	43,00	0,00	0	46.950.000,00	4.607.500,00	9,81
3.28.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	3,00	0,00	0	20.000.000,00	3.553.500,00	17,77
3.28.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1,00	0,00	0	199.903.680,00	0,00	0
3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase Luas kerusakan kawasan hutan	%	1,00	0,00	0			
		Produksi hasil hutan bukan kayu	Ton	900,00	474,35	53			
		Produksi Hasil Hutan Kayu	m	4.445.000,00	1.059.546,70	24	12.129.291.062,00	126.041.752,00	1,04
		Persentase Luas Lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat direhabilitasi	%	0,71	0,00	0			
3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Tata Hutan yang disusun	Dokumen	1,00	0,00	0	6.389.253.387,00	6.425.000,00	0,1
3.28.03.1.01.0006	Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah sarana prasarana operasionalisasi KPH yang terpelihara	Unit	6,00	0,00	0	6.389.253.387,00	6.425.000,00	0,1
3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	Dokumen	1,00	0,00	0	320.129.365,00	18.574.240,00	5,8
3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	Dokumen	2,00	0,00	0	320.129.365,00	18.574.240,00	5,8
3.28.03.1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Luas Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	Ha	5,15	0,00	0	305.980.000,00	0,00	0
3.28.03.1.03.0013	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBBH Di Kawasan Hutan Produksi	Dokumen	10,00	0,00	0	305.980.000,00	0,00	0
3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara	Ha	200,00	0,00	0	4.107.854.826,00	44.755.894,00	1,09

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan (Rp)	Persen (%)
3.28.03.1.04.0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	Ha	205,00	0,00	0	4.038.714.189,00	29.480.000,00	0,73
3.28.03.1.04.0008	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Laporan	2,00	0,00	0	69.140.637,00	15.275.894,00	22,09
3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kerusakan Kawasan Hutan	Ha	7,50	0,00	0	1.006.073.484,00	56.286.618,00	5,59
3.28.03.1.05.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Dokumen	12,00	0,00	0	321.404.346,00	16.100.000,00	5,01
3.28.03.1.05.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penangulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	Laporan	12,00	0,00	0	341.221.728,00	31.526.618,00	9,24
3.28.03.1.05.0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	Ha	247,58	0,00	0	343.447.410,00	8.660.000,00	2,52
3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat	Ha	20.000,00	0,00	0	1.309.203.279,00	26.625.000,00	2,03
		Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	Kelompok	20,00	0,00	0			
3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	Kelompok	4,00	0,00	0	1.309.203.279,00	26.625.000,00	2,03
3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	Kelompok	3,00	0,00	0	380.290.935,00	26.625.000,00	7
3.28.05.1.01.0006	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	Unit	1,00	0,00	0	532.652.162,00	0,00	0
3.28.05.1.01.0007	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan	Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya	Orang	10,00	0,00	0	146.318.400,00	0,00	0
3.28.05.1.01.0008	Penyiapan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial	Hektar	30,00	0,00	0	249.941.782,00	0,00	0
3.28.0.00.0.00.01.0004	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bongan								
3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	Indeks	83,00	7,00	8,43	3.548.610.610,00	215.967.996,00	6,09
		2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	%	100,00	25,00	25			
3.28.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Penatausahaan Keuangan	%	100,00	25,00	25	199.176.000,00	0,00	0
3.28.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12,00	3,00	25	148.800.000,00	0,00	0
3.28.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	12,00	0,00	0	50.376.000,00	0,00	0
3.28.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Presentase Barang Milik Daerah Pada SKPD yang telah Ditatausahakan	%	100,00	25,00	25	50.376.000,00	8.118.350,00	16,12
3.28.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	4,00	1,00	25	50.376.000,00	8.118.350,00	16,12
3.28.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian	%	100,00	25,00	25	302.464.000,00	0,00	0
3.28.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	4,00	0,00	0	168.144.000,00	0,00	0
3.28.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	20,00	0,00	0	134.320.000,00	0,00	0
3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum	%	100,00	25,00	25	778.412.767,00	93.367.846,00	11,99
3.28.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	4,00	0,00	0	12.008.533,00	0,00	0
3.28.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5,00	1,00	20	65.606.853,00	33.378.378,00	50,88
3.28.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	5,00	0,00	0	39.522.718,00	0,00	0
3.28.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	3,00	1,00	33,33	40.515.563,00	10.390.000,00	25,64
3.28.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	12,00	0,00	0	1.939.200,00	0,00	0
3.28.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	15,00	5,00	33,33	618.819.900,00	49.599.468,00	8,02
3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pelayanan Jasa Kantor	%	100,00	25,00	25	872.464.400,00	114.481.800,00	13,12
3.28.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12,00	0,00	0	11.180.000,00	0,00	0
3.28.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12,00	3,00	25	174.393.600,00	0,00	0
3.28.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12,00	3,00	25	686.890.800,00	114.481.800,00	16,67

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan (Rp)	Persen (%)
3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	%	100,00	0,00	0	1.345.717.443,00	0,00	0
3.28.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	31,00	0,00	0	709.844.800,00	0,00	0
3.28.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	31,00	0,00	0	57.986.500,00	0,00	0
3.28.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	5,00	0,00	0	577.886.143,00	0,00	0
3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Presentase Luas kerusakan kawasan hutan Persentase Luas Lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat direhabilitasi	% %	1,00 0,71	0,00 0,00	0 0	6.551.455.722,00	288.569.413,00	4,4
3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Tata Hutan yang disusun	Dokumen	1,00	0,00	0	1.160.248.248,00	147.784.119,00	12,74
3.28.03.1.01.0008	Pembangunan dan pengelolaan Sarana dan Prasarana KPH berbasis resor	Jumlah sarana dan prasarana operasionalisasi resor yang terbangun	Unit	4,00	0,00	0	1.160.248.248,00	147.784.119,00	12,97
3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	Dokumen	1,00	0,00	0	183.593.990,00	7.536.750,00	4,11
3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	Dokumen	1,00	0,00	0	183.593.990,00	7.536.750,00	4,11
3.28.03.1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Luas Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	Ha	5.153.407,00	0,00	0	233.018.000,00	10.581.450,00	4,54
3.28.03.1.03.0013	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	Dokumen	2,00	0,00	0	233.018.000,00	10.581.450,00	4,54
3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara	Ha	105,00	0,00	0	3.438.357.151,00	22.635.631,00	0,66
3.28.03.1.04.0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	Ha	111,00	0,00	0	3.438.357.151,00	22.635.631,00	0,67
3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kerusakan Kawasan Hutan	Ha	7.929.179,00	0,00	0	1.536.238.333,00	100.031.463,00	6,51
3.28.03.1.05.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Dokumen	2,00	0,00	0	132.889.848,00	69.794.486,00	52,52
3.28.03.1.05.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penangulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	Laporan	12,00	1,00	8,33	1.129.181.118,00	20.672.905,00	1,95
3.28.03.1.05.0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	Ha	335.746,00	0,00	0	274.167.367,00	9.564.072,00	3,49
3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	2). Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya 1). Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat	Kelompok Ha	20,00 20,00	0,00 0,00	0 0	1.843.741.518,00	35.570.600,00	1,93
3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	Kelompok	4,00	0,00	0	1.843.741.518,00	35.570.600,00	1,93
3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	Kelompok	4,00	0,00	0	608.327.896,00	14.206.900,00	2,34
3.28.05.1.01.0004	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	Orang	1,00	0,00	0	12.998.000,00	0,00	0
3.28.05.1.01.0006	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	Jumlah KUPS yang ditingkatkan kualitasnya	Unit	1,00	0,00	0	1.067.782.793,00	21.363.700,00	2,01
3.28.05.1.01.0008	Penyiapan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial	Hektar	25,00	0,00	0	154.632.829,00	0,00	0
3.28.0.00.0.00.01.0005	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Meratus								
3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan 2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	Indeks %	83,00 100,00	10,00 0,00	12 0	2.266.832.548,00	250.470.261,00	11,05
3.28.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Penatausahaan Keuangan	%	100,00	0,00	0	148.800.000,00	12.400.000,00	8,33
3.28.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	2,00	0,00	0	148.800.000,00	12.400.000,00	8,33
3.28.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian	%	100,00	0,00	0	34.659.100,00	0,00	0
3.28.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1,00	0,00	0	34.659.100,00	0,00	0
3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum	%	100,00	0,00	0	432.499.464,00	0,00	0
3.28.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	2,00	0,00	0	11.202.020,00	0,00	0
3.28.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	4,00	0,00	0	218.710.770,00	0,00	0

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan (Rp)	Persen (%)
3.28.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	2,00	0,00	0	4.396.674,00	0,00	0
3.28.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	2,00	0,00	0	198.190.000,00	0,00	0
X.XX.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Barang Milik Daerah yang Di adakan	%	100,00	0,00	0	319.387.070,00	0,00	0
X.XX.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	14,00	0,00	0	319.387.070,00	0,00	0
3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pelayanan Jasa Kantor	%	100,00	0,00	0	918.706.000,00	191.359.611,00	20,83
3.28.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	2,00	0,00	0	5.170.000,00	0,00	0
3.28.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12,00	3,00	25	160.016.000,00	14.509.611,00	9,07
3.28.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12,00	3,00	25	753.520.000,00	176.850.000,00	23,47
3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	%	100,00	0,00	0	412.780.914,00	46.710.650,00	11,32
3.28.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	45,00	0,00	0	307.330.914,00	41.623.150,00	13,54
3.28.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	45,00	0,00	0	30.450.000,00	5.087.500,00	16,71
3.28.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2,00	0,00	0	75.000.000,00	0,00	0
3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	2). Presentase Luas kerusakan kawasan hutan	%	1,00	0,00	0			0
		1). Presentase Luas Lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat direhabilitasi	%	0,71	0,00	0	9.618.099.991,00	0,00	0
3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Tata Hutan yang disusun	Dokumen	1,00	0,00	0	1.487.255.332,00	0,00	0
3.28.03.1.01.0006	Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah sarana prasarana operasionalisasi KPH yang terpelihara	Unit	7,00	0,00	0	1.487.255.332,00	0,00	0
3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	Dokumen	1,00	0,00	0	250.000.000,00	0,00	0
3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	Dokumen	1,00	0,00	0	250.000.000,00	0,00	0
3.28.03.1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Luas Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	Ha	5,15	0,00	0	807.512.000,00	0,00	0
3.28.03.1.03.0001	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	Dokumen	2,00	0,00	0	599.983.800,00	0,00	0
3.28.03.1.03.0013	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBBH Di Kawasan Hutan Produksi	Dokumen	2,00	0,00	0	207.528.200,00	0,00	0
3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara	Ha	50,00	0,00	0	6.220.245.058,00	0,00	0
3.28.03.1.04.0001	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	Dokumen	1,00	0,00	0	244.558.504,00	0,00	0
3.28.03.1.04.0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	Ha	260,00	0,00	0	5.975.686.554,00	0,00	0
3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kerusakan Kawasan Hutan	Ha	7,93	0,00	0	853.087.601,00	0,00	0
3.28.03.1.05.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Dokumen	2,00	0,00	0	132.640.000,00	0,00	0
3.28.03.1.05.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	Laporan	12,00	0,00	0	652.225.900,00	0,00	0
3.28.03.1.05.0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	Ha	24.449,00	0,00	0	68.221.701,00	0,00	0
3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	1). Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat	Ha	20,00	0,00	0			0
		2). Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	Kelompok	20,00	0,00	0	1.248.479.247,00	0,00	0
3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	Kelompok	7,00	0,00	0	1.248.479.247,00	0,00	0
3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	Kelompok	6,00	0,00	0	1.103.391.247,00	0,00	0
3.28.05.1.01.0006	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	Unit	2,00	0,00	0	72.904.724,00	0,00	0

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan (Rp)	Persen (%)
3.28.05.1.01.0008	Penyiapan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial	Hektar	50,00	0,00	0	72.183.276,00	0,00	0
3.28.0.00.0.00.01.0006	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo								
3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	Indeks	83,00	0,00	0			
		Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	%	100,00	0,00	0	3.301.694.350,00	0,00	0
3.28.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Penatausahaan Keuangan	%	100,00	30,00	30	144.000.000,00	0,00	0
3.28.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12,00	3,00	25	144.000.000,00		0
3.28.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian	%	100,00	0,00	0	154.844.000,00	0,00	0
3.28.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1,00	0,00	0	46.944.000,00		0
3.28.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	5,00	0,00	0	32.000.000,00		0
3.28.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	5,00	0,00	0	22.300.000,00		0
3.28.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	5,00	0,00	0	53.600.000,00		0
3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum	%	100,00	30,00	30	673.957.325,00	0,00	0
3.28.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1,00	0,00	0	62.429.964,00		0
3.28.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	4,00	0,00	0	73.657.670,00		0
3.28.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	4,00	0,00	0	107.799.128,00		0
3.28.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	3,00	0,00	0	48.490.563,00		0
3.28.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	12,00	3,00	25	1.980.000,00	0,00	0
3.28.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12,00	3,00	25	379.600.000,00		0
3.28.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Barang Milik Daerah yang Diadakan	%	100,00	0,00	0	506.572.115,00	0,00	0
3.28.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	6,00	0,00	0	129.121.422,00		0
3.28.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	20,00	0,00	0	377.450.693,00		0
3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pelayanan Jasa Kantor	%	100,00	30,00	30	698.769.600,00	0,00	0
3.28.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12,00	3,00	25	303.403.200,00	0,00	0
3.28.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12,00	3,00	25	395.366.400,00	0,00	0
3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	%	100,00	0,00	0	1.123.551.310,00	0,00	0
3.28.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	34,00	0,00	0	451.274.290,00		0
3.28.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	37,00	0,00	0	30.450.000,00		0
3.28.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1,00	0,00	0	641.827.020,00		0
3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	1). Presentase Luas Lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat direhabilitasi 2). Presentase Luas kerusakan kawasan hutan	%	0,71	0,00	0	7.999.240.652,00	0,00	0
3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Tata Hutan KPH yang disusun	Dokumen	1,00	0,00	0	200.000.000,00	0,00	0
3.28.03.1.01.0006	Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah sarana prasarana operasionalisasi KPH yang terpelihara	Unit	10,00	0,00	0	200.000.000,00		0
3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	Dokumen	1,00	0,00	0	249.213.502,00	0,00	0
3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	Dokumen	1,00	0,00	0	249.213.502,00		0
3.28.03.1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Luas Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	Hektar	5.153.407,00	0,00	0	375.225.900,00	0,00	0
3.28.03.1.03.0001	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	Dokumen	1,00	0,00	0	300.225.900,00		0

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan (Rp)	Persen (%)
3.28.03.1.03.0013	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBBH Di Kawasan Hutan Produksi	Dokumen	1,00	0,00	0	75.000.000,00		0
3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara	Hektar	50,00	0,00	0	6.122.801.250,00	0,00	0
3.28.03.1.04.0001	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	Dokumen	1,00	0,00	0	70.000.000,00		0
3.28.03.1.04.0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	Ha	200,00	5,00	2,5	6.052.801.250,00		0
3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas kerusakan kawasan hutan	<Hektar	25.000,00	0,00	0	1.052.000.000,00	0,00	0
3.28.03.1.05.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Dokumen	10,00	2,00	20	400.400.000,00	0,00	0
3.28.03.1.05.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	Laporan	12,00	3,00	25	551.600.000,00	0,00	0
3.28.03.1.05.0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	Ha	137,50	0,00	0	100.000.000,00		0
3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat	Hektar	20,00	0,00	0	2.330.561.030,00	0,00	0
3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	Kelompok	20,00	0,00	0	2.330.561.030,00	0,00	0
3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	Kelompok	6,00	0,00	0	2.330.561.030,00	0,00	0
3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	Kelompok	6,00	0,00	0	191.000.000,00		0
3.28.05.1.01.0006	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	Unit	5,00	0,00	0	1.848.561.030,00		0
3.28.05.1.01.0007	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan	Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya	Orang	9,00	0,00	0	100.000.000,00		0
3.28.05.1.01.0008	Penyiapan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial	Hektar	200,00	0,00	0	191.000.000,00		0
3.28.0.00.0.00.01.0007	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Santan								
3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	%	83,00	20,75	25	2.889.754.071,00	303.232.587,00	10,49
		2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	%	100,00	25,00	25			
3.28.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penatausahaan keuangan	%	100,00	25,00	25	154.200.000,00	12.850.000,00	8,33
3.28.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12,00	0,36	3	154.200.000,00	12.850.000,00	8,33
3.28.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian	%	100,00	25,00	25	125.668.000,00	0,00	0
3.28.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1,00	0,00	0	47.268.000,00	0,00	0
3.28.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	7,00	0,07	1	78.400.000,00	0,00	0
3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum	%	100,00	0,00	25	367.610.571,00	8.985.800,00	2,44
3.28.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1,00	0,00	0	11.059.920,00	0,00	0
3.28.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	3,00	0,00	0	179.673.280,00	0,00	0
3.28.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1,00	0,00	0	25.277.371,00	0,00	0
3.28.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12,00	0,24	2	151.600.000,00	8.985.800,00	5,93
3.28.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Di adakan	%	100,00	0,00	0	911.834.500,00	0,00	0
3.28.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	2,00	0,00	0	911.834.500,00	0,00	0
3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelayanan Jasa Kantor	%	100,00	0,00	0	940.556.000,00	220.834.905,00	23,48
3.28.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12,00	0,36	3	130.816.000,00	21.034.905,00	16,08
3.28.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12,00	0,36	3	809.740.000,00	199.800.000,00	24,67
3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Bai	%	100,00	0,00	0	389.885.000,00	60.561.882,00	15,53

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan (Rp)	Persen (%)
3.28.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	54,00	1,08	2	315.165.000,00	60.561.882,00	19,22
3.28.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	56,00	2,80	5	74.720.000,00	0,00	0
3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	1). Persentase Luas Lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat direhabilitasi 2). Presentase Luas kerusakan kawasan hutan	%	0,71	0,00	0	9.214.672.556,00	67.793.200,00	0,74
3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Tata Hutan yang disusun	Dokumen	1,00	0,00	0	326.128.371,00	0,00	0
3.28.03.1.01.0006	Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah sarana prasarana operasionalisasi KPH yang terpelihara	Unit	27,00	0,00	0	326.128.371,00	0,00	0
3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	Dokumen	1,00	0,00	0	187.782.819,00	0,00	0
3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	Dokumen	2,00	0,00	0	187.782.819,00	0,00	0
3.28.03.1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Luas Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	Ha	5,15	0,00	0	43.480.000,00	0,00	0
3.28.03.1.03.0013	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	Dokumen	1,00	0,00	0	43.480.000,00	0,00	0
3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara	Ha	613,00	0,00	0	6.893.456.944,00	37.622.000,00	0,55
3.28.03.1.04.0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	Ha	635,00	0,00	0	6.893.456.944,00	37.622.000,00	0,55
3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kerusakan Kawasan Hutan	Ha	7,93	0,00	0	1.763.824.422,00	30.171.200,00	1,71
3.28.03.1.05.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Dokumen	12,00	0,00	0	359.608.532,00	14.564.400,00	4,05
3.28.03.1.05.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penangulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	Laporan	12,00	0,00	3	1.254.781.480,00	15.606.800,00	1,81
3.28.03.1.05.0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	Ha	264.805,00	0,00	0	149.434.410,00	0,00	0
X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						17.643.298,00	8.985.800,00	50,93
X.XX.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1,00	0,00	0	17.643.298,00	0,00	0
3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	1). Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat 2). Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	Ha Kelompok	20,00	0,00	0	1.913.990.563,00	0,00	0
3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	Kelompok	1,00	0,00	0	1.913.990.563,00	0,00	0
3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	Kelompok	1,00	0,00	0	83.599.250,00	0,00	0
3.28.05.1.01.0006	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	Jumlah KUPS yang ditingkatkan kualitasnya	Unit	6,00	0,00	0	1.702.597.313,00	0,00	0
3.28.05.1.01.0008	Penyiapan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial	Hektar	500,00	0,00	0	127.794.000,00	0,00	0
3.28.0.00.0.00.01.0008	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Sub Das Belayan								
3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan 2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	Indeks %	83,00 100,00	20,00 0,00	24,1 0	3.217.415.424,00	391.982.355,00	12,18
3.28.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penatausahaan Keuangan	%	100,00	25,00	25	141.240.000,00	23.540.000,00	16,67
3.28.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12,00	3,00	25	141.240.000,00	23.540.000,00	16,67
3.28.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Pada SKPD yang telah Ditatausahakan	%	100,00	0,00	0	22.595.500,00	0,00	0
3.28.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	4,00	0,00	0	22.595.500,00	0,00	0
3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum	%	100,00	0,00	0	424.568.264,00	0,00	0
3.28.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	2,00	0,00	0	51.140.304,00	0,00	0
3.28.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	6,00	0,00	0	233.227.960,00	0,00	0
3.28.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12,00	0,00	0	140.200.000,00	0,00	0
3.28.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Di adakan	%	100,00	0,00	0	544.250.060,00	0,00	0

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan (Rp)	Persen (%)
3.28.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1,00	0,00	0	544.250.060,00	0,00	0
3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pelayanan Jasa Kantor	%	100,00	25,00	25	1.634.418.600,00	368.442.355,00	22,54
3.28.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12,00	3,00	25	216.978.600,00	25.422.355,00	11,72
3.28.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12,00	3,00	25	1.417.440.000,00	343.020.000,00	24,2
3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	%	100,00	0,00	0	450.343.000,00	0,00	0
3.28.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	46,00	0,00	0	367.147.000,00	0,00	0
3.28.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	70,00	0,00	0	83.196.000,00	0,00	0
3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Produksi hasil hutan bukan kayu	ton	900,00	474,35	52,71	5.122.698.299,00	0,00	0
		Produksi hasil hutan kayu	m3/tahun	4.445.000,00	1.059.546,70	23,84			
		Presentase Luas kerusakan kawasan hutan	%	1,00	0,00	200			
		Persentase Luas Lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat direhabilitasi	%	0,71	0,00	0			
3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Tata Hutan yang disusun	Dokumen	1,00	0,00	0	346.391.326,00	0,00	0
3.28.03.1.01.0006	Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah sarana prasarana operasionalisasi KPH yang terpelihara	Unit	3,00	0,00	0	225.391.326,00	0,00	0
3.28.03.1.01.0008	Pembangunan dan pengelolaan Sarana dan Prasarana KPH berbasis resor	Jumlah sarana dan prasarana operasionalisasi resor yang terbangun	Unit	5,00	0,00	0	121.000.000,00	0,00	0
3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	Dokumen	1,00	0,00	0	244.882.000,00	0,00	0
3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	Dokumen	2,00	0,00	0	244.882.000,00	0,00	0
3.28.03.1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Luas Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	Ha	5,15	0,00	0	561.512.794,00	0,00	0
3.28.03.1.03.0001	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	Dokumen	2,00	0,00	0	460.064.824,00	0,00	0
3.28.03.1.03.0013	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	Dokumen	5,00	0,00	0	101.447.970,00	0,00	0
3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara	Ha	50,00	0,00	0	2.921.068.144,00	0,00	0
3.28.03.1.04.0001	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	Dokumen	1,00	0,00	0	111.243.720,00	0,00	0
3.28.03.1.04.0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	Ha	58,00	0,00	0	2.809.824.424,00	0,00	0
3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kerusakan Kawasan Hutan	<Ha	25,00	0,00	0	1.048.844.035,00	0,00	0
3.28.03.1.05.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Dokumen	10,00	0,00	0	295.053.176,00	0,00	0
3.28.03.1.05.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penangulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	Laporan	12,00	0,00	0	753.790.859,00	0,00	0
3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	2). Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	Kelompok	20,00	0,00	0	2.146.245.007,00	0,00	0
		1). Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat	Ha	20,00	0,00	0			
3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	Kelompok	3,00	0,00	0	2.146.245.007,00	0,00	0
3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	Kelompok	3,00	0,00	0	414.707.864,00	0,00	0
3.28.05.1.01.0006	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	Unit	3,00	0,00	0	1.292.084.243,00	0,00	0
3.28.05.1.01.0007	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan	Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya	Orang	20,00	0,00	0	295.227.900,00	0,00	0
3.28.05.1.01.0008	Penyiapan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial	Hektar	2.000,00	0,00	0	144.225.000,00	0,00	0
3.28.0.00.0.00.01.0009	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bangalon								
3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2). Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti	%	100,00	0,00	0	4.289.201.770,00	105.661.833,00	2,46
		1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	%	83,00	0,00	0			
3.28.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Penatausahaan Keuangan	%	100,00	5,00	5	177.200.000,00	0,00	0

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan (Rp)	Persen (%)
3.28.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	4,00	2,00	50	139.200.000,00	0,00	0
3.28.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	4,00	0,00	0	38.000.000,00	0,00	0
3.28.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian	%	100,00	25,00	25	123.000.000,00	0,00	0
3.28.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	10,00	5,00	50	123.000.000,00	0,00	0
3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi umum	%	100,00	5,00	5	608.972.800,00	49.204.313,00	8,08
3.28.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5,00	0,00	0	117.916.329,00	0,00	0
3.28.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2,00	1,00	50	33.850.471,00	0,00	0
3.28.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12,00	6,00	50	457.206.000,00	49.204.313,00	10,96
3.28.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Di adakan	%	100,00	0,00	0	2.082.349.416,00	0,00	0
3.28.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	5,00	0,00	0	114.500.216,00	0,00	0
3.28.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1,00	0,00	0	1.967.849.200,00	0,00	0
3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelayanan Jasa Kantor	%	100,00	25,00	25	757.976.800,00	56.457.520,00	7,45
3.28.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12,00	6,00	50	215.980.000,00	0,00	0
3.28.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12,00	8,00	66,67	541.996.800,00	56.457.520,00	10,42
3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	%	100,00	0,00	0	539.702.754,00	0,00	0
3.28.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	36,00	12,00	33,33	459.552.754,00	0,00	0
3.28.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	77,00	14,00	18,18	80.150.000,00	0,00	0
3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu	Ton	900,00	474,35	52,71	5.209.900.449,00	10.615.200,00	0,2
		Produksi Hasil Hutan Kayu	m	4.445.000,00	1.059.546,70	23,84			
		Persentase Luas kerusakan kawasan hutan	%	1,00	0,00	0			
		Persentase Luas Lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat direhabilitasi	%	0,71	0,00	0			
3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Tata Hutan yang disusun	Dokumen	1,00	0,00	0	712.284.022,00	0,00	0
3.28.03.1.01.0006	Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah sarana prasarana operasionalisasi KPH yang terpelihara	Unit	5,00	0,00	0	712.284.022,00	0,00	0
3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah Dokumen Rencana Tata Hutan yang disusun	Dokumen	1,00	0,00	0	158.924.975,00	4.744.800,00	2,99
3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	Dokumen	1,00	1,00	100	158.924.975,00	4.744.800,00	2,99
3.28.03.1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Luas Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	Ha	5.153.407,00	0,00	0	127.465.000,00	5.870.400,00	4,61
3.28.03.1.03.0013	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	Dokumen	4,00	2,00	50	127.465.000,00	5.870.400,00	4,61
3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara	Ha	200,00	0,00	0	3.340.978.120,00	0,00	0
3.28.03.1.04.0001	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	Dokumen	1,00	0,00	0	58.320.000,00	0,00	0
3.28.03.1.04.0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	Ha	219,00	2,00	0,91	3.282.658.120,00	0,00	0
3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kerusakan Kawasan Hutan	<Ha	25,00	0,00	0	870.248.332,00	0,00	0
3.28.03.1.05.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Dokumen	2,00	2,00	100	69.120.000,00	0,00	0
3.28.03.1.05.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penganggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	Laporan	12,00	0,00	0	550.281.847,00	0,00	0

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan (Rp)	Persen (%)
3.28.03.1.05.0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	Ha	671,07	0,00	0	250.846.485,00	0,00	0
3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	1). Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat	Ha	20,00	0,00	0	735.231.381,00	6.881.200,00	0,94
		2). Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	Kelompok	20,00	0,00	0			
3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	Kelompok	4,00	0,00	0	735.231.381,00	6.881.200,00	0,94
3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	Kelompok	4,00	0,00	0	222.331.815,00	0,00	0
3.28.05.1.01.0004	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	Orang	2,00	0,00	0	52.640.000,00	0,00	0
3.28.05.1.01.0006	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	Unit	3,00	0,00	0	278.590.458,00	0,00	0
3.28.05.1.01.0008	Penyiapan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial	Hektar	100,00	0,00	0	181.669.108,00	6.881.200,00	3,79
3.28.0.00.0.00.01.0010	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Batu Ayau								
3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Keskretariatian	Indeks	83,00	10,00	12,05	4.388.007.360,00	297.525.813,00	6,78
		Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	%	100,00	0,00	10			
3.28.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Penatausahaan Keuangan	%	100,00	25,00	25	180.009.000,00	40.540.000,00	22,52
3.28.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12,00	3,00	25	152.160.000,00	40.540.000,00	26,64
3.28.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	2,00	0,00	0	9.828.000,00	0,00	0
3.28.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	12,00	0,00	0	18.021.000,00	0,00	0
3.28.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Presentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian	%	100,00	0,00	20	52.718.314,00	7.988.000,00	15,15
3.28.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	3,00	0,00	0	34.463.314,00	0,00	0
3.28.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	3,00	2,00	66,67	18.255.000,00	7.988.000,00	43,76
3.28.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian	%	100,00	0,00	0	101.375.000,00	0,00	0
3.28.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	14,00	0,00	0	38.600.000,00	0,00	0
3.28.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	4,00	0,00	0	36.675.000,00	0,00	0
3.28.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	4,00	0,00	0	26.100.000,00	0,00	0
3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pelayanan Jasa Kantor	%	100,00	18,00	18	286.985.060,00	45.772.228,00	15,95
3.28.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1,00	0,00	0	5.135.385,00	0,00	0
3.28.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	7,00	0,00	0	71.013.730,00	0,00	0
3.28.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	3,00	0,00	0	12.579.174,00	0,00	0
3.28.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	3,00	0,00	0	11.271.771,00	0,00	0
3.28.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	15,00	4,00	26,67	186.985.000,00	45.772.228,00	24,48
3.28.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Barang Milik Daerah Pada SKPD yang telah Ditatausahakan	%	100,00	0,00	0	1.441.708.101,00	0,00	0
3.28.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	7,00	0,00	0	144.487.020,00	0,00	0
3.28.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	16,00	0,00	0	1.297.221.081,00	0,00	0
3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pelayanan Jasa Kantor	%	100,00	12,00	12	1.371.994.216,00	195.655.424,00	14,26
3.28.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12,00	1,00	8,33	195.702.000,00	14.155.824,00	7,23
3.28.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12,00	2,00	16,67	1.176.292.216,00	181.499.600,00	15,43

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan (Rp)	Persen (%)
3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						953.217.669,00	7.570.161,00	0,79
X.XX.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	32,00	0,00	0	808.915.750,00	7.570.161,00	0,94
3.28.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	20,00	0,00	0	11.451.919,00	0,00	0
3.28.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	85,00	0,00	0	57.850.000,00	0,00	0
3.28.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1,00	0,00	0	75.000.000,00	0,00	0
3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Presentase Luas kerusakan kawasan hutan	%	1,00	0,00	0			
		Persentase Luas Lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat direhabilitasi	%	0,71	0,00	0	14.366.627.480,00	19.400.346,00	0,14
3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Tata Hutan yang disusun	Dokumen	1,00	0,00	0	3.312.365.291,00	0,00	0
3.28.03.1.01.0002	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lidung (KPHP/L) yang Telah Dilakukan Pembagian Blok	Unit	1,00	0,00	0	119.773.800,00	0,00	0
3.28.03.1.01.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Hutan	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Peruntukkan dan Fungsi Kawasan Hutan untuk Wilayah Provinsi	Dokumen	2,00	0,00	0	99.120.000,00	0,00	0
3.28.03.1.01.0008	Pembangunan dan pengelolaan Sarana dan Prasarana KPH berbasis resor	Jumlah sarana dan prasarana operasionalisasi resor yang terbangun	Unit	4,00	0,00	0	3.093.471.491,00	0,00	0
3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	Dokumen	1,00	0,00	0	137.202.400,00	8.360.346,00	6,09
3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	Dokumen	1,00	0,00	0	137.202.400,00	8.360.346,00	6,09
3.28.03.1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Luas Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	Hektar	5.153.407,00	0,00	0	686.786.796,00	0,00	0
3.28.03.1.03.0001	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	Dokumen	1,00	0,00	0	162.310.100,00	0,00	0
3.28.03.1.03.0002	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Mengenai Pemanfaatan Hutan di Kawasan HL Provinsi Secara Berkala	Dokumen	1,00	0,00	0	135.840.000,00	0,00	0
3.28.03.1.03.0013	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	Dokumen	9,00	0,00	0	388.636.696,00	0,00	0
3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara	Ha	170,00	0,00	0	9.406.941.329,00	0,00	0
3.28.03.1.04.0001	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	Dokumen	1,00	0,00	0	112.626.240,00	0,00	0
3.28.03.1.04.0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	Ha	224,00	0,00	0	9.157.035.089,00	0,00	0
3.28.03.1.04.0008	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Laporan	8,00	0,00	0	137.280.000,00	0,00	0
3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kerusakan Kawasan Hutan	<Ha	25,00	0,00	0	823.331.664,00	11.040.000,00	1,34
3.28.03.1.05.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Dokumen	10,00	1,00	10	185.950.000,00	11.040.000,00	6,87
3.28.03.1.05.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penangulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	Laporan	12,00	0,00	0	390.229.060,00	0,00	0
3.28.03.1.05.0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	Ha	111.283,00	0,00	0	247.152.604,00	0,00	0
3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	Kelompok	20,00	0,00	0	703.237.773,00	0,00	0
		Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat	Ha	20.000,00	0,00	0			
3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	Kelompok	4,00	0,00	0	703.237.773,00	0,00	0
3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	Kelompok	4,00	0,00	0	454.199.403,00	0,00	0
3.28.05.1.01.0006	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	Unit	2,00	0,00	0	68.380.000,00	0,00	0
3.28.05.1.01.0007	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan	Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya	Orang	8,00	0,00	0	110.600.000,00	0,00	0
3.28.05.1.01.0008	Penyiapan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial	Hektar	500,00	0,00	0	70.058.370,00	0,00	0

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan (Rp)	Persen (%)
3.28.0.00.0.00.01.0011	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Utara								
3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	Indeks	83,00	0,00	0			
		Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	%	100,00	0,00	0	2.107.170.609,00	92.400.000,00	4,39
3.28.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penatausahaan Keuangan	%	100,00	0,00	0	231.654.000,00	0,00	0
3.28.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12,00	0,00	0	152.160.000,00	0,00	0
3.28.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12,00	0,00	0	79.494.000,00	0,00	0
3.28.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Pada SKPD yang telah Ditatausahakan	%	100,00	0,00	0	47.462.000,00	0,00	0
3.28.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	4,00	0,00	0	47.462.000,00	0,00	0
3.28.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian	%	100,00	0,00	0	150.767.365,00	0,00	0
3.28.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	3,00	0,00	0	10.967.365,00	0,00	0
3.28.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	19,00	0,00	0	139.800.000,00	0,00	0
3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum	%	100,00	0,00	0	473.938.399,00	0,00	0
3.28.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1,00	0,00	0	35.759.083,00	0,00	0
3.28.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	2,00	0,00	0	106.985.882,00	0,00	0
3.28.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1,00	0,00	0	43.102.934,00	0,00	0
3.28.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2,00	0,00	0	50.997.500,00	0,00	0
3.28.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12,00	0,00	0	237.093.000,00	0,00	0
3.28.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Di adakan	%	100,00	0,00	0	212.370.445,00	0,00	0
3.28.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	6,00	0,00	0	84.843.958,00	0,00	0
3.28.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	33,00	0,00	0	127.526.487,00	0,00	0
3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelayanan Jasa Kantor	%	100,00	3,00	3	576.488.300,00	92.400.000,00	16,03
3.28.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12,00	0,00	0	8.030.000,00	0,00	0
3.28.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12,00	0,00	0	198.348.300,00	0,00	0
3.28.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12,00	3,00	25	370.110.000,00	92.400.000,00	24,97
3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	%	100,00	0,00	0	414.490.100,00	0,00	0
3.28.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	26,00	0,00	0	327.590.100,00	0,00	0
3.28.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	70,00	0,00	0	47.900.000,00	0,00	0
3.28.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1,00	0,00	0	39.000.000,00	0,00	0
3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase Luas Lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat direhabilitasi Persentase Luas kerusakan kawasan hutan	% %	0,71 1,00	0,00 0,00	0 0	7.010.557.918,00	28.507.748,00	0,41
3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Tata Hutan yang disusun	Dokumen	1,00	0,00	0	1.379.931.975,00	0,00	0
3.28.03.1.01.0008	Pembangunan dan pengelolaan Sarana dan Prasarana KPH berbasis resor terbangun	Jumlah sarana dan prasarana operasionalisasi resor yang terbangun	Unit	3,00	0,00	0	1.379.931.975,00	0,00	0
3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	Dokumen	1,00	0,00	0	98.612.000,00	0,00	0
3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	Dokumen	1,00	0,00	0	98.612.000,00	0,00	0
3.28.03.1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Luas Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	M	#####	0,00	0	150.746.900,00	0,00	0
3.28.03.1.03.0001	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	Dokumen	1,00	0,00	0	101.106.900,00	0,00	0

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan (Rp)	Persen (%)
3.28.03.1.03.0013	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBBH Di Kawasan Hutan Produksi	Dokumen	7,00	0,00	0	49.640.000,00	0,00	0
3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara	Ha	175,00	15,00	8,57	4.021.098.889,00	28.507.748,00	0,71
3.28.03.1.04.0001	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	Dokumen	1,00	0,00	0	45.248.246,00	0,00	0
3.28.03.1.04.0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	Ha	175,00	15,00	8,57	3.975.850.643,00	28.507.748,00	0,72
3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kerusakan Kawasan Hutan	Ha	7.929.179,00	0,00	0	1.360.168.154,00	0,00	0
3.28.03.1.05.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Dokumen	12,00	0,00	0	149.989.794,00	0,00	0
3.28.03.1.05.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	Laporan	12,00	0,00	0	768.477.670,00	0,00	0
3.28.03.1.05.0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	Ha	44.126,00	0,00	0	441.700.690,00	0,00	0
3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	Kelompok	20,00	0,00	0	1.015.494.675,00	0,00	0
3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat	Ha	20.000,00	0,00	0			
3.28.05.1.01.0001	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	Kelompok	3,00	0,00	0	1.015.494.675,00	0,00	0
3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	Kelompok	3,00	0,00	0	348.024.759,00	0,00	0
3.28.05.1.01.0004	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	Orang	6,00	0,00	0	43.920.000,00	0,00	0
3.28.05.1.01.0006	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	Unit	4,00	0,00	0	374.999.148,00	0,00	0
3.28.05.1.01.0008	Penyiapan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial	Hektar	600,00	0,00	0	248.550.768,00	0,00	0
3.28.0.00.0.00.01.0012	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Tengah								
3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	%	100,00	25,00	25	2.636.294.694,00	306.178.570,00	11,61
		Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	Indeks	83,00	83,00	100			
3.28.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penatausahaan Keuangan	%	100,00	25,00	25	198.920.000,00	51.765.137,00	26,02
3.28.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12,00	3,00	25	129.480.000,00	31.690.000,00	24,47
3.28.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12,00	0,00	0	69.440.000,00	20.075.137,00	28,91
		Persentase Administrasi Barang Milik Daerah	%	100,00	0,00	0			
3.28.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Pada SKPD yang telah Ditatausahakan	%	100,00	0,00	0	44.240.000,00	4.348.100,00	9,83
3.28.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	4,00	0,00	0	44.240.000,00	4.348.100,00	9,83
3.28.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian	%	100,00	0,00	0	156.900.698,00	0,00	0
3.28.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	2,00	0,00	0	65.140.698,00	0,00	0
3.28.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	6,00	0,00	0	91.760.000,00	0,00	0
3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum	%	100,00	25,00	25	218.609.856,00	71.842.657,00	32,86
3.28.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5,00	5,00	100	57.737.856,00	44.558.000,00	83,82
3.28.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12,00	3,00	25	160.872.000,00	27.284.657,00	16,96
3.28.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Di adakan	%	100,00	0,00	0	411.376.718,00	0,00	0
3.28.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	1,00	0,00	0	154.545.960,00	0,00	0
3.28.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	11,00	0,00	0	256.830.758,00	0,00	0
3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelayanan Jasa Kantor	%	100,00	25,00	25	813.277.320,00	129.927.676,00	15,98
3.28.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12,00	0,00	0	12.219.120,00	0,00	0
3.28.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12,00	2,00	16,67	108.681.000,00	17.051.676,00	15,69

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan (Rp)	Persen (%)
3.28.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12,00	2,00	16,67	692.377.200,00	112.876.000,00	16,3
3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	%	100,00	25,00	25	792.970.102,00	48.295.000,00	6,09
3.28.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	22,00	0,00	0	257.062.000,00	0,00	0
3.28.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	3,00	1,00	33,33	535.908.102,00	48.295.000,00	9,01
3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase Luas kerusakan kawasan hutan	%	1,00	0,00	0	7.386.562.631,00	188.209.370,00	2,55
		Persentase Luas Lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat direhabilitasi	%	0,71	0,00	0			
3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Tata Hutan yang disusun	Dokumen	1,00	0,00	0	1.289.534.415,00	0,00	0
3.28.03.1.01.0006	Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah sarana prasarana operasionalisasi KPH yang terpelihara	Unit	1,00	0,00	0	1.289.534.415,00	0,00	0
3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	Dokumen	1,00	0,00	0	337.312.573,00	5.020.000,00	1,49
3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	Dokumen	1,00	0,00	0	337.312.573,00	5.020.000,00	1,49
3.28.03.1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Luas Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	Ha	5.153.407,00	0,00	0	243.709.715,00	65.270.513,00	26,78
3.28.03.1.03.0001	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	Dokumen	1,00	0,00	0	139.807.127,00	14.438.513,00	10,33
3.28.03.1.03.0013	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	Dokumen	1,00	0,00	0	103.902.588,00	50.832.000,00	48,92
3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara	Ha	170,00	0,00	0	3.856.291.120,00	23.669.600,00	0,61
3.28.03.1.04.0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	Ha	180,00	0,00	0	3.856.291.120,00	23.669.600,00	0,62
3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kerusakan Kawasan Hutan	Ha	7.929.179,00	0,00	0	1.659.714.808,00	94.249.257,00	5,68
3.28.03.1.05.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Dokumen	12,00	0,00	0	611.108.988,00	44.704.499,00	8,35
3.28.03.1.05.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	Laporan	12,00	0,00	0	925.987.092,00	33.044.758,00	4,05
3.28.03.1.05.0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	Ha	84.151,70	0,00	0	122.618.728,00	16.500.000,00	13,46
3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat	Ha	20,00	0,00	0	1.212.254.319,00	32.897.154,00	2,71
		Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	Kelompok	20,00	0,00	0			
3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	Kelompok	4,00	0,00	0	1.212.254.319,00	32.897.154,00	2,71
3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	Kelompok	3,00	0,00	0	612.692.639,00	10.890.000,00	1,95
3.28.05.1.01.0006	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	Unit	5,00	0,00	0	471.491.680,00	14.142.154,00	3,2
3.28.05.1.01.0008	Penyiapan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial	Hektar	100,00	0,00	0	128.070.000,00	7.865.000,00	6,14
3.28.0.00.0.00.01.0013	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Pantai								
3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	%	100,00	8,38	8,38	2.512.060.191,00	210.564.826,00	8,38
		Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	Indeks	83,00	14,00	16,87			
3.28.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penatausahaan Keuangan	%	100,00	16,67	17	124.800.000,00	20.800.000,00	16,67
3.28.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12,00	0,00	25	124.800.000,00	20.800.000,00	16,67
3.28.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian	%	100,00	0,00	0	57.888.000,00	0,00	0
3.28.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	2,00	0,00	0	29.088.000,00	0,00	0
3.28.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	4,00	0,00	0	28.800.000,00	0,00	0
3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum	%	100,00	20,11	20	330.276.235,00	47.830.466,00	14,48

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan (Rp)	Persen (%)
3.28.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	5,00	0,00	0	18.594.467,00	0,00	0
3.28.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12,00	1,00	8,33	49.951.768,00	1.135.992,00	2,27
3.28.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12,00	0,00	25	261.730.000,00	46.694.474,00	17,84
3.28.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Barang Milik Daerah yang Di adakan	%	100,00	0,00	0	1.040.695.798,00	0,00	0
3.28.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	5,00	0,00	0	58.335.960,00	0,00	0
3.28.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	14,00	0,00	0	172.904.838,00	0,00	0
3.28.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	3,00	0,00	0	809.455.000,00	0,00	0
3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pelayanan Jasa Kantor	%	100,00	0,00	0	714.448.500,00	134.281.560,00	18,8
3.28.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12,00	0,00	0	6.950.000,00	0,00	0
3.28.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12,00	0,00	25	123.425.000,00	15.389.560,00	12,47
3.28.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	8,00	0,00	25	22.740.000,00	1.700.000,00	7,48
3.28.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12,00	0,00	25	561.333.500,00	117.192.000,00	20,88
3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	%	100,00	3,14	3	243.951.658,00	7.652.800,00	3,14
3.28.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	20,00	0,00	20	194.955.658,00	7.652.800,00	3,93
3.28.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1,00	0,00	0	48.996.000,00	0,00	0
3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Presentase Luas kerusakan kawasan hutan	%	1,00	0,00	0	6.806.609.312,00	205.422.969,00	3,02
		Persentase Luas Lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat direhabilitasi	%	0,71	0,00	0			
		Produksi Hasil Hutan Kayu	m3	#####	0,00	0			
		Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu	ton	47.435,00	0,00	0			
3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Tata Hutan yang disusun	dokumen	1,00	0,02	2	1.343.866.200,00	20.775.769,00	1,55
3.28.03.1.01.0008	Pembangunan dan pengelolaan Sarana dan Prasarana KPH berbasis resor	Jumlah sarana dan prasarana operasionalisasi resor yang terbangun	Unit	2,00	0,00	0	1.343.866.200,00	20.775.769,00	1,55
3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	Dokumen	1,00	1,00	100	247.186.320,00	10.872.200,00	4,4
3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	Dokumen	1,00	1,00	100	247.186.320,00	10.872.200,00	4,4
3.28.03.1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Luas Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	Ha	5.153.407,00	0,00	0	198.700.000,00	0,00	0
3.28.03.1.03.0001	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	Dokumen	1,00	0,00	0	144.600.000,00	0,00	0
3.28.03.1.03.0013	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPB Di Kawasan Hutan Produksi	Dokumen	6,00	0,00	0	54.100.000,00	0,00	0
3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara	Ha	138,00	0,00	0	3.597.495.600,00	68.605.000,00	1,91
3.28.03.1.04.0001	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	Dokumen	1,00	0,00	0	76.950.000,00	34.215.000,00	44,46
3.28.03.1.04.0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	Ha	156,00	0,00	0	3.520.545.600,00	34.390.000,00	0,98
3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kerusakan Kawasan Hutan	Ha	20.000,00	606,00	3	1.419.361.192,00	105.170.000,00	7,41
3.28.03.1.05.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Dokumen	12,00	0,00	25	735.710.400,00	105.170.000,00	19,24
3.28.03.1.05.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	Laporan	12,00	0,00	0	598.700.400,00	0,00	0
3.28.03.1.05.0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	Ha	20.000,00	0,00	0	84.950.392,00	0,00	0
3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat	Ha	20.000,00	0,00	2	2.432.300.171,00	44.338.832,00	1,82
		Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	Kelompok	20,00	0,00	10			

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan (Rp)	Persen (%)
3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	Kelompok	6,00	1,00	17	2.432.300.171,00	44.338.832,00	1,82
3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	Kelompok	3,00	0,00	0	101.280.000,00	11.280.000,00	11,14
3.28.05.1.01.0004	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	Orang	4,00	0,00	0	81.779.943,00	7.668.832,00	9,38
3.28.05.1.01.0006	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	Jumlah KUPS yang ditingkatkan kualitasnya	Unit	6,00	0,00	1,17	2.249.240.228,00	25.390.000,00	1,13
3.28.0.00.0.00.01.0014	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Manubar								
3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	%	100,00	25,00	25	2.106.153.928,00	107.023.500,00	5,08
		1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	%	83,00	20,75	25			
3.28.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penatausahaan Keuangan	%	100,00	16,67	16,67	139.200.000,00	16.560.000,00	11,9
3.28.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12,00	2,00	16,67	139.200.000,00	16.560.000,00	11,9
3.28.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian	%	100,00	0,00	0	80.076.000,00	0,00	0
3.28.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1,00	0,00	0	41.076.000,00	0,00	0
3.28.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	12,00	0,00	0	39.000.000,00	0,00	0
3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum	%	100,00	0,00	0	497.034.314,00	0,00	0
3.28.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	2,00	0,00	0	50.956.471,00	0,00	0
3.28.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	4,00	0,00	0	94.079.361,00	0,00	0
3.28.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	3,00	0,00	0	12.453.974,00	0,00	0
3.28.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2,00	0,00	0	7.474.920,00	0,00	0
3.28.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	4,00	0,00	0	14.469.588,00	0,00	0
3.28.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12,00	0,00	0	317.600.000,00	0,00	0
3.28.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Di adakan	%	100,00	0,00	0	446.511.414,00	0,00	0
3.28.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	2,00	0,00	0	152.436.402,00	0,00	0
3.28.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	35,00	0,00	0	294.075.012,00	0,00	0
3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelayanan Jasa Kantor	%	100,00	16,67	16,67	625.567.200,00	90.463.500,00	14,46
3.28.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12,00	1,00	8,33	151.320.000,00	11.663.500,00	7,71
3.28.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12,00	2,00	16,67	474.247.200,00	78.800.000,00	16,62
3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	%	100,00	0,00	0	317.765.000,00	0,00	0
3.28.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	36,00	0,00	0	269.715.000,00	0,00	0
3.28.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	82,00	0,00	0	48.050.000,00	0,00	0
3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	2). Persentase Luas Kerusakan Kawasan Hutan	%	1,00	0,00	200	6.807.355.057,00	0,00	0
		1). Persentase Luas Lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat direhabilitasi	%	0,71	0,00	0			
3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Tata Hutan yang disusun	Dokumen	1,00	0,00	0	1.016.319.020,00	0,00	0
3.28.03.1.01.0006	Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah sarana prasarana operasionalisasi KPH yang terpelihara	Unit	2,00	0,00	0	47.200.000,00	0,00	0
3.28.03.1.01.0008	Pembangunan dan pengelolaan Sarana dan Prasarana KPH berbasis resor	Jumlah sarana dan prasarana operasionalisasi resor yang terbangun	Unit	4,00	0,00	0	969.119.020,00	0,00	0
3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	Dokumen	1,00	0,00	0	310.741.834,00	0,00	0
3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	Dokumen	2,00	0,00	0	310.741.834,00	0,00	0
3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara	Ha	187,00	0,00	0	4.353.768.716,00	0,00	0

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan (Rp)	Persen (%)
3.28.03.1.04.0001	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	Dokumen	1,00	0,00	0	152.319.304,00	0,00	0
3.28.03.1.04.0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	Ha	187,00	0,00	0	4.201.449.412,00	0,00	0
3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kerusakan Kawasan Hutan	Ha	7,93	0,00	0	1.126.525.487,00	0,00	0
3.28.03.1.05.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Dokumen	4,00	0,00	0	415.194.346,00	0,00	0
3.28.03.1.05.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penangulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	Laporan	12,00	0,00	0	711.331.141,00	0,00	0
3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	2). Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	Kelompok	20,00	0,00	0	1.451.317.151,00	0,00	0
3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	1). Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat	Ha	20,00	0,00	0			
3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	Kelompok	4,00	0,00	0	1.451.317.151,00	0,00	0
3.28.05.1.01.0006	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	Kelompok	4,00	0,00	0	709.372.559,00	0,00	0
3.28.05.1.01.0008	Penyiapan Perhutanan Sosial	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	Unit	1,00	0,00	0	649.172.321,00	0,00	0
3.28.00.0.00.01.0015	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kelinjau	Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial	Hektar	30,00	0,00	0	92.772.271,00	0,00	0
3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	%	83,00	0,00	0			
3.28.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	%	100,00	0,00	0	2.391.212.959,00	133.455.280,00	5,58
3.28.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Presentase Penatausahaan Keuangan	%	100,00	16,00	16	148.800.000,00	23.440.000,00	15,75
3.28.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	1,00	0,00	0	148.800.000,00	23.440.000,00	15,75
3.28.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Presentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian	%	100,00	0,00	0	178.140.000,00	0,00	0
3.28.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	3,00	0,00	0	102.150.000,00	0,00	0
3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	1,00	0,00	0	75.990.000,00	0,00	0
3.28.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum	%	100,00	0,00	0	364.971.440,00	0,00	0
3.28.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	11,00	0,00	0	176.520.763,00	0,00	0
3.28.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1,00	0,00	0	18.818.677,00	0,00	0
3.28.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	2,00	0,00	0	169.632.000,00	0,00	0
3.28.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	Presentase Barang Milik Daerah yang Di adakan	%	100,00	0,00	0	680.646.095,00	0,00	0
3.28.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	3,00	0,00	0	35.050.077,00	0,00	0
3.28.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	26,00	0,00	0	645.596.018,00	0,00	0
3.28.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Presentase Pelayanan Jasa Kantor	%	100,00	25,00	25	671.945.600,00	104.942.700,00	15,62
3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12,00	3,00	25	239.848.000,00	36.352.700,00	15,16
3.28.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12,00	3,00	25	432.097.600,00	68.590.000,00	15,87
3.28.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Presentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	%	100,00	2,00	2	346.709.824,00	5.072.580,00	1,46
3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	34,00	1,00	3	316.029.824,00	5.072.580,00	1,61
3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	54,00	0,00	0	30.680.000,00	0,00	0
3.28.03.1.01.0008	Pembangunan dan pengelolaan Sarana dan Prasarana KPH berbasis resor	2). Presentase Luas kerusakan kawasan hutan	%	1,00	0,00	0			
		1). Presentase Luas Lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat direhabilitasi	%	0,71	0,00	0	7.642.843.668,00	0,00	0
		Jumlah Dokumen Rencana Tata Hutanyang disusun	Dokumen	1,00	0,00	0	1.719.714.960,00	0,00	0
		Jumlah sarana dan prasarana operasionalisasi resor yang terbangun	Unit	6,00	0,00	0	1.719.714.960,00	0,00	0

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan (Rp)	Persen (%)
3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	Dokumen	1,00	0,00	0	250.963.176,00	0,00	0
3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	Dokumen	1,00	0,00	0	250.963.176,00	0,00	0
3.28.03.1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Luas Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	Ha	5.153.407,00	0,00	0	185.580.000,00	0,00	0
3.28.03.1.03.0013	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	Dokumen	1,00	0,00	0	185.580.000,00	0,00	0
3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara	Ha	385,00	0,00	0	4.698.197.320,00	0,00	0
3.28.03.1.04.0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	Ha	345,00	0,00	0	4.698.197.320,00	0,00	0
3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kerusakan Kawasan Hutan	Ha	7.929.179,00	0,00	200	725.128.212,00	0,00	0
3.28.03.1.05.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Dokumen	1,00	0,00	0	189.441.640,00	0,00	0
3.28.03.1.05.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	Laporan	12,00	0,00	0	409.204.408,00	0,00	0
3.28.03.1.05.0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	Ha	2.000,00	0,00	0	126.482.164,00	0,00	0
3.28.03.1.07	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Jumlah hasil izin usaha industri primer hasil hutan kayu dengan kapasitas izin 6.000m3 per tahun yang aktif	M3	4.500,00	0,00	0	63.260.000,00	0,00	0
3.28.03.1.07.0004	Pembinaan dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi	Laporan Kegiatan pelaksanaan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk skala usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi	Laporan	2,00	0,00	0	63.260.000,00	0,00	0
3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	2). Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	Kelompok	20,00	0,00	0	1.445.967.373,00	0,00	0
		1). Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat	Ha	20,00	0,00	0			
3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	Kelompok	3,00	0,00	0	1.445.967.373,00	0,00	0
3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	Kelompok	3,00	0,00	0	230.914.287,00	0,00	0
3.28.05.1.01.0006	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	Unit	2,00	0,00	0	975.906.870,00	0,00	0
3.28.05.1.01.0007	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan	Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya	Orang	3,00	0,00	0	148.240.122,00	0,00	0
3.28.05.1.01.0008	Penyiapan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial	Hektar	100,00	0,00	0	90.906.094,00	0,00	0
3.28.0.00.0.00.01.0016	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Delta Mahakam								
3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	%	83,00	0,00	0	1.963.278.868,00	205.251.857,00	10,45
		2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	%	100,00	0,00	0			
3.28.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penatausahaan Keuangan	%	100,00	0,00	0	243.800.000,00	4.680.000,00	1,92
3.28.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12,00	0,00	0	148.800.000,00	0,00	0
3.28.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	12,00	3,00	25	95.000.000,00	4.680.000,00	4,93
3.28.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Pada SKPD yang telah Ditatausahakan	%	100,00	0,00	0	57.600.000,00	0,00	0
3.28.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	4,00	0,00	0	57.600.000,00	0,00	0
3.28.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian	%	100,00	0,00	0	70.000.000,00	0,00	0
3.28.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	1,00	0,00	0	70.000.000,00	0,00	0
3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum	%	100,00	0,00	0	288.438.896,00	0,00	0
3.28.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1,00	0,00	0	28.353.600,00	0,00	0
3.28.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	3,00	0,00	0	67.231.718,00	0,00	0
3.28.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	4,00	0,00	0	18.962.000,00	0,00	0

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan (Rp)	Persen (%)
3.28.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12,00	0,00	0	173.891.578,00	0,00	0
3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelayanan Jasa Kantor	%	100,00	0,00	0	900.876.090,00	200.571.857,00	22,26
3.28.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12,00	3,00	25	204.158.490,00	29.271.857,00	14,34
3.28.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12,00	3,00	25	696.717.600,00	171.300.000,00	24,59
3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	%	100,00	0,00	0	402.563.882,00	0,00	0
3.28.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	17,00	0,00	0	153.198.968,00	0,00	0
3.28.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	70,00	0,00	0	51.764.914,00	0,00	0
3.28.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1,00	0,00	0	197.600.000,00	0,00	0
3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	1). Persentase Luas Lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat direhabilitasi 2). Presentase Luas kerusakan kawasan hutan	%	0,71	0,00	0	5.499.090.282,00	0,00	0
3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Tata Hutan yang disusun	Dokumen	1,00	0,00	0	806.754.050,00	0,00	0
3.28.03.1.01.0006	Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah sarana prasarana operasionalisasi KPH yang terpelihara	Unit	11,00	0,00	0	806.754.050,00	0,00	0
3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	Dokumen	1,00	0,00	0	270.800.000,00	0,00	0
3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	Dokumen	2,00	0,00	0	270.800.000,00	0,00	0
3.28.03.1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Luas Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	Hektar	5,15	0,00	0	78.000.000,00	0,00	0
3.28.03.1.03.0013	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	Dokumen	3,00	0,00	0	78.000.000,00	0,00	0
3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara	Hektar	50,00	0,00	0	3.179.486.232,00	0,00	0
3.28.03.1.04.0001	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	DokumenDokumen	1,00	0,00	0	95.286.232,00	0,00	0
3.28.03.1.04.0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	Ha	225,00	0,00	0	1.505.942.600,00	0,00	0
3.28.03.1.04.0009	Rehabilitasi Mangrove di luar kawasan hutan	Luas Area Mangrove Di Luar Kawasan Hutan yang Direhabilitasi	Ha	100,00	0,00	0	1.578.257.400,00	0,00	0
3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kerusakan Kawasan Hutan	Hektar	7,93	0,00	0	1.164.050.000,00	0,00	0
3.28.03.1.05.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	LaporanDokumen	12,00	0,00	0	328.800.000,00	0,00	0
3.28.03.1.05.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penangulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	Laporan	12,00	0,00	0	751.250.000,00	0,00	0
3.28.03.1.05.0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	0	Laporan	10,00	0,00	0	84.000.000,00	0,00	0
3.28.04	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Luas Kawasan Bernilai Ekosistem Penting dan Konservasi Provinsi yang dikelola	Hektar	730,01	0,00	0	70.800.000,00	0,00	0
3.28.04.1.03	Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	Luas KBEP yang dikelola	Hektar	1,00	0,00	0	70.800.000,00	0,00	0
3.28.04.1.03.0004	Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem Lahan Basah	Luas Kerusakan Lahan Basah yang Tertangani	Ha	50,00	0,00	0	70.800.000,00	0,00	0
3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	1). Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat 2). Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	Hektar Kelompok	20,00 20,00	0,00 0,00	0 0	4.142.759.300,00	0,00	0
3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	Dokumen	1,00	0,00	0	4.142.759.300,00	0,00	0
3.28.05.1.01.0006	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	Unit	9,00	0,00	0	3.645.143.300,00	0,00	0
3.28.05.1.01.0007	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan	Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya	Orang	20,00	0,00	0	287.000.000,00	0,00	0
3.28.05.1.01.0008	Penyiapan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial	Hektar	500,00	0,00	0	210.616.000,00	0,00	0
3.28.0.00.0.00.01.0017	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Damai								
3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti 1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	% Indeks	100,00 83,00	0,00 0,00	0 0	4.178.413.111,00	285.301.007,00	6,83

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan (Rp)	Persen (%)
3.28.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Penatausahaan Keuangan	%	100,00	16,00	16	148.800.000,00	22.580.000,00	15,17
3.28.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12,00	2,00	16,67	148.800.000,00	22.580.000,00	15,17
3.28.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian	%	100,00	0,00	0	342.800.000,00	0,00	0
3.28.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1,00	0,00	0	52.000.000,00	0,00	0
3.28.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	20,00	0,00	0	290.800.000,00	0,00	0
3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum	%	100,00	5,00	5	878.358.441,00	41.064.071,00	4,68
3.28.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	4,00	4,00	100	7.316.897,00	7.260.000,00	99,22
3.28.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	8,00	2,00	25	261.002.061,00	11.021.551,00	4,22
3.28.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	3,00	1,00	33	26.702.595,00	9.782.520,00	36,64
3.28.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	4,00	0,00	0	55.052.500,00	0,00	0
3.28.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12,00	1,00	8,33	528.284.388,00	13.000.000,00	2,46
3.28.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Barang Milik Daerah yang Di adakan	%	100,00	0,00	0	1.525.094.400,00	0,00	0
3.28.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	7,00	0,00	0	1.525.094.400,00	0,00	0
3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pelayanan Jasa Kantor	%	100,00	25,00	25	668.683.200,00	152.782.688,00	22,85
3.28.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12,00	3,00	25	95.784.000,00	9.572.888,00	9,99
3.28.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12,00	3,00	25	572.899.200,00	143.209.800,00	25
3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	%	100,00	0,00	0	614.677.070,00	68.874.248,00	11,2
3.28.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	24,00	3,00	13	614.677.070,00	68.874.248,00	11,2
3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	1). Presentase Luas Lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat direhabilitasi 2). Presentase Luas kerusakan kawasan hutan	%	0,71	0,00	0	7.477.329.356,00	300.000,00	0
3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Tata Hutan yang disusun	dokumen	1,00	0,00	0	2.226.602.016,00	300.000,00	0,01
3.28.03.1.01.0002	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lindung (KPHP/L) yang Telah Dilakukan Pembagian Blok	Unit	3,00	0,00	0	138.413.494,00	0,00	0
3.28.03.1.01.0006	Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah sarana prasarana operasionalisasi KPH yang terpelihara	Unit	85,00	1,00	1	326.363.522,00	300.000,00	0,09
3.28.03.1.01.0008	Pembangunan dan pengelolaan Sarana dan Prasarana KPH berbasis resor	Jumlah sarana dan prasarana operasionalisasi resor yang terbangun	Unit	1,00	0,00	0	1.761.825.000,00	0,00	0
3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	dokumen	1,00	0,00	0	268.999.794,00	0,00	0
3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	Dokumen	1,00	0,00	0	268.999.794,00	0,00	0
3.28.03.1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Luas Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	Hektar	5.153.407,00	0,00	0	451.236.340,00	0,00	0
3.28.03.1.03.0002	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Mengenai Pemanfaatan Hutan di Kawasan HL Provinsi Secara Berkala	Dokumen	1,00	0,00	0	219.540.200,00	0,00	0
3.28.03.1.03.0013	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBBH Di Kawasan Hutan Produksi	Dokumen	8,00	0,00	0	231.696.140,00	0,00	0
3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara	Hektar	160,00	0,00	0	2.822.097.206,00	0,00	0
3.28.03.1.04.0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	Ha	170,00	0,00	0	2.670.894.912,00	0,00	0
3.28.03.1.04.0008	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Laporan	1,00	0,00	0	151.202.294,00	0,00	0

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan (Rp)	Persen (%)
3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kerusakan Kawasan Hutan	<Hektar	25.000,00	0,00	0	1.708.394.000,00	0,00	0
3.28.03.1.05.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Dokumen	12,00	0,00	0	716.933.000,00	0,00	0
3.28.03.1.05.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	Laporan	12,00	0,00	0	848.800.000,00	0,00	0
3.28.03.1.05.0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	Ha	123.793,00	0,00	0	142.661.000,00	0,00	0
3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	2). Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	Unit	6,00	0,00	0	1.456.024.507,00	184.000.000,00	12,64
		1). Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat	Hektar	20.000,00	0,00	0			
3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	kelompok	4,00	0,00	0	1.456.024.507,00	184.000.000,00	12,64
3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	Kelompok	5,00	0,00	0	134.652.507,00	0,00	0
3.28.05.1.01.0006	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	Unit	6,00	0,00	0	1.076.890.000,00	0,00	0
3.28.05.1.01.0007	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan	Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya	Orang	20,00	20,00	100	244.482.000,00	184.000.000,00	75,26
3.28.0.00.0.00.01.0018	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Mook Manor Bulatn								
3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	Indeks	83,00	2,82	3	2.461.051.684,00	265.644.450,00	10,79
		Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	%	100,00	10,83	11			
3.28.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Penatausahaan Keuangan	%	100,00	0,00	0	330.800.000,00	63.740.000,00	19,27
3.28.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12,00	3,11	26	139.200.000,00	34.920.000,00	25,09
3.28.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12,00	1,80	15	191.600.000,00	28.820.000,00	15,04
3.28.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Presentase Barang Milik Daerah Pada SKPD yang telah Ditatausahakan	%	100,00	13,00	13	80.000.000,00	10.640.000,00	13,3
		Presentase Barang Milik Daerah Pada SKPD yang telah Ditatausahakan	%	100,00	13,00	13			
3.28.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	4,00	0,52	13	80.000.000,00	10.640.000,00	13,3
3.28.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian	%	100,00	5,33	5	204.984.000,00	10.932.000,00	5,33
3.28.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1,00	0,00	0	42.624.000,00	0,00	0
3.28.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	1,00	0,22	22	51.960.000,00	10.932.000,00	21,04
3.28.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	12,00	0,00	0	110.400.000,00	0,00	0
3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum	%	100,00	13,05	13	494.126.924,00	63.482.440,00	12,85
3.28.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	2,00	0,00	0	83.190.481,00	0,00	0
3.28.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	5,00	0,00	0	100.321.500,00	0,00	0
3.28.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1,00	0,00	0	5.574.943,00	0,00	0
3.28.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12,00	2,52	21	305.040.000,00	63.482.440,00	20,81
3.28.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Barang Milik Daerah yang Di adakan	%	100,00	0,00	0	446.583.000,00	0,00	0
3.28.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1,00	0,00	0	446.583.000,00	0,00	0
3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pelayanan Jasa Kantor	%	100,00	18,43	18	455.894.800,00	84.018.760,00	18,43
3.28.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12,00	3,00	25	97.832.800,00	24.348.760,00	24,89
3.28.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12,00	2,04	17	358.062.000,00	59.670.000,00	16,66
3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	%	100,00	7,32	7	448.662.960,00	32.831.250,00	7,32

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan (Rp)	Persen (%)
3.28.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	34,00	2,49	7	448.662.960,00	32.831.250,00	7,32
3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Produksi hasil hutan bukan kayu	Ton	900,00	0,00	0	7.556.396.214,00	82.977.129,00	1,1
		Persentase Luas Lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat direhabilitasi	%	0,71	0,00	0			
		Persentase Luas kerusakan kawasan hutan	%	1,00	0,00	0			
3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Tata Hutan yang disusun	Dokumen	1,00	0,01	1	1.556.258.168,00	10.069.600,00	0,65
3.28.03.1.01.0002	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lindung (KPHP/L) yang Telah Dilakukan Pembagian Blok	Unit	1,00	0,00	0	185.067.600,00	0,00	0
3.28.03.1.01.0008	Pembangunan dan pengelolaan Sarana dan Prasarana KPH berbasis resor	Jumlah sarana dan prasarana operasionalisasi resor yang terbangun	Unit	1,00	0,01	1	1.371.190.568,00	10.069.600,00	0,73
3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	Dokumen	1,00	0,03	3	256.905.600,00	7.679.729,00	2,99
3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	Dokumen	1,00	0,03	3	256.905.600,00	7.679.729,00	2,99
3.28.03.1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Luas Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	Ha	5.153.407,00	1,49	0	603.844.476,00	8.984.000,00	1,49
3.28.03.1.03.0001	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	Dokumen	1,00	0,04	4	218.298.076,00	8.984.000,00	4,12
3.28.03.1.03.0013	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBP Di Kawasan Hutan Produksi	Dokumen	10,00	0,00	0	385.546.400,00	0,00	0
3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara	Ha	165,00	1,07	1	4.422.663.970,00	23.689.600,00	0,54
3.28.03.1.04.0001	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	Dokumen	1,00	0,00	0	229.653.832,00	0,00	0
3.28.03.1.04.0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	Ha	180,00	1,80	1	4.193.010.138,00	23.689.600,00	0,56
3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kerusakan Kawasan Hutan	Ha	25.000,00	0,00	0	716.724.000,00	32.554.200,00	4,54
3.28.03.1.05.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Dokumen	3,00	0,13	4	154.380.000,00	6.480.000,00	4,2
3.28.03.1.05.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penangulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	Laporan	12,00	0,00	0	477.600.000,00	14.794.200,00	3,1
3.28.03.1.05.0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	Ha	410,74	0,00	0	84.744.000,00	11.280.000,00	13,31
3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat	Ha	20.000,00	0,00	0	1.506.274.462,00	35.483.600,00	2,36
		Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	kelompok	20,00	0,00	0			
3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	kelompok	5,00	0,12	2	1.506.274.462,00	35.483.600,00	2,36
3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	Kelompok	5,00	0,00	0	254.023.750,00	0,00	0
3.28.05.1.01.0006	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	Unit	2,00	0,02	1	904.267.712,00	6.640.000,00	0,73
3.28.05.1.01.0007	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan	Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya	Orang	10,00	0,00	0	100.973.000,00	0,00	0
3.28.05.1.01.0008	Penyiapan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial	Hektar	400,00	46,72	12	247.010.000,00	28.843.600,00	11,68
3.28.0.00.0.00.01.0019	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Telake								
3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	%	100,00	0,00	0	1.557.246.445,00	89.980.185,00	5,78
		1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	%	83,00	0,00	0			
3.28.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penatausahaan Keuangan	%	100,00	25,00	25	148.800.000,00	0,00	0
3.28.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	3,00	0,00	0	148.800.000,00	0,00	0
3.28.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian	%	100,00	25,00	25	112.797.920,00	0,00	0
3.28.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Berserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Berserta Atribut Kelengkapan	Paket	2,00	0,00	0	43.997.920,00	0,00	0
3.28.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	4,00	0,00	0	68.800.000,00	0,00	0

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan (Rp)	Persen (%)
3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum	%	100,00	25,00	25	361.323.570,00	7.246.385,00	2,01
3.28.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	2,00	0,00	0	11.495.864,00	0,00	0
3.28.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5,00	0,00	0	69.105.027,00	0,00	0
3.28.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	3,00	0,00	0	29.962.479,00	0,00	0
3.28.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	3,00	0,00	0	20.455.000,00	0,00	0
3.28.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	1,00	0,00	0	1.939.200,00	0,00	0
3.28.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12,00	3,00	25	228.366.000,00	7.246.385,00	3,17
3.28.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Barang Milik Daerah yang Di adakan	%	100,00	0,00	0	80.005.455,00	0,00	0
3.28.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	2,00	0,00	0	27.258.106,00	0,00	0
3.28.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	15,00	0,00	0	52.747.349,00	0,00	0
3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pelayanan Jasa Kantor	%	100,00	25,00	25	593.808.100,00	82.733.800,00	13,93
3.28.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12,00	3,00	25	161.186.500,00	0,00	0
3.28.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12,00	0,00	0	432.621.600,00	82.733.800,00	19,12
3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	%	100,00	25,00	25	260.511.400,00	0,00	0
3.28.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	36,00	7,00	19	235.571.400,00	0,00	0
3.28.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	38,00	0,00	0	24.940.000,00	0,00	0
3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	2). Presentase Luas kerusakan kawasan hutan	%	1,00	0,00	0	9.469.252.985,00	101.373.418,00	1,07
3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	1). Presentase Luas Lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat direhabilitasi	%	0,71	0,00	0	3.812.114.708,00	34.737.833,00	0,91
3.28.03.1.01.0002	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lidung (KPHP/L) yang Telah Dilakukan Pembagian Blok	Unit	2,00	0,00	0	278.216.060,00	13.496.000,00	4,85
3.28.03.1.01.0006	Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah sarana prasarana operasionalisasi KPH yang terpelihara	Unit	43,00	0,00	0	3.533.898.648,00	21.241.833,00	0,6
3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	Dokumen	1,00	0,00	0	143.809.091,00	20.460.000,00	14,23
3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	Dokumen	1,00	0,00	0	143.809.091,00	20.460.000,00	14,23
3.28.03.1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Luas Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	Hektar	5,15	0,43	8	456.014.940,00	0,00	0
3.28.03.1.03.0001	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	Dokumen	1,00	0,00	0	300.000.000,00	0,00	0
3.28.03.1.03.0013	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	Dokumen	2,00	0,00	0	156.014.940,00	0,00	0
3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara	Hektar	177,00	0,00	0	3.348.769.600,00	17.097.485,00	0,51
3.28.03.1.04.0001	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	Dokumen	1,00	0,00	0	122.746.920,00	0,00	0
3.28.03.1.04.0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Jumlah Luas Rehabilitasi yang di hijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	Ha	177,00	0,00	0	3.082.162.680,00	9.350.000,00	0,3
3.28.03.1.04.0008	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Laporan	4,00	0,00	0	143.860.000,00	7.747.485,00	5,39
3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kerusakan Kawasan Hutan	Hektar	7,93	2,00	25	1.708.544.646,00	29.078.100,00	1,7
3.28.03.1.05.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Dokumen	6,00	0,00	0	170.000.000,00	0,00	0

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan (Rp)	Persen (%)
3.28.03.1.05.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penangulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	Laporan	12,00	0,00	0	1.208.544.646,00	29.078.100,00	2,41
3.28.03.1.05.0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	Ha	75.948,00	0,00	0	330.000.000,00	0,00	0
3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	1). Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat 2). Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	Hektar Kelompok	20,00 20,00	0,00 0,00	0 0	1.208.000.000,00	13.004.485,00	1,08
3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	Kelompok	3,00	0,00	0	1.208.000.000,00	13.004.485,00	1,08
3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	Kelompok	3,00	0,00	0	574.189.000,00	0,00	0
3.28.05.1.01.0006	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	Unit	4,00	0,00	0	569.311.000,00	0,00	0
3.28.05.1.01.0008	Penyiapan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial	Hektar	50,00	0,00	0	64.500.000,00	13.004.485,00	20,16
3.28.0.00.0.00.01.0020	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Balikpapan								
3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan 2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	Indeks %	83,00 100,00	20,00 25,00	24 25	5.087.810.921,00	251.017.743,00	4,93
3.28.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Penatausahaan Keuangan	%	100,00	25,00	25	253.384.000,00	11.575.000,00	4,57
3.28.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12,00	0,00	0	148.440.000,00	0,00	0
3.28.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	12,00	3,00	25	104.944.000,00	11.575.000,00	11,03
3.28.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian	%	100,00	0,00	0	382.273.029,00	0,00	0
3.28.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	4,00	0,00	0	158.950.179,00	0,00	0
3.28.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	41,00	0,00	0	223.322.850,00	0,00	0
3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum	%	100,00	25,00	25	1.176.146.338,00	44.477.000,00	3,78
3.28.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	8,00	0,00	0	50.760.723,00	0,00	0
3.28.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	50,00	0,00	0	381.417.898,00	0,00	0
3.28.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	19,00	0,00	0	90.342.863,00	0,00	0
3.28.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	3,00	0,00	0	75.752.854,00	0,00	0
3.28.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12,00	3,00	25	577.872.000,00	44.477.000,00	8,37
3.28.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Barang Milik Daerah yang Di adakan	%	100,00	0,00	0	1.266.743.459,00	0,00	0
3.28.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	5,00	0,00	0	429.241.949,00	0,00	0
3.28.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	13,00	0,00	0	837.501.510,00	0,00	0
3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pelayanan Jasa Kantor	%	100,00	25,00	25	1.070.163.595,00	181.981.743,00	17,01
3.28.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1,00	0,00	0	4.524.000,00	0,00	0
3.28.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12,00	3,00	25	281.919.595,00	51.361.743,00	18,22
3.28.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1,00	0,00	0	783.720.000,00	130.620.000,00	16,67
3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	%	100,00	25,00	25	939.100.500,00	12.984.000,00	1,38
3.28.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	52,00	13,00	25	431.782.500,00	12.984.000,00	3,01
3.28.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	79,00	0,00	0	66.990.000,00	0,00	0
3.28.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1,00	0,00	0	440.328.000,00	0,00	0
3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	2). Persentase luas kerusakan kawasan hutan 1). Persentase Luas Lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat direhabilitasi	% %	1,00 0,71	0,00 0,00	0 0	15.469.272.763,00	100.615.389,00	0,65

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan (Rp)	Persen (%)
3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Tata Hutan yang disusun	Dokumen	1,00	0,00	0	13.361.474.163,00	49.540.774,00	0,37
3.28.03.1.01.0002	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lidung (KPHP/L) yang Telah Dilakukan Pembagian Blok	Unit	1,00	0,00	0	429.000.000,00	0,00	0
3.28.03.1.01.0008	Pembangunan dan pengelolaan Sarana dan Prasarana KPH berbasis resor	Jumlah sarana dan prasarana operasionalisasi resor yang terbangun	Unit	25,00	0,00	0	12.932.474.163,00	49.540.774,00	0,35
3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	Dokumen	1,00	0,00	0	324.356.100,00	17.055.615,00	5,26
3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	Dokumen	1,00	0,00	0	324.356.100,00	17.055.615,00	6,16
3.28.03.1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Luas Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	Ha	5,15	0,00	0	161.800.000,00	0,00	0
3.28.03.1.03.0015	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Lindung	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Lindung	Dokumen	1,00	0,00	0	161.800.000,00	0,00	0
3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara	Ha	20,00	0,00	0	808.642.500,00	0,00	0
3.28.03.1.04.0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	Ha	20,00	0,00	0	808.642.500,00	0,00	0
3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kerusakan Kawasan Hutan	Ha	7,50	0,00	0	813.000.000,00	34.019.000,00	4,18
3.28.03.1.05.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Dokumen	5,00	1,00	20	100.000.000,00	7.371.000,00	16,45
3.28.03.1.05.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penangulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	Laporan	12,00	3,00	25	412.000.000,00	13.324.000,00	3,6
3.28.03.1.05.0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	Ha	16,38	0,00	0	301.000.000,00	13.324.000,00	4,76
3.28.04	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Luas Kawasan Bernilai Ekosistem Penting dan Konservasi Provinsi yang dikelola	Ha	730,01	0,00	0	100.000.000,00	0,00	0
3.28.04.1.02	Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah spesies tumbuhan dan satwa yang tidak dilindungi	Spesies	2,00	0,00	0	100.000.000,00	0,00	0
3.28.04.1.02.0001	Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	Laporan	1,00	0,00	0	100.000.000,00	0,00	0
3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	1). Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat 2). Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	Ha kelompok	20,00 20,00	0,00 0,00	0 0	494.000.000,00	2.540.000,00	0,51
3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	Kelompok	2,00	0,00	0	494.000.000,00	2.540.000,00	0,51
3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	Kelompok	4,00	0,00	0	297.000.000,00	0,00	0
3.28.05.1.01.0006	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	Unit	4,00	1,00	25	197.000.000,00	2.540.000,00	1,52
3.28.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	Luas DAS dan Sub DAS yang dikelola	Ha	196,34	0,00	0	415.043.570,00	0,00	0
3.28.06.1.01	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah DAS yang dikelola	DAS	1,00	0,00	0	415.043.570,00	0,00	0
3.28.06.1.01.0008	Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS	Jumlah dokumen sinkronisasi dan koordinasi optimalisasi DAS	Dokumen	1,00	0,00	0	415.043.570,00	0,00	0
3.28.0.00.0.00.01.0021	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Batu Rook								
3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan 2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	Indeks %	83,00 100,00	0,00 0,00	0 0	7.217.634.960,00	133.159.300,00	1,84
3.28.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Penatausahaan Keuangan	%	100,00	6,25	6	186.590.693,00	11.670.000,00	6,25
3.28.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12,00	0,00	0	133.440.000,00	0,00	0
3.28.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	12,00	1,00	8	53.150.693,00	11.670.000,00	21,96
3.28.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Presentase Barang Milik Daerah Pada SKPD yang telah Ditatausahakan	%	100,00	23,84	24	48.950.693,00	11.670.000,00	23,84

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan (Rp)	Persen (%)
3.28.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	4,00	1,00	25	48.950.693,00	11.670.000,00	23,84
3.28.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian	%	100,00	0,00	0	368.251.967,00	0,00	0
3.28.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1,00	0,00	0	72.101.274,00	0,00	0
3.28.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	2,00	0,00	0	53.150.693,00	0,00	0
3.28.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	30,00	0,00	0	243.000.000,00	0,00	0
3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum	%	100,00	3,97	4	579.451.110,00	22.910.000,00	3,95
3.28.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	10,00	0,00	0	19.584.082,00	0,00	0
3.28.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12,00	0,00	0	179.316.861,00	0,00	0
3.28.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	10,00	0,00	0	36.876.962,00	0,00	0
3.28.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12,00	0,00	0	47.813.205,00	0,00	0
3.28.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12,00	0,00	0	295.860.000,00	22.910.000,00	7,74
3.28.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Barang Milik Daerah yang Di adakan	%	100,00	0,60	0,6	5.470.748.228,00	33.200.000,00	0,61
3.28.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	1,00	0,00	0	6.123.228,00	0,00	0
3.28.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	2,00	0,00	0	4.364.270.000,00	33.200.000,00	0,78
3.28.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	10,00	0,00	0	1.100.355.000,00	0,00	0
3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pelayanan Jasa Kantor	%	100,00	11,24	11	318.688.700,00	53.709.300,00	16,85
3.28.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12,00	0,00	0	91.851.500,00	0,00	0
3.28.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12,00	0,00	25	226.837.200,00	53.709.300,00	23,68
3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	%	100,00	0,00	0	244.953.569,00	0,00	0
3.28.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	21,00	0,00	0	144.476.750,00	0,00	0
3.28.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	27,00	0,00	0	18.070.000,00	0,00	0
3.28.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1,00	0,00	0	82.406.819,00	0,00	0
3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	1). Persentase Luas Lahan yang direhabilitasi terhadap Luas Lahan yang dapat direhabilitasi 2). Persentase Luas Kerusakan Kawasan Hutan	%	0,71	0,00	0	3.893.834.000,00	0,00	0
		Produksi hasil hutan kayu	m/tahun	1,00	0,00	200			
		Produksi hasil hutan bukan kayu	ton	#####	0,00	0			
				900,00	0,00	0			
3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Tata Hutan yang disusun	Dokumen	1,00	0,00	0	536.701.000,00	0,00	0
3.28.03.1.01.0002	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lindung (KPHP/L) yang Telah Dilakukan Pembagian Blok	Unit	70,00	0,00	0	126.701.000,00	0,00	0
3.28.03.1.01.0006	Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah sarana prasarana operasionalisasi KPH yang terpelihara	Unit	8,00	0,00	0	410.000.000,00	0,00	0
3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	Dokumen	1,00	0,00	0	100.000.000,00	0,00	0
3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	Dokumen	2,00	0,00	0	100.000.000,00	0,00	0
3.28.03.1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Luas Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	Hektar	5.153.407,00	0,00	0	850.000.000,00	0,00	0
3.28.03.1.03.0002	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Mengenai Pemanfaatan Hutan di Kawasan HL Provinsi Secara Berkala	Dokumen	3,00	0,00	0	100.000.000,00	0,00	0

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan (Rp)	Persen (%)
3.28.03.1.03.0013	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBBH Di Kawasan Hutan Produksi	Dokumen	3,00	0,00	0	750.000.000,00	0,00	0
3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara	Hektar	25,00	0,00	0	1.860.133.000,00	0,00	0
3.28.03.1.04.0001	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	Dokumen	1,00	0,00	0	75.000.000,00	0,00	0
3.28.03.1.04.0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	Ha	25,00	0,00	0	1.710.133.000,00	0,00	0
3.28.03.1.04.0008	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Laporan	1,00	0,00	0	75.000.000,00	0,00	0
3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kerusakan Kawasan Hutan	<Ha	25,00	0,00	0	547.000.000,00	0,00	0
3.28.03.1.05.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Dokumen	6,00	0,00	0	225.000.000,00	0,00	0
3.28.03.1.05.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penangulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	Laporan	12,00	0,00	0	222.000.000,00	0,00	0
3.28.03.1.05.0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	Ha	557,62	0,00	0	100.000.000,00	0,00	0
3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	1). Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat 2). Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	Hektar unit	20.000,00 2,00	0,00 0,00	0 0	783.824.490,00	0,00	0
3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	Kelompok	3,00	0,00	0	783.824.490,00	0,00	0
3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	Kelompok	2,00	0,00	0	491.044.490,00	0,00	0
3.28.05.1.01.0004	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	Orang	2,00	0,00	0	42.780.000,00	0,00	0
3.28.05.1.01.0006	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	Unit	2,00	0,00	0	250.000.000,00	0,00	0
3.29.0.00.0.00.01.0000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral								
3.29.0.00.0.00.01.0000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral								
3.29.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti	Indeks %	86,51 100,00	8,31 0,00	9,61 0	32.880.101.600,00	6.332.343.448,00	19,26
3.29.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yg ditetapkan tepat waktu	%	100,00	0,00	0	1.365.790.000,00	235.000.740,00	17,21
3.29.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	1,00	0,00	0	304.040.000,00	18.645.940,00	6,13
3.29.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1,00	1,00	100	10.370.000,00	2.600.000,00	25,07
3.29.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1,00	0,00	0	11.655.000,00	753.000,00	6,46
3.29.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1,00	0,00	0	11.655.000,00	1.100.000,00	9,44
3.29.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1,00	0,00	0	7.770.000,00	753.000,00	9,69
3.29.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	1,00	0,00	0	62.000.000,00	1.100.000,00	1,77
3.29.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	20,00	4,00	20	958.300.000,00	210.048.800,00	21,92
3.29.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran	%	87,00	3,54	4,07	24.622.795.259,00	4.066.238.578,00	16,51
3.29.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	131,00	100,00	76,34	23.850.755.259,00	3.897.789.578,00	19,6
3.29.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12,00	0,00	0	697.680.000,00	165.270.000,00	23,69
3.29.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	4,00	0,00	0	2.000.000,00	0,00	0
3.29.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	1,00	0,00	0	4.160.000,00	1.997.000,00	48

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan (Rp)	Persen (%)
3.29.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	4,00	0,00	0	66.200.000,00	1.182.000,00	1,79
3.29.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	1,00	0,00	0	2.000.000,00	0,00	0
3.29.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD yang berfungsi dengan baik	%	100,00	0,00	0	35.937.700,00	0,00	0
3.29.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1,00	0,00	0	5.000.000,00	0,00	0
3.29.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1,00	0,00	0	9.464.700,00	0,00	0
3.29.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1,00	0,00	0	21.473.000,00	0,00	0
3.29.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	%	61,64	0,00	0	319.480.600,00	0,00	0
3.29.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1,00	0,00	0	138.362.000,00	0,00	0
3.29.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	1,00	0,00	0	1.780.000,00	0,00	0
3.29.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	1,00	0,00	0	10.304.000,00	0,00	0
3.29.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	12,00	0,00	0	169.034.600,00	0,00	0
3.29.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Unit Pelayanan Administrasi Kantor yang tercapai	Unit	5,00	0,00	0	2.289.739.779,00	362.648.785,00	15,84
3.29.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	5,00	0,00	0	23.079.000,00	1.431.500,00	6,2
3.29.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	15,00	0,00	0	187.895.000,00	448.750,00	0,24
3.29.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1,00	0,00	0	19.019.244,00	0,00	0
3.29.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	4,00	0,00	0	70.861.135,00	2.764.000,00	3,9
3.29.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	12,00	0,00	0	23.270.400,00	0,00	0
3.29.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	2,00	0,00	0	9.147.000,00	0,00	0
3.29.01.1.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Laporan	12,00	0,00	0	74.800.000,00	13.062.000,00	17,46
3.29.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	36,00	0,00	0	1.826.668.000,00	344.942.535,00	18,88
3.29.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	1,00	0,00	0	55.000.000,00	0,00	0
3.29.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah	Unit	1,00	0,00	0	1.300.000.000,00	0,00	0
3.29.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1,00	0,00	0	1.300.000.000,00	0,00	0
3.29.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan jasa kegiatan kantor	Laporan	12,00	0,00	0	1.756.035.800,00	1.592.227.090,00	90,67
3.29.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12,00	0,00	0	24.830.400,00	0,00	0
3.29.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12,00	0,00	0	232.933.400,00	40.738.930,00	17,49
3.29.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12,00	0,00	0	1.498.272.000,00	1.551.488.160,00	28,37
3.29.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	%	100,00	0,00	0	1.190.322.462,00	76.228.255,00	6,4
3.29.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	15,00	7,00	46,67	505.632.000,00	76.228.255,00	15,08
3.29.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	15,00	0,00	0	20.930.000,00	0,00	0
3.29.01.1.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Unit	3,00	0,00	0	1.010.000,00	0,00	0
3.29.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	5,00	0,00	0	662.750.462,00	0,00	0
3.29.02	PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KE GEOLOGIAN	Persentase Zona Konservasi Air Tanah Yang Terpetakan	%	53,38	51,37	96,23	2.439.598.400,00	77.667.260,00	3,18
3.29.02.1.01	Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Jumlah cekungan air tanah yang dievaluasi	CAT	2,00	0,00	0	2.314.598.400,00	76.137.260,00	3,29

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan (Rp)	Persen (%)
3.29.02.1.01.0001	Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Jumlah Dokumen Terkait Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Dokumen	1,00	0,00	0	779.898.000,00	28.840.000,00	3,7
3.29.02.1.01.0002	Penentuan dan Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Jumlah Zona Konservasi Air Tanah yang Ditetapkan dalam Daerah Provinsi	Dokumen	3,00	0,00	0	294.900.400,00	0,00	0
3.29.02.1.01.0003	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Laporan	16,00	4,00	25	1.239.800.000,00	47.297.260,00	3,81
3.29.02.1.03	Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Data Jumlah Pajak Air Tanah setiap Kabupaten/Kota	Dokumen	1,00	0,00	0	125.000.000,00	1.530.000,00	1,22
3.29.02.1.03.0001	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi yang Terkumpul	Dokumen	1,00	0,00	0	125.000.000,00	1.530.000,00	1,22
3.29.03	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	Persentase Usaha Tambang Sesuai Kewenangan Provinsi yang Tidak Melanggar Perda	%	100,00	0,00	0	2.339.948.000,00	255.081.500,00	10,9
3.29.03.1.01	Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Pemetaan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan Wilayah Provinsi	Peta	1,00	0,00	0	187.800.000,00	33.951.500,00	18,08
3.29.03.1.01.0005	Pemberian dan penetapan wilayah izin usaha pertambangan mineral bukan logam, Mineral bukan logam jenis tertentu, dan batuan dengan ketentuan berada dalam 1 (satu) daerah provinsi atau wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil laut	Jumlah Pemberian dan penetapan wilayah izin usaha pertambangan mineral bukan logam, Mineral bukan logam jenis tertentu, dan batuan dengan ketentuan berada dalam 1 (satu) daerah provinsi atau wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil laut	Laporan	100,00	5,00	5	187.800.000,00	33.951.500,00	18,08
3.29.03.1.03	Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Jumlah Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Logam dan Batuan	Laporan	50,00	0,00	0	541.573.000,00	78.784.500,00	14,55
3.29.03.1.03.0003	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Dokumen	30,00	6,00	20	177.200.000,00	33.660.000,00	19
3.29.03.1.03.0005	Pengawasan Teknis Kaidah Pertambangan yang baik Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kaidah Teknis Pertambangan yang baik dan Kaidah Pengusahaan yang Baik Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Laporan	40,00	0,00	0	364.373.000,00	45.124.500,00	12,38
3.29.03.1.06	Penatausahaan Izin Usaha Jasa Pertambangan dalam rangka Penanaman Modal dalam Negeri yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Jasa Pertambangan dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Dokumen	70,00	0,00	0	176.600.000,00	0,00	0
3.29.03.1.06.0002	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Jasa Pertambangan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Jasa Pertambangan dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Dokumen	70,00	0,00	0	176.600.000,00	0,00	0
3.29.03.1.07	Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	Jumlah Dokumen Harga Acuan Mineral Bukan Logam dan Batuan Wilayah Provinsi	Dokumen	1,00	0,00	0	908.400.000,00	49.334.500,00	5,43
3.29.03.1.07.0002	Penentuan dan Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	Jumlah Dokumen Harga Patokan Mineral Bukan Logam yang telah Ditentukan dan Ditetapkan	Dokumen	1,00	0,00	0	460.800.000,00	31.146.500,00	6,76
3.29.03.1.07.0003	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam	Laporan	10,00	5,00	50	447.600.000,00	18.188.000,00	4,06
3.29.03.1.12	Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Jumlah Dokumen Penatausahaan Izin dan informasi Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu	Dokumen	1,00	0,00	0	525.575.000,00	93.011.000,00	17,7

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan (Rp)	Persen (%)
3.29.03.1.12.0002	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Dokumen	10,00	4,00	40	166.600.000,00	21.020.000,00	12,62
3.29.03.1.12.0004	Pengawasan Teknis Kaidah Pertambangan yang Baik Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Teknis Kaidah Pertambangan yang Baik Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Laporan	40,00	0,00	0	358.975.000,00	71.991.000,00	20,05
3.29.05	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	Jumlah reduksi CO2e dari bidang energi	TonCOe/Tahun	484,91	0,00	0	104.903.602.000,00	325.481.800,00	0,31
		Persentase Instansi Pemerintah Daerah Yang Menerapkan Kebijakan Bauran Energi	%	45,76	0,00	0			
		Persentase Perusahaan Yang Menerapkan Bauran Energi	%	35,78	0,00	0			
3.29.05.1.05	Pengelolaan penyediaan Biomassa dan/atau Biogas dalam wilayah provinsi	Jumlah laporan Pengelolaan Penyediaan Biomassa dan/atau Biogas dalam wilayah provinsi	Laporan	1,00	0,00	0	3.517.388.524,00	58.406.800,00	1,66
3.29.05.1.05.0001	Penyusunan dan pemuktahiran data potensi biomassa	Jumlah dokumen data potensi biomassa	Dokumen	1,00	0,00	0	128.200.000,00	0,00	0
3.29.05.1.05.0002	Pemberian bimtek, supervisi, evaluasi dan pelaporan biogas	Jumlah laporan pelaksanaan pemberian bimtek, supervisi, evaluasi dan pelaporan biogas	Laporan	8,00	0,00	0	210.600.000,00	0,00	0
3.29.05.1.05.0006	Penyusunan dan pemuktahiran data potensi biogas	Jumlah dokumen data potensi biogas	Dokumen	1,00	0,00	0	202.600.000,00	20.651.600,00	10,19
3.29.05.1.05.0008	Pelaksanaan kegiatan penyediaan biogas	Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan penyediaan biogas	Laporan	6,00	1,00	16,67	2.975.988.524,00	37.755.200,00	1,27
3.29.05.1.06	Pengelolaan pemanfaatan Biomassa dan/atau Biogas sebagai bahan bakar dalam wilayah provinsi	Jumlah laporan pengelolaan pemanfaatan biomassa dan/atau biogas sebagai bahan bakar dalam wilayah provinsi	Laporan	1,00	0,00	0	244.200.000,00	1.360.000,00	0,56
3.29.05.1.06.0004	Pembinaan dan pengawasan pemanfaatan biomassa dan biogas (kapasitas terpasang, investasi, TKDN, SNI, produksi dan distribusi bahan bakar biomassa dan biogas)	Jumlah laporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pemanfaatan biomassa dan biogas (kapasitas terpasang, investasi, TKDN, SNI, produksi dan distribusi bahan bakar biomassa dan biogas)	Laporan	1,00	0,00	0	244.200.000,00	1.360.000,00	0,56
3.29.05.1.07	Pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi	Jumlah laporan pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi	Laporan	1,00	0,00	0	100.046.213.476,00	223.141.200,00	0,22
3.29.05.1.07.0001	Pemberian evaluasi dan pelaporan pemanfaatan aneka EBT	Jumlah laporan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pemanfaatan aneka EBT	laporan	2,00	0,00	0	290.504.365,00	0,00	0
3.29.05.1.07.0002	Pembinaan dan pengawasan aneka EBT (kapasitas terpasang, investasi) di daerah	Jumlah laporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan aneka EBT (kapasitas terpasang, investasi) di daerah	Laporan	1,00	0,00	0	492.900.000,00	70.833.200,00	14,37
3.29.05.1.07.0005	Revitalisasi infrastruktur aneka EBT	Jumlah infrastruktur aneka EBT yang terevitalisasi	Unit	3,00	0,00	0	18.683.152.000,00	0,00	0
3.29.05.1.07.0006	Perencanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT	Jumlah rencana kegiatan pemanfaatan aneka EBT	Dokumen	8,00	0,00	0	3.816.400.000,00	0,00	0
3.29.05.1.07.0007	Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT	Jumlah hasil kegiatan pemanfaatan aneka EBT	unit	1.076,00	0,00	0	76.485.785.111,00	152.308.000,00	0,2
3.29.05.1.07.0010	Penyusunan dan pemuktahiran data potensi aneka EBT di daerah	Jumlah dokumen data potensi aneka EBT di daerah	Dokumen	1,00	0,00	0	277.472.000,00	0,00	0
3.29.05.1.08	Pengelolaan Konservasi Energi terhadap kegiatan yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi	Jumlah laporan pengelolaan Konservasi Energi terhadap kegiatan yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi	Laporan	1,00	0,00	0	193.000.000,00	20.014.200,00	10,37
3.29.05.1.08.0001	Penyusunan dan pemuktahiran data kegiatan yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi	Jumlah dokumen data kegiatan yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi	Dokumen	1,00	0,00	0	96.800.000,00	0,00	0
3.29.05.1.08.0005	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan konservasi energi pada kegiatan yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi	Jumlah laporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan konservasi energi pada kegiatan yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi	Laporan	1,00	0,00	0	96.200.000,00	20.014.200,00	23,94
3.29.05.1.09	Pelaksanaan Konservasi Energi pada sarana dan prasarana yang dikelola oleh perangkat daerah yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral	Jumlah dokumen pelaksanaan Konservasi Energi pada sarana dan prasarana yang dikelola oleh perangkat daerah yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral	Dokumen	1,00	0,00	0	558.404.300,00	0,00	0
3.29.05.1.09.0001	Evaluasi terhadap kegiatan konservasi energi	Jumlah laporan pelaksanaan evaluasi kegiatan konservasi energi	Laporan	1,00	0,00	0	73.200.000,00	0,00	0
3.29.05.1.09.0003	Perencanaan kegiatan konservasi energi	Jumlah rencana kegiatan konservasi energi	Dokumen	1,00	0,00	0	485.204.300,00	0,00	0

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan (Rp)	Persen (%)
3.29.05.1.10	Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Konservasi Energi yang dilakukan oleh pemangku kepentingan di tingkat daerah provinsi	Jumlah laporan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Konservasi Energi yang dilakukan oleh pemangku kepentingan di tingkat daerah provinsi	Laporan	1,00	0,00	0	344.395.700,00	22.559.600,00	6,55
3.29.05.1.10.0002	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan konservasi energi kepada perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota	Jumlah laporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan konservasi energi kepada perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota	laporan	6,00	1,00	16,67	146.154.616,00	22.559.600,00	16,45
3.29.05.1.10.0003	Sosialisasi konservasi energi kepada masyarakat	Jumlah laporan pelaksanaan sosialisasi konservasi energi kepada masyarakat	laporan	3,00	0,00	0	94.400.000,00	0,00	0
3.29.05.1.10.0005	Sosialisasi konservasi energi kepada perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota	Jumlah laporan pelaksanaan sosialisasi konservasi energi kepada perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota	Laporan	2,00	0,00	0	103.841.084,00	0,00	0
3.29.06	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	Persentase Desa Yang Dibangun PLTS Pada Desa Belum Berlistrik PLN	%	38,73	0,00	0	64.759.950.000,00	301.604.000,00	0,47
		Persentase Kelurahan/Desa Yang Teraliri Listrik 24 Jam	%	97,78	0,00	0			
		Persentase Rekomendasi Teknis Izin Usaha Ketenagalistrikan Yang Tertangani	%	100,00	0,00	0			
		Pertambahan Daya Listrik Yang Bersumber Dari EBT	kWp	300,00	0,00	0			
3.29.06.1.02	Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Jumlah perusahaan yang mendapat rekomendasi teknis Izin Operasi (IO)	Perusahaan	40,00	33,00	82,5	808.200.000,00	58.032.400,00	7,18
3.29.06.1.02.0001	Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Jumlah Prosedur dan Persyaratan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi yang Ditetapkan	Dokumen	80,00	59,00	73,75	499.000.000,00	58.032.400,00	11,63
3.29.06.1.02.0003	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Laporan	40,00	0,00	0	309.200.000,00	0,00	0
3.29.06.1.05	Penatausahaan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri	Jumlah perusahaan yang mendapat rekomendasi teknis Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (IUJPTL)	Perusahaan	20,00	3,00	15	152.000.000,00	14.106.800,00	9,28
3.29.06.1.05.0002	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri	Jumlah surat Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki Oleh Penanam Modal dalam Negeri	Dokumen	12,00	3,00	25	152.000.000,00	14.106.800,00	9,28
3.29.06.1.06	Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Jumlah Data Verifikasi Kategori Masyarakat Tidak Mampu Daerah Terpencil dan Perdesaan	Dokumen	1,00	0,00	0	63.799.750.000,00	229.464.800,00	0,36
3.29.06.1.06.0003	Pengendalian dan Pengawasan Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	Laporan	1,00	0,00	0	252.800.000,00	0,00	0
3.29.06.1.06.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Laporan	1,00	0,00	0	491.000.000,00	34.704.200,00	7,07
3.29.06.1.06.0006	Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Jumlah Sarana yang Terbangun dalam Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Unit	5,00	0,00	0	63.055.950.000,00	194.760.600,00	0,31
3.31.3.30.2.17.01.0000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah								
3.31.3.30.2.17.01.0000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah								
2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti	%	100,00	0,00	0	57.234.468.397,00	8.096.262.969,00	14,15
		Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	Indeks	88,80	0,00	0			
2.17.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran yg ditetapkan tepat waktu	Dokumen	29,00	4,00	14	1.606.735.966,00	230.852.182,00	14,37
2.17.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	6,00	3,00	50	661.378.966,00	214.879.960,00	32,49
2.17.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	2,00	0,00	0	152.884.000,00	0,00	0
2.17.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	2,00	0,00	0	64.884.000,00	0,00	0
2.17.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	11,00	1,00	9,09	593.661.000,00	15.972.222,00	3,46
2.17.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	2,00	0,00	0	133.928.000,00	0,00	0
2.17.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	jumlah Dokumen administrasi keuangan tiap tahun	Dokumen	75,00	0,00	0	33.147.981.823,00	4.762.779.266,00	14,37

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan (Rp)	Persen (%)
2.17.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	75,00	75,00	100	32.076.281.749,00	4.686.179.266,00	18,22
2.17.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12,00	3,00	25	648.840.000,00	76.600.000,00	11,81
2.17.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	4,00	0,00	0	102.229.667,00	0,00	0
2.17.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	2,00	0,00	0	249.087.303,00	0,00	0
2.17.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	1,00	0,00	0	1.790.000,00	0,00	0
2.17.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	14,00	0,00	0	1.750.000,00	0,00	0
2.17.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	2,00	0,00	0	68.003.104,00	0,00	0
2.17.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi barang milik daerah	Dokumen	18,00	0,00	0	157.395.925,00	0,00	0
2.17.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	4,00	0,00	0	33.156.000,00	0,00	0
2.17.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1,00	0,00	0	49.942.000,00	0,00	0
2.17.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	4,00	0,00	0	12.577.925,00	0,00	0
2.17.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	4,00	0,00	0	14.500.000,00	0,00	0
2.17.01.1.03.0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	2,00	0,00	0	47.220.000,00	0,00	0
2.17.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah SDM Aparatur yang mengikuti Diklat/bimtek/sosialisasi	orang	189,00	0,00	0	2.181.499.550,00	0,00	0
2.17.01.1.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Unit	7,00	0,00	0	36.400.000,00	0,00	0
2.17.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Berserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Berserta Atribut Kelengkapan	Paket	3,00	0,00	0	502.055.342,00	0,00	0
2.17.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	4,00	0,00	0	499.809.800,00	0,00	0
2.17.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	4,00	0,00	0	25.642.808,00	0,00	0
2.17.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	2,00	0,00	0	159.899.600,00	0,00	0
2.17.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	35,00	0,00	0	957.692.000,00	0,00	0
2.17.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dokumen	12,00	0,00	0	4.202.010.340,00	160.239.492,00	3,81
2.17.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	14,00	0,00	0	73.430.398,00	0,00	0
2.17.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	16,00	0,00	0	1.135.403.630,00	0,00	0
2.17.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	2,00	0,00	0	4.675.130,00	0,00	0
2.17.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	4,00	2,00	50	1.693.963.833,00	54.500.000,00	3,22
2.17.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	5,00	2,00	40	238.099.000,00	9.360.000,00	3,93
2.17.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	12,00	3,00	25	23.270.400,00	200.000,00	0,86
2.17.01.1.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Laporan	3,00	0,00	0	122.881.800,00	0,00	0
2.17.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	3,00	1,00	33,33	742.739.600,00	81.692.330,00	13,94
2.17.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	2,00	0,00	0	133.626.840,00	0,00	0
2.17.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	3,00	2,00	66,67	33.919.709,00	14.487.162,00	42,71
2.17.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	unit	100,00	0,00	0	7.649.924.112,00	0,00	0
2.17.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	2,00	0,00	0	889.962.000,00	0,00	0
2.17.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	3,00	0,00	0	420.769.965,00	0,00	0

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan (Rp)	Persen (%)
2.17.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	7,00	0,00	14,29	120.643.907,00	0,00	0
2.17.01.1.07.0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	Unit	4,00	0,00	0	488.528.000,00	0,00	0
2.17.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1,00	0,00	0	2.287.265.720,00	0,00	0
2.17.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	20,00	0,00	0	3.126.166.520,00	0,00	0
2.17.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1,00	0,00	0	316.588.000,00	0,00	0
2.17.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kegiatan	12,00	0,00	0	5.379.581.800,00	2.912.184.332,00	54,13
2.17.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12,00	3,00	25	39.885.000,00	8.750.000,00	21,94
2.17.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	36,00	9,00	25	1.592.230.000,00	161.235.164,00	10,13
2.17.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12,00	3,00	25	3.747.466.800,00	2.742.199.168,00	27,19
2.17.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	Unit	200,00	0,00	0	2.909.338.881,00	30.207.697,00	1,04
2.17.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	3,00	0,00	0	43.986.900,00	0,00	0
2.17.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	65,00	7,00	10,77	380.546.565,00	13.778.297,00	3,62
2.17.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	416,00	0,00	0	258.024.916,00	0,00	0
2.17.01.1.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Unit	1,00	0,00	0	52.730.000,00	0,00	0
2.17.01.1.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Unit	5,00	0,00	0	88.800.000,00	0,00	0
2.17.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	10,00	0,00	0	1.848.418.000,00	0,00	0
2.17.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	3,00	1,00	33,33	236.832.500,00	16.429.400,00	6,94
2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Koperasi Binaan Provinsi yang Sehat	%	35,00	2,28	6,51	812.542.184,00	36.573.000,00	4,5
2.17.03.1.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Provinsi	%	54,00	0,00	0	325.550.926,00	0,00	0
2.17.03.1.01.0003	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	UnitUsaha	30,00	0,00	0	325.550.926,00	0,00	0
2.17.03.1.02	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam Provinsi	%	20,00	10,00	50	486.991.258,00	36.573.000,00	7,51
2.17.03.1.02.0002	Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	UnitUsaha	30,00	3,00	10	486.991.258,00	36.573.000,00	7,51
2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Koperasi Modern Binaan Provinsi	%	66,00	0,00	0	1.190.169.275,00	38.676.400,00	3,25
2.17.06.1.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase koperasi provinsi yang mengalami perkembangan usaha	%	61,65	1,95	3,16	1.190.169.275,00	38.676.400,00	3,25
2.17.06.1.01.0002	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	UnitUsaha	30,00	0,00	0	690.172.835,00	38.676.400,00	6,01
2.17.06.1.01.0009	Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang diberdayakan	UnitUsaha	29,00	0,00	0	499.996.440,00	0,00	0
2.17.07	PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase UKM yang Masuk Pasar Digital	%	10,00	1,91	19,1	5.343.502.674,00	172.313.210,00	3,22
2.17.07.1.01	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	persentase koperasi provinsi yang mengalami perkembangan usaha	%	61,65	0,88	1,43	5.343.502.674,00	172.313.210,00	3,22
2.17.07.1.01.0001	Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	UnitUsaha	137,00	163,00	118,98	4.252.979.224,00	172.313.210,00	4,05
2.17.07.1.01.0002	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan	Orang	120,00	0,00	0	279.265.850,00	0,00	0

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan (Rp)	Persen (%)
2.17.07.1.01.0005	Penyusunan Basis Data Usaha Kecil	Jumlah Unit Usaha Kecil Terdata	UnitUsaha	3.500,00	0,00	0	317.895.600,00	0,00	0
2.17.07.1.01.0008	Pendampingan dan Bantuan Hukum bagi Usaha Kecil	Jumlah Usaha Kecil yang Terfasilitasi	UnitUsaha	150,00	0,00	0	493.362.000,00	0,00	0
2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Jumlah UKM Potensial Ekspor	UKM	40,00	0,00	0	1.690.263.283,00	3.600.000,00	0,21
2.17.08.1.01	Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	Jumlah UKM yang di fasilitasi	UKM	455,00	0,00	0	1.690.263.283,00	3.600.000,00	0,21
2.17.08.1.01.0001	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	UnitUsaha	40,00	0,00	0	1.390.619.451,00	3.600.000,00	0,26
2.17.08.1.01.0002	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Literasi Hukum dan Bantuan Penyelesaian Perkara bagi Pelaku UMKM	Jumlah Pelaku UMKM yang Memahami Literasi Hukum	Orang	258,00	0,00	0	299.643.832,00	0,00	0
3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase Ketaatan Pelaku Usaha dalam Tertib Niaga	%	85,00	0,00	0	354.877.500,00	0,00	0
		Persentase Penerbitan SKA yang Tepat Waktu	%	100,00	0,00	0			
		jumlah rekomendasi yang tepat waktu	%	100,00	0,00	0			
3.30.02.1.03	Pengendalian Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar	jumlah pelaku usaha yang diawasi yang sesuai ketentuan	pelakuUsaha	9,00	0,00	0	108.401.500,00	0,00	0
3.30.02.1.03.0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Surat Rekomendasi Perdagangan Besar/Distributor Bahan Berbahaya melalui Online Single Submission	Dokumen	10,00	0,00	0	63.002.000,00	0,00	0
3.30.02.1.03.0003	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya	Jumlah Laporan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya	Laporan	5,00	0,00	0	45.399.500,00	0,00	0
3.30.02.1.04	Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)	Jumlah Eksportir yang Aktif Menggunakan SKA	Eksportir	265,00	0,00	0	246.476.000,00	0,00	0
3.30.02.1.04.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal	Dokumen	4.000,00	0,00	0	246.476.000,00	0,00	0
3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Terbentuknya Food Station / Pusat Distribusi Pangan	%	50,00	0,00	0	1.199.856.800,00	30.785.930,00	2,57
3.30.03.1.01	Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas	jumlah kegiatan fasilitasi pembentukan Food Station	Kegiatan	7,00	0,00	0	1.199.856.800,00	30.785.930,00	2,57
3.30.03.1.01.0001	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	Unit	3,00	0,00	0	1.199.856.800,00	30.785.930,00	2,57
3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase kinerja realisasi pupuk	%	90,00	0,00	0	868.676.243,00	12.930.000,00	1,49
		Disparitas Harga Barang Pokok dan Barang Penting	%	14,00	6,84	48,86			
3.30.04.1.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi	persentase laporan harga harian melalui sistem informasi kemendag	%	100,00	24,58	24,58	279.404.000,00	10.600.000,00	3,79
3.30.04.1.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	Laporan	240,00	58,00	24,17	191.024.000,00	10.600.000,00	5,55
3.30.04.1.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Penting di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Penting Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	laporan	48,00	0,00	0	88.380.000,00	0,00	0
3.30.04.1.02	Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	persentase stabilitas komoditi bapokting yang di pantau	%	80,00	79,49	99,36	519.642.443,00	2.330.000,00	0,45
3.30.04.1.02.0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	Laporan	12,00	3,00	25	38.478.878,00	2.330.000,00	6,06
3.30.04.1.02.0002	Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Laporan	15,00	0,00	0	481.163.565,00	0,00	0
3.30.04.1.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya	Jumlah Laporan Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat DaerahProvinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya	laporan	10,00	0,00	0	69.629.800,00	0,00	0
3.30.04.1.03.0003	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	Laporan	4,00	0,00	0	36.319.600,00	0,00	0
3.30.04.1.03.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Pestisida	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Pestisida	Laporan	4,00	0,00	0	33.310.200,00	0,00	0
3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Produk daerah yang masuk pasar ekspor dan atau negara tujuan baru	Jenis	70,00	0,00	0	1.837.873.610,00	18.097.621,00	0,98

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan (Rp)	Persen (%)
3.30.05.1.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	Jumlah pelaku usaha yang didampingi untuk menjadi eksportir	PelakuUsaha	10,00	0,00	0	1.837.873.610,00	18.097.621,00	0,98
3.30.05.1.01.0001	Pameran Dagang Internasional/Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	PelakuUsaha	1,00	0,00	0	442.574.800,00	0,00	0
3.30.05.1.01.0002	Pameran Dagang Lokal	Jumlah Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pameran Dagang Lokal	PelakuUsaha	4,00	0,00	0	343.880.000,00	0,00	0
3.30.05.1.01.0003	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	PelakuUsaha	5,00	0,00	0	295.206.400,00	0,00	0
3.30.05.1.01.0004	Peningkatan Citra Produk Ekspor	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun menjadi Materi Promosi	Produk	20,00	0,00	0	756.212.410,00	18.097.621,00	2,39
3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Barang Beredar Yang Diawasi Yang Sesuai Dengan Ketentuan Perundang-Undangan	%	79,00	0,00	0	4.850.569.077,00	384.271.316,00	7,92
3.30.06.1.01	Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	jumlah konsumen dan pelaku usaha yang teredukasi	Orang	1.000,00	0,00	0	3.738.773.052,00	301.527.536,00	8,06
3.30.06.1.01.0001	Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen	Jumah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang Aktif	BPSK	3,00	0,00	0	3.004.164.492,00	301.527.536,00	10,21
3.30.06.1.01.0002	Peningkatan Hubungan Kerja dengan Lembaga Perlindungan Konsumen	Jumlah Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) yang Aktif	LPKSM	1,00	0,00	0	243.520.000,00	0,00	0
3.30.06.1.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen	Jumlah Pengaduan Konsumen yang Ditangani	Pengaduan	25,00	0,00	0	491.088.560,00	0,00	0
3.30.06.1.03	Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Barang dan Jasa yang Sesuai KetentuanKetentuan Perundang-Undangan	Persen	5,00	1,00	20	1.111.796.025,00	82.743.780,00	7,44
3.30.06.1.03.0003	Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa serta Kegiatan Perdagangan sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Barang Beredar dan Jasa serta Kegiatan Perdagangan yang Diawasi	Laporan	3,00	1,00	33,33	434.654.646,00	62.314.400,00	14,34
3.30.06.1.03.0004	Fasilitasi Penanganan terhadap Pelanggaran Atas Ketentuan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	Jumlah Kasus yang Ditangani	Kasus	3,00	1,00	33,33	677.141.379,00	20.429.380,00	3,02
3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase Produk UMKM Binaan yang Terserap di Pasar Dalam Negeri	%	90,00	0,00	0	719.357.743,00	10.481.000,00	1,46
3.30.07.1.01	Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri	Persentase pelaku usaha yang memperoleh fasilitas pengembangan produk (ikk Output)	Persen	33,33	0,00	0	208.677.127,00	3.720.000,00	1,78
3.30.07.1.01.0002	Fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri terutama produk yang dihasilkan oleh UMKM melalui kepersertaan dan partisipasi pada pameran produk dalam negeri	UMKM	8,00	0,00	0	208.677.127,00	3.720.000,00	1,78
3.30.07.1.02	Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri	Persentase pelaku usaha yang memperoleh fasilitas promosi dagang	Persen	23,43	0,00	0	63.544.000,00	1.730.000,00	2,72
3.30.07.1.02.0002	Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri terutama produk yang dihasilkan oleh UMKM melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi	UMKM	15,00	0,00	0	63.544.000,00	1.730.000,00	2,72
3.30.07.1.03	Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah Yang di Sosialisasi	Orang	800,00	0,00	0	447.136.616,00	5.031.000,00	1,13
3.30.07.1.03.0002	Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah Laporan Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Laporan	7,00	0,00	0	447.136.616,00	5.031.000,00	1,13
3.31.02	PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Pertumbuhan Industri Pengolahan Non Migas dan Non Batubara	%	5,56	0,00	0	13.226.279.341,00	219.302.973,00	1,66
3.31.02.1.01	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Jumlah pelaksanaan rencana pembangunan industri provinsi	Dokumen	5,00	0,00	0	13.226.279.341,00	219.302.973,00	1,66
3.31.02.1.01.0001	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	Dokumen	1,00	0,00	0	25.434.000,00	780.000,00	3,07
3.31.02.1.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Dokumen	1,00	0,00	0	20.076.000,00	0,00	0
3.31.02.1.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industr	Dokumen	1,00	0,00	0	28.136.000,00	0,00	0
3.31.02.1.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Dokumen	1,00	0,00	0	10.090.773.809,00	1.730.000,00	0,02
3.31.02.1.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Dokumen	4,00	0,00	0	3.025.541.532,00	216.792.973,00	7,25
3.31.02.1.01.0006	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Dokumen	1,00	0,00	0	33.822.000,00	0,00	0

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan (Rp)	Persen (%)
3.31.02.1.01.0007	Penyediaan Data dan Informasi dalam rangka Evaluasi Percepatan Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Data dan informasi dalam rangka evaluasi percepatan penyebaran dan perwilayahan industri	Laporan	1,00	0,00	0	2.496.000,00	0,00	0
3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase Pengendalian Perijinan Berusaha Sektor Industri	%	10,00	0,67	6,7	574.691.552,00	28.980.800,00	5,04
3.31.03.1.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi	Persentase jumlah hasil pemantauan	Persen	25,50	0,64	3	574.691.552,00	28.980.800,00	5,04
3.31.03.1.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Provinsi	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang lokasinya lintas Kab./Kota, dan Industri Besar sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	Dokumen	2,00	0,00	0	374.737.202,00	19.050.800,00	5,08
3.31.03.1.01.0004	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi: 1) Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Besar, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dan 2) Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah pada 1 (satu) hamparan lokasi yang sama namun lintas kabupaten/kota, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	Dokumen	3,00	0,00	0	199.954.350,00	9.930.000,00	4,97
3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase Jumlah Industri yang Terdaftar di SIINas	%	19,02	2,54	13,35	378.514.997,00	5.490.000,00	1,45
3.31.04.1.01	Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Informasi Industri yang Tersedia Kewenangan Provinsi Berbasis SIINAS	Industri	3,00	0,00	0	378.514.997,00	5.490.000,00	1,45
3.31.04.1.01.0001	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Dokumen	1,00	0,00	0	145.391.873,00	0,00	0
3.31.04.1.01.0002	Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINas	Dokumen	1,00	0,00	0	95.345.923,00	0,00	0
3.31.04.1.01.0003	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas	Dokumen	2,00	0,00	0	137.777.201,00	5.490.000,00	3,98
3.31.3.30.2.17.01.0002	UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang								
3.30.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD BPSMB)	Indeks	88,80	95,44	107,48	2.811.727.433,00	403.315.726,00	14,34
3.30.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti (UPTD BPSMB)	%	100,00	0,00	0			
3.30.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen administrasi keuangan tiap tahun (UPTD BPSMB)	Dokumen	13,00	3,00	23,08	84.120.000,00	8.660.000,00	10,29
3.30.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12,00	3,00	25	84.120.000,00	4.330.000,00	5,15
3.30.01.1.04.0001	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Pendapatan Daerah Kewenangan perangkat Daerah (UPTD BPSMB)	Dokumen	5,00	0,00	0	90.582.106,00	0,00	0
3.30.01.1.04.0004	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	Dokumen	12,00	0,00	0	20.000.000,00	0,00	0
3.30.01.1.04.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	Dokumen	12,00	0,00	0	17.400.000,00	0,00	0
3.30.01.1.04.0006	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	Laporan	12,00	0,00	0	17.400.000,00	0,00	0
3.30.01.1.04.0006	Penetapan Wajib Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah	Dokumen	12,00	0,00	0	17.400.000,00	0,00	0

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan (Rp)	Persen (%)
3.30.01.1.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan	12,00	0,00	0	18.382.106,00	0,00	0
3.30.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah SDM Aparatur yang mengikuti Diklat/bimtek/sosialisasi (UPTD BPSMB)	orang	20,00	0,00	0	194.050.000,00	0,00	0
3.30.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	20,00	0,00	0	194.050.000,00	0,00	0
3.30.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah (UPTD BPSMB)	Dokumen	7,00	0,00	0	1.280.841.575,00	32.830.000,00	2,56
3.30.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	10,00	0,00	0	12.226.640,00	0,00	0
3.30.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	6,00	0,00	0	513.528.578,00	0,00	0
3.30.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	24,00	0,00	0	262.197.701,00	0,00	0
3.30.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	9,00	1,00	11,11	44.213.856,00	305.000,00	0,69
3.30.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	12,00	0,00	0	2.344.800,00	0,00	0
3.30.01.1.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Laporan	4,00	0,00	0	5.200.000,00	0,00	0
3.30.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	14,00	0,00	0	441.130.000,00	16.110.000,00	3,65
3.30.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (UPTD BPSMB)	unit	11,00	0,00	0	121.723.160,00	78.000.000,00	64,08
3.30.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	10,00	1,00	10	121.723.160,00	39.000.000,00	32,04
3.30.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPTD BPSMB)	kegiatan	38,00	7,00	18,42	768.262.292,00	268.192.894,00	34,91
3.30.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12,00	2,00	16,67	11.035.796,00	3.000.000,00	27,18
3.30.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	14,00	3,00	21,43	186.168.000,00	34.410.447,00	18,48
3.30.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12,00	2,00	16,67	571.058.496,00	96.686.000,00	17,01
3.30.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik (UPTD BPSMB)	unit	58,00	0,00	0	272.148.300,00	15.632.832,00	5,74
3.30.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	4,00	4,00	100	77.012.000,00	5.667.066,00	7,36
3.30.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	58,00	3,00	5,17	148.257.100,00	2.149.350,00	1,45
3.30.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1,00	0,00	0	46.879.200,00	0,00	0
3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase komoditi potensial yang sesuai dengan ketentuan berlaku	%	74,00	0,00	0	1.214.817.780,00	3.000.000,00	0,25
		Mutu Layanan UPTD BPSMB	(A)%	83,00	0,00	0			
3.30.06.1.02	Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah keluhan pelanggan	≤%(P)&≤%(K)	20,50	0,00	0	1.214.817.780,00	3.000.000,00	0,25
		Jumlah laporan mutu akreditasi	laporan	12,00	0,00	0			
		Jumlah IKM yang mendapatkan pendampingan GMP	IKM	12,00	0,00	0			
		Persentase capaian penerbitan sertifikat layanan	%	100,00	0,00	0			
3.30.06.1.02.0004	Pengembangan Layanan Kalibrasi	Jumlah Sertifikat Kalibrasi yang Diterbitkan	Sertifikat	2.600,00	600,00	23,08	607.903.802,00	1.500.000,00	0,25
3.30.06.1.02.0005	Pengembangan Layanan Pengujian	Jumlah Laporan/Sertifikat Pengujian Mutu Barang yang Diterbitkan	laporan	180,00	0,00	0	255.078.670,00	0,00	0
3.30.06.1.02.0006	Pemantauan Mutu Produk	Jumlah produk potensial yang dipantau	Produk	6,00	0,00	0	57.087.600,00	0,00	0
3.30.06.1.02.0007	Pengembangan Layanan Sertifikasi/Lembaga Inspeksi	Jumlah Sertifikat Produk/person/sertifikat Inspeksi yang Diterbitkan	Sertifikat	1,00	0,00	0	294.747.708,00	0,00	0
3.31.3.30.2.17.01.0003	UPTD Pelatihan Koperasi								
2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD Pelatihan Koperasi)	Indeks	88,80	0,00	0	3.890.632.126,00	378.434.470,00	9,73
		Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti (UPTD Pelatihan Koperasi)	%	100,00	0,00	0			
2.17.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	jumlah Dokumen administrasi keuangan tiap tahun (UPTD Pelatihan Koperasi)	Dokumen	12,00	0,00	0	87.960.000,00	0,00	0
2.17.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12,00	0,00	0	87.960.000,00	0,00	0
2.17.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	jumlah Dokumen Pendapatan Daerah Kewenangan perangkat Daerah (UPTD Pelatihan Koperasi)	Dokumen	5,00	0,00	0	79.966.947,00	0,00	0
2.17.01.1.04.0001	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	Dokumen	12,00	0,00	0	11.621.021,00	0,00	0

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan (Rp)	Persen (%)
2.17.01.1.04.0004	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	Dokumen	12,00	0,00	0	19.999.594,00	0,00	0
2.17.01.1.04.0005	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	Laporan	12,00	0,00	0	8.433.696,00	0,00	0
2.17.01.1.04.0006	Penetapan Wajib Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah	Dokumen	12,00	0,00	0	19.920.000,00	0,00	0
2.17.01.1.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan	12,00	0,00	0	19.992.636,00	0,00	0
2.17.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah SDM Aparatur yang mengikuti Diklat/bimtek/sosialisasi (UPTD Pelatihan Koperasi)	orang	20,00	0,00	0	89.796.000,00	0,00	0
2.17.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	12,00	0,00	0	89.796.000,00	0,00	0
2.17.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah (UPTD Pelatihan Koperasi)	dokumen	12,00	0,00	0	579.380.505,00	0,00	0
2.17.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	10,00	0,00	0	25.991.517,00	0,00	0
2.17.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	7,00	0,00	0	89.707.837,00	0,00	0
2.17.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	12,00	0,00	0	61.027.747,00	0,00	0
2.17.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	15,00	0,00	0	39.797.942,00	0,00	0
2.17.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	4,00	0,00	0	43.899.900,00	0,00	0
2.17.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	12,00	0,00	0	2.100.000,00	0,00	0
2.17.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	24,00	0,00	0	106.927.712,00	0,00	0
2.17.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	30,00	0,00	0	209.927.850,00	0,00	0
2.17.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (UPTD Pelatihan Koperasi)	unit	12,00	0,00	0	415.131.106,00	0,00	0
2.17.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	2,00	0,00	0	97.417.390,00	0,00	0
2.17.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	85,00	0,00	0	317.713.716,00	0,00	0
2.17.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPTD Pelatihan Koperasi)	kegiatan	12,00	0,00	0	1.143.804.200,00	378.434.470,00	33,09
2.17.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	60,00	0,00	0	5.980.200,00	0,00	0
2.17.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12,00	1,00	8,33	225.501.600,00	39.877.235,00	17,68
2.17.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	12,00	0,00	0	9.922.400,00	0,00	0
2.17.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12,00	1,00	8,33	902.400.000,00	149.340.000,00	16,55
2.17.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	Unit	18,00	0,00	0	1.494.593.368,00	0,00	0
2.17.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	1,00	0,00	0	10.203.000,00	0,00	0
2.17.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	3,00	0,00	0	33.987.300,00	0,00	0
2.17.01.1.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	Unit	15,00	0,00	0	9.040.000,00	0,00	0
2.17.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	12,00	0,00	0	70.750.000,00	0,00	0
2.17.01.1.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Unit	1,00	0,00	0	14.620.000,00	0,00	0
2.17.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1,00	0,00	0	1.355.993.068,00	0,00	0
2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase koperasi dan UKM yang mengikuti pelatihan	%	4,97	0,00	0	1.935.637.985,00	0,00	0
2.17.05.1.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi Yang Mengikuti Pelatihan Jumlah UKM Yang Mengikuti Pelatihan	Koperasi UKM	260,00 480,00	0,00 0,00	0 0	1.935.637.985,00	0,00	0
2.17.05.1.01.0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	Orang	740,00	0,00	0	1.935.637.985,00	0,00	0
4.01.0.00.0.00.03.0000	Sekretariat Daerah								
4.01.0.00.0.00.03.0001	Biro Umum								
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Umum	Indeks	84,50	0,00	0	247.457.871.000,00	40.955.884.257,83	16,55

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan (Rp)	Persen (%)
4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan Sekretariat Daerah Dengan Baik	Persentase	100,00	0,00	0	126.972.340.725,00	20.721.977.546,00	16,32
4.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	683,00	0,00	0	124.762.071.313,00	20.547.487.346,00	17,66
4.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12,00	0,00	0	2.210.269.412,00	174.490.200,00	7,89
4.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah Pada Sekretariat Daerah	Persentase	100,00	0,00	0	1.275.187.205,00	101.499.032,00	7,96
4.01.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	12,00	0,00	0	617.384.240,00	40.576.700,00	6,57
4.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	12,00	0,00	0	657.802.965,00	60.922.332,00	9,26
4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Pada Biro Umum	Persentase	100,00	0,00	0	3.158.103.000,00	113.795.646,00	3,6
4.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	9,00	0,00	0	876.192.000,00	0,00	0
4.01.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	4,00	0,00	0	1.494.591.000,00	113.795.646,00	7,61
4.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	30,00	0,00	0	787.320.000,00	0,00	0
4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Umum Pada Biro Umum	Persentase	100,00	0,00	0	31.247.936.279,00	3.992.330.489,33	12,78
4.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	7,00	0,00	0	283.750.882,00	16.304.995,00	5,75
4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	8,00	0,00	0	479.989.178,00	17.385.300,00	3,62
4.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	219,00	0,00	0	9.180.997.380,00	1.341.613.631,00	16,74
4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12,00	0,00	0	769.950.305,00	135.842.610,00	17,64
4.01.01.1.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Laporan	12,00	0,00	0	1.033.965.314,00	485.430.000,00	46,95
4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	2.209,00	0,00	0	18.513.777.600,00	1.952.018.353,33	12,14
4.01.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	4,00	0,00	0	615.129.520,00	26.735.600,00	4,35
4.01.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	4,00	0,00	0	370.376.100,00	17.000.000,00	4,59
4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Sekretariat Daerah	Persentase	100,00	0,00	0	8.663.287.942,00	0,00	0
4.01.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	1,00	0,00	0	1.266.350.400,00	0,00	0
4.01.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	8,00	0,00	0	4.035.810.771,00	0,00	0
4.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	200,00	0,00	0	2.358.564.908,00	0,00	0
4.01.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	299,00	0,00	0	1.002.561.863,00	0,00	0
4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Sekretariat Daerah	Persentase	100,00	0,00	0	24.072.567.210,00	8.523.956.145,00	35,41
4.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12,00	0,00	0	51.730.000,00	12.000.000,00	23,2
4.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12,00	0,00	0	11.446.027.700,00	1.367.801.747,00	11,95
4.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	12,00	0,00	0	2.798.568.460,00	363.373.194,00	12,98
4.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12,00	0,00	0	9.776.241.050,00	6.780.781.204,00	23,29
4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Sekretariat Daerah	Persentase	100,00	0,00	0	19.929.968.562,00	1.589.505.023,00	7,98
4.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	22,00	0,00	0	275.178.000,00	60.525.000,00	21,99
4.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	211,00	0,00	0	6.174.314.930,00	1.235.742.377,00	20,01
4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	685,00	0,00	0	1.015.427.632,00	29.641.160,00	2,92

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan (Rp)	Persen (%)
4.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	13,00	0,00	0	12.183.698.000,00	247.694.416,00	2,03
4.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2.602,00	0,00	0	281.350.000,00	15.902.070,00	5,65
4.01.01.1.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase	100,00	0,00	0	13.706.966.354,00	3.580.314.180,50	26,12
4.01.01.1.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Orang/Bulan	2,00	0,00	0	250.252.232,00	0,00	0
4.01.01.1.11.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Paket	18,00	0,00	0	152.700.000,00	152.700.000,00	100
4.01.01.1.11.0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Orang	8,00	0,00	0	870.000.000,00	0,00	0
4.01.01.1.11.0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Orang/Bulan	2,00	0,00	0	12.434.014.122,00	3.427.614.180,50	23,46
4.01.01.1.12	Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Persentase Tersedianya Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Persentase	100,00	0,00	0	18.431.513.723,00	2.332.506.196,00	12,65
4.01.01.1.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	Paket	19,00	0,00	0	7.263.673.528,00	1.321.309.113,00	18,19
4.01.01.1.12.0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Paket	21,00	0,00	0	6.004.240.125,00	495.064.670,00	8,25
4.01.01.1.12.0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	Paket	29,00	0,00	0	5.163.600.070,00	516.132.413,00	10,72
4.01.0.00.0.00.03.0002	Biro Administrasi Pimpinan								
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kepuasan Pimpinan terhadap pelayanan Keprotokolanan dan Materi dan Komunikasi Pimpinan	%	100,00	0,00	0	28.401.080.000,00	4.229.425.623,00	14,89
		Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Administrasi Pimpinan	Indeks	85,50	23,01	26,91			
4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyiapan Bahan Pelaksanaan Kebijakan, Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Bidang Perencanaan dan Pelaporan, Kepegawaian dan Tata Usaha	persen	90,00	23,62	26,24	1.048.860.000,00	127.410.029,00	12,15
4.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	9,00	3,00	33,33	663.100.000,00	102.923.600,00	17,2
4.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	4,00	0,00	0	385.760.000,00	24.486.429,00	7,02
4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyiapan Bahan Pelaksanaan Kebijakan, Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Bidang Perencanaan dan Pelaporan, Kepegawaian dan Tata Usaha	%	90,00	20,25	22,5	609.763.500,00	80.180.000,00	13,15
4.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12,00	3,00	25	609.763.500,00	80.180.000,00	13,15
4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Penyiapan Bahan Pelaksanaan Kebijakan, Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Bidang Perencanaan dan Pelaporan, Kepegawaian dan Tata Usaha	%	90,00	20,25	22,5	610.370.000,00	67.866.000,00	11,12
4.01.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	2,00	1,00	50	372.770.000,00	67.866.000,00	20,12
4.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	11,00	0,00	0	237.600.000,00	0,00	0
4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyiapan Bahan Pelaksanaan Kebijakan, Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Bidang Perencanaan dan Pelaporan, Kepegawaian dan Tata Usaha	%	90,00	7,38	8,2	1.756.682.449,00	255.947.547,00	14,57
4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	10,00	1,00	10	155.043.449,00	23.415.000,00	15,1
4.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	119,00	1,00	0,84	88.082.000,00	1.080.000,00	1,37
4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	150,00	1,00	0,67	46.557.000,00	1.390.000,00	2,99
4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4,00	1,00	25	1.467.000.000,00	230.062.547,00	17,46
4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyiapan Bahan Pelaksanaan Kebijakan, Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Bidang Perencanaan dan Pelaporan, Kepegawaian dan Tata Usaha	%	90,00	0,00	0	380.092.458,00	0,00	0

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan (Rp)	Persen (%)
4.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	48,00	0,00	0	380.092.458,00	0,00	0
4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyiapan Bahan Pelaksanaan Kebijakan, Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Bidang Perencanaan dan Pelaporan, Kepegawaian dan Tata Usaha	%	90,00	10,13	11,26	1.922.119.380,00	1.781.000,00	0,09
4.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12,00	3,00	25	44.359.380,00	1.781.000,00	4,01
4.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12,00	0,00	0	1.877.760.000,00		0
4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyiapan Bahan Pelaksanaan Kebijakan, Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Bidang Perencanaan dan Pelaporan, Kepegawaian dan Tata Usaha	%	90,00	40,50	45	156.107.704,00	24.653.249,00	15,79
4.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	4,00	4,00	100	145.727.000,00	24.653.249,00	16,92
4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	11,00	0,00	0	10.380.704,00	0,00	0
4.01.01.1.13	Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	Persentase Penyiapan Bahan Pelaksanaan Kebijakan, Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi di Bidang Penyiapan Materi Pimpinan, Komunikasi Pimpinan, dan Dokumentasi Pimpinan	%	100,00	25,00	25	19.888.078.830,00	3.349.260.732,00	16,84
4.01.01.1.13.0001	Penyiapan Materi Pimpinan	Jumlah Dokumen Materi Pimpinan yang Disiapkan	Dokumen	12,00	3,00	25	513.420.950,00	138.623.108,00	29,33
4.01.01.1.13.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Laporan	12,00	3,00	25	11.103.765.054,00	1.342.330.506,00	12,21
4.01.01.1.13.0003	Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	Jumlah Laporan Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	Laporan	12,00	3,00	25	8.270.892.826,00	1.868.307.118,00	22,82
4.01.01.1.14	Fasilitasi Keprotokolan	Persentase Penyiapan Bahan Kebijakan, Pemantauan dan Evaluasi Bidang Acara, Tamu dan Hubungan Keprotokolan	%	100,00	25,00	25	2.029.005.679,00	322.327.066,00	15,89
4.01.01.1.14.0001	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	Laporan	4,00	1,00	25	954.855.940,00	212.252.117,00	24,54
4.01.01.1.14.0002	Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Laporan	2,00	1,00	50	474.000.000,00	110.074.949,00	25,95
4.01.01.1.14.0003	Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	Jumlah Laporan Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	Laporan	2,00	0,00	0	600.149.739,00	0,00	0
4.01.0.00.0.00.03.0003	Biro Hukum								
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan pada Biro Hukum	%	89,00	0,00	0	1.867.554.126,00	108.287.268,00	5,8
4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penatausahaan Keuangan SKPD yang Baik	%	100,00	0,00	0	104.362.808,00	25.980.000,00	24,89
4.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12,00	0,00	0	104.362.808,00	25.980.000,00	24,89
4.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (Biro Hukum)	%	100,00	0,00	0	8.122.808,00	0,00	0
4.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	12,00	0,00	0	8.122.808,00	0,00	0
4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Kepegawaian (Biro Hukum)	%	100,00	0,00	0	30.000.000,00	0,00	0
4.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	2,00	0,00	0	30.000.000,00	0,00	0
4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100,00	0,00	0	772.320.214,00	76.327.268,00	9,88
4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	30,00	0,00	0	81.440.743,00	16.593.568,00	20,38
4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	5,00	0,00	0	12.799.471,00	0,00	0
4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	45,00	0,00	0	678.080.000,00	59.733.700,00	9,18
4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100,00	0,00	0	126.667.000,00	0,00	0
4.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	10,00	0,00	0	126.667.000,00	0,00	0
4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Sekretariat Daerah	%	100,00	0,00	0	806.081.296,00	1.250.000,00	0,16
4.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12,00	0,00	0	5.000.000,00	1.250.000,00	25

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan (Rp)	Persen (%)
4.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12,00	0,00	0	801.081.296,00		0
4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik (Biro Hukum)	%	100,00	0,00	0	20.000.000,00	4.730.000,00	23,65
4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	28,00	0,00	0	20.000.000,00	4.730.000,00	23,65
4.01.05	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	Persentase rancangan Produk Hukum yang difasilitasi dan bantuan hukum serta Pendokumentasian Produk Hukum	%	100,00	0,00	0	4.646.990.874,00	136.100.735,00	2,93
4.01.05.1.01	Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan	Persentase penyusunan Produk Hukum Daerah	%	100,00	0,00	0	2.638.910.874,00	83.709.220,00	3,17
4.01.05.1.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan	Jumlah Produk Hukum Pengaturan yang Disusun	Dokumen	35,00	0,00	0	828.221.828,00	21.886.600,00	2,64
4.01.05.1.01.0002	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan	Jumlah Produk Hukum Penetapan yang Disusun	Dokumen	500,00	0,00	0	299.999.934,00	27.129.120,00	10,59
4.01.05.1.01.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya	Jumlah Produk Hukum yang Didokumentasi dan Dikelola Informasi Hukumnya	Dokumen	600,00	0,00	0	657.689.112,00	22.126.600,00	3,58
4.01.05.1.01.0004	Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota	Jumlah Produk Hukum Kabupaten/Kota yang Difasilitasi dan Dievaluasi	Dokumen	350,00	0,00	0	853.000.000,00	12.566.900,00	1,62
4.01.05.1.02	Fasilitasi Bantuan Hukum	Persentase Penanganan Non Litigasi, HAM dan Litigasi Kepada Unsur Pemerintah Di Prov. Kaltim Yang Diselesaikan Di Setiap Tingkat Peradilan	%	100,00	0,00	0	2.008.080.000,00	52.391.515,00	2,61
4.01.05.1.02.0001	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum	Jumlah Masalah Hukum yang Diselesaikan	Kasus	10,00	0,00	0	1.254.240.000,00	43.629.115,00	3,72
4.01.05.1.02.0002	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM	Jumlah Masalah Non Litigasi dan HAM yang Diselesaikan	Kasus	5,00	0,00	0	753.840.000,00	8.762.400,00	1,28
4.01.0.00.0.00.03.0004	Biro Organisasi								
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Organisasi	Indeks	83,00	0,00	0	3.061.965.034,00	25.028.160,00	0,82
4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran (Biro Organisasi)	%	100,00	0,00	0	136.473.425,00	500.000,00	0,37
4.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12,00	0,00	0	136.473.425,00	500.000,00	0,37
4.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (Biro Organisasi)	%	100,00	0,00	0	9.835.308,00	0,00	0
4.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	12,00	0,00	0	9.835.308,00	0,00	0
4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu (Biro Organisasi)	%	100,00	0,00	0	258.298.380,00	0,00	0
4.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	2,00	0,00	0	258.298.380,00	0,00	0
4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik (Biro Organisasi)	%	92,00	0,00	0	1.443.868.834,00	23.304.500,00	1,61
4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	3,00	0,00	0	83.714.859,00	0,00	0
4.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2,00	0,00	0	273.610.782,00	1.920.000,00	1,03
4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2,00	0,00	0	17.292.780,00	0,00	0
4.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	1,00	0,00	0	239.045.000,00	0,00	0
4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1,00	0,00	0	712.152.000,00	21.384.500,00	3,34
4.01.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	7,00	0,00	0	118.053.413,00	0,00	0
4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah (Biro Organisasi)	%	100,00	0,00	0	719.634.187,00	0,00	0
4.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	81,00	0,00	0	719.634.187,00	0,00	0
4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu (Biro Organisasi)	%	100,00	0,00	0	419.322.900,00	0,00	0
4.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1,00	0,00	0	992.400,00	0,00	0
4.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12,00	0,00	0	418.330.500,00		0
4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik (Biro Organisasi)	%	100,00	0,00	0	74.532.000,00	1.223.660,00	1,64
4.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	9,00	0,00	0	56.832.000,00	1.223.660,00	2,15
4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	12,00	0,00	0	17.700.000,00	0,00	0
		Indeks Kelembagaan	Indeks	73,00	0,00	0			
		Indeks Kematangan Organisasi	Indeks	45,00	0,00	0			

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan (Rp)	Persen (%)
4.01.02	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	Jumlah Perangkat Daerah Klaster Utama yang mendapat Nilai AKIP predikat minimal A (Memuaskan)	Perangkat Daerah	1,00	0,00	0	8.019.807.966,00	235.816.422,00	2,94
		Persentase Perangkat Daerah Klaster Pendukung yang mendapat Nilai AKIP predikat minimal BB (Sangat Baik)	%	60,00	0,00	0			
		Persentase Perangkat Daerah yang memperoleh Indeks Kepuasan Masyarakat yang nilainya >80 (B)	%	87,00	0,00	0			
4.01.02.1.01	Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Persentase Perangkat Daerah yang Menyampaikan Penilaian Indeks Kematangan Organisasi	%	100,00	0,00	0	5.089.804.107,00	95.751.922,00	1,88
		Persentase Perangkat Daerah yang Menyampaikan Penilaian Mandiri Indeks Kelembagaan	%	100,00	0,00	0			
4.01.02.1.01.0001	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	Dokumen	2,00	0,00	0	766.900.913,00	17.704.500,00	2,44
4.01.02.1.01.0002	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	Dokumen	1,00	0,00	0	3.604.004.854,00	67.100.422,00	1,97
4.01.02.1.01.0003	Penataan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan Evaluasi Jabatan	Dokumen	2,00	0,00	0	718.898.340,00	10.947.000,00	1,62
4.01.02.1.02	Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	Persentase Perangkat Daerah yang menyampaikan Laporan Rencana Aksi SAKIP Pertriwulan	%	100,00	0,00	0	2.930.003.859,00	140.064.500,00	4,78
		Persentase Perangkat Daerah yang menyampaikan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	%	90,00	0,00	0			
4.01.02.1.02.0001	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Dokumen	1,00	0,00	0	808.459.805,00	18.444.000,00	2,43
4.01.02.1.02.0002	Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Dokumen	3,00	0,00	0	826.277.771,00	46.959.000,00	6,21
4.01.02.1.02.0003	Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	Laporan	1,00	0,00	0	269.993.186,00	1.350.000,00	0,54
4.01.02.1.02.0004	Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Tata Laksana Pemerintahan	Dokumen	3,00	0,00	0	483.270.485,00	12.701.000,00	2,89
4.01.02.1.02.0005	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	Dokumen	3,00	0,00	0	542.002.612,00	60.610.500,00	12,31
4.01.0.00.0.00.03.0005	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah								
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Indeks	87,00	7,83	9	2.434.480.163,00	181.245.535,00	7,44
4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Keuangan Biro POD	%	95,00	15,68	16,51	136.800.000,00	22.140.000,00	16,18
4.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	2,00	0,33	16,7	136.800.000,00	22.140.000,00	15,76
4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Administrasi Kepegawaian Pada Perangkat Daerah	%	100,00	0,00	0	26.963.488,00	0,00	0
4.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	7,00	0,00	0	26.963.488,00	0,00	0
4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Laporan Pelaksanaan Administrasi Umum pada Perangkat Daerah	%	100,00	8,41	8,41	1.224.659.446,00	151.925.535,00	12,41
4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12,00	0,00	0	69.988.358,00	13.442.895,00	19,21
4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12,00	4,44	37	54.671.328,00	19.500.000,00	35,67
4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1,00	0,00	0	1.099.999.760,00	118.982.640,00	6,43
4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Jumlah Unit pengadaan barang milik Daerah yang terealisasi pada Biro POD	%	100,00	0,00	0	40.982.057,00	0,00	0
4.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	5,00	0,00	0	40.982.057,00	0,00	0
4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Biro POD	%	100,00	100,00	100	955.575.172,00	4.900.000,00	0,51
4.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1,00	0,00	0	5.091.500,00	4.900.000,00	96,24
4.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12,00	0,00	0	950.483.672,00		0
4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi Baik (Biro POD)	%	100,00	5,00	5	49.500.000,00	2.280.000,00	4,61
4.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	10,00	0,00	0	36.566.000,00	0,00	0

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan (Rp)	Persen (%)
4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	18,00	0,00	0	12.934.000,00	2.280.000,00	17,63
4.01.03	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	Persentase kerja sama daerah yang difasilitasi	%	100,00	0,00	0	4.713.949.837,00	4.185.844.331,00	88,8
4.01.03.1.01	Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	Persentase Kegiatan Koordinasi, Fasilitasi dan Konsultasi dibidang Pemerintahan	%	100,00	0,00	0	1.305.007.150,00	24.116.400,00	1,85
4.01.03.1.01.0002	Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	Dokumen	3,00	0,00	0	805.007.350,00	15.850.400,00	0,49
4.01.03.1.01.0003	Fasilitasi Penataan Wilayah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Wilayah	Dokumen	3,00	0,00	0	499.999.800,00	8.266.000,00	1,96
4.01.03.1.02	Pelaksanaan Otonomi Daerah	Persentase Kegiatan Koordinasi, Fasilitasi dan Konsultasi di Bidang Pelaksanaan Otonomi Daerah	%	95,00	53,20	56	1.849.956.718,00	4.071.259.679,00	220,07
4.01.03.1.02.0001	Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	Dokumen	3,00	0,60	20	449.996.000,00	364.296.660,00	18,48
4.01.03.1.02.0002	Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan yang Dilaksanakan	Dokumen	4,00	0,00	0	799.981.406,00	3.419.240.000,00	59,45
4.01.03.1.02.0003	Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	Laporan	3,00	1,65	55	599.979.312,00	287.723.019,00	52,22
4.01.03.1.03	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Persentase Usulan kerjasama yang ditindaklanjuti	%	100,00	0,00	0	1.558.985.969,00	90.468.252,00	5,8
4.01.03.1.03.0001	Fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah	Jumlah Kerja Sama Antar Pemerintah yang Difasilitasi	Dokumen	30,00	3,60	12	608.996.000,00	69.489.182,00	11,41
4.01.03.1.03.0002	Fasilitasi Kerja Sama Badan Usaha/Swasta	Jumlah Kerja Sama Badan Usaha/Swasta yang Difasilitasi	Dokumen	20,00	1,00	5	449.992.771,00	17.019.070,00	3,78
4.01.03.1.03.0003	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Kerja Sama yang Dievaluasi	Laporan	3,00	0,03	1	499.997.198,00	3.960.000,00	0,79
4.01.0.00.0.00.03.0006	Biro Kesejahteraan Rakyat								
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Kesejahteraan Rakyat	Indeks	100,00	0,00	0	2.928.846.788,00	56.922.866,00	1,94
4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Keuangan	%	93,00	0,00	0	319.047.430,00	0,00	0
4.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12,00	0,00	0	299.127.430,00	0,00	0
4.01.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	12,00	0,00	0	19.920.000,00	0,00	0
4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%	100,00	0,00	0	36.967.320,00	0,00	0
4.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	6,00	0,00	0	36.967.320,00	0,00	0
4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Umum	Bulan	12,00	0,00	0	1.150.240.482,00	35.054.660,00	3,05
4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	6,00	0,00	0	472.518.647,00	0,00	0
4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12,00	0,00	0	58.000.000,00	0,00	0
4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12,00	0,00	0	619.721.835,00	35.054.660,00	6,28
4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Pelaksanaan Jasa Penunjang	Bulan	12,00	0,00	0	1.248.963.956,00	0,00	0
4.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12,00	0,00	0	20.000.000,00	0,00	0
4.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12,00	0,00	0	1.228.963.956,00		0
4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100,00	0,00	0	173.627.600,00	21.868.206,00	12,59
4.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	13,00	0,00	0	133.838.000,00	21.268.806,00	15,89
4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	38,00	0,00	0	39.789.600,00	599.400,00	1,51
4.01.04	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase perumusan kebijakan di bidang kesra yang difasilitasi	%	100,00	0,00	0	103.877.419.212,00	50.981.017.708,00	49,08
4.01.04.1.01	Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	Persentase bahan koordinasi lembaga Bina Spiritual dan Sarana Prasarana keagamaan yang difasilitasi	%	100,00	0,00	0	95.555.932.006,00	50.746.437.798,00	53,11
4.01.04.1.01.0001	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola	Unit	250,00	0,00	0	93.387.625.920,00	50.294.125.940,00	53,93
4.01.04.1.01.0002	Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi	Lembaga	10,00	0,00	0	2.168.306.086,00	452.311.858,00	9,88
4.01.04.1.02	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	Persentase rumusan kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat pelayanan dasar yang ditindaklanjuti	%	100,00	0,00	0	4.599.322.025,00	210.607.510,00	4,58
4.01.04.1.02.0001	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	Dokumen	12,00	0,00	0	3.199.904.405,00	201.485.400,00	6,96

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan (Rp)	Persen (%)
4.01.04.1.02.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	Dokumen	12,00	0,00	0	699.530.320,00	0,00	0
4.01.04.1.02.0003	Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	Dokumen	12,00	0,00	0	699.887.300,00	9.122.110,00	1,3
4.01.04.1.03	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	Persentase rumusan kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar yang ditindaklanjuti	%	100,00	0,00	0	3.722.165.181,00	23.972.400,00	0,64
4.01.04.1.03.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	Dokumen	12,00	0,00	0	1.705.985.984,00	9.965.000,00	0,61
4.01.04.1.03.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Dokumen	12,00	0,00	0	1.337.150.297,00	8.360.000,00	0,67
4.01.04.1.03.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan	Dokumen	12,00	0,00	0	679.028.900,00	5.647.400,00	0,88
4.01.0.00.0.00.03.0007	Biro Perekonomian								
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Perekonomian	Indeks	82,00	0,00	0	2.566.169.898,00	0,00	0
4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Perekonomian	Indeks	82,00	0,00	0	130.914.000,00	0,00	0
4.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12,00	0,00	0	130.914.000,00		0
4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Perekonomian	Indeks	81,00	0,00	0	99.361.985,00	0,00	0
4.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	41,00	0,00	0	36.457.500,00		0
4.01.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	25,00	0,00	0	5.397.500,00		0
4.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	41,00	0,00	0	57.506.985,00		0
4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Perekonomian	Indeks	82,00	0,00	0	699.611.784,00	0,00	0
4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	50,00	0,00	0	47.580.346,00		0
4.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12,00	0,00	0	14.479.500,00		0
4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2,00	0,00	0	24.089.198,00		0
4.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	12,00	0,00	0	7.806.300,00		0
4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	130,00	0,00	0	605.656.440,00		0
4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Perekonomian	Indeks	82,00	0,00	0	190.034.617,00	0,00	0
4.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	1,00	0,00	0	7.134.234,00		0
4.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	10,00	0,00	0	182.900.383,00		0
4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Perekonomian	Indeks	82,00	0,00	0	1.394.095.312,00	0,00	0
4.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1,00	0,00	0	14.425.264,00		0
4.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					1.379.670.048,00		0	
4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Perekonomian	Indeks	82,00	0,00	0	52.152.200,00	0,00	0
4.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	1,00	0,00	0	28.712.200,00		0
4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	25,00	0,00	0	23.440.000,00		0

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan (Rp)	Persen (%)
4.01.06	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Perumusan Kebijakan Daerah di Bidang Perekonomian yang difasilitasi	%	100,00	0,00	0	15.019.253.102,00	0,00	0
4.01.06.1.01	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	Persentase Perumusan Kebijakan Daerah di Bidang Perekonomian yang difasilitasi	%	100,00	0,00	0	1.073.891.105,00	0,00	0
4.01.06.1.01.0001	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	Dokumen	5,00	0,00	0	755.885.000,00		0
4.01.06.1.01.0002	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	Dokumen	2,00	0,00	0	318.006.105,00		0
4.01.06.1.02	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	Persentase Perumusan Kebijakan Daerah di Bidang Perekonomian yang difasilitasi	%	95,00	0,00	0	11.972.951.583,00	0,00	0
4.01.06.1.02.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Dokumen	6,00	0,00	0	11.500.604.990,00		0
4.01.06.1.02.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Dokumen	2,00	0,00	0	240.163.455,00		0
4.01.06.1.02.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Dokumen	2,00	0,00	0	232.183.138,00		0
4.01.06.1.03	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	Persentase Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	%	95,00	0,00	0	1.972.410.414,00	0,00	0
4.01.06.1.03.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	Dokumen	10,00	0,00	0	1.310.382.420,00		0
4.01.06.1.03.0002	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	Dokumen	1,00	0,00	0	296.997.120,00		0
4.01.06.1.03.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	Dokumen	1,00	0,00	0	365.030.874,00		0
4.01.0.00.0.00.03.0008	Biro Administrasi Pembangunan								
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Administrasi Pembangunan	Indeks	83,00	21,93	26,42	6.166.047.865,00	190.322.862,00	3,09
4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Biro Administrasi Pembangunan)	%	100,00	4,77	4,77	260.000.000,00	24.720.000,00	9,51
4.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	1,00	0,00	0	260.000.000,00	24.720.000,00	9,51
4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (Biro Administrasi Pembangunan)	%	100,00	0,00	0	238.218.487,00	0,00	0
4.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	2,00	0,00	0	72.115.050,00	0,00	0
4.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	15,00	0,00	0	153.453.437,00	0,00	0
4.01.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	15,00	0,00	0	12.650.000,00	0,00	0
4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah (Biro Administrasi Pembangunan)	%	82,00	0,00	0	2.959.154.465,00	88.488.362,00	2,99
4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	6,00	0,00	0	140.729.464,00	0,00	0
4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1,00	0,00	0	10.000.000,00	3.000.000,00	30
4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4,00	0,00	0	2.808.425.001,00	85.488.362,00	3,94
X.XX.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Biro Adbang (Biro Administrasi Pembangunan)	%	92,00	0,00	0	292.148.457,00	0,00	0
X.XX.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	24,00	0,00	0	292.148.457,00	0,00	0
4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Biro Administrasi Pembangunan)	%	82,00	0,00	0	2.156.550.456,00	74.958.500,00	3,48
4.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1,00	0,00	0	2.000.000,00	0,00	0

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan (Rp)	Persen (%)
4.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1,00	0,00	23	324.727.100,00	74.958.500,00	23,08
4.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						1.829.823.356,00		0
4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam Kondisi Baik (Biro Administrasi Pembangunan)	%	85,00	7,00	8,24	259.976.000,00	2.156.000,00	0,83
4.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	2,00	0,00	0	55.136.000,00	0,00	0
4.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	5,00	1,00	20	176.440.000,00	646.000,00	0,37
4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	40,00	3,00	7,5	28.400.000,00	1.510.000,00	5,32
4.01.08	PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	Persentase rekomendasi pelaksanaan pembangunan daerah oleh perangkat daerah	%	85,00	0,00	0	7.806.230.135,00	350.774.200,00	4,49
4.01.08.1.01	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Persentase Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	%	85,00	0,00	0	4.720.253.928,00	346.368.000,00	7,34
4.01.08.1.01.0001	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	Persentase Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	%	85,00	0,00	0			
4.01.08.1.01.0001	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	Laporan	4,00	1,00	25	777.829.520,00	49.488.600,00	6,51
4.01.08.1.01.0002	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	Laporan	4,00	0,00	0	600.000.000,00	0,00	0
4.01.08.1.01.0003	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	Laporan	6,00	1,00	16,67	3.342.424.408,00	296.879.400,00	9,04
4.01.08.1.02	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Persentase Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	%	85,00	0,15	0,18	3.085.976.207,00	4.406.200,00	0,14
4.01.08.1.02.0001	Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah yang Disediakan	Dokumen	1,00	0,00	0	599.000.000,00	0,00	0
4.01.08.1.02.0002	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Laporan	1,00	0,00	0	1.141.714.000,00	0,00	0
4.01.08.1.02.0003	Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	Dokumen	1,00	0,33	33	1.345.262.207,00	4.406.200,00	0,33
4.01.0.00.0.00.03.0009	Biro Pengadaan Barang dan Jasa								
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Pengadaan Barang dan Jasa	Indeks	78,00	0,00	0	5.782.263.297,00	171.284.636,00	2,96
4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran yang dilaksanakan (Biro PBJ)	%	88,00	15,00	17,05	141.980.013,00	32.565.000,00	22,94
4.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	1,00	0,00	0	136.554.000,00	31.380.000,00	22,98
4.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12,00	3,00	25	5.426.013,00	1.185.000,00	21,84
4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi (Biro PBJ)	%	60,00	0,00	0	334.971.414,00	0,00	0
4.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1,00	0,00	0	86.121.414,00	0,00	0
4.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	20,00	0,00	0	184.900.000,00	0,00	0
4.01.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	13,00	0,00	0	63.950.000,00	0,00	0
4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum yang dilaksanakan (Biro PBJ)	%	83,00	5,00	6,02	944.013.830,00	57.492.636,00	6,09
4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	30,00	0,00	0	193.735.200,00	9.720.000,00	5,02
4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2,00	0,00	0	49.369.730,00	0,00	0
4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	40,00	5,00	12,5	700.908.900,00	47.772.636,00	7,46
4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase prasarana kantor yang terpenuhi (Biro PBJ)	%	88,00	0,00	0	2.436.208.652,00	0,00	0
4.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	40,00	0,00	0	2.436.208.652,00	0,00	0
4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya pelayanan Administrasi Umum (Biro PBJ)	%	83,00	15,00	18,07	1.732.461.388,00	78.652.000,00	4,54

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan (Rp)	Persen (%)
4.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12,00	0,00	0	11.884.424,00	0,00	0
4.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12,00	3,00	25	199.184.700,00	31.222.000,00	15,67
4.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12,00	3,00	25	1.521.392.264,00	47.430.000,00	15,63
4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik (Biro PBJ)	%	83,00	0,00	0	192.628.000,00	2.575.000,00	1,34
4.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	1,00	0,00	0	13.568.000,00	0,00	0
4.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	7,00	0,00	0	122.260.000,00	0,00	0
4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	80,00	0,00	0	56.800.000,00	2.575.000,00	4,53
4.01.07	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	Tingkat kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Persentase transaksi e-purchasing terhadap pengadaan melalui penyedia	Level %	3,00 35,00	0,00 0,00	0 0	8.931.950.703,00	578.943.163,00	6,48
4.01.07.1.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Variabel Domain Proses yang dilaksanakan	Variabel	4,00	0,00	0	3.911.195.488,00	403.121.887,00	10,31
4.01.07.1.01.0001	Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Hasil Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	Laporan	1,00	0,00	0	417.849.176,00	81.415.387,00	20,33
4.01.07.1.01.0002	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	Laporan	1,00	0,00	0	2.495.400.312,00	321.706.500,00	13,21
4.01.07.1.01.0003	Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	Laporan	1,00	0,00	0	997.946.000,00	0,00	0
4.01.07.1.02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Variabel Domain Sistem Informasi yang dilaksanakan	variabel	1,00	0,00	0	2.259.112.600,00	12.452.500,00	0,55
4.01.07.1.02.0001	Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Laporan Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	Laporan	1,00	0,00	0	815.673.800,00	9.692.500,00	1,23
4.01.07.1.02.0002	Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Laporan	1,00	0,00	0	604.086.800,00	0,00	0
4.01.07.1.02.0003	Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Laporan	1,00	0,00	0	839.352.000,00	2.760.000,00	0,35
4.01.07.1.03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Variabel Domain Kelembagaan dan SDM yang dilaksanakan	Variabel	4,00	0,00	0	2.761.642.615,00	163.368.776,00	5,92
4.01.07.1.03.0001	Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah O+A2922:12929rang yang Mengikuti Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	Orang	250,00	30,00	12	869.315.900,00	35.057.550,00	4,3
4.01.07.1.03.0002	Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	Dokumen	1,00	0,00	0	1.185.339.400,00	19.603.560,00	1,73
4.01.07.1.03.0003	Pendampingan, konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	Dokumen	1,00	0,00	0	706.987.315,00	108.707.666,00	16,07
4.02.0.00.0.00.04.0000	Sekretariat DPRD								
4.02.0.00.0.00.04.0000	Sekretariat DPRD								
4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	Indeks	90,00	33,70	37,44	163.270.489.072,00	38.433.176.043,00	23,54
4.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%	100,00	25,00	25	1.085.968.033,00	284.781.500,00	26,22
4.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2,00	0,00	50	375.792.779,00	56.870.000,00	15,13
4.02.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	2,00	0,00	0	277.334.186,00	56.258.100,00	20,29
4.02.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	2,00	1,00	50	8.577.500,00	0,00	0
4.02.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	2,00	1,00	50	212.855.279,00	92.603.000,00	43,51
4.02.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	2,00	0,00	0	211.408.289,00	79.050.400,00	37,39
4.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan perangkat daerah	%	100,00	25,00	25	36.168.486.817,00	3.592.886.154,00	9,93
4.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	980,00	272,00	27,76	35.146.359.332,00	3.379.447.704,00	22,19
4.02.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12,00	3,00	25	470.720.000,00	71.940.000,00	15,28
4.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12,00	3,00	25	227.656.985,00	97.400.150,00	42,78

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan (Rp)	Persen (%)
4.02.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	2,00	1,00	50	14.416.000,00	0,00	0
4.02.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	12,00	3,00	25	309.334.500,00	44.098.300,00	14,26
4.02.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase barang milik daerah pada perangkat daerah yang dipelihara	%	100,00	25,00	25	952.084.400,00	184.000.000,00	19,33
4.02.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	2,00	0,00	0	74.923.800,00	0,00	0
4.02.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	4,00	2,00	50	773.214.000,00	184.000.000,00	23,8
4.02.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	4,00	0,00	0	103.946.600,00	0,00	0
4.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	%	100,00	25,00	25	2.023.734.371,00	65.323.600,00	3,23
4.02.01.1.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Unit	300,00	0,00	0	135.465.751,00	0,00	0
4.02.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1,00	0,00	0	722.889.880,00	0,00	0
4.02.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	2,00	1,00	50	198.096.000,00	6.300.000,00	3,18
4.02.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	1,00	0,00	0	41.849.780,00	4.403.600,00	10,52
4.02.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	1,00	0,00	0	26.229.000,00	0,00	0
4.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	41,00	4,00	9,76	487.832.560,00	0,00	0
4.02.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	60,00	20,00	33,33	257.237.400,00	54.620.000,00	21,23
4.02.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	10,00	0,00	0	154.134.000,00	0,00	0
4.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah	%	100,00	25,00	25	4.928.948.827,00	1.094.995.835,00	22,22
4.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	31,00	9,00	29,03	191.991.328,00	47.200.000,00	24,58
4.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12,00	3,00	25	1.668.034.421,00	300.575.000,00	18,02
4.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	5,00	0,00	0	1.345.257.175,00	592.460.835,00	27,62
4.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	10,00	2,00	20	453.291.749,00	0,00	0
4.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12,00	3,00	25	461.772.715,00	95.750.000,00	20,74
4.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	1,00	0,00	0	6.481.140,00	0,00	0
4.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1,00	0,00	0	537.345.779,00	0,00	0
4.02.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	3,00	1,00	33,33	264.774.520,00	59.010.000,00	22,29
4.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	%	100,00	0,00	0	10.188.179.440,00	0,00	0
4.02.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	4,00	0,00	0	2.659.819.178,00	0,00	0
4.02.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	2,00	0,00	0	869.952.214,00	0,00	0
4.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	167,00	0,00	0	4.091.623.748,00	0,00	0
4.02.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	2,00	0,00	0	2.566.784.300,00	0,00	0
4.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan	%	100,00	25,00	25	14.998.293.220,00	6.826.530.492,00	45,52
4.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12,00	3,00	25	55.626.400,00	12.470.000,00	22,42
4.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12,00	3,00	25	6.675.763.200,00	1.352.435.806,00	15,71
4.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	4,00	0,00	0	198.983.620,00	0,00	0

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan (Rp)	Persen (%)
4.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12,00	3,00	25	8.067.920.000,00	5.461.624.686,00	18,27
4.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara	%	100,00	25,00	25	9.213.758.725,00	4.094.923.882,00	44,44
4.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	10,00	6,00	60	723.356.000,00	251.766.207,00	20,59
4.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	83,00	20,00	24,1	1.899.405.500,00	565.095.000,00	23,62
4.02.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	1,00	0,00	0	9.750.000,00	0,00	0
4.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	1.456,00	364,00	25	2.793.674.000,00	756.470.000,00	22,96
4.02.01.1.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Unit	6,00	6,00	100	1.728.044.825,00	1.605.049.900,00	40,85
4.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	7,00	1,00	14,29	1.166.434.000,00	436.630.000,00	33,11
4.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	6,00	2,00	33,33	740.094.400,00	479.912.775,00	33,33
4.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1,00	0,00	0	153.000.000,00	0,00	0
4.02.01.1.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD	%	100,00	25,00	25	53.963.588.879,00	13.028.406.590,00	24,14
4.02.01.1.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	Orang/Bulan	55,00	55,00	100	52.768.711.529,00	12.996.414.240,00	24,54
4.02.01.1.15.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	Paket	3,00	0,00	0	618.927.350,00	0,00	0
4.02.01.1.15.0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	Orang	55,00	0,00	0	575.950.000,00	31.992.350,00	5,55
4.02.01.1.16	Layanan Administrasi DPRD	Persentase layanan administrasi DPRD	%	100,00	25,00	25	29.747.446.360,00	9.261.327.990,00	31,13
4.02.01.1.16.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Dokumen	4,00	1,00	25	882.347.260,00	200.101.100,00	22,68
4.02.01.1.16.0002	Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	Laporan	12,00	3,00	25	187.474.500,00	39.130.000,00	20,87
4.02.01.1.16.0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Laporan	12,00	3,00	25	14.580.524.600,00	3.178.711.890,00	21,8
4.02.01.1.16.0004	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	Paket	4,00	4,00	100	14.097.100.000,00	5.843.385.000,00	41,45
4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Indeks Kepuasan DPRD terhadap layanan Penyusunan Anggaran dan Penyelenggaraan Pengawasan	indeks	84,00	0,00	0	283.437.893.928,00	34.699.332.882,00	12,24
		Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	%	100,00	0,00	0			
		Indeks Kepuasan DPRD terhadap layanan Persidangan dan penyusunan perundang-undangan	Indeks	84,00	0,00	0			
		Indeks Kepuasan DPRD terhadap layanan Umum dan Keuangan	Indeks	84,00	0,00	0			
4.02.02.1.01	Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	Persentase Perda dan Peraturan DPRD yang difasilitasi	%	100,00	25,00	25	41.857.362.986,00	8.901.827.979,00	21,27
4.02.02.1.01.0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Dokumen	1,00	0,00	0	6.976.149.380,00	364.867.371,00	6,21
4.02.02.1.01.0002	Pembahasan Rancangan Perda	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Perda	Dokumen	10,00	0,00	0	2.350.801.620,00	0,00	0
4.02.02.1.01.0003	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangn	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangn	Dokumen	3,00	0,00	0	501.002.364,00	0,00	0
4.02.02.1.01.0004	Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	Dokumen	3,00	0,00	0	590.577.822,00	0,00	0
4.02.02.1.01.0005	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	Dokumen	1,00	0,00	0	364.500.000,00	0,00	0
4.02.02.1.01.0006	Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah	Orang	66.000,00	19.200,00	29,09	31.074.331.800,00	8.536.960.608,00	28,24
4.02.02.1.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persentase Rapat Pembahasan Kebijakan Anggaran yang difasilitasi	%	100,00	0,00	0	8.343.318.500,00	649.221.490,00	7,78
4.02.02.1.02.0001	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	Dokumen	1,00	0,00	0	1.113.510.000,00	0,00	0
4.02.02.1.02.0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Dokumen	1,00	0,00	0	948.363.000,00	0,00	0
4.02.02.1.02.0003	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	Dokumen	1,00	0,00	0	3.870.030.000,00	356.929.248,00	11,41
4.02.02.1.02.0004	Pembahasan Perubahan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan APBD	Dokumen	1,00	0,00	0	965.041.500,00	0,00	0
4.02.02.1.02.0005	Pembahasan Laporan Semester	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	Dokumen	1,00	0,00	0	8.964.000,00	0,00	0

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan (Rp)	Persen (%)
4.02.02.1.02.0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Dokumen	1,00	0,00	0	1.437.410.000,00	292.292.242,00	31,37
4.02.02.1.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase kegiatan pengawasan oleh DPRD yang difasilitasi	%	100,00	25,00	25	34.239.669.502,00	4.025.364.056,00	11,76
4.02.02.1.03.0001	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Laporan	12,00	3,00	25	6.171.813.336,00	672.790.249,00	12,28
4.02.02.1.03.0002	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Laporan	12,00	3,00	25	6.998.542.352,00	725.467.807,00	12,37
4.02.02.1.03.0003	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Laporan	12,00	3,00	25	4.320.142.352,00	515.301.371,00	14,43
4.02.02.1.03.0004	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Laporan	12,00	3,00	25	5.441.542.352,00	621.772.069,00	13,53
4.02.02.1.03.0006	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Dokumen	1,00	0,00	0	2.040.025.000,00	0,00	0
4.02.02.1.03.0007	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	Dokumen	1,00	0,00	0	6.031.340.680,00	1.430.742.000,00	23,72
4.02.02.1.03.0008	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Dokumen	1,00	0,00	0	3.236.263.430,00	59.290.560,00	1,99
4.02.02.1.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase Anggota Dewan yang difasilitasi dalam peningkatan kapasitas	%	100,00	25,00	25	112.392.246.888,00	10.619.611.702,00	9,45
4.02.02.1.04.0002	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	Dokumen	9,00	2,00	22,22	4.290.444.000,00	133.393.768,00	3,11
4.02.02.1.04.0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Orang	22,00	22,00	100	2.146.569.288,00	405.000.000,00	12,58
4.02.02.1.04.0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	Orang	9,00	7,00	77,78	684.069.288,00	105.000.000,00	15,35
4.02.02.1.04.0006	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Dokumen	2,00	0,00	0	32.027.603.800,00	8.798.948.456,00	28,22
4.02.02.1.04.0007	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	Dokumen	1,00	0,00	0	2.663.850.000,00	901.849.978,00	45,5
4.02.02.1.04.0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Dokumen	55,00	3,00	5,45	70.579.710.512,00	275.419.500,00	0,35
4.02.02.1.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase penghimpunan aspirasi masyarakat oleh DPRD yang difasilitasi	%	100,00	30,00	30	34.477.763.636,00	8.460.329.175,00	24,54
4.02.02.1.05.0001	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	Laporan	48,00	12,00	25	5.464.074.576,00	466.266.691,00	8,53
4.02.02.1.05.0002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	Dokumen	1,00	0,00	0	2.999.888.000,00	787.901.102,00	40,42
4.02.02.1.05.0003	Pelaksanaan Reses	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	Dokumen	3,00	1,00	33,33	26.013.801.060,00	7.206.161.382,00	27,7
4.02.02.1.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Persentase pelaksanaan dan pengawasan kode etik DPRD yang difasilitasi	%	100,00	25,00	25	2.686.142.478,00	284.296.999,00	10,58
4.02.02.1.06.0001	Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	Dokumen	1,00	0,00	0	527.032.784,00	0,00	0
4.02.02.1.06.0002	Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	Laporan	1,00	0,00	0	2.159.109.694,00	284.296.999,00	17,88
4.02.02.1.07	Pembahasan Kerja Sama Daerah	Persentase kerjasama daerah yang dibahas	%	100,00	25,00	25	2.108.745.570,00	280.649.109,00	13,31
4.02.02.1.07.0001	Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	Dokumen	4,00	0,00	0	678.908.382,00	15.595.050,00	2,65
4.02.02.1.07.0002	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun	Dokumen	12,00	3,00	25	1.429.837.188,00	265.054.059,00	18,54
4.02.02.1.08	Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase Pelaksanaan Tugas DPRD yang difasilitasi	%	100,00	25,00	25	47.332.644.368,00	1.478.032.372,00	3,12
4.02.02.1.08.0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Dokumen	12,00	3,00	25	18.476.438.576,00	559.250.265,00	7,17
4.02.02.1.08.0002	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	Laporan	3,00	0,00	0	77.018.400,00	0,00	0
4.02.02.1.08.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Dokumen	6,00	1,02	17	6.905.517.288,00	407.687.921,00	5,9
4.02.02.1.08.0004	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Dokumen	12,00	3,00	25	749.517.288,00	39.150.700,00	5,22
4.02.02.1.08.0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	Dokumen	7,00	0,00	0	21.124.152.816,00	471.943.486,00	2,89
5.01.0.00.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah								
5.01.0.00.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah								
5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	Indeks	82,00	25,31	30,87	50.773.541.288,00	7.281.581.043,00	14,34
		Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti	%	100,00	100,00	100			
5.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang Ditetapkan Tepat Waktu	%	98,00	40,00	41	843.734.038,00	69.139.200,00	8,19
5.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	3,00	1,00	33,33	343.734.438,00	69.139.200,00	20,11
5.01.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	2,00	1,00	50	54.999.600,00	0,00	0

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan (Rp)	Persen (%)
5.01.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	2,00	1,00	50	55.000.000,00	0,00	0
5.01.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	2,00	1,00	50	220.000.000,00	0,00	0
5.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	1,00	0,00	0	170.000.000,00	0,00	0
5.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu	%	100,00	100,00	100	33.079.919.491,00	4.856.406.239,00	14,68
5.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	155,00	84,00	54,19	31.904.444.944,00	4.701.144.239,00	16,95
5.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	1,00	0,00	0	1.140.541.305,00	155.262.000,00	14,13
5.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	1,00	0,00	0	9.993.696,00	0,00	0
5.01.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	1,00	0,00	0	4.984.252,00	0,00	0
5.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	31,00	4,00	12,9	9.991.034,00	0,00	0
5.01.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	2,00	0,00	0	9.964.260,00	0,00	0
5.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah yang diselesaikan tepat waktu	Dokumen	7,00	0,00	0	156.161.520,00	9.330.000,00	5,97
5.01.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1,00	0,00	0	15.312.380,00	0,00	0
5.01.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1,00	0,00	0	57.210.380,00	0,00	0
5.01.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1,00	0,00	0	73.370.380,00	8.610.000,00	11,73
5.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	4,00	1,00	25	10.268.380,00	720.000,00	7,01
5.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	%	100,00	2,59	2,59	1.653.426.104,00	20.546.000,00	1,24
5.01.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	1,00	0,00	0	46.510.380,00	10.281.200,00	22,11
5.01.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	1,00	0,00	0	48.310.380,00	9.094.800,00	18,83
5.01.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	1,00	0,00	0	48.054.584,00	0,00	0
5.01.01.1.05.0007	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Laporan	1,00	0,00	0	22.510.380,00	0,00	0
5.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	116,00	3,00	2,59	1.488.040.380,00	1.170.000,00	0,1
5.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum yang disediakan tepat waktu	%	97,00	100,00	103,09	2.693.173.667,00	250.040.950,00	9,28
5.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	8,00	5,00	62,5	101.087.407,00	16.780.000,00	16,6
5.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	6,00	5,00	83,33	220.573.079,00	45.159.000,00	20,47
5.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	2,00	0,00	0	7.601.785,00	0,00	0
5.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	5,00	2,00	40	401.945.874,00	64.980.000,00	16,17
5.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	7,00	3,00	42,86	176.056.353,00	14.700.000,00	8,35
5.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	1,00	0,00	0	60.310.380,00	9.589.000,00	15,9
5.01.01.1.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Laporan	1,00	0,00	0	40.312.649,00	8.769.500,00	21,75
5.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1,00	0,00	0	1.452.310.380,00	82.698.650,00	5,69
5.01.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1,00	0,00	0	108.940.380,00	7.364.800,00	6,76

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan (Rp)	Persen (%)
5.01.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	12,00	0,00	0	124.035.380,00	0,00	0
5.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen hasil Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dokumen	1,00	0,00	0	3.826.161.971,00	0,00	0
5.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	2,00	0,00	0	29.085.500,00	0,00	0
5.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	27,00	0,00	0	554.830.560,00	0,00	0
5.01.01.1.07.0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	Unit	1,00	0,00	0	36.310.380,00	0,00	0
5.01.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1,00	0,00	0	3.155.810.380,00	0,00	0
5.01.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	2,00	0,00	0	50.125.151,00	0,00	0
5.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan tepat waktu	%	100,00	100,00	100	4.167.192.386,00	1.802.811.655,00	43,26
5.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1,00	0,00	0	15.312.080,00	15.000.000,00	97,96
5.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1,00	0,00	0	1.560.488.796,00	205.291.255,00	13,16
5.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1,00	0,00	0	2.591.391.510,00	1.582.520.400,00	23,34
5.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	%	94,00	100,00	106,38	4.353.772.111,00	273.306.999,00	6,28
5.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	2,00	2,00	100	65.661.820,00	21.410.999,00	32,61
5.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	36,00	36,00	100	863.740.271,00	182.752.000,00	21,16
5.01.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	27,00	0,00	0	19.310.380,00	0,00	0
5.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	135,00	21,00	15,56	144.675.380,00	19.260.000,00	13,31
5.01.01.1.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Unit	20,00	1,00	5	106.161.880,00	855.000,00	0,81
5.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2,00	1,00	50	2.743.512.000,00	7.900.000,00	0,29
5.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	130,00	76,00	58,46	410.710.380,00	41.129.000,00	10,01
5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Tingkat Kesesuaian Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Antar Periode Perencanaan	%	100,00	0,00	0	9.036.581.629,00	522.651.420,00	5,78
		Tingkat Kesesuaian Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Antar Level Pemerintahan	%	100,00	0,00	0			
		Persentase Rekomendasi Hasil Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah yang Ditindaklanjuti	%	100,00	0,00	0			
5.01.02.1.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah dokumen rencana pembangunan daerah yang ditetapkan tepat waktu	Dokumen	3,00	0,00	0	4.292.153.752,00	260.775.220,00	6,08
5.01.02.1.01.0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	BeritaAcara	2,00	2,00	100	351.174.055,00	3.325.000,00	0,95
5.01.02.1.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	Jumlah Berita Acara Musrenbang Provinsi	BeritaAcara	2,00	0,00	0	1.155.694.120,00	0,00	0
5.01.02.1.01.0006	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	Dokumen	3,00	0,00	0	2.785.285.577,00	257.450.220,00	9,49
5.01.02.1.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Analisis Data dan Informasi yang Digunakan dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	DatadanInformasi	120,00	0,00	0	1.271.266.011,00	16.516.000,00	1,3
5.01.02.1.02.0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	Dokumen	3,00	0,00	0	528.162.365,00	16.516.000,00	3,78
5.01.02.1.02.0002	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	Orang	80,00	0,00	0	414.975.900,00	0,00	0
5.01.02.1.02.0003	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Pemerintah Kabupaten/Kota yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Orang	40,00	0,00	0	232.575.400,00	0,00	0
5.01.02.1.02.0004	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Provinsi	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	Buku	1,00	0,00	0	95.552.346,00	0,00	0
5.01.02.1.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Pengendalian dan Evaluasi yang Dianalisis	Dokumen	2,00	0,00	0	3.473.161.866,00	245.360.200,00	7,06
5.01.02.1.03.0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	Laporan	3,00	0,00	0	791.800.760,00	47.438.000,00	7,41

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan (Rp)	Persen (%)
5.01.02.1.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	Laporan	3,00	1,00	33,33	1.770.999.562,00	195.159.700,00	11,02
5.01.02.1.03.0004	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota yang Difasilitasi/Evaluasi	Dokumen	4,00	0,00	0	910.361.544,00	2.762.500,00	0,33
5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Tingkat Kesesuaian Dokumen Rencana Pembangunan Daerah dengan Dokumen Rencana Pembangunan Perangkat Daerah	%	100,00	0,00	0	13.660.468.083,00	595.570.536,00	4,36
		Tingkat Kesesuaian Dokumen Rencana Perangkat Daerah Antar Periode Perencanaan	%	100,00	0,00	0			
5.01.03.1.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Keselarasan Program/Kegiatan Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dalam Dokumen Perencanaan (RPJMD, RKPD, RENSTRA dan RENJA)	%	100,00	0,00	0	4.299.399.841,00	344.576.518,00	8,01
5.01.03.1.01.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	3,00	0,00	0	545.422.715,00	76.590.200,00	14,04
5.01.03.1.01.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Laporan	1,00	0,00	0	538.848.965,00	46.364.196,00	10,36
5.01.03.1.01.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Laporan	1,00	0,00	0	460.491.224,00	45.340.000,00	9,85
5.01.03.1.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	Laporan	1,00	0,00	0	586.988.987,00	42.586.608,00	7,26
5.01.03.1.01.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	3,00	0,00	0	514.531.833,00	27.781.996,00	5,81
5.01.03.1.01.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Laporan	2,00	0,00	0	646.333.271,00	50.874.618,00	9,1
5.01.03.1.01.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Laporan	1,00	0,00	0	378.199.700,00	41.057.500,00	10,86
5.01.03.1.01.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	Laporan	2,00	0,00	0	628.583.146,00	13.981.400,00	2,53
5.01.03.1.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase keselarasan program/kegiatan lingkup bidang perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) dalam dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD, RENSTRA & RENJA PD)	%	100,00	0,00	0	6.018.402.498,00	121.543.120,00	2,02
5.01.03.1.02.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	3,00	0,00	0	386.162.369,00	38.618.348,00	10,99
5.01.03.1.02.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Laporan	9,00	0,00	0	179.771.871,00	6.212.000,00	3,46
5.01.03.1.02.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Laporan	9,00	0,00	0	203.487.631,00	0,00	0
5.01.03.1.02.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	Laporan	2,00	0,00	0	763.527.231,00	43.258.672,00	6,18
5.01.03.1.02.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	3,00	0,00	0	373.599.770,00	22.332.500,00	7,39
5.01.03.1.02.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Laporan	3,00	0,00	0	138.938.673,00	3.458.000,00	2,49
5.01.03.1.02.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Laporan	3,00	0,00	0	385.665.786,00	5.843.600,00	1,52
5.01.03.1.02.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	Laporan	4,00	0,00	0	3.587.249.167,00	1.820.000,00	0,05

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan (Rp)	Persen (%)
5.01.03.1.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Wilayah	Persentase keselarasan program/kegiatan lingkup bidang infrastruktur dan kewilayahan dalam dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD, RENSTRA & RENJA PD)	%	100,00	0,00	0	3.342.665.744,00	129.450.898,00	3,87
5.01.03.1.03.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	3,00	0,00	0	1.528.756.119,00	12.492.400,00	0,84
5.01.03.1.03.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Laporan	2,00	0,00	0	417.077.625,00	31.211.098,00	7,56
5.01.03.1.03.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Laporan	2,00	0,00	0	850.467.540,00	43.534.000,00	5,95
5.01.03.1.03.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	Laporan	2,00	0,00	0	546.364.460,00	42.213.400,00	8,84
5.02.0.00.0.00.01.0000	Badan Pendapatan Daerah								
5.02.0.00.0.00.01.0000	Badan Pendapatan Daerah								
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks kualitas layanan kesekretariatan	Indeks	76,00	0,00	0	261.857.158.863,00	28.568.437.510,00	10,91
		Persentase Realisasi Retribusi Daerah	%	100,00	14,51	14,51			
5.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi kinerja perangkat daerah yang diselesaikan tepat waktu	Persen	100,00	41,66	42	852.542.300,00	25.791.200,00	3,03
5.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	3,00	1,00	33,33	279.547.800,00	0,00	0
5.02.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	2,00	1,00	50	175.335.500,00	0,00	0
5.02.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	2,00	1,00	50	15.510.000,00	0,00	0
5.02.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	16,00	4,00	25	273.830.000,00	15.063.200,00	6,27
5.02.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	2,00	1,00	50	108.319.000,00	10.728.000,00	14,36
5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realsasi Anggaran	Persen	85,00	13,28	16	238.405.157.415,00	22.234.462.395,00	9,33
X.XX.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	498,00	482,00	96,79	237.777.237.415,00	22.175.342.395,00	16,35
5.02.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	415,00	0,00	0	345.720.000,00	59.120.000,00	17,1
5.02.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1,00	1,00	100	63.200.000,00	0,00	0
5.02.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	19,00	4,00	21	219.000.000,00	0,00	0
5.02.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD yang berfungsi dengan baik	Persen	100,00	0,00	0	310.944.000,00	21.252.354,00	6,83
5.02.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	10,00	0,00	0	181.844.000,00	0,00	0
5.02.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	36,00	0,00	0	129.100.000,00	21.252.354,00	18,24
5.02.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah	Triliun Rupiah	1,07	0,16	14,51	1.676.688.000,00	85.690.512,00	5,11
		Jumlah dokumen perencanaan pendapatan retribusi daerah	Dokumen	3,00	1,00	33			
		Jumlah dokumen pengendalian, evaluasi, pengawasan, dan pembinaan serta penyuluhan dan penyebarluasan retribusi daerah	Dokumen	7,00	0,00	0			
5.02.01.1.04.0001	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	Dokumen	2,00	1,00	50	318.092.000,00	13.480.145,00	4,24
5.02.01.1.04.0002	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	Dokumen	1,00	0,00	0	159.508.000,00	0,00	0
5.02.01.1.04.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Laporan	4,00	0,00	0	364.000.000,00	22.284.367,00	6,79
5.02.01.1.04.0005	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	Laporan	3,00	0,00	0	352.276.000,00	26.959.100,00	7,84
5.02.01.1.04.0006	Penetapan Wajib Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah	Dokumen	3,00	0,00	0	302.284.000,00	19.203.600,00	7,21

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan (Rp)	Persen (%)
5.02.01.1.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan	4,00	0,00	0	180.528.000,00	3.763.300,00	2,32
5.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	Persen	100,00	34,62	34,62	1.909.783.300,00	11.597.000,00	0,61
5.02.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	3,00	0,00	0	644.800.000,00	0,00	0
5.02.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	10,00	0,00	0	389.100.000,00	4.616.000,00	1,61
5.02.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	10,00	0,00	0	180.268.000,00	6.981.000,00	7,25
5.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	78,00	9,00	11,54	436.215.300,00	0,00	0
5.02.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	26,00	9,00	34,62	259.400.000,00	0,00	0
5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase sarana prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	Persen	100,00	100,00	100	9.194.610.122,00	140.792.210,00	1,53
5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1,00	0,00	0	120.993.057,00	0,00	0
5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	4,00	0,00	0	1.945.059.040,00	0,00	0
5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2,00	0,00	0	4.431.070.875,00	6.750.000,00	0,17
5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	72,00	18,00	25	19.392.000,00	2.330.000,00	12,02
5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12,00	3,00	25	2.678.095.150,00	131.712.210,00	4,92
5.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan BMD	Persen	100,00	0,00	0	2.466.664.666,00	0,00	0
5.02.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	1,00	0,00	0	746.110.000,00	0,00	0
5.02.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	1,00	0,00	0	6.603.852,00	0,00	0
5.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	222,00	0,00	0	1.713.950.814,00	0,00	0
5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	Persen	100,00	11,11	11,11	5.657.652.860,00	6.008.242.489,00	106,2
5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12,00	0,00	0	12.727.200,00	0,00	0
5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12,00	3,00	25	2.049.750.000,00	252.297.339,00	12,31
5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4,00	1,00	25	3.595.175.660,00	5.755.945.150,00	33,04
5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan berfungsi dengan baik	Persen	100,00	100,00	100	1.383.116.200,00	40.609.350,00	2,94
5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	17,00	0,00	0	362.674.000,00	0,00	0
5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	150,00	4,00	3	617.942.200,00	40.609.350,00	6,57
5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	3,00	0,00	0	402.500.000,00	0,00	0
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Realisasi hasil pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	Persen	100,00	3,03	3,03	1.238.370.000,00	108.761.810,00	8,78
		Persentase Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	Persen	100,00	13,20	13,2			
		Persentase tercapainya target dana perimbangan dan dana transfer	Persen	100,00	1,94	1,94			
		Persentase realisasi lain-lain pendapatan daerah yang sah	Persen	100,00	15,39	15,39			
5.02.02.1.03	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Jumlah Realisasi hasil pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	MiliarRupiah	449,31	13,61	3,03	463.994.000,00	25.725.300,00	5,54
		Jumlah Realisasi Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	MiliarRupiah	115,51	15,25	13,2			
		Jumlah Realisasi Lain - Lain Pendapatan Daerah yang Sah	MilyarRupiah	202,05	3,91	1,94			
5.02.02.1.03.0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Dokumen	4,00	0,00	0	463.994.000,00	25.725.300,00	6,25

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan (Rp)	Persen (%)
5.02.02.1.05	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah realisasi Penerimaan Transfer	TriliunRupiah	9,83	1,52	15,45	774.376.000,00	83.036.510,00	10,72
5.02.02.1.05.0010	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	Laporan	4,00	0,00	0	774.376.000,00	83.036.510,00	10,72
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase tercapainya target Pajak Daerah	Persen	100,00	18,73	18,73	11.355.550.400,00	312.622.464,00	2,75
		Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindak lanjuti	Persen	100,00	22,22	22,22			
5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah realisasi Pajak Daerah	Triliun Rupiah	8,40	1,57	18,73	11.355.550.400,00	312.622.464,00	2,75
		Jumlah dokumen perencanaan pendapatan pajak daerah	Dokumen	3,00	1,00	33			
		Jumlah pelayanan menuju Zona Integritas menuju WBK/WBBM	UPTD PPRD	2,00	0,00	0			
		Jumlah sistem elektronik yang dikembangkan dan dibuat	Aplikasi	2,00	0,00	0			
		Jumlah dokumen pengendalian, evaluasi dan pengawasan dan pembinaan serta penyuluhan dan penyebarluasan pajak daerah	Dokumen	22,00	5,00	23			
5.02.04.1.01.0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Dokumen	2,00	1,00	50	243.010.000,00	35.568.370,00	16,99
5.02.04.1.01.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pengembangan Pajak daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Laporan	1,00	0,00	0	285.432.500,00	51.706.756,00	20,88
		Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah	Dokumen	1,00	0,00	0			
5.02.04.1.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Laporan	9,00	0,00	0	394.270.000,00	21.872.575,00	5,55
5.02.04.1.01.0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Laporan	13,00	3,00	23,08	1.357.130.200,00	57.119.686,00	4,21
5.02.04.1.01.0007	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	DokumenKetetapan	12,00	1,00	8,33	555.700.000,00	24.131.000,00	4,34
5.02.04.1.01.0008	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.	Laporan	9,00	2,00	22,22	7.081.247.700,00	38.933.376,00	0,55
5.02.04.1.01.0009	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Dokumen	12,00	0,00	0	284.400.000,00	41.390.185,00	14,55
5.02.04.1.01.0011	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Keberatan yang Telah Ditindaklanjuti	DokumenSuratPersetujuan/Penolakan	4,00	0,00	0	162.000.000,00	0,00	0
5.02.04.1.01.0012	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Laporan	13,00	0,00	0	347.740.000,00	16.819.214,00	5,1
5.02.04.1.01.0013	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan	3,00	0,00	0	210.120.000,00	0,00	0
5.02.04.1.01.0014	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Laporan	2,00	0,00	0	434.500.000,00	25.081.302,00	6,39
5.02.00.0.00.01.0002	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Samarinda								
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Samarinda)	Indeks	76,00	47,50	63	7.874.496.570,00	1.356.969.841,00	17,23
		Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Samarinda)	%	100,00	14,51	15			
5.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi kinerja perangkat daerah yang diselesaikan tepat waktu (UPTD PPRD Samarinda)	Persen	100,00	50,00	50	42.800.000,00	595.000,00	1,39
5.02.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	2,00	1,00	50	42.800.000,00	595.000,00	1,39
5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran (UPTD PPRD Samarinda)	Persen	85,00	10,73	13	127.320.000,00	20.080.000,00	15,77
5.02.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	38,00	21,00	55	127.320.000,00	20.080.000,00	15,77
5.02.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah (UPTD PPRD Samarinda)	Triliun Rupiah	1,07	0,16	15	28.788.000,00	0,00	0
5.02.01.1.04.0004	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	Dokumen	12,00	3,00	25	5.240.000,00	0,00	0
5.02.01.1.04.0005	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	Laporan	12,00	3,00	25	5.240.000,00	0,00	0
5.02.01.1.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan	12,00	3,00	25	18.308.000,00	0,00	0
5.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi (UPTD PPRD Samarinda)	Persen	100,00	25,00	25	259.200.000,00	0,00	0

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan (Rp)	Persen (%)
5.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	20,00	0,00	0	259.200.000,00	0,00	0
5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase sarana prasarana kantor yang berfungsi dengan baik (UPTD PPRD Samarinda)	Persen	100,00	25,00	25	1.330.258.225,00	385.216.261,00	28,96
5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1,00	1,00	100	35.311.580,00	33.941.200,00	96,12
5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	11,00	10,00	91	632.995.085,00	256.424.800,00	40,51
5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1,00	1,00	100	222.812.360,00	66.529.700,00	29,86
5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	12,00	3,00	25	1.939.200,00	310.000,00	15,99
5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12,00	3,00	25	437.200.000,00	28.010.561,00	6,41
5.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan BMD (UPTD PPRD Samarinda)	Persen	100,00	25,00	25	900.185.831,00	0,00	0
5.02.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	2,00	1,00	50	85.388.556,00	0,00	0
5.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	37,00	30,00	81	814.797.275,00	0,00	0
5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu (UPTD PPRD Samarinda)	Persen	100,00	25,00	25	4.259.162.414,00	879.378.580,00	20,65
5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12,00	3,00	25	4.997.118,00	2.490.000,00	49,83
5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12,00	3,00	25	1.145.212.996,00	150.796.780,00	13,17
5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12,00	3,00	25	3.108.952.300,00	726.091.800,00	23,35
5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan berfungsi dengan baik (UPTD PPRD Samarinda)	Persen	100,00	25,00	25	926.782.100,00	71.700.000,00	7,74
5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	27,00	13,00	48	275.670.500,00	71.700.000,00	26,01
5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	135,00	30,00	22	105.090.000,00	0,00	0
5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	4,00	1,00	25	546.021.600,00	0,00	0
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase tercapainya target penerimaan PKB, BBNKB dan AP (UPTD PPRD Samarinda)	%	100,00	18,19	18	1.370.794.000,00	54.381.261,00	3,97
		Persentase Keluhan Pengguna layanan yang ditindaklanjuti (UPTD PPRD Samarinda)	%	100,00	100,00	100			
5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Samarinda (UPTD PPRD Samarinda)	MiliarRupiah	820,90	93,39	11	1.370.794.000,00	54.381.261,00	3,97
5.02.04.1.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Laporan	12,00	3,00	25	179.410.000,00	6.851.061,00	3,82
5.02.04.1.01.0008	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.	Laporan	12,00	3,00	25	755.364.000,00	38.775.200,00	5,13
5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertunggaknya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	DokumenSSPD	1.000,00	250,00	25	436.020.000,00	8.755.000,00	2,01
5.02.0.00.0.00.01.0003	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Kartanegara								
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Kukar)	%	100,00	14,51	15	3.184.684.812,00	883.191.846,00	27,73
		Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Kukar)	Indeks	76,00	0,00	0			
5.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi kinerja perangkat daerah yang diselesaikan tepat waktu (UPTD PPRD Kukar)	Persen	100,00	50,00	50	17.840.000,00	1.720.000,00	9,64
5.02.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	2,00	1,00	50	17.840.000,00	1.720.000,00	9,64
5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran (UPTD PPRD Kukar)	Persen	85,00	14,09	17	109.080.000,00	18.180.000,00	16,67
5.02.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	73,00	20,00	27	109.080.000,00	18.180.000,00	16,67
5.02.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah (UPTD PPRD Kukar)	Triliun Rupiah	1,07	0,16	15	79.982.000,00	10.500.000,00	13,13
5.02.01.1.04.0004	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	Dokumen	1,00	0,00	0	28.346.000,00	1.040.000,00	3,67

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan (Rp)	Persen (%)
5.02.01.1.04.0005	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	Laporan	4,00	0,00	0	19.272.000,00	0,00	0
5.02.01.1.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan	12,00	3,00	25	32.364.000,00	9.460.000,00	29,23
X.XX.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi (UPTD PPRD Kukar)	Persen	100,00	0,00	0	96.600.000,00	2.044.000,00	2,12
X.XX.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	8,00	0,00	0	96.600.000,00	2.044.000,00	2,12
5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase sarana prasarana kantor yang berfungsi dengan baik (UPTD PPRD Kukar)	Persen	100,00	0,00	0	1.146.313.232,00	215.006.980,00	23,82
5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	3,00	0,00	0	12.690.477,00	300.000,00	2,36
5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	3,00	1,00	33,33	264.690.207,00	131.919.900,00	49,84
X.XX.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1,00	0,00	0	239.252.148,00	7.218.000,00	3,02
X.XX.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	12,00	0,00	0	4.258.400,00	0,00	0
5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	14,00	0,00	0	625.422.000,00	75.569.080,00	12,08
X.XX.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan BMD (UPTD PPRD Kukar)	Persen	100,00	0,00	0	299.020.692,00	0,00	0
X.XX.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	1,00	0,00	0	128.503.527,00	0,00	0
X.XX.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	13,00	0,00	0	170.517.165,00	0,00	0
5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu (UPTD PPRD Kukar)	Persen	100,00	0,00	0	3.597.625.688,00	619.104.266,00	51,94
5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12,00	0,00	0	11.450.500,00	0,00	0
5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12,00	3,00	25	1.180.414.888,00	151.689.266,00	12,85
X.XX.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	5,00	1,00	20	2.405.760.300,00	467.415.000,00	19,43
5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan berfungsi dengan baik (UPTD PPRD Kukar)	Persen	100,00	0,00	0	883.114.740,00	16.636.600,00	1,88
5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	15,00	3,00	20	469.039.000,00	11.202.600,00	2,39
5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	74,00	0,00	0	152.715.740,00	5.204.000,00	3,41
5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1,00	0,00	0	261.360.000,00	230.000,00	0,09
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase tercapainya target penerimaan PKB, BBNKB dan AP (UPTD PPRD Kukar)	%	100,00	11,48	11,48	873.248.000,00	94.420.500,00	10,81
		Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti (UPTD PPRD Kukar)	%	100,00	0,00	0			
5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Kukar (UPTD PPRD Kukar)	MiliarRupiah	453,19	52,02	11,48	873.248.000,00	94.420.500,00	10,81
5.02.04.1.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Laporan	12,00	3,00	25	244.012.000,00	20.750.000,00	8,5
5.02.04.1.01.0008	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.	Laporan	4,00	0,00	0	326.868.000,00	45.600.000,00	13,95
5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertunggaknya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	DokumenSSPD	82,00	20,00	24,39	302.368.000,00	28.070.500,00	9,28
5.02.0.00.0.00.01.0004	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Timur								
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Kutim)	%	100,00	14,51	14,51	4.056.756.757,00	360.808.307,00	8,89
		Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Kutim)	Indeks	76,00	0,00	0			
5.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi kinerja perangkat daerah yang diselesaikan tepat waktu (UPTD Kutim)	Persen	100,00	50,00	50	66.677.500,00	6.103.497,00	9,15
5.02.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	2,00	1,00	50	66.677.500,00	6.103.497,00	9,15
5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran (UPTD Kutim)	Persen	85,00	9,19	10,81	97.920.000,00	19.530.000,00	19,94

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan (Rp)	Persen (%)
5.02.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12,00	3,00	25	97.920.000,00	19.530.000,00	19,94
5.02.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah realisasi penerimaan retribusi daerah (UPTD PPRD Kutim)	Triliun Rupiah	1,07	0,16	14,51	222.100.000,00	0,00	0
X.XX.01.1.04.0004	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	Dokumen	1,00	0,00	0	93.772.000,00	0,00	0
5.02.01.1.04.0005	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	Laporan	4,00	0,00	0	73.144.000,00	0,00	0
5.02.01.1.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan	12,00	0,00	0	55.184.000,00	0,00	0
X.XX.01.1.05	Administrasi Kepegawainan Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi (UPTD PPRD Kutim)	Persen	100,00	0,00	0	61.200.000,00	0,00	0
X.XX.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	9,00	0,00	0	61.200.000,00	0,00	0
5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase sarana prasarana kantor yang berfungsi dengan baik (UPTD PPRD Kutim)	Persen	100,00	0,00	0	710.375.935,00	34.362.550,00	4,84
5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1,00	0,00	0	53.821.090,00	0,00	0
5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	3,00	0,00	0	192.260.357,00	0,00	0
5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2,00	0,00	0	36.393.688,00	0,00	0
5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	12,00	0,00	0	11.020.800,00	0,00	0
5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12,00	3,00	25	416.880.000,00	34.362.550,00	8,24
5.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan BMD (UPTD PPRD Kutim)	Persen	100,00	0,00	0	115.977.396,00	0,00	0
5.02.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	1,00	0,00	0	40.521.986,00	0,00	0
5.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	12,00	0,00	0	75.455.410,00	0,00	0
5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu (UPTD PPRD Kutim)	Persen	100,00	0,00	0	2.275.622.938,00	266.696.714,00	11,72
5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12,00	0,00	0	4.095.600,00	34.500,00	0,84
5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12,00	3,00	25	838.738.300,00	81.412.214,00	9,71
5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12,00	2,00	16,67	1.432.789.038,00	185.250.000,00	12,93
5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan berfungsi dengan baik (UPTD PPRD Kutim)	Persen	100,00	0,00	0	661.854.988,00	34.115.546,00	5,15
5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	9,00	0,00	0	320.874.788,00	33.615.546,00	10,48
5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	54,00	0,00	0	145.180.200,00	500.000,00	0,34
5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1,00	0,00	0	195.800.000,00	0,00	0
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti (UPTD PPRD Kutim)	%	100,00	0,00	0	657.666.000,00	86.828.282,00	13,2
		Persentase tercapainya target penerimaan PKB, BBNKB, dan AP (UPTD PPRD Kutim)	%	100,00	15,25	15			
5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Kutim (UPTD PPRD Kutim)	MiliarRupiah	325,75	49,68	15,25	657.666.000,00	86.828.282,00	13,2
5.02.04.1.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Laporan	12,00	0,00	0	487.228.000,00	78.683.482,00	16,15
5.02.04.1.01.0008	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.	Laporan	4,00	0,00	0	74.996.000,00	8.144.800,00	10,86

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan (Rp)	Persen (%)
5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertunggaknya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	DokumenSSPD	300,00	0,00	0	95.442.000,00	0,00	0
5.02.0.00.0.00.01.0005	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Barat								
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Kubar)	Indeks	76,00	0,00	0	4.541.430.363,00	611.089.935,00	13,46
		Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Kubar)	%	100,00	14,51	14,51			
5.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi kinerja perangkat daerah yang diselesaikan tepat waktu (UPTD PPRD Kubar)	Persen	100,00	50,00	50	54.612.000,00	0,00	0
5.02.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	2,00	1,00	50	54.612.000,00	0,00	0
5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran (UPTD PPRD Kubar)	Persen	85,00	12,29	14,46	109.080.000,00	24.180.000,00	22,17
5.02.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	95,00	24,00	25,26	109.080.000,00	24.180.000,00	22,17
5.02.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah (UPTD PPRD Kubar)	Triliun Rupiah	1,07	0,16	0,42	97.534.000,00	7.423.284,00	7,61
5.02.01.1.04.0004	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	Dokumen	1,00	1,00	100	41.544.000,00	7.423.284,00	17,87
5.02.01.1.04.0005	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	Laporan	4,00	1,00	25	19.790.000,00	0,00	0
5.02.01.1.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan	12,00	3,00	25	36.200.000,00	0,00	0
5.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi (UPTD PPRD Kubar)	Persen	100,00	92,00	92	89.400.000,00	2.040.000,00	2,28
5.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	95,00	1,00	1,05	89.400.000,00	2.040.000,00	2,28
5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase sarana prasarana kantor yang berfungsi dengan baik (UPTD PPRD Kubar)	Persen	100,00	20,00	20	812.623.540,00	65.039.900,00	8
5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	3,00	1,00	33,33	32.809.244,00	2.295.000,00	6,99
5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	6,00	1,00	16,67	150.388.768,00	4.618.000,00	3,07
5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1,00	1,00	100	218.307.128,00	29.793.400,00	13,65
5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	12,00	3,00	25	3.878.400,00	330.000,00	8,51
5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12,00	3,00	25	407.240.000,00	28.003.500,00	6,88
5.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan BMD (UPTD PPRD Kubar)	Persen	100,00	20,00	20	159.518.223,00	0,00	0
5.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	6,00	0,00	0	159.518.223,00	0,00	0
5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase layanan jasa penunjang tepat waktu (UPTD PPRD Kubar)	Persen	100,00	100,00	100	2.348.780.600,00	477.170.181,00	20,57
X.XX.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12,00	3,00	25	29.012.800,00	2.540.000,00	8,75
5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12,00	3,00	25	806.590.000,00	127.575.181,00	15,82
5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	5,00	4,00	80	1.513.177.800,00	347.055.000,00	22,94
5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan berfungsi dengan baik (UPTD PPRD Kubar)	Persen	100,00	20,00	20	898.894.800,00	35.236.570,00	3,92
5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	11,00	11,00	100	461.494.700,00	33.439.786,00	7,25
5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	57,00	5,00	8,77	129.985.100,00	1.796.784,00	1,38
5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1,00	0,00	0	307.415.000,00	0,00	0
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti (UPTD PPRD Kubar)	%	100,00	25,00	25	792.040.000,00	95.672.500,00	12,08
		Persentase tercapainya target penerimaan PKB, BBNKB, dan AP (UPTD PPRD Kubar)	%	100,00	13,28	13,28			
5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Kubar (UPTD PPRD Kubar)	MiliarRupiah	95,83	17,14	18	792.040.000,00	95.672.500,00	12,08

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan (Rp)	Persen (%)
5.02.04.1.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Laporan	12,00	3,00	25	227.720.000,00	31.282.400,00	13,74
5.02.04.1.01.0008	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.	Laporan	4,00	1,00	25	240.020.000,00	31.335.700,00	13,06
5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	DokumenSSPD	760,00	190,00	25	324.300.000,00	33.054.400,00	10,19
5.02.0.00.0.00.01.0006	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Balikpapan								
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Balikpapan)	Indeks	76,00	92,68	121,95	5.598.640.285,00	568.538.182,00	10,15
		Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Balikpapan)	%	100,00	14,51	14,51			
5.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi kinerja perangkat daerah yang diselesaikan tepat waktu (UPTD PPRD Balikpapan)	Persen	100,00	50,00	50	27.920.000,00	0,00	0
5.02.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	2,00	1,00	50	27.920.000,00	0,00	0
5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran (UPTD PPRD Balikpapan)	Persen	85,00	9,22	10,85	108.586.000,00	16.120.000,00	14,85
5.02.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	84,00	21,00	25	108.586.000,00	16.120.000,00	14,85
5.02.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah (UPTD PPRD Balikpapan)	Triliun Rupiah	1,07	0,16	14,51	112.272.000,00	2.390.000,00	2,13
5.02.01.1.04.0004	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	Dokumen	21,00	5,00	23,81	51.600.000,00	0,00	0
5.02.01.1.04.0005	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	Laporan	8,00	2,00	25	43.200.000,00	0,00	0
5.02.01.1.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan	2,00	0,00	0	17.472.000,00	2.390.000,00	13,68
5.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi (UPTD PPRD Balikpapan)	Persen	100,00	0,00	0	60.360.000,00	0,00	0
5.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	8,00	0,00	0	60.360.000,00	0,00	0
5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase sarana prasarana kantor yang berfungsi dengan baik (UPTD PPRD Balikpapan)	Persen	100,00	0,00	0	1.255.245.836,00	47.363.482,00	3,77
5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1,00	0,00	0	24.926.829,00	0,00	0
5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	3,00	0,00	0	194.017.757,00	0,00	0
5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	3,00	1,00	33,33	118.469.250,00	6.125.000,00	5,17
5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	2,00	2,00	100	2.472.000,00	0,00	0
5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12,00	3,00	25	915.360.000,00	41.238.482,00	4,51
5.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan BMD (UPTD PPRD Balikpapan)	Persen	100,00	0,00	0	474.928.309,00	0,00	0
5.02.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	1,00	0,00	0	62.229.333,00	0,00	0
5.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	31,00	0,00	0	412.698.976,00	0,00	0
5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu (UPTD PPRD Balikpapan)	Persen	100,00	50,00	50	2.807.393.640,00	469.611.912,00	16,73
5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1,00	1,00	100	5.885.000,00	2.500.000,00	42,48
5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12,00	3,00	25	1.094.428.000,00	121.088.310,00	11,06
5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12,00	3,00	25	1.707.080.640,00	346.023.602,00	20,27
5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan berfungsi dengan baik (UPTD PPRD Balikpapan)	Persen	100,00	16,84	16,84	751.934.500,00	33.052.788,00	4,4
5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	12,00	3,00	25	337.544.500,00	30.602.788,00	9,07
5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	94,00	24,00	25,53	134.600.000,00	2.450.000,00	1,82
5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2,00	0,00	0	279.790.000,00	0,00	0

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan (Rp)	Persen (%)
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti (UPTD PPRD Balikpapan)	%	100,00	24,40	24,4	920.420.000,00	1.970.000,00	0,21
		Persentase tercapainya target penerimaan PKB, BBNKB, dan AP (UPTD PPRD Balikpapan)	%	100,00	9,00	9			
5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Balikpapan (UPTD PPRD Balikpapan)	MiliarRupiah	868,84	79,92	9,2	920.420.000,00	1.970.000,00	0,21
5.02.04.1.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Laporan	63,00	16,00	25,4	99.320.000,00	680.000,00	0,68
5.02.04.1.01.0008	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.	Laporan	346,00	87,00	25,14	434.950.000,00	1.290.000,00	0,3
5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertunggahnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	DokumenSSPD	103,00	25,00	24,27	386.150.000,00	0,00	0
5.02.0.00.0.00.01.0007	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Bontang								
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Bontang)	Indeks	76,00	93,47	123	3.977.673.352,00	366.982.265,00	9,23
		Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Bontang)	%	100,00	14,51	15			
5.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang diselesaikan tepat waktu (UPTD PPRD Bontang)	Persen	100,00	50,00	50	26.760.000,00	0,00	0
5.02.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	2,00	1,00	50	26.760.000,00	0,00	0
5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran (UPTD PPRD Bontang)	Persen	85,00	9,53	11,21	96.000.000,00	14.380.000,00	14,98
5.02.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	57,00	13,00	22,81	96.000.000,00	14.380.000,00	14,98
5.02.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah (UPTD PPRD Bontang)	Triliun Rupiah	1,07	14,51	1,356.07	40.100.000,00	1.700.000,00	4,24
5.02.01.1.04.0004	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	Dokumen	5,00	1,00	20	15.980.000,00	1.700.000,00	10,64
5.02.01.1.04.0005	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	Laporan	5,00	0,00	0	9.180.000,00	0,00	0
5.02.01.1.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan	5,00	0,00	0	14.940.000,00	0,00	0
5.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi (UPTD PPRD Bontang)	Persen	100,00	0,00	0	69.000.000,00	0,00	0
5.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	9,00	0,00	0	69.000.000,00	0,00	0
5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase sarana prasarana kantor yang berfungsi dengan baik (UPTD PPRD Bontang)	Persen	100,00	0,00	0	863.341.610,00	93.702.944,00	10,85
5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1,00	0,00	100	9.225.978,00	1.629.400,00	17,66
5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5,00	1,00	20	238.517.932,00	25.881.000,00	10,85
5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2,00	1,00	50	140.799.300,00	12.699.000,00	9,02
5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	12,00	3,00	25	3.878.400,00	0,00	0
5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	30,00	6,00	20	470.920.000,00	53.493.544,00	11,36
5.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan BMD (UPTD PPRD Bontang)	Persen	100,00	0,00	0	745.267.061,00	0,00	0
5.02.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	1,00	0,00	0	193.081.369,00	0,00	0
5.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	35,00	0,00	0	552.185.692,00	0,00	0
5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu (UPTD PPRD Bontang)	Persen	100,00	47,22	47,22	1.477.421.681,00	245.810.721,00	16,64
5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	2,00	1,00	50	4.853.900,00	2.070.000,00	42,65
5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12,00	3,00	25	415.571.693,00	49.406.121,00	11,89
5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	6,00	4,00	66,67	1.056.996.088,00	194.334.600,00	18,39
5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan berfungsi dengan baik (UPTD PPRD Bontang)	Persen	100,00	0,00	0	659.783.000,00	11.388.600,00	1,73

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan (Rp)	Persen (%)
5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	11,00	3,00	27,27	249.168.000,00	10.738.600,00	4,31
5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	73,00	9,00	12,33	134.119.000,00	650.000,00	0,48
5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1,00	0,00	0	276.496.000,00	0,00	0
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti (UPTD PPRD Bontang)	%	100,00	100,00	100	807.884.000,00	74.663.000,00	9,24
		Persentase tercapainya target penerimaan PKB, BBNKB, dan AP (UPTD PPRD Bontang)	%	100,00	0,00	0			
5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Bontang (UPTD PPRD Bontang)	MiliarRupiah	160,70	0,00	0	807.884.000,00	74.663.000,00	9,24
5.02.04.1.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Laporan	8,00	2,00	25	159.690.000,00	14.180.000,00	8,88
5.02.04.1.01.0008	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.	Laporan	10,00	4,00	40	357.360.000,00	57.330.000,00	16,04
5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertunggaknya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	DokumenSSPD	2.000,00	593,00	29,65	290.834.000,00	3.153.000,00	1,08
5.02.0.00.0.00.01.0008	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Penajam Paser Utara								
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD PPU)	Indeks	76,00	85,42	112,39	3.965.736.161,00	271.682.642,00	6,85
		Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD PPU)	%	100,00	14,51	14,51			
5.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang diselesaikan tepat waktu (UPTD PPRD PPU)	Persen	100,00	50,00	50	26.630.000,00	0,00	0
5.02.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	2,00	1,00	50	26.630.000,00	0,00	0
5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran (UPTD PPRD PPU)	Persen	85,00	6,77	7,96	96.000.000,00	13.020.000,00	13,56
5.02.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12,00	3,00	25	96.000.000,00	13.020.000,00	13,56
5.02.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah (UPTD PPRD PPU)	Triliun Rupiah	1,07	0,16	14,95	41.898.000,00	0,00	0
5.02.01.1.04.0004	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	Dokumen	1,00	1,00	100	14.468.000,00	0,00	0
5.02.01.1.04.0005	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	Laporan	4,00	1,00	25	14.128.000,00	0,00	0
5.02.01.1.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan	12,00	3,00	25	13.302.000,00	0,00	0
5.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi (UPTD PPRD PPU)	Persen	100,00	90,00	90	75.000.000,00	0,00	0
5.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	11,00	17,00	154,55	75.000.000,00	0,00	0
5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase sarana prasarana kantor yang berfungsi dengan baik (UPTD PPRD PPU)	Persen	100,00	0,00	0	697.122.065,00	47.910.462,00	6,87
5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1,00	0,00	0	19.501.700,00	0,00	0
5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	4,00	0,00	0	185.196.758,00	0,00	0
5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1,00	1,00	100	194.637.607,00	0,00	0
5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	12,00	2,00	16,67	3.960.000,00	320.000,00	8,08
5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12,00	3,00	25	293.826.000,00	47.590.462,00	16,2
5.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan BMD (UPTD PPRD PPU)	Persen	100,00	100,00	100	432.788.266,00	0,00	0
5.02.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	1,00	0,00	0	62.376.995,00	0,00	0
5.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	40,00	0,00	0	370.411.271,00	0,00	0
5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu (UPTD PPRD PPU)	Persen	100,00	100,00	100	1.586.857.330,00	195.475.840,00	12,32
5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12,00	3,00	25	13.469.580,00	1.419.000,00	10,53

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan (Rp)	Persen (%)
5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12,00	3,00	25	443.876.600,00	47.406.840,00	10,68
5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	5,00	3,00	60	1.129.511.150,00	146.650.000,00	12,98
5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan berfungsi dengan baik (UPTD PPRD PPU)	Persen	100,00	100,00	100	1.009.440.500,00	15.276.340,00	1,51
5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	19,00	16,00	84,21	247.517.000,00	15.276.340,00	6,17
5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	48,00	1,00	2,08	82.494.500,00	0,00	0
5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1,00	0,00	0	679.429.000,00	0,00	0
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti di wilayah Balikpapan (UPTD PPRD PPU)	%	100,00	100,00	100	748.534.000,00	47.486.100,00	6,34
		Persentase tercapainya target penerimaan PKB, BBNKB, dan AP (UPTD PPRD PPU)	%	100,00	15,86	15,86			
5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Penajam (UPTD PPRD PPU)	MiliarRupiah	99,97	0,00	0	748.534.000,00	47.486.100,00	6,34
5.02.04.1.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Laporan	12,00	3,00	25	83.496.000,00	3.814.500,00	4,57
5.02.04.1.01.0008	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.	Laporan	4,00	1,00	25	319.998.000,00	16.013.200,00	5
5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertunggaknya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	DokumenSSPD	5.500,00	978,00	17,78	345.040.000,00	27.658.400,00	8,02
5.02.0.00.0.00.01.0009	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Paser								
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Paser)	Indeks	76,00	0,00	0	3.635.648.097,00	448.898.642,00	12,35
		Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Paser)	%	100,00	14,51	15			
5.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang diselesaikan tepat waktu (UPTD PPRD Paser)	Persen	100,00	50,00	50	22.879.000,00	0,00	0
5.02.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	2,00	1,00	50	22.879.000,00	0,00	0
5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran (UPTD PPRD Paser)	Persen	85,00	11,24	13	96.000.000,00	14.380.000,00	14,98
5.02.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	72,00	18,00	25	96.000.000,00	14.380.000,00	14,98
5.02.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah (UPTD PPRD Paser)	Triliun Rupiah	1,07	0,16	15	70.260.000,00	0,00	0
5.02.01.1.04.0004	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	Dokumen	1,00	0,00	0	16.800.000,00	0,00	0
5.02.01.1.04.0005	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	Laporan	4,00	1,00	25	19.860.000,00	0,00	0
5.02.01.1.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan	12,00	3,00	25	33.600.000,00	0,00	0
5.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi (UPTD PPRD Paser)	Persen	100,00	0,00	0	49.200.000,00	0,00	0
5.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	10,00	0,00	0	49.200.000,00	0,00	0
5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase sarana prasarana kantor yang berfungsi dengan baik (UPTD PPRD Paser)	Persen	100,00	0,00	0	826.120.331,00	87.872.339,00	10,64
5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1,00	0,00	0	17.572.131,00	0,00	0
5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	4,00	1,00	25	171.715.448,00	100.000,00	0,06
5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	4,00	1,00	25	134.308.752,00	4.550.000,00	3,39
5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	12,00	0,00	0	1.980.000,00	330.000,00	16,67
5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	25,00	0,00	0	500.544.000,00	82.892.339,00	16,56
5.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan BMD (UPTD PPRD Paser)	Persen	100,00	0,00	0	143.474.762,00	0,00	0

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan (Rp)	Persen (%)
5.02.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	1,00	0,00	0	20.536.080,00	0,00	0
5.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	4,00	0,00	0	122.938.682,00	0,00	0
5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu (UPTD PPRD Paser)	Persen	100,00	25,00	25	1.993.846.704,00	313.371.420,00	15,72
5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12,00	3,00	25	12.448.800,00	1.200.000,00	9,64
5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12,00	3,00	25	773.240.948,00	71.262.220,00	9,22
5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	5,00	2,00	40	1.208.156.956,00	240.909.200,00	19,94
5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan berfungsi dengan baik (UPTD PPRD Paser)	Persen	100,00	0,00	0	433.867.300,00	33.274.883,00	7,67
5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	20,00	10,00	50	271.199.900,00	33.124.883,00	12,21
5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	112,00	37,00	33	62.667.400,00	150.000,00	0,24
5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1,00	0,00	0	100.000.000,00	0,00	0
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase tercapainya target penerimaan PKB, BBNKB, dan AP (UPTD PPRD Paser)	%	100,00	12,00	12	791.830.000,00	30.033.530,00	3,79
		Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti (UPTD PPRD Paser)	%	100,00	25,00	25			
5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Paser (UPTD PPRD Paser)	MiliarRupiah	184,34	21,80	12	791.830.000,00	30.033.530,00	3,79
5.02.04.1.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Laporan	12,00	3,00	25	158.880.000,00	23.612.990,00	14,86
5.02.04.1.01.0008	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.	Laporan	4,00	1,00	25	391.100.000,00	6.420.540,00	1,64
5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertunggaknya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	DokumenSSPD	116,00	0,00	0	241.850.000,00	0,00	0
5.02.0.00.0.00.01.0010	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Berau								
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Berau)	Indeks	76,00	0,00	0	4.765.770.000,00	414.003.633,00	8,69
		Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Berau)	%	100,00	14,51	15			
5.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi kinerja perangkat daerah yang diselesaikan tepat waktu (UPTD PPRD Berau)	Persen	100,00	50,00	50	82.420.000,00	3.786.000,00	12,27
X.XX.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12,00	3,00	25	30.850.000,00	3.786.000,00	12,27
5.02.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	2,00	1,00	50	51.570.000,00	0,00	0
5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran (UPTD PPRD Berau)	Persen	85,00	7,90	9	111.120.000,00	18.180.000,00	16,36
5.02.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	84,00	21,00	25	111.120.000,00	18.180.000,00	16,36
5.02.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah (UPTD PPRD Berau)	Triliun Rupiah	1,07	0,16	14,51	98.566.000,00	0,00	0
5.02.01.1.04.0004	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	Dokumen	12,00	3,00	25	38.816.000,00	0,00	0
5.02.01.1.04.0005	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	Laporan	6,00	1,00	17	47.240.000,00	0,00	0
5.02.01.1.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan	12,00	3,00	25	12.510.000,00	0,00	0
5.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi (UPTD PPRD Berau)	Persen	100,00	0,00	8	75.596.000,00	0,00	0
5.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	13,00	1,00	8	75.596.000,00	0,00	0
5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase sarana prasarana kantor yang berfungsi dengan baik (UPTD PPRD Berau)	Persen	100,00	25,00	25	916.016.516,00	125.111.630,00	13,66
5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1,00	1,00	100	13.716.689,00	0,00	0
5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	3,00	3,00	100	160.232.170,00	0,00	0
5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	7,00	1,00	14	146.667.657,00	400.000,00	0,27

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan (Rp)	Persen (%)
5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	12,00	3,00	25	7.920.000,00	1.125.000,00	14,2
5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	61,00	13,00	21	587.480.000,00	123.586.630,00	21,04
5.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan BMD (UPTD PPRD Berau)	Persen	100,00	0,00	0	1.038.401.919,00	0,00	0
5.02.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	52,00	0,00	0	333.113.056,00	0,00	0
5.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	33,00	0,00	0	705.288.863,00	0,00	0
5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu (UPTD PPRD Berau)	Persen	100,00	25,00	25	1.684.579.985,00	243.107.295,00	14,43
5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12,00	3,00	25	691.577.748,00	61.350.795,00	8,87
5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	5,00	0,00	0	993.002.237,00	177.970.500,00	17,92
5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan berfungsi dengan baik (UPTD PPRD Berau)	Persen	100,00	25,00	25	789.919.580,00	27.604.708,00	3,49
5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	17,00	5,00	29,41	293.059.580,00	18.014.708,00	6,15
5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	74,00	20,00	27	189.360.000,00	9.560.000,00	5,05
5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	3,00	1,00	33	307.500.000,00	30.000,00	0,01
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti (UPTD PPRD Berau)	%	100,00	25,00	25	703.380.000,00	75.559.276,00	10,74
		Persentase tercapainya target penerimaan PKB, BBNKB, dan AP (UPTD PPRD Berau)	%	100,00	6,29	6			
5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Berau (UPTD PPRD Berau)	MiliarRupiah	182,24	10,71	6	703.380.000,00	75.559.276,00	10,74
5.02.04.1.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Laporan	12,00	3,00	25	113.320.000,00	1.190.000,00	1,05
5.02.04.1.01.0008	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.	Laporan	15,00	3,00	20	342.580.000,00	68.456.876,00	19,98
5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	DokumenSSPD	12,00	3,00	25	247.480.000,00	5.912.400,00	2,39
5.02.0.00.0.00.02.0000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah								
5.02.0.00.0.00.02.0000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah								
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti	%	100,00	0,00	0	425.805.499.683,00	8.675.441.648,00	2,04
		Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	Indeks	86,00	0,00	0			
5.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tingkat Keselarasan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%	100,00	13,33	13	2.096.510.020,00	101.698.059,00	4,85
5.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2,00	0,00	0	883.556.259,00	9.902.450,00	1,15
5.02.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1,00	0,00	0	159.296.091,00	0,00	0
5.02.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1,00	0,00	0	68.390.000,00	0,00	0
5.02.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1,00	0,00	100	160.706.611,00	0,00	0
5.02.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1,00	0,00	0	73.250.000,00	0,00	0
5.02.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	2,00	0,00	0	466.049.290,00	55.562.709,00	11,92
5.02.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	7,00	2,00	28,57	285.261.769,00	36.232.900,00	12,7
5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat keselarasan Laporan Administrasi Keuangan	%	100,00	57,01	57	384.396.969.251,00	5.910.042.629,00	1,54
5.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	150,00	150,00	100	381.598.951.351,00	5.525.419.629,00	1,45
5.02.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	400,00	9,00	2,25	2.000.000.000,00	382.415.000,00	19,12

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan (Rp)	Persen (%)
5.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	400,00	394,00	98,5	307.947.900,00	0,00	0
5.02.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	12,00	0,00	0	99.780.000,00	0,00	0
5.02.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1,00	0,00	0	124.736.000,00	2.208.000,00	2,26
5.02.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	3,00	0,00	0	111.644.000,00	0,00	0
5.02.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	3,00	0,00	0	91.536.000,00	0,00	0
5.02.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	1,00	0,00	0	62.374.000,00	0,00	0
5.02.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tingkat Keselarasan Laporan Administrasi BMD pada SKPD	%	100,00	8,33	8	307.901.969,00	6.408.560,00	2,08
5.02.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	12,00	1,00	8,33	307.901.969,00	6.408.560,00	2,08
5.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Keselarasn Dokumen Administrasi Kepegawaian	%	100,00	0,66	1	1.907.022.974,00	7.454.000,00	0,39
5.02.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1,00	0,00	0	496.387.460,00	0,00	0
5.02.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	12,00	1,00	8,33	124.751.014,00	3.824.000,00	3,07
5.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	140,00	0,00	0	1.027.666.000,00	0,00	0
5.02.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	140,00	1,00	0,71	258.218.500,00	3.630.000,00	1,41
5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tingkat Pelayanan Administrasi Umum di Lingkup BPKAD Provinsi Kaltim	%	100,00	10,26	10,26	10.869.330.325,00	441.931.190,00	4,07
5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	12,00	1,00	8,33	215.510.045,00	20.374.200,00	9,45
5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12,00	0,00	0	4.434.680.518,00	13.608.000,00	0,31
5.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	12,00	0,00	0	1.942.972.198,00	2.517.600,00	0,13
5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12,00	1,00	8,33	372.587.870,00	3.786.500,00	1,02
5.02.01.1.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Laporan	6,00	0,00	0	450.764.644,00	42.468.723,00	9,81
5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12,00	3,00	25	1.093.985.050,00	79.451.167,00	7,26
5.02.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	12,00	3,00	25	2.358.830.000,00	279.725.000,00	11,86
5.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tingkat Penyediaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100,00	0,00	0	2.118.712.427,00	349.250,00	0,02
5.02.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	1,00	0,00	0	1.097.960.700,00	0,00	0
5.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	20,00	0,00	0	1.020.751.727,00	349.250,00	0,03
5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100,00	18,75	18,75	8.959.343.852,00	1.699.019.454,00	18,96
5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12,00	3,00	25	92.165.544,00	1.031.000,00	1,12
5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12,00	3,00	25	5.025.904.000,00	278.204.454,00	5,54
5.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	12,00	0,00	0	134.594.308,00	0,00	0
5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12,00	3,00	25	3.706.680.000,00	1.419.784.000,00	38,3
5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya BMD di lingkungan BPKAD Provinsi Kaltim	%	100,00	16,44	16,44	15.149.708.865,00	508.538.506,00	3,36
5.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	6,00	0,00	0	166.338.900,00	0,00	0

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan (Rp)	Persen (%)
5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	25,00	10,00	40	1.351.769.573,00	175.958.812,00	13,02
5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	12,00	1,00	8,33	831.284.976,00	14.169.700,00	1,7
5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	5,00	1,00	20	12.800.315.416,00	318.409.994,00	2,49
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Perda dan Pergub/Tentang APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang Ditetapkan Tepat Waktu	%	100,00	0,00	0	6.577.888.888.086,00	393.030.990,00	0,01
5.02.02.1.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Pedoman Kebijakan Keuangan Daerah	%	100,00	0,00	0	9.761.361.119,00	178.514.865,00	1,83
5.02.02.1.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	Dokumen	2,00	0,00	0	309.040.000,00	0,00	0
5.02.02.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	Dokumen	2,00	0,00	0	308.170.000,00	0,00	0
5.02.02.1.01.0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA- SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	Dokumen	37,00	0,00	0	1.797.052.000,00	8.791.000,00	0,52
5.02.02.1.01.0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	Dokumen	37,00	0,00	0	1.451.530.000,00	0,00	0
5.02.02.1.01.0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA- SKPD	Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi	Dokumen	37,00	0,00	0	675.310.000,00	0,00	0
5.02.02.1.01.0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	Dokumen	37,00	0,00	0	642.100.000,00	0,00	0
5.02.02.1.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Dokumen	2,00	0,00	0	566.569.834,00	0,00	0
5.02.02.1.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Dokumen	2,00	0,00	0	220.130.000,00	0,00	0
5.02.02.1.01.0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Dokumen	3,00	0,00	0	212.410.000,00	0,00	0
5.02.02.1.01.0011	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Dokumen	1,00	0,00	0	3.513.529.285,00	169.723.865,00	4,97
5.02.02.1.01.0013	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi	Orang	74,00	0,00	0	65.520.000,00	0,00	0
5.02.02.1.02	Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat keselarasan Dokumen Rancangan Perda dan Perkada	%	100,00	0,00	0	1.240.104.000,00	0,00	0
5.02.02.1.02.0002	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota	Laporan	20,00	0,00	0	268.610.000,00	0,00	0
5.02.02.1.02.0003	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	Laporan	20,00	0,00	0	268.610.000,00	0,00	0
5.02.02.1.02.0004	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Laporan	10,00	0,00	0	274.936.000,00	0,00	0
5.02.02.1.02.0006	Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan	Laporan	3,00	0,00	0	427.948.000,00	0,00	0
5.02.02.1.03	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Tingkat Keselarasan Laporan Perbendaharaan Daerah	%	100,00	10,03	10,03	5.798.372.908,00	118.446.223,00	2,04
5.02.02.1.03.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Dokumen	12,00	0,00	0	880.279.974,00	82.334.399,00	9,35
5.02.02.1.03.0002	Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Laporan	1,00	0,00	0	38.400.000,00	3.440.000,00	8,96
5.02.02.1.03.0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Dokumen	460,00	0,00	0	163.600.000,00	1.720.000,00	1,05
5.02.02.1.03.0004	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Dokumen	1,00	0,00	0	48.180.000,00	0,00	0
5.02.02.1.03.0005	Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Dokumen	16,00	0,00	0	1.052.078.760,00	4.603.600,00	0,55
5.02.02.1.03.0006	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Dokumen	2,00	0,00	0	686.259.360,00	0,00	0

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan (Rp)	Persen (%)
5.02.02.1.03.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Laporan	12,00	1,00	8,33	907.909.546,00	7.518.225,00	0,83
5.02.02.1.03.0008	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Dokumen	12,00	0,00	0	330.424.628,00	14.250.000,00	4,31
5.02.02.1.03.0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Dokumen	30.000,00	3.060,00	10,2	732.335.965,00	2.400.000,00	0,33
5.02.02.1.03.0010	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Dokumen	1,00	0,00	0	507.978.276,00	0,00	0
5.02.02.1.03.0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Orang	20,00	0,00	0	450.926.399,00	2.179.999,00	0,48
5.02.02.1.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Tingkat Keselarasan Dokumen Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	%	100,00	21,81	21,81	4.965.514.461,00	57.365.902,00	1,16
5.02.02.1.04.0001	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Laporan	4,00	0,00	0	182.934.000,00	0,00	0
5.02.02.1.04.0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	Dokumen	84,00	6,00	7,14	1.602.372.390,00	33.114.000,00	2,07
5.02.02.1.04.0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Laporan	12,00	0,00	0	112.512.000,00	0,00	0
5.02.02.1.04.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	Laporan	48,00	48,00	100	182.972.000,00	0,00	0
5.02.02.1.04.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	Dokumen	106,00	0,00	0	689.505.520,00	0,00	0
5.02.02.1.04.0006	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Dokumen	6,00	0,00	0	256.403.165,00	0,00	0
5.02.02.1.04.0008	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Dokumen	576,00	0,00	0	224.556.000,00	0,00	0
5.02.02.1.04.0009	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Dokumen	1,00	0,00	0	207.920.000,00	0,00	0
5.02.02.1.04.0010	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Dokumen	1,00	0,00	0	139.741.902,00	0,00	0
5.02.02.1.04.0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi	Orang	480,00	235,00	48,96	1.081.192.000,00	24.251.902,00	2,24
5.02.02.1.04.0012	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Provinsi	Jumlah BLUD Provinsi yang Dibina	Lembaga	6,00	0,00	0	285.405.484,00	0,00	0
5.02.02.1.05	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Tingkat Keselarasan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	%	90,00	0,00	0	6.555.570.060.000,00	38.704.000,00	0
5.02.02.1.05.0002	Analisis Investasi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah	Laporan	2,00	0,00	0	139.850.000,00	0,00	0
5.02.02.1.05.0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Laporan	10,00	0,00	0	2.053.930.210.000,00	38.704.000,00	0
5.02.02.1.05.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Laporan	21,00	0,00	0	100.000.000.000,00	0,00	0
5.02.02.1.05.0010	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	Laporan	16,00	0,00	0	4.401.500.000.000,00	0,00	0

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan (Rp)	Persen (%)
5.02.02.1.06	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Tingkat Keselarasan Sistem Informasi Bidang Keuangan Daerah	%	100,00	0,00	0	553.475.598,00	0,00	0
5.02.02.1.06.0002	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Dokumen	3,00	0,00	0	553.475.598,00	0,00	0
5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Keseluruhan Target Temuan BPK s/d LKPP Sebelumnya (t-1) yang Ditindaklanjuti dan Dinyatakan Sesuai pada Tahun Ini (t-0)	%	60,00	0,00	0	9.399.627.381,00	298.883.042,00	3,18
5.02.03.1.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Tingkat Keselarasan Antar Data Pengelolaan BMD	%	100,00	96,70	97	9.399.627.381,00	298.883.042,00	3,18
5.02.03.1.01.0001	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	Dokumen	1,00	0,00	0	962.810.179,00	0,00	0
5.02.03.1.01.0002	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Dokumen	1,00	0,00	0	152.955.000,00	0,00	0
5.02.03.1.01.0003	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Dokumen	1,00	0,00	0	166.340.000,00	0,00	0
5.02.03.1.01.0004	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Dokumen	1,00	0,00	0	167.490.660,00	0,00	0
5.02.03.1.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Laporan	1,00	0,00	0	634.841.248,00	6.320.000,00	1
5.02.03.1.01.0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	Laporan	1,00	0,00	0	415.850.888,00	0,00	0
5.02.03.1.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	Laporan	2,00	0,00	0	2.392.885.640,00	62.128.280,00	2,78
5.02.03.1.01.0008	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	Laporan	3,00	12,00	400	861.629.220,00	20.181.560,00	2,34
5.02.03.1.01.0009	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Laporan	1,00	0,00	0	124.764.000,00	0,00	0
5.02.03.1.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Dokumen	20,00	11,00	55	2.546.123.546,00	38.188.202,00	1,5
5.02.03.1.01.0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Laporan	8,00	2,00	25	499.007.000,00	169.345.000,00	33,94
5.02.03.1.01.0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	Laporan	1,00	14,00	1.400,00	279.740.000,00	0,00	0
5.02.03.1.01.0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Orang	50,00	49,00	98	195.190.000,00	2.720.000,00	1,39
5.03.0.00.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian Daerah								
5.03.0.00.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian Daerah								
5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti	%	100,00	100,00	100	28.466.879.793,00	5.881.308.117,00	20,6601783
		Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	Indeks	95,00	49,00	51,58			
5.03.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yang ditetapkan tepat waktu	%	100,00	35,29	35,29	670.056.717,00	49.553.400,00	8,41
5.03.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	3,00	1,00	33,33	146.889.144,00	3.195.000,00	2,18
5.03.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	2,00	1,00	50	56.138.853,00	0,00	0
5.03.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	2,00	1,00	50	50.954.746,00	0,00	0
5.03.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	9,00	3,00	33,33	335.259.931,00	43.977.900,00	13,12
X.XX.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	1,00	0,00	0	80.814.043,00	2.380.500,00	2,95
5.03.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran	%	97,00	15,61	16,09	21.247.777.408,00	4.489.735.284,00	586,94
X.XX.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	101,00	101,00	100	20.482.834.140,00	4.332.642.284,00	21,15
5.03.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12,00	3,00	25	701.280.000,00	125.610.000,00	17,91
5.03.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	2,00	1,00	50	63.663.268,00	31.483.000,00	49,45
5.03.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD yang berfungsi dengan baik	%	90,00	70,89	78,77	5.000.000,00	3.888.000,00	77,76
5.03.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	2,00	1,00	50	5.000.000,00	3.888.000,00	77,76
5.03.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	%	81,00	4,65	5,74	329.212.500,00	153.850.000,00	46,73
5.03.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	2,00	2,00	100	299.212.500,00	153.850.000,00	51,42

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan (Rp)	Persen (%)
5.03.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	22,00	4,00	18,18	30.000.000,00	0,00	0
5.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	%	100,00	100,00	100	1.611.984.021,00	158.373.300,00	24,08
5.03.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	6,00	0,00	0	629.566.932,00	0,00	0
5.03.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	8,00	3,00	37,5	27.997.065,00	7.900.000,00	28,22
X.XX.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	3,00	0,00	0	954.420.024,00	150.473.300,00	15,77
5.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	%	100,00	27,27	27,27	3.606.757.774,00	892.031.147,00	36,4
5.03.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	2,00	0,00	0	19.999.692,00	305.000,00	1,53
X.XX.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	6,00	0,00	0	1.156.372.975,00	128.074.827,00	11,08
5.03.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12,00	3,00	25	2.430.385.107,00	763.651.320,00	31,42
5.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi baik	%	100,00	100,00	100	996.091.373,00	133.876.986,00	13,44
5.03.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	3,00	0,00	0	349.999.500,00	37.382.986,00	10,68
5.03.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2,00	0,00	0	646.091.873,00	96.494.000,00	14,94
5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Indeks NSPK Manajemen ASN	indeks	90,50	0,00	0	24.484.368.134,00	4.039.579.214,00	16,5
5.03.02.1.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase Pemenuhan Kebutuhan ASN	%	85,00	41,76	49,13	6.290.538.025,00	417.493.108,00	6,64
5.03.02.1.01.0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Dokumen	2,00	1,00	50	944.463.433,00	34.113.000,00	3,61
5.03.02.1.01.0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Dokumen	2,00	0,00	0	569.016.000,00	60.775.408,00	10,68
5.03.02.1.01.0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Dokumen	1,00	0,00	0	892.239.402,00	98.616.000,00	11,05
5.03.02.1.01.0008	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	Lembaga	1,00	0,00	0	3.349.999.889,00	87.956.000,00	2,63
5.03.02.1.01.0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	2,00	1,00	50	134.822.845,00	0,00	0
5.03.02.1.01.0011	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	Dokumen	2,00	0,00	0	399.996.456,00	136.032.700,00	34,01
5.03.02.1.02	Mutasi dan Promosi ASN	Persentase Penempatan ASN sesuai dengan kebutuhan	%	98,00	95,00	96,94	1.456.982.023,00	154.835.985,00	10,63
5.03.02.1.02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN Antar Daerah	Dokumen	6,00	1,00	16,67	349.990.026,00	57.281.100,00	16,37
5.03.02.1.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Laporan	6,00	1,00	16,67	359.999.033,00	33.434.500,00	9,29
5.03.02.1.02.0003	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	Dokumen	6,00	0,00	0	746.992.964,00	64.120.385,00	8,58
5.03.02.1.03	Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase ASN yang memiliki kompetensi sesuai standar	%	85,00	80,00	94,12	6.675.686.624,00	1.441.220.750,00	21,59
5.03.02.1.03.0003	Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Dokumen	4,00	1,00	25	896.865.199,00	66.533.000,00	7,42
5.03.02.1.03.0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pendidikan Lanjutan ASN yang Dikelola	Dokumen	5,00	1,00	20	5.205.999.834,00	1.301.419.250,00	25
5.03.02.1.03.0012	Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	Laporan	2,00	0,00	0	241.518.813,00	20.016.000,00	8,29
5.03.02.1.03.0014	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Dokumen	3,00	2,00	66,67	331.302.778,00	53.252.500,00	16,07
5.03.02.1.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase ASN yang berkinerja baik	%	95,00	92,00	96,84	10.061.161.462,00	2.026.029.371,00	20,14
5.03.02.1.04.0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Dokumen	12,00	3,00	25	299.980.000,00	57.517.010,00	19,17
5.03.02.1.04.0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	Orang	3.500,00	2.170,00	62	9.072.087.349,00	1.854.065.951,00	20,44
5.03.02.1.04.0005	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	Orang	570,00	97,00	17,02	160.800.000,00	6.000.000,00	3,73
5.03.02.1.04.0007	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	Orang	80,00	114,00	142,5	248.306.113,00	94.735.000,00	38,15
5.03.02.1.04.0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Laporan	1,00	0,00	0	160.000.000,00	8.541.410,00	5,34

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan (Rp)	Persen (%)
5.03.02.1.04.0009	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	Dokumen	1,00	0,00	0	119.988.000,00	5.170.000,00	4,31
5.03.0.00.0.00.01.0002	UPTD Penilaian Kompetensi Pegawai								
5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						3.150.766.973,00	259.707.916,00	17,12
X.XX.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	%	70,00	65,00	92,86	116.049.200,00	4.615.000,00	7,95
X.XX.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	12,00	13,00	108,33	116.049.200,00	4.615.000,00	3,98
5.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	%	100,00	100,00	100	1.187.467.603,00	84.878.400,00	14,3
5.03.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	10,00	2,00	20	573.133.321,00	46.034.900,00	8,03
5.03.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	3,00	1,00	33,33	91.214.282,00	0,00	0
5.03.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1,00	0,00	0	523.120.000,00	38.843.500,00	7,43
5.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	%	100,00	23,68	23,68	1.213.164.100,00	165.634.531,00	27,31
5.03.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1,00	0,00	0	3.680.000,00	3.000.000,00	81,52
5.03.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	36,00	9,00	25	510.886.100,00	51.054.531,00	9,99
5.03.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1,00	0,00	0	698.598.000,00	111.580.000,00	15,97
5.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi baik	%	100,00	100,00	100	634.086.070,00	4.579.985,00	1,44
5.03.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	2,00	1,00	50	63.479.750,00	4.579.985,00	7,21
5.03.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1,00	0,00	0	570.606.320,00	0,00	0
5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Indeks NSPK Manajemen ASN	Indeks	90,50	0,00	0	1.858.599.100,00	7.224.000,00	0,78
5.03.02.1.03	Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase ASN yang telah dinilai kompetensinya	%	10,00	64,82	648,2	1.858.599.100,00	7.224.000,00	0,78
5.03.02.1.03.0002	Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	Dokumen	8,00	0,00	0	1.858.599.100,00	7.224.000,00	0,39
5.04.0.00.0.00.01.0000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia								
5.04.0.00.0.00.01.0000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia								
5.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	Persen	90,00	6,00	6,67	46.077.234.729,00	5.585.104.351,00	12,12
		Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti	Persen	88,00	7,00	7,95			
5.04.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yang ditetapkan tepat waktu	Persen	85,00	13,00	15	607.234.839,00	186.601.000,00	30,73
5.04.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	5,00	2,00	40	428.105.753,00	186.601.000,00	43,59
5.04.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	1,00	0,00	0	19.153.086,00	0,00	0
5.04.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	2,00	0,00	0	159.976.000,00	0,00	0
5.04.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran	Persen	80,00	10,00	13	17.597.373.166,00	3.581.285.912,00	20,35
5.04.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	77,00	77,00	100	17.211.911.866,00	3.523.155.912,00	20,47
5.04.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	1,00	0,00	0	379.440.000,00	58.130.000,00	15,32
5.04.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	4,00	0,00	0	6.021.300,00	0,00	0
5.04.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Penatausahaan Barang Milik Daerah	Persen	80,00	0,00	0	6.310.000,00	0,00	0
5.04.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1,00	0,00	0	6.310.000,00	0,00	0
5.04.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Capaian Retribusi Daerah	Persen	70,00	0,00	0	28.136.250,00	0,00	0
5.04.01.1.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan	1,00	0,00	0	28.136.250,00	0,00	0
5.04.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM Aparatur yang Memiliki Sertifikat Kompetensi	Persen	60,00	0,00	0	385.136.483,00	0,00	0
5.04.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	50,00	0,00	0	251.933.454,00	0,00	0

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan (Rp)	Persen (%)
5.04.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	20,00	0,00	0	133.203.029,00	0,00	0
5.04.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	Persen	90,00	10,00	11,11	6.537.468.978,00	321.752.600,00	4,92
5.04.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	4,00	0,00	0	173.944.090,00	0,00	0
5.04.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2,00	1,00	50	74.173.964,00	11.488.000,00	15,49
5.04.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	5,00	1,00	20	985.484.554,00	19.984.500,00	2,03
5.04.01.1.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Laporan	1,00	0,00	0	33.737.520,00	1.037.000,00	3,07
5.04.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	3,00	0,00	0	4.983.598.550,00	268.043.100,00	5,38
5.04.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1,00	0,00	0	30.394.500,00	0,00	0
5.04.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	2,00	0,00	0	256.135.800,00	21.200.000,00	8,28
5.04.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan BMD	Persen	90,00	0,00	0	8.511.205.663,00	0,00	0
5.04.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	3,00	0,00	0	1.437.868.000,00	0,00	0
5.04.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	6,00	0,00	0	3.079.812.242,00	0,00	0
5.04.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	565,00	0,00	0	3.993.525.421,00	0,00	0
5.04.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	Persen	82,00	8,00	9,76	5.547.650.450,00	1.412.193.321,00	25,46
5.04.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1,00	0,00	0	7.093.600,00	15.000,00	0,21
5.04.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12,00	3,00	25	1.726.664.550,00	372.657.495,00	21,58
5.04.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1,00	0,00	0	3.813.892.300,00	1.039.520.826,00	27,26
5.04.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi baik	Persen	90,00	7,00	7,78	6.856.718.900,00	83.271.518,00	1,21
5.04.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	1,00	0,00	0	56.800.000,00	5.767.600,00	10,15
5.04.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	23,00	3,00	13,04	136.300.500,00	10.198.918,00	7,48
5.04.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	796,00	140,00	17,59	650.370.400,00	28.465.000,00	4,38
5.04.01.1.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Unit	2,00	0,00	0	40.720.000,00	4.440.000,00	10,9
5.04.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	45,00	1,00	2,22	5.972.528.000,00	34.400.000,00	0,58
5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase SDM/Aparatur yang mengikuti Pengembangan Kompetensi	Persen	87,00	12,00	13,79	25.152.765.271,00	2.296.043.359,00	9,13
5.04.02.1.01	Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi Teknis	Persen	88,00	5,00	5,68	7.034.808.055,00	324.250.102,00	4,61
5.04.02.1.01.0003	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	Orang	1.800,00	100,00	5,56	7.034.808.055,00	324.250.102,00	4,61
5.04.02.1.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase SDM/Aparatur yang mengikuti pengembangan kompetensi kepemimpinan/Pemerintahan daerah, manajerial dan fungsional	Persen	86,00	16,00	18,6	18.117.957.216,00	1.971.793.257,00	10,88
		Persentase SDM/Aparatur yang bersertifikasi Kompetensi	Persen	86,00	18,00	21			
5.04.02.1.02.0001	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, dan Pengembangan Kompetensi,	Dokumen	5,00	0,00	0	91.303.800,00	0,00	0
5.04.02.1.02.0002	Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi	Jumlah Dokumen Lembaga Sertifikasi	Dokumen	3,00	0,00	0	127.078.098,00	2.480.000,00	1,95
5.04.02.1.02.0003	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah ASN Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Tersertifikasi	Orang	130,00	0,00	0	518.331.690,00	0,00	0

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan (Rp)	Persen (%)
5.04.02.1.02.0004	Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	Jumlah Laporan Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	Laporan	54,00	46,00	85,19	3.994.028.976,00	290.060.068,00	7,26
5.04.02.1.02.0005	Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga	Dokumen	20,00	1,00	5	22.688.750,00	1.032.000,00	4,55
5.04.02.1.02.0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Orang	6.954,00	1.175,00	16,9	13.364.525.902,00	1.678.221.189,00	12,56
5.05.0.00.0.00.01.0000	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah								
5.05.0.00.0.00.01.0000	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah								
5.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						22.247.017.817,00	3.597.655.711,00	47,51
5.05.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						503.861.312,00	0,00	0
X.XX.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	10,00	3,00	30	426.378.000,00	0,00	0
X.XX.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1,00	1,00	100	4.799.828,00	0,00	0
5.05.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1,00	0,00	0	4.799.828,00	0,00	0
5.05.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1,00	1,00	100	3.941.828,00	0,00	0
X.XX.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1,00	0,00	0	3.941.828,00	0,00	0
5.05.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	21,00	3,00	14,29	53.192.000,00	0,00	0
5.05.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	5,00	1,00	20	6.808.000,00	0,00	0
5.05.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						14.437.110.826,00	2.678.370.871,00	23,99
X.XX.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	69,00	17,00	24,64	14.155.477.402,00	2.678.370.871,00	23,99
5.05.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12,00	0,00	0	242.040.000,00	0,00	0
5.05.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	1,00	0,00	0	723.000,00	0,00	0
5.05.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	1,00	0,00	0	29.979.500,00	0,00	0
5.05.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	1,00	0,00	0	3.894.000,00	0,00	0
5.05.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	30,00	0,00	0	4.996.924,00	0,00	0
5.05.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Menurunnya Temuan Audit Barang Milik Daerah	%	15,00	0,00	0	33.910.000,00	0,00	0
5.05.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1,00	1,00	100	2.600.000,00	0,00	0
5.05.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1,00	0,00	0	2.600.000,00	0,00	0
5.05.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	12,00	0,00	0	26.110.000,00	0,00	0
5.05.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	12,00	0,00	0	2.600.000,00	0,00	0
5.05.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai yang memiliki sertifikasi keahlian dan keterampilan	%	50,00	0,00	0	219.900.000,00	0,00	0
5.05.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1,00	0,00	0	70.720.000,00	0,00	0
X.XX.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	1,00	0,00	0	11.180.000,00	0,00	0
5.05.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	15,00	0,00	0	90.000.000,00	0,00	0
5.05.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	30,00	0,00	0	48.000.000,00	0,00	0
5.05.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						3.314.980.062,00	59.894.000,00	8,60

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan (Rp)	Persen (%)
X.XX.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1,00	0,00	0	41.528.741,00	0,00	0
5.05.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1,00	0,00	0	646.128.495,00	50.506.000,00	7,82
5.05.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1,00	0,00	0	58.024.876,00	0,00	0
5.05.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1,00	0,00	0	100.479.500,00	0,00	0
5.05.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1,00	0,00	0	118.707.100,00	0,00	0
5.05.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	1,00	0,00	0	100.000.000,00	9.388.000,00	9,39
5.05.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1,00	0,00	0	2.201.711.350,00	0,00	0
X.XX.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1,00	0,00	0	31.400.000,00	0,00	0
5.05.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	1,00	0,00	0	17.000.000,00	0,00	0
5.05.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendukung Riset dan Inovasi	%	70,00	0,00	0	430.949.714,00	0,00	0
5.05.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	1,00	0,00	0	376.200.000,00	0,00	0
5.05.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	1,00	0,00	0	52.143.840,00	0,00	0
5.05.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	10,00	0,00	0	5.874,00	0,00	0
5.05.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1,00	0,00	0	2.600.000,00	0,00	0
5.05.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Riset dan Inovasi	%	100,00	0,00	0	2.529.298.905,00	859.390.840,00	33,98
5.05.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12,00	0,00	0	15.000.000,00	0,00	0
5.05.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12,00	3,00	25	560.241.705,00	40.555.640,00	7,24
5.05.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	12,00	0,00	0	390.412.800,00	0,00	0
5.05.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	35,00	9,00	25,71	1.563.644.400,00	818.835.200,00	17,98
5.05.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berfungsi baik	%	70,00	0,00	0	777.006.998,00	0,00	0
5.05.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	5,00	0,00	0	152.087.998,00	0,00	0
5.05.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	9,00	0,00	0	198.655.000,00	0,00	0
5.05.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	80,00	0,00	0	49.302.000,00	0,00	0
5.05.01.1.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Unit	1,00	0,00	0	44.400.000,00	0,00	0
5.05.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	4,00	0,00	0	233.772.000,00	0,00	0
5.05.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	3,00	0,00	0	10.150.000,00	0,00	0
5.05.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2,00	0,00	0	88.640.000,00	0,00	0
5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Hasil Riset yang Ditindaklanjuti Dalam Dokumen Anggaran	%	9,00	0,00	0	13.671.182.183,00	0,00	0
5.05.02.1.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase Hasil Riset bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan yang masuk dalam dokumen perencanaan Pembangunan Provinsi dan Kab/Kota	%	4,00	0,00	0	2.277.506.894,00	0,00	0
5.05.02.1.01.0001	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Laporan	2,00	0,00	0	860.519.020,00	0,00	0
5.05.02.1.01.0002	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Laporan	2,00	0,00	0	489.300.520,00	0,00	0

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan (Rp)	Persen (%)
5.05.02.1.01.0004	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Laporan	1,00	0,00	0	183.081.020,00	0,00	0
5.05.02.1.01.0005	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	Laporan	1,00	0,00	0	184.307.020,00	0,00	0
5.05.02.1.01.0011	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa	Laporan	1,00	0,00	0	245.229.020,00	0,00	0
5.05.02.1.01.0012	Pengelolaan Data Kelitbang dan Peraturan	Jumlah Dokumen Data Kelitbang dan Peraturan yang Dikelola	Dokumen	1,00	0,00	0	105.153.274,00	0,00	0
5.05.02.1.01.0013	Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang diterbitkan	Rekomendasi	2,00	0,00	0	209.917.020,00	0,00	0
5.05.02.1.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Persentase Hasil Riset bidang sosial dan kependudukan yang masuk dalam dokumen perencanaan Pembangunan Provinsi dan Kab/Kota	%	4,00	0,00	0	1.616.369.770,00	0,00	0
5.05.02.1.02.0001	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Dokumen	1,00	0,00	0	317.772.120,00	0,00	0
5.05.02.1.02.0002	Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dokumen	1,00	0,00	0	266.688.000,00	0,00	0
5.05.02.1.02.0003	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Dokumen	1,00	0,00	0	284.436.000,00	0,00	0
5.05.02.1.02.0006	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Dokumen	1,00	0,00	0	253.170.000,00	0,00	0
5.05.02.1.02.0009	Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	Dokumen	1,00	0,00	0	257.787.650,00	0,00	0
5.05.02.1.02.0010	Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Dokumen	1,00	0,00	0	236.516.000,00	0,00	0
5.05.02.1.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase Hasil Riset bidang ekonomi dan pembangunan yang masuk dalam dokumen perencanaan Pembangunan Provinsi dan Kab/Kota	%	4,00	0,00	0	3.883.574.474,00	0,00	0
5.05.02.1.03.0001	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Dokumen	1,00	0,00	0	274.999.816,00	0,00	0
5.05.02.1.03.0002	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Dokumen	1,00	0,00	0	171.178.134,00	0,00	0
5.05.02.1.03.0003	Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah	Dokumen	1,00	0,00	0	157.481.112,00	0,00	0
5.05.02.1.03.0004	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Dokumen	1,00	0,00	0	295.999.877,00	0,00	0
5.05.02.1.03.0005	Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Dokumen	1,00	0,00	0	273.000.020,00	0,00	0
5.05.02.1.03.0006	Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral	Dokumen	1,00	0,00	0	270.999.619,00	0,00	0
5.05.02.1.03.0007	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Dokumen	1,00	0,00	0	938.780.180,00	0,00	0
5.05.02.1.03.0008	Penelitian dan Pengembangan Kehutanan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kehutanan	Dokumen	1,00	0,00	0	239.999.506,00	0,00	0
5.05.02.1.03.0009	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Dokumen	1,00	0,00	0	280.999.805,00	0,00	0
5.05.02.1.03.0010	Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	Dokumen	1,00	0,00	0	285.999.835,00	0,00	0
5.05.02.1.03.0011	Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dokumen	1,00	0,00	0	279.999.820,00	0,00	0
5.05.02.1.03.0012	Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	Dokumen	1,00	0,00	0	276.499.920,00	0,00	0
5.05.02.1.03.0013	Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	Dokumen	1,00	0,00	0	137.636.830,00	0,00	0
5.05.02.1.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase Hasil inovasi dan Pengembangan Iptek yang masuk dalam dokumen perencanaan Pembangunan Provinsi dan Kab/Kota	%	11,00	0,00	0	5.893.731.045,00	0,00	0
5.05.02.1.04.0001	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Dokumen	3,00	0,00	0	4.086.569.328,00	0,00	0

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan (Rp)	Persen (%)
5.05.02.1.04.0002	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Laporan	1,00	0,00	0	199.966.044,00	0,00	0
5.05.02.1.04.0003	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Laporan	3,00	0,00	0	1.156.939.335,00	0,00	0
5.05.02.1.04.0004	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Laporan	3,00	0,00	0	299.984.020,00	0,00	0
5.05.02.1.04.0005	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Laporan	1,00	0,00	0	150.272.318,00	0,00	0
5.06.5.07.0.00.05.0000	Badan Penghubung Provinsi								
5.06.5.07.0.00.05.0000	Badan Penghubung Provinsi								
5.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Keskretariatian	Poin	83,00	21,12	25,45	18.465.249.518,00	2.609.966.818,00	14,13
5.07.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang ditetapkan tepat waktu	%	100,00	34,48	34	577.549.482,00	75.316.000,00	13,04
5.07.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	9,00	4,00	44,44	247.531.440,00	74.700.000,00	30,5
5.07.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	2,00	1,00	50	64.220.000,00	0,00	0
5.07.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	2,00	0,00	0	64.220.000,00	0,00	0
5.07.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	2,00	1,00	50	55.220.000,00	0,00	0
5.07.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	2,00	0,00	0	55.220.000,00	0,00	0
5.07.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	8,00	2,00	25	50.527.042,00	0,00	0
5.07.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	8,00	2,00	25	40.611.000,00	616.000,00	1,52
5.07.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu	%	100,00	100,00	100	7.795.010.332,00	725.320.180,00	9,3
5.07.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	61,00	19,00	31,15	7.204.953.560,00	611.955.000,00	8,49
5.07.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	24,00	6,00	25	216.249.399,00	23.060.000,00	10,66
5.07.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	149,00	23,00	15,44	180.271.873,00	1.160.000,00	0,64
5.07.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	2,00	0,00	0	2.136.000,00	0,00	0
5.07.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	13,00	2,00	15,38	92.000.000,00	89.145.180,00	96,9
5.07.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	4,00	1,00	25	99.399.500,00	0,00	0
5.07.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang dilaksanakan	%	100,00	18,18	18,18	41.714.746,00	0,00	0
5.07.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	2,00	0,00	0	1.646.920,00	0,00	0
5.07.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1,00	0,00	0	1.999.326,00	0,00	0
5.07.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	8,00	2,00	25	38.068.500,00	0,00	0
5.07.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	%	74,04	0,00	0	277.257.500,00	0,00	0
5.07.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	2,00	0,00	0	63.937.500,00	0,00	0
5.07.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	29,00	22,00	75,86	68.760.000,00	0,00	0
5.07.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	25,00	19,00	76	9.560.000,00	0,00	0

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan (Rp)	Persen (%)
5.07.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	40,00	0,00	0	135.000.000,00	0,00	0
5.07.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan	%	100,00	20,97	20,97	1.669.906.985,00	70.781.831,00	4,24
5.07.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1,00	0,00	0	106.246.248,00	0,00	0
5.07.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	16,00	6,00	37,5	642.851.373,00	41.511.150,00	6,46
5.07.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2,00	2,00	100	95.622.000,00	2.115.000,00	2,21
5.07.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2,00	0,00	0	88.694.941,00	0,00	0
5.07.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	65,00	5,00	7,69	658.304.623,00	27.155.681,00	5,37
5.07.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	2,00	0,00	0	78.187.800,00	0,00	0
5.07.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	%	100,00	0,00	0	733.302.925,00	0,00	0
5.07.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	1,00	0,00	0	479.000,00	0,00	0
5.07.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	52,00	0,00	0	566.684.673,00	0,00	0
5.07.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	10,00	0,00	0	166.139.252,00	0,00	0
5.07.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan	%	100,00	18,67	18,67	4.604.864.448,00	1.661.150.742,00	36,07
5.07.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	2,00	0,00	0	11.560.000,00	0,00	0
5.07.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	62,00	10,00	16,13	1.832.882.600,00	301.550.742,00	16,45
5.07.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12,00	4,00	33,33	2.760.421.848,00	1.359.600.000,00	49,25
5.07.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	%	90,00	71,94	80	2.765.643.100,00	77.398.065,00	2,8
5.07.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	5,00	5,00	100	531.330.950,00	17.528.260,00	3,3
5.07.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	44,00	17,00	38,64	798.224.050,00	33.640.130,00	4,21
5.07.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	62,00	2,00	3,23	117.051.000,00	482.575,00	0,41
5.07.01.1.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Unit	2,00	0,00	0	25.322.500,00	0,00	0
5.07.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	11,00	11,00	100	954.414.600,00	25.077.100,00	2,63
5.07.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	313,00	24,00	7,67	339.300.000,00	670.000,00	0,2
5.07.02	PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG	Persentase Keluhan Pengguna Layanan Mess, Fasilitas Layanan Hubungan Antar Lembaga dan Fasilitas Layanan Promosi dan Informasi yang ditindaklanjuti	%	100,00	100,00	100	4.534.750.482,00	213.559.785,00	4,71
5.07.02.1.01	Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Persentase Pelayanan Penghubung yang Dilaksanakan	%	100,00	23,08	23,08	4.534.750.482,00	213.559.785,00	4,71
5.07.02.1.01.0001	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat yang Ditingkatkan	Laporan	2,00	1,00	50	986.579.005,00	69.924.988,00	7,09
5.07.02.1.01.0002	Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat	Laporan	3,00	1,00	33,33	876.615.341,00	28.342.938,00	3,41
5.07.02.1.01.0003	Peningkatan Fasilitas Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	Jumlah Laporan Hasil Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya yang Ditingkatkan	Laporan	2,00	0,00	0	947.546.890,00	57.477.000,00	6,07
5.07.02.1.01.0004	Kegiatan Fasilitas Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Fasilitas Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	Laporan	3,00	0,00	0	1.370.253.472,00	37.057.215,00	2,7
5.07.02.1.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Laporan	3,00	1,00	33,33	353.755.774,00	20.757.644,00	6,35
6.01.0.00.0.00.01.0000	Inspektorat								
6.01.0.00.0.00.01.0000	Inspektorat								
	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan		Indeks	100,00	0,00	0			

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan (Rp)	Persen (%)
6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti	%	100,00	100,00	100	59.968.901.896,00	16.031.807.713,00	29,56
6.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%	100,00	25,00	25	1.766.128.400,00	96.277.367,00	6,5
6.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2,00	0,00	0	150.000.000,00	19.861.000,00	13,24
6.01.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	2,00	0,00	0	150.000.000,00	1.772.500,00	1,18
6.01.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	2,00	0,00	0	150.000.000,00	0,00	0
6.01.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	4,00	1,00	25	350.000.000,00	450.000,00	0,13
6.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	4,00	0,00	25	680.400.000,00	74.193.867,00	10,9
X.XX.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	110,00	50,00	45,45	435.728.400,00	0,00	0
6.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah Sesuai SAP	%	100,00	25,00	25	28.738.655.636,00	5.639.366.415,00	19,62
6.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	100,00	0,00	82	27.988.655.636,00	5.545.307.681,00	20,18
6.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12,00	0,00	25	350.000.000,00	62.615.484,00	17,89
6.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12,00	0,00	25	100.000.000,00	20.000.000,00	20
6.01.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	4,00	0,00	25	100.000.000,00	480.000,00	0,48
6.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	12,00	0,00	25	100.000.000,00	10.963.250,00	10,96
6.01.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	12,00	0,00	25	100.000.000,00	0,00	0
6.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang diadministrasikan dengan Baik	%	100,00	0,00	0	300.000.000,00	16.740.000,00	5,58
6.01.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	2,00	1,00	50	100.000.000,00	16.740.000,00	16,74
6.01.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	4,00	0,00	0	100.000.000,00	0,00	0
6.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	12,00	0,00	0	100.000.000,00	0,00	0
6.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Tenaga Fungsional Pengawasan Yang bersertifikat sesuai jenjangnya	%	100,00	100,00	100	6.570.107.980,00	86.907.296,00	1,32
6.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	108,00	0,00	0	350.000.000,00	0,00	0
6.01.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	12,00	3,00	25	250.000.000,00	9.674.000,00	3,87
6.01.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	4,00	1,00	25	100.000.000,00	4.290.000,00	4,29
6.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	118,00	13,00	11,02	5.870.107.980,00	72.943.296,00	0,85
6.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Unit Kerja Perangkat Daerah yang memberikan pelayanan	%	100,00	100,00	100	1.628.408.542,00	1.327.765.086,00	81,54
6.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	2,00	1,00	50	49.967.340,00	424.200,00	0,85
6.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	22,00	10,00	45,45	505.039.762,00	1.223.000.000,00	65,86
6.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	5,00	0,00	0	113.747.203,00	0,00	0
6.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	5,00	2,00	40	159.663.300,00	25.633.452,00	16,05
6.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	5,00	2,00	40	249.991.037,00	16.242.630,00	6,5
6.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	36,00	6,00	16,67	400.000.000,00	62.464.804,00	15,62
6.01.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	4,00	0,00	0	149.999.900,00	0,00	0

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan (Rp)	Persen (%)
6.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						15.643.875.838,00	7.759.765.000,00	76,17
X.XX.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	3,00	0,00	0	81.000.000,00	0,00	0
6.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	122,00	0,00	0	9.887.284.040,00	0,00	0
6.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	20,00	0,00	0	299.546.440,00	0,00	0
X.XX.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	12,00	1,00	8,33	5.376.045.358,00	7.759.765.000,00	144,34
6.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pada Perangkat Daerah	%	100,00	25,00	25	3.749.511.000,00	1.045.070.405,00	27,87
6.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12,00	0,00	0	14.000.000,00	1.717.500,00	12,27
6.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12,00	3,00	25	1.224.699.200,00	193.146.465,00	15,77
6.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	12,00	0,00	0	97.465.000,00	0,00	0
6.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12,00	3,00	25	2.413.346.800,00	850.206.440,00	23,65
6.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Daerah pada Perangkat Daerah yang dipelihara dengan baik	%	100,00	25,00	25	1.572.214.500,00	59.916.144,00	3,81
6.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	2,00	1,00	50	81.460.000,00	4.220.644,00	5,18
6.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	30,00	6,00	20	285.994.500,00	35.404.100,00	12,38
6.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	30,00	0,00	0	877.000.000,00	2.193.500,00	0,25
6.01.01.1.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Unit	2,00	0,00	0	17.760.000,00	0,00	0
6.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1,00	0,00	100	310.000.000,00	18.097.900,00	2,57
6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Internal Pemda Provinsi dan Kab/Kota	%	100,00	0,00	0	7.577.450.600,00	363.213.444,00	4,79
6.01.02.1.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI dan Hasil Pemeriksaan APIP	%	80,00	0,00	0	3.037.450.800,00	241.169.844,00	7,94
		Persentase identifikasi Manajemen Risiko pada perangkat daerah	%	100,00	0,00	0			
		Persentase Laporan Keuangan Pemda dan Perangkat Daerah yang sesuai SAP	%	100,00	90,00	90			
6.01.02.1.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Laporan	84,00	10,00	11,9	350.000.000,00	63.784.000,00	18,22
6.01.02.1.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Laporan	2,00	1,00	50	550.000.000,00	0,00	0
6.01.02.1.01.0004	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Laporan	37,00	28,00	75,68	589.999.900,00	146.494.300,00	24,83
6.01.02.1.01.0005	Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	Laporan	32,00	1,00	3,13	815.000.000,00	25.599.544,00	3,14
6.01.02.1.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Dokumen	6,00	1,00	16,67	732.450.900,00	5.292.000,00	0,72
6.01.02.1.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase Laporan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	%	100,00	29,00	29	4.539.999.800,00	122.043.600,00	2,69
		Persentase Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang ditindaklanjuti	%	100,00	100,00	100			
6.01.02.1.02.0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	Laporan	14,00	1,00	7,14	540.000.000,00	696.000,00	0,13
6.01.02.1.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Laporan	88,00	29,00	32,95	3.999.999.800,00	121.347.600,00	3,03
6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase Pemenuhan Aksi Pencegahan Korupsi	%	85,00	0,00	0	2.626.187.504,00	6.460.000,00	0,25
		Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat	%	100,00	0,00	0			
		Persentase Pelaksanaan Penilaian Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah	%	100,00	0,00	0			
		Persentase Laporan Penerimaan/Penolakan Gratifikasi yang ditangani	%	100,00	0,00	0			

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan (Rp)	Persen (%)
6.01.03.1.02	Pendampingan dan Asistensi	Persentase Hasil Penilaian Integritas Pemda yang ditindaklanjuti	%	100,00	0,00	0	2.626.187.504,00	6.460.000,00	0,25
		Persentase Tingkat Kepatuhan Penyampaian Laporan LHKPN dan LHKASN	%	100,00	82,08	82,08			
		Persentase Aksi PPK yang ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah	%	100,00	0,00	0			
		Persentase Perangkat Daerah Yang Ditetapkan sebagai ZI Menuju WBK/WBBM	%	100,00	0,00	0			
6.01.03.1.02.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	PerangkatDaerah	21,00	0,00	14,29	660.000.000,00	6.460.000,00	0,98
6.01.03.1.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kegiatan	21,00	0,00	0	1.966.187.504,00	0,00	0
8.01.0.00.0.00.02.0000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik								
8.01.0.00.0.00.02.0000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik								
8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	Indeks	78,68	7,44	9	24.451.349.609,00	2.712.632.717,00	11,09
		Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti	%	100,00	100,00	100			
8.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yang ditetapkan tepat waktu	%	100,00	13,33	13,33	961.007.944,00	0,00	0
8.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	3,00	1,00	33,33	39.315.616,00	0,00	0
8.01.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	2,00	0,00	0	17.942.808,00	0,00	0
8.01.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	2,00	0,00	0	1.742.808,00	0,00	0
8.01.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	2,00	0,00	0	1.742.808,00	0,00	0
8.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	4,00	0,00	0	619.589.536,00	0,00	0
8.01.01.1.01.0009	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	BeritaAcara	2,00	0,00	0	280.674.368,00	0,00	0
8.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran	%	96,75	3,30	3	13.024.450.277,00	2.312.940.720,00	17,76
8.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	55,00	49,00	89,09	12.424.050.965,00	2.210.880.720,00	17,8
8.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12,00	0,00	0	432.480.000,00	102.060.000,00	23,6
8.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	30,00	10,00	33	5.776.848,00	0,00	0
8.01.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	2,00	0,00	0	962.808,00	0,00	0
8.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	12,00	0,00	0	159.696.848,00	0,00	0
8.01.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	2,00	0,00	0	1.482.808,00	0,00	0
8.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	%	35,00	0,00	0	185.295.444,00	0,00	0
8.01.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	2,00	0,00	0	962.808,00	0,00	0
8.01.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1,00	0,00	0	180.481.404,00	0,00	0
8.01.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	4,00	0,00	0	1.925.616,00	0,00	0
8.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	4,00	0,00	0	1.925.616,00	0,00	0
8.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan Pelatihan	%	30,00	0,00	0	180.729.116,00	0,00	0

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan (Rp)	Persen (%)
8.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1,00	0,00	0	59.323.500,00	0,00	0
8.01.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	1,00	0,00	0	481.404,00	0,00	0
8.01.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	4,00	1,00	25	481.404,00	0,00	0
8.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	20,00	5,00	25	120.442.808,00	0,00	0
8.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi umum	%	96,00	0,00	0	4.213.882.376,00	126.620.564,00	3
8.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1,00	0,00	0	5.329.336,00	0,00	0
8.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	16,00	0,00	0	1.000.206.801,00	0,00	0
8.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1,00	0,00	0	222.915.900,00	1.945.400,00	0,87
8.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	6,00	1,00	16,67	2.310.707.606,00	124.675.164,00	5,4
8.01.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1,00	0,00	0	289.521.404,00	0,00	0
8.01.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	1,00	0,00	0	385.201.329,00	0,00	0
8.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100,00	0,00	0	4.517.510.797,00	0,00	0
8.01.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	2,00	0,00	0	4.237.750.702,00	0,00	0
8.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	1,00	0,00	0	279.760.095,00	0,00	0
8.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelaksanaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	%	100,00	8,00	8	1.019.158.656,00	259.370.243,00	25,45
8.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1,00	0,00	0	30.034.000,00	0,00	0
8.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12,00	3,00	25	217.579.840,00	14.721.319,00	6,77
8.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12,00	3,00	25	771.544.816,00	244.648.924,00	31,71
8.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara	%	100,00	10,00	10	349.314.999,00	13.701.190,00	3,92
8.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	1,00	0,00	0	72.741.999,00	5.950.200,00	8,18
8.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	10,00	0,00	0	201.173.000,00	7.750.990,00	3,85
8.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	70,00	10,00	14,29	46.700.000,00	0,00	0
8.01.01.1.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Unit	1,00	0,00	0	28.700.000,00	0,00	0
8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	Persen	90,00	0,00	0	12.246.582.456,00	73.172.365,00	0,6
8.01.02.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Capaian Retribusi Daerah	Persen	70,00	0,00	0	12.246.582.456,00	73.172.365,00	0,6
8.01.02.1.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Orang	2.845,00	300,00	10,54	1.511.616.314,00	24.498.865,00	1,62

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan (Rp)	Persen (%)
8.01.02.1.01.0005	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Laporan	4,00	1,00	25	331.268.424,00	3.613.300,00	1,09
8.01.02.1.01.0006	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Dokumen Hasil Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Dokumen	1,00	0,00	0	218.634.006,00	0,00	0
8.01.02.1.01.0007	Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan	1,00	0,00	0	776.787.716,00	20.290.000,00	2,61
8.01.02.1.01.0008	Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka	Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka	Dokumen	1,00	0,00	0	3.714.517.280,00	0,00	0
8.01.02.1.01.0009	Pelaksanaan tugas Paskibraka	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Tugas Paskibraka	Dokumen	1,00	0,00	0	4.254.128.384,00	0,00	0
8.01.02.1.01.0010	Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	Dokumen	1,00	0,00	0	54.905.980,00	0,00	0
8.01.02.1.01.0011	Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	Dokumen	1,00	0,00	0	401.469.006,00	0,00	0
8.01.02.1.01.0012	Pembentukan Paskibraka	Jumlah Paskibraka	Orang	40,00	0,00	0	983.255.346,00	24.770.200,00	2,52
8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase masyarakat yang mendapatkan pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	%	1,32	0,00	0	57.260.236.464,00	54.125.500,00	0,09
8.01.03.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah rumusan kebijakan yang mendukung Peningkatan Kehidupan Masyarakat yang demokratis	Dokumen	5,00	0,00	0	57.260.236.464,00	54.125.500,00	0,09
8.01.03.1.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Orang	1.725,00	0,00	0	56.718.647.463,00	600.000,00	0
8.01.03.1.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Laporan	4,00	0,00	0	541.589.001,00	53.525.500,00	9,88
8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase organisasi masyarakat yang terdaftar dan aktif	%	33,58	0,00	0	1.704.194.395,00	73.909.302,00	4,34
8.01.04.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah rumusan kebijakan yang mendukung Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat	Dokumen	3,00	0,00	0	1.704.194.395,00	73.909.302,00	4,34
8.01.04.1.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Orang	1.270,00	300,00	23,62	1.489.125.009,00	73.049.302,00	4,91
8.01.04.1.01.0005	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Laporan	4,00	1,00	25	215.069.386,00	860.000,00	0,4
8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase elemen masyarakat yang mendapatkan pembinaan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, dan agama	%	100,00	0,00	0	1.756.110.267,00	17.374.322,00	0,99
8.01.05.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah rumusan kebijakan yang mendukung penguatan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Dokumen	1,00	0,00	0	1.756.110.267,00	17.374.322,00	0,99
8.01.05.1.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Orang	1.380,00	0,00	0	1.605.454.285,00	15.603.322,00	0,97

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan (Rp)	Persen (%)
8.01.05.1.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Laporan	4,00	0,00	0	150.655.982,00	1.771.000,00	1,18
8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase potensi konflik sosial yang ditangani	%	100,00	0,00	0	4.952.596.809,00	129.519.564,00	2,62
8.01.06.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah rumusan kebijakan yang mendukung Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Dokumen	4,00	1,00	25	4.952.596.809,00	129.519.564,00	2,62
8.01.06.1.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Orang	1.230,00	200,00	16,26	2.242.760.269,00	105.775.360,00	4,72
8.01.06.1.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Laporan	4,00	1,00	25	241.200.000,00	12.120.300,00	5,03
8.01.06.1.01.0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	Dokumen	12,00	1,00	8,33	2.468.636.540,00	11.623.904,00	0,47



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

